PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 11 TAHUN 2024

TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024



TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI :

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo 1

Lampiran I

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 19

Lampiran II

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 21

Lampiran III

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 37

Lampiran IV

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN
BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN 646

Lampiran V

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK
KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 1022

Lampiran VI

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM 1027

Lampiran VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1034

Lampiran VIII

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA
PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1054

Lampiran IX

DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN
DAN PER JABATAN 1247

Lampiran X

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH 1248

Lampiran XI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH 1613

DAFTAR ISI

Lampiran XII

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH 1614

Lampiran XIII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA 1619

Lampiran XIV

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN- LAIN 1621

Lampiran XV

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS)* 1622

Lampiran XVI

DAFTAR DANA CADANGAN 1623

Lampiran XVII

DAFTAR PIUTANG DAERAH 1624

BUPATI WONOSOBO

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan /atau keadaan luar biasa;

d. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan keadaan yang menyebabkan perubahan asumsi kebijakan umum anggaran Tahun 2024, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2023 harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2024, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosob Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo

Nomor 10) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Wonosobo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 7));

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang

ditetapkan dengan undang-undang.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 2.117.228.353.493,00 bertambah sebesar Rp. 105.711.543.732,00 sehingga menjadi Rp. 2.222.939.897.225,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

1. Semula	Rp. 2.076.589.927.944,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 48.324.256.596,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.2.214.914.184.540,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 2.110.148.353.493,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 105.414.160.897,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.2.215.562.514.390,00

c. Pembiayaan daerah

1. Semula	Rp. 33.558.425.549,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 57.089.904.301,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 90.648.329.850,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp. 291.824.704.944,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 22.773.401.176,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.314.598.106.120,00

b. Pendapatan transfer

1. Semula	Rp. 1.773.681.223.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 25.253.472.585,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.798.934.695.585,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp. 11.084.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 297,382,835,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang	

sah setelah perubahan Rp. 11,381,382,835,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1. Semula	Rp.69.405.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.250.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.71.655.000.000,00

b. Retribusi daerah;

1. Semula	Rp. 21.106.350.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.182.054.644.552,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.203.160.994.552,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1. Semula	Rp. 24.320.779.534,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.144.155.710,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 25.464.935.245,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1. Semula	Rp. 176.992.575.410,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 162.675.399.087,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 14.317.176.323,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp. 1.576.697.073.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.646.461.585,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 1.595.343.534.585,00

b. Transfer antar daerah

1. Semula	Rp. 196.984.150.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 6,367,011,000,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 203.351.161.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1. Semula	Rp.11.084.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 297.382.835,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.11.381.382.835,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional:

1. Semula	Rp.1.480.525.124.786,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 71.562.627.043,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.552.087.751.829,00

b. Belanja modal:

1. Semula	Rp. 228,707,778,637,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 30.238.965.854,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 258.946.744.491,00

c. Belanja tidak terduga:

1. Semula	Rp. 5.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 3.380.000.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 2.120.000.000,00

d. Belanja transfer:

1. Semula	Rp. 395.415.450.070,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.992.568.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 402.480.018.070,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai:

1. Semula	Rp. 799.992.431.262,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 15.975.976.302,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 815.968.407.564,00

b. Belanja barang dan jasa:

1. Semula	Rp. 526.146.283.154,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 45.313.223.506,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 571.459.506.660,00

c. Belanja subsidi:

1. Semula	Rp. 450,000,000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 190.000.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 640,000,000,00

d. Belanja hibah:

3. Semula	Rp.144.864.910.370,00
4. Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.690.627.235,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 153.555.537.605,00

e. Belanja bantuan sosial:

1. Semula	Rp. 9,071,500,000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.392.800.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 9.814.300.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah:

1. Semula	Rp. 3.999.350.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.446.500.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 8.445.850.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin:

1. Semula	Rp.39.315.333.121,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.12.681.664.601,00

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 51.996.997.722,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung:

1. Semula Rp. 54.525.421.038,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 523.619.942,00

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 54.001.801.096,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1. Semula Rp. 123.924.846.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.699.125.000,00

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp. 136.623.971.000,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya:

1. Semula Rp. 6.082.233.709,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 816.546.195,00

Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 6.898.779.904,00

f. Belanja modal aset lainnya:

1. Semula Rp. 860.594.769,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 118.750.000,00

Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp. 979.344.769,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 5.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.380.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.120.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil:

1. Semula Rp.9.051.135.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp.9.051.135.000,00

b. Belanja bantuan keuangan:

1. Semula Rp.386.364.315.070,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.992.568.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 393.356.883.070,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

(1) Penerimaan pembiayaan:

1. Semula Rp. 40.638.425.549,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 57.387.287.136,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 98,025,712,685,00

(2) Pengeluaran pembiayaan:

1. Semula Rp. 7.080.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 297.382.835,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 7.377.382.835,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran:

1. Semula Rp. 28.620.530.749,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 69.405.181.936,00

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran setelah perubahan Rp. 98.025.712.685,00

b.Pencairan Dana Cadangan:

1. Semula Rp. 12.017.894.800,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 12.017.894.800,00)

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

terdiri atas Penyertaan Modal Daerah, yaitu:

a. Semula	Rp.7.080.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 297.382.835,00
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.7.377.382.835,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan PemerintahanDaerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah;

l. Lampiran XII : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;

o. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*Multi Years*);

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;

q. Lampiran XVII : Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 September 2024
BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 23 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH : (11 - 311 / 2024)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 23 September 2024

KABUPATEN WONOSOBO

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**291.824.704.944,00**	**314.598.106.120,00**	**22.773.401.176,00**
4.1.01	Pajak Daerah	69.405.000.000,00	71.655.000.000,00	2.250.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.106.350.000,00	203.206.238.087,00	182.099.888.087,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.320.779.534,00	25.464.935.245,00	1.144.155.711,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	176.992.575.410,00	14.271.932.788,00	-162.720.642.622,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.773.681.223.000,00**	**1.798.934.695.585,00**	**25.253.472.585,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.576.697.073.000,00	1.595.343.534.585,00	18.646.461.585,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	196.984.150.000,00	203.591.161.000,00	6.607.011.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**11.084.000.000,00**	**11.381.382.835,00**	**297.382.835,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.084.000.000,00	11.381.382.835,00	297.382.835,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**2.076.589.927.944,00**	**2.124.914.184.540,00**	**48.324.256.596,00**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.480.525.124.786,00**	**1.552.087.751.829,00**	**71.562.627.043,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	799.992.431.262,00	815.968.407.564,00	15.975.976.302,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.146.283.154,00	571.459.506.660,00	45.313.223.506,00
5.1.04	Belanja Subsidi	450.000.000,00	640.000.000,00	190.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	144.864.910.370,00	153.555.537.605,00	8.690.627.235,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.071.500.000,00	10.464.300.000,00	1.392.800.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**228.707.778.637,00**	**258.946.744.491,00**	**30.238.965.854,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.999.350.000,00	8.445.850.000,00	4.446.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.315.333.121,00	51.996.997.722,00	12.681.664.601,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.525.421.038,00	54.001.801.096,00	-523.619.942,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.924.846.000,00	136.623.971.000,00	12.699.125.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.082.233.709,00	6.898.779.904,00	816.546.195,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	860.594.769,00	979.344.769,00	118.750.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.500.000.000,00**	**2.120.000.000,00**	**-3.380.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	-3.380.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**395.415.450.070,00**	**402.408.018.070,00**	**6.992.568.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.051.135.000,00	9.051.135.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	386.364.315.070,00	393.356.883.070,00	6.992.568.000,00
	Jumlah Belanja	**2.110.148.353.493,00**	**2.215.562.514.390,00**	**105.414.160.897,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-33.558.425.549,00**	**-90.648.329.850,00**	**-57.089.904.301,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**40.638.425.549,00**	**98.025.712.685,00**	**57.387.287.136,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.620.530.749,00	98.025.712.685,00	69.405.181.936,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	12.017.894.800,00	0,00	-12.017.894.800,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**7.080.000.000,00**	**7.377.382.835,00**	**297.382.835,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.080.000.000,00	7.377.382.835,00	297.382.835,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**7.080.000.000,00**	**7.377.382.835,00**	**297.382.835,00**
	Pembiayaan Netto	**33.558.425.549,00**	**90.648.329.850,00**	**57.089.904.301,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 23 September 2024

KABUPATEN WONOSOBO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	14.832.350.475,00	15.108.085.902,00	205.395.000,00	205.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.037.745.475,00	15.313.480.902,00	275.735.427,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	6.432.163.803,00	6.572.432.690,00	184.120.000,00	184.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616.283.803,00	6.756.552.690,00	140.268.887,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	RSUD Setjonegoro Kab. Wonosobo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0002	Kelurahan Selomerto	139.000.000,00	267.050.000,00	638.336.746,00	684.836.746,00	74.860.000,00	78.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.196.746,00	763.196.746,00	50.000.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0002	Kelurahan Garung	30.000.000,00	21.200.000,00	689.911.680,00	693.911.680,00	14.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.911.680,00	703.911.680,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.378.000.000,00	17.708.680.000,00	68.613.336.263,00	71.448.422.133,00	10.300.385.000,00	10.282.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.913.721.263,00	81.730.507.133,00	2.816.785.870,00
3	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	145.000.000,00	35.000.000,00	10.176.132.185,00	16.014.123.131,00	3.306.003.810,00	3.306.003.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482.135.995,00	19.320.126.941,00	5.837.990.946,00
3	07	2.07.3.31.3.32.01.0000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	0,00	0,00	2.011.702.000,00	2.161.702.000,00	3.257.300.000,00	3.257.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269.002.000,00	5.419.002.000,00	150.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Mojotengah	3.547.588.000,00	3.703.000.000,00	4.506.528.000,00	5.009.475.283,00	48.000.000,00	341.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554.528.000,00	5.351.325.283,00	796.797.283,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Sukoharjo 2	654.958.500,00	894.879.000,00	1.568.097.560,00	1.889.604.010,00	7.200.940,00	51.936.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.298.500,00	1.941.540.035,00	366.241.535,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	Laboratorium Kesehatan Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	600.000.000,00	704.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	704.970.000,00	104.970.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Kaliwiro	3.624.600.000,00	3.624.600.000,00	4.840.462.500,00	4.945.373.635,00	112.977.500,00	112.977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953.440.000,00	5.058.351.135,00	104.911.135,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Garung	0,00	2.320.000,00	3.388.549.163,00	3.381.778.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388.549.163,00	3.381.778.189,00	-6.770.974,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	258.000.000,00	358.000.000,00	88.380.155.948,00	92.047.365.714,00	1.032.600.000,00	2.164.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.412.755.948,00	94.212.315.714,00	4.799.559.766,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	258.000.000,00	358.000.000,00	40.231.260.545,00	40.911.308.223,00	225.750.000,00	986.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457.010.545,00	41.897.308.223,00	1.440.297.678,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.080.759.760,00	1.265.759.760,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.759.760,00	1.375.759.760,00	295.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	124.471.712.634,00	128.846.836.045,00	8.793.363.552,00	11.012.365.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.265.076.186,00	139.859.201.185,00	6.594.124.999,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Mlipak	91.995.000,00	99.550.000,00	685.800.000,00	685.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.800.000,00	685.800.000,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	258.000.000,00	358.000.000,00	88.380.155.948,00	92.047.365.714,00	1.032.600.000,00	2.164.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.412.755.948,00	94.212.315.714,00	4.799.559.766,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	258.000.000,00	358.000.000,00	40.231.260.545,00	40.911.308.223,00	225.750.000,00	986.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457.010.545,00	41.897.308.223,00	1.440.297.678,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	0,00	0,00	499.620.768,00	499.620.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.620.768,00	499.620.768,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Sapuran	0,00	16.801.000,00	3.628.794.376,00	3.490.104.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.794.376,00	3.490.104.940,00	-138.689.436,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	258.000.000,00	358.000.000,00	88.380.155.948,00	92.047.365.714,00	1.032.600.000,00	2.164.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.412.755.948,00	94.212.315.714,00	4.799.559.766,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	258.000.000,00	358.000.000,00	40.231.260.545,00	40.911.308.223,00	225.750.000,00	986.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457.010.545,00	41.897.308.223,00	1.440.297.678,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Umum Sekretariat Daerah	258.000.000,00	358.000.000,00	31.053.861.356,00	31.012.407.034,00	150.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.203.861.356,00	31.812.407.034,00	608.545.678,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Mojotengah	0,00	0,00	4.401.559.326,00	4.252.249.988,00	33.300.000,00	30.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434.859.326,00	4.282.879.988,00	-151.979.338,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Kalikajar 2	1.934.953.980,00	2.142.720.476,00	2.737.393.980,00	2.981.242.478,00	77.000.000,00	238.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.393.980,00	3.219.592.478,00	405.198.498,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Leksono	0,00	1.497.000,00	3.111.978.353,00	2.945.492.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.978.353,00	2.945.492.303,00	-166.486.050,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Wonosobo Timur	0,00	0,00	843.332.000,00	843.332.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.332.000,00	968.332.000,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	258.000.000,00	358.000.000,00	88.380.155.948,00	92.047.365.714,00	1.032.600.000,00	2.164.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.412.755.948,00	94.212.315.714,00	4.799.559.766,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	258.000.000,00	358.000.000,00	40.231.260.545,00	40.911.308.223,00	225.750.000,00	986.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457.010.545,00	41.897.308.223,00	1.440.297.678,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	0,00	0,00	538.597.890,00	573.597.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.597.890,00	573.597.890,00	35.000.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0012	Kelurahan Jaraksari	0,00	100.000.000,00	1.055.468.453,00	1.055.468.453,00	14.176.000,00	14.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.644.453,00	1.069.644.453,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Watumalang	2.625.405.000,00	2.400.000.000,00	3.457.445.000,00	3.367.703.413,00	109.900.000,00	151.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567.345.000,00	3.518.953.413,00	-48.391.587,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Setjonegoro	110.000.000.000,00	122.000.000.000,00	127.054.189.769,00	139.602.774.414,00	7.712.388.500,00	14.309.030.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.766.578.269,00	153.911.805.156,00	19.145.226.887,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	820.000.000,00	840.000.000,00	13.319.940.360,00	14.937.522.095,00	19.978.872.500,00	21.663.712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.298.812.860,00	36.601.234.595,00	3.302.421.735,00
2	04	1.04.2.15.2.10.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	0,00	2.541.450.000,00	2.808.920.000,00	9.487.172.500,00	10.958.762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028.622.500,00	13.767.682.500,00	1.739.060.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Kalibawang	1.150.735.000,00	1.674.650.000,00	2.044.425.000,00	2.599.278.947,00	21.000.000,00	89.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.425.000,00	2.689.253.947,00	623.828.947,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Kalikajar	0,00	0,00	3.259.041.851,00	2.948.743.549,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.041.851,00	2.958.743.549,00	-300.298.302,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	400.000.000,00	810.000.000,00	21.937.192.774,00	22.420.498.814,00	2.457.910.280,00	2.598.472.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.395.103.054,00	25.018.971.052,00	623.867.998,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas lingkungan Hidup	400.000.000,00	405.000.000,00	21.937.192.774,00	3.569.559.734,00	2.457.910.280,00	351.840.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.395.103.054,00	3.921.400.014,00	-20.473.703.040,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	145.000.000,00	35.000.000,00	10.176.132.185,00	16.014.123.131,00	3.306.003.810,00	3.306.003.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482.135.995,00	19.320.126.941,00	5.837.990.946,00
2	07	2.07.3.31.3.32.01.0000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	145.000.000,00	35.000.000,00	8.147.889.364,00	13.852.421.131,00	48.703.810,00	48.703.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196.593.174,00	13.901.124.941,00	5.704.531.767,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Kalibawang	0,00	0,00	2.083.330.637,00	2.023.597.188,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.330.637,00	2.053.597.188,00	-59.733.449,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Leksono 1	1.250.500.000,00	1.350.000.000,00	2.296.439.200,00	2.492.028.728,00	12.700.800,00	49.700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.140.000,00	2.541.729.528,00	232.589.528,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	0,00	21.043.428.882,00	21.349.309.404,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243.428.882,00	21.549.309.404,00	305.880.522,00
1	06	1.06.2.13.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	11.668.628.882,00	12.411.773.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668.628.882,00	12.411.773.404,00	743.144.522,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	258.000.000,00	358.000.000,00	88.380.155.948,00	92.047.365.714,00	1.032.600.000,00	2.164.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.412.755.948,00	94.212.315.714,00	4.799.559.766,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja											
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
4	01		-	258.000.000,00	358.000.000,00	40.231.260.545,00	40.911.308.223,00	225.750.000,00	986.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457.010.545,00	41.897.308.223,00	1.440.297.678,00	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00	
2	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.545.000.000,00	7.875.680.000,00	10.390.365.264,00	12.128.339.181,00	5.813.085.000,00	6.009.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.203.450.264,00	18.137.474.181,00	1.934.023.917,00	
2	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	1.321.000.000,00	2.736.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000.000,00	2.736.000.000,00	1.415.000.000,00	
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00	
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0010	Kelurahan Kramatan	85.510.000,00	85.510.000,00	709.806.565,00	709.806.565,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.806.565,00	734.806.565,00	0,00	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	258.000.000,00	358.000.000,00	88.380.155.948,00	92.047.365.714,00	1.032.600.000,00	2.164.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.412.755.948,00	94.212.315.714,00	4.799.559.766,00	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	258.000.000,00	358.000.000,00	40.231.260.545,00	40.911.308.223,00	225.750.000,00	986.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457.010.545,00	41.897.308.223,00	1.440.297.678,00	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	0,00	0,00	547.271.500,00	587.271.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.271.500,00	617.271.500,00	40.000.000,00	
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00	
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Kepil	0,00	0,00	3.587.579.669,00	3.388.327.616,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.579.669,00	3.438.327.616,00	-149.252.053,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Wonosobo	0,00	2.002.000,00	9.978.683.265,00	9.302.952.648,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003.683.265,00	9.327.952.648,00	-675.730.617,00	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.378.000.000,00	17.708.680.000,00	68.613.336.263,00	71.448.422.133,00	10.300.385.000,00	10.282.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.913.721.263,00	81.730.507.133,00	2.816.785.870,00	
3	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	153.900.000,00	165.960.000,00	56.128.049.813,00	58.061.702.587,00	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.008.049.813,00	58.941.702.587,00	1.933.652.774,00	
3	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	55.407.899.813,00	57.316.552.587,00	869.500.000,00	869.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.277.399.813,00	58.186.052.587,00	1.908.652.774,00	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.890.828.890.915,00	1.921.173.585.871,00	69.645.697.147,00	72.784.074.161,00	396.889.000,00	1.232.089.000,00	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	395.415.450.070,00	402.408.018.070,00	470.958.036.217,00	478.544.181.231,00	7.586.145.014,00	
5	01		PERENCANAAN	0,00	0,00	8.549.542.020,00	8.682.530.277,00	58.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607.842.020,00	8.790.830.277,00	182.988.257,00	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	8.155.542.020,00	8.288.530.277,00	58.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213.842.020,00	8.396.830.277,00	182.988.257,00	
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00	
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00	

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0002	Kelurahan Sapuran	0,00	127.650.000,00	672.800.000,00	672.800.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.800.000,00	692.800.000,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.378.000.000,00	17.708.680.000,00	68.613.336.263,00	71.448.422.133,00	10.300.385.000,00	10.282.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.913.721.263,00	81.730.507.133,00	2.816.785.870,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.833.000.000,00	9.833.000.000,00	13.748.360.778,00	14.843.155.956,00	653.600.000,00	160.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401.960.778,00	15.003.805.956,00	601.845.178,00
3	30	3.30.2.17.0.00.03.0000	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.833.000.000,00	9.833.000.000,00	1.578.328.365,00	2.023.328.365,00	350.000.000,00	135.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.328.365,00	2.158.978.365,00	230.650.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Jlamprang	0,00	28.691.000,00	657.597.267,00	657.597.267,00	265.500.000,00	265.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.097.267,00	923.097.267,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00	2.474.767.648,00	2.379.656.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474.767.648,00	2.379.656.007,00	-95.111.641,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	0,00	9.633.597.458,00	9.569.499.814,00	397.649.998,00	547.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031.247.456,00	10.117.499.812,00	86.252.356,00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Wadaslintang 1	2.026.625.000,00	2.637.871.950,00	2.794.195.000,00	3.587.096.630,00	70.970.000,00	84.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.165.000,00	3.671.746.630,00	806.581.630,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0002	Kelurahan Kalibeber	70.267.000,00	70.267.000,00	761.327.419,00	761.327.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.327.419,00	761.327.419,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan kaliwiro	0,00	3.183.000,00	2.999.562.797,00	3.023.111.052,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.562.797,00	3.039.111.052,00	23.548.255,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	258.000.000,00	358.000.000,00	88.380.155.948,00	92.047.365.714,00	1.032.600.000,00	2.164.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.412.755.948,00	94.212.315.714,00	4.799.559.766,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	258.000.000,00	358.000.000,00	40.231.260.545,00	40.911.308.223,00	225.750.000,00	986.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457.010.545,00	41.897.308.223,00	1.440.297.678,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	0,00	0,00	408.610.000,00	408.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.610.000,00	408.610.000,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Wadaslintang 2	1.233.500.000,00	1.388.520.000,00	1.941.898.000,00	2.168.862.119,00	94.000.000,00	127.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.898.000,00	2.296.562.119,00	260.664.119,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sapuran	3.800.000.000,00	4.600.000.000,00	4.497.840.000,00	5.705.908.147,00	207.500.000,00	271.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705.340.000,00	5.977.758.147,00	1.272.418.147,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0003	Kelurahan Mudal	43.200.000,00	51.200.000,00	665.468.854,00	665.369.854,00	574.472.000,00	424.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.940.854,00	1.089.940.854,00	-150.000.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.378.000.000,00	17.708.680.000,00	68.613.336.263,00	71.448.422.133,00	10.300.385.000,00	10.282.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.913.721.263,00	81.730.507.133,00	2.816.785.870,00
3	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	145.000.000,00	35.000.000,00	10.176.132.185,00	16.014.123.131,00	3.306.003.810,00	3.306.003.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482.135.995,00	19.320.126.941,00	5.837.990.946,00
3	07	2.07.3.31.3.32.01.0000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	0,00	0,00	16.540.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540.821,00	0,00	-16.540.821,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	400.000.000,00	810.000.000,00	21.937.192.774,00	22.420.498.814,00	2.457.910.280,00	2.598.472.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.395.103.054,00	25.018.971.052,00	623.867.998,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas lingkungan Hidup	0,00	405.000.000,00	0,00	18.850.939.080,00	0,00	2.246.631.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097.571.038,00	21.097.571.038,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.890.828.890.915,00	1.921.173.585.871,00	69.645.697.147,00	72.784.074.161,00	396.889.000,00	1.232.089.000,00	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	395.415.450.070,00	402.408.018.070,00	470.958.036.217,00	478.544.181.231,00	7.586.145.014,00
5	02		KEUANGAN	1.890.828.890.915,00	1.921.173.585.871,00	54.752.777.004,00	57.648.949.757,00	283.170.000,00	988.370.000,00	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	395.415.450.070,00	402.408.018.070,00	455.951.397.074,00	463.165.337.827,00	7.213.940.753,00
5	02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	106.893.667.915,00	111.687.507.451,00	54.716.061.004,00	57.612.233.757,00	283.170.000,00	988.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999.231.004,00	58.600.603.757,00	3.601.372.753,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kertek 1	2.472.270.000,00	2.880.376.429,00	3.344.510.000,00	3.830.609.146,00	38.000.000,00	71.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.510.000,00	3.901.821.146,00	519.311.146,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kejajar	0,00	4.057.000,00	4.326.258.553,00	4.251.476.420,00	63.603.610,00	63.603.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389.862.163,00	4.315.080.030,00	-74.782.133,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	6.325.113.108,00	6.115.989.137,00	450.652.100,00	450.652.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775.765.208,00	6.566.641.237,00	-209.123.971,00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	5.445.285.208,00	5.236.161.237,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.285.208,00	5.251.161.237,00	-209.123.971,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Kertek	0,00	4.984.080,00	4.532.066.009,00	4.268.914.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.066.009,00	4.268.914.277,00	-263.151.732,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Sambek	10.300.000,00	19.600.000,00	742.515.882,00	742.515.882,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.515.882,00	772.515.882,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.378.000.000,00	17.708.680.000,00	68.613.336.263,00	71.448.422.133,00	10.300.385.000,00	10.282.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.913.721.263,00	81.730.507.133,00	2.816.785.870,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.545.000.000,00	7.875.680.000,00	10.390.365.264,00	12.128.339.181,00	5.813.085.000,00	6.009.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.203.450.264,00	18.137.474.181,00	1.934.023.917,00
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.545.000.000,00	7.875.680.000,00	9.069.365.264,00	9.392.339.181,00	5.813.085.000,00	6.009.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.882.450.264,00	15.401.474.181,00	519.023.917,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	0,00	9.633.597.458,00	9.569.499.814,00	397.649.998,00	547.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031.247.456,00	10.117.499.812,00	86.252.356,00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.890.828.890.915,00	1.921.173.585.871,00	69.645.697.147,00	72.784.074.161,00	396.889.000,00	1.232.089.000,00	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	395.415.450.070,00	402.408.018.070,00	470.958.036.217,00	478.544.181.231,00	7.586.145.014,00
5	02		KEUANGAN	1.890.828.890.915,00	1.921.173.585.871,00	54.752.777.004,00	57.648.949.757,00	283.170.000,00	988.370.000,00	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	395.415.450.070,00	402.408.018.070,00	455.951.397.074,00	463.165.337.827,00	7.213.940.753,00
5	02	5.02.0.00.0.00.04.0001	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.783.935.223.000,00	1.809.486.078.420,00	36.716.000,00	36.716.000,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	395.415.450.070,00	402.408.018.070,00	400.952.166.070,00	404.564.734.070,00	3.612.568.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Wonosobo Barat	0,00	0,00	837.405.630,00	837.405.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.405.630,00	837.405.630,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0008	Kelurahan Pagerkukuh	32.720.000,00	133.074.000,00	696.269.290,00	696.269.290,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.269.290,00	707.269.290,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0003	Kelurahan Wringinanom	125.000.000,00	0,00	588.999.723,00	588.999.723,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.999.723,00	591.999.723,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	258.000.000,00	358.000.000,00	88.380.155.948,00	92.047.365.714,00	1.032.600.000,00	2.164.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.412.755.948,00	94.212.315.714,00	4.799.559.766,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	258.000.000,00	358.000.000,00	40.231.260.545,00	40.911.308.223,00	225.750.000,00	986.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457.010.545,00	41.897.308.223,00	1.440.297.678,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	0,00	0,00	972.150.193,00	1.008.250.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.150.193,00	1.008.250.193,00	36.100.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Kepil 2	1.948.797.900,00	1.948.797.900,00	3.042.787.900,00	3.094.775.322,00	87.550.000,00	173.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.337.900,00	3.267.975.322,00	137.637.422,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0004	Kelurahan Andongsili	0,00	36.100.000,00	593.667.687,00	593.667.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.667.687,00	593.667.687,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.890.828.890.915,00	1.921.173.585.871,00	69.645.697.147,00	72.784.074.161,00	396.889.000,00	1.232.089.000,00	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	395.415.450.070,00	402.408.018.070,00	470.958.036.217,00	478.544.181.231,00	7.586.145.014,00
5	01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	8.549.542.020,00	8.682.530.277,00	58.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607.842.020,00	8.790.830.277,00	182.988.257,00
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	394.000.000,00	394.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000.000,00	394.000.000,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0002	Kelurahan Kertek	104.000.000,00	153.865.335,00	770.774.224,00	845.774.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.774.224,00	845.774.224,00	75.000.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0013	Kelurahan Bumireso	56.800.000,00	56.800.000,00	646.396.660,00	646.396.660,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.896.660,00	659.896.660,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	18.517.635.821,00	18.655.669.137,00	1.081.700.000,00	1.062.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.599.335.821,00	19.717.669.137,00	118.333.316,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	6.442.617.178,00	6.410.950.494,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454.617.178,00	6.422.950.494,00	-31.666.684,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Watumalang	0,00	0,00	3.178.069.814,00	3.003.648.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.069.814,00	3.003.648.338,00	-174.421.476,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Sukoharjo 1	1.450.000.000,00	1.920.500.000,00	2.817.740.000,00	3.287.916.631,00	0,00	50.503.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.740.000,00	3.338.419.881,00	520.679.881,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0014	Kelurahan Kalianget	42.200.000,00	42.200.000,00	836.358.860,00	836.358.860,00	312.818.900,00	312.818.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.177.760,00	1.149.177.760,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.833.000.000,00	9.833.000.000,00	13.748.360.778,00	14.843.155.956,00	653.600.000,00	160.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401.960.778,00	15.003.805.956,00	601.845.178,00
2	30	3.30.2.17.0.00.03.0000	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	12.170.032.413,00	12.819.827.591,00	303.600.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473.632.413,00	12.844.827.591,00	371.195.178,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0009	Kelurahan Rojoimo	67.600.000,00	85.000.000,00	721.057.040,00	708.557.040,00	225.000.000,00	237.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.057.040,00	946.057.040,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Kejiwan	47.675.000,00	47.675.000,00	740.657.904,00	786.144.235,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.657.904,00	1.106.144.235,00	45.486.331,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	258.000.000,00	358.000.000,00	88.380.155.948,00	92.047.365.714,00	1.032.600.000,00	2.164.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.412.755.948,00	94.212.315.714,00	4.799.559.766,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	48.148.895.403,00	51.136.057.491,00	806.850.000,00	1.178.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.955.745.403,00	52.315.007.491,00	3.359.262.088,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	48.148.895.403,00	51.136.057.491,00	806.850.000,00	1.178.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.955.745.403,00	52.315.007.491,00	3.359.262.088,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja								Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer				
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.378.000.000,00	17.708.680.000,00	68.613.336.263,00	71.448.422.133,00	10.300.385.000,00	10.282.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.913.721.263,00	81.730.507.133,00	2.816.785.870,00
3	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	153.900.000,00	165.960.000,00	56.128.049.813,00	58.061.702.587,00	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.008.049.813,00	58.941.702.587,00	1.933.652.774,00
3	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	529.500.000,00	554.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000.000,00	565.000.000,00	25.000.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0011	Kelurahan Tawangsari	22.700.000,00	36.000.000,00	576.877.473,00	576.877.473,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.877.473,00	631.877.473,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	21.043.428.882,00	21.349.309.404,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243.428.882,00	21.549.309.404,00	305.880.522,00
2	06	1.06.2.13.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	9.374.800.000,00	8.937.536.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574.800.000,00	9.137.536.000,00	-437.264.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0002	Kelurahan Kalikajar	48.200.000,00	264.150.000,00	555.076.366,00	555.076.366,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.076.366,00	755.076.366,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0002	Kelurahan kejajar	70.409.000,00	147.858.900,00	596.076.426,00	596.076.426,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.076.426,00	609.076.426,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	9.633.597.458,00	9.569.499.814,00	397.649.998,00	547.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031.247.456,00	10.117.499.812,00	86.252.356,00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	9.557.597.458,00	9.493.499.814,00	397.649.998,00	547.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955.247.456,00	10.041.499.812,00	86.252.356,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4.000.000,00	4.000.000,00	603.235.026.987,00	623.739.857.456,00	57.929.838.933,00	63.170.270.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.164.865.920,00	686.910.128.265,00	25.745.262.345,00
1	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	599.737.426.987,00	617.358.107.456,00	46.907.438.933,00	52.242.020.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.644.865.920,00	669.600.128.265,00	22.955.262.345,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	153.900.000,00	165.960.000,00	56.128.049.813,00	58.061.702.587,00	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.008.049.813,00	58.941.702.587,00	1.933.652.774,00
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	153.900.000,00	165.960.000,00	190.650.000,00	190.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.650.000,00	190.650.000,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Kejajar 1	2.550.000.000,00	2.650.000.000,00	3.131.540.000,00	3.255.598.642,00	141.800.000,00	182.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.340.000,00	3.438.098.642,00	164.758.642,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Selomerto 1	5.024.817.099,00	5.024.817.099,00	5.648.857.099,00	6.142.051.118,00	195.300.000,00	170.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844.157.099,00	6.312.351.118,00	468.194.019,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	300.000.000,00	300.000.000,00	7.570.678.928,00	7.227.616.387,00	226.800.000,00	811.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797.478.928,00	8.038.896.387,00	241.417.459,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300.000.000,00	300.000.000,00	7.570.678.928,00	7.227.616.387,00	226.800.000,00	811.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797.478.928,00	8.038.896.387,00	241.417.459,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Kertek 2	2.003.080.000,00	2.147.690.000,00	2.676.613.000,00	2.861.580.385,00	0,00	333.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.613.000,00	3.195.369.385,00	518.756.385,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Selomerto 2	934.190.000,00	1.050.000.000,00	1.736.728.000,00	1.882.358.429,00	38.000.000,00	58.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.728.000,00	1.941.308.429,00	166.580.429,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	38.571.724.471,00	40.677.014.772,00	287.000.000,00	387.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.858.724.471,00	41.064.014.772,00	2.205.290.301,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	38.571.724.471,00	40.677.014.772,00	287.000.000,00	387.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.858.724.471,00	41.064.014.772,00	2.205.290.301,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	38.571.724.471,00	40.677.014.772,00	287.000.000,00	387.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.858.724.471,00	41.064.014.772,00	2.205.290.301,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja											
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0002	Kelurahan Wonoroto	59.300.000,00	65.260.000,00	521.163.445,00	521.163.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.163.445,00	521.163.445,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0003	Kelurahan Wonorejo	850.000,00	35.400.000,00	585.257.435,00	570.257.435,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.257.435,00	585.257.435,00	0,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0002	Kelurahan Wadaslintang	20.150.000,00	0,00	688.800.000,00	738.800.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.800.000,00	950.800.000,00	50.000.000,00	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kepil 1	2.515.000.000,00	2.748.965.000,00	3.229.540.000,00	3.719.747.709,00	147.800.000,00	129.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.340.000,00	3.849.347.709,00	472.007.709,00	
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00	
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Wadaslintang	0,00	1.699.000,00	3.230.591.303,00	3.203.608.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.591.303,00	3.203.608.753,00	-26.982.550,00	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	258.000.000,00	358.000.000,00	88.380.155.948,00	92.047.365.714,00	1.032.600.000,00	2.164.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.412.755.948,00	94.212.315.714,00	4.799.559.766,00	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	258.000.000,00	358.000.000,00	40.231.260.545,00	40.911.308.223,00	225.750.000,00	986.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457.010.545,00	41.897.308.223,00	1.440.297.678,00	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	0,00	0,00	3.620.964.723,00	4.046.366.723,00	45.750.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666.714.723,00	4.092.366.723,00	425.652.000,00	
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00	
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0002	Kelurahan Leksono	253.000.000,00	0,00	635.750.000,00	635.750.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.750.000,00	835.750.000,00	0,00	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	258.000.000,00	358.000.000,00	88.380.155.948,00	92.047.365.714,00	1.032.600.000,00	2.164.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.412.755.948,00	94.212.315.714,00	4.799.559.766,00	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	258.000.000,00	358.000.000,00	40.231.260.545,00	40.911.308.223,00	225.750.000,00	986.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457.010.545,00	41.897.308.223,00	1.440.297.678,00	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.509.424.355,00	1.509.424.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.424.355,00	1.509.424.355,00	0,00	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	820.000.000,00	840.000.000,00	13.319.940.360,00	14.937.522.095,00	19.978.872.500,00	21.663.712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.298.812.860,00	36.601.234.595,00	3.302.421.735,00	
1	04	1.04.2.15.2.10.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	820.000.000,00	840.000.000,00	10.728.490.360,00	12.061.402.095,00	10.491.700.000,00	10.704.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220.190.360,00	22.766.352.095,00	1.546.161.735,00	

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja								Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer				
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Wonosobo 1	3.500.000.000,00	3.650.000.000,00	4.385.403.640,00	4.283.945.358,00	47.736.360,00	830.066.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.140.000,00	5.114.011.718,00	680.871.718,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	8.864.897.074,00	9.264.213.053,00	57.887.069,00	57.887.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922.784.143,00	9.322.100.122,00	399.315.979,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	8.864.897.074,00	9.264.213.053,00	57.887.069,00	57.887.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922.784.143,00	9.322.100.122,00	399.315.979,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	8.864.897.074,00	765.800.000,00	57.887.069,00	57.887.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922.784.143,00	823.687.069,00	-8.099.097.074,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0002	Kelurahan Kaliwiro	21.350.000,00	21.350.000,00	593.442.090,00	643.442.090,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.442.090,00	843.442.090,00	50.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	14.832.350.475,00	15.108.085.902,00	205.395.000,00	205.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.037.745.475,00	15.313.480.902,00	275.735.427,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan polisi Pamong Praja	0,00	0,00	8.400.186.672,00	8.535.653.212,00	21.275.000,00	21.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421.461.672,00	8.556.928.212,00	135.466.540,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.000.000,00	4.000.000,00	603.235.026.987,00	623.739.857.456,00	57.929.838.933,00	63.170.270.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.164.865.920,00	686.910.128.265,00	25.745.262.345,00
2	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	3.497.600.000,00	6.381.750.000,00	11.022.400.000,00	10.928.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520.000.000,00	17.310.000.000,00	2.790.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Garung	3.908.105.000,00	3.918.295.000,00	4.509.179.815,00	4.892.933.525,00	464.965.185,00	267.947.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.145.000,00	5.160.880.845,00	186.735.845,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	6.325.113.108,00	6.115.989.137,00	450.652.100,00	450.652.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775.765.208,00	6.566.641.237,00	-209.123.971,00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	879.827.900,00	879.827.900,00	435.652.100,00	435.652.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.480.000,00	1.315.480.000,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Kalikajar 1	2.003.769.900,00	2.296.811.500,00	2.778.109.900,00	3.083.655.326,00	12.300.000,00	11.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.409.900,00	3.094.695.326,00	304.285.426,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Kejajar 2	934.770.650,00	932.000.000,00	1.853.110.650,00	1.865.030.544,00	36.500.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.610.650,00	1.906.930.544,00	17.319.894,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	820.000.000,00	840.000.000,00	13.319.940.360,00	14.937.522.095,00	19.978.872.500,00	21.663.712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.298.812.860,00	36.601.234.595,00	3.302.421.735,00
2	04	1.04.2.15.2.10.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	0,00	50.000.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	67.200.000,00	17.200.000,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	19.950.000,00	1.230.000.000,00	5.628.163.216,00	5.262.724.686,00	224.415.600,00	430.415.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.578.816,00	5.693.140.286,00	-159.438.530,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.950.000,00	1.230.000.000,00	5.628.163.216,00	5.262.724.686,00	224.415.600,00	430.415.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.578.816,00	5.693.140.286,00	-159.438.530,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Wonosobo 2	1.032.620.000,00	1.284.470.000,00	1.565.258.000,00	1.773.205.695,00	0,00	159.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.258.000,00	1.932.515.695,00	367.257.695,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Selomerto	0,00	0,00	4.066.109.275,00	3.498.331.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066.109.275,00	3.498.331.610,00	-567.777.665,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.890.828.890.915,00	1.921.173.585.871,00	69.645.697.147,00	72.784.074.161,00	396.889.000,00	1.232.089.000,00	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	395.415.450.070,00	402.408.018.070,00	470.958.036.217,00	478.544.181.231,00	7.586.145.014,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	0,00	6.343.378.123,00	6.452.594.127,00	55.419.000,00	135.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398.797.123,00	6.588.013.127,00	189.216.004,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	6.343.378.123,00	6.452.594.127,00	55.419.000,00	135.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398.797.123,00	6.588.013.127,00	189.216.004,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	8.864.897.074,00	9.264.213.053,00	57.887.069,00	57.887.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922.784.143,00	9.322.100.122,00	399.315.979,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	8.864.897.074,00	9.264.213.053,00	57.887.069,00	57.887.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922.784.143,00	9.322.100.122,00	399.315.979,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	8.498.413.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498.413.053,00	8.498.413.053,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.426.286.029,00	180.393.964.354,00	325.190.193.647,00	349.734.899.714,00	18.476.952.837,00	29.372.453.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.667.146.484,00	379.107.352.851,00	35.440.206.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Leksono 2	700.000.000,00	875.000.000,00	1.660.189.000,00	1.860.338.035,00	0,00	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.189.000,00	1.910.838.035,00	250.649.035,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.018.850.000,00	2.540.960.000,00	106.905.803.082,00	117.046.302.697,00	25.901.004.288,00	28.061.536.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806.807.370,00	145.107.838.943,00	12.301.031.573,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	18.517.635.821,00	18.655.669.137,00	1.081.700.000,00	1.062.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.599.335.821,00	19.717.669.137,00	118.333.316,00
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	12.075.018.643,00	12.244.718.643,00	1.069.700.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144.718.643,00	13.294.718.643,00	150.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.619.286.029,00	181.485.964.354,00	1.021.112.173.643,00	1.072.852.923.971,00	187.655.782.770,00	213.750.537.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.767.956.413,00	1.286.603.461.637,00	77.835.505.224,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.369.000.000,00	248.000.000,00	58.955.083.292,00	66.178.655.400,00	111.574.296.000,00	121.225.718.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.529.379.292,00	187.404.374.120,00	16.874.994.828,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	1.369.000.000,00	248.000.000,00	58.955.083.292,00	66.178.655.400,00	111.574.296.000,00	121.225.718.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.529.379.292,00	187.404.374.120,00	16.874.994.828,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01		KECAMATAN	1.486.901.000,00	2.051.994.315,00	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00	-2.529.472.830,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0002	Kelurahan Kepil	44.675.000,00	20.000.000,00	878.000.000,00	1.055.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.000.000,00	1.055.660.000,00	177.660.000,00
			TOTAL	**2.076.589.927.944,00**	**2.125.319.184.540,00**	**1.480.525.124.786,00**	**1.552.087.751.829,00**	**228.707.778.637,00**	**258.946.744.491,00**	**5.500.000.000,00**	**2.120.000.000,00**	**395.415.450.070,00**	**402.408.018.070,00**	**2.110.148.353.493,00**	**2.215.562.514.390,00**	**105.414.160.897,00**

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

KABUPATEN WONOSOBO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.076.589.927.944,00	2.124.914.184.540,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	291.824.704.944,00	314.598.106.120,00	
4.1.01	Pajak Daerah	69.405.000.000,00	71.655.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	21.106.350.000,00	203.206.238.087,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.320.779.534,00	25.464.935.245,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	176.992.575.410,00	14.271.932.788,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.773.681.223.000,00	1.798.934.695.585,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.576.697.073.000,00	1.595.343.534.585,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	196.984.150.000,00	203.591.161.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.084.000.000,00	11.381.382.835,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.084.000.000,00	11.381.382.835,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	250.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.000.000,00	395.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	467.330.528.482,00	487.606.775.453,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	70.200.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	368.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Aset Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	330.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	792.849.998,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	774.649.998,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.400.000,00	239.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	210.600.000,00	210.600.000,00	
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Persentase warga negara usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs Persentase warga negara usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar Persentase sekolah ramah anak Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani Persentase PAUD (TK/RA/KB/SPS) yang terakreditasi APK PAUD 3-6 tahun Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	629.799.000,00	608.249.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.459.732.000,00	1.401.508.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	1.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.430.285.000,00	1.178.903.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	12.050.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	199.550.000,00	199.150.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.441.200.000,00	1.638.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	900.415.000,00	848.524.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.134.000,00	103.066.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	850.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	301.013.000,00	280.557.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.550.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	496.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	298.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.850.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.500.000,00	990.891.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.898.800.000,00	4.429.400.728,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	48.400.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	98.950.000,00	98.300.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.549.700.000,00	1.735.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.341.458.440,00	3.341.458.440,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	255.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.111.409.186,00	42.929.624.172,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.237.300.000,00	3.282.300.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.195.599.580,00	9.949.181.848,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.693.091.234,00	4.080.412.229,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	190.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.999.464.000,00	3.568.081.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	16.100.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	549.000.000,00	199.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.291.250.000,00	1.434.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	461.114.000,00	461.114.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.095.800,00	86.095.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	83.904.200,00	83.904.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.432.000,00	160.782.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	199.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.656.688.000,00	5.704.401.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (APK) SMP/MTs/Paket B			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	595.000.000,00	563.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.339.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	750.000.000,00	922.250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.075.000.000,00	1.275.411.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.788.980,00	20.588.980,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.943.786.020,00	2.940.986.020,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	535.000.000,00	535.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	640.000.000,00	640.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000,00	700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.000.000,00	435.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.128.500.000,00	2.597.899.272,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	250.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384.625.000,00	384.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.526.000.000,00	2.526.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.000.000,00	381.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.650.000,00	635.650.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	249.350.000,00	249.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.165.689.831,00	19.174.253.483,00	
5.1.05	Belanja Hibah	8.807.850.000,00	9.055.965.860,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.278.859.794,00	3.617.852.207,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.953.490.375,00	2.382.715.575,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.766.000,00	71.766.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0044 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.739.400.000,00	1.739.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.375.000,00	400.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.958.500,00	185.958.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	84.041.500,00	84.041.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	524.550.000,00	349.550.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	750.000.000,00	727.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	624.425.000,00	624.425.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Indikator Keluaran	: Persentase Anak Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	149.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	33.900.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.555.000.000,00	2.555.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD			

Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.837.370,00	124.837.370,00	
5.1.05	Belanja Hibah	15.271.800.000,00	15.271.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.962.630,00	44.962.630,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	714.077.000,00	714.077.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	130.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan) belas tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menegah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.400.000,00	61.950.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	7.281.600.000,00	6.743.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604.225.400,00	604.225.400,00	
5.1.05	Belanja Hibah	4.141.760.000,00	4.141.760.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.634.600,00	89.634.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	425.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.05	Belanja Hibah	225.000.000,00	225.000.000,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
Indikator Hasil	: Persentase sekolah jenjang pendidkan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal Persentase sekolah yang melaksanakan			
Kegiatan	: 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal			
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	260.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Rasio ketercukupan guru SMP Rasio kecukupan guru kelas SD			
Kegiatan	: 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Calon Kepala Sekolah yang mengikuti seleksi			
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Program	: 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: -			

Sub Kegiatan	: 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			

Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase realisasi Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase realisasi belanja administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	58.068.858.729,00	58.606.010.893,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase realisasi belanja administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	57.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	200.407.924,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase realisasi pemenuhan belanja barang milik daerah thd rencana kebutuhan tahunan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	110.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase realisasi pemenuhan belanja jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.830.000,00	109.456.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.000.000,00	631.965.276,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	230.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Rasio bed rawat inap per satuan penduduk Persentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) Persentase puskesmas dengan layanan pendaftaran online Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase desa ODF Persentase orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar Persentase sarana air minum yang sesuai standar Persentase penduduk usia produktif (15-59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar SPM Indeks Kepuasan Pelanggan Labkesda Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas Persentase orang berisiko HIV yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin operasional Cakupan jaminan kesehatan masyarakat miskin Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.500.000,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.763.814.608,00	200.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas

Indikator Keluaran	: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	750.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	597.750.000,00	599.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.313.298.944,00	8.450.800.532,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	450.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.679.000,00	40.679.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.741.248.900,00	10.505.121.291,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.410.700,00	150.410.700,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: AFP Non Polio per 100.000 penduduk <15 tahun Angka keberhasilan pengobatan penderita TBC (sucses rate) (%) Cakupan balita mendapat vitamin A Cakupan K1 (%) Cakupan K4 (%) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) (%) Cakupan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita (D/S) Cakupan pemberian PMT pada balita gizi kurang Cakupan pemberian PMT pada ibu hamil KEK Cakupan pemberian tamblet Fe pada ibu hamil Persentase anak sekolah yang dimunisasi campak Persentase anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase caries gigi pada anak Persentase kasus kusta baru tanpa cacat Persentase ODGJ berat yang bebas pasung Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat ARV Persentase penduduk dengan akes jamban sehat Persentase penemuan penderita diare Persentase penemuan pneumonia pada balita Persentase penyehat tradisional yang terdaftar dan memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Persentase Posbindu Aktif Persentase Pos Lansia yang aktif Persentase puskesmas yang diakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan GERMAS Prevalensi penderita DBD per 100.000 penduduk Persentase kasus gawat darurat terpadu yang ditangani dengan SPGDT
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.420.000,00	240.420.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.261.695,00	224.261.695,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	115.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.000.000,00	137.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	115.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.950.000,00	582.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	98.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.308.388.000,00	1.308.388.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.406.800,00	447.406.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.300.000,00	310.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.834.345.000,00	7.856.845.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.214.793.850,00	1.214.793.850,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	687.722.000,00	889.722.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.365.000,00	166.365.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.940.000,00	11.940.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.071.985.630,00	1.071.985.630,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.911.607.047,00	36.462.781.523,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.053.000,00	19.053.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.050.498,00	183.050.498,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	545.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	48.500.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.561.814.608,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.750.000,00	179.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.283.420,00	132.283.420,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.000.000,00	83.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ijin
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	95.000.000,00	

Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Indikator Hasil	: Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk) Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk) Persentase puskesmas Yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar
Kegiatan	: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	

Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Persentase puskesmas yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.920.300,00	167.920.300,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	863.671.005,00	863.671.005,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Indikator Hasil	: Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT) Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat			
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
Indikator Keluaran	: Persentase apotek, toko obat, dan toko alat kesehatan yang memiliki ijin			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.179.980,00	155.179.980,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			

Indikator Keluaran	: Persentase PIRT yang memiliki SPP-PIRT			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.070.000,00	776.070.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Indikator Keluaran	: Persentase TPM dam DAM yang memiliki sertifikat Laik Higiene			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.065.000,00	54.065.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah penjual jajan anak sekolah dan PKL yang memperoleh pembinaan			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	175.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Persentase sampel makanan yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.364.500,00	305.364.500,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri			
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase makanan yang mengandung bahan berbahaya			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.160.000,00	70.160.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase FKD Aktif Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kades poskestren			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.782.580,00	448.706.960,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Wonosobo 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase pengunjung puskesmas yang dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.452.263.640,00	3.350.805.358,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.736.360,00	830.066.360,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.610.000,00	12.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.080.000,00	25.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			

Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.579.900,00	3.579.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.725.000,00	221.725.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.619.800,00	6.619.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.149.800,00	63.149.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.929.600,00	49.929.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	125.474.000,00	125.474.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.516.000,00	106.516.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	1.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.923.000,00	76.923.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.410.000,00	127.410.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.003.200,00	6.003.200,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase keluarga PBHS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.879.700,00	92.879.700,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Kertek 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Presentase pengunjung puskesmas yang dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.434.270.000,00	2.920.369.146,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	71.212.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.960.000,00	30.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.275.000,00	11.275.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.290.000,00	28.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	15.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.951.000,00	126.951.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	7.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.920.000,00	16.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.864.000,00	165.864.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	89.088.000,00	89.088.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.654.000,00	64.654.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.405.000,00	34.405.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.020.000,00	148.020.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem Informasi Puskesmas yang terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.000,00	103.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.870.000,00	165.870.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Selomerto 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas yang Terlayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			

Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.829.517.099,00	5.322.711.118,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.300.000,00	110.300.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	60.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	20.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.942.000,00	27.942.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			

Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.920.000,00	34.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.430.000,00	177.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	7.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.299.000,00	19.299.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.880.000,00	122.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	129.327.000,00	129.327.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.935.000,00	143.935.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	180.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	18.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.700.000,00	86.700.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi puskesmas yang terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.077.000,00	12.077.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.470.000,00	16.470.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Leksono 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase pengunjung yang dilayani di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.237.799.200,00	1.433.388.728,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.700.800,00	49.700.800,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.972.000,00	135.972.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.443.000,00	3.443.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.702.000,00	11.702.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	4.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.779.000,00	129.779.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.964.000,00	29.964.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.605.000,00	44.605.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	122.160.000,00	122.160.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.230.000,00	281.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000,00	30.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.032.000,00	5.032.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.490.000,00	188.490.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000,00	18.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.565.000,00	98.565.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Watumalang			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas yang Terlayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.515.505.000,00	2.425.763.413,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.900.000,00	151.250.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.504.000,00	61.504.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.840.000,00	13.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.740.000,00	19.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	10.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.922.000,00	232.922.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	7.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.610.000,00	59.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.200.000,00	184.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	101.000.000,00	101.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.890.000,00	54.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.800.000,00	106.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000,00	14.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.740.000,00	78.740.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Mojotengah			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.499.588.000,00	4.002.535.283,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	293.850.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	48.000.000,00	48.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.640.000,00	86.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.448.000,00	7.448.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.090.000,00	12.090.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	5.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.485.000,00	241.485.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.340.000,00	11.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.510.000,00	18.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.490.000,00	209.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	100.250.000,00	100.250.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.280.000,00	108.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	180.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.220.000,00	26.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.490.000,00	134.490.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Puskesmas Yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.000,00	97.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.340.000,00	40.340.000,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Garung
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas Yang Terlayani
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.443.139.815,00	3.826.893.525,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.965.185,00	267.947.320,00	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.680.000,00	71.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.250.000,00	53.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.520.000,00	32.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	11.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.800.000,00	125.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.510.000,00	91.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.260.000,00	232.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			

Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	151.300.000,00	151.300.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.470.000,00	88.470.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	9.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.230.000,00	127.230.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000,00	20.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.760.000,00	55.760.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Kejajar 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.408.200.000,00	2.532.258.642,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.800.000,00	136.500.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	55.000.000,00	46.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	44.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.715.000,00	7.715.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.230.000,00	19.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.695.000,00	165.695.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	6.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.820.000,00	15.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.135.000,00	111.135.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	142.950.000,00	142.950.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.478.000,00	68.478.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.980.000,00	103.980.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.000,00	117.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.310.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	31.310.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Kalikajar 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			

Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas yang dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.469.900,00	2.297.015.326,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.300.000,00	11.040.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	14.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.270.000,00	41.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	10.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.593.000,00	1.593.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.337.000,00	211.337.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	4.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.715.000,00	42.715.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.097.100,00	57.097.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.680.000,00	69.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.560.000,00	25.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.456.000,00	105.456.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.400,00	499.400,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.812.500,00	97.812.500,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Sapuran			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas yang Terlayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.592.500.000,00	4.800.568.147,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.500.000,00	271.850.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.713.000,00	23.713.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.480.000,00	9.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	5.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.515.000,00	8.515.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.020.000,00	273.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.780.000,00	60.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.610.000,00	179.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	151.173.000,00	151.173.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.109.000,00	85.109.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.743.000,00	17.743.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.664.000,00	41.664.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000,00	108.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.385.000,00	19.385.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kepil 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			

Indikator Keluaran	: Presentase pengunjung puskesmas yang dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.367.200.000,00	2.857.407.709,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.800.000,00	129.600.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.704.000,00	16.704.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.322.000,00	12.322.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.020.000,00	19.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.570.000,00	306.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			

Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.160.000,00	121.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	140.650.000,00	140.650.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.740.000,00	89.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.474.000,00	15.474.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.470.000,00	67.470.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase keluarga PHBS			

Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.610.000,00	35.610.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Kaliwiro			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas yang Terlayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.511.622.500,00	3.616.533.635,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.977.500,00	112.977.500,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.860.000,00	25.860.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.425.000,00	83.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.060.000,00	39.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	1.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.288.000,00	221.288.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.770.000,00	7.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.335.000,00	60.335.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.390.000,00	453.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	116.270.000,00	116.270.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.220.000,00	91.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	15.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.120.000,00	120.120.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.852.000,00	57.852.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.200.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Wadaslintang 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Presentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.955.655.000,00	2.748.556.630,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.970.000,00	84.650.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.195.000,00	30.195.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.125.000,00	32.125.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.380.000,00	13.380.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.077.000,00	1.077.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	540.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.270.000,00	267.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.180.000,00	34.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.020.880,00	72.020.880,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	123.705.000,00	123.705.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.474.600,00	85.474.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000,00	330.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.880.000,00	11.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.060.000,00	13.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.910.000,00	119.910.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.520,00	20.520,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.372.000,00	21.372.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Sukoharjo 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000.000,00	1.920.176.631,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	50.503.250,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.370.000,00	32.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.480.000,00	9.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	3.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.505.000,00	195.505.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.025.000,00	33.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.740.000,00	148.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	150.000.000,00	150.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.690.000,00	608.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000,00	90.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.665.000,00	19.665.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.950.000,00	55.950.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.295.000,00	10.295.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			

Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.700.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	84.700.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Kalibawang			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.129.735.000,00	1.684.588.947,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	89.975.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.232.000,00	11.232.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.416.000,00	18.416.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.440.000,00	19.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.878.000,00	1.878.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.220.000,00	198.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.185.000,00	7.185.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.432.000,00	17.432.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.301.000,00	89.301.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	85.200.000,00	85.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.292.000,00	226.292.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	3.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.610.000,00	110.610.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.280,00	58.280,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.045.720,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	109.045.720,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Wonosobo 2			

Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja Rata-rata indeks kepuasan layanan puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.032.620.000,00	1.240.567.695,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	159.310.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.540.000,00	12.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.010.000,00	7.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	7.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.679.840,00	2.679.840,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.472.000,00	100.472.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	5.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.276.000,00	7.276.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.795.000,00	87.795.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	102.450.000,00	102.450.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.140.000,00	40.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.600.000,00	99.600.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.160,00	435.160,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.440.000,00	52.440.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Kertek 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas Yang Dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.003.080.000,00	2.188.047.385,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	333.789.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.170.000,00	7.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.001.000,00	6.001.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.470.000,00	266.470.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.662.000,00	8.662.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.150.000,00	123.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	128.560.000,00	128.560.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.798.000,00	46.798.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.790.000,00	5.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.620.000,00	61.620.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.000,00	49.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.743.000,00	4.743.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Selomerto 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.190.000,00	1.041.820.429,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	58.950.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.872.000,00	28.872.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.618.000,00	21.618.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.810.000,00	12.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.919.000,00	79.919.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	4.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.537.000,00	23.537.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.376.000,00	76.376.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	119.720.000,00	119.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.870.000,00	246.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000,00	30.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.940.000,00	16.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.086.000,00	85.086.000,00	

Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.000,00	76.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.324.000,00	122.324.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Leksono 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Presentase pengunjung puskemasmas yang dilayani			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	900.149.035,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	50.500.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.754.000,00	61.754.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.245.000,00	20.245.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.860.000,00	25.860.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.140.000,00	199.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	4.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.041.000,00	24.041.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.480.000,00	66.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	96.850.000,00	96.850.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.740.000,00	324.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	180.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.540.000,00	35.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.980.000,00	55.980.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.639.000,00	41.639.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Kejajar 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Rata-rata indeks kepuasan layanan puskesmas			

Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Persentase Pengunjung Puskesmas Yang Dilayani
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.270.650,00	910.190.544,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.500.000,00	41.900.000,00	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Presentase Pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.080.000,00	94.080.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.155.000,00	13.155.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.360.000,00	12.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.164.000,00	115.164.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	4.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.376.000,00	25.376.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.750.000,00	72.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	88.550.000,00	88.550.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.740.000,00	303.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	5.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.615.000,00	12.615.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.240.000,00	141.240.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Puseksas Yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.019.000,00	15.019.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.171.000,00	44.171.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Kalikajar 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Rata-rata indeks kepuasan layanan puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas yang terpenuhi, belanja modal BLUD dan belanja operasional BLUD Puskesmas terpenuhi Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan			

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.857.953.980,00	2.101.802.478,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.000.000,00	209.250.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.100.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.286.000,00	29.286.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.190.000,00	26.190.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.926.000,00	119.926.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	7.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.548.000,00	29.548.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.335.000,00	370.335.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	100.653.000,00	100.653.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.337.000,00	89.337.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	4.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.790.000,00	17.790.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.755.000,00	70.755.000,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kepil 2
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.861.247.900,00	1.913.235.322,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.550.000,00	173.200.000,00	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: AFP Non Polio per 100.000 penduduk <15 tahun Angka keberhasilan pengobatan penderita TBC (sucses rate) (%) Cakupan balita mendapat vitamin A Cakupan K1 (%) Cakupan K4 (%) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) (%) Cakupan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita (D/S) Cakupan pemberian PMT pada balita gizi kurang Cakupan pemberian PMT pada ibu hamil KEK Cakupan pemberian tamblet Fe pada ibu hamil Persentase anak sekolah yang dimunisasi campak Persentase anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase caries gigi pada anak Persentase kasus kusta baru tanpa cacat Persentase ODGJ berat yang bebas pasung Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat ARV Persentase penduduk dengan akes jamban sehat Persentase penemuan penderita diare Persentase penemuan pneumonia pada balita Persentase penyehat tradisional yang terdaftar dan memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Persentase Posbindu Aktif Persentase Pos Lansia yang aktif Persentase puskesmas yang diakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan GERMAS Presentasepemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas Prevalensi penderita DBD per 100.000 penduduk Persentase kasus gawat darurat terpadu yang ditangani dengan SPGDT
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.050.000,00	31.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.320.000,00	13.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.676.000,00	12.676.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.755.500,00	2.755.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.383.000,00	409.383.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.545.000,00	7.545.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.121.000,00	40.121.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.100.800,00	67.100.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	157.950.000,00	157.950.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.340.000,00	201.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.783.000,00	53.783.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.090.000,00	90.090.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.964.500,00	1.964.500,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.861.200,00	88.861.200,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Wadaslintang 2
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja Rata-rata indeks kepuasan layanan puskesmas
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Presentase pengunjung puskesmas yang dilayani
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.139.500.000,00	1.366.464.119,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.000.000,00	92.700.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	35.000.000,00	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.976.000,00	38.976.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.096.000,00	4.096.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.933.000,00	14.933.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.490.000,00	161.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	3.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.549.750,00	7.549.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.228.200,00	142.228.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	91.763.000,00	91.763.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.767.000,00	243.767.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	540.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.960.000,00	9.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.860.000,00	40.860.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi yang terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.050,00	18.050,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Keluarga PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.677.000,00	24.677.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Sukoharjo 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.757.560,00	969.264.010,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.200.940,00	51.936.025,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas			

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.656.000,00	52.656.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.575.000,00	47.575.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.280.000,00	137.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.844.000,00	27.844.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.247.000,00	113.247.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	128.900.000,00	128.900.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.390.000,00	280.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.225.000,00	4.225.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	75.600.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Keluarga PHBS			

Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.683.000,00	31.683.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0026 Laboratorium Kesehatan Daerah			
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	704.970.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0027 RSUD Setjonegoro Kab. Wonosobo			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Rasio bed rawat inap per satuan penduduk Persentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) Persentase puskesmas dengan layanan pendaftaran online Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase desa ODF Persentase orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar Persentase sarana air minum yang sesuai standar Persentase penduduk usia produktif (15-59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar SPM Indeks Kepuasan Pelanggan Labkesda Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas Persentase orang berisiko HIV yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin operasional Cakupan jaminan kesehatan masyarakat miskin Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Setjonegoro			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Setjonegoro			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Lama tunggu pelayanan obat racikan Lama tunggu pelayanan rawat jalan. undefined			
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	24.766.578.269,00	26.439.162.914,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Layanan SPM Rumah Sakit Terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.287.611.500,00	113.163.611.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	6.200.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.712.388.500,00	8.109.030.742,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang			
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang			
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	650.605.885,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	15.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	65.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	10.685.898.912,00	10.453.365.662,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	23.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	39.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	750.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	90.216.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	92.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.000.000,00	794.034.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	330.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	150.000.000,00	
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Indikator Hasil	: Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Pengelolaan SDA Yang DI Bangun Atau Di Rehab/Dipelihara			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Panjang Saluran Irigasi Yang Ditangani			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.250.000,00	93.250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.768.000.000,00	5.758.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.486.000.000,00	2.486.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	650.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Indikator Hasil	: Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak			
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak			
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	195.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.168.264.000,00	1.107.264.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	14.370.000.000,00	14.321.000.000,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Indikator Hasil	: Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi (tempat BABS)			
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik Layak			
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	94.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	130.600.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	53.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.892.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.317.497.000,00	1.257.497.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	15.924.000.000,00	15.924.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
Indikator Hasil	: Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat			
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Panjang Saluran Drainase Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat			
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
Indikator Hasil	: Persentase bangunan gedung pelayanan publik pemerintah kabupaten yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung Persentase bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG)			
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung Yang Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung Yang Memilik Persetujuan Bangunan Gedung (komulatif)			
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0016 Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.800.000,00	79.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.320.000,00	684.050.000,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
Indikator Hasil	: Persentase aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis			
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Lahan Yang Di Tata Sesuai Rencana Teknis			
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.450.000,00	182.856.900,00	
5.1.05	Belanja Hibah	365.000.000,00	1.679.044.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	835.550.000,00	528.099.100,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Indikator Hasil	: Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani			
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan Yang Tertangani			
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.200.000,00	253.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	205.350.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Diganti			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	46.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.716.300.000,00	4.616.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	384.685.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	861.173.380,00	495.954.370,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	46.619.010,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.822.446.000,00	62.837.046.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.500.000,00	182.138.620,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	32.861.380,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	613.530.000,00	393.344.524,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.715.500.000,00	46.455.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000.000,00	9.240.380.439,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	76.092.230,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Indikator Hasil	: Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Indikator Hasil	: Persentase penetapan kebijakan perencanaan tata ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang			
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR) Yang Di Legalisasi			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	450.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR) Yang DIsusun			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Organisasi	: 1.04.2.15.2.10.03.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
Unit Organisasi	: 1.04.2.15.2.10.03.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dengan RKPD			
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000,00	84.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.379.890.360,00	5.261.387.095,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.904.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.000.000,00	225.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	48.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	745.000.000,00	745.996.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	195.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani			
Kegiatan	: 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen data BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	220.000.000,00	220.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	6.500.000,00	

5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	280.000.000,00	280.000.000,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
Indikator Hasil	: Persentase penetapan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal)			
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	185.925.000,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Luas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.600.000,00	82.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			
Indikator Keluaran	: Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			

Indikator Hasil	: Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang tertangani			
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani diluar Kawasan Permukiman Kumuh			
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	260.000.000,00	260.000.000,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Indikator Hasil	: Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah lokasi yang disediakan PSU			
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	737.800.000,00	1.335.600.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	650.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.931.700.000,00	10.015.200.000,00	
Program	: 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Indikator Hasil	: Persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi			
Kegiatan	: 1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum			
Sub Kegiatan	: 1.04.06.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan polisi Pamong Praja			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Prosentase kebutuhan Administrasi terpenuhi			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Dokumen Perencanaan dan Evaluasi dan Perencanaan			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.461.724.672,00	4.445.413.585,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.576.000,00	54.576.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: tercapainya pemahaman ASN			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	701.777.627,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tercukupinya kebutuhan umum kantor			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: tercukupinya kebutuhan sarana prasarana			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.275.000,00	21.275.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: tercukupinya kebutuhan jasa administrasi			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: terpeliharanya barang-barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.376.000,00	17.376.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penegakan perda dan perkada			
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: tercapainya tingkat keamanan dan kenyamanan undefined			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.461.410.000,00	2.461.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah kasus yang ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.200.000,00	442.200.000,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah PPNS yang terbina			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			

Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.066.283.803,00	4.156.552.690,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	235.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	275.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah desa dan kelurahan tangguh bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.380.000,00	120.380.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.620.000,00	89.620.000,00	

Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)			
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (response time)			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	60.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.500.000,00	14.500.000,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah relawan kebakaran dibawah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Unit Organisasi	: 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD			
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.558.511.802,00	3.546.323.442,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	27.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.500.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	177.500.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Modal			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.244.480,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	256.244.480,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			

Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	55.000.000,00	
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase rata- rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri Rasio penerima program usaha produktif laki- laki : perempuan			
Kegiatan	: 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			
Indikator Keluaran	: Cakupan pemberdayaan sosial KAT yang terfasilitasi kegiatan (pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas)			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	75.000.000,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase PSKS Aktif			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.200.000,00	146.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	360.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

Indikator Hasil	: Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Indikator Keluaran	: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	70.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	150.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.500.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.500.000,00	0,00	

5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	15.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	140.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	90.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Persentase PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase KPM PKH graduasi Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial			
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Cakupan pengelolaan Data Kamiskinan cakupan daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.172.600,00	239.705.482,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.956.000.000,00	5.698.800.000,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
Indikator Hasil	: Persentase kelengkapan makam pahlawan dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
Organisasi	: 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi			
Unit Organisasi	: 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi			
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.008.093.174,00	4.698.802.120,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksanya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksanya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	123.500.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.296.190,00	1.296.190,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.703.810,00	18.703.810,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksanya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksanya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	94.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.000.000,00	298.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan			
Kegiatan	: 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
Indikator Keluaran	: Dokumen rencana tenaga kerja daerah			
Sub Kegiatan	: 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi			
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.815.000.000,00	7.712.282.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Indikator Keluaran	: Persentase instruktur yang mendapatkan sertifikat kompetensi			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah wirausaha baru Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/start up wirausaha baru Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan			
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: [deleted] Persentase kelompok rentan peserta pelatihan yang ditempatkan Persentase kelompok rentan peserta pelatihan yang ditempatkan Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/start up wirausaha baru			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja			

Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	96.540.821,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Menurunnya angka kasus penempatan PMI (Pra dan Purna Penempatan)			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
Indikator Keluaran	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Indikator Hasil	: Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan			
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Menurunnya jumlah perselisihan			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perselisihan yang Dicegah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.450.613.793,00	4.283.947.109,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase reaslisai belanja Administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.229.277,00	35.854.277,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.080.000,00	13.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	3.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.247.072,00	265.847.072,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase realisasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase reaslisai belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.700.000,00	31.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.400.000,00	511.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	14.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	13.000.000,00	
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Persentase anggaran responsif gender Persentase SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih Persentase perempuan sebagai tenaga professional Persentase APBDes responsif gender Partisipasi angkatan kerja perempuan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR			
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: persentase pelembagaan PUG			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.654.292,00	75.654.292,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	130.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: persentase anggota yang aktif			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: persentase lembaga kabupaten yang aktif			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif			
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditanganig ditangani			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan konseling Cakupan lembaga layanan tingkat desa			
Kegiatan	: 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: persentase penyelenggaraan kegiatan hari anak			
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.022.744,00	43.022.744,00	
Kegiatan	: 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: persentase layanan			
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.250.000,00	93.250.000,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate			
Kegiatan	: 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate undefined			
Sub Kegiatan	: 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Indikator Hasil	: Persentase desa ramah anak			
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemenuhan hak anak yang terlaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Indikator Hasil	: Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif			
Kegiatan	: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jumlah pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase lembaga penyedia layanan yang aktif			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase penyediaan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksanannya penyusunan perencanaan dan evaluasi 1inerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Ketersediaan energi per kapita/hari			
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Indikator Keluaran	: Promosi penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
Indikator Keluaran	: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengadaan beras cadangan pangan			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Indikator Keluaran	: Laporan pola konsumsi pangan wilayah			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			
Indikator Keluaran	: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase bahan pangan aman			
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sarana pengujian keamanan pangan			
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.650.000,00	25.650.000,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
Organisasi	: 1.04.2.15.2.10.03.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
Unit Organisasi	: 1.04.2.15.2.10.03.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
Program	: 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi			
Kegiatan	: 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penanganan sengketa tanah garapan pemerintah daerah yang dilakukan melalui mediasi			
Sub Kegiatan	: 2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	67.200.000,00	
Program	: 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
Indikator Hasil	: Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			
Kegiatan	: 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penetapan tanah pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas umum			
Sub Kegiatan	: 2.10.10.2.01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas lingkungan Hidup			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN			
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada tahun berjalan			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	7.537.165.538,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase pengurangan sampah Persentase penanganan sampah			
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			
Indikator Keluaran	: Jumlah volume sampah yang dapat dikurangi			
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	337.448.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	196.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	1.996.500.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	93.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	308.061.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.766.038.042,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	4.706.226.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	90.170.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	66.511.958,00	
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas lingkungan Hidup			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada tahun berjalan			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.423.297.540,00	0,00	

Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.117.000,00	56.192.361,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.778.200,00	15.778.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	1.255.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.088.000,00	184.088.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah			

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.095.930,00	1.095.930,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.904.070,00	58.904.070,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.547.590,00	1.547.590,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.452.410,00	44.102.410,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	72.669.639,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.550.000,00	334.900.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	190.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian dokumen RPPLH sampai dengan dinyatakan sah atau legal			
Kegiatan	: 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah RPPLH yang disusun			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.654.000,00	93.654.000,00	
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumenn KLHS RPJMD/RPJPD			

Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.453.500,00	82.453.500,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Rata-rata koefisien rezim aliran daerah aliran sungai prioritas Jumlah pengendalian sektor emisi gas rumah kaca yang dikoordinasi, disinkronkan emisinya Persentase penurunan emisi gas rumah kaca Persentase luas lahan kritis diluar kawasan hutan Persentase mata air yang rusak dan/atau menurun debitnya			
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen IGRK Jumlah mata air yang rusak/mati Jumlah pendampingan kawasan kampung proklim Persentase pencemaran pada titik pantau (air permukaan)			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.261.400,00	102.261.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.391.200,00	207.391.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.608.800,00	3.608.800,00	

Kegiatan	: 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya media informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pohon untuk rehabilitasi lahan Pelaksanaan Hari Menanam Pohon Indonesia			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Indikator Hasil	: Persentase ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan			
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang dikelola atau jumlah RTH yang dikelola??			
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.548.722.414,00	1.553.722.414,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.950.000,00	45.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			
Indikator Keluaran	: Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.500.500,00	63.600.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.125.000,00	11.125.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	25.900.000,00	
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3			
Kegiatan	: 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3			
Indikator Keluaran	: Jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan sosialisasi			
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Indikator Hasil	: Persentase ketaatan pengampu usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah kabupaten Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi			
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan atau pertek LH usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan atau pertimbangan teknis lingkungan yang diawasi			
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.950.000,00	46.950.000,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Jumlah lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup			
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pembinaan Saka Kalpataru Pembinaan Sekolah Adiwiyata Penebaran Benih Ikan			
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang dikelola			
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang dikelola			
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			

Indikator Hasil	: Persentase pengurangan sampah Persentase penanganan sampah			
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			
Indikator Keluaran	: Jumlah volume sampah yang dapat dikurangi			
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.098.500,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	4.780.874.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.700.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.013.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			
Indikator Keluaran	: Persentase luas layanan pengumpulan sampah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	151.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.807.800.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.170.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	40.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah			
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang terdaur ulang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.783.829.568,00	4.575.247.027,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.600.000,00	170.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.500.000,00	249.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.800.000,00	711.280.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	104.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.400.000,00	512.320.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	22.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)			
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: % anak yang memiliki KIA % penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen % peningkatan kepemilikan KTP elektronik			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.132.999.360,00	883.499.360,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	150.000.000,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
Indikator Hasil	: Rasio kepemilikan akta kematian Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen Persentase anak yang memiliki akte kelahiran			
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: % anak yang memiliki akte kelahiran % penduduk meninggal yang dibuatkan akte kematian			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	27.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	30.250.000,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: penyelesaian digitalisasi arsip			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	:			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan Persentase cakupan updating data kependudukan			
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
Indikator Keluaran	: ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.100.000,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah perangkat komputer yang diunakan untuk pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.100.000,00	45.100.000,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Organisasi	: 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Unit Organisasi	: 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang telah menyelesaikan penegasan batas desa Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa			
Indikator Keluaran	: Cakupan penyelenggaraan penataan desa			
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	1.522.200.000,00	
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			

Indikator Hasil	: Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
Indikator Keluaran	: Cakupan Kerjasama Antar Desa yang difasilitasi
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000,00	274.085.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	80.915.000,00	

Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Indikator Hasil	: Persentase BUMDes berkembang dan maju Persentase BUMDes berbadan hukum Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa Persentase desa berkinerja baik
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Indikator Keluaran	: Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu Persentase desa yang menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD tepat waktu Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati tepat waktu Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat tepat waktu
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.404.400.000,00	3.404.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.400.000,00	116.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000,00	915.536.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.000.000,00	384.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	145.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
Indikator Hasil	: Persentase PKK aktif Persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif desa Persentase lembaga kemasyarakatan aktif			
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Kemasyarakatan desa aktif melakukan kegiatan pemberdayaan			
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	700.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 setiap tahun Rata-rata jumlah anak per keluarga			
Kegiatan	: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Indikator Keluaran	: Dokumen rancangan induk pengendalian penduduk dengan 5 aspek			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.857.643,00	25.857.643,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0004 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: persentase ketersediaan data kependudukan			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.400.000,00	221.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	126.000.000,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Indikator Hasil	: Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) Kepesertaan KB Pria Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Drop Out KB			
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan advokasi KIE			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.640.000,00	121.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	863.412.000,00	863.412.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.360.000,00	321.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	240.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.000.000,00	312.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
Indikator Keluaran	: Persentase tenaga penyuluh yang berkompeten			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.000.000,00	795.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.974.000,00	7.974.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	420.000.000,00	420.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: persentase sumber daya yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	36.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.121.687.000,00	3.121.687.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	22.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	649.700.000,00	630.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.263.000,00	46.263.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.450.000,00	50.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria			
Indikator Keluaran	: Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	35.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Indikator Keluaran	: Persentase peran serta organisasi masyarakat			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.090.000,00	8.090.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.425.000,00	32.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.160.000,00	578.160.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
Indikator Hasil	: rata rata usia kawin pertama wanita rata rata usia melahirkan pertama perempuan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa angka kelahiran remaja perempuan usai 15-19 ASFR cakupan PUS peserta KB anggta UPPKS yang ber KB Mandiri cakupan anggota bina keluarga remaja cakupan anggota bina keluarga balita cakupan anggota bina keluarga lansia ber KB			
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan pembinaan keluarga/realisasi kegiatan			
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif			

Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.034.000.000,00	2.034.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.237.400.000,00	2.237.400.000,00	

Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi	: 1.04.2.15.2.10.03.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Unit Organisasi	: 1.04.2.15.2.10.03.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Indikator Hasil	: Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota

Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah ruas jalan kabupaten yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.330.400.000,00	4.330.400.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.770.900.000,00	6.176.740.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.750.000,00	969.970.000,00	

Kegiatan	: 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Indikator Keluaran	: Jumlah terminal tipe C yang dikelola
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Indikator Keluaran	: Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	2.250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	27.750.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Indikator Keluaran	: Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	

Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Indikator Keluaran	: Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang dikeluarkan
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	43.700.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.300.000,00	95.300.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	75.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.572.500,00	96.572.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	218.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	32.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota yang telaksana pada tahun -n			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	140.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	745.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen andalalin yang disetujui			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah ruas jalan yang di audit atau di inspeksi			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.000.000,00	430.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Panjang ruas jalan yang dilalui trayek angkutan umum			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Indikator Hasil	: Persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.05.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dermaga Penyeberangan dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.135.957.708,00	3.917.210.064,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.160.000,00	71.160.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Regulasi Cukai Presentase Realisasi Belanja Administrasi			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	400.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	14.632.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	31.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.978.860,00	125.978.860,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	68.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.850.888,00	175.550.888,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.500.000,00	314.168.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Indikator Hasil	: Nilai kelembagaan PPID Nilai informasi tersedia setiap saat Nilai aksesibilitas website			
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Nilai Keterbukaan Informasi Publik			
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.046.490,00	108.046.490,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.803.510,00	1.833.803.510,00	
5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	450.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.600.000,00	326.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Hubungan Media			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.350.000,00	106.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	67.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	81.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.000.000,00	115.000.000,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
Indikator Hasil	: Nilai manajemen SPBE Nilai layanan SPBE Nilai kebijakan internal SPBE Nilai tata kelola SPBE			
Kegiatan	: 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tingkat Kematangan Kebijakan Internet Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan TNDE			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	971.000.002,00	958.000.002,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.999.998,00	198.999.998,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.650.000,00	184.400.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	49.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			

Organisasi	: 3.30.2.17.0.00.03.0000 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi	: 3.30.2.17.0.00.03.0000 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Terlaksanya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Presentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD Presentase pemenuhan sarpraspendukung kinerja Cakupan Pelayanan admnistrasi perkantoran
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: cakupan pelayanan administrasi perkantoran presentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik presentase keselarasan program renja perangkat daerah dan rkpd presentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja Terlaksananya Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.731.614.487,00	7.577.304.210,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.866.246,00	98.866.246,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Prasarana Gedung			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah Tersedianya Jasa Komunikasi , sumberdaya air dan Listrik Tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Surat Menyurat			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	995.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000.000,00	1.650.505.455,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya Terrlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan kendaraan Dinas atau Operasional tersedianya Mebeleur yang siap dipakai Tersedianya Mebeleur yang telah dipelihara
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	73.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	94.000.000,00	

Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Indikator Hasil	: Pertumbuhan omzet koperasi
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah kegaiatan pengawasan dan pembinaan koperasi Jumlah koperasi yang di awasi Jumlah Koperasi Yang Diawasi Pertumbuhan omzet koperasi
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.692.000,00	43.692.000,00	
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
Indikator Hasil	: Presentase Koperasi Aktif Persentase KSP/USP koperasi sehat			
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan penilaian tingkat kesehatan koperasi Jumlah KSP Sehat Jumlah USP Sehat Persentase koperasi aktif Persentase KSP/USP koperasi sehat			
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.065.549,00	27.065.549,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Persentase koperasi produksi Persentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar online Persentase koperasi yang mengakses pembiayaan perbankan			
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi Aktif katagori Sehat yang bisa mengakses Perbankan Jumlah Koperasi aktif yang katagori sehat yang bisa mengakses perbankan Jumlah Koperasi yang menghasilkan produk Persentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar online Presentase Koperasi Produksi presentase koperasi yang mngakses pembiayaan perbankan			
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.170.000,00	525.170.000,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/ UB Presentase Masyarakat Miskin Yang Menjadi Wirausaha yang bermitra dengan UMK/UB Persentase usaha mikro yang mengakses pembiayaan perbankan Presentase Rumah Tangga Miskin yang Menjadi Wirausaha yang Mengakses Modal Usaha Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha dan bisa mengakses modal usaha Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha			
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			

Indikator Keluaran	: Jumlah usaha mikro telah di data untuk di kembangkan Jumlah usaha mikro telah di data untuk di kembangkan (terget awal 100. target akhir 300) Jumlah usaha mikro yang akan di berdayakan Jumlah Usaha Mikro yang akan diberdayakan Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemudahan perijinan Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi kemudahan perijinan Pertumbuhan Jumlah usaha mikro Presentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/UB Presentase Usaha mikro yang mengakses pembiayaan perbankan
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	450.000.000,00	640.000.000,00	

Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Indikator Hasil	: Presentase Unit usaha Mikro Naik Kelas Yang Difasilitasi Presentase Usaha Mikro yang Mempunyai Izin Usaha
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil Presentase Unit Usaha Mikro naik kelas yang difasilitasi presentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.574.131,00	792.174.131,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.600.000,00	0,00	

Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Disusun Tepat Waktu
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.863.503.256,00	2.534.064.726,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.934.400,00	1.934.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	218.065.600,00	218.065.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.650.000,00	428.650.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	206.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.350.000,00	6.350.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	134.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.388.560,00	574.388.560,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Pemeliharaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.800.000,00	105.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			

Indikator Hasil	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
Kegiatan	: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Kemitraan Pelaku Usaha Besar Dengan UMK			
Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	33.200.000,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Soft Launching Mal Pelayanan Publik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Grand Launching Mal Pelayanan Publik Terlaksananya Soft Launching Mal Pelayanan Publik Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.687.000,00	416.687.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	115.000.000,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
Kegiatan	: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
Sub Kegiatan	: 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Indikator Hasil	: Persentase pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda Persentase organisasi pemuda yang aktif			
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pemuda berprestasi			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	270.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.600.000,00	329.870.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.022.400.000,00	10.928.250.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase atlet berprestasi			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.000.000,00	1.071.880.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
Indikator Keluaran	: Persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	1.270.000.000,00	3.860.000.000,00	

Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan			
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan			
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan data sektoral			
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase PD yang sudah memutakhirkan data sektoral di porrtal satu data			
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Indikator Hasil	: Indeks Keamanan Informasi			
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Sistem Informasi yang sudah dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Indikator Hasil	: Jumlah kelompok kesenian dan lembaga kebudayaan yang mendapat pembinaan dan bantuan			
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok kesenian dan lembaga kebudayaan yang mendapat pembinaan dan bantuan			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	871.000.000,00	1.956.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah tradisi budaya yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	650.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah tradisi budaya yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
Indikator Hasil	: Jumlah SDM kesenian yang terfasilitasi			
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM kesenian yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			

Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan Persentase pemustaka yang memanfaatkan pepustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan Presentase penambahan koleksi Persentase perpustakaan terakreditasi Persentase koleksi digital			
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.000.000,00	593.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.347.900,00	37.347.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	435.652.100,00	435.652.100,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan jumlah kunjungan perpustakaan			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.300.000,00	198.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
Indikator Hasil	: Cakupan koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) Cakupan naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa Cakupan naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya			
Kegiatan	: 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan jumlah koleksi naskah kuno yang dikelola dan dialihmedia			
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.180.000,00	21.180.000,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik			

Kegiatan	: 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan gaji dan tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.199.112.928,00	3.989.988.957,00	
Kegiatan	: 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	115.000.000,00	
Kegiatan	: 2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase realisasi pengadaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.127.280,00	377.280,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	25.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.250.000,00	523.250.000,00	
Kegiatan	: 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.795.000,00	70.795.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	30.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan arsip secara baku Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip kategori baik Persentase desa dengan pengelolaan arsip kategori baik			
Kegiatan	: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah perawatan arsip daerah			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI			
Indikator Keluaran	: Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.000.000,00	218.000.000,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD dan desa yang menggunakan sistem kearsipan sesuai dengan NSPK			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan (NSPK) Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan Persentase arsip digital			
Kegiatan	: 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Arsip yang sudah memasuki retensi di atas 10 tahun dan tidak bernilaiguna yang dimusnahkan			
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

BELANJA DAERAH	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Indikator Hasil	: Pertumbuhan produksi perikanan tangkap
Kegiatan	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Gennagan Air Lainnya
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan produksi perikanan budidaya Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan Persentase jumlah kelompok tani ikan yang aktif Persentase UPR aktf			
Kegiatan	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya peningkatan kapasistas bagi pembudidaya ikan kecil			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.500.000,00	200.500.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	189.000.000,00	189.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Presentase Kegiatan direncanakan tepat dan sesuai rencana			
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: LKPjlP, Renstra, Renja, LPPD, dll			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.738.249.264,00	4.447.175.181,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	79.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.000.000,00	148.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	247.500.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	44.098.000,00	
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Dokumen DED DTW Dieng Plateau Theater Dokumen DED Kawasan Sindoro - Sumbing			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	155.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pembangunan Amenitas dan Atraksi Telaga Menjer Pengadaan Sarana dan Prasarana Waterpark Taman Rekreasi Kalianget Revitalisasi Waterpark Taman Rekreasi Kalianget			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.909.000,00	41.450.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.717.292.000,00	958.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Operasional Obyek Wisata Milik Pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	93.409.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	4.954.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000.000,00	1.246.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase TDUP yang diteteapkan dan tersertifikasi Prosentase			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.04.0010 Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan Pertumbuhan event wisata tingkat nasional Pertumbuhan jumlah kemitraan pariwisata			
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Jaringan Promosi dan Kemitraan di Bidang Pariwisata			
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	750.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	304.207.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	95.793.000,00	
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan			
Kegiatan	: 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase zona ekonomi kreatif yang dimanfaatkan Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif			
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Presentase sub sektor ekonomi kreatif yang berkembang			
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0004 Penyediaan Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Indikator Hasil	: Persentase industri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi Persentase kelembagaan pariwisata Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi			
Kegiatan	: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
Indikator Keluaran	: Presentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi tingkat dasar			
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	759.777.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.207.000,00	468.223.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.793.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Kegiatan	: 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Indikator Keluaran	: Prosentase Prosentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	

Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Unit Organisasi	: 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase penyediaan sarpras pendukung kinerja

Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	20.922.001.413,00	20.100.838.933,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	37.014.625,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	125.746.080,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	95.289.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.000.000,00	255.980.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.000.000,00	138.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.500.000,00	771.780.000,00	

Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	188.950.295,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Produksi tanaman hortikultura (Durian) Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim			
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penmgawasan penggunaan sarana pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.267.030,00	666.784.909,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.751.181.370,00	3.719.218.745,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	195.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pertumbuhan populasi SDG Hewan/ Tanaman			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	343.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya populasi ternak unggas di Kabupaten Wonosobo			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya populasi ternak ruminansia besar dan kecil di Kabupaten Wonosobo			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	101.700.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.095.200.000,00	3.288.300.000,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi Persentase jalan produksi yag berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura Persentase JUT yang berada di sentra produksi			
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya perencanaan pengembangan prasarana pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.666.800,00	22.966.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	9.943.333.200,00	9.927.033.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			
Indikator Keluaran	: Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.373.000,00	325.373.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	354.627.000,00	354.627.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.628.200.000,00	1.636.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	13.667.800.000,00	13.660.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.500.000,00	172.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.500.000,00	177.500.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	680.000.000,00	680.000.000,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT yang tertangani)			
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengendalian dan penaggulangan bencana pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.150.000,00	501.150.000,00	
Program	: 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Gapoktan aktif Persentase kelompok tani aktif			
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyuluhan pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.500.000,00	297.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
Organisasi	: 3.30.2.17.0.00.03.0000 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Unit Organisasi	: 3.30.2.17.0.00.03.0000 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Presentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD Presentase pemenuhan sarpraspendukung kinerja Cakupan Pelayanan admnistrasi perkantoran			
Kegiatan	: 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya Terrlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan kendaraan Dinas atau Operasional tersedianya Mebeleur yang siap dipakai Tersedianya Mebeleur yang telah dipelihara			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	14.100.000,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase pasar dalam kondisi baik Persentase kios/ los yang dimanfaatkan			
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/renovasi/rehab Jumlah sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun/renovasi/rehap Jumlah sarana distribusi perdagangan yang tersedia Persentase pasar dalam kondisi baik Presentase los/kios yang dimanfaatkan			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.183.375,00	490.183.375,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	135.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	36.750.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	0,00	

Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengelola pasar yang akan adakan pembinaan Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan dibina Jumlah Pengelola sarana Distribusi Perdagangan dibina Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	40.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	28.350.000,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
Indikator Hasil	: Persentase disparitas harga kepokmas antar wilayah Jumlah Barang Penting yang Di awasi Jumlah Pelaku Usaha Distribusi Pupuk Bersubsidi yang di Awasi			
Kegiatan	: 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah barang penting yang diawasi Jumlah barang pokok dan barang penting yang diawasi stoknya Jumlah pelaku usaha distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi Jumlah stok barang pokok dan penting yang tersedia Presentase dispasirtas harga kepokmas antar wilayah			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.007.840.000,00	1.229.840.000,00	
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang pokok dan penting yang diawasi stoknya jumlah kegiatan pemantauan harga			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.047.855,00	59.047.855,00	
Kegiatan	: 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha penyalur pupuk dan pestisida yang diawasi jumlah stok pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan komoditas eksport			
Kegiatan	: 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan pameran dagang lokal Jumlah Kegiatan pameran yang dilaksanakan Jumlah komoditas ekspor yang di promosikan Jumlah Komoditas Ekspor yang di promosikan Jumlah pelaku usaha yang telah dibina dan dilatih jumlah produk ekspor yang mempunyai citra Jumlah produk unggulan yang menjadi komoditas ekspor pertumbuhan jumlah komoditas ekspor			
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	7.150.000,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
Indikator Hasil	: Rasio Metrologi Legal yang di Tera Ulang Rasio barang cukai ilegal yang beredar			

Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pengawasan /penyuluhan tera, tera-tera ulang metrolohi legal Jumlah Kegiatan tera/tera-tera ulang metrologi legal Jumlah UTTP legal yang di tera/tera-tera ulang Rasio Metrologi legal yang ditera/tera ulang			
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.107.135,00	93.107.135,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	12.150.000,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
Indikator Hasil	: Pertumbuhan omset market place lokal produk UMKM Persentase market place lokal yang memasarkan produk lokal Persentase toko modern yang memasarkan produk lokal			
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah market place yang memasarkan produk lokal Jumlah produk lokal yang dipasarkan di Toko Modern jumlah produk lokal yang masuk sistem jaringan perdagangan Pertumbuhan omset market place lokal produk umkm presentase marketplace lokal yang memasarkan produk lokal Presentase toko modern yang memasarkan produk lokal			
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	12.150.000,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
Organisasi	: 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi			
Unit Organisasi	: 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi			
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Indikator Hasil	: Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal Pertumbuhan Jumlah sentra industri Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan Persentase klaster kategori berkembang Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil			

Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri			
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.700.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.302.500.000,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.954.800.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.769.002.000,00	1.769.002.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	342.700.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.302.500.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.954.800.000,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
Indikator Hasil	: Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten			

Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Cakupan penyediaan informasi industri
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.540.821,00	0,00	

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja administrasi umum

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.334.200,00	16.334.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.495.062,00	13.495.062,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.803.700,00	144.803.700,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja pelayanan administrasi			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	58.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase aset dalam kondisi baik			

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.403.920,00	22.403.920,00	
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Indikator Hasil	: Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar			
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.790.855,00	450.790.855,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.906.032,00	61.906.032,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.651.290,00	169.751.290,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan/MOU yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.365.134,00	68.365.134,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja Presentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja			
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.815.000,00	10.815.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Penataan Organisasi yang diPublikasikan Rata rata Nilai RB Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.340.520,00	81.340.520,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.746.480,00	102.746.480,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.988.000,00	55.988.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah			
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase realisasi belanja pelayanan administrasi			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.117.500,00	15.117.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.134.000,00	15.134.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.820.000,00	13.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Indikator Hasil	: persentase peraturan daeerah yang di tindaklanjuti dengan peraturan bupati			
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Indikator Keluaran	: nilai JDIH kabupaten persentase jumlah gugatan yang difasilitasi Persentase penyusunan produk hukum			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	185.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Presentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja			
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja administrasi umum			

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.479.037,00	19.011.487,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	10.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.925.000,00	48.216.950,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.750.000,00	46.000.000,00	

Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.180.000,00	67.395.600,00	

Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.930.686,00	20.930.686,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	9.000.000,00	

Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Indikator Hasil	: persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Indikator Keluaran	: Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.757.100.000,00	3.183.002.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	442.900.000,00	442.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	162.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	81.000.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Umum Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	19.010.268.696,00	17.946.543.249,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	175.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000.000,00	2.403.226.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	1.240.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	289.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	510.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.098.080,00	586.098.080,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.308.858.500,00	2.266.858.500,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.156.687,00	575.156.687,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	575.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.342.085,00	1.100.342.085,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan kedinasan pimpinan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	727.616.437,00	803.661.562,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.520.871,00	35.520.871,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	600.000.000,00	600.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Persentase pelayanan kedinasan pimpinan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	900.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	640.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	420.000.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah			
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.696.400,00	8.696.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.423.755,00	25.200.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	11.223.755,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP			
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			

Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tertangani Prsentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	175.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	250.000.000,00	

Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Indikator Keluaran	: Persentase kebijakan yang tertangani
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	902.724.200,00	902.724.200,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	

Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Kegiatan Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.574.000,00	85.574.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.094.000,00	132.094.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.590.000,00	6.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.500.000,00	425.740.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	110.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	29.760.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Protokoler dan Komunikasi Pimpinan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.020.000,00	307.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.331.760,00	135.331.760,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah			
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.275.494,00	10.275.494,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase aset sekretariat daerah dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.869.801,00	1.869.801,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.930.686,00	24.930.686,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.628.701,00	33.628.701,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan			
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.776.001,00	31.776.001,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.043.748,00	163.043.748,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.096.337,00	130.096.337,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			

Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	85.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Capaian Kinerja Bidang Perekonimian dan Pembangunan (SPM) Indeks Tata Kelola Pengadaan Capaian kinerja bidang perekonomian dan pembangunan (SAKIP) Capaian kinerja bidang perekonomian dan pembangunan (MCP)			

Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Indeks tata kelola pengadaan			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.125.000,00	172.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	38.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.272.890,00	72.272.890,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD			
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.160.907.121,00	3.181.273.210,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	648.850.000,00	753.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	124.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase realisasi belanja Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.013.240.000,00	1.263.240.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase realisasi pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.288.688,00	666.288.688,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	93.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.000.000,00	242.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.000.000,00	108.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.610.000,00	241.960.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Indikator Keluaran	: Presentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	25.352.939.594,00	25.352.939.593,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.900.000,00	1.084.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.370.000,00	44.370.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000.000,00	13.848.896.000,00	
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
Indikator Hasil	: Persentase Hasil Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Persentase Peraturan Daerah inisiatif DPRD			
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Raperda Inisiatif dan Keputusan DPRD yang dihasilkan			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.000.000,00	535.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Agenda Kerja DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.582.340.000,00	2.277.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	205.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	195.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.150.000,00	470.650.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	93.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Persentase aspirasi masyarakat yang sesuai dengan prioritas daerah			

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses			
Indikator Keluaran	: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	913.500.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja			
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.383.280,00	11.383.280,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.733.600.248,00	5.666.588.505,00	

Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	6.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.500.000,00	54.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	213.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.400.000,00	134.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.280.240,00	521.280.240,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.583.052,00	106.583.052,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	37.000.000,00	
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase kesesuaian program RKPD dan RPJMD Persentase capaian kinerja program terhadap target kinerja RKPD			
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan yang disusun			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	430.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	13.700.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	28.300.000,00	78.300.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan yang disusun			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	39.000.000,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.879.700,00	86.879.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.215.500,00	254.215.500,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	124.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	98.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.000.000,00	203.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.500.000,00	144.500.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	36.287.785.531,00	36.793.261.914,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.000.000,00	309.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	480.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.837.807,00	546.837.807,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.830.000,00	1.661.630.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283.170.000,00	988.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.352.000,00	12.352.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.780.302.129,00	12.135.998.499,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.135.894.976,00	1.185.094.976,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	200.432.370,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	135.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dan RKPD Persentase silpa terhadap APBD			
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.615.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.070.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.615.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.169.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.080.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.680.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.669.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.003.250,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.200.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	109.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.350.000,00	0,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.446.750,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.830.480,00	265.830.480,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.780.480,00	117.780.480,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Kegiatan	: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.682.370,00	213.250.000,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.558.500,00	25.558.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.000.000,00	674.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.992.500,00	153.992.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.872.900,00	60.872.900,00	

Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.022.427,00	377.022.427,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.171.720,00	703.171.720,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	802.607.184,00	1.182.607.184,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0001 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.716.000,00	36.716.000,00	
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	386.364.315.070,00	393.356.883.070,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.051.135.000,00	9.051.135.000,00	

Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dan RKPD
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.472.047.123,00	4.253.351.461,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	53.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.400.000,00	267.400.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	95.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.600.000,00	262.600.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.250.000,00	85.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian Persentase Layanan Kepegawaian yang Berbasis Teknologi Informasi			
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Yang Difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.900.000,00	376.811.666,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	82.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.581.000,00	14.581.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.419.000,00	20.419.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Persentase Mutasi dan Promosi ASN yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	300.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang difasilitasi pengembangan kompetensinya pada tahun berkenaan			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.800.000,00	236.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan/dokumen evaluasi kinerja aparatur			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase inovasi yang diterapkan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
Indikator Keluaran	: persentase hasil litbang bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Inovasi dan teknologi yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 inspektorat
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 inspektorat
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Presentase Keselarasan Program Kerja Perangkat Daerah dan RKPD
Kegiatan	: 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Presentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	69.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	41.495.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.993.222.074,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	7.202.538.053,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Pegawai yang Lulus Mengikuti Diklat			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	84.250.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Belanja Umum			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	52.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.750.000,00	39.750.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	248.510.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	206.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	75.000.000,00	
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
Indikator Hasil	: Presentase tindak lanjut hasil reviu APIP			

Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Presentase pemeriksaan internal yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	287.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.425.000,00	144.050.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	18.137.069,00	18.137.069,00	
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Presentase hasil audit yang ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	105.000.000,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Indikator Hasil	: Presentase Perangkat Daerah berpredikat WBK Presentase Hasil Penilaian			
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			
Indikator Keluaran	: Presentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai B pada LKE RB Presentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai MCP KPK			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	191.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Gaji dan Tunjangan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	9.175.311.565,00	8.499.580.948,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.709.900,00	6.709.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.606.800,00	10.606.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kinerja aparatur dan layanan pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: IKM Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Cakupan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pembinaan dan Pelayanan Keliling Desa/ Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.700.000,00	98.700.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Presentase kegiatan pemberdayaan Desa terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.165.000,00	55.165.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Kegiatan PKK yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.290.000,00	61.290.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Wonosobo Barat			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	9.471.392,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.660.000,00	157.188.608,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.800.000,00	465.800.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konûik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiba			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.745.630,00	50.745.630,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Wonosobo Timur			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.705.700,00	2.705.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	998.500,00	998.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.855.000,00	1.855.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktiû tas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.520,00	311.520,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.288.480,00	99.288.480,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000,00	125.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.972.800,00	586.972.800,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.830.000,00	63.830.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konûik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiba			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.410.000,00	35.410.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	13.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Jlamprang			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			

Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pelayanan Administrasi Kantor yang Terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.640.000,00	20.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.685.129,00	3.685.129,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.500.000,00	25.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.377.760,00	110.377.760,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Pemberdayaan Kelurahan yang Terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	190.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.296.400,00	295.296.400,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Terlaksananya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.016.000,00	87.016.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.745.630,00	50.745.630,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasa Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.196.348,00	14.196.348,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Kejiwan			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktiû tas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.346.800,00	13.346.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.269.084,00	122.269.084,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.160.000,00	25.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.180.020,00	332.180.020,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	165.486.331,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase konûik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiba			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.202.000,00	54.202.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terlaksana			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Sambek			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pelayanan administrasi kantor terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	25.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase Pemenuhan sarpras kantor pendukung kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.280.000,00	14.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.554.005,00	151.554.005,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tercukupinya pemeliharaan sarana prasarana kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.500.000,00	60.500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif Persentase lembaga masyarakat aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.049.877,00	305.049.877,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.410.000,00	73.410.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, ketenteraman, ketertiban umum tingkt kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.132.000,00	45.132.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase penyelnggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.090.000,00	24.090.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Mlipak			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	25.400.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.600.000,00	121.600.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.300.000,00	344.300.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase Konflik Antar Kelompok/Desa/Kelurahan Terselesaikan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Pagerkukuh			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.070.000,00	1.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.498.270,00	3.498.270,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.268.450,00	2.268.450,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.485.800,00	3.485.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.947.000,00	8.947.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktiû tas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.392.960,00	98.555.760,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.656.810,00	2.656.810,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif jumlah pelaksanaan Musrenbang persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.973.730,00	9.973.730,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.940.685,00	406.277.885,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.905.585,00	75.905.585,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konûik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiba			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.890.000,00	37.890.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase konûik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiba			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.040.000,00	13.040.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Rojoimo			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	37.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Kantor Yang Terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.057.040,00	129.557.040,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.800.000,00	403.800.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	

Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0010 Kelurahan Kramatan			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Kantor Yang Terfasilitasi			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.986.565,00	96.101.765,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	22.884.800,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyrakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.250.000,00	409.250.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	53.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0011 Kelurahan Tawangsari			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.544.000,00	5.830.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.520.474,00	9.234.474,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.872.240,00	116.872.240,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Prosentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.732.054,00	268.732.054,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiban Umum tingkat Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.800.595,00	56.800.595,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.108.110,00	6.108.110,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0012 Kelurahan Jaraksari			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.404.693,00	6.404.693,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.264.000,00	15.264.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.176.000,00	14.176.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktiû tas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.897.760,00	111.897.760,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.202.000,00	643.202.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			

Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0013 Kelurahan Bumireso			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktiû tas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.220.000,00	12.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.684.160,00	112.684.160,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.080.000,00	40.080.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.600.000,00	324.600.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.692.500,00	35.692.500,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konûik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiba			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wonosobo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0014 Kelurahan Kalianget			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.061.100,00	6.061.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.818.900,00	12.818.900,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan nilai komponen kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.097.760,00	172.097.760,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase lembaga Masyarakat Aktif persentase kenaikan BUMDes rintisan menjadi BUMDes dengan status berkembang Persentase kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi Persentase kenaikan desa / kelurahan yang memiliki lembaga pengelola sampah 3R yang aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.800.000,00	437.800.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konûik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiba			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kertek			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kertek			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			

Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.783.969.440,00	3.520.817.708,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.040.000,00	117.040.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.820.569,00	17.820.569,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: persentase kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedia Persentase kenaikan desa yang melakukan verval data secara kontinyu Persentase penurunan kasus pernikahan usia anak nilai rata-rata persepsi pelayanan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	82.200.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk penanggulangan bencana Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk pengelolaan sampah Persentase kenaikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	44.250.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000,00	80.500.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase Pembinaan LINMAS dan RPB, Fasilitasi Kegiatan Patroli Wilayah, dan Fasilitasi Kegiatan Pemilu dan Pilkada			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.725.000,00	42.725.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase pelanggaran pilkades yang terselesaikan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase kenaikan ZIS Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.000.000,00	106.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar Persentase kenaikan Indeks ketahanan ekonomi IDM			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi dasar Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBDes Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.291.000,00	45.291.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.470.000,00	47.470.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kertek			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Kertek			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pelayanan Administrasi Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.044.275,00	2.044.275,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.551.499,00	12.551.499,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.813.100,00	27.813.100,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Kantor Yang Terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.000,00	290.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	12.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.760.000,00	53.760.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Sarpras Kantor Dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyrakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.823.950,00	12.823.950,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.034.400,00	486.434.400,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.923.000,00	51.326.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.524.000,00	41.124.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	23.747.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kertek			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Wringinanom			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Komponen Instalasai Penerangan Bangunan Kantor,Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,Cakupan Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.531.279,00	5.531.279,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	1.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.776.719,00	1.776.719,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.724.000,00	5.724.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Jasa Surat Menyurat,Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik Jumlah Pegawai Yang Menerima Jasa Pelayanan Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.840.000,00	107.840.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Sarpras Kantor Dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.287.625,00	12.287.625,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.136.600,00	270.136.600,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	

Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian Pelanggaran,Kebencanaan,Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.444.000,00	41.444.000,00	

Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Indikator Keluaran	: Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.199.500,00	19.199.500,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Selomerto
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Selomerto
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Kegiatan Pertemuan / Rapat
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.483.400.576,00	2.915.622.911,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terealisasinya Pembayaran Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.937.950,00	6.937.950,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.296.000,00	10.296.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.070.000,00	10.070.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terealisasinya Kegiatan Surat Menyurat			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	23.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.090.000,00	107.090.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tercukupinya Pemeliharaan Fasilitas Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Pramusrenbangdesa atau Kelurahan yang Di Selenggarakan tepat Waktu			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Realisasi Kegiatan Pramusrenbang Tepat Waktu			

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.950.000,00	24.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Persentase penerbitan dokumen non perizinan sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.045.350,00	10.045.350,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Terealisasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase kenaikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif Terealisasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.416.100,00	40.416.100,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Partisipasi Keluarga dalam Peningkatan Sumberdaya Perempuan Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.211.040,00	83.211.040,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase FKUB aktif Persentase FKUB yang aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.005.669,00	36.005.669,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan permberdayaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.242.890,00	115.137.890,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Laporan Kegiatan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.893.700,00	38.048.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Selomerto			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Selomerto			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	10.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.303.136,00	177.703.136,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.860.000,00	74.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.493.610,00	339.893.610,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	58.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	3.500.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan.			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Selomerto			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Wonorejo			

Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.020.290,00	5.020.290,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.880.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.387.072,00	140.507.072,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.941.312,00	2.941.312,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif Presentase Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.678.000,00	9.678.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.561.296,00	253.561.296,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.175.465,00	62.175.465,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Presentase Kenaikan ZIS			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.944.000,00	22.944.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai amanat peraturan perundang - undangan yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	22.650.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Leksono
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Leksono
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.394.478.353,00	2.227.992.303,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.080.000,00	41.080.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.220.000,00	90.220.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Pelaporan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan koordinasi/sinergi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan yang tertangani dibagi target jumlah layanan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebancanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.250.000,00	79.250.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan.			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.750.000,00	118.750.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Pelaporan pertanggungjawaban kinerja desa tepat waktu			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawabankinerja tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Leksono			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Leksono			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Yang Terlayani			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Yang Terlayani			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Aset Kelurahan dalam Kondisi baik Sarpras pendukung Kinerja terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.700.000,00	37.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Aset Kelurahan dalam Kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: persentase kenaikan BUMDes rintisan menjadi BUMDes dengan status berkembang Persentase kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif Presentase Lembaga Masyarakat Aktif Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Presentase Lembaga Masyarakat yang Terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.450.000,00	429.450.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasaan Kepala Daerah yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Watumalang			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Watumalang			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.477.569.814,00	2.303.148.338,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	30.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	9.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	89.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	64.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	

Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	46.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan Prasarana pelayanan umum (sekolah SD/ SMP, Puskesmas) dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Informasi Wajib yang Tersedia Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan Persentase Kenaikan Jumlah Informasi Wajib yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	68.500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi kegiatan Kesehatan dan Pendidikan Fasilitasi pembinaan BumDes/ UMKM/ BankeuDes Fasilitasi pertemuan keluarga FSG Disabilitas			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	67.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase konflik antar kelompok/desa/keluraha n yang terselesaikan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi PEMILU dan PILKADA Kegiatan Forkompimcam Pembinaan LINMAS dan RELAWAN Persentase konflik antar kelompok/desa/keluraha n yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	33.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi), KerukunanAntar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya GunaMewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Fasilitasi LOMBA MASJID			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	139.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata PemerintahanDesa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBDes			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	61.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Watumalang			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Wonoroto			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktiû tas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.040.000,00	76.040.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	

Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.243.445,00	307.243.445,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.760.000,00	61.760.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang Didukung Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mojotengah			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mojotengah			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: - Cakupan pelayanan administrasi perkantoran - Persentase pemenuhan sarpras pendukung lainnya			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.764.610.476,00	3.612.631.138,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.704.600,00	12.704.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kinerja aparatur dan layanan pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	340.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.300.000,00	30.630.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	111.120.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa pemeliharaan sarpras kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: - Cakupan desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu - Meningkatnya sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.996.270,00	27.996.270,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.800.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Layanan Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.816.249,00	4.726.249,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.300.000,00	27.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Pelanggaran,Kebencanaan,Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase Konflik antar Kelompok / Desa / Kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.072.081,00	32.072.081,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang di dukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.932.663,00	105.956.294,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: - Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa - Terlaksananya Pilkades - Tersusunnya APBDes			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.143.660,00	23.143.660,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.023.631,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.739.696,00	21.739.696,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mojotengah			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Kalibeber			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi pelayanan kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	6.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya produktivitas kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.200.000,00	140.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Jasa sarpras kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	7.660.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan lembaga masyarakat aktif Jumlah pelaksanaan Musrenbang			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.567.419,00	420.457.419,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok /desa/kelurahan yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mojotengah			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0003 Kelurahan Mudal			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Adminisrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	1.380.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	8.850.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	7.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.720.000,00	101.720.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor Yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif Jumlah Pelaksanaan Musrenbang			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.000,00	429.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	574.472.000,00	424.571.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.102.200,00	409.102.200,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.228.654,00	65.228.654,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan Pemilu			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.720.000,00	24.720.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Rasa Cinta tanah Air Yang Didukung Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0006 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mojotengah			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Andongsili			

Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.230.000,00	8.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.000,00	770.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	3.850.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.440.000,00	15.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.740.000,00	89.740.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jasa Sarana Prasarana Kantor yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.092.887,00	3.092.887,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan lembaga masyarakat aktif Jumlah pelaksanaan Musrenbang			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.544.800,00	324.544.800,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok /desa/kelurahan yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang Didukung Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Garung			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Garung			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: perencanaan dan evaluasi kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.738.049.163,00	2.731.278.189,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	28.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	76.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	44.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	12.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Cakupan desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Layanan administrasi kependudukan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok / desa / kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Presentase Desa yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan tepat waktu			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

Indikator Keluaran	: Tersusunnya APBDES			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	27.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	17.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Garung			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Garung			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan adminitrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: meningkatnya Kinerja Aparatur dan layanan Pemerintah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya produktifitas kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	6.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.329.600,00	103.329.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Jasa Pemeliharaan Sarpras kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentasi lembaga Masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.122.080,00	392.122.080,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	39.900.000,00	

Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Indikator Hasil	: Presentase penyelesaian pelanggan Ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator Keluaran	: Presentase Konflik antar kelompok desa/kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	

Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Indikator Keluaran	: Meningktanya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kabangsaan
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kejajar
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kejajar
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disetujui Kabupaten
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.659.886.333,00	3.585.104.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	1.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.396.390,00	1.396.390,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.603.610,00	43.603.610,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.056.000,00	19.056.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.200.000,00	125.200.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan desa yang melakukan verval data secara kontinyu Persentase penurunan kasus pernikahan usia anak Nilai Rata rata Persepsi Pelayanan nilai rata-rata persepsi pelayanan Presentase kenaikan nilai SKM Persentase Kenaikan Nilai SKM			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: [deleted] Persentase desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional Persentase Desa dan Kelurahan dengan Skala Prioritas usulan 3 Aspek (Ekonomi, Sosial dan Infrastruktur) secara Proporsional Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik Persentase sarana dan Prasarana pelayanan umum (sekolah SD/ SMP, Puskesmas) dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: [deleted] Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Persentase Dokumen Non Perizinan yang Diterbitkan Persentase penerbitan dokumen non perizinan sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan			

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: kegiatan PKK yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	60.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.301.971,00	12.301.971,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase pelanggaran pilkades yang terselesaikan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase kenaikan ZIS Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0006 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	19.500.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang Menerapkan Kebijakan Padat Karya dalam Pembangunan Desa Persentase kenaikan Indeks ketahanan ekonomi IDM			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi dasar Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBDes Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	22.473.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.507.859,00	31.051.859,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.483.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kejajar			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan kejajar			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Capaian Pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.894.000,00	4.894.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.106.000,00	3.106.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.580.000,00	8.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.760.000,00	21.760.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.139.549,00	294.139.549,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.776.877,00	188.776.877,00	

Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Pelanggaran, Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelnggaraan Urusan Pemerintahan Umum Susai Penugasan Kepala Daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kalikajar			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kalikajar			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Prosentase Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan , Dokumen Evaluasi, Dan Laporan KeuanganTepat Waktu			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.508.561.851,00	2.208.263.549,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.820.000,00	89.820.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	40.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	3.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: persentase kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedia			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya keterbukaan informasi publik			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	5.560.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya keterbukaan informasi publik			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.040.000,00	58.040.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Desa persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap permberdayaan PKK di Tingkat Desa dan Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	76.500.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase konflik antar kelompok/desa/keluraha n yang terselesaikan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase pelanggaran tramtibum yang terlaporkan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	45.400.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

Indikator Hasil	: Persentase pelanggaran tramtibum yang terlaporkan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keamanan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	99.500.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jumlah desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.550.000,00	55.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.825.000,00	8.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	5.625.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kalikajar			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Kalikajar			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Persentase Paket Komponen Instalasi Listrik Yang disediakan Persentase Alat Tulis Kantor Yang disediakan			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase Penyediaan Sarana Prasarana Kerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase Pemenuhan Sarana prasarana pendukung Kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.553.600,00	71.553.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi Prosentase Asset Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.132.913,00	398.972.913,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Gangguan dan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.069.042,00	26.069.042,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase pelanggaran pilkades yang terselesaikan Persentase Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.320.811,00	25.480.811,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sapuran			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sapuran			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: presentase laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: presentase laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.747.853.876,00	2.609.164.440,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pendukung Kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.595.100,00	16.595.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.150.000,00	30.150.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.980.000,00	93.980.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.075.400,00	7.075.400,00	

Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Layanan Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	43.400.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	225.000.000,00	

Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan PKK
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	76.000.000,00	

Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator Keluaran	: Persentase konûik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiba
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.440.500,00	62.440.500,00	

Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator Hasil	: persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	151.600.000,00	

Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang telah Dilakukan
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.559.500,00	11.559.500,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sapuran			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Sapuran			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.612.000,00	6.612.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.655.000,00	1.655.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.607.828,00	1.607.828,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.855.000,00	1.855.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.540.000,00	9.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.445.000,00	2.445.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang di laksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.395.030,00	453.395.030,00	

Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.240.142,00	95.240.142,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase GangguanKetrentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Kegiatan Upaya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Telah dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kepil			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kepil			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.784.238.071,00	2.634.986.018,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.581.598,00	21.581.598,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.960.000,00	50.960.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Desa Yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Penanganan Anak tidak sekolah, Fasilitasi Penanganan Disabilitas, Fasilitasi Penanganan Kenakalan remaja, Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak, Fasilitasi Desa Siaga, Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan rakor Desa Cantik, Pembinaan Bumdes, lomba Desa, pembinaan UMKM, pembinaan ODF, RTLH, Pembinaan UKS Pembinaan Perpustakaan , Fasilitasi Forum Kesehatan Desa, Pembinaan karang taruna Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi PKK Kecamatan Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman, dan Ketertiban umum tingkat kecamatan			

Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan dan Ketertiban Umumtingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan Persentase ZIS Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan/jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000,00	116.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas perangkat desa Terlaksananya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Terlaksananya Pilkades			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kepil			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Kepil			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrassi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	690.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	990.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	10.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.600.000,00	137.600.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Sarpras Kantor Yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	890.000,00	890.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.130.000,00	1.130.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Presentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Presentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.626.000,00	787.286.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Terselesaikanya Konflik Antar Kelompok Desa/Kelurahan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.504.000,00	21.504.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan kaliwiro			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan kaliwiro			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja Pelaporan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Laporan Perencanaan Tepat Waktu Pelaporan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan gaji dan tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.261.198.636,00	2.284.746.891,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.533.785,00	17.533.785,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Mebel Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.340.000,00	23.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.590.376,00	131.590.376,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentasi Aset Kecamatan dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	55.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: persentase kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedia Jumlah Musrenbang Kecamatan yang di selengggarakan tepat waktu nilai rata-rata persepsi pelayanan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan Persentase IKM Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk penanggulangan bencana Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	92.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			

Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	64.500.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan kaliwiro			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.12.0002 Kelurahan Kaliwiro			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	15.360.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan umum Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	9.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.730.000,00	112.730.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase lembaga masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.927.390,00	10.927.390,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.111.200,00	376.111.200,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.023.000,00	30.023.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: jumlah patroli wilayah penegakan Perda Perkada			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.064.800,00	26.064.800,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penurunan angka pelanggaran			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.365.700,00	32.365.700,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Wadaslintang			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Wadaslintang			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.467.011.304,00	2.340.028.754,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum Rentang Waktu Pelaksanaan Kegiatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.268.773,00	32.568.773,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.711.226,00	21.711.226,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	85.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	65.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	127.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: nilai rata-rata persepsi pelayanan persentase kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedia Persentase penurunan kasus pernikahan usia anak nilai rata-rata persepsi pelayanan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Pelayanan Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

Indikator Hasil	: persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana Fasilitasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Faisilitasi penanganan Disabilitas Fasilitasi penanganan kenakalan remaja fasilitasi penanganan pernikahan anak fasilitasi desa siaga jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan rakor desa cantik pembinaan bumdes lomba desa pembinaan UMKM Pembinaan ODF RTLH Pembinaan UKS pembinaan perpustakaan fasilitasi forum kesehatan desa
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	

Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Indikator Keluaran	: undefined
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	

Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	

Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator Hasil	: Persentase pelanggaran pilkades yang terselesaikan
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Jumlah pelanggaran pemilu yang terselesaikan/ jumlah pelanggaran pemilu yang ada) x 100% persentase kenaikan ZIS Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar prosentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase kenaikan Indeks ketahanan ekonomi IDM			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi dasar Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBDes Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Wadaslintang			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.13.0002 Kelurahan Wadaslintang			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Rentang Waktu Pelaksanaan Kegiatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Rentang Waktu Pelaksanaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang di Sediakan Rentang Waktu Pelaksanaan Kegiatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.487.000,00	9.487.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.856.000,00	97.856.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Rentang Waktu Pelaksanaan Kegiatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.144.000,00	3.144.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.513.000,00	482.513.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Rentang Waktu Pelaksanaan Kegiatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	68.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesi, tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal diwilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sukoharjo			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sukoharjo			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan avaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kinerja ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.891.267.648,00	1.796.156.007,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Pelayanan Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	65.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa pemeliharaan Sarpras kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	7.500.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Layanan admnistrasi kependudukan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan PKK			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan keteriban umum di Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	

Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pilkades			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kalibawang			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kalibawang			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.488.123.201,00	1.428.389.752,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	12.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Aset kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.211.276,00	34.211.276,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.796.160,00	16.796.160,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Cakupan Desa Yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan Prasarana pelayanan umum dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Layanan Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Lembaga Masyarakat Aktif			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	

Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Fasilitasi PKK Kecamatan Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman, dan Ketertiban umum tingkat kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan dan Ketertiban Umumtingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase ZIS Kecamatan Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan/jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas perangkat desa Terlaksananya Pilkades			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD			
Kegiatan	: 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang DIsusun Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.610.022.971,00	2.449.660.272,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.820.000,00	53.820.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	150.000.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	86.000.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	20.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.000.000,00	237.000.000,00	

Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000.000,00	2.024.590.000,00	

Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik yang Tersusun
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.000.000,00	1.077.508.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	30.788.557.800,00	31.621.935.800,00	

Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Indikator Hasil	: Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Tersusun
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	1.270.000.000,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	175.000.000,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	670.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	350.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.823.700,00	549.000.700,00	

PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.638.425.549,00	98.025.712.685,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.620.530.749,00	98.025.712.685,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	12.017.894.800,00	0,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.080.000.000,00	7.377.382.835,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.080.000.000,00	7.377.382.835,00	

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 23 September 2024

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68.64 angka											
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000.000,00	395.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
3	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	467.330.528.482,00	487.606.775.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.330.528.482,00	487.606.775.453,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
4	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	70.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350.000.000,00	368.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	368.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %											
11	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
13	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %											
15	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
16	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
18	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
19	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
20	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
21	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	774.649.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.649.998,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
22	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	792.849.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.849.998,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %											
23	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
24	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
25	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
26	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
27	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	289.400.000,00	239.400.000,00	210.600.000,00	210.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs Persentase warga negara usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar Persentase sekolah ramah anak Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani Persentase PAUD (TK/RA/KB/SPS) yang terakreditasi APK PAUD 3-6 tahun Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100 % 100.00 % 21.00 % 23.00 % 28.00 % 35.00 % 36.31 % 61.52 % 68.00 % 77.07 % 77.11 % 79.09 % 80.13 % 82.84 % 94,04 % 97.95 % 99.49 %											
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100 %											
28	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	0,00	629.799.000,00	608.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.799.000,00	608.249.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
29	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	0,00	0,00	1.459.732.000,00	1.401.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.732.000,00	1.401.508.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
30	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	750.000,00	1.400.000,00	1.430.285.000,00	1.178.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.035.000,00	1.180.303.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
31	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	208.800.000,00	211.200.000,00	1.441.200.000,00	1.638.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	1.850.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
32	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	150.000,00	150.000,00	900.415.000,00	848.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.565.000,00	848.674.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
33	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	111.134.000,00	103.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.134.000,00	103.066.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
34	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	450.000,00	850.000,00	301.013.000,00	280.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.463.000,00	281.407.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
35	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
36	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	9 Paket	0,00	501.050.000,00	0,00	298.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
37	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	14 Paket	0,00	1.850.000,00	0,00	990.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.741.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
38	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	1.500.000,00	0,00	198.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
39	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	4.898.800.000,00	4.429.400.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898.800.000,00	4.429.400.728,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
40	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	16 Paket	100.300.000,00	0,00	1.549.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
41	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	22 Paket	0,00	146.700.000,00	0,00	1.735.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
42	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
43	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	205 Orang	3.341.458.440,00	3.341.458.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341.458.440,00	3.341.458.440,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000.000,00	255.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
45	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	460 Satuan Pendidikan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
46	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	460 Satuan Pendidikan	48.348.709.186,00	46.211.924.172,00	11.888.690.814,00	14.029.594.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.237.400.000,00	60.241.518.249,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
47	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	460 Orang	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
48	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar													
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	3.999.464.000,00	3.568.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999.464.000,00	3.568.081.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
49	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
50	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	128 Ruang	558.750.000,00	215.700.000,00	1.291.250.000,00	1.434.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000.000,00	1.650.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
51	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	33 Unit	450.000,00	450.000,00	461.114.000,00	461.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.564.000,00	461.564.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
52	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	460 Satuan Pendidikan	86.095.800,00	86.095.800,00	83.904.200,00	83.904.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
53	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	346.432.000,00	360.382.000,00	5.656.688.000,00	5.704.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003.120.000,00	6.064.783.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (APK) SMP/MTs/Paket B	94.04 %											
54	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
56	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
57	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium													
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	595.000.000,00	563.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000.000,00	763.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
58	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula													
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir													
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	750.000.000,00	924.589.000,00	1.075.000.000,00	1.275.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.000.000,00	2.200.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
61	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	217.788.980,00	220.588.980,00	2.943.786.020,00	2.940.986.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.575.000,00	3.161.575.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
62	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
63	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0,00	0,00	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000.000,00	535.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
64	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium													
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	0,00	0,00	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000.000,00	640.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
65	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula													
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
66	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
67	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
68	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
69	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	8 Paket	0,00	100.000.000,00	0,00	435.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.500.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
70	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	0,00	0,00	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
71	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	2.128.500.000,00	2.597.899.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.500.000,00	2.597.899.272,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
72	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	7 Paket	0,00	0,00	384.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.625.000,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
73	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9 Paket	0,00	250.000.000,00	0,00	384.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.625.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
74	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
75	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	163 Orang	2.526.000.000,00	2.526.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.000.000,00	2.526.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
76	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	231.000.000,00	381.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000.000,00	381.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
77	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	107 Satuan Pendidikan	535.650.000,00	635.650.000,00	249.350.000,00	249.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000.000,00	885.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
78	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	107 Satuan Pendidikan	29.973.539.831,00	28.230.219.343,00	4.232.350.169,00	6.000.567.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.205.890.000,00	34.230.787.125,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
79	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	107 Orang	71.766.000,00	71.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.766.000,00	71.766.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
80	1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU													
			Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	600.000,00	600.000,00	1.739.400.000,00	1.739.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000.000,00	1.740.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
81	1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah													
			Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0,00	0,00	400.375.000,00	400.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.375.000,00	400.375.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
82	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	107 Satuan Pendidikan	0,00	185.958.500,00	0,00	84.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
83	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	107 Satuan Pendidikan	85.958.500,00	0,00	84.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
84	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	525.000.000,00	350.000.000,00	750.000.000,00	727.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000.000,00	1.077.500.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
85	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0,00	0,00	624.425.000,00	624.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.425.000,00	624.425.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Anak Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	77.07 %											
86	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
87	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD													
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
88	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
89	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
90	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD													
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
91	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD													
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
92	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD													
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
93	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD													
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
94	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900.000,00	33.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
95	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
96	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
97	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5500 Peserta Didik	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
98	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	283 Orang	2.555.000.000,00	2.555.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.000.000,00	2.555.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
99	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
100	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD													
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidikan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
101	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	665 Satuan Pendidikan	15.396.637.370,00	15.396.637.370,00	44.962.630,00	44.962.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441.600.000,00	15.441.600.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD
102	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
103	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	717.877.000,00	717.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.877.000,00	717.877.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
104	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	454 Orang	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan) belas tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menegah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	77.11 %											
105	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	42 Unit	0,00	6.805.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
106	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	46 Unit	7.355.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
107	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
109	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	4.745.985.400,00	4.745.985.400,00	89.634.600,00	89.634.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.620.000,00	4.835.620.000,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
110	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
111	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
112	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
113	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
114	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Peserta Didik	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
115	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
116	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	0,00	425.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
117	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
118	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah jenjang pendidkan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal Persentase sekolah yang melaksanakan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100 %											
119	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	567 Orang	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-											
120	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal													
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio ketercukupan guru SMP Rasio kecukupan guru kelas SD	0.96 angka 1.00 angka											
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Calon Kepala Sekolah yang mengikuti seleksi	20 angka											
121	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-											
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-											
122	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
123	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
124	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
125	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda Persentase organisasi pemuda yang aktif	0,0463 % 2,10 % 80 %											
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda berprestasi	0.046 %											
126	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor													
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	37 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
127	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula													
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
128	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	750 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
129	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi													
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
130	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda													
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-											
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
131	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha													
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
132	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	16 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
133	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 Unit	197.600.000,00	329.870.000,00	11.022.400.000,00	10.928.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.000.000,00	11.258.120.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase atlet berprestasi	5.79 %											
134	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	910.000.000,00	1.071.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000.000,00	1.071.880.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	96 %											
135	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	100 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	96 %											
136	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	13 Organisasi	0,00	3.860.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
137	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	13 Organisasi	1.270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	15 %											
138	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
139	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	5,79 %											
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	5.79 %											
140	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Dinas Kesehatan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	100 % 88.33 %											
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
141	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase realisasi Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase realisasi belanja administrasi umum	100 % 100 %											
142	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	867 Orang/bulan	58.068.858.729,00	58.606.010.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.068.858.729,00	58.606.010.893,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase realisasi belanja administrasi umum	100 %											
143	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
144	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	57.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
145	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
146	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
147	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
148	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	164.000.000,00	200.407.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000.000,00	200.407.924,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase realisasi pemenuhan belanja barang milik daerah thd rencana kebutuhan tahunan	100 %											
149	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	110.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase realisasi pemenuhan belanja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
150	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	115.830.000,00	109.456.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.830.000,00	109.456.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
151	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	657.000.000,00	631.965.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000.000,00	631.965.276,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
152	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
153	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
154	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
155	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
156	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
157	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Rasio bed rawat inap per satuan penduduk Persentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) Persentase puskesmas dengan layanan pendaftaran online Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase desa ODF Persentase orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar Persentase sarana air minum yang sesuai standar Persentase penduduk usia produktif (15-59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar SPM Indeks Kepuasan Pelanggan Labkesda Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas Persentase orang berisiko HIV yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin operasional Cakupan jaminan kesehatan masyarakat miskin Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	0.18 % 0.72 angka 100 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 37.16 % 37.50 % 5.00 % 62.59 % 75.00 % 79.65 % 80.00 % 83.67 % 85.1 % 86.29 % 87.00 angka 88.00 % 88.33 % 9.72 % 98.46 % 98.58 % 98.63 % 98.78 % 99.40 % 99.91 %												
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	86 %											
158	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas													
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
159	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	1.810.314.608,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.314.608,00	200.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
160	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
161	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas													
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
162	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
163	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit	2.250.000,00	750.000,00	597.750.000,00	599.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
164	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
165	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	6.313.298.944,00	8.450.800.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328.298.944,00	8.465.800.532,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok
166	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi													
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	20 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
167	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	40.679.000,00	40.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.679.000,00	40.679.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
168	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	8.741.248.900,00	10.505.121.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741.248.900,00	10.505.121.291,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
169	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Paket	150.410.700,00	150.410.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.410.700,00	150.410.700,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	AFP Non Polio per 100.000 penduduk <15 tahun Angka keberhasilan pengobatan penderita TBC (sucses rate) (%) Cakupan balita mendapat vitamin A Cakupan K1 (%) Cakupan K4 (%) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) (%) Cakupan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita (D/S) Cakupan pemberian PMT pada balita gizi kurang Cakupan pemberian PMT pada ibu hamil KEK Cakupan pemberian tamblet Fe pada ibu hamil Persentase anak sekolah yang dimunisasi campak Persentase anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase caries gigi pada anak Persentase kasus kusta baru tanpa cacat Persentase ODGJ berat yang bebas pasung Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat ARV Persentase penduduk dengan akes jamban sehat Persentase penemuan penderita diare Persentase penemuan pneumonia pada balita Persentase penyehat tradisional yang terdaftar dan memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Persentase Posbindu Aktif Persentase Pos Lansia yang aktif Persentase puskesmas yang diakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan GERMAS Prevalensi penderita DBD per 100.000 penduduk Persentase kasus gawat darurat terpadu yang ditangani dengan SPGDT	2 % 90 % 100 % 100 % 98 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 % 99 % 98 % 100 % 13 % 15 % 99.5 % 55 % 75 % 80 % 75 % 27.5 % 99.5 % 100 % 100 % 100 % <25 angka 100 %										
170	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13103 Orang	240.420.000,00	240.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.420.000,00	240.420.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
171	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12508 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
172	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11912 Orang	224.261.695,00	224.261.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.261.695,00	224.261.695,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
173	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58156 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
174	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
175	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	355.000 Orang	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
176	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	104807 Orang	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
177	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
178	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	582.950.000,00	582.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.950.000,00	582.950.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
179	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400.000,00	98.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
180	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11738 Orang	1.308.388.000,00	1.308.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.388.000,00	1.308.388.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
181	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	447.406.800,00	447.406.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.406.800,00	447.406.800,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
182	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	310.300.000,00	310.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.300.000,00	310.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
183	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
184	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	7.834.345.000,00	7.856.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834.345.000,00	7.856.845.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
185	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	2.339.793.850,00	2.339.793.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.793.850,00	2.339.793.850,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
186	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20 Dokumen	687.722.000,00	889.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.722.000,00	889.722.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
187	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
188	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24 Dokumen	166.365.000,00	166.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.365.000,00	166.365.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
189	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	48 Orang	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940.000,00	11.940.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
190	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6 Dokumen	1.071.985.630,00	1.071.985.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.985.630,00	1.071.985.630,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
191	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	0,00	36.462.781.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.462.781.523,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Pajak Rokok
192	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	34.911.607.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.911.607.047,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
193	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah													
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
194	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	8 Paket	19.053.000,00	19.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.053.000,00	19.053.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
195	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
196	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
197	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
198	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
199	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	11 Dokumen	183.050.498,00	183.050.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.050.498,00	183.050.498,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
200	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0 Unit	500.000.000,00	545.000.000,00	0,00	1.610.314.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	2.155.314.608,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
201	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
202	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
203	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	179.750.000,00	179.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.750.000,00	179.750.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
204	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	132.283.420,00	132.283.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.283.420,00	132.283.420,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal	100 %											
205	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	83.000.000,00	83.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ijin	100 %											
206	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
207	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit	100.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	95.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk) Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk) Persentase puskesmas Yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	2,02 % 2,02 angka 36.27 %											
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin	95.5 %											
208	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	100 %											
209	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
210	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	100.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	60.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
211	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6 Dokumen	167.920.300,00	167.920.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.920.300,00	167.920.300,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	100 angka											
212	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	863.671.005,00	863.671.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.671.005,00	863.671.005,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT) Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat	77.5 % 83.71 % 93.84 % 97.00 %											
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, dan toko alat kesehatan yang memiliki ijin	100 %											
213	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0 Dokumen	155.179.980,00	155.179.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.179.980,00	155.179.980,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang memiliki SPP-PIRT	86 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
214	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0 Dokumen	701.070.000,00	776.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.070.000,00	776.070.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM dam DAM yang memiliki sertifikat Laik Higiene	77.5 %											
215	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0 Dokumen	54.065.000,00	54.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.065.000,00	54.065.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah penjual jajan anak sekolah dan PKL yang memperoleh pembinaan	30 angka											
216	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sampel makanan yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan	93 %											
217	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan													
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0 Unit	305.364.500,00	305.364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.364.500,00	305.364.500,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase makanan yang mengandung bahan berbahaya	22.99 %											
218	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	70.160.000,00	70.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.160.000,00	70.160.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase FKD Aktif Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kader posyandu Prosentase puskesmas yang melakukan refresing kades poskestren	96.5 % 100 % 70 %											
219	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16 Dokumen	223.782.580,00	448.706.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.782.580,00	448.706.960,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Puskesmas Wonosobo 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengunjung puskesmas yang dilayani	100 %											
220	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.452.263.640,00	3.350.805.358,00	47.736.360,00	830.066.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	4.180.871.718,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
221	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
222	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225 Orang	12.610.000,00	12.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610.000,00	12.610.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
223	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
224	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	836 Orang	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080.000,00	25.080.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
225	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
226	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
227	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
228	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	27 Orang	3.579.900,00	3.579.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579.900,00	3.579.900,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
229	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	360 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
230	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	235 Dokumen	221.725.000,00	221.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.725.000,00	221.725.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
231	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
232	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	113 Dokumen	6.619.800,00	6.619.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619.800,00	6.619.800,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
233	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
234	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	82 Dokumen	63.149.800,00	63.149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.149.800,00	63.149.800,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
235	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
236	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	777 Dokumen	49.929.600,00	49.929.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929.600,00	49.929.600,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
237	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
238	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	258 Dokumen	231.990.000,00	231.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.990.000,00	231.990.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
239	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	29 Laporan	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
240	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
241	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
242	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	71 Dokumen	76.923.000,00	76.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.923.000,00	76.923.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
243	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	532 Dokumen	127.410.000,00	127.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.410.000,00	127.410.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun	1 Sistem											
244	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6 Dokumen	6.003.200,00	6.003.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003.200,00	6.003.200,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga PBHS	100% Keluarga											
245	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	73 Dokumen	92.879.700,00	92.879.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.879.700,00	92.879.700,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Kertek 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase pengunjung puskesmas yang dilayani	100 %											
246	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.434.270.000,00	2.920.369.146,00	38.000.000,00	71.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.270.000,00	2.991.581.146,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
247	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 Orang	30.960.000,00	30.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960.000,00	30.960.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
248	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	11.275.000,00	11.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275.000,00	11.275.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
249	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
250	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
251	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	28.290.000,00	28.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290.000,00	28.290.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
252	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
253	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
254	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
255	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	70 Orang	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
256	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
257	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13 Dokumen	126.951.000,00	126.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.951.000,00	126.951.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
258	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
259	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13 Dokumen	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00	7.980.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
260	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
261	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13 Dokumen	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920.000,00	16.920.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
262	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
263	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	165.864.000,00	165.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.864.000,00	165.864.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
264	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
265	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	153.742.000,00	153.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.742.000,00	153.742.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
266	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
267	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
268	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
269	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
270	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	34.405.000,00	34.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.405.000,00	34.405.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
271	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	13 Dokumen	148.020.000,00	148.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.020.000,00	148.020.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sistem Informasi Puskesmas yang terbangun	1 sistem											
272	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase keluarga PHBS	100 Keluarga											
273	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	165.870.000,00	165.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.870.000,00	165.870.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Selomerto 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88,33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang Terlayani	100 %											
274	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.829.517.099,00	5.322.711.118,00	195.300.000,00	170.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024.817.099,00	5.493.011.118,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
275	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	432 Orang	20.040.000,00	20.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040.000,00	20.040.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
276	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	423 Orang	27.942.000,00	27.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.942.000,00	27.942.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
277	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
278	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4614 Orang	34.920.000,00	34.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920.000,00	34.920.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
279	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
280	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
281	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
282	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
283	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	631 Orang	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
284	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	177.430.000,00	177.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.430.000,00	177.430.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
285	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
286	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590.000,00	7.590.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
287	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
288	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.299.000,00	19.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.299.000,00	19.299.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
289	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
290	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	122.880.000,00	122.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.880.000,00	122.880.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
291	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	19 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
292	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	273.262.000,00	273.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.262.000,00	273.262.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
293	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
294	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14 Orang	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
295	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	631 Orang	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
296	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480.000,00	18.480.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
297	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	86.700.000,00	86.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700.000,00	86.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi puskesmas yang terbangun	1 sistem											
298	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12.077.000,00	12.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077.000,00	12.077.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga PHBS	100% keluarga											
299	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470.000,00	16.470.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Leksono 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengunjung yang dilayani di Puskesmas	100 %											
300	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.237.799.200,00	1.433.388.728,00	12.700.800,00	49.700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.500.000,00	1.483.089.528,00	Pendapatan dari BLUD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
301	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	317 Orang	135.972.000,00	135.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.972.000,00	135.972.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
302	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	312 Orang	3.443.000,00	3.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.000,00	3.443.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
303	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2986 Orang	11.702.000,00	11.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.702.000,00	11.702.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
304	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	371 Orang	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
305	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
306	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	129.779.000,00	129.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.779.000,00	129.779.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
307	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
308	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	29.964.000,00	29.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964.000,00	29.964.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
309	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	44.605.000,00	44.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.605.000,00	44.605.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
310	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	403.390.000,00	403.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.390.000,00	403.390.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
311	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
312	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
313	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
314	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5.032.000,00	5.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032.000,00	5.032.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
315	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	188.490.000,00	188.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.490.000,00	188.490.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal	6 Dokumen 100 %											
316	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga PHBS	100 %											
317	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	98.565.000,00	98.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.565.000,00	98.565.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Watumalang													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang Terlayani	100 %											
318	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.515.505.000,00	2.425.763.413,00	109.900.000,00	151.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.405.000,00	2.577.013.413,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
319	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	61.504.000,00	61.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.504.000,00	61.504.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
320	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	585 Orang	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840.000,00	13.840.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
321	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4226 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
322	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8636 Orang	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740.000,00	19.740.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
323	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58249 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
324	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6771 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
325	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
326	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	199 Orang	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320.000,00	10.320.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
327	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	543 Orang	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
328	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
329	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	232.922.000,00	232.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.922.000,00	232.922.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
330	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
331	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00	7.980.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
332	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
333	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	59.610.000,00	59.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.610.000,00	59.610.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
334	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
335	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	184.200.000,00	184.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.200.000,00	184.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
336	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	50 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
337	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	155.890.000,00	155.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.890.000,00	155.890.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
338	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
339	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
340	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
341	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	57 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
342	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
343	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800.000,00	106.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun	1 Sistem											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
344	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga PHBS	100 % Keluarga											
345	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	78.740.000,00	78.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740.000,00	78.740.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Mojotengah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
346	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	3.499.588.000,00	4.002.535.283,00	48.000.000,00	341.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547.588.000,00	4.344.385.283,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
347	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	375 Orang	86.640.000,00	86.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.640.000,00	86.640.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
348	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang	7.448.000,00	7.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448.000,00	7.448.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
349	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	411 Orang	12.090.000,00	12.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090.000,00	12.090.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
350	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	182 Orang	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
351	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
352	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	241.485.000,00	241.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.485.000,00	241.485.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
353	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340.000,00	11.340.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
354	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	18.510.000,00	18.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.510.000,00	18.510.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
355	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
356	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Dokumen	209.490.000,00	209.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.490.000,00	209.490.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
357	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
358	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	208.530.000,00	208.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.530.000,00	208.530.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
359	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
360	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
361	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84 Orang	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
362	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.220.000,00	26.220.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
363	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	9 Dokumen	134.490.000,00	134.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.490.000,00	134.490.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Puskesmas Yang Terbangun	1 Sistem											
364	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
365	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14 Dokumen	40.340.000,00	40.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.340.000,00	40.340.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Garung													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas Yang Terlayani	100 Persen											
366	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.443.139.815,00	3.826.893.525,00	464.965.185,00	267.947.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908.105.000,00	4.094.840.845,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas	100 %											
367	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	320 Orang	71.680.000,00	71.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.680.000,00	71.680.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
368	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	53.250.000,00	53.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250.000,00	53.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
369	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
370	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang	32.520.000,00	32.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520.000,00	32.520.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
371	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
372	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
373	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
374	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	568 Orang	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
375	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1111 Orang	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
376	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
377	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	125.800.000,00	125.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800.000,00	125.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
378	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
379	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
380	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
381	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	91.510.000,00	91.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.510.000,00	91.510.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
382	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
383	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	232.260.000,00	232.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.260.000,00	232.260.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
384	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
385	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	239.770.000,00	239.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.770.000,00	239.770.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
386	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
387	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64 Orang	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
388	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
389	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
390	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00	9.780.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
391	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	127.230.000,00	127.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.230.000,00	127.230.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun	1 Sistem											
392	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6 Dokumen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri	1.94 angka 26.41 angka 80 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga PHBS	100 % Keluarga											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
393	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	55.760.000,00	55.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.760.000,00	55.760.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Kejajar 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	100 % 88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
394	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.408.200.000,00	2.532.258.642,00	141.800.000,00	182.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000.000,00	2.714.758.642,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
395	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1230 Orang	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100.000,00	44.100.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
396	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282 Orang	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715.000,00	7.715.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
397	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
398	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	641 Orang	19.230.000,00	19.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230.000,00	19.230.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
399	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
400	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
401	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
402	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42 Orang	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
403	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
404	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
405	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8147 Dokumen	165.695.000,00	165.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.695.000,00	165.695.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
406	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
407	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	188 Dokumen	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
408	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
409	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	434 Dokumen	15.820.000,00	15.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820.000,00	15.820.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
410	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
411	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3567 Dokumen	111.135.000,00	111.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.135.000,00	111.135.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
412	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
413	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1631 Dokumen	211.428.000,00	211.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.428.000,00	211.428.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
414	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
415	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
416	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
417	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
418	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	36 Dokumen	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
419	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4276 Dokumen	103.980.000,00	103.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.980.000,00	103.980.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun	100 %											
420	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Keluarga PHBS	100 %											
421	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1112 Dokumen	31.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.310.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
422	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1112 Dokumen	0,00	31.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.310.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Kalikajar 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang dilayani	100 %											
423	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.991.469.900,00	2.297.015.326,00	12.300.000,00	11.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.769.900,00	2.308.055.326,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 85.1 % 88.33 % 9.72 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas	100 %											
424	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	490 Orang	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
425	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	41.270.000,00	41.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.270.000,00	41.270.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
426	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2961 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
427	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4136 Orang	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920.000,00	10.920.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
428	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22098 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
429	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4112 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
430	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
431	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	397 Orang	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
432	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	599 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
433	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	211.337.000,00	211.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.337.000,00	211.337.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
434	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
435	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17 Dokumen	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
436	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
437	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19 Dokumen	42.715.000,00	42.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.715.000,00	42.715.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
438	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
439	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	57.097.100,00	57.097.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.097.100,00	57.097.100,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
440	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	169.680.000,00	169.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.680.000,00	169.680.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
441	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	9 Laporan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
442	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
443	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
444	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	49 Dokumen	25.560.000,00	25.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560.000,00	25.560.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
445	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	105.456.000,00	105.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.456.000,00	105.456.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal	100 %											
446	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	499.400,00	499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.400,00	499.400,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga PHBS	100% keluarga											
447	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	97.812.500,00	97.812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.812.500,00	97.812.500,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Sapuran													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	100 % 86.56 % 88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang Terlayani	100 %											
448	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	3.592.500.000,00	4.800.568.147,00	207.500.000,00	271.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000.000,00	5.072.418.147,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 % 99.40 % 99.91 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
449	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204 Orang	23.713.000,00	23.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.713.000,00	23.713.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
450	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45 Orang	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
451	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
452	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500 Orang	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
453	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
454	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
455	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
456	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	45 Orang	8.515.000,00	8.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515.000,00	8.515.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
457	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
458	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
459	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	273.020.000,00	273.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.020.000,00	273.020.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
460	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
461	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
462	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
463	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	60.780.000,00	60.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780.000,00	60.780.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
464	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
465	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Dokumen	179.610.000,00	179.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.610.000,00	179.610.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
466	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
467	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	236.282.000,00	236.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.282.000,00	236.282.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
468	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
469	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
470	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25 Orang	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
471	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	17.743.000,00	17.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743.000,00	17.743.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
473	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8 Dokumen	41.664.000,00	41.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.664.000,00	41.664.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal	100 %											
474	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga PHBS	100 %											
475	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	19.385.000,00	19.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.385.000,00	19.385.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Kepil 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase pengunjung puskesmas yang dilayani	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
476	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.367.200.000,00	2.857.407.709,00	147.800.000,00	129.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.000.000,00	2.987.007.709,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
477	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	288 Orang	16.704.000,00	16.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.704.000,00	16.704.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
478	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78 Orang	12.322.000,00	12.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322.000,00	12.322.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
479	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
480	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3500 Orang	19.020.000,00	19.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.020.000,00	19.020.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
481	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
482	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
483	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
484	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24 Orang	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
485	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
486	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	72 Dokumen	306.570.000,00	306.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.570.000,00	306.570.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
487	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
488	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	82 Dokumen	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
489	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
490	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35 Dokumen	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
491	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
492	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	115 Dokumen	121.160.000,00	121.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.160.000,00	121.160.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
493	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
494	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	750 Dokumen	230.390.000,00	230.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.390.000,00	230.390.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
495	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
496	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
497	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
498	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
499	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	26 Dokumen	15.474.000,00	15.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.474.000,00	15.474.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
500	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	67.470.000,00	67.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.470.000,00	67.470.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase keluarga PHBS	100% Keluarga											
501	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	35.610.000,00	35.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610.000,00	35.610.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Kaliwiro													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang Terlayani	100 %											
502	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.511.622.500,00	3.616.533.635,00	112.977.500,00	112.977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.600.000,00	3.729.511.135,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
503	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	435 Orang	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.860.000,00	25.860.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
504	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	83.425.000,00	83.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.425.000,00	83.425.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
505	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3178 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
506	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31830 Orang	39.060.000,00	39.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.060.000,00	39.060.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
507	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
508	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
509	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	117 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
510	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
511	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
512	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
513	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	221.288.000,00	221.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.288.000,00	221.288.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
514	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
515	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770.000,00	7.770.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
516	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
517	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	60.335.000,00	60.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.335.000,00	60.335.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
518	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
519	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	453.390.000,00	453.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.390.000,00	453.390.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
520	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	207.490.000,00	207.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.490.000,00	207.490.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
521	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
522	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
523	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
524	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
525	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	120.120.000,00	120.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.120.000,00	120.120.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
526	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	57.852.000,00	57.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.852.000,00	57.852.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga PHBS	100 %											
527	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
528	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Wadaslintang 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani	100 %											
529	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.955.655.000,00	2.748.556.630,00	70.970.000,00	84.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.625.000,00	2.833.206.630,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
530	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	357 Orang	30.195.000,00	30.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.195.000,00	30.195.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
531	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang	32.125.000,00	32.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.125.000,00	32.125.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
532	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
533	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3505 Orang	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380.000,00	13.380.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
534	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
535	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
536	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
537	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	562 Orang	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
538	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	377 Orang	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
539	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14 Dokumen	267.270.000,00	267.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.270.000,00	267.270.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
540	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
541	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
542	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
543	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	34.180.000,00	34.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.180.000,00	34.180.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
544	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
545	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	72.020.880,00	72.020.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.020.880,00	72.020.880,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
546	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
547	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	209.179.600,00	209.179.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.179.600,00	209.179.600,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
548	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	26 Laporan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
549	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	562 Orang	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
550	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
551	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
552	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	13.060.000,00	13.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060.000,00	13.060.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
553	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	9 Dokumen	119.910.000,00	119.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.910.000,00	119.910.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal	1 Sistem 100 %											
554	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6 Dokumen	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase keluarga PHBS	100 %											
555	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	37 Dokumen	21.372.000,00	21.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372.000,00	21.372.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Puskesmas Sukoharjo 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
556	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.450.000.000,00	1.920.176.631,00	0,00	50.503.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	1.970.679.881,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.00 % 88.33 % 9.72 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
557	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181 Orang	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
558	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	175 Orang	32.370.000,00	32.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.370.000,00	32.370.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
559	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
560	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2381 Orang	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
561	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
562	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
563	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	267 Orang	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
564	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	197 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
565	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	195.505.000,00	195.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.505.000,00	195.505.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
566	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
567	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
568	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
569	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	33.025.000,00	33.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.025.000,00	33.025.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
570	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	148.740.000,00	148.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.740.000,00	148.740.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
571	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
572	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	758.690.000,00	758.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.690.000,00	758.690.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
573	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
574	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	267 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
575	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	197 Orang	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
576	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
577	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	19.665.000,00	19.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.665.000,00	19.665.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
578	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	55.950.000,00	55.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950.000,00	55.950.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang terbangun	1 sistem											
579	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	10.295.000,00	10.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295.000,00	10.295.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Keluarga PHBS	100% Keluarga											
580	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	84.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
581	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	84.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Kalibawang													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	100 % 88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja											
582	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	1.684.588.947,00	0,00	89.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.563.947,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan dari BLUD
583	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.129.735.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.735.000,00	0,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
584	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	270 Orang	11.232.000,00	11.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232.000,00	11.232.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
585	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	270 Orang	18.416.000,00	18.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416.000,00	18.416.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
586	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
587	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1380 Orang	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440.000,00	19.440.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
588	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
589	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
590	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
591	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.000,00	1.878.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
592	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
593	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	198.220.000,00	198.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.220.000,00	198.220.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
594	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
595	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185.000,00	7.185.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
596	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
597	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	17.432.000,00	17.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432.000,00	17.432.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
598	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
599	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen	89.301.000,00	89.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.301.000,00	89.301.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
600	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
601	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	311.492.000,00	311.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.492.000,00	311.492.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
602	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
603	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
604	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
605	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
606	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
607	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	110.610.000,00	110.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.610.000,00	110.610.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK secara optimal	100 %											
608	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	58.280,00	58.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.280,00	58.280,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga PHBS	100% Keluarga											
609	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	109.045.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.045.720,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
610	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	109.045.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.045.720,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Wonosobo 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja Rata-rata indeks kepuasan layanan puskesmas	100 % 88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani	100 %											
611	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.032.620.000,00	1.240.567.695,00	0,00	159.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.620.000,00	1.399.877.695,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
612	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277 Orang	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540.000,00	12.540.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
613	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277 Orang	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	7.010.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
614	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
615	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.000,00	7.080.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
616	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
617	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
618	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
619	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	2.679.840,00	2.679.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.840,00	2.679.840,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
620	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
621	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	100.472.000,00	100.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.472.000,00	100.472.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
622	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
623	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580.000,00	5.580.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
624	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
625	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.276.000,00	7.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276.000,00	7.276.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
626	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
627	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	87.795.000,00	87.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.795.000,00	87.795.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
628	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
629	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	142.590.000,00	142.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.590.000,00	142.590.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
630	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
631	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
632	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
633	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
634	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
635	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600.000,00	99.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun	1 Sistem											
636	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	435.160,00	435.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.160,00	435.160,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga PHBS	100 %											
637	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	52.440.000,00	52.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.440.000,00	52.440.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Kertek 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas Yang Dilayani	100 %											
638	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.003.080.000,00	2.188.047.385,00	0,00	333.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.080.000,00	2.521.836.385,00	Pendapatan dari BLUD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
639	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	578 Orang	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
640	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	562 Orang	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
641	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	526 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
642	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3836 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
643	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4514 Orang	6.001.000,00	6.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001.000,00	6.001.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
644	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24895 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
645	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4686 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
646	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13520 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
647	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
649	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	81 Orang	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
650	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	676 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
651	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
652	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16 Dokumen	266.470.000,00	266.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.470.000,00	266.470.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
653	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
654	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9 Dokumen	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
655	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
656	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	86 Dokumen	8.662.000,00	8.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662.000,00	8.662.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
657	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	123.150.000,00	123.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.150.000,00	123.150.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
658	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	122 Dokumen	175.358.000,00	175.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.358.000,00	175.358.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
659	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8 Laporan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
660	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
661	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
662	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	41 Dokumen	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	5.790.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
663	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1042 Dokumen	61.620.000,00	61.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.620.000,00	61.620.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun	1 Sistem											
664	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga PHBS	100 % Keluarga											
665	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25 Dokumen	4.743.000,00	4.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743.000,00	4.743.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Selomerto 2													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas yang Dilayani	100 %											
666	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	896.190.000,00	1.041.820.429,00	38.000.000,00	58.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.190.000,00	1.100.770.429,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
667	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28.872.000,00	28.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.872.000,00	28.872.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
668	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	21.618.000,00	21.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.618.000,00	21.618.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
669	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
670	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810.000,00	12.810.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
671	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
672	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
673	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
674	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
675	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	79.919.000,00	79.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.919.000,00	79.919.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
676	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
677	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
678	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
679	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	23.537.000,00	23.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.537.000,00	23.537.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
680	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
681	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	76.376.000,00	76.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.376.000,00	76.376.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
682	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	366.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.590.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
684	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00	366.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.590.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
685	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
686	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
687	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
688	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940.000,00	16.940.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
689	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	85.086.000,00	85.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.086.000,00	85.086.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Puskesmas yang Terbangun	1 Sistem											
690	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga PHBS	100 %											
691	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	122.324.000,00	122.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.324.000,00	122.324.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Leksono 2													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase pengunjung puskemasmas yang dilayani	100 %											
692	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	900.149.035,00	0,00	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.649.035,00	Pendapatan dari BLUD
693	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM kesehatan di puskesmas	100 %											
694	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272 Orang	61.754.000,00	61.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.754.000,00	61.754.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
695	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang	20.245.000,00	20.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245.000,00	20.245.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
696	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1185 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
697	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1762 Orang	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.860.000,00	25.860.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
698	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10051 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
699	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2025 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
701	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	202 Orang	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
702	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	225 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
703	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	199.140.000,00	199.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.140.000,00	199.140.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
704	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
705	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
706	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
707	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	24.041.000,00	24.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.041.000,00	24.041.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
708	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	33 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
709	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	66.480.000,00	66.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.480.000,00	66.480.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
710	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	14 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
711	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	421.590.000,00	421.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.590.000,00	421.590.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
712	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
713	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
714	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
715	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
716	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	35.540.000,00	35.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.540.000,00	35.540.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
717	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	55.980.000,00	55.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.980.000,00	55.980.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga PHBS	100 %											
718	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	41.639.000,00	41.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.639.000,00	41.639.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Kejajar 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata indeks kepuasan layanan puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengunjung Puskesmas Yang Dilayani	100 %											
719	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	898.270.650,00	910.190.544,00	36.500.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.770.650,00	952.090.544,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas	100 %											
720	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	94.080.000,00	94.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.080.000,00	94.080.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
721	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
722	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1684 Orang	13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155.000,00	13.155.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
723	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	190 Orang	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360.000,00	12.360.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
724	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
725	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20 Dokumen	115.164.000,00	115.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.164.000,00	115.164.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
726	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42 Dokumen	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
727	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30 Dokumen	25.376.000,00	25.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.376.000,00	25.376.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
728	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	72.750.000,00	72.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.750.000,00	72.750.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
729	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	50 Dokumen	392.290.000,00	392.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.290.000,00	392.290.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
730	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	21 Laporan	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
731	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
732	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
733	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	7 Dokumen	12.615.000,00	12.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615.000,00	12.615.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
734	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	141.240.000,00	141.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.240.000,00	141.240.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Puseksas Yang Terbangun	1 Sistem											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
735	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	15.019.000,00	15.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.019.000,00	15.019.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Keluarga PHBS	100 %											
736	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7 Dokumen	44.171.000,00	44.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.171.000,00	44.171.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Kalikajar 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Rata-rata indeks kepuasan layanan puskesmas	100 % 88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas yang terpenuhi, belanja modal BLUD dan belanja operasional BLUD Puskesmas terpenuhi Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	12 Bulan 1 Unit Kerja											
737	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.857.953.980,00	2.101.802.478,00	77.000.000,00	238.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.953.980,00	2.340.152.478,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
738	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	482 Orang	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
739	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	491 Orang	29.286.000,00	29.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.286.000,00	29.286.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
740	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2587 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
741	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3746 Orang	26.190.000,00	26.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.190.000,00	26.190.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
742	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24465 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
743	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4277 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
744	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	94 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
745	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	561 Orang	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
746	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	510 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
747	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
748	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	119.926.000,00	119.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.926.000,00	119.926.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
749	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
751	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	29.548.000,00	29.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.548.000,00	29.548.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
753	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	370.335.000,00	370.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.335.000,00	370.335.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
755	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	189.990.000,00	189.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.990.000,00	189.990.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
756	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
757	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
758	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
759	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
760	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	17.790.000,00	17.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790.000,00	17.790.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase posyandu dengan strata mandiri	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga PHBS	100 %											
761	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	70.755.000,00	70.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.755.000,00	70.755.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Kepil 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
762	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.861.247.900,00	1.913.235.322,00	87.550.000,00	173.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.797.900,00	2.086.435.322,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3.20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	AFP Non Polio per 100.000 penduduk <15 tahun Angka keberhasilan pengobatan penderita TBC (sucses rate) (%) Cakupan balita mendapat vitamin A Cakupan K1 (%) Cakupan K4 (%) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) (%) Cakupan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita (D/S) Cakupan pemberian PMT pada balita gizi kurang Cakupan pemberian PMT pada ibu hamil KEK Cakupan pemberian tamblet Fe pada ibu hamil Persentase anak sekolah yang dimunisasi campak Persentase anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase caries gigi pada anak Persentase kasus kusta baru tanpa cacat Persentase ODGJ berat yang bebas pasung Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat ARV Persentase penduduk dengan akes jamban sehat Persentase penemuan penderita diare Persentase penemuan pneumonia pada balita Persentase penyehat tradisional yang terdaftar dan memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Persentase Posbindu Aktif Persentase Pos Lansia yang aktif Persentase puskesmas yang diakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan GERMAS Presentasepemenuhan SPM kesehatan di Puskesmas Prevalensi penderita DBD per 100.000 penduduk Persentase kasus gawat darurat terpadu yang ditangani dengan SPGDT	2 % 90 % 100 % 100 % 98 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 % 99 % 98 % 100 % 13 % 15 % 99.5 % 55 % 75 % 80 % 75 % 27.5 % 99.5 % 100 % 100 % 100 % 100 % <25 angka 100 %											
763	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050.000,00	31.050.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
764	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1315 Orang	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
765	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	90 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
766	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350 Orang	12.676.000,00	12.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.676.000,00	12.676.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
767	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
768	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	178 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
769	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	247 Orang	2.755.500,00	2.755.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.500,00	2.755.500,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
770	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
771	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	409.383.000,00	409.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.383.000,00	409.383.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
772	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
773	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.545.000,00	7.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545.000,00	7.545.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
774	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
775	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	40.121.000,00	40.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.121.000,00	40.121.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
776	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	67.100.800,00	67.100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100.800,00	67.100.800,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
778	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	140 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
779	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	359.290.000,00	359.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.290.000,00	359.290.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
780	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	19 Laporan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
781	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
782	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
783	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
784	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	540 Dokumen	53.783.000,00	53.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.783.000,00	53.783.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
785	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1540 Dokumen	90.090.000,00	90.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.090.000,00	90.090.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
786	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	300 Dokumen	1.964.500,00	1.964.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.500,00	1.964.500,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-											
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
787	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	225 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
788	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	88.861.200,00	88.861.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.861.200,00	88.861.200,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Wadaslintang 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja Rata-rata indeks kepuasan layanan puskesmas	100 % 88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase pengunjung puskesmas yang dilayani	100 %											
789	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.139.500.000,00	1.366.464.119,00	94.000.000,00	127.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.500.000,00	1.494.164.119,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
790	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	421 Orang	38.976.000,00	38.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.976.000,00	38.976.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
791	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	377 Orang	4.096.000,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
792	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
793	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3206 Orang	14.933.000,00	14.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933.000,00	14.933.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
794	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
795	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
796	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
797	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	395 Orang	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
798	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
799	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14 Dokumen	161.490.000,00	161.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.490.000,00	161.490.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
800	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
802	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
803	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	7.549.750,00	7.549.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549.750,00	7.549.750,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
804	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
805	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	142.228.200,00	142.228.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.228.200,00	142.228.200,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
806	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
807	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	335.530.000,00	335.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.530.000,00	335.530.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
808	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	9 Laporan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
809	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77 Orang	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
810	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
811	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960.000,00	9.960.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
812	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8 Dokumen	40.860.000,00	40.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.860.000,00	40.860.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi yang terbangun	1 Sistem											
813	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	18.050,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	18.050,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Keluarga PHBS	100 %											
814	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9 Dokumen	24.677.000,00	24.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.677.000,00	24.677.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
		Puskesmas Sukoharjo 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Puskesmas	88.33 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja											
815	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	647.757.560,00	969.264.010,00	7.200.940,00	51.936.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.958.500,00	1.021.200.035,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase sarana air minum yang sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	0.18 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 5.00 % 79.65 % 88.33 % 9.72 %												
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan di Puskesmas	100 %											
816	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	209 Orang	52.656.000,00	52.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.656.000,00	52.656.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
817	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210 Orang	47.575.000,00	47.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.575.000,00	47.575.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
818	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
819	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1288 Orang	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
820	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
821	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
822	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
823	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	275 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
824	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	137.280.000,00	137.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.280.000,00	137.280.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
825	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
826	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
827	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
828	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	27.844.000,00	27.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844.000,00	27.844.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
829	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	113.247.000,00	113.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.247.000,00	113.247.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
830	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	409.290.000,00	409.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.290.000,00	409.290.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
831	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
832	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
833	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
834	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
835	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225.000,00	4.225.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
836	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600.000,00	75.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita Cakupan desa siaga aktif strata mandiri Persentase poskestren aktif	1,94 angka 26.41 angka 80.00 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Keluarga PHBS	100 %											
837	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	31.683.000,00	31.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.683.000,00	31.683.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Laboratorium Kesehatan Daerah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
838	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Dokumen	600.000.000,00	704.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	704.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		RSUD Setjonegoro Kab. Wonosobo													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
839	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	425 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
840	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (persen) Rasio bed rawat inap per satuan penduduk Persentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) Persentase puskesmas dengan layanan pendaftaran online Angka kesakitan penyakit tidak menular Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Angka kesakitan penyakit menular Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase desa ODF Persentase orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar Persentase sarana air minum yang sesuai standar Persentase penduduk usia produktif (15-59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar SPM Indeks Kepuasan Pelanggan Labkesda Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Rata- rata capaian SPM puskesmas Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas Persentase orang berisiko HIV yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin operasional Cakupan jaminan kesehatan masyarakat miskin Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	0.18 % 0.72 angka 100 % 100.00 % 13.00 % 2.27 % 3,20 % 3.67 % 37.16 % 37.50 % 5.00 % 62.59 % 75.00 % 79.65 % 80.00 % 83.67 % 85.1 % 86.29 % 87.00 angka 88.00 % 88.33 % 9.72 % 98.46 % 98.58 % 98.63 % 98.78 % 99.40 % 99.91 %											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	86 %											
841	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
842	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		RSUD Setjonegoro													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Lama tunggu pelayanan obat racikan Lama tunggu pelayanan rawat jalan. undefined	100 % 30.78 % 45.11 % undefined undefined											
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %											
843	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	425 Orang/bulan	24.766.578.269,00	26.439.162.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766.578.269,00	26.439.162.914,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan SPM Rumah Sakit Terpenuhi	100 %											
844	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	102.287.611.500,00	113.163.611.500,00	7.712.388.500,00	14.309.030.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000.000,00	127.472.642.242,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen											
845	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	70.000.000,00	650.605.885,00	0,00	15.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	666.255.885,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
846	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
847	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
848	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			0	107 0	10.685.898.912,00	10.453.365.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685.898.912,00	10.453.365.662,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
849	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
850	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
851	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
852	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	23.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
853	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
854	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
855	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
856	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
857	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	0,00	250.000,00	0,00	39.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
858	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	750.000,00	0,00	90.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.966.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
859	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
860	1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
861	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
862	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
863	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
864	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
865	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	92.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
866	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	925.000.000,00	794.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000.000,00	794.034.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
867	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	350.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	330.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
868	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
869	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	68.40 %											
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Pengelolaan SDA Yang DI Bangun Atau Di Rehab/Dipelihara	2 Unit											
870	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	50 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Irigasi Yang Ditangani	40.19 Hm											
871	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4 KM	93.250.000,00	93.250.000,00	4.768.000.000,00	5.758.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861.250.000,00	5.851.250.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
872	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,5 KM	2.486.000.000,00	2.486.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
873	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi													
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	30 Bendung	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
874	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa													
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak	100 %											
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak	218799 SR											
875	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	360 Orang	45.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	195.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
876	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
877	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	4850 Liter/Detik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
878	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
879	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4850 SR	15.538.264.000,00	15.428.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.538.264.000,00	15.428.264.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi (tempat BABS)	13.16 % 62.52 % 95 %											
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik Layak	136793 SR											
880	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)													
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	100.000.000,00	94.400.000,00	0,00	130.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	225.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
881	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)													
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	10 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
882	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman													
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	150 M³/Hari	1.545.000.000,00	1.945.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000.000,00	1.945.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
883	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja													
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1000 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
884	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)													
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	2510 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
885	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
886	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat													
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	2500 Rumah Tangga	17.241.497.000,00	17.181.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.241.497.000,00	17.181.497.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Hibah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
887	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	26 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
888	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	80 %											
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	790.5 Meter											
889	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	200 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
890	1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
891	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	150 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
892	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	200 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
893	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9.980 Sistem Drainase Perkotaan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pelayanan publik pemerintah kabupaten yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung Persentase bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG)	26.32 % 40 %											
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Yang Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung Yang Memilik Persetujuan Bangunan Gedung (komulatif)	4116 Unit 35 Unit											
894	1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
895	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
896	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
897	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung													
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800.000,00	79.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
898	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota													
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
899	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung													
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	56 Dokumen	733.320.000,00	684.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.320.000,00	684.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis	35 Angka											
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aset Lahan Yang Di Tata Sesuai Rencana Teknis	4 Angka											
901	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	614.450.000,00	1.861.900.900,00	835.550.000,00	528.099.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	2.390.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani	55.66 % 64 %											
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Tertangani	102.94 Km											
902	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan													
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	434 Dokumen	185.200.000,00	253.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.200.000,00	253.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
903	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	200.000.000,00	205.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	205.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
904	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Diganti	175.55 Jembatan	46.200.000,00	46.200.000,00	5.716.300.000,00	4.616.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762.500.000,00	4.662.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
905	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan													
			Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	0,00	0,00	0,00	384.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.685.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
906	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	165.663 KM	0,00	495.954.370,00	0,00	62.883.665.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.379.619.380,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
907	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	165.663 KM	861.173.380,00	0,00	61.322.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.183.619.380,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
908	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.200 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
909	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar													
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	9.121 KM	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
910	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	86.83 Jembatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
911	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	40 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
912	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	212.500.000,00	182.138.620,00	2.500.000,00	32.861.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
913	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	46.05 KM	0,00	393.344.524,00	0,00	46.455.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.849.144.524,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
914	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	46.05 KM	613.530.000,00	0,00	38.715.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.329.030.000,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
915	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	625.2 KM	3.480.000.000,00	9.240.380.439,00	0,00	76.092.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.000.000,00	9.316.472.669,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	90 angka											
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	85 Angka											
916	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
917	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	85 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
918	1.03.11.2.01.0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi													
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
919	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	75 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
920	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI													
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
922	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi													
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penetapan kebijakan perencanaan tata ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80 % 86 %											
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR) Yang Di Legalisasi	2 Dokumen											
923	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
924	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	350.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
925	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang													
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR) Yang DIsusun	1 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
927	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
928	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang													
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	4 Dokumen											
929	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	20 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
930	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dengan RKPD	100 %											
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %											
931	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	15.000.000,00	15.250.000,00	35.000.000,00	84.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
932	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen											
933	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	5.379.890.360,00	5.261.387.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.890.360,00	5.261.387.095,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
934	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
935	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
936	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	10.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.904.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
937	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
938	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
939	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan											
940	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
941	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Bantuan Keuangan
942	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
943	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
944	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
945	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	48.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
946	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	745.000.000,00	745.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000.000,00	745.996.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
947	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	150.000.000,00	195.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	195.940.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
948	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
949	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
950	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	45.33 %											
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana	2 dokumen											
951	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	142 unit											
952	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana													
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	11 Unit Rumah	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
953	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	11 Unit Rumah	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
954	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana													
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	8 Unit Rumah	0,00	286.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
955	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana													
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	8 Unit Rumah	285.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penetapan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal)	100.00 %											
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	3 dokumen											
956	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP													
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	30.000.000,00	185.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	185.925.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	15.32 Ha											
957	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	105 Unit Rumah	0,00	2.163.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.000.000,00	Insentif Fiskal Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
958	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	105 Unit Rumah	2.163.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.000.000,00	0,00	Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
959	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	82.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
960	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh													
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0,02 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang tertangani	27.48 %											
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani diluar Kawasan Permukiman Kumuh	100 unit											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
961	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	17 Unit Rumah	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
962	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	17 Unit Rumah	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	60.00 % 86.67 %											
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi yang disediakan PSU	100 lokasi											
963	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	66 Lokasi	737.800.000,00	1.985.600.000,00	9.931.700.000,00	10.015.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669.500.000,00	12.000.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi	25.00 %											
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum	4 kegiatan											
964	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan sengketa tanah garapan pemerintah daerah yang dilakukan melalui mediasi	1 kasus											
965	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	50.000.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	67.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %											
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan tanah pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas umum	1 dokumen											
966	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	55.58 % 91.62 %											
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan kabupaten yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan	19 lokasi											
967	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	286 Unit	0,00	0,00	9.101.300.000,00	10.507.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101.300.000,00	10.507.140.000,00	Bantuan Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
968	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan													
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	75 Unit	771.750.000,00	969.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.750.000,00	969.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C yang dikelola	3 lokasi											
969	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)													
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	3 Unit	16.000.000,00	2.250.000,00	14.000.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
970	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)													
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang dikeluarkan	42 lokasi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
971	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	13.700.000,00	43.700.000,00	75.300.000,00	95.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000.000,00	139.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala	5800 unit											
972	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
973	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6239 Dokumen	175.000.000,00	75.000.000,00	96.572.500,00	96.572.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.572.500,00	171.572.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
974	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	150.000.000,00	218.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota yang telaksana pada tahun -n	100 angka											
975	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	100.000.000,00	140.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	340.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
976	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	700.000.000,00	745.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	745.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen andalalin yang disetujui	5 dokumen											
977	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin													
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah ruas jalan yang di audit atau di inspeksi	4 lokasi											
978	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal													
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00	430.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang ruas jalan yang dilalui trayek angkutan umum	5 ruas											
979	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik	30 %											
	2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan											
980	2.15.03.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Penyeberangan dalam Kondisi Baik	1 lokasi											
981	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan													
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Satuan polisi Pamong Praja													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase kebutuhan Administrasi terpenuhi	100 %											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi dan Perencanaan	2 DOKUMEN											
982	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
983	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100 %											
984	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	4.461.724.672,00	4.445.413.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461.724.672,00	4.445.413.585,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
985	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	54.576.000,00	54.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.576.000,00	54.576.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tercapainya pemahaman ASN	100 %											
986	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
987	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	550.000.000,00	701.777.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	701.777.627,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tercukupinya kebutuhan umum kantor	100 %											
988	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
989	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
990	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
991	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
992	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
993	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tercukupinya kebutuhan sarana prasarana	100 %											
994	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	400.000,00	400.000,00	21.275.000,00	21.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675.000,00	21.675.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercukupinya kebutuhan jasa administrasi	100 %											
995	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
996	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang-barang milik daerah	100 %											
997	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
998	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	17.376.000,00	17.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.376.000,00	17.376.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
999	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda dan perkada	100 %											
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya tingkat keamanan dan kenyamanan undefined	95 % undefined undefined											
1000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	50 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1001	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1002	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	75 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1003	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	40 laporan	2.461.410.000,00	2.461.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.410.000,00	2.461.410.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1004	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	40 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1005	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah													
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah kasus yang ditindaklanjuti	100 %											
1006	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1007	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	20 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1008	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	442.200.000,00	442.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.200.000,00	442.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	jumlah PPNS yang terbina	100 %											
1009	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD	100 %											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %											
1010	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1011	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %											
1012	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	0,00	4.156.552.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.552.690,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1013	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	4.066.283.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066.283.803,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1014	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1015	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1016	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1017	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1018	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1019	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	235.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1020	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1021	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1022	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1023	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1024	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	275.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1025	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1026	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	40 %											
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30000 orang											
1027	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah desa dan kelurahan tangguh bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	23 desa 2000 orang											
1028	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan													
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	15 Kawasan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1029	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1030	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1031	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1032	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1033	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	250 Kawasan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1034	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	120.380.000,00	120.380.000,00	89.620.000,00	89.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %											
1035	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1036	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0 Orang	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1037	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1038	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1 Dokumen											
1039	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1040	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)	70 %											
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (response time)	70 %											
1041	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1042	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit	10.500.000,00	60.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)	70 %											
1043	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran dibawah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	150 orang											
1044	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat													
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1045	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran													
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD	100 %											
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja yang disusun tepat waktu	10 dokumen											
1046	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1047	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	14 Dokumen											
1048	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.558.511.802,00	3.546.323.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.511.802,00	3.546.323.442,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1049	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1050	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250 Paket	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1051	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1052	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1053	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1054	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1055	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1056	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1057	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1058	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	177.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1059	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	0,00	177.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi belanja Modal	100 %											
1060	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1061	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1062	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1063	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1064	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1065	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1066	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1067	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1068	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1069	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1070	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	256.244.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.244.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1071	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	256.244.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.244.480,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1072	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1073	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1074	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	241 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1075	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	241 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1076	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1077	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1078	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1079	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase rata- rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri Rasio penerima program usaha produktif laki- laki : perempuan	2.00 % 3.36 % 50 angka											
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan pemberdayaan sosial KAT yang terfasilitasi kegiatan (pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas)	20 %											
1080	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT													
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarga	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1081	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT													
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarga	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1082	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT													
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Aktif	60.00 %											
1083	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	146.200.000,00	146.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200.000,00	146.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1084	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1085	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1086	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)													
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Sertifikat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	100 % 76.00 %											
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100 %											
1087	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1088	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1089	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang													
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1090	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang													
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1091	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1092	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1093	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1094	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1095	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1096	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1097	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat													
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1098	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat													
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1099	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak													
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1100	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak													
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1101	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan													
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1102	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan													
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi	20 %											
1103	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1104	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1105	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang													
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1106	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1107	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA													
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1108	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM PKH graduasi Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial	2.00 % 75 % 88.24 % 95.50 %											
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan Data Kamiskinan cakupan daerah	100 %											
1109	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	480000 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1110	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	67000 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1111	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4200 Keluarga	5.183.172.600,00	5.938.505.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183.172.600,00	5.938.505.482,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100.00 %											
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %											
1112	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1113	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1114	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1115	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	4 Dokumen											
1116	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana													
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1117	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kelengkapan makam pahlawan dalam kondisi baik	80 %											
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3769 M2											
1118	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1119	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	124 Makam	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang telah menyelesaikan penegasan batas desa Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik	60 % 68 %											
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan penyelenggaraan penataan desa	3 area											
1120	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	600 Unit	75.000.000,00	1.522.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	1.522.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi	23.03 % 83.33 %											
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan Kerjasama Antar Desa yang difasilitasi	15 BKAD											
1121	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1122	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	305.000.000,00	274.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000.000,00	274.085.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1123	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	50.000.000,00	80.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	80.915.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes berkembang dan maju Persentase BUMDes berbadan hukum Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa Persentase desa berkinerja baik	3.68 % 48.65 % 6.97 % 70.00 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu Persentase desa yang menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD tepat waktu Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati tepat waktu Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat tepat waktu	100 % 100 % 100 % 100 %											
1124	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	236 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1125	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1126	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	236 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1127	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	15 Dokumen	3.404.400.000,00	3.404.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.400.000,00	3.404.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1128	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa													
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	45 Orang	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1129	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	30 Dokumen	116.400.000,00	116.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400.000,00	116.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1130	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	164 Laporan	3.000.000.000,00	915.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	915.536.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1131	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Laporan	284.000.000,00	384.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000.000,00	384.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1132	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	15 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1133	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15 Dokumen	45.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	145.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1134	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD													
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2124 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1135	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	236 Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1136	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Posyandu aktif Persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif desa Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100.00 % 80.00 90.00 %											
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan desa aktif melakukan kegiatan pemberdayaan	50.00 %											
1137	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15 Dokumen	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1138	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1139	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1140	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1141	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1142	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1143	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1144	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1145	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1146	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 Dokumen	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 Persen											
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1147	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %											
1148	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	5.008.093.174,00	4.698.802.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008.093.174,00	4.698.802.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksanya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81 % 81 Paket											
1149	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1150	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1151	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1152	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1153	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	125.000.000,00	123.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	123.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 % 87 %											
1154	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1155	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.296.190,00	1.296.190,00	18.703.810,00	18.703.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksanya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.75 % 57.75 Laporan											
1156	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1157	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1158	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	328.000.000,00	298.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000.000,00	298.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.3 % 47.3 Unit											
1159	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	70.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1160	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1161	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	14.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1162	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	95.000.000,00	Pajak Rokok
1163	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	100.00 %											
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen rencana tenaga kerja daerah	100 %											
1164	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro													
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	22.37 %											
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK	16.78 %											
1165	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	150 Orang	1.815.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000.000,00	0,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1166	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	150 Orang	0,00	7.712.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712.282.000,00	Dana Insentif Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1167	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja													
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1168	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase instruktur yang mendapatkan sertifikat kompetensi	3.26 %											
1169	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	25.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi	2.237 %											
1170	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	50 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase jumlah wirausaha baru Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/start up wirausaha baru Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan	22.90 % 25.21 % 31.00 % 33.00 %											
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] Persentase kelompok rentan peserta pelatihan yang ditempatkan Persentase kelompok rentan peserta pelatihan yang ditempatkan Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/start up wirausaha baru	25.21 persen 33 % 25.21 %											
1171	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	80.000.000,00	96.540.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	96.540.821,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1172	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja													
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	250 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka kasus penempatan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	33 %											
1173	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)													
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1174	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan													
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	120 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	100.00 % 82.00 %											
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	25 %											
1175	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya jumlah perselisihan	75 %											
1176	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1177	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal Pertumbuhan Jumlah sentra industri Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan Persentase klaster kategori berkembang Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	0.94 % 1.00 % 100.00 % 37.50 % 3.79 % 5.00 %											
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	100 %											
1178	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen	92.700.000,00	0,00	3.257.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000.000,00	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1179	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	1.769.002.000,00	1.769.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.002.000,00	1.769.002.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1180	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1181	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
1182	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	0,00	342.700.000,00	0,00	3.257.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten	91.00 %											
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi industri	91 %											
1183	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
1184	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas													
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-											
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
1185	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi													
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	16.540.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540.821,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan sarpras pendukung kinerja	87 %											
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya penyusunan perencanaan dan evaluasi 1inerja perangkat daerah	1 Tahun											
1186	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1187	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-											
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
1188	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya													
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1189	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	19 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi per kapita/hari	3,000.00 kkal											
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Promosi penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal	1 kegiatan											
1190	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan beras cadangan pangan	6000 Kilogram											
1191	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Ton	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Laporan pola konsumsi pangan wilayah	1 Dokumen											
1192	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-											
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1193	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan													
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-											
1194	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota													
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan aman	93 %											
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan pangan	1 Paket											
1195	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1196	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan													
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1197	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650.000,00	25.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	2,95 %											
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Gennagan Air Lainnya	12 Bulan											
1198	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan													
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1199	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan Persentase jumlah kelompok tani ikan yang aktif Persentase UPR aktf	3,40 % 4.00 % 83 % 86.54 %											
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya peningkatan kapasistas bagi pembudidaya ikan kecil	12 Bulan											
1200	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil													
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6 Kelompok	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan	12 Bulan											
1201	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1202	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	364.500.000,00	389.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-											
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-											
1203	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-											
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-											
1204	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan sarpras pendukung kinerja	87 %											
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tahun											
1205	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	167 Orang/bulan	20.922.001.413,00	20.100.838.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.922.001.413,00	20.100.838.933,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan											
1206	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	37.014.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	37.014.625,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1207	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100.000.000,00	125.746.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	125.746.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1208	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	70.000.000,00	95.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	95.289.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1209	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1210	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	181.000.000,00	255.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000.000,00	255.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1211	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan											
1212	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1213	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	133.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000.000,00	138.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1214	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	822.500.000,00	771.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.500.000,00	771.780.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan											
1215	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	120.000.000,00	188.950.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	188.950.295,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1216	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1217	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi tanaman hortikultura (Durian) Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	16.744 ton 40,00 %											
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya penmgawasan penggunaan sarana pertanian	70 %											
1218	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	3.332.448.400,00	4.386.003.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.448.400,00	4.386.003.654,00	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1219	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan populasi SDG Hewan/ Tanaman	15 %											
1220	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman													
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	93.000.000,00	343.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	343.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1221	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan													
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya populasi ternak unggas di Kabupaten Wonosobo	5 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1222	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil													
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya populasi ternak ruminansia besar dan kecil di Kabupaten Wonosobo	15 %											
1223	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	310 Ekor	2.160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1224	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	310 Ekor	0,00	3.390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.000.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi Persentase jalan produksi yag berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura Persentase JUT yang berada di sentra produksi	0.00 % 88.00 % 96,00 %											
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersusunnya perencanaan pengembangan prasarana pertanian	1 Dokumen											
1225	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota													
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian	20											
1226	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12 Unit	9.950.000.000,00	9.950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950.000.000,00	9.950.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1227	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit													
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000.000,00	680.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1228	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1229	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	27 Unit	15.296.000.000,00	15.296.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308.000.000,00	15.308.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1230	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1231	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan													
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	172.500.000,00	172.500.000,00	857.500.000,00	857.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT yang tertangani)	100,00 %											
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penaggulangan bencana pertanian	12 Bulan											
1232	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1233	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	150 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1234	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis													
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	15 laporan	501.150.000,00	501.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.150.000,00	501.150.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-											
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
1235	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian													
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Gapoktan aktif Persentase kelompok tani aktif	50,00 % 65 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan pertanian	15 BPP											
1236	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	297.500.000,00	297.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.500.000,00	297.500.000,00	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1237	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1238	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani													
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas lingkungan Hidup													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %											
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada tahun berjalan	100 %											
1239	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	0,00	7.537.165.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537.165.538,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah Persentase penanganan sampah	11.50 % 42.01 %											
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dapat dikurangi	15660,4 Ton/thn											
1240	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	16 Unit	0,00	533.448.500,00	0,00	2.089.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.398.500,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1241	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota													
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen	0,00	308.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.061.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1242	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	100 Ton	0,00	10.472.264.042,00	0,00	156.681.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628.946.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas lingkungan Hidup													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % 100 %											
1243	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada tahun berjalan	100 %											
1244	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	7.423.297.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423.297.540,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100 %											
1245	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1246	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	53.117.000,00	56.192.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.117.000,00	56.192.361,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1247	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	15.778.200,00	15.778.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778.200,00	15.778.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1248	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	4.000.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.255.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1249	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	184.088.000,00	184.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.088.000,00	184.088.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100 %											
1250	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	1.095.930,00	1.095.930,00	58.904.070,00	58.904.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1251	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1.547.590,00	1.547.590,00	48.452.410,00	55.102.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	56.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1252	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1253	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	78.000.000,00	72.669.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	72.669.639,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1254	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan	331.550.000,00	334.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.550.000,00	334.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100% %											
1255	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1256	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	0,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1257	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1258	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian dokumen RPPLH sampai dengan dinyatakan sah atau legal	100 %											
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah RPPLH yang disusun	1 dokumen											
1259	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota													
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokuman	93.654.000,00	93.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.654.000,00	93.654.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumenn KLHS RPJMD/RPJPD	1 Dokumen											
1260	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD													
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	82.453.500,00	82.453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.453.500,00	82.453.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rata-rata koefisien rezim aliran daerah aliran sungai prioritas Jumlah pengendalian sektor emisi gas rumah kaca yang dikoordinasi, disinkronkan emisinya Persentase penurunan emisi gas rumah kaca Persentase luas lahan kritis diluar kawasan hutan Persentase mata air yang rusak dan/atau menurun debitnya	1000 angka 2 Kegiatan 4 % 40 % 9 %											
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen IGRK Jumlah mata air yang rusak/mati Jumlah pendampingan kawasan kampung proklim Persentase pencemaran pada titik pantau (air permukaan)	1 Buah 130 titik 15 Desa 74 %											
1261	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	102.261.400,00	102.261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.261.400,00	102.261.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1262	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1263	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	207.391.200,00	207.391.200,00	3.608.800,00	3.608.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000.000,00	211.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya media informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1 Dokumen											
1264	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pohon untuk rehabilitasi lahan Pelaksanaan Hari Menanam Pohon Indonesia	1 Paket 1 Paket											
1265	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi													
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan	44.00 %											
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelola atau jumlah RTH yang dikelola??	17.76 Ha											
1266	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	17,68 Ha	1.548.722.414,00	1.553.722.414,00	50.950.000,00	45.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.672.414,00	1.599.672.414,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1267	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1268	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan													
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3,12 Unit	89.500.500,00	63.600.500,00	11.125.000,00	37.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.625.500,00	100.625.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	18 %											
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan sosialisasi	20 kali											
1269	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1270	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3													
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	40 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pengampu usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah kabupaten Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	15,83 % 40,24 %											
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi pemenuhan ketentuan persetujuan lingkungan atau pertek LH usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan atau pertimbangan teknis lingkungan yang diawasi	40 keg usaha 20 keg usaha											
1271	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	25 Dokumen	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.950.000,00	46.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	3 Kegiatan											
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Saka Kalpataru Pembinaan Sekolah Adiwiyata Penebaran Benih Ikan	2 Regu 4 Sekolah 2 Ruas Sungai											
1272	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup													
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1273	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup													
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang dikelola	5 Aduan											
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang dikelola	5 Aduan											
1274	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	30 Pengaduan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah Persentase penanganan sampah	11.50 % 42.01 %											
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dapat dikurangi	15660,4 Ton/thn											
1275	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	30 Kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1276	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	16 Unit	4.986.972.500,00	0,00	2.194.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181.672.500,00	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1277	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota													
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen	122.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.013.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1278	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah													
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	10,49 Persentase	0,00	0,00	0,00	151.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.250.000,00	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
1279	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	100 Ton	5.807.800.000,00	0,00	90.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897.970.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1280	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah													
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1281	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah													
			Jumlah sampah yang terdaur ulang	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan											
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD	100 %											
1282	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1283	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan											
1284	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	4.783.829.568,00	4.575.247.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783.829.568,00	4.575.247.027,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan											
1285	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1286	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	170.600.000,00	170.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.600.000,00	170.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1287	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1288	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1289	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	249.500.000,00	249.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500.000,00	249.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1290	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
1291	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1292	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1293	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	151.800.000,00	711.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800.000,00	711.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan											
1294	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1295	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	104.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1296	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	599.400.000,00	512.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.400.000,00	512.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %											
1297	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	70.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1298	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	25.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1299	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1300	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	100 angka 53,07 angka											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	% anak yang memiliki KIA % penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen % peningkatan kepemilikan KTP elektronik	53.07 % 75 % 100 %											
1301	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	1.132.999.360,00	883.499.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.999.360,00	883.499.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1302	2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan													
			Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-											
1303	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1304	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan akta kematian Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	53,19 angka 75 % 86 %											
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	% anak yang memiliki akte kelahiran % penduduk meninggal yang dibuatkan akte kematian	86 % 53.19 %											
1305	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1306	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil													
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	50 Layanan	42.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	27.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1307	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan													
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	30.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	penyelesaian digitalisasi arsip	100 %											
1308	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1309	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil													
1310	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan Persentase cakupan updating data kependudukan	100 % 15 % 66,67 %											
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100 %											
1311	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1312	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	25.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1313	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	25.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah perangkat komputer yang diunakan untuk pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50 unit											
1314	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16 Laporan	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100.000,00	45.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 persen											
1315	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100% Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1316	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100% Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 persen											
1317	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100% Orang/bulan	4.450.613.793,00	4.283.947.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.613.793,00	4.283.947.109,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase reaslisai belanja Administrasi umum	100 persen											
1318	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1319	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% Paket	29.229.277,00	35.854.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.229.277,00	35.854.277,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1320	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% Paket	13.000.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1321	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	23.080.000,00	13.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080.000,00	13.080.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1322	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100% Dokumen	1.920.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	3.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1323	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100% Laporan	254.247.072,00	265.847.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.247.072,00	265.847.072,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase realisasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen											
1324	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100% Unit	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase reaslisai belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen											
1325	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100% Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1326	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan	26.700.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700.000,00	31.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1327	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100% Laporan	543.400.000,00	511.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.400.000,00	511.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen											
1328	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100% Unit	120.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1329	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100% Unit	12.000.000,00	14.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	14.125.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1330	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100% Unit	8.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase anggaran responsif gender Persentase SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih Persentase perempuan sebagai tenaga professional Persentase APBDes responsif gender Partisipasi angkatan kerja perempuan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	100.00 % 40.00 % 47.00 % 50.31 % 59.68 % 6.66 %											
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase pelembagaan PUG	100 persen											
1331	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG													
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	95,03% Dokumen	75.654.292,00	75.654.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.654.292,00	75.654.292,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1332	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Perangkat Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase anggota yang aktif	80 persen											
1333	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	59,06% Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1334	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	28% Organisasi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase lembaga kabupaten yang aktif	100 persen											
1335	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	28% Lembaga	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1336	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	28% Orang	115.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1337	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	28% Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100 % 55 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditanganig ditangani	100 %											
1338	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100% Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1339	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Layanan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan layanan konseling Cakupan lembaga layanan tingkat desa	0,19 % 35,09 %											
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyelenggaraan kegiatan hari anak	100 persen											
1340	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	33,96% Perangkat Daerah	43.022.744,00	43.022.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.022.744,00	43.022.744,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan	100 persen											
1341	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	33,96% Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1342	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	33,96% Dokumen	93.250.000,00	93.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.250.000,00	93.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate undefined	100 persen undefined undefined											
1343	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa ramah anak	27.95 %											
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kegiatan pemenuhan hak anak yang terlaksanakan	100 persen											
1344	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	25,73% Organisasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1345	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25,73% Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100 % 55 %											
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	100 %											
1346	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA													
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	50% Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	100 %											
1347	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50% Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang aktif	100 %											
1348	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/													
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50% Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 setiap tahun Rata-rata jumlah anak per keluarga	100 % 1,54 angka											
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen rancangan induk pengendalian penduduk dengan 5 aspek	90 %											
1349	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1,56% Dokumen	25.857.643,00	25.857.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.857.643,00	25.857.643,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1350	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan													
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1,56% Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1351	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1,56% Satuan Pendidikan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data kependudukan	90 %											
1352	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1,56% Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1353	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1,56% Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1354	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga													
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1,56% Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1355	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1,56% Laporan	221.400.000,00	221.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400.000,00	221.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1356	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1,56% Dokumen	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00	126.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) Kepesertaan KB Pria Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Drop Out KB	10,02 % 2.55 % 38,41 % 78,776 % 8.27 %											
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan advokasi KIE	100 %											
1357	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	78,77% Laporan	121.640.000,00	121.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.640.000,00	121.640.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1358	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	78,77% Laporan	863.412.000,00	863.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.412.000,00	863.412.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1359	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	78,77% Laporan	321.360.000,00	321.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.360.000,00	321.360.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1360	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	78,77% Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1361	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	78,77% Dokumen	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
1362	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	78,77% Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1363	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	78,77% Organisasi	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000.000,00	312.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh yang berkompeten	100 %											
1364	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	38,31% Orang	795.000.000,00	795.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000.000,00	795.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1365	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB													
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	38,31% Organisasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1366	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)													
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan	7.974.000,00	7.974.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.974.000,00	427.974.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	persentase sumber daya yang tersedia	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1367	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8,70% Laporan	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400.000,00	36.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1368	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8,70% Orang	3.121.687.000,00	3.121.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.687.000,00	3.121.687.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1369	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP													
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	8,70% Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1370	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	8,70% Unit	3.100.000,00	22.800.000,00	649.700.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.800.000,00	652.800.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1371	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	8,70% Orang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1372	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8,70% Laporan	46.263.000,00	46.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.263.000,00	46.263.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1373	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	8,70% Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1374	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak													
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	8,70% Laporan	50.450.000,00	50.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.450.000,00	50.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1375	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria													
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	0 Orang	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1376	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	8,70% Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1377	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan													
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	8,70% Orang	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peran serta organisasi masyarakat	100 %											
1378	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB													
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	10 Dokumen	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090.000,00	8.090.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1379	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	0 Laporan	32.425.000,00	32.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.425.000,00	32.425.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1380	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Kampung	578.160.000,00	578.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.160.000,00	578.160.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	rata rata usia kawin pertama wanita rata rata usia melahirkan pertama perempuan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa angka kelahiran remaja perempuan usai 15-19 ASFR cakupan PUS peserta KB anggta UPPKS yang ber KB Mandiri cakupan anggota bina keluarga remaja cakupan anggota bina keluarga balita cakupan anggota bina keluarga lansia ber KB	18.60 angka 20.00 angka 2.49 persen 29.00 persen 52.38 persen 72.34 persen 83.72 persen 84.65 persen 89.70 persen											
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kegiatan pembinaan keluarga/realisasi kegiatan	100 %											
1381	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)													
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	10 Laporan / Dokumen	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1382	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1383	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	100 %											
1384	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1385	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1386	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	2.034.000.000,00	2.034.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.000.000,00	2.034.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1387	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	2.237.400.000,00	2.237.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.400.000,00	2.237.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
		Dinas Komunikasi dan Informatika													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1388	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1389	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang											
1390	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	4.135.957.708,00	3.917.210.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135.957.708,00	3.917.210.064,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1391	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	71.160.000,00	71.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.160.000,00	71.160.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Regulasi Cukai Presentase Realisasi Belanja Administrasi	90 % 100 %											
1392	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	300.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	400.000.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1393	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1394	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1395	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	28.000.000,00	14.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	14.632.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1396	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	31.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1397	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1484 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1398	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	149.978.860,00	125.978.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.978.860,00	125.978.860,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1399	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1400	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1401	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1402	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	68.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1403	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan	170.850.888,00	175.550.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.850.888,00	175.550.888,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1404	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1405	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1406	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1407	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	252.500.000,00	314.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500.000,00	314.168.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1408	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai kelembagaan PPID Nilai informasi tersedia setiap saat Nilai aksesibilitas website	93 angka 94 angka 95 angka											
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	94.00 Angka											
1409	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1410	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	108.046.490,00	108.046.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.046.490,00	108.046.490,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1411	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	2.303.803.510,00	2.283.803.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.803.510,00	2.283.803.510,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1412	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	271.600.000,00	326.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.600.000,00	326.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1413	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media													
			Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan	106.350.000,00	106.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.350.000,00	106.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1414	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik													
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1415	2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1416	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas													
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Dokumen	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1417	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai manajemen SPBE Nilai layanan SPBE Nilai kebijakan internal SPBE Nilai tata kelola SPBE	2,65 angka 3,33 angka 3,40 angka 3 angka											
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internet Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	100 %											
1418	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Domain	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan TNDE	100 %											
1419	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1420	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik													
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1421	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah													
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	971.000.002,00	958.000.002,00	198.999.998,00	198.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000.000,00	1.157.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1422	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2 Dokumen	350.000,00	0,00	83.650.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	234.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1423	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1424	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik													
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1425	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas													
			0	0 0	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1426	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1427	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE													
			0	0 0	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral	85 %											
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang sudah memutakhirkan data sektoral di porrtal satu data	75.00 %											
1428	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1429	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi													
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	130 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	350 Indeks											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi yang sudah dilaksanakan	60 %											
1430	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	100 % 16 Orang/bulan											
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Disusun Tepat Waktu	28 Dokumen											
1431	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.863.503.256,00	2.534.064.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.503.256,00	2.534.064.726,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1432	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1433	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1434	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1435	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1436	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1437	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	1.934.400,00	1.934.400,00	218.065.600,00	218.065.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Pajak Rokok
1438	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	428.650.000,00	428.650.000,00	6.350.000,00	212.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000.000,00	641.000.000,00	Pajak Rokok
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
1439	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1440	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	134.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	134.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1441	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	574.388.560,00	574.388.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.388.560,00	574.388.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Realisasi Pemeliharaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1442	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	60.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1443	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1444	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	105.800.000,00	105.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800.000,00	105.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1445	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen											
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1446	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0 Dokumen											
1447	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Kemitraan Pelaku Usaha Besar Dengan UMK	1 Dokumen											
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
1448	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	33.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Soft Launching Mal Pelayanan Publik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Kegiatan 500 Pelaku Usaha											
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Grand Launching Mal Pelayanan Publik Terlaksananya Soft Launching Mal Pelayanan Publik Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Kegiatan 1 Kegiatan 500 Pelaku Usaha											
1449	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Kegiatan Usaha 11 Kegiatan Usaha 300 Pelaku Usaha 800 Pelaku Usaha											
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan Usaha 800 Pelaku Usaha 300 Pelaku Usaha 11 Kegiatan Usaha											
1450	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11 Kegiatan Usaha.	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1451	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1100 Pelaku Usaha	416.687.000,00	416.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.687.000,00	416.687.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1452	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0 Dokumen											
1453	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan Persentase pemustaka yang memanfaatkan pepustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan Presentase penambahan koleksi Persentase perpustakaan terakreditasi Persentase koleksi digital	2.86 % 34 % 35.22 % 3.6 % 4.72 % 6.22 %												
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	30 %											
1454	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik													
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	15 Layanan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1455	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	180 Perpustakaan	593.000.000,00	593.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000.000,00	593.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1456	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan													
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	45 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1457	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	3 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1458	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka													
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6000 Eksemplar	37.347.900,00	37.347.900,00	435.652.100,00	435.652.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000.000,00	473.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah kunjungan perpustakaan	200 %											
1459	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat													
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300.000,00	198.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1460	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial													
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	45 Perpustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) Cakupan naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa Cakupan naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	1.022 angka 1072 angka 2.052 angka											
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah koleksi naskah kuno yang dikelola dan dialihmedia	10 %											
1461	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan													
			Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	6 Eksemplar	21.180.000,00	21.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.180.000,00	21.180.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %											
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100 Laporan											
1462	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1463	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan gaji dan tunjangan ASN	33 ASN											
1464	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	4.199.112.928,00	3.989.988.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199.112.928,00	3.989.988.957,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi belanja administrasi umum	100 %											
1465	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1466	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1467	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1468	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	20.000.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1469	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	115.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase realisasi pengadaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1470	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1471	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.127.280,00	377.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.280,00	377.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1472	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1473	2.24.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	31.000.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	25.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1474	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	523.250.000,00	523.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.250.000,00	523.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1475	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	62.795.000,00	70.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.795.000,00	70.795.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1476	2.24.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1477	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	20.000.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	30.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1478	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengelolaan arsip secara baku Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip kategori baik Persentase desa dengan pengelolaan arsip kategori baik	100 % 50 % 89,72 %											
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perawatan arsip daerah	3 kegiatan											
1479	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI													
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	2 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1480	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis													
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2000 Arsip	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000.000,00	218.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dan desa yang menggunakan sistem kearsipan sesuai dengan NSPK	190 angka											
1481	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan (NSPK) Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan Persentase arsip digital	100 % 60 % 76,34 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Dokumen Arsip yang sudah memasuki retensi di atas 10 tahun dan tidak bernilaiguna yang dimusnahkan	60 %											
1482	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun													
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah kelompok kesenian dan lembaga kebudayaan yang mendapat pembinaan dan bantuan	115 kelompok											
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok kesenian dan lembaga kebudayaan yang mendapat pembinaan dan bantuan	115 kelompok											
1483	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1484	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	80 Orang	891.000.000,00	1.976.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000.000,00	1.976.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tradisi budaya yang terfasilitasi	70 objek											
1485	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1486	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional													
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	320.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	650.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tradisi budaya yang terfasilitasi	30 angka											
1487	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM kesenian yang terfasilitasi	180 angka											
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesenian yang terfasilitasi	180 angka											
1488	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	40 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-											
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-											
1489	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-											
1490	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-											
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-											
1491	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kegiatan direncanakan tepat dan sesuai rencana	100 %											
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKPjIP, Renstra, Renja, LPPD, dll	100 %											
1492	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	100 %											
1493	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	0,00	4.447.175.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447.175.181,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1494	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.738.249.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738.249.264,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1495	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1496	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1497	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1498	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1499	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1500	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1501	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	141.000.000,00	148.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000.000,00	148.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1502	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1503	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	255.000.000,00	247.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000.000,00	247.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1504	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1505	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1506	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00	44.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	44.098.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Paket											
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen DED DTW Dieng Plateau Theater Dokumen DED Kawasan Sindoro - Sumbing	1 Paket 1 Paket											
1507	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1508	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Amenitas dan Atraksi Telaga Menjer Pengadaan Sarana dan Prasarana Waterpark Taman Rekreasi Kalianget Revitalisasi Waterpark Taman Rekreasi Kalianget	1 Paket 1 Paket 1 Paket											
1509	3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	130.909.000,00	41.450.000,00	5.717.292.000,00	958.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848.201.000,00	1.000.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1510	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Operasional Obyek Wisata Milik Pemerintah daerah	1 tahun											
1511	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 tahun Unit	0,00	93.409.000,00	0,00	4.954.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.201.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1512	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	1.010.000.000,00	1.246.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000.000,00	1.246.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Presentase TDUP yang diteteapkan dan tersertifikasi Prosentase	100 % 100% Dokumen											
1513	3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)													
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	13 Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1514	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan Pertumbuhan event wisata tingkat nasional Pertumbuhan jumlah kemitraan pariwisata	30.00 % 30.00 % 8.00 %											
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jaringan Promosi dan Kemitraan di Bidang Pariwisata	100 %											
1515	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1516	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1517	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1518	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	400.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1519	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1520	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Promosi	0,00	304.207.000,00	0,00	95.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan	4.00 %											
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase zona ekonomi kreatif yang dimanfaatkan Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif	65 %											
1521	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Presentase sub sektor ekonomi kreatif yang berkembang	68 %											
1522	3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur													
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1523	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual													
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	40 Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1524	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase industri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi Persentase kelembagaan pariwisata Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	20.00 % 26.00 % 35.00 %											
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi tingkat dasar	30 %											
1525	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif													
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1526	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	0 Orang	0,00	759.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.777.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
1527	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata													
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	480 Orang	1.332.207.000,00	468.223.000,00	95.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000.000,00	468.223.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1528	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	80 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1529	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Prosentase Prosentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1 Paket 3 %											
1530	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	90 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1531	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	30 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksanya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Presentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD Presentase pemenuhan sarpraspendukung kinerja Cakupan Pelayanan admnistrasi perkantoran	100 % 70 % 80 % 86 % 95 %											
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1532	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi perkantoran presentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik presentase keselarasan program renja perangkat daerah dan rkpd presentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja Terlaksananya Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	95 % 70 % 80 % 86 % 100 % 100 % 100 %											
1533	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	7.731.614.487,00	7.577.304.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731.614.487,00	7.577.304.210,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %											
1534	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1535	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.866.246,00	98.866.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.866.246,00	98.866.246,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1536	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1537	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1538	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan Laporan	125.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Prasarana Gedung	0 unit											
1539	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1540	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah Tersedianya Jasa Komunikasi , sumberdaya air dan Listrik Tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %											
1541	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1542	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.100.000.000,00	995.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	995.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1543	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1544	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150 Laporan	1.550.000.000,00	1.650.505.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000.000,00	1.650.505.455,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya Terrlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan kendaraan Dinas atau Operasional tersedianya Mebeleur yang siap dipakai Tersedianya Mebeleur yang telah dipelihara	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %											
1545	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	68.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	73.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1546	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	24 Unit	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1547	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	94.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pertumbuhan omzet koperasi	1.08 %											
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegaiatan pengawasan dan pembinaan koperasi Jumlah koperasi yang di awasi Jumlah Koperasi Yang Diawasi Pertumbuhan omzet koperasi	300 Kali 300 Koperasi 300 Koperasi 1.08 %											
1548	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	70 Unit Usaha	43.692.000,00	43.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692.000,00	43.692.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Aktif Persentase KSP/USP koperasi sehat	70.39 % 76.60 %											
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penilaian tingkat kesehatan koperasi Jumlah KSP Sehat Jumlah USP Sehat Persentase koperasi aktif Persentase KSP/USP koperasi sehat	300 kali 10 KSP 46 USP 70.39 % 76.60 %											
1549	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	27.065.549,00	27.065.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.065.549,00	27.065.549,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi produksi Persentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar online Persentase koperasi yang mengakses pembiayaan perbankan	1.40 % 21.28 % 96.11 %											
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif katagori Sehat yang bisa mengakses Perbankan Jumlah Koperasi aktif yang katagori sehat yang bisa mengakses perbankan Jumlah Koperasi yang menghasilkan produk Persentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar online Presentase Koperasi Produksi presentase koperasi yang mngakses pembiayaan perbankan	51 Koperasi 51 Kop 8 Kop 21.28 % 1.40 % 96.11 %											
1550	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Unit Usaha	525.170.000,00	525.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.170.000,00	525.170.000,00	DAK Non Fisik-PK2UKM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/ UB Presentase Masyarakat Miskin Yang Menjadi Wirausaha yang bermitra dengan UMK/UB Persentase usaha mikro yang mengakses pembiayaan perbankan Presentase Rumah Tangga Miskin yang Menjadi Wirausaha yang Mengakses Modal Usaha Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha dan bisa mengakses modal usaha Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0.38 % 1.80 % 1.80 % 21.50 % 2.30 % 3,00 % 88.50 %											
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro telah di data untuk di kembangkan Jumlah usaha mikro telah di data untuk di kembangkan (terget awal 100. target akhir 300) Jumlah usaha mikro yang akan di berdayakan Jumlah Usaha Mikro yang akan diberdayakan Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemudahan perijinan Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi kemudahan perijinan Pertumbuhan Jumlah usaha mikro Presentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/UB Presentase Usaha mikro yang mengakses pembiayaan perbankan	205 UKM 205 UKM 260 UKM 260 UKM 220 UKM 220 UKM 0.38 % 2.30 % 21.50 %											
1551	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	400 Unit Usaha	500.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	690.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Unit usaha Mikro Naik Kelas Yang Difasilitasi Presentase Usaha Mikro yang Mempunyai Izin Usaha	0.40 % 21.50 %											
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil Presentase Unit Usaha Mikro naik kelas yang difasilitasi presentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	65 UKM 80 UKM 0.40 % 21.50 %											
1552	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi													
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	350 Unit Usaha	283.574.131,00	792.174.131,00	273.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.174.131,00	792.174.131,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Presentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD Presentase pemenuhan sarpraspendukung kinerja Cakupan Pelayanan admnistrasi perkantoran	100 % 70 % 80 % 86 % 95 %											
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %											
1553	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya Terrlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan kendaraan Dinas atau Operasional tersedianya Mebeleur yang siap dipakai Tersedianya Mebeleur yang telah dipelihara	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %											
1554	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-											
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-											
1555	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	8.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	14.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar dalam kondisi baik Persentase kios/ los yang dimanfaatkan	73.00 % 93.00 %											
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/renovasi/rehab Jumlah sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun/renovasi/rehap Jumlah sarana distribusi perdagangan yang tersedia Persentase pasar dalam kondisi baik Presentase los/kios yang dimanfaatkan	93 % 93 % 90 % 73 % 93 %											
1556	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit	280.183.375,00	490.183.375,00	200.000.000,00	135.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.183.375,00	625.833.375,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1557	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	36.750.000,00	36.750.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.750.000,00	36.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola pasar yang akan adakan pembinaan Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan dibina Jumlah Pengelola sarana Distribusi Perdagangan dibina Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	0 % 90 % 90 Pengelola 95 %											
1558	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1559	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350.000,00	28.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase disparitas harga kepokmas antar wilayah Jumlah Barang Penting yang Di awasi Jumlah Pelaku Usaha Distribusi Pupuk Bersubsidi yang di Awasi	2.00 % 20 Barang 86.00 Distributor											
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah barang penting yang diawasi Jumlah barang pokok dan barang penting yang diawasi stoknya Jumlah pelaku usaha distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi Jumlah stok barang pokok dan penting yang tersedia Presentase dispasirtas harga kepokmas antar wilayah	20 Barang 79 barang 86 Usaha 100 % 2 %											
1560	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat													
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	20 Laporan	1.007.840.000,00	1.229.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.840.000,00	1.229.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang pokok dan penting yang diawasi stoknya jumlah kegiatan pemantauan harga	79 barang 200 kali											
1561	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	55.047.855,00	59.047.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.047.855,00	59.047.855,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha penyalur pupuk dan pestisida yang diawasi jumlah stok pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	80 orang 68267 ton											
1562	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi													
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	37 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan komoditas eksport	4.90 %											
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pameran dagang lokal Jumlah Kegiatan pameran yang dilaksanakan Jumlah komoditas ekspor yang di promosikan Jumlah Komoditas Ekspor yang di promosikan Jumlah pelaku usaha yang telah dibina dan dilatih jumlah produk ekspor yang mempunyai citra Jumlah produk unggulan yang menjadi komoditas ekspor pertumbuhan jumlah komoditas ekspor	1 kegiatan 2 kegiatan 10 komoditas 10 % 50 orang 75 produk 75 produk 4.9 %												
1563	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1564	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor													
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	12.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	7.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rasio Metrologi Legal yang di Tera Ulang Rasio barang cukai ilegal yang beredar	7.00 % 7.00 angka											
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan /penyuluhan tera, tera-tera ulang metrolohi legal Jumlah Kegiatan tera/tera-tera ulang metrologi legal Jumlah UTTP legal yang di tera/tera-tera ulang Rasio Metrologi legal yang ditera/tera ulang	15 Kgt 105 Kgt 1036 UTTP 7 %											
1565	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1184 Unit	85.107.135,00	93.107.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.107.135,00	93.107.135,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1566	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	15 Orang	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan omset market place lokal produk UMKM Persentase market place lokal yang memasarkan produk lokal Persentase toko modern yang memasarkan produk lokal	2.00 % 58.00 % 78.90 %											
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah market place yang memasarkan produk lokal Jumlah produk lokal yang dipasarkan di Toko Modern jumlah produk lokal yang masuk sistem jaringan perdagangan Pertumbuhan omset market place lokal produk umkm presentase marketplace lokal yang memasarkan produk lokal Presentase toko modern yang memasarkan produk lokal	3 Produk 16 Prdk 4 Produk 2 % 58 % 78.90 %											
1567	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 persen											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi belanja administrasi umum	100 persen											
1568	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.334.200,00	16.334.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.334.200,00	16.334.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1569	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.495.062,00	13.495.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.495.062,00	13.495.062,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1570	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1571	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	144.803.700,00	144.803.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.803.700,00	144.803.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja pelayanan administrasi	100 persen											
1572	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100 persen											
1573	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	22.403.920,00	22.403.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.403.920,00	22.403.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	100 persen											
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan	48 Dokumen											
1574	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	425.790.855,00	450.790.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.790.855,00	450.790.855,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1575	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	61.906.032,00	61.906.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.906.032,00	61.906.032,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1576	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	158.651.290,00	169.751.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.651.290,00	169.751.290,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kesepakatan/MOU yang difasilitasi	15 Dokumen											
1577	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	68.365.134,00	68.365.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.365.134,00	68.365.134,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja Presentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja	100 % 100 % 100 %											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi belanja administrasi umum	100 %											
1578	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1579	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.815.000,00	10.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815.000,00	10.815.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1580	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1581	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
1582	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1583	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1584	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1585	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Kebijakan Penataan Organisasi yang diPublikasikan Rata rata Nilai RB Perangkat Daerah	100 % 71 angka											
1586	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	44 Dokumen	81.340.520,00	81.340.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.340.520,00	81.340.520,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1587	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	102.746.480,00	102.746.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.746.480,00	102.746.480,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1588	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	55.988.000,00	55.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.988.000,00	55.988.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	12 dokumen											
1589	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase realisasi belanja pelayanan administrasi	100 persen											
1590	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.117.500,00	15.117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117.500,00	15.117.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1591	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.134.000,00	15.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134.000,00	15.134.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1592	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.820.000,00	13.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.820.000,00	13.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1593	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 persen											
1594	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 persen											
1595	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1596	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase peraturan daeerah yang di tindaklanjuti dengan peraturan bupati	100 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	nilai JDIH kabupaten persentase jumlah gugatan yang difasilitasi Persentase penyusunan produk hukum	100 persen 100 persen 100 persen											
1597	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	12 Dokumen	95.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1598	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	85.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1599	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	12 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja	100 %											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi belanja administrasi umum	100 %											
1600	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.479.037,00	19.011.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.479.037,00	19.011.487,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1601	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.000.000,00	10.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	10.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1602	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1603	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	54.925.000,00	48.216.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.925.000,00	48.216.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1604	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	250.000,00	0,00	45.750.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1605	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1606	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	70.180.000,00	67.395.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.180.000,00	67.395.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1607	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	20.930.686,00	20.930.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930.686,00	20.930.686,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1608	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 %											
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100 %											
1609	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	3.200.000.000,00	3.625.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000.000,00	3.625.652.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1610	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	15 Dokumen	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1611	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Umum Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %											
1612	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	19.010.268.696,00	17.946.543.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010.268.696,00	17.946.543.249,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi belanja administrasi umum	100 %											
1613	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	60.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1614	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	125.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1615	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1616	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1617	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1618	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1619	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1620	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	1.900.000.000,00	2.403.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	2.403.226.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1621	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.200.000.000,00	1.240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.240.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1622	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1623	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	289.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1624	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	150.000.000,00	510.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	510.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1625	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1626	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1627	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1628	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1629	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1630	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan	581.098.080,00	586.098.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.098.080,00	586.098.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1631	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1632	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.308.858.500,00	2.266.858.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.858.500,00	2.266.858.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1633	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	500.156.687,00	575.156.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.156.687,00	575.156.687,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1634	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	500.000.000,00	575.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	575.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1635	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	110.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1636	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	30.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1637	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	900.342.085,00	1.100.342.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.342.085,00	1.100.342.085,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1638	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan	100 %											
1639	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	727.616.437,00	803.661.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.616.437,00	803.661.562,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1640	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1641	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	35.520.871,00	35.520.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.520.871,00	35.520.871,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1642	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Persentase pelayanan kedinasan pimpinan	100 % 100 %											
1643	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1644	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	600.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	640.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1645	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	500.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	420.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1646	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1647	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.696.400,00	8.696.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696.400,00	8.696.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1648	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1649	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1650	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
1651	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	160 Laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1652	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	27.423.755,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.423.755,00	25.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1653	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	0,00	11.223.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223.755,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1654	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1655	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti kebijakan	100 %											
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tertangani Prsentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	100 % 100 %											
1656	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50 Dokumen	0,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1657	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1658	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	77 Laporan	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1659	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	77 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan yang tertangani	100 %											
1660	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	30 Dokumen	902.724.200,00	902.724.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.724.200,00	902.724.200,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1661	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	6 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Belanja Pelayanan Administrasi	12 bulan											
1662	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	55.574.000,00	85.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.574.000,00	85.574.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1663	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.094.000,00	132.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.094.000,00	132.094.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1664	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1460 Dokumen	6.590.000,00	6.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00	6.590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1665	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	457.500.000,00	425.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.500.000,00	425.740.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1666	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	12 bulan											
1667	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1668	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	28.000.000,00	29.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	29.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan											
1669	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1670	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Kegiatan Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	12 bulan											
1671	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1672	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	222.020.000,00	307.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.020.000,00	307.020.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1673	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	135.331.760,00	135.331.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.331.760,00	135.331.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 % persen											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi belanja administrasi umum	100 %											
1674	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.275.494,00	10.275.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275.494,00	10.275.494,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1675	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1676	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1677	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase aset sekretariat daerah dalam kondisi baik	100 % persen											
1678	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
1679	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.869.801,00	1.869.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.801,00	1.869.801,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1680	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.930.686,00	24.930.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930.686,00	24.930.686,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1681	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	33.628.701,00	33.628.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.628.701,00	33.628.701,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1682	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan	100 % 85 angka											
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan	100 % persen 85 angka											
1683	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	31.776.001,00	31.776.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.776.001,00	31.776.001,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1684	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	163.043.748,00	163.043.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.043.748,00	163.043.748,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1685	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	19 Laporan	130.096.337,00	130.096.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.096.337,00	130.096.337,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1686	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1687	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1688	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1689	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1690	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
1691	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1692	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %											
1693	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1694	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian Kinerja Bidang Perekonimian dan Pembangunan (SPM) Indeks Tata Kelola Pengadaan Capaian kinerja bidang perekonomian dan pembangunan (SAKIP) Capaian kinerja bidang perekonomian dan pembangunan (MCP)	100 % 60 Angka 71 angka 90 angka											
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks tata kelola pengadaan	60 Angka											
1695	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	30 Dokumen	172.125.000,00	172.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.125.000,00	172.125.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1696	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1697	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	72.272.890,00	72.272.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.272.890,00	72.272.890,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02	SEKRETARIAT DPRD													
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 % 2 dokumen											
1698	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/14 Orang/bulan	3.160.907.121,00	3.181.273.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.907.121,00	3.181.273.210,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %											
1699	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-											
1700	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1701	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1702	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1703	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1704	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1705	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1706	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.150.000,00	1.150.000,00	648.850.000,00	753.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	755.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1707	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	900.000,00	0,00	124.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1708	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1709	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase realisasi belanja Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1710	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1711	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1712	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.013.240.000,00	1.263.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.240.000,00	1.263.240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase realisasi pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1713	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	416.288.688,00	666.288.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.288.688,00	666.288.688,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1714	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1715	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40.000.000,00	93.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	93.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1716	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	142.000.000,00	242.000.000,00	58.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100 %											
1717	4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	270.610.000,00	241.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.610.000,00	241.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Presentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %											
1718	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45/14 Orang/Bulan	25.352.939.594,00	25.352.939.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.352.939.594,00	25.352.939.593,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1719	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	180 Paket	684.900.000,00	1.084.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.900.000,00	1.084.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1720	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	44.370.000,00	44.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.370.000,00	44.370.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD	100 %											
1721	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12.000.000.000,00	13.848.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	13.848.896.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Hasil Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Persentase Peraturan Daerah inisiatif DPRD	100 % 20 %											
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda Inisiatif dan Keputusan DPRD yang dihasilkan	32 angka											
1722	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	385.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00	535.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-											
1723	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan Layanan Agenda Kerja DPRD	100 %											
1724	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	15 Dokumen	2.582.340.000,00	2.277.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.340.000,00	2.277.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1725	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli													
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	24 Orang	180.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	205.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1726	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi													
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1727	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	262.150.000,00	470.650.000,00	100.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.150.000,00	563.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang sesuai dengan prioritas daerah	100 %											
1728	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses													
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	900.000.000,00	913.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	913.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.01	PERENCANAAN													
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja	100 %											
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 persen											
1729	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1730	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.383.280,00	11.383.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383.280,00	11.383.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen											
1731	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	5.733.600.248,00	5.666.588.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733.600.248,00	5.666.588.505,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1732	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1733	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1734	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	11.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1735	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1736	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1737	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	213.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	213.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1738	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1739	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1740	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400.000,00	134.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1741	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	541.280.240,00	521.280.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.280.240,00	521.280.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1742	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	106.583.052,00	106.583.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.583.052,00	106.583.052,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1743	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	54 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1744	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1745	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	37.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu Persentase capaian kinerja program terhadap target kinerja RKPD	100 % 80 %											
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100 %											
1746	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1747	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1748	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	0,00	430.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1749	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD	100 %											
1750	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	6.700.000,00	13.700.000,00	28.300.000,00	78.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	92.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100 %											
1751	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	40 Laporan	56.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	39.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 persen											
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu	100 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1752	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	61.879.700,00	86.879.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.879.700,00	86.879.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1753	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	204.215.500,00	254.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.215.500,00	254.215.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	100 %											
1754	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	99.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	124.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1755	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu	100 persen											
1756	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00	203.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1757	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Laporan	144.500.000,00	144.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500.000,00	144.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi yang diterapkan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	14 % 81 %											
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	81 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1758	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1759	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan													
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	persentase hasil litbang bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	100 %											
1760	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan teknologi yang difasilitasi	6 Angka											
1761	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1762	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1763	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
1764	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	36.287.785.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.287.785.531,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1765	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	0,00	36.793.261.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.793.261.914,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
1766	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1767	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	254.000.000,00	309.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000.000,00	309.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1768	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	200.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	480.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1769	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1770	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	171.837.807,00	546.837.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.837.807,00	546.837.807,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1771	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	16.830.000,00	1.661.630.000,00	283.170.000,00	988.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	2.650.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1772	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1773	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1774	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2.352.000,00	12.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.000,00	12.352.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1775	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	12.780.302.129,00	12.135.998.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780.302.129,00	12.135.998.499,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1776	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1.135.894.976,00	1.185.094.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.894.976,00	1.185.094.976,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1777	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	110.000.000,00	200.432.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	200.432.370,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1778	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	80.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	135.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1779	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dan RKPD Persentase silpa terhadap APBD	100 % 6 %											
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tepat waktu	100 %											
1780	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	24.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.615.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1781	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	0,00	22.070.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.070.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1782	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	24.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.615.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1783	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	0,00	21.169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.169.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1784	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD													
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	0,00	15.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1785	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD													
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	21.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1786	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	18.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1787	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	0,00	17.669.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1788	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD													
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1789	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD													
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1790	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD													
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1791	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD													
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	0,00	9.003.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1792	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	209.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.200.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1793	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	0,00	109.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1794	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	40.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1795	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	0,00	50.446.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.446.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-											
1796	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 Dokumen	265.830.480,00	265.830.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.830.480,00	265.830.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1797	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-											
1798	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	119.780.480,00	117.780.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.780.480,00	117.780.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1799	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-											
1800	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	223.682.370,00	213.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.682.370,00	213.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-											
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-											
1801	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga													
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	25.558.500,00	25.558.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.558.500,00	25.558.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1802	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	624.000.000,00	674.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000.000,00	674.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1803	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 Laporan	153.992.500,00	153.992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.992.500,00	153.992.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1804	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	60.872.900,00	60.872.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.872.900,00	60.872.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-											
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-											
1805	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1806	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	297.022.427,00	377.022.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.022.427,00	377.022.427,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1807	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7045 Obyek Pajak	668.171.720,00	703.171.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.171.720,00	703.171.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1808	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Dokumen	802.607.184,00	1.182.607.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.607.184,00	1.182.607.184,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1809	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Pejabat Pengelola Keuangan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-											
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-											
1810	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	36.716.000,00	36.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.364.315.070,00	393.356.883.070,00	386.401.031.070,00	393.393.599.070,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1811	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1812	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051.135.000,00	9.051.135.000,00	9.051.135.000,00	9.051.135.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kepegawaian Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dan RKPD	100 %											
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %											
1813	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1814	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %											
1815	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	0,00	4.253.351.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.351.461,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1816	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.472.047.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472.047.123,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1817	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	61.800.000,00	53.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800.000,00	53.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1818	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1819	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1820	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1821	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1822	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1823	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	375 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1824	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336 Laporan	267.400.000,00	267.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.400.000,00	267.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1825	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1826	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1827	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1828	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	262.600.000,00	262.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.600.000,00	262.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1829	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	77.250.000,00	85.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.250.000,00	85.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1830	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	115 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1831	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1832	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian Persentase Layanan Kepegawaian yang Berbasis Teknologi Informasi	100 % 83 %											
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Yang Difasilitasi	954 orang											
1833	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1834	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK													
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	323 Dokumen	218.900.000,00	376.811.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.900.000,00	376.811.666,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1835	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian													
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	331 Dokumen	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1836	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN													
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	50.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1837	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	14.581.000,00	14.581.000,00	20.419.000,00	20.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1838	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	300 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN yang difasilitasi	100 %											
1839	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1840	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	200.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi pengembangan kompetensinya pada tahun berkenaan	929 Orang											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1841	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN													
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1842	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1843	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	50 Dokumen	236.800.000,00	236.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.800.000,00	236.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1844	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	125 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1845	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional													
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan/dokumen evaluasi kinerja aparatur	3 Dokumen											
1846	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1847	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1848	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	25 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1849	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1000 Orang	16.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1850	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		inspektorat													
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Keselarasan Program Kerja Perangkat Daerah dan RKPD	100 %											
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %											
1851	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1852	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	0,00	69.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1853	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	41.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.495.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1854	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %											
1855	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	0,00	7.202.538.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202.538.053,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1856	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.993.222.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993.222.074,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Lulus Mengikuti Diklat	100 %											
1857	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1858	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	0,00	84.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Belanja Umum	100 %											
1859	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1860	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1861	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1862	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1863	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1864	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1865	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1866	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1867	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	250.000,00	250.000,00	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1868	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1869	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1870	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	0,00	25.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1871	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1872	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1873	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	248.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.510.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1874	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	0,00	206.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1875	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	282.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1876	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1877	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1878	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1879	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	65.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase tindak lanjut hasil reviu APIP	100 %											
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase pemeriksaan internal yang dilaksanakan	100 %											
1880	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	96 Laporan	0,00	287.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1881	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	96 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1882	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1883	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1884	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal													
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1885	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal													
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1886	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	100.425.000,00	144.050.000,00	18.137.069,00	18.137.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.562.069,00	162.187.069,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase hasil audit yang ditindaklanjuti	100 %											
1887	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1888	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	24 Laporan	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1889	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	24 Laporan	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah berpredikat WBK Presentase Hasil Penilaian	3.23 % 83.5 %											
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Presentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai B pada LKE RB Presentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai MCP KPK	62.5 % 80 %											
1890	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	39 perangkat daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1891	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1892	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	0,00	191.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1893	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	39 perangkat daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Wonosobo													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen											
1894	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1895	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Gaji dan Tunjangan	100 %											
1896	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	9.175.311.565,00	8.499.580.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175.311.565,00	8.499.580.948,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
1897	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.709.900,00	6.709.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709.900,00	6.709.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1898	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1899	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1900	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.606.800,00	10.606.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606.800,00	10.606.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1901	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1902	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur dan layanan pemerintahan	100 %											
1903	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1904	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	83,5 undefined 100 %											
1905	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1906	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1907	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	83,5 % 100 %											
1908	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1909	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1910	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan	83,5 angka											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terfasilitasi	100 %											
1911	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1912	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terfasilitasi	100 %											
1913	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pembinaan dan Pelayanan Keliling Desa/ Kelurahan	12 laporan 12 Laporan 20 desa/kelurahan											
1914	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	98.700.000,00	98.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700.000,00	98.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase kegiatan pemberdayaan Desa terlaksana	100 %											
1915	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	55.165.000,00	55.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165.000,00	55.165.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan PKK yang terfasilitasi	100 %											
1916	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	4 pokja Keluarga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan	100 %											
1917	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	61.290.000,00	61.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.290.000,00	61.290.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 persen											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
1918	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen											
1919	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1920	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	15.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1921	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1922	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1923	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1924	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Wonosobo Barat													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
1925	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1926	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1927	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1928	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1929	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1930	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
1931	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	8.000.000,00	9.471.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	9.471.392,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1932	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	158.660.000,00	157.188.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.660.000,00	157.188.608,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
1933	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1934	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1935	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
1936	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1937	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	465.800.000,00	465.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.800.000,00	465.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1938	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2600 Keluarga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konûik ant kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
1939	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.745.630,00	50.745.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.745.630,00	50.745.630,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
1940	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Wonosobo Timur													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	12 bulan											
1941	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1942	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.705.700,00	2.705.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.700,00	2.705.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1943	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1944	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	998.500,00	998.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.500,00	998.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1945	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1946	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produkt Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
1947	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	311.520,00	311.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.520,00	311.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1948	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1949	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	99.288.480,00	99.288.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.288.480,00	99.288.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
1950	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1951	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1952	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
1953	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1954	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1955	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	586.972.800,00	586.972.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.972.800,00	586.972.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 Keluarga											
1956	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	63.830.000,00	63.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.830.000,00	63.830.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konûikant kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
1957	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	35.410.000,00	35.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.410.000,00	35.410.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	3 kegiatan											
1958	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1959	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kelurahan Jlamprang													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Kantor yang Terpenuhi	100 %											
1960	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1961	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640.000,00	20.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1962	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1963	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.685.129,00	3.685.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.129,00	3.685.129,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1964	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1965	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %											
1966	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH
1967	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	0,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	12 Bulan											
1968	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1969	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	110.377.760,00	110.377.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.377.760,00	110.377.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %											
1970	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1971	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1972	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan yang Terfasilitasi	100 %											
1973	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1974	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1975	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	295.296.400,00	295.296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.296.400,00	295.296.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Terlaksananya Kegiatan PKK	1 tahun 12 Bulan											
1976	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	989 Keluarga	87.016.000,00	87.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.016.000,00	87.016.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %											
1977	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.745.630,00	50.745.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.745.630,00	50.745.630,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasa Kepala Daerah	100 %											
1978	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	44 Orang	14.196.348,00	14.196.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196.348,00	14.196.348,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kejiwan													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum	100 %											
1979	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1980	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1981	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1982	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1983	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
1984	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produkt Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
1985	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1986	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	13.346.800,00	13.346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346.800,00	13.346.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1987	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	122.269.084,00	122.269.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.269.084,00	122.269.084,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
1988	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	25.160.000,00	25.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.160.000,00	25.160.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1989	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana	100 %											
1991	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1992	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1993	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	332.180.020,00	332.180.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.180.020,00	332.180.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	12 Bulan											
1994	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	500 Keluarga	120.000.000,00	165.486.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	165.486.331,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
1995	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	54.202.000,00	54.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.202.000,00	54.202.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terlaksana	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	2 Kegiatan											
1996	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kelurahan Sambek													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi kantor terpenuhi	100 %											
1997	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1998	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1999	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2001	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2002	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase Pemenuhan sarpras kantor pendukung kinerja	1 Paket 100 %											
2003	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2004	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100 %											
2005	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2006	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280.000,00	14.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2007	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	151.554.005,00	151.554.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.554.005,00	151.554.005,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tercukupinya pemeliharaan sarana prasarana kantor yang tersedia	2 Unit 4 Unit 100 %											
2008	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2009	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2010	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2011	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif Persentase lembaga masyarakat aktif	100 % 100 %											
2012	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2013	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2014	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	305.049.877,00	305.049.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.049.877,00	305.049.877,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan PKK	100 %											
2015	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1225 Keluarga	73.410.000,00	73.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.410.000,00	73.410.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, ketenteraman, ketertiban umum tingkt kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terlaksana	100 %											
2016	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	45.132.000,00	45.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.132.000,00	45.132.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelnggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 % 175 orang											
2017	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	156 Orang	24.090.000,00	24.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.090.000,00	24.090.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2018	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Kelurahan Mlipak													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	12 Bulan											
2019	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2020	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2021	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2022	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2023	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2024	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00	25.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
2025	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2026	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2027	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang	12 Bulan											
2028	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2029	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2030	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	121.600.000,00	121.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600.000,00	121.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
2031	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2032	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2033	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
2034	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2035	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	344.300.000,00	344.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.300.000,00	344.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	12 Bulan											
2036	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1838 Keluarga	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik Antar Kelompok/Desa/Kelurahan Terselesaikan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
2037	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	1 Tahun											
2038	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kelurahan Pagerkukuh													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2039	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2040	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.498.270,00	3.498.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.270,00	3.498.270,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2041	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.268.450,00	2.268.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.450,00	2.268.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2042	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.485.800,00	3.485.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.800,00	3.485.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2043	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2044	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	8.947.000,00	8.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947.000,00	8.947.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
2045	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2046	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produkt Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
2047	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12.000.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2048	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	98.392.960,00	98.555.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.392.960,00	98.555.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
2049	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.656.810,00	2.656.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.810,00	2.656.810,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2050	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2051	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif jumlah pelaksanaan Musrenbang persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 % 2 angka 100 %											
2052	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.973.730,00	9.973.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973.730,00	9.973.730,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2053	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2054	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	405.940.685,00	406.277.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.940.685,00	406.277.885,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
2055	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	86 Keluarga	75.905.585,00	75.905.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.905.585,00	75.905.585,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
2056	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	37.890.000,00	37.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.890.000,00	37.890.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase konûik ant kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
2057	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	13.040.000,00	13.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040.000,00	13.040.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
		Kelurahan Rojoimo													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	12 Bulan											
2058	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2059	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2060	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2061	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2062	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
2063	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2064	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Kantor Yang Terfasilitasi	100 %											
2065	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2066	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	142.057.040,00	129.557.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.057.040,00	129.557.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
2067	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2068	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2069	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Terfasilitasi	100 %											
2070	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2071	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2072	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	403.800.000,00	403.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.800.000,00	403.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
2073	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1323 Keluarga	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Terfasilitasi	100 %											
2074	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi	100 %											
2075	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	43 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kelurahan Kramatan													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2076	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2077	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2078	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2079	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2080	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2081	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
2082	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2083	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Kantor Yang Terfasilitasi	100 %											
2084	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2085	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	113.986.565,00	96.101.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.986.565,00	96.101.765,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
2086	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2087	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2088	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2089	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	22.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	22.884.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyrakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Terfasilitasi	100 %											
2090	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2091	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2092	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	409.250.000,00	409.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.250.000,00	409.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan PKK	12 Bulan											
2093	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1000 Keluarga	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Terfasilitasi	100 %											
2094	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi	100 %											
2095	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kelurahan Tawangsari													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2096	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2097	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2098	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2099	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2100	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2101	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2.544.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.000,00	5.830.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
2102	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
2103	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2104	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.520.474,00	9.234.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520.474,00	9.234.474,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2105	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	120.872.240,00	116.872.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.872.240,00	116.872.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
2106	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2107	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2108	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
2109	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2110	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2111	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	268.732.054,00	268.732.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.732.054,00	268.732.054,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
2112	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	841 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiban Umum tingkat Kelurahan	100 %											
2113	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	56.800.595,00	56.800.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800.595,00	56.800.595,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	95 %											
2114	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2115	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	6.108.110,00	6.108.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108.110,00	6.108.110,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Jaraksari													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	15 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
2116	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2117	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.404.693,00	6.404.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404.693,00	6.404.693,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2118	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2119	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2120	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2121	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.264.000,00	15.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.264.000,00	15.264.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
2122	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	14.176.000,00	14.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176.000,00	14.176.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produkt Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
2123	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2124	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	111.897.760,00	111.897.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.897.760,00	111.897.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
2125	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2126	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2127	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2128	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
2129	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2130	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2131	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	643.202.000,00	643.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.202.000,00	643.202.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
2132	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2500 Keluarga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan	100 %											
2133	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
2134	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2135	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Bumireso													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2136	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2137	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2138	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2139	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2140	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2141	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
2142	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2143	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produkt Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
2144	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2145	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12.220.000,00	12.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220.000,00	12.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2146	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	112.684.160,00	112.684.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.684.160,00	112.684.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
2147	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2148	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2149	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.080.000,00	40.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.080.000,00	40.080.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 %											
2150	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2151	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2152	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	324.600.000,00	324.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.600.000,00	324.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
2153	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70 Keluarga	35.692.500,00	35.692.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692.500,00	35.692.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konûikant kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
2154	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
2155	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kalianget													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2156	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2157	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2158	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	6.061.100,00	6.061.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061.100,00	6.061.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2159	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2160	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2161	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
2162	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	12.818.900,00	12.818.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818.900,00	12.818.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kenaikan nilai komponen kinerja	100 %											
2163	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2164	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	172.097.760,00	172.097.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.097.760,00	172.097.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
2165	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2166	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2167	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase lembaga Masyarakat Aktif persentase kenaikan BUMDes rintisan menjadi BUMDes dengan status berkembang Persentase kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi Persentase kenaikan desa / kelurahan yang memiliki lembaga pengelola sampah 3R yang aktif	100 % 10 % 100 % 15 % 9.43 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
2168	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2169	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2170	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	437.800.000,00	437.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.800.000,00	437.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
2171	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
2172	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
2173	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kecamatan Kertek													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	15 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2174	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2175	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.783.969.440,00	3.520.817.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.969.440,00	3.520.817.708,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
2176	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2177	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2178	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2179	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2180	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2181	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2182	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2183	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2184	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.040.000,00	117.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.040.000,00	117.040.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah	100 %											
2185	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2186	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2187	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	17.820.569,00	17.820.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820.569,00	17.820.569,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedia Persentase kenaikan desa yang melakukan verval data secara kontinyu Persentase penurunan kasus pernikahan usia anak nilai rata-rata persepsi pelayanan	100 % 100 % 25 % 80 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional	100 %											
2188	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2189	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi baik	68 %											
2190	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan	100 %											
2191	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21 Laporan	67.200.000,00	82.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200.000,00	82.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R	100 % 15 % 9,43 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk penanggulangan bencana Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk pengelolaan sampah Persentase kenaikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif	100 % 100 % 100 % 5 %											
2192	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250.000,00	44.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %											
2193	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	4 Keluarga	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500.000,00	80.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan LINMAS dan RPB, Fasilitasi Kegiatan Patroli Wilayah, dan Fasilitasi Kegiatan Pemilu dan Pilkada	100 %											
2194	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	42.725.000,00	42.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.725.000,00	42.725.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelanggaran pilkades yang terselesaikan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase kenaikan ZIS Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades	100 % 100 %											
2195	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar Persentase kenaikan Indeks ketahanan ekonomi IDM	100 % 13,22 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi dasar Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBDes Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita	100 % 100 % 100 % 5 % 100 % 100 %											
2196	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	15.291.000,00	45.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291.000,00	45.291.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2197	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2198	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	47.470.000,00	47.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.470.000,00	47.470.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kelurahan Kertek													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan											
2199	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.044.275,00	2.044.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.275,00	2.044.275,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2200	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	12.551.499,00	12.551.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551.499,00	12.551.499,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2201	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2202	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2203	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2204	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	27.813.100,00	27.813.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.813.100,00	27.813.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Kantor Yang Terfasilitasi	100 %											
2205	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2206	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2207	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760.000,00	53.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarpras Kantor Dalam Kondisi Baik	100 %											
2208	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2209	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2210	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyrakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Terfasilitasi	12 Bulan											
2211	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.823.950,00	12.823.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823.950,00	12.823.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2212	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	25.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2213	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	484.034.400,00	486.434.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.034.400,00	486.434.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan PKK	12 Bulan											
2214	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	989 Keluarga	53.923.000,00	51.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.923.000,00	51.326.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Terfasilitasi	undefined undefined											
2215	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	43.524.000,00	41.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.524.000,00	41.124.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi	1 Tahun											
2216	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	17.150.000,00	23.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150.000,00	23.747.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kelurahan Wringinanom													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Komponen Instalasai Penerangan Bangunan Kantor,Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,Cakupan Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	5 Paket											
2217	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2218	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.531.279,00	5.531.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531.279,00	5.531.279,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2219	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2220	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.776.719,00	1.776.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.719,00	1.776.719,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2221	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2222	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	5.724.000,00	5.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724.000,00	5.724.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket											
2223	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Jasa Surat Menyurat,Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik Jumlah Pegawai Yang Menerima Jasa Pelayanan Umum	2 Paket 7 Pegawai											
2224	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2225	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107.840.000,00	107.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.840.000,00	107.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarpras Kantor Dalam Kondisi Baik	100 %											
2226	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2227	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2228	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas											
2229	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	12.287.625,00	12.287.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.287.625,00	12.287.625,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas											
2230	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	270.136.600,00	270.136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.136.600,00	270.136.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan PKK	1 Tahun											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2231	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	35 Keluarga	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran,Kebencanaan,Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kali											
2232	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	41.444.000,00	41.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.444.000,00	41.444.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi	1 Tahun											
2233	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	19.199.500,00	19.199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199.500,00	19.199.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kecamatan Selomerto													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Pertemuan / Rapat	15 Kali											
2234	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2235	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	13 Kali											
2236	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang/bulan	3.483.400.576,00	2.915.622.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483.400.576,00	2.915.622.911,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terealisasinya Pembayaran Tepat Waktu	22 Kali											
2237	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2238	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.937.950,00	6.937.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.950,00	6.937.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2239	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2240	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296.000,00	10.296.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2241	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2242	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070.000,00	10.070.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
2243	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terealisasinya Kegiatan Surat Menyurat	1 Tahun											
2244	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2245	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2246	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107.090.000,00	107.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.090.000,00	107.090.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya Pemeliharaan Fasilitas Kantor	12 Kali											
2247	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2248	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2249	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pramusrenbangdesa atau Kelurahan yang Di Selenggarakan tepat Waktu	100 Persen											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Realisasi Kegiatan Pramusrenbang Tepat Waktu	2 Kali											
2250	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2251	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penerbitan dokumen non perizinan sesuai SOP	100 Persen											
2252	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10.045.350,00	10.045.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045.350,00	10.045.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terealisasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 Persen											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kenaikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif Terealisasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 Persen 12 Kali											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2253	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40.416.100,00	40.416.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.416.100,00	40.416.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan Partisipasi Keluarga dalam Peningkatan Sumberdaya Perempuan Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Masyarakat	100 % 100 %											
2254	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	12731 Keluarga	83.211.040,00	83.211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.211.040,00	83.211.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 Persen											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase FKUB aktif Persentase FKUB yang aktif	85 % 85 %											
2255	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36.005.669,00	36.005.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.005.669,00	36.005.669,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 Persen											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan permberdayaan	100 %											
2256	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	510 Orang	97.242.890,00	115.137.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.242.890,00	115.137.890,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100 Persen											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Kegiatan Tepat Waktu	100 Persen											
2257	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	30.893.700,00	38.048.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.893.700,00	38.048.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2258	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Dokumen	25.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Selomerto													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
2259	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2260	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2261	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2262	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2263	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2264	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2265	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.600.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	10.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2266	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	181.303.136,00	177.703.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.303.136,00	177.703.136,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2267	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2268	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
2269	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2270	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	140.000,00	140.000,00	74.860.000,00	74.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2271	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	337.493.610,00	339.893.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.493.610,00	339.893.610,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
2272	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1000 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan	100 %											
2273	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.000.000,00	58.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	62.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan.	100 %											
2274	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	500 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Wonorejo													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
2275	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2276	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.020.290,00	5.020.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.290,00	5.020.290,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2277	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2278	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2279	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2280	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2281	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2282	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	14.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2283	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2284	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2285	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	170.387.072,00	140.507.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.387.072,00	140.507.072,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %											
2286	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2.941.312,00	2.941.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.312,00	2.941.312,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2287	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif Presentase Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Aktif	100 % 100 %											
2288	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9.678.000,00	9.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678.000,00	9.678.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2289	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	253.561.296,00	253.561.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.561.296,00	253.561.296,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif	100 %											
2290	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	800 Keluarga	62.175.465,00	62.175.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.175.465,00	62.175.465,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kenaikan ZIS	100 %											
2291	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.944.000,00	22.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944.000,00	22.944.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai amanat peraturan perundang - undangan yang dilaksanakan	100 %											
2292	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	51 Orang	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650.000,00	22.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Leksono													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	2 Dokumen											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	2 Dokumen											
2293	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 OB											
2294	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.394.478.353,00	2.227.992.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.478.353,00	2.227.992.303,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	95 %											
2295	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2296	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2297	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2298	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2299	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2300	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	41.080.000,00	41.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.080.000,00	41.080.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen											
2301	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2302	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	90.220.000,00	90.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.220.000,00	90.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98 %											
2303	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2304	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaporan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	13 Dokumen											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi/sinergi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	13 Dokumen											
2305	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2306	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah layanan yang tertangani dibagi target jumlah layanan	100 %											
2307	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	14 Desa											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Dokumen											
2308	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	14 Desa											
2309	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	14 Keluarga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebancanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	14 Desa											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan											
2310	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.250.000,00	79.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan.	14 Dokumen											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14 Dokumen											
2311	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	118.750.000,00	118.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750.000,00	118.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaporan pertanggungjawaban kinerja desa tepat waktu	13 Desa											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawabankinerja tepat waktu	13 Desa											
2312	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2313	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2314	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kelurahan Leksono													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Yang Terlayani	100 %											
2315	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Yang Terlayani	100 %											
2316	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2317	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2318	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2319	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2320	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2321	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Aset Kelurahan dalam Kondisi baik Sarpras pendukung Kinerja terpenuhi	100 % 100 %											
2322	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2323	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2324	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700.000,00	37.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Aset Kelurahan dalam Kondisi baik	100 %											
2325	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2326	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2327	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kenaikan BUMDes rintisan menjadi BUMDes dengan status berkembang Persentase kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif Presentase Lembaga Masyarakat Aktif Persentase kenaikan Koperasi terdaftar di Kecamatan yang terfasilitasi Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R	10 % 100 % 100 % 15 % 9.43 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Masyarakat yang Terfasilitasi	100 %											
2328	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2329	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2330	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	429.450.000,00	429.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.450.000,00	429.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PKK	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2331	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	55 Keluarga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan											
2332	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasaan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											
2333	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Watumalang													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen											
2334	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	1 lap akhir tahun											
2335	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.477.569.814,00	2.303.148.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477.569.814,00	2.303.148.338,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
2336	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2337	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	30.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2338	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2339	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2340	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2341	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
2342	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2343	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2344	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
2345	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2346	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	27.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2347	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000.000,00	89.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %											
2348	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	60.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	64.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2349	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2350	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2351	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester	100 % 100 %											
2352	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2353	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	42.500.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	46.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase sarana dan Prasarana pelayanan umum (sekolah SD/ SMP, Puskesmas) dalam kondisi baik	100 %											
2354	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Informasi Wajib yang Tersedia Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan Persentase Kenaikan Jumlah Informasi Wajib yang Tersedia	100 % 100 % 100 %											
2355	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	61.000.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	68.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Fasilitasi kegiatan Kesehatan dan Pendidikan Fasilitasi pembinaan BumDes/ UMKM/ BankeuDes Fasilitasi pertemuan keluarga FSG Disabilitas	12 bulan 12 bulan 1 kegiatan											
2356	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %											
2357	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	72.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	67.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase konflik antar kelompok/desa/keluraha n yang terselesaikan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi PEMILU dan PILKADA Kegiatan Forkompimcam Pembinaan LINMAS dan RELAWAN Persentase konflik antar kelompok/desa/keluraha n yang terselesaikan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2358	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	33.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi), KerukunanAntar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya GunaMewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI Fasilitasi LOMBA MASJID	1 kegiatan 12 bulan 1 kegiatan											
2359	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	108.000.000,00	139.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	139.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata PemerintahanDesa	1 dokumen											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBDes	100 % 100 %											
2360	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2361	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2362	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2363	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Wonoroto													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2364	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2365	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2366	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2367	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2368	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produkt Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang	100 %											
2369	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2370	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	76.040.000,00	76.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.040.000,00	76.040.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor yang tersedia	100 %											
2371	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2372	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 %											
2373	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana	100 %											
2374	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2375	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	307.243.445,00	307.243.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.243.445,00	307.243.445,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	100 %											
2376	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	989 Keluarga	61.760.000,00	61.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.760.000,00	61.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang Didukung Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan	100 %											
2377	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kecamatan Mojotengah													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran - Persentase pemenuhan sarpras pendukung lainnya	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 persen											
2378	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 persen											
2379	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.764.610.476,00	3.612.631.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.610.476,00	3.612.631.138,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 persen											
2380	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2381	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2382	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.704.600,00	12.704.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.704.600,00	12.704.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2383	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2384	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2385	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur dan layanan pemerintahan	100 Persen											
2386	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.700.000,00	0,00	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2387	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	340.000,00	0,00	30.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 Persen											
2388	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2389	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2390	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105.000.000,00	111.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	111.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pemeliharaan sarpras kantor yang tersedia	100 Persen											
2391	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2392	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2393	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	83,50											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Cakupan desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu - Meningkatnya sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 persen 100 persen											
2394	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	27.996.270,00	27.996.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.996.270,00	27.996.270,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2395	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	-											
2396	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan Administrasi Kependudukan	100 angka											
2397	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.816.249,00	4.726.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816.249,00	4.726.249,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 Persen											
2398	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	26.300.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300.000,00	27.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 Persen											
2399	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran,Kebencanaan,Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik antar Kelompok / Desa / Kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat kecamatan	100 persen											
2400	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	32.072.081,00	32.072.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.072.081,00	32.072.081,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang di dukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100 persen											
2401	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	66.932.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.932.663,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2402	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	0,00	105.956.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.956.294,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa - Terlaksananya Pilkades - Tersusunnya APBDes	100 persen											
2403	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	23.143.660,00	23.143.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.143.660,00	23.143.660,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2404	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2405	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	39.023.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.023.631,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2406	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen	21.739.696,00	21.739.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.739.696,00	21.739.696,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kalibeber													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi pelayanan kantor	100 %											
2407	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2408	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2409	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2410	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	6.630.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2411	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2412	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya produktivitas kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
2413	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.500.000,00	10.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2414	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	141.200.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200.000,00	140.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa sarpras kantor yang tersedia	1 paket											
2415	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2416	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2417	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660.000,00	7.660.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan lembaga masyarakat aktif Jumlah pelaksanaan Musrenbang	100 % 2 angka											
2418	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2419	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2420	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	423.567.419,00	420.457.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.567.419,00	420.457.419,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											
2421	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2404 Keluarga	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok /desa/kelurahan yang terselesaikan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2422	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
2423	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8043 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Mudal													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Adminisrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2424	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2425	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2426	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2427	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2428	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang	100 %											
2429	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2430	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	101.720.000,00	101.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.720.000,00	101.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor Yang Tersedia	1 Paket											
2431	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2432	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2433	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	100 % 1 Kegiatan											
2434	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2435	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	0,00	429.000,00	0,00	424.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2436	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	528.000,00	0,00	574.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2437	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	409.102.200,00	409.102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.102.200,00	409.102.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	1 Tahun											
2438	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2400 Keluarga	65.228.654,00	65.228.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.228.654,00	65.228.654,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terfasilitasinya Kegiatan Pemilu	2 Kegiatan											
2439	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	24.720.000,00	24.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720.000,00	24.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Rasa Cinta tanah Air Yang Didukung Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan	100 %											
2440	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2441	7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila													
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	2 Lembaga Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Kelurahan Andongsili													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2442	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2443	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% Paket	8.230.000,00	8.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230.000,00	8.230.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2444	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% Paket	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2445	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2446	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100% Dokumen	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2447	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100% Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja Karena Dukungan Jasa Penunjang	100 %											
2448	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100% Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2449	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440.000,00	15.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2450	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100% Laporan	89.740.000,00	89.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.740.000,00	89.740.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Sarana Prasarana Kantor yang Tersedia	1 paket											
2451	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2452	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.092.887,00	3.092.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092.887,00	3.092.887,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2453	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan lembaga masyarakat aktif Jumlah pelaksanaan Musrenbang	100 % 2 angka											
2454	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2455	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	324.544.800,00	324.544.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.544.800,00	324.544.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	100 %											
2456	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1188 Keluarga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok /desa/kelurahan yang terselesaikan	100 %											
2457	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang Didukung Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan	100 %											
2458	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Garung													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan dan evaluasi kinerja	100 %											
2459	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2460	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %											
2461	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.738.049.163,00	2.731.278.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.049.163,00	2.731.278.189,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2462	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2463	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2464	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2465	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2466	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2467	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
2468	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
2469	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2470	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2471	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	76.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara	100 %											
2472	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2473	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2474	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100 %											
2475	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2476	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan administrasi kependudukan	100 %											
2477	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana	100 %											
2478	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	100 persen											
2479	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	250 Keluarga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok / desa / kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat kecamatan	100 %											
2480	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
2481	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	350 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan tepat waktu	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersusunnya APBDES	14 desa											
2482	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	22.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	27.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2483	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2484	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 Dokumen	5.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Garung													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan adminitrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi pelayanan Kantor	100 %											
2485	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2486	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2487	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2488	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2489	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2490	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya Kinerja Aparatur dan layanan Pemerintah	100 %											
2491	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya produktifitas kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
2492	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2493	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2494	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	103.329.600,00	103.329.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.329.600,00	103.329.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Pemeliharaan Sarpras kantor yang tersedia	100 %											
2495	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2496	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2497	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentasi lembaga Masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %											
2498	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2499	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	392.122.080,00	392.122.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.122.080,00	392.122.080,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	100 %											
2500	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penyelesaian pelanggan Ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Konflik antar kelompok desa/kelurahan terselesaikan dan ketertiban umum tingkat kelurahan	100 %											
2501	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningktanya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kabangsaan	100 %											
2502	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2503	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70 Orang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Kejajar													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	15 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disetujui Kabupaten	1 Dokumen											
2504	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2505	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	1 angka 1 Angka											
2506	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.659.886.333,00	3.585.104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.886.333,00	3.585.104.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
2507	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2508	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2509	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2510	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2511	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2512	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2513	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2514	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.396.390,00	1.396.390,00	43.603.610,00	43.603.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2515	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2516	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.056.000,00	19.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056.000,00	19.056.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2517	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	125.200.000,00	125.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200.000,00	125.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
2518	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2519	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2520	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2521	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2522	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kenaikan desa yang melakukan verval data secara kontinyu Persentase penurunan kasus pernikahan usia anak Nilai Rata rata Persepsi Pelayanan nilai rata-rata persepsi pelayanan Presentase kenaikan nilai SKM Persentase Kenaikan Nilai SKM	100 % 15 % 3 Angka 80 % 83.5 angka 83,5 Angka											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	[deleted] Persentase desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional Persentase Desa dan Kelurahan dengan Skala Prioritas usulan 3 Aspek (Ekonomi, Sosial dan Infrastruktur) secara Proporsional Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester	100 % 100 % 100 %											
2523	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2524	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik Persentase sarana dan Prasarana pelayanan umum (sekolah SD/ SMP, Puskesmas) dalam kondisi baik	68 % 68 %											
2525	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	[deleted] Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Persentase Dokumen Non Perizinan yang Diterbitkan Persentase penerbitan dokumen non perizinan sesuai SOP	100 % 100 % 100 %											
2526	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %											
2527	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	kegiatan PKK yang terfasilitasi	12 BULAN											
2528	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan	100 %											
2529	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	12.301.971,00	12.301.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301.971,00	12.301.971,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelanggaran pilkades yang terselesaikan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase kenaikan ZIS Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades	100 % 100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2530	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2531	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2532	7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila													
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	5 Lembaga Masyarakat	12.000.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	19.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Kebijakan Padat Karya dalam Pembangunan Desa Persentase kenaikan Indeks ketahanan ekonomi IDM	100 % 13.22 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi dasar Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBDes Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita	100 % 100 % 100 % 5 % 100 % 100 %											
2533	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	16.000.000,00	22.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	22.473.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2534	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen	28.507.859,00	31.051.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.507.859,00	31.051.859,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2535	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2536	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	0,00	3.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2537	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2538	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan kejajar													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan administrasi perkantoran persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	undefined undefined											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
2539	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2540	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.894.000,00	4.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.000,00	4.894.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2541	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.106.000,00	3.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.000,00	3.106.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2542	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2543	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2544	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
2545	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
2546	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580.000,00	8.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2547	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.760.000,00	21.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760.000,00	21.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
2548	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2549	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	undefined undefined											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-											
2550	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2551	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2552	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	294.139.549,00	294.139.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.139.549,00	294.139.549,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-											
2553	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1074 Keluarga	188.776.877,00	188.776.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.776.877,00	188.776.877,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran, Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	undefined undefined											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-											
2554	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelnggaraan Urusan Pemerintahan Umum Susai Penugasan Kepala Daerah	undefined undefined											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-											
2555	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	13 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kecamatan Kalikajar													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan , Dokumen Evaluasi, Dan Laporan KeuanganTepat Waktu	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	9,864 %											
2556	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	9,864 %											
2557	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.508.561.851,00	2.208.263.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.561.851,00	2.208.263.549,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	9,864 %											
2558	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2559	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2560	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2561	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2562	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2563	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
2564	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2565	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	9,864 %											
2566	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2567	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	24.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2568	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	89.820.000,00	89.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.820.000,00	89.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	9,864 %											
2569	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	42.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700.000,00	40.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2570	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2571	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2572	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedia	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	93 %											
2573	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2574	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan	100 %											
2575	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	5.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	100 %											
2576	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	58.040.000,00	58.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.040.000,00	58.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpenuhinya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatkan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Desa persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat	100 % 100 %											
2577	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap permberdayaan PKK di Tingkat Desa dan Kecamatan	100 %											
2578	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200 Keluarga	70.000.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	76.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase konflik antar kelompok/desa/keluraha n yang terselesaikan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran tramtibum yang terlaporkan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2579	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400.000,00	45.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelanggaran tramtibum yang terlaporkan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keamanan	100 %											
2580	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	80.000.000,00	99.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	99.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	100 %											
2581	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	55.550.000,00	55.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550.000,00	55.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2582	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2583	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	8.825.000,00	8.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825.000,00	8.825.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2584	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kelurahan Kalikajar													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Persentase Paket Komponen Instalasi Listrik Yang disediakan Persentase Alat Tulis Kantor Yang disediakan	100 % 1 Paket 3 Paket											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket 1 Paket 3 Paket 1 Paket 3 Paket 2 Paket										
2585	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2586	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2587	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2588	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2589	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2590	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyediaan Sarana Prasarana Kerja	100 %											
2591	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase Pemenuhan Sarana prasarana pendukung Kinerja	3 Paket 6 Orang 60 Lembar 100 %											
2592	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2593	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2594	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	71.553.600,00	71.553.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553.600,00	71.553.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi Prosentase Asset Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	3 Unit 2 Unit 2 Unit 100 %											
2595	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2596	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2597	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000.000,00	201.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas 9 Pokmas/Ormas											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas 0 Pokmas/Ormas											
2598	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2599	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	411.132.913,00	398.972.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.132.913,00	398.972.913,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan dan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	3 Laporan											
2600	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	26.069.042,00	26.069.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.069.042,00	26.069.042,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelanggaran pilkades yang terselesaikan Persentase Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 % 100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang											
2601	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	13.320.811,00	25.480.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320.811,00	25.480.811,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Sapuran													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
2602	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2603	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.747.853.876,00	2.609.164.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.853.876,00	2.609.164.440,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pendukung Kinerja	100 %											
2604	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2605	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.595.100,00	16.595.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595.100,00	16.595.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2606	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2607	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2608	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150.000,00	30.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Layanan Pemerintahan	100 %											
2609	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
2610	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2611	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	93.980.000,00	93.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.980.000,00	93.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
2612	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2613	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2614	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.075.400,00	7.075.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075.400,00	7.075.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82,5 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan											
2615	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2616	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan Administrasi Kependudukan	90 %											
2617	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	65.000.000,00	43.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	43.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Laporan											
2618	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan PKK	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2619	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	17 Keluarga	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konûik ant kelompok/desa/kelurahan terselesaikanan dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
2620	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	62.440.500,00	62.440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.440.500,00	62.440.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
2621	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100.000.000,00	151.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	151.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Realisasi Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang telah Dilakukan	100 %											
2622	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	40.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2623	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2624	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen	11.559.500,00	11.559.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559.500,00	11.559.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Sapuran													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
2625	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2626	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.612.000,00	6.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612.000,00	6.612.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2627	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2628	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1.607.828,00	1.607.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.828,00	1.607.828,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2629	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2630	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2631	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2632	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2633	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540.000,00	9.540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2634	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
2635	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2636	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2637	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2638	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang di laksanakan	100 %											
2639	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2640	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2641	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	453.395.030,00	453.395.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.395.030,00	453.395.030,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Realisasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2642	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	899 Keluarga	95.240.142,00	95.240.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.240.142,00	95.240.142,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase GangguanKetrentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Realisasi Kegiatan Upaya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Telah dilaksanakan	100 %											
2643	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
2644	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2645	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85 Orang	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Kepil													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2646	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/bulan	2.784.238.071,00	2.634.986.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.238.071,00	2.634.986.018,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
2647	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2648	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2649	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2650	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2651	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2652	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2653	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2654	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2655	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.581.598,00	21.581.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581.598,00	21.581.598,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2656	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.960.000,00	50.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.960.000,00	50.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
2657	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2658	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2659	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82,50 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Desa Yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan tepat Waktu	82,50 %											
2660	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2661	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Fasilitasi Penanganan Anak tidak sekolah, Fasilitasi Penanganan Disabilitas, Fasilitasi Penanganan Kenakalan remaja, Fasilitasi Penanganan Pernikahan Anak, Fasilitasi Desa Siaga, Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan rakor Desa Cantik, Pembinaan Bumdes, lomba Desa, pembinaan UMKM, pembinaan ODF, RTLH, Pembinaan UKS Pembinaan Perpustakaan , Fasilitasi Forum Kesehatan Desa, Pembinaan karang taruna Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	1 Laporan 1 Laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2662	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi PKK Kecamatan Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	100 %											
2663	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	126 Keluarga	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman, dan Ketertiban umum tingkat kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan dan Ketertiban Umumtingkat Kecamatan	100 %											
2664	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan Persentase ZIS Kecamatan	100 % 100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan/jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											
2665	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas perangkat desa Terlaksananya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Terlaksananya Pilkades	100 % 100 % 100 %											
2666	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2667	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2668	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kepil													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrassi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Kantor	100 %											
2669	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2670	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2671	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2672	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2673	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2674	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja	100 %											
2675	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920.000,00	10.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2676	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.600.000,00	137.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.600.000,00	137.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarpras Kantor Yang Tersedia	100 %											
2677	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2678	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2679	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100 %											
2680	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2681	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2682	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	609.626.000,00	787.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.626.000,00	787.286.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	12 Bulan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2683	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2000 Keluarga	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikanya Konflik Antar Kelompok Desa/Kelurahan dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
2684	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	21.504.000,00	21.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.504.000,00	21.504.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Rasa Cinta Tanah Air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
2685	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan kaliwiro													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja Pelaporan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	15 % 3 Dokumen											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan Tepat Waktu Pelaporan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	3 Dokumen 3 Dokumen 15 %											
2686	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2687	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan gaji dan tunjangan ASN	14 Orang/bulan											
2688	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	0,00	2.284.746.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.746.891,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2689	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.261.198.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.198.636,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 % 100 %											
2690	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2691	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.533.785,00	17.533.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.533.785,00	17.533.785,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2692	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2693	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2694	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2695	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Mebel Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	10 Unit 100 %											
2696	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2697	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2698	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.340.000,00	23.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340.000,00	23.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2699	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	131.590.376,00	131.590.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.590.376,00	131.590.376,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Aset Kecamatan dalam Kondisi Baik	100 %											
2700	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2701	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2702	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2703	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedia Jumlah Musrenbang Kecamatan yang di selengggarakan tepat waktu nilai rata-rata persepsi pelayanan	100 % 100 % 80 angka											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester	100 %											
2704	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2705	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase dokumen non perizinan yang diterbitkan Persentase IKM Kecamatan	100 % 82 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2706	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 % 100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk penanggulangan bencana Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 % 100 % 100 %											
2707	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	62.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	92.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R	9.43 %											
2708	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	400 Keluarga	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 % 100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 % 100 %											
2709	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											
2710	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100 % 100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita	100 % 100 % 5 % 100 %											
2711	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2712	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2713	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2714	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kaliwiro													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2715	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2716	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2717	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2718	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2719	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360.000,00	15.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan umum Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 % 100 % 100 %											
2720	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720.000,00	9.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2721	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	112.730.000,00	112.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.730.000,00	112.730.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit											
2722	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2723	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2724	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
2725	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.927.390,00	10.927.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927.390,00	10.927.390,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2726	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2727	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	326.111.200,00	376.111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.111.200,00	376.111.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
2728	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1750 Keluarga	30.023.000,00	30.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023.000,00	30.023.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah patroli wilayah penegakan Perda Perkada	100 %											
2729	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26.064.800,00	26.064.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.064.800,00	26.064.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penurunan angka pelanggaran	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2730	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15000 Orang	32.365.700,00	32.365.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.365.700,00	32.365.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Wadaslintang													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	15 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
2731	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2732	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-											
2733	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	2.467.011.304,00	2.340.028.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467.011.304,00	2.340.028.754,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum Rentang Waktu Pelaksanaan Kegiatan	100 % 12 Bulan											
2734	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2735	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2736	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2737	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2738	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.268.773,00	32.568.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.268.773,00	32.568.773,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit											
2739	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
2740	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21.711.226,00	21.711.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.711.226,00	21.711.226,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2741	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	110.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
2742	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	44.000.000,00	65.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	65.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2743	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2744	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2745	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.000.000,00	127.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	127.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai rata-rata persepsi pelayanan persentase kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedia Persentase penurunan kasus pernikahan usia anak nilai rata-rata persepsi pelayanan	10 % 100 % 15 % 80 angka											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa	100 % 100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2746	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2747	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelayanan Administrasi Kependudukan	100 %en											
2748	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana Fasilitasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Faisilitasi penanganan Disabilitas Fasilitasi penanganan kenakalan remaja fasilitasi penanganan pernikahan anak fasilitasi desa siaga jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan rakor desa cantik pembinaan bumdes lomba desa pembinaan UMKM Pembinaan ODF RTLH Pembinaan UKS pembinaan perpustakaan fasilitasi forum kesehatan desa	100 % 100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-											
2749	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	undefined	undefined undefined											
2750	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 Keluarga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan											
2751	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelanggaran pilkades yang terselesaikan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Jumlah pelanggaran pemilu yang terselesaikan/ jumlah pelanggaran pemilu yang ada) x 100% persentase kenaikan ZIS Persentase Penurunan angka pelanggaran pilkades	120 Orang 100 % 100 % 100 %											
2752	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2753	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar prosentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase kenaikan Indeks ketahanan ekonomi IDM	100 % 100 % 13.22 angka											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi dasar Persentase kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBDes Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita	10 % 100 % 100 % 5 % 100 % 100 %												
2754	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	22.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	42.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2755	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2756	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2757	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2758	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Wadaslintang													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rentang Waktu Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan											
2759	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2760	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2761	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2762	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2763	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rentang Waktu Pelaksanaan	1 Tahun											
2764	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2765	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang di Sediakan Rentang Waktu Pelaksanaan Kegiatan	12 Laporan 12 Bulan											
2766	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2767	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.487.000,00	9.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487.000,00	9.487.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2768	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.856.000,00	97.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.856.000,00	97.856.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rentang Waktu Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan											
2769	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.000,00	3.144.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2770	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2771	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat aktif	100 % %											
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
2772	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2773	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2774	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	432.513.000,00	482.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.513.000,00	482.513.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rentang Waktu Pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun											
2775	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	205 Keluarga	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesi, tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	undefined undefined											
2776	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang											
2777	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kecamatan Sukoharjo													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	100 % 15 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan avaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen											
2778	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2779	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN	100 %											
2780	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.891.267.648,00	1.796.156.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.267.648,00	1.796.156.007,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pelayanan Kantor	100 %											
2781	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2782	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2783	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2784	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2785	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2786	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2787	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Produktifitas Kinerja karena dukungan jasa penunjang	100 %											
2788	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2789	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2790	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	71.000.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000.000,00	65.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pemeliharaan Sarpras kantor yang tersedia	100 %											
2791	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	22.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	24.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2792	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2793	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	85 angka											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 %											
2794	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2795	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan admnistrasi kependudukan	4 layanan											
2796	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terfasilitasinya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	6 Kegiatan											
2797	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	1 Tahun											
2798	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	150 Keluarga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan terselesaikan dan keteriban umum di Tingkat Kecamatan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2799	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya rasa cinta tanah air yang didukung pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	100 %											
2800	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pilkades	10 Desa											
2801	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2802	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2803	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Kecamatan Kalibawang													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	15 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Buah											
2804	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang											
2805	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	1.488.123.201,00	1.428.389.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.123.201,00	1.428.389.752,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	1 laporan											
2806	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2807	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2808	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2809	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2810	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
2811	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2812	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi	100 %											
2813	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2814	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2815	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset kondisi baik	1 laporan											
2816	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	34.211.276,00	34.211.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.211.276,00	34.211.276,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2817	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2818	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	16.796.160,00	16.796.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796.160,00	16.796.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82.5 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Desa Yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan tepat Waktu	100 %											
2819	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2820	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase sarana dan Prasarana pelayanan umum dalam kondisi baik	68 %											
2821	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Layanan Administrasi Kependudukan	12 Laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2822	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lembaga Masyarakat Aktif	10 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan											
2823	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi PKK Kecamatan Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	100 %											
2824	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian pelanggaran, kebencanaan, Ketentraman, dan Ketertiban umum tingkat kecamatan	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan dan Ketertiban Umumtingkat Kecamatan	100 %											
2825	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase ZIS Kecamatan Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 % 100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan/jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2826	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas perangkat desa Terlaksananya Pilkades	100 % 100 %											
2827	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2828	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2829	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %											
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %											
2830	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2831	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang DIsusun Tepat Waktu	100 %											
2832	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.610.022.971,00	2.449.660.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.022.971,00	2.449.660.272,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2833	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.820.000,00	53.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820.000,00	53.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 %											
2834	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2835	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2836	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2837	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %											
2838	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2839	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
2840	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2841	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2842	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2843	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2844	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2845	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-											
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-											
2846	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	1.075.000.000,00	2.024.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000.000,00	2.024.590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik	10 %											
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik yang Tersusun	4 Laporan											
2847	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5000 Orang	31.507.557.800,00	32.699.443.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.507.557.800,00	32.699.443.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100 %											
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Tersusun	5 Dokumen											
2848	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	800 Orang	2.100.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00	1.370.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-											
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-											
2849	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2850	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	100.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-											
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2851	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 Orang	575.000.000,00	670.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000.000,00	670.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2852	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	150.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2853	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	64.823.700,00	549.000.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.823.700,00	549.000.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 23 September 2024

KABUPATEN WONOSOBO
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1				PELAYANAN UMUM										
1	01	1	01	Pendidikan	470.604.578.480,00	490.800.825.451,00	230.600.000,00	360.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.835.178.480,00	491.161.425.451,00
1	01	1	02	Kesehatan	237.368.963.742,00	257.970.728.562,00	9.713.589.285,00	18.470.087.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.082.553.027,00	276.440.816.559,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.649.898.912,00	12.983.005.547,00	0,00	145.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649.898.912,00	13.128.621.547,00
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.695.090.360,00	6.622.777.095,00	560.000.000,00	689.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255.090.360,00	7.312.527.095,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	10.437.860.475,00	10.663.595.902,00	71.275.000,00	71.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509.135.475,00	10.734.870.902,00
1	01	1	06	Sosial	4.269.256.282,00	4.257.067.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269.256.282,00	4.257.067.922,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	5.802.889.364,00	5.493.598.310,00	48.703.810,00	48.703.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851.593.174,00	5.542.302.120,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.497.690.142,00	5.331.023.458,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509.690.142,00	5.343.023.458,00
1	01	2	09	Pangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	8.338.974.260,00	8.446.192.258,00	107.356.480,00	114.006.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446.330.740,00	8.560.198.738,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.570.678.928,00	7.227.616.387,00	226.800.000,00	811.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797.478.928,00	8.038.896.387,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.374.800.000,00	8.937.536.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574.800.000,00	9.137.536.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	5.410.947.456,00	5.325.199.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410.947.456,00	5.325.199.812,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.790.530.733,00	10.741.725.911,00	30.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820.530.733,00	10.766.725.911,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	4.633.276.216,00	4.267.837.686,00	224.415.600,00	430.415.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857.691.816,00	4.698.253.286,00
1	01	2	20	Statistik	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
1	01	2	24	Kearsipan	5.445.285.208,00	5.236.161.237,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.285.208,00	5.251.161.237,00
1	01	3	26	Pariwisata	5.381.249.264,00	5.114.273.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381.249.264,00	5.114.273.181,00
1	01	3	27	Pertanian	22.480.301.413,00	21.855.398.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480.301.413,00	21.855.398.933,00
1	01	3	30	Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	40.231.260.545,00	40.911.308.223,00	225.750.000,00	986.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457.010.545,00	41.897.308.223,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	48.148.895.403,00	51.136.057.491,00	806.850.000,00	1.178.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.955.745.403,00	52.315.007.491,00
1	01	5	01	Perencanaan	8.155.542.020,00	8.288.530.277,00	58.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213.842.020,00	8.396.830.277,00
1	01	5	02	Keuangan	54.752.777.004,00	57.648.949.757,00	283.170.000,00	988.370.000,00	5.500.000.000,00	2.120.000.000,00	395.415.450.070,00	402.408.018.070,00	455.951.397.074,00	463.165.337.827,00
1	01	5	03	Kepegawaian	6.343.378.123,00	6.452.594.127,00	55.419.000,00	135.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398.797.123,00	6.588.013.127,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	394.000.000,00	394.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000.000,00	394.000.000,00
1	01	6	01	Inspektorat	8.864.897.074,00	9.264.213.053,00	57.887.069,00	57.887.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922.784.143,00	9.322.100.122,00
1	01	7	01	Kecamatan	78.431.337.158,00	75.967.435.328,00	3.076.230.510,00	3.010.659.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.507.567.668,00	78.978.094.838,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	38.571.724.471,00	40.677.014.772,00	287.000.000,00	387.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.858.724.471,00	41.064.014.772,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN										
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	4.394.490.000,00	4.444.490.000,00	134.120.000,00	134.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.610.000,00	4.578.610.000,00
2	03	1	06	Sosial	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00
3				EKONOMI										
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.935.423.380,00	17.351.488.853,00	111.574.296.000,00	120.949.502.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.509.719.380,00	138.300.991.573,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	2.345.000.000,00	8.358.822.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.000.000,00	8.358.822.821,00
3	04	2	09	Pangan	160.650.000,00	160.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650.000,00	160.650.000,00
3	04	2	15	Perhubungan	2.541.450.000,00	2.808.920.000,00	9.487.172.500,00	10.958.762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028.622.500,00	13.767.682.500,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	4.146.650.002,00	4.168.300.002,00	397.649.998,00	547.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544.300.000,00	4.716.300.000,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.379.501.680,00	2.078.101.680,00	273.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.101.680,00	2.078.101.680,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	994.887.000,00	994.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.887.000,00	994.887.000,00
3	04	2	21	Persandian	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	529.500.000,00	554.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000.000,00	565.000.000,00
3	04	3	27	Pertanian	32.927.598.400,00	35.461.153.654,00	869.500.000,00	869.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.797.098.400,00	36.330.653.654,00
3	04	3	30	Perdagangan	1.578.328.365,00	2.023.328.365,00	350.000.000,00	135.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.328.365,00	2.158.978.365,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
3	04	3	31	Perindustrian	2.011.702.000,00	2.161.702.000,00	3.257.300.000,00	3.257.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269.002.000,00	5.419.002.000,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP										
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.786.497.000,00	20.220.897.000,00	0,00	130.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786.497.000,00	20.351.497.000,00
4	05	2	10	Pertanahan	50.000.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	67.200.000,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	13.598.218.514,00	13.974.306.556,00	2.350.553.800,00	2.484.465.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948.772.314,00	16.458.772.314,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM										
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.583.264.000,00	15.623.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.583.264.000,00	15.623.264.000,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.033.400.000,00	5.438.625.000,00	9.931.700.000,00	10.015.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965.100.000,00	15.453.825.000,00
6				KESEHATAN										
6	07	1	02	Kesehatan	87.821.229.905,00	91.764.171.152,00	8.763.363.552,00	10.902.365.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.584.593.457,00	102.666.536.292,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.075.018.643,00	12.244.718.643,00	1.069.700.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144.718.643,00	13.294.718.643,00
7				PARIWISATA										
7	08	3	26	Pariwisata	3.688.116.000,00	4.278.066.000,00	5.813.085.000,00	6.009.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501.201.000,00	10.287.201.000,00
8				PENDIDIKAN										
8	10	1	01	Pendidikan	129.132.848.507,00	126.557.282.005,00	46.676.838.933,00	51.881.420.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.809.687.440,00	178.438.702.814,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	3.497.600.000,00	6.381.750.000,00	11.022.400.000,00	10.928.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520.000.000,00	17.310.000.000,00
8	10	2	22	Kebudayaan	1.321.000.000,00	2.736.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000.000,00	2.736.000.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
8	10	2	23	Perpustakaan	879.827.900,00	879.827.900,00	435.652.100,00	435.652.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.480.000,00	1.315.480.000,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	7.264.372.600,00	8.019.705.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264.372.600,00	8.019.705.482,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	944.927.036,00	1.079.927.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.927.036,00	1.079.927.036,00
9	11	3	32	Transmigrasi	16.540.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540.821,00	0,00
				TOTAL	**1.480.525.124.786,00**	**1.552.087.751.829,00**	**228.707.778.637,00**	**258.946.744.491,00**	**5.500.000.000,00**	**2.120.000.000,00**	**395.415.450.070,00**	**402.408.018.070,00**	**2.110.148.353.493,00**	**2.215.562.514.390,00**

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 23 September 2024

KABUPATEN WONOSOBO
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Pendidikan Dasar	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00	200.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.850.000.000,00	1.650.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	175.000.000,00	175.000.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.650.000.000,00	1.882.500.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	255.000.000,00	255.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.898.800.000,00	4.429.400.728,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.341.458.440,00	3.341.458.440,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.003.120.000,00	6.064.783.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.275.000.000,00	1.077.500.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	785.000.000,00	885.000.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	384.625.000,00	634.625.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	231.000.000,00	381.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.128.500.000,00	2.597.899.272,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.526.000.000,00	2.526.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.161.575.000,00	3.161.575.000,00
		Total	28.865.078.440,00	29.261.741.440,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	130.000.000,00	130.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	717.877.000,00	717.877.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	130.000.000,00	130.000.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0,00	80.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	550.000.000,00	550.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	33.900.000,00	33.900.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.555.000.000,00	2.555.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	0,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	150.000.000,00
		Total	4.116.777.000,00	4.346.777.000,00
3.	Pendidikan Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	100.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	225.000.000,00	225.000.000,00
		Total	225.000.000,00	325.000.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	33.206.855.440,00	33.933.518.440,00
B SPM Bidang Kesehatan				
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	542.557.000,00	542.557.000,00
		Total	542.557.000,00	542.557.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	137.000.000,00	137.000.000,00
		Total	137.000.000,00	137.000.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	115.000.000,00	115.000.000,00
		Total	115.000.000,00	115.000.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	60.000.000,00	60.000.000,00
		Total	60.000.000,00	60.000.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	582.950.000,00	582.950.000,00
		Total	582.950.000,00	582.950.000,00
6.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	98.400.000,00	98.400.000,00
		Total	98.400.000,00	98.400.000,00
7.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.415.036.240,00	1.415.036.240,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
		Total	1.415.036.240,00	1.415.036.240,00
8.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	468.526.800,00	468.526.800,00
		Total	468.526.800,00	468.526.800,00
9.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.161.208.000,00	1.161.208.000,00
		Total	1.161.208.000,00	1.161.208.000,00
10.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	620.491.000,00	620.491.000,00
		Total	620.491.000,00	620.491.000,00
11.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	224.261.695,00	224.261.695,00
		Total	224.261.695,00	224.261.695,00
12.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000,00	100.000.000,00
		Total	100.000.000,00	100.000.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	5.525.430.735,00	5.525.430.735,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	0,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	45.000.000,00	195.000.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	0,00
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15.538.264.000,00	15.428.264.000,00
		Total	15.583.264.000,00	15.623.264.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	100.000.000,00
		Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	100.000.000,00	225.000.000,00
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,00	0,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.545.000.000,00	1.945.000.000,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.000.000,00	50.000.000,00
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,00	0,00
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0,00	0,00
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	17.241.497.000,00	17.181.497.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	0,00
Total			19.036.497.000,00	19.501.497.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			34.619.761.000,00	35.124.761.000,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00
Total			100.000.000,00	100.000.000,00
2.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	285.000.000,00	286.500.000,00
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	225.000.000,00	225.000.000,00
Total			510.000.000,00	511.500.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			610.000.000,00	611.500.000,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.461.410.000,00	2.461.410.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	0,00	0,00
Total			2.461.410.000,00	2.461.410.000,00
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	60.000.000,00	60.000.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
		Total	60.000.000,00	60.000.000,00
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	85.000.000,00	85.000.000,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	210.000.000,00	210.000.000,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	30.000.000,00	30.000.000,00
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00
		Total	495.000.000,00	495.000.000,00
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000,00	110.000.000,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00
		Total	810.000.000,00	810.000.000,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	25.000.000,00	25.000.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	80.000.000,00	80.000.000,00
		Total	130.000.000,00	130.000.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.956.410.000,00	3.956.410.000,00
F SPM Bidang Sosial				
1.	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000,00	30.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	140.000.000,00	140.000.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	90.000.000,00	90.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	150.000.000,00	150.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	70.000.000,00	70.000.000,00
		Penyediaan Sandang	15.000.000,00	15.000.000,00
		Total	630.000.000,00	630.000.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000,00	30.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	140.000.000,00	140.000.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	90.000.000,00	90.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	150.000.000,00	150.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	70.000.000,00	70.000.000,00
		Penyediaan Sandang	15.000.000,00	15.000.000,00
		Total	630.000.000,00	630.000.000,00
3.	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000,00	30.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	140.000.000,00	140.000.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	90.000.000,00	90.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	150.000.000,00	150.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	70.000.000,00	70.000.000,00
		Penyediaan Sandang	15.000.000,00	15.000.000,00
		Total	630.000.000,00	630.000.000,00
4.	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000,00	30.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	140.000.000,00	140.000.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	90.000.000,00	90.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	150.000.000,00	150.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	70.000.000,00	70.000.000,00
		Penyediaan Sandang	15.000.000,00	15.000.000,00
		Total	630.000.000,00	630.000.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	15.000.000,00	15.000.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	15.000.000,00	15.000.000,00
		Penyediaan Makanan	70.000.000,00	70.000.000,00
		Penyediaan Sandang	25.000.000,00	25.000.000,00
Total			125.000.000,00	125.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			2.645.000.000,00	2.645.000.000,00

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

KABUPATEN WONOSOBO
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.345.923.268,00	591.062.069,00	626.787.069,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	4.269.256.282,00	4.257.067.922,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	132.068.492,00	46.950.000,00	46.950.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	307.756.845,00	170.100.000,00	210.200.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.331.525.429,00	18.290.011.436,00	18.578.127.967,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	574.479.444,00	385.000.000,00	385.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	77.965.067,00	135.000.000,00	135.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	785.327.446,00	1.851.180.918,00	1.901.780.918,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	81.247.806,00	12.150.000,00	12.150.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	201.770.964,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	418.549.308,00	125.000.000,00	241.820.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	738.616.428,00	170.000.000,00	170.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100.885.482,00	176.107.500,00	176.107.500,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.611.013.648,00	500.000.000,00	690.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	470.835.178.480,00	491.161.425.451,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	328.273.968,00	1.132.999.360,00	1.033.499.360,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.360.878.035,00	4.709.800.000,00	4.709.800.000,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.004.056.460,00	230.000.000,00	246.540.821,00
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	24.620.548,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	5.410.947.456,00	5.325.199.812,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	21.551.185.988,00	13.920.000.000,00	16.710.000.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	8.446.330.740,00	8.560.198.738,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	18.670.581.920,00	1.044.200.000,00	1.372.111.666,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.102.188.996,00	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.972.115.010,00	394.000.000,00	394.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	184.654.107,00	0,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	80.873.760.000,00	19.036.497.000,00	19.501.497.000,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.800.520.000,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	20.517.123,00	43.692.000,00	43.692.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	44.351.255.403,00	47.625.517.491,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.787.200.000,00	8.161.250.000,00	9.151.250.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	27.996.033.810,00	2.275.600.000,00	2.431.525.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	967.587.520,00	1.920.000.000,00	7.917.282.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	247.082.553.027,00	276.440.816.559,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13.834.053.172,00	1.450.000.000,00	2.390.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	99.663.978,00	21.180.000,00	21.180.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.247.441.076,00	500.000.000,00	525.000.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	82.068.492,00	97.257.135,00	105.257.135,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15.732.529.908,00	13.342.155.500,00	13.852.155.500,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	143.619.861,00	175.000.000,00	250.000.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.531.792.332,00	27.068.000.000,00	27.068.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	41.034.246,00	56.000.000,00	56.000.000,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	4.857.691.816,00	4.698.253.286,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.477.232.856,00	864.423.900,00	914.423.900,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	742.000.000,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	127.206.163,00	110.000.000,00	110.000.000,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	151.328.223,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	369.308.214,00	1.075.000.000,00	2.024.590.000,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.086.915.107,00	31.507.557.800,00	32.699.443.800,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	41.034.246,00	40.000.000,00	40.000.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	3.211.342.971,00	3.150.980.272,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	5.354.597.123,00	5.215.901.461,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.741.616.153,00	601.150.000,00	601.150.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	741.620.134,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	36.930.821,00	0,00	0,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	22.480.301.413,00	21.855.398.933,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.401.757.290,00	4.552.713.311,00	5.054.465.311,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.885.482,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.350.000.000,00	813.120.000,00	763.850.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	5.381.249.264,00	5.114.273.181,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.576.540.304,00	570.654.292,00	705.654.292,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.832.430.708,00	2.013.896.022,00	2.199.171.653,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	33.943.559.058,00	34.882.104.736,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	41.034.246,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.606.513.599,00	810.595.200,00	910.595.200,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	451.376.706,00	598.257.643,00	598.257.643,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	246.205.476,00	135.000.000,00	135.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	566.272.593,00	260.000.000,00	260.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.055.377.022,00	8.274.800.000,00	6.390.336.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	41.034.246,00	0,00	0,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	24.620.548,00	50.000.000,00	67.200.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	19.662.281.265,00	1.960.738.176,00	1.960.738.176,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	328.273.968,00	557.174.131,00	792.174.131,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.074.281.135,00	610.000.000,00	611.500.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	328.273.968,00	75.000.000,00	1.522.200.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	389.825.337,00	789.823.700,00	1.569.000.700,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	164.136.984,00	185.000.000,00	185.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.291.881.303,00	4.604.490.000,00	4.689.490.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.784.989.700,00	491.000.000,00	641.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	41.034.246,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	56.703.592.377,00	53.974.436.016,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.090.275.342,00	180.000.000,00	230.000.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.031.195.177,00	836.200.000,00	836.200.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	26.770.455.700,00	7.836.661.000,00	7.986.661.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	213.378.080,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.357.249.270,00	735.783.375,00	731.433.375,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.797.299.973,00	1.271.000.000,00	2.686.000.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	20.177.096,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	402.795.441,00	27.065.549,00	27.065.549,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	10.509.135.475,00	10.734.870.902,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.885.482,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	5.851.593.174,00	5.542.302.120,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	55.030.945.211,00	11.953.622.500,00	13.692.682.500,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	960.201.356,00	1.700.297.914,00	1.700.297.914,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100.885.482,00	8.100.000,00	14.100.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.703.760.190,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18.202.791.516,00	1.201.591.305,00	1.161.591.305,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.385.325.295,00	538.261.400,00	538.261.400,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.221.371,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100.885.482,00	0,00	0,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.630.705.511,00	3.111.300.000,00	3.146.300.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	6.912.246.820,00	6.845.235.077,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100.885.482,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	5.509.690.142,00	5.343.023.458,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	984.821.904,00	650.000.000,00	1.200.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7.656.990.300,00	1.294.300.000,00	1.294.300.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	616.744.716,00	525.170.000,00	525.170.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.460.600.000,00	750.000.000,00	850.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	410.342.460,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	41.034.246,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.396.550.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.129.101.677,00	1.358.179.046,00	1.032.760.415,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	652.444.512,00	253.000.000,00	253.000.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	164.136.984,00	2.100.000.000,00	1.370.000.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.677.676.589,00	1.668.000.000,00	1.468.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	2.068.125.996,00	1.390.679.480,00	1.465.679.480,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	20.517.123,00	0,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	886.339.712,00	5.483.172.600,00	6.238.505.482,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.567.664.311.958,00	175.349.687.440,00	177.978.702.814,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	91.034.246,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	984.931.381,00	2.953.610.000,00	2.953.610.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.181.786.283,00	192.250.000,00	177.250.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	51.398.172.443,00	54.573.977.566,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	902.753.412,00	1.756.295.700,00	1.981.220.080,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	10.820.530.733,00	10.766.725.911,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	16.540.821,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.341.423.224,00	360.000.000,00	360.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	20.517.123,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	12.649.898.912,00	13.128.621.547,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	8.206.722.074,00	8.453.493.053,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.925.716.955,00	5.269.002.000,00	5.419.002.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	5.207.285.208,00	4.998.161.237,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	86.309.496.306,00	5.830.448.400,00	8.364.003.654,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	157.981.848,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	325.401.570,00	136.272.744,00	136.272.744,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	305.673.947,00	611.687.000,00	611.687.000,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.012.337.720,00	1.433.000.000,00	1.570.000.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.442.741,00	0,00	0,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	247.026.160,00	110.000.000,00	110.000.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	77.009.560,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	492.410.952,00	33.200.000,00	33.200.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.767.801.331,00	2.262.801.331,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	53.344.520,00	45.000.000,00	45.000.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	7.255.090.360,00	7.312.527.095,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.299.403.263.282,00	92.236.026.972,00	98.058.045.427,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.328.000.000,00	15.583.264.000,00	15.623.264.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.564.722.132,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	24.620.548,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	82.068.492,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.775.543.416,00	7.013.201.000,00	7.449.201.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	205.171.228,00	297.500.000,00	297.500.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	160.669.500.000,00	111.705.349.380,00	125.615.891.573,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	164.136.984,00	1.062.887.855,00	1.288.887.855,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.007.706.494.155,00	6.302.129.568,00	6.617.947.027,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	402.800.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.878.450.154,00	1.290.707.869,00	1.291.817.869,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	53.344.520,00	25.650.000,00	25.650.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.109.997.731.204,00	401.920.999.400,00	405.414.135.030,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	24.234.859.630,00	10.669.500.000,00	12.000.800.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	205.171.230,00	350.000.000,00	350.000.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	79.606.437,00	12.150.000,00	7.150.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.199.435.584,00	840.000.000,00	840.000.000,00

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 23 September 2024

KABUPATEN WONOSOBO
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000						Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	662.186.893.688,00	687.851.948.255,00	686.910.128.265,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	647.016.893.688,00	672.631.948.255,00	669.600.128.265,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	647.016.893.688,00	672.631.948.255,00	669.600.128.265,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	175.899.687.440,00	176.349.687.440,00	177.978.702.814,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	90.365.534.440,00	89.698.635.168,00	90.745.253.417,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	608.249.000,00	608.249.000,00	608.249.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.401.508.000,00	1.401.508.000,00	1.401.508.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.367.803.000,00	1.367.803.000,00	1.180.303.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	848.674.000,00	848.674.000,00	848.674.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	103.066.000,00	103.066.000,00	103.066.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	281.407.000,00	281.407.000,00	281.407.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	800.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	992.741.000,00	992.741.000,00	992.741.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.898.800.000,00	4.231.900.728,00	4.429.400.728,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	1.882.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.341.458.440,00	3.341.458.440,00	3.341.458.440,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	255.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	60.237.400.000,00	60.237.400.000,00	60.241.518.249,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.568.081.000,00	3.568.081.000,00	3.568.081.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	461.564.000,00	461.564.000,00	461.564.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.064.783.000,00	6.064.783.000,00	6.064.783.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	52.735.156.000,00	53.752.055.272,00	54.204.452.397,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	763.000.000,00	763.000.000,00	763.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.161.575.000,00	3.161.575.000,00	3.161.575.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	535.000.000,00	535.000.000,00	535.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	640.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	160.500.000,00	260.500.000,00	535.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.128.500.000,00	2.795.399.272,00	2.597.899.272,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	384.625.000,00	384.625.000,00	634.625.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.526.000.000,00	2.526.000.000,00	2.526.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	231.000.000,00	381.000.000,00	381.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	785.000.000,00	885.000.000,00	885.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34.205.890.000,00	34.205.890.000,00	34.230.787.125,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	71.766.000,00	71.766.000,00	71.766.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	1.740.000.000,00	1.740.000.000,00	1.740.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	400.375.000,00	400.375.000,00	400.375.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	170.000.000,00	170.000.000,00	270.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.077.500.000,00	1.077.500.000,00	1.077.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	624.425.000,00	624.425.000,00	624.425.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20.048.377.000,00	20.048.377.000,00	20.328.377.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	0,00	0,00	50.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	0,00	0,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	33.900.000,00	33.900.000,00	33.900.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0,00	0,00	80.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.555.000.000,00	2.555.000.000,00	2.555.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.441.600.000,00	15.441.600.000,00	15.441.600.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	717.877.000,00	717.877.000,00	717.877.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.750.620.000,00	12.850.620.000,00	12.700.620.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	7.355.000.000,00	7.455.000.000,00	6.805.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.835.620.000,00	4.835.620.000,00	4.835.620.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	25.000.000,00	25.000.000,00	425.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	470.657.206.248,00	495.822.260.815,00	491.161.425.451,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	645.000.000,00	645.000.000,00	645.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.000.000,00	395.000.000,00	395.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	467.052.556.250,00	492.267.610.817,00	487.606.775.453,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	467.052.556.250,00	492.267.610.817,00	487.606.775.453,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	808.200.000,00	826.400.000,00	826.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.200.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	368.200.000,00	368.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	130.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.256.449.998,00	1.238.249.998,00	1.238.249.998,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	792.849.998,00	774.649.998,00	774.649.998,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	745.000.000,00	695.000.000,00	695.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.170.000.000,00	15.220.000.000,00	17.310.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.170.000.000,00	15.220.000.000,00	17.310.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.570.000.000,00	14.620.000.000,00	16.710.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.640.000.000,00	11.690.000.000,00	11.528.120.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	11.370.000.000,00	11.420.000.000,00	11.258.120.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	910.000.000,00	910.000.000,00	1.071.880.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	910.000.000,00	910.000.000,00	1.071.880.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	3.860.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	3.860.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	133.265.076.186,00	138.789.886.331,00	139.859.201.185,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	133.265.076.186,00	138.789.886.331,00	139.859.201.185,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	133.265.076.186,00	138.789.886.331,00	139.859.201.185,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	70.889.174.092,00	74.290.048.071,00	76.606.222.547,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.510.637.544,00	19.837.011.523,00	20.412.011.523,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.328.298.944,00	8.165.800.532,00	8.465.800.532,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40.679.000,00	40.679.000,00	40.679.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.741.248.900,00	10.230.121.291,00	10.505.121.291,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	150.410.700,00	150.410.700,00	150.410.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.103.536.548,00	54.178.036.548,00	55.924.211.024,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	240.420.000,00	240.420.000,00	240.420.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	224.261.695,00	224.261.695,00	224.261.695,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	137.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	582.950.000,00	582.950.000,00	582.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	98.400.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.308.388.000,00	1.308.388.000,00	1.308.388.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	447.406.800,00	447.406.800,00	447.406.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	310.300.000,00	310.300.000,00	310.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.834.345.000,00	7.856.845.000,00	7.856.845.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.339.793.850,00	2.339.793.850,00	2.339.793.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	687.722.000,00	739.722.000,00	889.722.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	166.365.000,00	166.365.000,00	166.365.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	11.940.000,00	11.940.000,00	11.940.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.071.985.630,00	1.071.985.630,00	1.071.985.630,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.911.607.047,00	34.911.607.047,00	36.462.781.523,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	19.053.000,00	19.053.000,00	19.053.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	183.050.498,00	183.050.498,00	183.050.498,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2.110.314.608,00	2.110.314.608,00	2.155.314.608,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	179.750.000,00	179.750.000,00	179.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	132.283.420,00	132.283.420,00	132.283.420,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	145.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.201.591.305,00	1.201.591.305,00	1.161.591.305,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	297.920.300,00	297.920.300,00	257.920.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	167.920.300,00	167.920.300,00	167.920.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	863.671.005,00	863.671.005,00	863.671.005,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	863.671.005,00	863.671.005,00	863.671.005,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.390.679.480,00	1.390.679.480,00	1.465.679.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	155.179.980,00	155.179.980,00	155.179.980,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	155.179.980,00	155.179.980,00	155.179.980,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	701.070.000,00	701.070.000,00	776.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	701.070.000,00	701.070.000,00	776.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	54.065.000,00	54.065.000,00	54.065.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	54.065.000,00	54.065.000,00	54.065.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	305.364.500,00	305.364.500,00	305.364.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	305.364.500,00	305.364.500,00	305.364.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	293.942.580,00	518.866.960,00	518.866.960,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.160.000,00	70.160.000,00	70.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	70.160.000,00	70.160.000,00	70.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	223.782.580,00	448.706.960,00	448.706.960,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	223.782.580,00	448.706.960,00	448.706.960,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.489.688.729,00	61.388.700.515,00	60.106.840.893,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.068.858.729,00	59.967.870.515,00	58.606.010.893,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.068.858.729,00	59.967.870.515,00	58.606.010.893,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.000.000,00	313.000.000,00	344.407.924,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.000.000,00	62.000.000,00	57.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.000.000,00	164.000.000,00	200.407.924,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	110.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	110.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.830.000,00	772.830.000,00	741.422.076,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.830.000,00	115.830.000,00	109.456.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	657.000.000,00	657.000.000,00	631.965.276,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002						Puskesmas Wonosobo 1	4.433.140.000,00	5.114.011.718,00	5.114.011.718,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	840.260.300,00	840.260.300,00	840.260.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	834.257.100,00	834.257.100,00	834.257.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.610.000,00	12.610.000,00	12.610.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.080.000,00	25.080.000,00	25.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.579.900,00	3.579.900,00	3.579.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	221.725.000,00	221.725.000,00	221.725.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.619.800,00	6.619.800,00	6.619.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	63.149.800,00	63.149.800,00	63.149.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	49.929.600,00	49.929.600,00	49.929.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	231.990.000,00	231.990.000,00	231.990.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	76.923.000,00	76.923.000,00	76.923.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	127.410.000,00	127.410.000,00	127.410.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.003.200,00	6.003.200,00	6.003.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.003.200,00	6.003.200,00	6.003.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	92.879.700,00	92.879.700,00	92.879.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92.879.700,00	92.879.700,00	92.879.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	92.879.700,00	92.879.700,00	92.879.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.500.000.000,00	4.180.871.718,00	4.180.871.718,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.500.000.000,00	4.180.871.718,00	4.180.871.718,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.500.000.000,00	4.180.871.718,00	4.180.871.718,00
1.02.0.00.0.00.01.0003						Puskesmas Kertek 1	3.382.510.000,00	3.901.821.146,00	3.901.821.146,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	744.370.000,00	744.370.000,00	744.370.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	744.267.000,00	744.267.000,00	744.267.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.960.000,00	30.960.000,00	30.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.275.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.290.000,00	28.290.000,00	28.290.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.120.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	126.951.000,00	126.951.000,00	126.951.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.980.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.920.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	165.864.000,00	165.864.000,00	165.864.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	153.742.000,00	153.742.000,00	153.742.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	34.405.000,00	34.405.000,00	34.405.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	148.020.000,00	148.020.000,00	148.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	103.000,00	103.000,00	103.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	103.000,00	103.000,00	103.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	165.870.000,00	165.870.000,00	165.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	165.870.000,00	165.870.000,00	165.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	165.870.000,00	165.870.000,00	165.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.472.270.000,00	2.991.581.146,00	2.991.581.146,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.472.270.000,00	2.991.581.146,00	2.991.581.146,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.472.270.000,00	2.991.581.146,00	2.991.581.146,00
1.02.0.00.0.00.01.0004						Puskesmas Selomerto 1	5.844.157.099,00	6.312.351.118,00	6.312.351.118,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	802.870.000,00	802.870.000,00	802.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	790.793.000,00	790.793.000,00	790.793.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.040.000,00	20.040.000,00	20.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	27.942.000,00	27.942.000,00	27.942.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.920.000,00	34.920.000,00	34.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	177.430.000,00	177.430.000,00	177.430.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.590.000,00	7.590.000,00	7.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.299.000,00	19.299.000,00	19.299.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.880.000,00	122.880.000,00	122.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	273.262.000,00	273.262.000,00	273.262.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.480.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	86.700.000,00	86.700.000,00	86.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.077.000,00	12.077.000,00	12.077.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.077.000,00	12.077.000,00	12.077.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.470.000,00	16.470.000,00	16.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.470.000,00	16.470.000,00	16.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.470.000,00	16.470.000,00	16.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.024.817.099,00	5.493.011.118,00	5.493.011.118,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	5.024.817.099,00	5.493.011.118,00	5.493.011.118,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.024.817.099,00	5.493.011.118,00	5.493.011.118,00
1.02.0.00.0.00.01.0005						Puskesmas Leksono 1	2.309.140.000,00	2.541.729.528,00	2.541.729.528,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	960.075.000,00	960.075.000,00	960.075.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	960.057.000,00	960.057.000,00	960.057.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	135.972.000,00	135.972.000,00	135.972.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.443.000,00	3.443.000,00	3.443.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.702.000,00	11.702.000,00	11.702.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	129.779.000,00	129.779.000,00	129.779.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.964.000,00	29.964.000,00	29.964.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44.605.000,00	44.605.000,00	44.605.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	403.390.000,00	403.390.000,00	403.390.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.032.000,00	5.032.000,00	5.032.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	188.490.000,00	188.490.000,00	188.490.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	98.565.000,00	98.565.000,00	98.565.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98.565.000,00	98.565.000,00	98.565.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	98.565.000,00	98.565.000,00	98.565.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.250.500.000,00	1.483.089.528,00	1.483.089.528,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.250.500.000,00	1.483.089.528,00	1.483.089.528,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.250.500.000,00	1.483.089.528,00	1.483.089.528,00
1.02.0.00.0.00.01.0006						Puskesmas Watumalang	3.567.345.000,00	3.518.953.413,00	3.518.953.413,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	863.200.000,00	863.200.000,00	863.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	863.186.000,00	863.186.000,00	863.186.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.504.000,00	61.504.000,00	61.504.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.840.000,00	13.840.000,00	13.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.740.000,00	19.740.000,00	19.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.320.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	232.922.000,00	232.922.000,00	232.922.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.980.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	59.610.000,00	59.610.000,00	59.610.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	184.200.000,00	184.200.000,00	184.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	155.890.000,00	155.890.000,00	155.890.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	106.800.000,00	106.800.000,00	106.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	78.740.000,00	78.740.000,00	78.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.740.000,00	78.740.000,00	78.740.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	78.740.000,00	78.740.000,00	78.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.625.405.000,00	2.577.013.413,00	2.577.013.413,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.625.405.000,00	2.577.013.413,00	2.577.013.413,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.625.405.000,00	2.577.013.413,00	2.577.013.413,00
1.02.0.00.0.00.01.0007						Puskesmas Mojotengah	4.554.528.000,00	5.398.325.283,00	5.351.325.283,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	966.600.000,00	966.600.000,00	966.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	966.503.000,00	966.503.000,00	966.503.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.640.000,00	86.640.000,00	86.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.448.000,00	7.448.000,00	7.448.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.090.000,00	12.090.000,00	12.090.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	241.485.000,00	241.485.000,00	241.485.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.340.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.510.000,00	18.510.000,00	18.510.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	209.490.000,00	209.490.000,00	209.490.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	208.530.000,00	208.530.000,00	208.530.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.220.000,00	26.220.000,00	26.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	134.490.000,00	134.490.000,00	134.490.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	40.340.000,00	40.340.000,00	40.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.340.000,00	40.340.000,00	40.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.340.000,00	40.340.000,00	40.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.547.588.000,00	4.391.385.283,00	4.344.385.283,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.547.588.000,00	4.391.385.283,00	4.344.385.283,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.547.588.000,00	4.391.385.283,00	4.344.385.283,00
1.02.0.00.0.00.01.0008						Puskesmas Garung	4.974.145.000,00	5.160.880.845,00	5.160.880.845,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.010.280.000,00	1.010.280.000,00	1.010.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.010.260.000,00	1.010.260.000,00	1.010.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.680.000,00	71.680.000,00	71.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	53.250.000,00	53.250.000,00	53.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.520.000,00	32.520.000,00	32.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	125.800.000,00	125.800.000,00	125.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	91.510.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	232.260.000,00	232.260.000,00	232.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	239.770.000,00	239.770.000,00	239.770.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.780.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	127.230.000,00	127.230.000,00	127.230.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	55.760.000,00	55.760.000,00	55.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.760.000,00	55.760.000,00	55.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	55.760.000,00	55.760.000,00	55.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.908.105.000,00	4.094.840.845,00	4.094.840.845,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.908.105.000,00	4.094.840.845,00	4.094.840.845,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.908.105.000,00	4.094.840.845,00	4.094.840.845,00
1.02.0.00.0.00.01.0009						Puskesmas Kejajar 1	3.273.340.000,00	3.438.098.642,00	3.438.098.642,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	692.030.000,00	692.030.000,00	692.030.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	691.913.000,00	691.913.000,00	691.913.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.100.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.715.000,00	7.715.000,00	7.715.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.230.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	165.695.000,00	165.695.000,00	165.695.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	111.135.000,00	111.135.000,00	111.135.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	211.428.000,00	211.428.000,00	211.428.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	103.980.000,00	103.980.000,00	103.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	117.000,00	117.000,00	117.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	117.000,00	117.000,00	117.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	31.310.000,00	31.310.000,00	31.310.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.310.000,00	31.310.000,00	31.310.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.310.000,00	31.310.000,00	31.310.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.550.000.000,00	2.714.758.642,00	2.714.758.642,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.550.000.000,00	2.714.758.642,00	2.714.758.642,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.550.000.000,00	2.714.758.642,00	2.714.758.642,00
1.02.0.00.0.00.01.0010						Puskesmas Kalikajar 1	2.790.409.900,00	3.094.695.326,00	3.094.695.326,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	688.827.500,00	688.827.500,00	688.827.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	688.328.100,00	688.328.100,00	688.328.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.270.000,00	41.270.000,00	41.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.920.000,00	10.920.000,00	10.920.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	211.337.000,00	211.337.000,00	211.337.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.715.000,00	42.715.000,00	42.715.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	57.097.100,00	57.097.100,00	57.097.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	169.680.000,00	169.680.000,00	169.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	25.560.000,00	25.560.000,00	25.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	105.456.000,00	105.456.000,00	105.456.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	499.400,00	499.400,00	499.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	499.400,00	499.400,00	499.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	97.812.500,00	97.812.500,00	97.812.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.812.500,00	97.812.500,00	97.812.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	97.812.500,00	97.812.500,00	97.812.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.003.769.900,00	2.308.055.326,00	2.308.055.326,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.003.769.900,00	2.308.055.326,00	2.308.055.326,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.003.769.900,00	2.308.055.326,00	2.308.055.326,00
1.02.0.00.0.00.01.0011						Puskesmas Sapuran	4.705.340.000,00	5.977.758.147,00	5.977.758.147,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	885.955.000,00	885.955.000,00	885.955.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	885.847.000,00	885.847.000,00	885.847.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.713.000,00	23.713.000,00	23.713.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.480.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.515.000,00	8.515.000,00	8.515.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	273.020.000,00	273.020.000,00	273.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60.780.000,00	60.780.000,00	60.780.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	179.610.000,00	179.610.000,00	179.610.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	236.282.000,00	236.282.000,00	236.282.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.743.000,00	17.743.000,00	17.743.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	41.664.000,00	41.664.000,00	41.664.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.385.000,00	19.385.000,00	19.385.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.385.000,00	19.385.000,00	19.385.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.385.000,00	19.385.000,00	19.385.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.800.000.000,00	5.072.418.147,00	5.072.418.147,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.800.000.000,00	5.072.418.147,00	5.072.418.147,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.800.000.000,00	5.072.418.147,00	5.072.418.147,00
1.02.0.00.0.00.01.0012						Puskesmas Kepil 1	3.377.340.000,00	3.849.347.709,00	3.849.347.709,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	826.730.000,00	826.730.000,00	826.730.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	826.730.000,00	826.730.000,00	826.730.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.704.000,00	16.704.000,00	16.704.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.322.000,00	12.322.000,00	12.322.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.020.000,00	19.020.000,00	19.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	306.570.000,00	306.570.000,00	306.570.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	121.160.000,00	121.160.000,00	121.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	230.390.000,00	230.390.000,00	230.390.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.474.000,00	15.474.000,00	15.474.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	67.470.000,00	67.470.000,00	67.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	35.610.000,00	35.610.000,00	35.610.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.610.000,00	35.610.000,00	35.610.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35.610.000,00	35.610.000,00	35.610.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.515.000.000,00	2.987.007.709,00	2.987.007.709,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.515.000.000,00	2.987.007.709,00	2.987.007.709,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.515.000.000,00	2.987.007.709,00	2.987.007.709,00
1.02.0.00.0.00.01.0013						Puskesmas Kaliwiro	4.953.440.000,00	5.058.351.135,00	5.058.351.135,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.295.640.000,00	1.295.640.000,00	1.295.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.295.640.000,00	1.295.640.000,00	1.295.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.860.000,00	25.860.000,00	25.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	83.425.000,00	83.425.000,00	83.425.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.060.000,00	39.060.000,00	39.060.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	221.288.000,00	221.288.000,00	221.288.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.770.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60.335.000,00	60.335.000,00	60.335.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	453.390.000,00	453.390.000,00	453.390.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	207.490.000,00	207.490.000,00	207.490.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	15.120.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	120.120.000,00	120.120.000,00	120.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	57.852.000,00	57.852.000,00	57.852.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.624.600.000,00	3.729.511.135,00	3.729.511.135,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.624.600.000,00	3.729.511.135,00	3.729.511.135,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.624.600.000,00	3.729.511.135,00	3.729.511.135,00
1.02.0.00.0.00.01.0014						Puskesmas Wadaslintang 1	2.865.165.000,00	3.671.746.630,00	3.671.746.630,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	817.168.000,00	817.168.000,00	817.168.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	817.147.480,00	817.147.480,00	817.147.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.195.000,00	30.195.000,00	30.195.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.125.000,00	32.125.000,00	32.125.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.380.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	540.000,00	540.000,00	540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	267.270.000,00	267.270.000,00	267.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34.180.000,00	34.180.000,00	34.180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72.020.880,00	72.020.880,00	72.020.880,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	209.179.600,00	209.179.600,00	209.179.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.060.000,00	13.060.000,00	13.060.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	119.910.000,00	119.910.000,00	119.910.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	20.520,00	20.520,00	20.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.520,00	20.520,00	20.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	21.372.000,00	21.372.000,00	21.372.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.372.000,00	21.372.000,00	21.372.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.372.000,00	21.372.000,00	21.372.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.026.625.000,00	2.833.206.630,00	2.833.206.630,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.026.625.000,00	2.833.206.630,00	2.833.206.630,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.026.625.000,00	2.833.206.630,00	2.833.206.630,00
1.02.0.00.0.00.01.0015						Puskesmas Sukoharjo 1	2.817.740.000,00	3.338.419.881,00	3.338.419.881,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.283.040.000,00	1.283.040.000,00	1.283.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.272.745.000,00	1.272.745.000,00	1.272.745.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.370.000,00	32.370.000,00	32.370.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.480.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	195.505.000,00	195.505.000,00	195.505.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33.025.000,00	33.025.000,00	33.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	148.740.000,00	148.740.000,00	148.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	758.690.000,00	758.690.000,00	758.690.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	19.665.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.950.000,00	55.950.000,00	55.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	10.295.000,00	10.295.000,00	10.295.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.295.000,00	10.295.000,00	10.295.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	84.700.000,00	84.700.000,00	84.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.700.000,00	84.700.000,00	84.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	84.700.000,00	84.700.000,00	84.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.450.000.000,00	1.970.679.881,00	1.970.679.881,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.450.000.000,00	1.970.679.881,00	1.970.679.881,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.450.000.000,00	1.970.679.881,00	1.970.679.881,00
1.02.0.00.0.00.01.0016						Puskesmas Kalibawang	2.065.425.000,00	2.689.253.947,00	2.689.253.947,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	805.644.280,00	805.644.280,00	805.644.280,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	805.586.000,00	805.586.000,00	805.586.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.232.000,00	11.232.000,00	11.232.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.416.000,00	18.416.000,00	18.416.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.440.000,00	19.440.000,00	19.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.878.000,00	1.878.000,00	1.878.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	198.220.000,00	198.220.000,00	198.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.185.000,00	7.185.000,00	7.185.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.432.000,00	17.432.000,00	17.432.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	89.301.000,00	89.301.000,00	89.301.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	311.492.000,00	311.492.000,00	311.492.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	110.610.000,00	110.610.000,00	110.610.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	58.280,00	58.280,00	58.280,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	58.280,00	58.280,00	58.280,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	109.045.720,00	109.045.720,00	109.045.720,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.045.720,00	109.045.720,00	109.045.720,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	109.045.720,00	109.045.720,00	109.045.720,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.150.735.000,00	1.774.563.947,00	1.774.563.947,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.150.735.000,00	1.774.563.947,00	1.774.563.947,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.150.735.000,00	1.774.563.947,00	1.774.563.947,00
1.02.0.00.0.00.01.0017						Puskesmas Wonosobo 2	1.565.258.000,00	1.932.515.695,00	1.932.515.695,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	480.198.000,00	480.198.000,00	480.198.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	479.762.840,00	479.762.840,00	479.762.840,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.540.000,00	12.540.000,00	12.540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.679.840,00	2.679.840,00	2.679.840,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.472.000,00	100.472.000,00	100.472.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.276.000,00	7.276.000,00	7.276.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.795.000,00	87.795.000,00	87.795.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	142.590.000,00	142.590.000,00	142.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	99.600.000,00	99.600.000,00	99.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	435.160,00	435.160,00	435.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	435.160,00	435.160,00	435.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	52.440.000,00	52.440.000,00	52.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.440.000,00	52.440.000,00	52.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	52.440.000,00	52.440.000,00	52.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.032.620.000,00	1.399.877.695,00	1.399.877.695,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.032.620.000,00	1.399.877.695,00	1.399.877.695,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.032.620.000,00	1.399.877.695,00	1.399.877.695,00
1.02.0.00.0.00.01.0018						Puskesmas Kertek 2	2.676.613.000,00	3.195.369.385,00	3.195.369.385,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	668.790.000,00	668.790.000,00	668.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	668.741.000,00	668.741.000,00	668.741.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.170.000,00	7.170.000,00	7.170.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	266.470.000,00	266.470.000,00	266.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.662.000,00	8.662.000,00	8.662.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	123.150.000,00	123.150.000,00	123.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	175.358.000,00	175.358.000,00	175.358.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.790.000,00	5.790.000,00	5.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	61.620.000,00	61.620.000,00	61.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.743.000,00	4.743.000,00	4.743.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.743.000,00	4.743.000,00	4.743.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.743.000,00	4.743.000,00	4.743.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.003.080.000,00	2.521.836.385,00	2.521.836.385,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.003.080.000,00	2.521.836.385,00	2.521.836.385,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.003.080.000,00	2.521.836.385,00	2.521.836.385,00
1.02.0.00.0.00.01.0019						Puskesmas Selomerto 2	1.774.728.000,00	1.941.308.429,00	1.941.308.429,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	718.214.000,00	718.214.000,00	718.214.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	718.138.000,00	718.138.000,00	718.138.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.872.000,00	28.872.000,00	28.872.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.618.000,00	21.618.000,00	21.618.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.810.000,00	12.810.000,00	12.810.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	960.000,00	960.000,00	960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	79.919.000,00	79.919.000,00	79.919.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.537.000,00	23.537.000,00	23.537.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	76.376.000,00	76.376.000,00	76.376.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	366.590.000,00	366.590.000,00	366.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.940.000,00	16.940.000,00	16.940.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	85.086.000,00	85.086.000,00	85.086.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	122.324.000,00	122.324.000,00	122.324.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.324.000,00	122.324.000,00	122.324.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	122.324.000,00	122.324.000,00	122.324.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	934.190.000,00	1.100.770.429,00	1.100.770.429,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	934.190.000,00	1.100.770.429,00	1.100.770.429,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	934.190.000,00	1.100.770.429,00	1.100.770.429,00
1.02.0.00.0.00.01.0020						Puskesmas Leksono 2	1.660.189.000,00	1.910.838.035,00	1.910.838.035,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	918.550.000,00	918.550.000,00	918.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	918.550.000,00	918.550.000,00	918.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.754.000,00	61.754.000,00	61.754.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.245.000,00	20.245.000,00	20.245.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.860.000,00	25.860.000,00	25.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	960.000,00	960.000,00	960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	199.140.000,00	199.140.000,00	199.140.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.041.000,00	24.041.000,00	24.041.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	66.480.000,00	66.480.000,00	66.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	421.590.000,00	421.590.000,00	421.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	35.540.000,00	35.540.000,00	35.540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.980.000,00	55.980.000,00	55.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	41.639.000,00	41.639.000,00	41.639.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.639.000,00	41.639.000,00	41.639.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	41.639.000,00	41.639.000,00	41.639.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	700.000.000,00	950.649.035,00	950.649.035,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	700.000.000,00	950.649.035,00	950.649.035,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	700.000.000,00	950.649.035,00	950.649.035,00
1.02.0.00.0.00.01.0021						Puskesmas Kejajar 2	1.889.610.650,00	1.906.930.544,00	1.906.930.544,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	910.669.000,00	910.669.000,00	910.669.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	895.650.000,00	895.650.000,00	895.650.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94.080.000,00	94.080.000,00	94.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.155.000,00	13.155.000,00	13.155.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.360.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	115.164.000,00	115.164.000,00	115.164.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.380.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.376.000,00	25.376.000,00	25.376.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72.750.000,00	72.750.000,00	72.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	392.290.000,00	392.290.000,00	392.290.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.615.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	141.240.000,00	141.240.000,00	141.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	15.019.000,00	15.019.000,00	15.019.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15.019.000,00	15.019.000,00	15.019.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	44.171.000,00	44.171.000,00	44.171.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.171.000,00	44.171.000,00	44.171.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	44.171.000,00	44.171.000,00	44.171.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	934.770.650,00	952.090.544,00	952.090.544,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	934.770.650,00	952.090.544,00	952.090.544,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	934.770.650,00	952.090.544,00	952.090.544,00
1.02.0.00.0.00.01.0022						Puskesmas Kalikajar 2	2.814.393.980,00	3.219.592.478,00	3.219.592.478,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	808.685.000,00	808.685.000,00	808.685.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	808.685.000,00	808.685.000,00	808.685.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29.286.000,00	29.286.000,00	29.286.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.190.000,00	26.190.000,00	26.190.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	119.926.000,00	119.926.000,00	119.926.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.548.000,00	29.548.000,00	29.548.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	370.335.000,00	370.335.000,00	370.335.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	189.990.000,00	189.990.000,00	189.990.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	17.790.000,00	17.790.000,00	17.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70.755.000,00	70.755.000,00	70.755.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.755.000,00	70.755.000,00	70.755.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	70.755.000,00	70.755.000,00	70.755.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.934.953.980,00	2.340.152.478,00	2.340.152.478,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.934.953.980,00	2.340.152.478,00	2.340.152.478,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.934.953.980,00	2.340.152.478,00	2.340.152.478,00
1.02.0.00.0.00.01.0023						Puskesmas Kepil 2	3.130.337.900,00	3.267.975.322,00	3.267.975.322,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.092.678.800,00	1.092.678.800,00	1.092.678.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.090.714.300,00	1.090.714.300,00	1.090.714.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.050.000,00	31.050.000,00	31.050.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.676.000,00	12.676.000,00	12.676.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.755.500,00	2.755.500,00	2.755.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	409.383.000,00	409.383.000,00	409.383.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.545.000,00	7.545.000,00	7.545.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.121.000,00	40.121.000,00	40.121.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	67.100.800,00	67.100.800,00	67.100.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	359.290.000,00	359.290.000,00	359.290.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	53.783.000,00	53.783.000,00	53.783.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	90.090.000,00	90.090.000,00	90.090.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.964.500,00	1.964.500,00	1.964.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.964.500,00	1.964.500,00	1.964.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	88.861.200,00	88.861.200,00	88.861.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.861.200,00	88.861.200,00	88.861.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	88.861.200,00	88.861.200,00	88.861.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.948.797.900,00	2.086.435.322,00	2.086.435.322,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.948.797.900,00	2.086.435.322,00	2.086.435.322,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.948.797.900,00	2.086.435.322,00	2.086.435.322,00
1.02.0.00.0.00.01.0024						Puskesmas Wadaslintang 2	2.035.898.000,00	2.296.562.119,00	2.296.562.119,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	777.721.000,00	777.721.000,00	777.721.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	777.702.950,00	777.702.950,00	777.702.950,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.976.000,00	38.976.000,00	38.976.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.933.000,00	14.933.000,00	14.933.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	161.490.000,00	161.490.000,00	161.490.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.549.750,00	7.549.750,00	7.549.750,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.228.200,00	142.228.200,00	142.228.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	335.530.000,00	335.530.000,00	335.530.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	540.000,00	540.000,00	540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.960.000,00	9.960.000,00	9.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	40.860.000,00	40.860.000,00	40.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	18.050,00	18.050,00	18.050,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	18.050,00	18.050,00	18.050,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.677.000,00	24.677.000,00	24.677.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.677.000,00	24.677.000,00	24.677.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.677.000,00	24.677.000,00	24.677.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.233.500.000,00	1.494.164.119,00	1.494.164.119,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.233.500.000,00	1.494.164.119,00	1.494.164.119,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.233.500.000,00	1.494.164.119,00	1.494.164.119,00
1.02.0.00.0.00.01.0025						Puskesmas Sukoharjo 2	1.575.298.500,00	1.941.540.035,00	1.941.540.035,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	888.657.000,00	888.657.000,00	888.657.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	888.657.000,00	888.657.000,00	888.657.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.656.000,00	52.656.000,00	52.656.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	47.575.000,00	47.575.000,00	47.575.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	137.280.000,00	137.280.000,00	137.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.844.000,00	27.844.000,00	27.844.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	113.247.000,00	113.247.000,00	113.247.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	409.290.000,00	409.290.000,00	409.290.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.225.000,00	4.225.000,00	4.225.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	75.600.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	31.683.000,00	31.683.000,00	31.683.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.683.000,00	31.683.000,00	31.683.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.683.000,00	31.683.000,00	31.683.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	654.958.500,00	1.021.200.035,00	1.021.200.035,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	654.958.500,00	1.021.200.035,00	1.021.200.035,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	654.958.500,00	1.021.200.035,00	1.021.200.035,00
1.02.0.00.0.00.01.0026						Laboratorium Kesehatan Daerah	600.000.000,00	704.970.000,00	704.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0026	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	600.000.000,00	704.970.000,00	704.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0026	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	704.970.000,00	704.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0026	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	600.000.000,00	704.970.000,00	704.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0027						RSUD Setjonegoro Kab. Wonosobo	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0027	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0027	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0027	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0027	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0027	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0027	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0027	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0027	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000						RSUD Setjonegoro	134.766.578.269,00	153.971.805.158,00	153.911.805.156,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.766.578.269,00	26.499.162.916,00	26.439.162.914,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.766.578.269,00	26.499.162.916,00	26.439.162.914,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	110.000.000.000,00	127.472.642.242,00	127.472.642.242,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	110.000.000.000,00	127.472.642.242,00	127.472.642.242,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	171.718.786.961,00	184.207.259.596,00	187.404.374.120,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	171.718.786.961,00	184.207.259.596,00	187.404.374.120,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.300.000.000,00	9.151.250.000,00	9.151.250.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.250.000.000,00	9.101.250.000,00	9.101.250.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	5.851.250.000,00	5.851.250.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.583.264.000,00	15.668.264.000,00	15.623.264.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.583.264.000,00	15.668.264.000,00	15.623.264.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	45.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15.538.264.000,00	15.473.264.000,00	15.428.264.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	19.036.497.000,00	19.101.497.000,00	19.501.497.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.036.497.000,00	19.101.497.000,00	19.501.497.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	100.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	1.945.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	17.241.497.000,00	17.181.497.000,00	17.181.497.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	813.120.000,00	763.850.000,00	763.850.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	813.120.000,00	763.850.000,00	763.850.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	79.800.000,00	79.800.000,00	79.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	733.320.000,00	684.050.000,00	684.050.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.390.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.390.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.390.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	116.856.007.049,00	122.884.277.049,00	125.615.891.573,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	116.856.007.049,00	122.884.277.049,00	125.615.891.573,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	185.200.000,00	223.120.000,00	253.120.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000,00	205.350.000,00	205.350.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	4.662.500.000,00	4.662.500.000,00	4.662.500.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	384.685.000,00	384.685.000,00	384.685.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	63.783.619.380,00	63.379.619.380,00	63.379.619.380,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	37.389.030.000,00	43.789.030.000,00	46.849.144.524,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	9.685.972.669,00	9.674.972.669,00	9.316.472.669,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.649.898.912,00	13.158.121.547,00	13.128.621.547,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000,00	701.255.885,00	731.255.885,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000,00	651.255.885,00	666.255.885,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	50.000.000,00	65.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.685.898.912,00	10.512.865.662,00	10.453.365.662,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.685.898.912,00	10.512.865.662,00	10.453.365.662,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	130.966.000,00	130.966.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	90.966.000,00	90.966.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.027.000.000,00	888.034.000,00	888.034.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	925.000.000,00	794.034.000,00	794.034.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000,00	350.000.000,00	330.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	130.000.000,00	150.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	33.793.812.860,00	33.857.984.594,00	36.601.234.595,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.420.190.360,00	21.463.102.094,00	22.766.352.095,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	610.000.000,00	611.500.000,00	611.500.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	510.000.000,00	511.500.000,00	511.500.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	285.000.000,00	286.500.000,00	286.500.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.275.600.000,00	2.431.525.000,00	2.431.525.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	30.000.000,00	185.925.000,00	185.925.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	30.000.000,00	185.925.000,00	185.925.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.245.600.000,00	2.245.600.000,00	2.245.600.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.163.000.000,00	2.163.000.000,00	2.163.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	82.600.000,00	82.600.000,00	82.600.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.869.500.000,00	10.850.800.000,00	12.000.800.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.869.500.000,00	10.850.800.000,00	12.000.800.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10.869.500.000,00	10.850.800.000,00	12.000.800.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.255.090.360,00	7.159.277.094,00	7.312.527.095,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.379.890.360,00	5.238.137.094,00	5.261.387.095,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.379.890.360,00	5.238.137.094,00	5.261.387.095,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.700.000,00	253.604.000,00	253.604.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	10.904.000,00	10.904.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	325.000.000,00	325.000.000,00	405.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	80.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	787.500.000,00	796.596.000,00	796.596.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	48.100.000,00	48.100.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	745.000.000,00	745.996.000,00	745.996.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.000.000,00	485.940.000,00	485.940.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	195.940.000,00	195.940.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.373.622.500,00	12.394.882.500,00	13.834.882.500,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	50.000.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	50.000.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	12.323.622.500,00	12.327.682.500,00	13.767.682.500,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.248.622.500,00	12.252.682.500,00	13.692.682.500,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.123.050.000,00	10.077.110.000,00	11.477.110.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.351.300.000,00	9.307.140.000,00	10.507.140.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	771.750.000,00	769.970.000,00	969.970.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	89.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	89.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	421.572.500,00	421.572.500,00	421.572.500,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	271.572.500,00	171.572.500,00	171.572.500,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.045.000.000,00	1.045.000.000,00	1.085.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	340.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	745.000.000,00	745.000.000,00	745.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0,00	0,00	0,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan polisi Pamong Praja	8.421.461.672,00	8.534.728.212,00	8.556.928.212,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.421.461.672,00	8.534.728.212,00	8.556.928.212,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.421.461.672,00	8.534.728.212,00	8.556.928.212,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.953.610.000,00	2.953.610.000,00	2.953.610.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.486.410.000,00	2.486.410.000,00	2.486.410.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.461.410.000,00	2.461.410.000,00	2.461.410.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	467.200.000,00	467.200.000,00	467.200.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	442.200.000,00	442.200.000,00	442.200.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.467.851.672,00	5.581.118.212,00	5.603.318.212,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.516.300.672,00	4.477.789.585,00	4.499.989.585,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.461.724.672,00	4.423.213.585,00	4.445.413.585,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.576.000,00	54.576.000,00	54.576.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	550.000.000,00	701.777.627,00	701.777.627,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	550.000.000,00	701.777.627,00	701.777.627,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.700.000,00	162.700.000,00	162.700.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.675.000,00	21.675.000,00	21.675.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.675.000,00	21.675.000,00	21.675.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.376.000,00	182.376.000,00	182.376.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.376.000,00	17.376.000,00	17.376.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.804.897.253,00	6.683.002.690,00	6.756.552.690,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	505.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	180.000.000,00	180.000.000,00	230.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	105.000.000,00	155.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.229.897.253,00	5.108.002.690,00	5.131.552.690,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.254.897.253,00	4.133.002.690,00	4.156.552.690,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.254.897.253,00	4.133.002.690,00	4.156.552.690,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.000.000,00	355.000.000,00	355.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.586.455.743,00	21.335.609.404,00	21.549.309.404,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11.688.919.743,00	12.438.073.404,00	12.411.773.404,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	836.200.000,00	836.200.000,00	836.200.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	586.200.000,00	586.200.000,00	586.200.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	146.200.000,00	146.200.000,00	146.200.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	630.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.483.172.600,00	6.238.505.482,00	6.238.505.482,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.483.172.600,00	6.238.505.482,00	6.238.505.482,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.183.172.600,00	5.938.505.482,00	5.938.505.482,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.289.547.143,00	4.283.367.922,00	4.257.067.922,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.578.802.663,00	3.572.623.442,00	3.546.323.442,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.578.802.663,00	3.572.623.442,00	3.546.323.442,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.000.000,00	259.000.000,00	259.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.500.000,00	177.500.000,00	177.500.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.744.480,00	290.744.480,00	290.744.480,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.244.480,00	256.244.480,00	256.244.480,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.000.000,00	151.000.000,00	151.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	8.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.897.536.000,00	8.897.536.000,00	9.137.536.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.897.536.000,00	8.897.536.000,00	9.137.536.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	1.282.200.000,00	1.282.200.000,00	1.522.200.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	1.282.200.000,00	1.282.200.000,00	1.522.200.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	1.282.200.000,00	1.282.200.000,00	1.522.200.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	305.000.000,00	274.085.000,00	274.085.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	50.000.000,00	80.915.000,00	80.915.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.390.336.000,00	6.390.336.000,00	6.390.336.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.390.336.000,00	6.390.336.000,00	6.390.336.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.404.400.000,00	3.404.400.000,00	3.404.400.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	116.400.000,00	116.400.000,00	116.400.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	915.536.000,00	915.536.000,00	915.536.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	384.000.000,00	384.000.000,00	384.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	0,00	0,00	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	840.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	840.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000						Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	13.514.417.995,00	13.394.176.941,00	19.320.126.941,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.228.875.174,00	7.975.174.941,00	13.901.124.941,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.952.282.000,00	2.002.282.000,00	7.917.282.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.877.282.000,00	1.927.282.000,00	7.742.282.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.847.282.000,00	1.897.282.000,00	7.712.282.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000,00	25.000.000,00	125.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000,00	25.000.000,00	125.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	230.000.000,00	246.540.821,00	246.540.821,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	166.540.821,00	166.540.821,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	80.000.000,00	96.540.821,00	96.540.821,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.851.593.174,00	5.531.352.120,00	5.542.302.120,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.008.093.174,00	4.687.852.120,00	4.698.802.120,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.008.093.174,00	4.687.852.120,00	4.698.802.120,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.500.000,00	170.500.000,00	170.500.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	125.000.000,00	123.500.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.000.000,00	397.000.000,00	397.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	328.000.000,00	298.000.000,00	298.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.000.000,00	221.000.000,00	221.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5.285.542.821,00	5.419.002.000,00	5.419.002.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.269.002.000,00	5.419.002.000,00	5.419.002.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.269.002.000,00	5.419.002.000,00	5.419.002.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.269.002.000,00	5.419.002.000,00	5.419.002.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.769.002.000,00	1.769.002.000,00	1.769.002.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.450.000.000,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	16.540.821,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	16.540.821,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.540.821,00	0,00	0,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	16.540.821,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	57.240.333.133,00	57.038.884.457,00	58.941.702.587,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	190.650.000,00	190.650.000,00	190.650.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	190.650.000,00	190.650.000,00	190.650.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.650.000,00	25.650.000,00	25.650.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.650.000,00	25.650.000,00	25.650.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.650.000,00	25.650.000,00	25.650.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	57.049.683.133,00	56.848.234.457,00	58.751.052.587,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	540.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	500.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	375.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	375.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	56.509.683.133,00	56.283.234.457,00	58.186.052.587,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.030.448.400,00	6.384.003.654,00	8.364.003.654,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.527.448.400,00	3.881.003.654,00	4.581.003.654,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.332.448.400,00	3.686.003.654,00	4.386.003.654,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	293.000.000,00	293.000.000,00	343.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	293.000.000,00	293.000.000,00	343.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	3.390.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	3.390.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	27.068.000.000,00	27.068.000.000,00	27.068.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	26.968.000.000,00	26.968.000.000,00	26.968.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9.950.000.000,00	9.950.000.000,00	9.950.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	680.000.000,00	680.000.000,00	680.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	15.308.000.000,00	15.308.000.000,00	15.308.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	601.150.000,00	601.150.000,00	601.150.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	601.150.000,00	601.150.000,00	601.150.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	501.150.000,00	501.150.000,00	501.150.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	297.500.000,00	297.500.000,00	297.500.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	297.500.000,00	297.500.000,00	297.500.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	297.500.000,00	297.500.000,00	297.500.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.512.584.733,00	21.932.580.803,00	21.855.398.933,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.954.284.733,00	20.178.020.803,00	20.100.838.933,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.954.284.733,00	20.178.020.803,00	20.100.838.933,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.000.000,00	524.029.705,00	524.029.705,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	37.014.625,00	37.014.625,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	125.746.080,00	125.746.080,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000,00	95.289.000,00	95.289.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.000.000,00	255.980.000,00	255.980.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	967.300.000,00	921.580.000,00	921.580.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	822.500.000,00	771.780.000,00	771.780.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.000.000,00	308.950.295,00	308.950.295,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000,00	188.950.295,00	188.950.295,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000						Dinas lingkungan Hidup	20.473.703.040,00	20.571.321.037,00	21.097.571.038,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20.473.703.040,00	20.571.321.037,00	21.097.571.038,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	20.473.703.040,00	20.571.321.037,00	21.097.571.038,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.050.405.500,00	13.050.405.500,00	13.560.405.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	13.050.405.500,00	13.050.405.500,00	13.560.405.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.373.398.500,00	2.373.398.500,00	2.623.398.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	68.061.000,00	68.061.000,00	308.061.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	10.608.946.000,00	10.608.946.000,00	10.628.946.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.423.297.540,00	7.520.915.537,00	7.537.165.538,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.423.297.540,00	7.520.915.537,00	7.537.165.538,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.423.297.540,00	7.520.915.537,00	7.537.165.538,00
2.11.1.03.0.00.01.0000						Dinas lingkungan Hidup	3.921.400.014,00	3.921.400.014,00	3.921.400.014,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	176.107.500,00	176.107.500,00	176.107.500,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	93.654.000,00	93.654.000,00	93.654.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	93.654.000,00	93.654.000,00	93.654.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	82.453.500,00	82.453.500,00	82.453.500,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	82.453.500,00	82.453.500,00	82.453.500,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	538.261.400,00	538.261.400,00	538.261.400,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	413.261.400,00	413.261.400,00	413.261.400,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	102.261.400,00	102.261.400,00	102.261.400,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	211.000.000,00	211.000.000,00	211.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.700.297.914,00	1.700.297.914,00	1.700.297.914,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.700.297.914,00	1.700.297.914,00	1.700.297.914,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.599.672.414,00	1.599.672.414,00	1.599.672.414,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	100.625.500,00	100.625.500,00	100.625.500,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	46.950.000,00	46.950.000,00	46.950.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46.950.000,00	46.950.000,00	46.950.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	46.950.000,00	46.950.000,00	46.950.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	291.750.000,00	291.750.000,00	291.750.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	291.750.000,00	291.750.000,00	291.750.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	151.250.000,00	151.250.000,00	151.250.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.023.033.200,00	1.023.033.200,00	1.023.033.200,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.483.200,00	261.813.561,00	261.813.561,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.117.000,00	56.192.361,00	56.192.361,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.778.200,00	15.778.200,00	15.778.200,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.088.000,00	184.088.000,00	184.088.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.000.000,00	116.650.000,00	116.650.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	56.650.000,00	56.650.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.550.000,00	409.569.639,00	409.569.639,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000,00	72.669.639,00	72.669.639,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	331.550.000,00	334.900.000,00	334.900.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.797.478.928,00	7.579.146.386,00	8.038.896.387,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.797.478.928,00	7.579.146.386,00	8.038.896.387,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.132.999.360,00	1.033.499.360,00	1.033.499.360,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.132.999.360,00	883.499.360,00	883.499.360,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.132.999.360,00	883.499.360,00	883.499.360,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	192.250.000,00	177.250.000,00	177.250.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	132.250.000,00	117.250.000,00	117.250.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	42.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	30.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	170.100.000,00	210.200.000,00	210.200.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	125.000.000,00	165.100.000,00	165.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	25.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	50.000.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.100.000,00	45.100.000,00	45.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.100.000,00	45.100.000,00	45.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.302.129.568,00	6.158.197.026,00	6.617.947.027,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.783.829.568,00	4.565.497.026,00	4.575.247.027,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.783.829.568,00	4.565.497.026,00	4.575.247.027,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.100.000,00	471.100.000,00	471.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.600.000,00	170.600.000,00	170.600.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.500.000,00	249.500.000,00	249.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.800.000,00	286.280.000,00	736.280.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.800.000,00	261.280.000,00	711.280.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.400.000,00	620.320.000,00	620.320.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	599.400.000,00	512.320.000,00	512.320.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.148.722.028,00	19.538.419.136,00	19.717.669.137,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.004.003.385,00	6.393.700.493,00	6.422.950.494,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	570.654.292,00	705.654.292,00	705.654.292,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	205.654.292,00	205.654.292,00	205.654.292,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	75.654.292,00	75.654.292,00	75.654.292,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	290.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	136.272.744,00	136.272.744,00	136.272.744,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.022.744,00	43.022.744,00	43.022.744,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43.022.744,00	43.022.744,00	43.022.744,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	93.250.000,00	93.250.000,00	93.250.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.250.000,00	93.250.000,00	93.250.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.059.076.349,00	5.313.773.457,00	5.343.023.458,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	4.254.697.108,00	4.283.947.109,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	4.254.697.108,00	4.283.947.109,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.476.349,00	339.751.349,00	339.751.349,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.229.277,00	35.854.277,00	35.854.277,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.080.000,00	13.080.000,00	13.080.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.247.072,00	265.847.072,00	265.847.072,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.600.000,00	544.200.000,00	544.200.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.700.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.400.000,00	511.000.000,00	511.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.000.000,00	157.125.000,00	157.125.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	14.125.000,00	14.125.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.144.718.643,00	13.144.718.643,00	13.294.718.643,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	598.257.643,00	598.257.643,00	598.257.643,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	95.857.643,00	95.857.643,00	95.857.643,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	25.857.643,00	25.857.643,00	25.857.643,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	502.400.000,00	502.400.000,00	502.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	221.400.000,00	221.400.000,00	221.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.836.661.000,00	7.836.661.000,00	7.986.661.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.908.412.000,00	1.908.412.000,00	2.058.412.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	121.640.000,00	121.640.000,00	121.640.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	863.412.000,00	863.412.000,00	863.412.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	321.360.000,00	321.360.000,00	321.360.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	90.000.000,00	90.000.000,00	240.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	312.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.282.974.000,00	1.282.974.000,00	1.282.974.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	795.000.000,00	795.000.000,00	795.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	427.974.000,00	427.974.000,00	427.974.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.026.600.000,00	4.026.600.000,00	4.026.600.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.121.687.000,00	3.121.687.000,00	3.121.687.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	652.800.000,00	652.800.000,00	652.800.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46.263.000,00	46.263.000,00	46.263.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	50.450.000,00	50.450.000,00	50.450.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	618.675.000,00	618.675.000,00	618.675.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	8.090.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	32.425.000,00	32.425.000,00	32.425.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	578.160.000,00	578.160.000,00	578.160.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.709.800.000,00	4.709.800.000,00	4.709.800.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	388.400.000,00	388.400.000,00	388.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.321.400.000,00	4.321.400.000,00	4.321.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.034.000.000,00	2.034.000.000,00	2.034.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.237.400.000,00	2.237.400.000,00	2.237.400.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	10.236.247.456,00	10.124.299.811,00	10.117.499.812,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.160.247.456,00	10.048.299.811,00	10.041.499.812,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.166.300.000,00	3.146.300.000,00	3.146.300.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.166.300.000,00	3.146.300.000,00	3.146.300.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	108.046.490,00	108.046.490,00	108.046.490,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.303.803.510,00	2.283.803.510,00	2.283.803.510,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	326.600.000,00	326.600.000,00	326.600.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	106.350.000,00	106.350.000,00	106.350.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.583.000.000,00	1.570.000.000,00	1.570.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.568.000.000,00	1.555.000.000,00	1.555.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.170.000.000,00	1.157.000.000,00	1.157.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	234.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.410.947.456,00	5.331.999.811,00	5.325.199.812,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.207.117.708,00	3.995.170.063,00	3.988.370.064,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.135.957.708,00	3.924.010.063,00	3.917.210.064,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.160.000,00	71.160.000,00	71.160.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.978.860,00	276.610.860,00	276.610.860,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.000.000,00	14.632.000,00	14.632.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.978.860,00	125.978.860,00	125.978.860,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.350.888,00	246.050.888,00	246.050.888,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.850.888,00	175.550.888,00	175.550.888,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.500.000,00	414.168.000,00	414.168.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252.500.000,00	314.168.000,00	314.168.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.882.578.816,00	5.719.340.286,00	5.693.140.286,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.882.578.816,00	5.719.340.286,00	5.693.140.286,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	611.687.000,00	611.687.000,00	611.687.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	611.687.000,00	611.687.000,00	611.687.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	416.687.000,00	416.687.000,00	416.687.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.887.691.816,00	4.724.453.286,00	4.698.253.286,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.863.503.256,00	2.560.264.726,00	2.534.064.726,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.863.503.256,00	2.560.264.726,00	2.534.064.726,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.000.000,00	335.000.000,00	340.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	85.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	655.000.000,00	861.000.000,00	861.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	435.000.000,00	641.000.000,00	641.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.388.560,00	742.388.560,00	712.388.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604.388.560,00	604.388.560,00	574.388.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.800.000,00	225.800.000,00	250.800.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000,00	60.000.000,00	85.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.800.000,00	105.800.000,00	105.800.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	6.775.765.208,00	6.558.141.237,00	6.566.641.237,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.315.480.000,00	1.315.480.000,00	1.315.480.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.294.300.000,00	1.294.300.000,00	1.294.300.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.081.000.000,00	1.081.000.000,00	1.081.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	593.000.000,00	593.000.000,00	593.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	473.000.000,00	473.000.000,00	473.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	213.300.000,00	213.300.000,00	213.300.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	198.300.000,00	198.300.000,00	198.300.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	21.180.000,00	21.180.000,00	21.180.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	21.180.000,00	21.180.000,00	21.180.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	21.180.000,00	21.180.000,00	21.180.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	5.460.285.208,00	5.242.661.237,00	5.251.161.237,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	253.000.000,00	253.000.000,00	253.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	218.000.000,00	218.000.000,00	218.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	218.000.000,00	218.000.000,00	218.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.207.285.208,00	4.989.661.237,00	4.998.161.237,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.199.112.928,00	3.981.488.957,00	3.989.988.957,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.199.112.928,00	3.981.488.957,00	3.989.988.957,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.000.000,00	176.000.000,00	178.500.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	111.000.000,00	115.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	676.377.280,00	674.627.280,00	669.127.280,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.127.280,00	377.280,00	377.280,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000,00	31.000.000,00	25.500.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.250.000,00	523.250.000,00	523.250.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.795.000,00	138.545.000,00	141.545.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.795.000,00	62.795.000,00	70.795.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	16.667.074.182,00	18.137.474.181,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	1.451.000.000,00	2.736.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	1.401.000.000,00	2.686.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	891.000.000,00	1.976.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0,00	891.000.000,00	1.976.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	480.000.000,00	680.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0,00	450.000.000,00	650.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00	15.216.074.182,00	15.401.474.181,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	15.216.074.182,00	15.401.474.181,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0,00	7.413.201.000,00	7.449.201.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	6.258.201.000,00	6.294.201.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	5.048.201.000,00	5.048.201.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	1.210.000.000,00	1.246.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	1.050.000.000,00	1.200.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	1.050.000.000,00	1.200.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	400.000.000,00	750.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0,00	600.000.000,00	400.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0004	Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	1.468.000.000,00	1.468.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0,00	1.328.000.000,00	1.328.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	0,00	759.777.000,00	759.777.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	0,00	468.223.000,00	468.223.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.114.873.182,00	5.114.273.181,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	4.447.775.182,00	4.447.175.181,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	4.447.775.182,00	4.447.175.181,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	103.100.000,00	103.100.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	424.900.000,00	424.900.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	141.000.000,00	148.500.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	255.000.000,00	247.500.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	124.098.000,00	124.098.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	44.098.000,00	44.098.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000						Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.084.786.647,00	14.907.605.955,00	15.003.805.956,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.916.458.282,00	12.639.277.590,00	12.844.827.591,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11.916.458.282,00	12.639.277.590,00	12.844.827.591,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	43.692.000,00	43.692.000,00	43.692.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	43.692.000,00	43.692.000,00	43.692.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	43.692.000,00	43.692.000,00	43.692.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	27.065.549,00	27.065.549,00	27.065.549,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.065.549,00	27.065.549,00	27.065.549,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	27.065.549,00	27.065.549,00	27.065.549,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	525.170.000,00	525.170.000,00	525.170.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	525.170.000,00	525.170.000,00	525.170.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	525.170.000,00	525.170.000,00	525.170.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	500.000.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	500.000.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	500.000.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	607.174.131,00	792.174.131,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0,00	607.174.131,00	792.174.131,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	0,00	607.174.131,00	792.174.131,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.820.530.733,00	10.746.175.910,00	10.766.725.911,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.731.614.487,00	7.556.754.209,00	7.577.304.210,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.731.614.487,00	7.556.754.209,00	7.577.304.210,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.166.246,00	249.166.246,00	339.166.246,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.866.246,00	88.866.246,00	98.866.246,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	120.000.000,00	200.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.656.750.000,00	2.753.255.455,00	2.648.255.455,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	995.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.550.000.000,00	1.650.505.455,00	1.650.505.455,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.000.000,00	157.000.000,00	172.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000,00	68.000.000,00	73.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	84.000.000,00	94.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.168.328.365,00	2.268.328.365,00	2.158.978.365,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.168.328.365,00	2.268.328.365,00	2.158.978.365,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	8.100.000,00	8.100.000,00	14.100.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	8.100.000,00	8.100.000,00	14.100.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8.100.000,00	8.100.000,00	14.100.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	975.783.375,00	1.075.783.375,00	731.433.375,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	906.933.375,00	1.006.933.375,00	662.583.375,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	720.183.375,00	820.183.375,00	625.833.375,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	186.750.000,00	186.750.000,00	36.750.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	68.850.000,00	68.850.000,00	68.850.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	28.350.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.062.887.855,00	1.062.887.855,00	1.288.887.855,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.007.840.000,00	1.007.840.000,00	1.229.840.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.007.840.000,00	1.007.840.000,00	1.229.840.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	55.047.855,00	55.047.855,00	59.047.855,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	55.047.855,00	55.047.855,00	59.047.855,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	12.150.000,00	12.150.000,00	7.150.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.150.000,00	12.150.000,00	7.150.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	12.150.000,00	12.150.000,00	7.150.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	97.257.135,00	97.257.135,00	105.257.135,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	97.257.135,00	97.257.135,00	105.257.135,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	85.107.135,00	85.107.135,00	93.107.135,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0001						Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	997.150.193,00	1.008.250.193,00	1.008.250.193,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	997.150.193,00	1.008.250.193,00	1.008.250.193,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	997.150.193,00	1.008.250.193,00	1.008.250.193,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	739.713.311,00	750.813.311,00	750.813.311,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	671.348.177,00	682.448.177,00	682.448.177,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	450.790.855,00	450.790.855,00	450.790.855,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	61.906.032,00	61.906.032,00	61.906.032,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	158.651.290,00	169.751.290,00	169.751.290,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	68.365.134,00	68.365.134,00	68.365.134,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	68.365.134,00	68.365.134,00	68.365.134,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	257.436.882,00	257.436.882,00	257.436.882,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.032.962,00	177.032.962,00	177.032.962,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.334.200,00	16.334.200,00	16.334.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.495.062,00	13.495.062,00	13.495.062,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.803.700,00	144.803.700,00	144.803.700,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.403.920,00	22.403.920,00	22.403.920,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.403.920,00	22.403.920,00	22.403.920,00
4.01.0.00.0.00.01.0002						Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	408.610.000,00	408.610.000,00	408.610.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.335.000,00	121.335.000,00	121.335.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.815.000,00	10.815.000,00	10.815.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	240.075.000,00	240.075.000,00	240.075.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	81.340.520,00	81.340.520,00	81.340.520,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	102.746.480,00	102.746.480,00	102.746.480,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	55.988.000,00	55.988.000,00	55.988.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003						Bagian Hukum Sekretariat Daerah	577.271.500,00	617.271.500,00	617.271.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	395.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	395.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	95.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	85.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	182.271.500,00	182.271.500,00	182.271.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.071.500,00	134.071.500,00	134.071.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.117.500,00	15.117.500,00	15.117.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.134.000,00	15.134.000,00	15.134.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.820.000,00	13.820.000,00	13.820.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004						Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	4.092.366.723,00	4.092.366.723,00	4.092.366.723,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.868.652.000,00	3.868.652.000,00	3.868.652.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.868.652.000,00	3.868.652.000,00	3.868.652.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.625.652.000,00	3.625.652.000,00	3.625.652.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	162.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	223.714.723,00	223.714.723,00	223.714.723,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.604.037,00	79.388.437,00	79.388.437,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.479.037,00	19.011.487,00	19.011.487,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	10.960.000,00	10.960.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.925.000,00	48.216.950,00	48.216.950,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.180.000,00	68.395.600,00	68.395.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.180.000,00	67.395.600,00	67.395.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.930.686,00	29.930.686,00	29.930.686,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.930.686,00	20.930.686,00	20.930.686,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005						Bagian Umum Sekretariat Daerah	31.520.087.356,00	30.794.657.034,00	31.812.407.034,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.010.268.696,00	17.927.193.249,00	17.946.543.249,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.010.268.696,00	17.927.193.249,00	17.946.543.249,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.769.226.000,00	3.982.826.000,00	4.081.226.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000,00	125.000.000,00	175.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	31.600.000,00	50.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.216.226.000,00	2.403.226.000,00	2.403.226.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000.000,00	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	800.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	289.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	510.800.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.916.956.580,00	2.879.956.580,00	2.879.956.580,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	581.098.080,00	586.098.080,00	586.098.080,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.308.858.500,00	2.266.858.500,00	2.266.858.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.060.498.772,00	2.205.498.772,00	2.455.498.772,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.156.687,00	575.156.687,00	575.156.687,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	110.000.000,00	110.000.000,00	160.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900.342.085,00	900.342.085,00	1.100.342.085,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.613.137.308,00	1.689.182.433,00	1.689.182.433,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	727.616.437,00	803.661.562,00	803.661.562,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35.520.871,00	35.520.871,00	35.520.871,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.000.000.000,00	1.960.000.000,00	1.960.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	500.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0006						Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	1.509.424.355,00	1.509.424.355,00	1.509.424.355,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.352.724.200,00	1.352.724.200,00	1.352.724.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	425.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	927.724.200,00	927.724.200,00	927.724.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	902.724.200,00	902.724.200,00	902.724.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.700.155,00	156.700.155,00	156.700.155,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.676.400,00	115.676.400,00	115.676.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.696.400,00	8.696.400,00	8.696.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.023.755,00	26.800.000,00	26.800.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.423.755,00	25.200.000,00	25.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000,00	14.223.755,00	14.223.755,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.000.000,00	11.223.755,00	11.223.755,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007						Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	1.100.759.760,00	1.360.759.760,00	1.375.759.760,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	551.758.000,00	649.998.000,00	649.998.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.574.000,00	85.574.000,00	85.574.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.094.000,00	132.094.000,00	132.094.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.590.000,00	6.590.000,00	6.590.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	427.500.000,00	425.740.000,00	425.740.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.650.000,00	31.410.000,00	31.410.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.000.000,00	29.760.000,00	29.760.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	452.351.760,00	502.351.760,00	517.351.760,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	242.020.000,00	292.020.000,00	307.020.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	135.331.760,00	135.331.760,00	135.331.760,00
4.01.0.00.0.00.01.0008						Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	499.620.768,00	499.620.768,00	499.620.768,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	324.916.086,00	324.916.086,00	324.916.086,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	324.916.086,00	324.916.086,00	324.916.086,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	31.776.001,00	31.776.001,00	31.776.001,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	163.043.748,00	163.043.748,00	163.043.748,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	130.096.337,00	130.096.337,00	130.096.337,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	174.704.682,00	174.704.682,00	174.704.682,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.275.494,00	104.275.494,00	104.275.494,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.275.494,00	10.275.494,00	10.275.494,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.800.487,00	26.800.487,00	26.800.487,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.869.801,00	1.869.801,00	1.869.801,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.930.686,00	24.930.686,00	24.930.686,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.628.701,00	43.628.701,00	43.628.701,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.628.701,00	33.628.701,00	33.628.701,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	538.597.890,00	538.597.890,00	573.597.890,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	283.097.890,00	283.097.890,00	283.097.890,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	283.097.890,00	283.097.890,00	283.097.890,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	172.125.000,00	172.125.000,00	172.125.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	38.700.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	72.272.890,00	72.272.890,00	72.272.890,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	255.500.000,00	255.500.000,00	290.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.500.000,00	164.500.000,00	164.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.000.000,00	51.000.000,00	86.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	85.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	48.955.745.403,00	55.363.111.492,00	52.315.007.491,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	48.955.745.403,00	55.363.111.492,00	52.315.007.491,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.499.490.000,00	4.824.490.000,00	4.689.490.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	385.000.000,00	535.000.000,00	535.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	385.000.000,00	535.000.000,00	535.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.214.490.000,00	3.389.490.000,00	3.240.990.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.477.340.000,00	2.477.340.000,00	2.277.340.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	180.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	362.150.000,00	512.150.000,00	563.650.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	900.000.000,00	900.000.000,00	913.500.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	900.000.000,00	900.000.000,00	913.500.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.456.255.403,00	50.538.621.492,00	47.625.517.491,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.160.907.121,00	3.178.273.211,00	3.181.273.210,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.160.907.121,00	3.178.273.211,00	3.181.273.210,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.000.000,00	355.000.000,00	355.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	755.000.000,00	920.000.000,00	980.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	755.000.000,00	755.000.000,00	755.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	165.000.000,00	125.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	100.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.086.240.000,00	1.336.240.000,00	1.336.240.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.013.240.000,00	1.263.240.000,00	1.263.240.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.288.688,00	916.288.688,00	1.119.938.688,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.288.688,00	666.288.688,00	666.288.688,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	93.650.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	350.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	270.610.000,00	270.610.000,00	241.960.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	270.610.000,00	270.610.000,00	241.960.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	26.082.209.594,00	26.482.209.593,00	26.482.209.593,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.352.939.594,00	25.352.939.593,00	25.352.939.593,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	684.900.000,00	1.084.900.000,00	1.084.900.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	44.370.000,00	44.370.000,00	44.370.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	12.000.000.000,00	17.000.000.000,00	13.848.896.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12.000.000.000,00	17.000.000.000,00	13.848.896.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.644.626.621,00	8.620.380.277,00	8.790.830.277,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.644.626.621,00	8.620.380.277,00	8.790.830.277,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	8.250.626.621,00	8.226.380.277,00	8.396.830.277,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	491.000.000,00	491.000.000,00	641.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	400.000.000,00	410.000.000,00	510.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000,00	330.000.000,00	430.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	35.000.000,00	42.000.000,00	92.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	35.000.000,00	42.000.000,00	92.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	56.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	56.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	810.595.200,00	910.595.200,00	910.595.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	266.095.200,00	341.095.200,00	341.095.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	61.879.700,00	86.879.700,00	86.879.700,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	204.215.500,00	254.215.500,00	254.215.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	197.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	99.000.000,00	124.000.000,00	124.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	347.500.000,00	347.500.000,00	347.500.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	203.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	144.500.000,00	144.500.000,00	144.500.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.949.031.421,00	6.824.785.077,00	6.845.235.077,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.383.280,00	16.383.280,00	16.383.280,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.383.280,00	11.383.280,00	11.383.280,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.770.384.849,00	5.646.138.505,00	5.666.588.505,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.770.384.849,00	5.646.138.505,00	5.666.588.505,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.300.000,00	303.300.000,00	303.300.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	213.000.000,00	213.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	676.880.240,00	656.880.240,00	656.880.240,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.400.000,00	134.400.000,00	134.400.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.280.240,00	521.280.240,00	521.280.240,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.083.052,00	172.083.052,00	172.083.052,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.583.052,00	106.583.052,00	106.583.052,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	394.000.000,00	394.000.000,00	394.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	394.000.000,00	394.000.000,00	394.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	134.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000						Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	55.358.695.004,00	61.411.426.306,00	58.600.603.757,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02				KEUANGAN	55.358.695.004,00	61.411.426.306,00	58.600.603.757,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	968.833.330,00	858.400.960,00	849.400.960,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	359.540.000,00	259.540.000,00	252.540.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	24.615.000,00	24.615.000,00	22.070.800,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24.615.000,00	24.615.000,00	21.169.900,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	21.080.000,00	15.980.000,00	15.980.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	18.680.000,00	18.680.000,00	17.669.300,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	14.000.000,00	9.003.250,00	9.003.250,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	209.200.000,00	109.200.000,00	109.200.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	40.350.000,00	50.446.750,00	50.446.750,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	265.830.480,00	265.830.480,00	265.830.480,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	265.830.480,00	265.830.480,00	265.830.480,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	119.780.480,00	119.780.480,00	117.780.480,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	119.780.480,00	119.780.480,00	117.780.480,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	223.682.370,00	213.250.000,00	213.250.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	223.682.370,00	213.250.000,00	213.250.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	864.423.900,00	914.423.900,00	914.423.900,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	864.423.900,00	914.423.900,00	914.423.900,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	25.558.500,00	25.558.500,00	25.558.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	624.000.000,00	674.000.000,00	674.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	153.992.500,00	153.992.500,00	153.992.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	60.872.900,00	60.872.900,00	60.872.900,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.967.801.331,00	2.052.801.331,00	2.262.801.331,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.967.801.331,00	2.052.801.331,00	2.262.801.331,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	297.022.427,00	297.022.427,00	377.022.427,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	668.171.720,00	703.171.720,00	703.171.720,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.002.607.184,00	1.052.607.184,00	1.182.607.184,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.557.636.443,00	57.585.800.115,00	54.573.977.566,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.287.785.531,00	36.820.411.914,00	36.793.261.914,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.287.785.531,00	36.820.411.914,00	36.793.261.914,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	931.837.807,00	1.286.837.807,00	1.361.837.807,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254.000.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	280.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371.837.807,00	471.837.807,00	546.837.807,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000,00	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.748.013.105,00	16.393.118.024,00	13.333.445.475,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.352.000,00	12.352.000,00	12.352.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.609.766.129,00	15.195.671.048,00	12.135.998.499,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.135.894.976,00	1.185.094.976,00	1.185.094.976,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.000.000,00	435.432.370,00	435.432.370,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000,00	200.432.370,00	200.432.370,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0001						Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	11.171.135.000,00	397.557.466.070,00	404.564.734.070,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	11.171.135.000,00	397.557.466.070,00	404.564.734.070,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.171.135.000,00	397.557.466.070,00	404.564.734.070,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	386.386.331.070,00	393.393.599.070,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.120.000.000,00	2.120.000.000,00	2.120.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	9.051.135.000,00	9.051.135.000,00	9.051.135.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian Daerah	6.548.797.123,00	6.492.551.461,00	6.588.013.127,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	6.548.797.123,00	6.492.551.461,00	6.588.013.127,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.114.200.000,00	1.274.200.000,00	1.372.111.666,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	460.900.000,00	520.900.000,00	618.811.666,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0,00	0,00	0,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	218.900.000,00	278.900.000,00	376.811.666,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	215.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	321.800.000,00	321.800.000,00	321.800.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	0,00	0,00	0,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	236.800.000,00	236.800.000,00	236.800.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	116.500.000,00	116.500.000,00	116.500.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.434.597.123,00	5.218.351.461,00	5.215.901.461,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.533.847.123,00	4.317.601.461,00	4.307.151.461,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.472.047.123,00	4.255.801.461,00	4.253.351.461,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.800.000,00	61.800.000,00	53.800.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.900.000,00	397.900.000,00	397.900.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.400.000,00	267.400.000,00	267.400.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.600.000,00	297.600.000,00	297.600.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.600.000,00	262.600.000,00	262.600.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.250.000,00	107.250.000,00	115.250.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.250.000,00	77.250.000,00	85.250.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat Daerah	9.017.784.143,00	9.274.200.121,00	9.322.100.122,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.017.784.143,00	9.274.200.121,00	9.322.100.122,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	9.017.784.143,00	9.274.200.121,00	9.322.100.122,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	591.062.069,00	626.787.069,00	626.787.069,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	446.062.069,00	471.787.069,00	471.787.069,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	300.000.000,00	287.100.000,00	287.100.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	118.562.069,00	162.187.069,00	162.187.069,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	145.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	220.000.000,00	241.820.000,00	241.820.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	220.000.000,00	241.820.000,00	241.820.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	170.000.000,00	191.820.000,00	191.820.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.206.722.074,00	8.405.593.052,00	8.453.493.053,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.000.000,00	110.795.000,00	110.795.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	41.495.000,00	41.495.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.993.222.074,00	7.154.638.052,00	7.202.538.053,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.993.222.074,00	7.154.638.052,00	7.202.538.053,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	84.250.000,00	84.250.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	84.250.000,00	84.250.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.000.000,00	429.000.000,00	429.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.500.000,00	275.210.000,00	275.210.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000,00	25.700.000,00	25.700.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.000.000,00	248.510.000,00	248.510.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.000.000,00	311.700.000,00	311.700.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.000.000,00	206.700.000,00	206.700.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000						Kecamatan Wonosobo	10.003.683.265,00	9.423.321.438,00	9.327.952.648,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	10.003.683.265,00	9.423.321.438,00	9.327.952.648,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	10.003.683.265,00	9.423.321.438,00	9.327.952.648,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	142.100.000,00	142.100.000,00	142.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.900.000,00	30.900.000,00	30.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	98.700.000,00	98.700.000,00	98.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	98.700.000,00	98.700.000,00	98.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145.165.000,00	145.165.000,00	145.165.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.165.000,00	55.165.000,00	55.165.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.165.000,00	55.165.000,00	55.165.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61.290.000,00	61.290.000,00	61.290.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	61.290.000,00	61.290.000,00	61.290.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	61.290.000,00	61.290.000,00	61.290.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.487.628.265,00	8.907.266.438,00	8.811.897.648,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.175.311.565,00	8.594.949.738,00	8.499.580.948,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.175.311.565,00	8.594.949.738,00	8.499.580.948,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.316.700,00	96.316.700,00	96.316.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.709.900,00	6.709.900,00	6.709.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.606.800,00	10.606.800,00	10.606.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002						Kelurahan Wonosobo Barat	837.405.630,00	837.405.630,00	837.405.630,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	555.800.000,00	555.800.000,00	555.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	480.800.000,00	480.800.000,00	480.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	465.800.000,00	465.800.000,00	465.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.745.630,00	50.745.630,00	50.745.630,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.745.630,00	50.745.630,00	50.745.630,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.745.630,00	50.745.630,00	50.745.630,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	215.860.000,00	215.860.000,00	215.860.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.200.000,00	29.200.000,00	29.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.660.000,00	166.660.000,00	166.660.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	9.471.392,00	9.471.392,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.660.000,00	157.188.608,00	157.188.608,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003						Kelurahan Wonosobo Timur	968.332.000,00	968.332.000,00	968.332.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	785.802.800,00	785.802.800,00	785.802.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	721.972.800,00	721.972.800,00	721.972.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	586.972.800,00	586.972.800,00	586.972.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	63.830.000,00	63.830.000,00	63.830.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	63.830.000,00	63.830.000,00	63.830.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.410.000,00	35.410.000,00	35.410.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.410.000,00	35.410.000,00	35.410.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.410.000,00	35.410.000,00	35.410.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	131.019.200,00	131.019.200,00	131.019.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.919.200,00	8.919.200,00	8.919.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.705.700,00	2.705.700,00	2.705.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	998.500,00	998.500,00	998.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.600.000,00	111.600.000,00	111.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	311.520,00	311.520,00	311.520,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.288.480,00	99.288.480,00	99.288.480,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004						Kelurahan Jlamprang	923.097.267,00	923.097.267,00	923.097.267,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	582.312.400,00	582.312.400,00	582.312.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	495.296.400,00	495.296.400,00	495.296.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	295.296.400,00	295.296.400,00	295.296.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	87.016.000,00	87.016.000,00	87.016.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	87.016.000,00	87.016.000,00	87.016.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.745.630,00	50.745.630,00	50.745.630,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.745.630,00	50.745.630,00	50.745.630,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.745.630,00	50.745.630,00	50.745.630,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.196.348,00	14.196.348,00	14.196.348,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.196.348,00	14.196.348,00	14.196.348,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14.196.348,00	14.196.348,00	14.196.348,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	275.842.889,00	275.842.889,00	275.842.889,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.465.129,00	34.465.129,00	34.465.129,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.640.000,00	20.640.000,00	20.640.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.685.129,00	3.685.129,00	3.685.129,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.500.000,00	75.500.000,00	75.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.377.760,00	118.377.760,00	118.377.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.377.760,00	110.377.760,00	110.377.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005						Kelurahan Kejiwan	1.106.144.235,00	1.106.144.235,00	1.106.144.235,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	807.666.351,00	807.666.351,00	807.666.351,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	642.180.020,00	642.180.020,00	642.180.020,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	332.180.020,00	332.180.020,00	332.180.020,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	165.486.331,00	165.486.331,00	165.486.331,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	165.486.331,00	165.486.331,00	165.486.331,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	54.202.000,00	54.202.000,00	54.202.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54.202.000,00	54.202.000,00	54.202.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	54.202.000,00	54.202.000,00	54.202.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	234.275.884,00	234.275.884,00	234.275.884,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.115.884,00	136.115.884,00	136.115.884,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.346.800,00	13.346.800,00	13.346.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.269.084,00	122.269.084,00	122.269.084,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.160.000,00	59.160.000,00	59.160.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.160.000,00	25.160.000,00	25.160.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006						Kelurahan Sambek	772.515.882,00	772.515.882,00	772.515.882,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	390.459.877,00	390.459.877,00	390.459.877,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	317.049.877,00	317.049.877,00	317.049.877,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	305.049.877,00	305.049.877,00	305.049.877,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	73.410.000,00	73.410.000,00	73.410.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	73.410.000,00	73.410.000,00	73.410.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.132.000,00	45.132.000,00	45.132.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.132.000,00	45.132.000,00	45.132.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.132.000,00	45.132.000,00	45.132.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.090.000,00	24.090.000,00	24.090.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.090.000,00	24.090.000,00	24.090.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24.090.000,00	24.090.000,00	24.090.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	312.834.005,00	312.834.005,00	312.834.005,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.834.005,00	166.834.005,00	166.834.005,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.554.005,00	151.554.005,00	151.554.005,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007						Kelurahan Mlipak	685.800.000,00	685.800.000,00	685.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	419.300.000,00	419.300.000,00	419.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	354.300.000,00	354.300.000,00	354.300.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	344.300.000,00	344.300.000,00	344.300.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	186.500.000,00	186.500.000,00	186.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.100.000,00	135.100.000,00	135.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.600.000,00	121.600.000,00	121.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008						Kelurahan Pagerkukuh	707.269.290,00	707.269.290,00	707.269.290,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	491.820.000,00	492.157.200,00	492.157.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	415.914.415,00	416.251.615,00	416.251.615,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.973.730,00	9.973.730,00	9.973.730,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	405.940.685,00	406.277.885,00	406.277.885,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75.905.585,00	75.905.585,00	75.905.585,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	75.905.585,00	75.905.585,00	75.905.585,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37.890.000,00	37.890.000,00	37.890.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.890.000,00	37.890.000,00	37.890.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	37.890.000,00	37.890.000,00	37.890.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.040.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.040.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	13.040.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	164.519.290,00	164.182.090,00	164.182.090,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.469.520,00	20.469.520,00	20.469.520,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.498.270,00	3.498.270,00	3.498.270,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.268.450,00	2.268.450,00	2.268.450,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.485.800,00	3.485.800,00	3.485.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.947.000,00	8.947.000,00	8.947.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.392.960,00	110.055.760,00	110.055.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.392.960,00	98.555.760,00	98.555.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.656.810,00	22.656.810,00	22.656.810,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.656.810,00	2.656.810,00	2.656.810,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009						Kelurahan Rojoimo	946.057.040,00	946.057.040,00	946.057.040,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	668.800.000,00	668.800.000,00	668.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	613.800.000,00	613.800.000,00	613.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	403.800.000,00	403.800.000,00	403.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	212.257.040,00	212.257.040,00	212.257.040,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.057.040,00	138.557.040,00	138.557.040,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.057.040,00	129.557.040,00	129.557.040,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010						Kelurahan Kramatan	734.806.565,00	734.806.565,00	734.806.565,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	474.250.000,00	474.250.000,00	474.250.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	419.250.000,00	419.250.000,00	419.250.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	409.250.000,00	409.250.000,00	409.250.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	179.556.565,00	179.556.565,00	179.556.565,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.570.000,00	14.570.000,00	14.570.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.986.565,00	104.101.765,00	104.101.765,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.986.565,00	96.101.765,00	96.101.765,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000,00	35.884.800,00	35.884.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	22.884.800,00	22.884.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0011						Kelurahan Tawangsari	631.877.473,00	631.877.473,00	631.877.473,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	378.732.054,00	378.732.054,00	378.732.054,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	328.732.054,00	328.732.054,00	328.732.054,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	268.732.054,00	268.732.054,00	268.732.054,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	56.800.595,00	56.800.595,00	56.800.595,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56.800.595,00	56.800.595,00	56.800.595,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.800.595,00	56.800.595,00	56.800.595,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.108.110,00	34.108.110,00	34.108.110,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.108.110,00	34.108.110,00	34.108.110,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6.108.110,00	6.108.110,00	6.108.110,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	162.236.714,00	162.236.714,00	162.236.714,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.644.000,00	18.930.000,00	18.930.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.544.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.092.714,00	126.806.714,00	126.806.714,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.520.474,00	9.234.474,00	9.234.474,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.872.240,00	116.872.240,00	116.872.240,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012						Kelurahan Jaraksari	1.069.644.453,00	1.069.644.453,00	1.069.644.453,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	743.202.000,00	743.202.000,00	743.202.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	663.202.000,00	663.202.000,00	663.202.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	643.202.000,00	643.202.000,00	643.202.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	198.442.453,00	198.442.453,00	198.442.453,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.868.693,00	32.868.693,00	32.868.693,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.404.693,00	6.404.693,00	6.404.693,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.264.000,00	15.264.000,00	15.264.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.176.000,00	14.176.000,00	14.176.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.176.000,00	14.176.000,00	14.176.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.897.760,00	123.897.760,00	123.897.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.897.760,00	111.897.760,00	111.897.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013						Kelurahan Bumireso	659.896.660,00	659.896.660,00	659.896.660,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375.292.500,00	375.292.500,00	375.292.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	339.600.000,00	339.600.000,00	339.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	324.600.000,00	324.600.000,00	324.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	35.692.500,00	35.692.500,00	35.692.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	35.692.500,00	35.692.500,00	35.692.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	209.604.160,00	209.604.160,00	209.604.160,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.620.000,00	21.620.000,00	21.620.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.404.160,00	125.404.160,00	125.404.160,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.684.160,00	112.684.160,00	112.684.160,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.080.000,00	49.080.000,00	49.080.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.080.000,00	40.080.000,00	40.080.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014						Kelurahan Kalianget	1.149.177.760,00	1.149.177.760,00	1.149.177.760,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	822.800.000,00	822.800.000,00	822.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	752.800.000,00	752.800.000,00	752.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	437.800.000,00	437.800.000,00	437.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	251.377.760,00	251.377.760,00	251.377.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.461.100,00	32.461.100,00	32.461.100,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.061.100,00	6.061.100,00	6.061.100,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.818.900,00	12.818.900,00	12.818.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.818.900,00	12.818.900,00	12.818.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.097.760,00	184.097.760,00	184.097.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.097.760,00	172.097.760,00	172.097.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000						Kecamatan Kertek	4.532.066.009,00	4.313.458.120,00	4.268.914.277,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	110.200.000,00	110.200.000,00	125.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	67.200.000,00	67.200.000,00	82.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	67.200.000,00	67.200.000,00	82.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	124.750.000,00	124.750.000,00	124.750.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.250.000,00	44.250.000,00	44.250.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.250.000,00	44.250.000,00	44.250.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	80.500.000,00	80.500.000,00	80.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.500.000,00	80.500.000,00	80.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.725.000,00	42.725.000,00	42.725.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.725.000,00	42.725.000,00	42.725.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.725.000,00	42.725.000,00	42.725.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	107.761.000,00	107.761.000,00	92.761.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.761.000,00	107.761.000,00	92.761.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.291.000,00	15.291.000,00	45.291.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	47.470.000,00	47.470.000,00	47.470.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.040.630.009,00	3.822.022.120,00	3.777.478.277,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.783.969.440,00	3.565.361.551,00	3.520.817.708,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.783.969.440,00	3.565.361.551,00	3.520.817.708,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.100.000,00	58.100.000,00	58.100.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.240.000,00	139.240.000,00	139.240.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.040.000,00	117.040.000,00	117.040.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.320.569,00	56.320.569,00	56.320.569,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.820.569,00	17.820.569,00	17.820.569,00
7.01.0.00.0.00.02.0002						Kelurahan Kertek	770.774.224,00	770.774.224,00	845.774.224,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	575.781.350,00	575.584.350,00	650.584.350,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	521.858.350,00	524.258.350,00	599.258.350,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.823.950,00	12.823.950,00	12.823.950,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	484.034.400,00	486.434.400,00	486.434.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	53.923.000,00	51.326.000,00	51.326.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	53.923.000,00	51.326.000,00	51.326.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.524.000,00	41.124.000,00	41.124.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	43.524.000,00	41.124.000,00	41.124.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43.524.000,00	41.124.000,00	41.124.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.150.000,00	23.747.000,00	23.747.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.150.000,00	23.747.000,00	23.747.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	17.150.000,00	23.747.000,00	23.747.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.318.874,00	130.318.874,00	130.318.874,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.368.874,00	51.368.874,00	51.368.874,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.044.275,00	2.044.275,00	2.044.275,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.551.499,00	12.551.499,00	12.551.499,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	960.000,00	960.000,00	960.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.813.100,00	27.813.100,00	27.813.100,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.950.000,00	66.950.000,00	66.950.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	290.000,00	290.000,00	290.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.760.000,00	53.760.000,00	53.760.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003						Kelurahan Wringinanom	591.999.723,00	591.999.723,00	591.999.723,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	347.424.225,00	347.424.225,00	347.424.225,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.287.625,00	12.287.625,00	12.287.625,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.287.625,00	12.287.625,00	12.287.625,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	270.136.600,00	270.136.600,00	270.136.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	270.136.600,00	270.136.600,00	270.136.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.444.000,00	41.444.000,00	41.444.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	41.444.000,00	41.444.000,00	41.444.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41.444.000,00	41.444.000,00	41.444.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.199.500,00	19.199.500,00	19.199.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.199.500,00	19.199.500,00	19.199.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.199.500,00	19.199.500,00	19.199.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	183.931.998,00	183.931.998,00	183.931.998,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.691.998,00	16.691.998,00	16.691.998,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.531.279,00	5.531.279,00	5.531.279,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.776.719,00	1.776.719,00	1.776.719,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.724.000,00	5.724.000,00	5.724.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.740.000,00	117.740.000,00	117.740.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.840.000,00	107.840.000,00	107.840.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000						Kecamatan Selomerto	4.066.109.275,00	3.616.071.369,00	3.498.331.610,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.995.350,00	34.995.350,00	34.995.350,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.950.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.950.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.045.350,00	10.045.350,00	10.045.350,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.045.350,00	10.045.350,00	10.045.350,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	123.627.140,00	123.627.140,00	123.627.140,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.416.100,00	40.416.100,00	40.416.100,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.416.100,00	40.416.100,00	40.416.100,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	83.211.040,00	83.211.040,00	83.211.040,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	83.211.040,00	83.211.040,00	83.211.040,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.005.669,00	36.005.669,00	36.005.669,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.005.669,00	36.005.669,00	36.005.669,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.005.669,00	36.005.669,00	36.005.669,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	97.242.890,00	97.242.890,00	115.137.890,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	97.242.890,00	97.242.890,00	115.137.890,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	97.242.890,00	97.242.890,00	115.137.890,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.943.700,00	55.943.700,00	38.048.700,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.943.700,00	55.943.700,00	38.048.700,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.893.700,00	30.893.700,00	38.048.700,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.718.294.526,00	3.268.256.620,00	3.150.516.861,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.483.400.576,00	3.033.362.670,00	2.915.622.911,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.483.400.576,00	3.033.362.670,00	2.915.622.911,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.803.950,00	36.803.950,00	36.803.950,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.937.950,00	6.937.950,00	6.937.950,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.296.000,00	10.296.000,00	10.296.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.070.000,00	10.070.000,00	10.070.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.890.000,00	130.890.000,00	130.890.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.300.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.090.000,00	107.090.000,00	107.090.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002						Kelurahan Selomerto	713.196.746,00	763.196.746,00	763.196.746,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	462.493.610,00	464.893.610,00	464.893.610,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	432.493.610,00	434.893.610,00	434.893.610,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	337.493.610,00	339.893.610,00	339.893.610,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	218.703.136,00	216.303.136,00	216.303.136,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.550.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.403.136,00	189.003.136,00	189.003.136,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.303.136,00	177.703.136,00	177.703.136,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003						Kelurahan Wonorejo	585.257.435,00	585.257.435,00	585.257.435,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	325.414.761,00	325.414.761,00	325.414.761,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	263.239.296,00	263.239.296,00	263.239.296,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.678.000,00	9.678.000,00	9.678.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	253.561.296,00	253.561.296,00	253.561.296,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	62.175.465,00	62.175.465,00	62.175.465,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	62.175.465,00	62.175.465,00	62.175.465,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.944.000,00	22.944.000,00	22.944.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.944.000,00	22.944.000,00	22.944.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.944.000,00	22.944.000,00	22.944.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.650.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.650.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	22.650.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	214.248.674,00	214.248.674,00	214.248.674,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.520.290,00	26.520.290,00	26.520.290,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.020.290,00	5.020.290,00	5.020.290,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	29.880.000,00	29.880.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.787.072,00	149.907.072,00	149.907.072,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.387.072,00	140.507.072,00	140.507.072,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.941.312,00	7.941.312,00	7.941.312,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.941.312,00	2.941.312,00	2.941.312,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000						Kecamatan Leksono	3.111.978.353,00	2.932.742.303,00	2.945.492.303,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	79.250.000,00	79.250.000,00	79.250.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	79.250.000,00	79.250.000,00	79.250.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	79.250.000,00	79.250.000,00	79.250.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	118.750.000,00	118.750.000,00	118.750.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	118.750.000,00	118.750.000,00	118.750.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	118.750.000,00	118.750.000,00	118.750.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.611.978.353,00	2.432.742.303,00	2.445.492.303,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.394.478.353,00	2.215.242.303,00	2.227.992.303,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.394.478.353,00	2.215.242.303,00	2.227.992.303,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.280.000,00	74.280.000,00	74.280.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.080.000,00	41.080.000,00	41.080.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.220.000,00	108.220.000,00	108.220.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.220.000,00	90.220.000,00	90.220.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002						Kelurahan Leksono	835.750.000,00	835.750.000,00	835.750.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	704.450.000,00	704.450.000,00	704.450.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	644.450.000,00	644.450.000,00	644.450.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	429.450.000,00	429.450.000,00	429.450.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.300.000,00	101.300.000,00	101.300.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.200.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.700.000,00	37.700.000,00	37.700.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000						Kecamatan Watumalang	3.178.069.814,00	2.992.098.337,00	3.003.648.338,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	123.500.000,00	134.500.000,00	134.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.500.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.500.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	61.000.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	61.000.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	89.500.000,00	84.500.000,00	84.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	72.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	72.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000,00	64.000.000,00	33.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	64.000.000,00	33.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	64.000.000,00	33.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	108.000.000,00	108.000.000,00	139.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	108.000.000,00	108.000.000,00	139.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	108.000.000,00	108.000.000,00	139.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	108.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	108.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	40.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.718.569.814,00	2.532.598.337,00	2.544.148.338,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.477.569.814,00	2.291.598.337,00	2.303.148.338,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.477.569.814,00	2.291.598.337,00	2.303.148.338,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.500.000,00	62.250.000,00	61.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	31.355.000,00	30.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	3.950.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	13.610.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000,00	10.135.000,00	9.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.500.000,00	106.500.000,00	105.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	17.000.000,00	16.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.000.000,00	89.000.000,00	89.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.000.000,00	71.250.000,00	73.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	62.250.000,00	64.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002						Kelurahan Wonoroto	521.163.445,00	521.163.445,00	521.163.445,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	381.003.445,00	381.003.445,00	381.003.445,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	319.243.445,00	319.243.445,00	319.243.445,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	307.243.445,00	307.243.445,00	307.243.445,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	61.760.000,00	61.760.000,00	61.760.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	61.760.000,00	61.760.000,00	61.760.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.160.000,00	104.160.000,00	104.160.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.960.000,00	83.960.000,00	83.960.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.040.000,00	76.040.000,00	76.040.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000						Kecamatan Mojotengah	4.434.859.326,00	4.308.154.937,00	4.282.879.988,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.812.519,00	38.522.519,00	38.522.519,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.996.270,00	30.996.270,00	30.996.270,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27.996.270,00	27.996.270,00	27.996.270,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.816.249,00	4.726.249,00	4.726.249,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.816.249,00	4.726.249,00	4.726.249,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	126.300.000,00	127.500.000,00	127.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.300.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.300.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.072.081,00	32.072.081,00	32.072.081,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.072.081,00	32.072.081,00	32.072.081,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.072.081,00	32.072.081,00	32.072.081,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.932.663,00	105.956.294,00	105.956.294,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	66.932.663,00	105.956.294,00	105.956.294,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	66.932.663,00	105.956.294,00	105.956.294,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	83.906.987,00	44.883.356,00	44.883.356,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.906.987,00	44.883.356,00	44.883.356,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23.143.660,00	23.143.660,00	23.143.660,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	39.023.631,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21.739.696,00	21.739.696,00	21.739.696,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.083.835.076,00	3.959.220.687,00	3.933.945.738,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.764.610.476,00	3.637.906.087,00	3.612.631.138,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.764.610.476,00	3.637.906.087,00	3.612.631.138,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.724.600,00	75.724.600,00	75.724.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.704.600,00	12.704.600,00	12.704.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00	30.970.000,00	30.970.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	30.970.000,00	30.970.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.500.000,00	137.620.000,00	137.620.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.000.000,00	111.120.000,00	111.120.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002						Kelurahan Kalibeber	761.327.419,00	761.327.419,00	761.327.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	503.567.419,00	500.457.419,00	500.457.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	438.567.419,00	435.457.419,00	435.457.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	423.567.419,00	420.457.419,00	420.457.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	192.760.000,00	195.870.000,00	195.870.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.900.000,00	32.530.000,00	32.530.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.700.000,00	150.680.000,00	150.680.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.500.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.200.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.160.000,00	12.660.000,00	12.660.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003						Kelurahan Mudal	1.239.940.854,00	1.239.940.854,00	1.089.940.854,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.061.330.854,00	1.061.330.854,00	911.330.854,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	996.102.200,00	996.102.200,00	846.102.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	575.000.000,00	575.000.000,00	425.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	409.102.200,00	409.102.200,00	409.102.200,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	65.228.654,00	65.228.654,00	65.228.654,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	65.228.654,00	65.228.654,00	65.228.654,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.720.000,00	24.720.000,00	24.720.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.720.000,00	24.720.000,00	24.720.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.720.000,00	24.720.000,00	24.720.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	141.390.000,00	141.390.000,00	141.390.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.730.000,00	18.730.000,00	18.730.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.850.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.160.000,00	109.160.000,00	109.160.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.720.000,00	101.720.000,00	101.720.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004						Kelurahan Andongsili	593.667.687,00	593.667.687,00	593.667.687,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	406.544.800,00	406.544.800,00	406.544.800,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	334.544.800,00	334.544.800,00	334.544.800,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	324.544.800,00	324.544.800,00	324.544.800,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	147.122.887,00	147.122.887,00	147.122.887,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.350.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.230.000,00	8.230.000,00	8.230.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	770.000,00	770.000,00	770.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.680.000,00	105.680.000,00	105.680.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.440.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.740.000,00	89.740.000,00	89.740.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.092.887,00	13.092.887,00	13.092.887,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.092.887,00	3.092.887,00	3.092.887,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000						Kecamatan Garung	3.388.549.163,00	3.367.228.188,00	3.381.778.189,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	57.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	30.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.989.549.163,00	2.971.228.188,00	2.985.778.189,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.738.049.163,00	2.716.728.188,00	2.731.278.189,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.738.049.163,00	2.716.728.188,00	2.731.278.189,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.500.000,00	105.500.000,00	105.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002						Kelurahan Garung	703.911.680,00	703.911.680,00	703.911.680,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	447.022.080,00	447.022.080,00	447.022.080,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407.122.080,00	407.122.080,00	407.122.080,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	392.122.080,00	392.122.080,00	392.122.080,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	39.900.000,00	39.900.000,00	39.900.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	39.900.000,00	39.900.000,00	39.900.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	193.389.600,00	193.389.600,00	193.389.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.320.000,00	47.320.000,00	47.320.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.069.600,00	110.069.600,00	110.069.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.329.600,00	103.329.600,00	103.329.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.08.0000						Kecamatan Kejajar	4.389.862.163,00	4.302.630.030,00	4.315.080.030,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.301.971,00	12.301.971,00	12.301.971,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.301.971,00	12.301.971,00	12.301.971,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.301.971,00	12.301.971,00	12.301.971,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.000.000,00	107.500.000,00	107.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000,00	107.500.000,00	107.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	12.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	93.007.859,00	75.507.859,00	75.507.859,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	93.007.859,00	75.507.859,00	75.507.859,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.000.000,00	22.473.000,00	22.473.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.507.859,00	31.051.859,00	31.051.859,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	30.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	3.483.000,00	3.483.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.035.552.333,00	3.948.320.200,00	3.960.770.200,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.659.886.333,00	3.572.654.200,00	3.585.104.200,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.659.886.333,00	3.572.654.200,00	3.585.104.200,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.710.000,00	45.710.000,00	45.710.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.456.000,00	144.456.000,00	144.456.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.056.000,00	19.056.000,00	19.056.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.200.000,00	125.200.000,00	125.200.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.500.000,00	117.500.000,00	117.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0002						Kelurahan kejajar	609.076.426,00	609.076.426,00	609.076.426,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	492.916.426,00	492.916.426,00	492.916.426,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	304.139.549,00	304.139.549,00	304.139.549,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294.139.549,00	294.139.549,00	294.139.549,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	188.776.877,00	188.776.877,00	188.776.877,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	188.776.877,00	188.776.877,00	188.776.877,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82.160.000,00	82.160.000,00	82.160.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.820.000,00	18.820.000,00	18.820.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.894.000,00	4.894.000,00	4.894.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.106.000,00	3.106.000,00	3.106.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.340.000,00	30.340.000,00	30.340.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.580.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.760.000,00	21.760.000,00	21.760.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000						Kecamatan Kalikajar	3.259.041.851,00	2.991.099.594,00	2.958.743.549,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.560.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.560.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	58.040.000,00	58.040.000,00	58.040.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	58.040.000,00	58.040.000,00	58.040.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	170.000.000,00	176.500.000,00	176.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.000.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70.000.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.000.000,00	99.500.000,00	99.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.000.000,00	99.500.000,00	99.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80.000.000,00	99.500.000,00	99.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	106.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	106.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	55.550.000,00	55.550.000,00	55.550.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	36.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8.825.000,00	8.825.000,00	8.825.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.759.041.851,00	2.501.099.594,00	2.468.743.549,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.508.561.851,00	2.240.619.594,00	2.208.263.549,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.508.561.851,00	2.240.619.594,00	2.208.263.549,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.320.000,00	116.320.000,00	116.320.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.820.000,00	89.820.000,00	89.820.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.160.000,00	72.160.000,00	72.160.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.700.000,00	40.700.000,00	40.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002						Kelurahan Kalikajar	755.076.366,00	755.076.366,00	755.076.366,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	418.132.913,00	405.972.913,00	405.972.913,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	418.132.913,00	405.972.913,00	405.972.913,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	411.132.913,00	398.972.913,00	398.972.913,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.069.042,00	26.069.042,00	26.069.042,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.069.042,00	26.069.042,00	26.069.042,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.069.042,00	26.069.042,00	26.069.042,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.320.811,00	25.480.811,00	25.480.811,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.320.811,00	25.480.811,00	25.480.811,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	13.320.811,00	25.480.811,00	25.480.811,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	297.553.600,00	297.553.600,00	297.553.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.753.600,00	81.753.600,00	81.753.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.553.600,00	71.553.600,00	71.553.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.500.000,00	203.500.000,00	203.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	201.000.000,00	201.000.000,00	201.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000						Kecamatan Sapuran	3.628.794.376,00	3.481.854.940,00	3.490.104.940,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	78.400.000,00	78.400.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	65.000.000,00	43.400.000,00	43.400.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	65.000.000,00	43.400.000,00	43.400.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	301.000.000,00	301.000.000,00	301.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	62.440.500,00	62.440.500,00	62.440.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	62.440.500,00	62.440.500,00	62.440.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	62.440.500,00	62.440.500,00	62.440.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.000.000,00	151.600.000,00	151.600.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000,00	151.600.000,00	151.600.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.000.000,00	151.600.000,00	151.600.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	86.559.500,00	56.559.500,00	56.559.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86.559.500,00	56.559.500,00	56.559.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	35.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.559.500,00	11.559.500,00	11.559.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.978.794.376,00	2.831.854.940,00	2.840.104.940,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.747.853.876,00	2.600.914.440,00	2.609.164.440,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.747.853.876,00	2.600.914.440,00	2.609.164.440,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.685.100,00	60.685.100,00	60.685.100,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.595.100,00	16.595.100,00	16.595.100,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.150.000,00	30.150.000,00	30.150.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.180.000,00	113.180.000,00	113.180.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.980.000,00	93.980.000,00	93.980.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.075.400,00	57.075.400,00	57.075.400,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.075.400,00	7.075.400,00	7.075.400,00
7.01.0.00.0.00.10.0002						Kelurahan Sapuran	692.800.000,00	692.800.000,00	692.800.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	555.635.172,00	555.635.172,00	555.635.172,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	460.395.030,00	460.395.030,00	460.395.030,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	453.395.030,00	453.395.030,00	453.395.030,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	95.240.142,00	95.240.142,00	95.240.142,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	95.240.142,00	95.240.142,00	95.240.142,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.414.828,00	78.414.828,00	78.414.828,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.729.828,00	12.729.828,00	12.729.828,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.612.000,00	6.612.000,00	6.612.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.607.828,00	1.607.828,00	1.607.828,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.040.000,00	38.040.000,00	38.040.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.540.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.645.000,00	7.645.000,00	7.645.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000						Kecamatan Kepil	3.587.579.669,00	3.454.207.598,00	3.438.327.616,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	116.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	116.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	116.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	142.000.000,00	140.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	142.000.000,00	140.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	36.000.000,00	34.000.000,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.968.579.669,00	2.837.207.598,00	2.871.327.616,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.784.238.071,00	2.650.866.000,00	2.634.986.018,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.784.238.071,00	2.650.866.000,00	2.634.986.018,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.941.598,00	72.941.598,00	72.941.598,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.581.598,00	21.581.598,00	21.581.598,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.960.000,00	50.960.000,00	50.960.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.400.000,00	75.400.000,00	75.400.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002						Kelurahan Kepil	878.000.000,00	878.000.000,00	1.055.660.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	686.626.000,00	686.626.000,00	864.286.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	649.626.000,00	649.626.000,00	827.286.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	609.626.000,00	609.626.000,00	787.286.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.504.000,00	21.504.000,00	21.504.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.504.000,00	21.504.000,00	21.504.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.504.000,00	21.504.000,00	21.504.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	159.870.000,00	159.870.000,00	159.870.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.430.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	690.000,00	690.000,00	690.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	990.000,00	990.000,00	990.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00	900.000,00	900.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.520.000,00	148.520.000,00	148.520.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.920.000,00	10.920.000,00	10.920.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.600.000,00	137.600.000,00	137.600.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	900.000,00	900.000,00	900.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	890.000,00	890.000,00	890.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000						Kecamatan kaliwiro	3.015.562.797,00	3.026.661.052,00	3.039.111.052,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	127.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	62.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	62.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	122.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	122.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	50.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.557.062.797,00	2.588.161.052,00	2.600.611.052,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.261.198.636,00	2.272.296.891,00	2.284.746.891,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.261.198.636,00	2.272.296.891,00	2.284.746.891,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.933.785,00	48.933.785,00	48.933.785,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.533.785,00	17.533.785,00	17.533.785,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.930.376,00	156.930.376,00	156.930.376,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.340.000,00	23.340.000,00	23.340.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.590.376,00	131.590.376,00	131.590.376,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002						Kelurahan Kaliwiro	793.442.090,00	793.442.090,00	843.442.090,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	567.061.590,00	567.061.590,00	617.061.590,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	537.038.590,00	537.038.590,00	587.038.590,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.927.390,00	10.927.390,00	10.927.390,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	326.111.200,00	326.111.200,00	376.111.200,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	30.023.000,00	30.023.000,00	30.023.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30.023.000,00	30.023.000,00	30.023.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.064.800,00	26.064.800,00	26.064.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.064.800,00	26.064.800,00	26.064.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.064.800,00	26.064.800,00	26.064.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.365.700,00	32.365.700,00	32.365.700,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.365.700,00	32.365.700,00	32.365.700,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	32.365.700,00	32.365.700,00	32.365.700,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	167.950.000,00	167.950.000,00	167.950.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.360.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.450.000,00	122.450.000,00	122.450.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.720.000,00	9.720.000,00	9.720.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.730.000,00	112.730.000,00	112.730.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000						Kecamatan Wadaslintang	3.330.591.303,00	3.189.358.752,00	3.203.608.753,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.500.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	94.000.000,00	94.000.000,00	79.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	94.000.000,00	94.000.000,00	79.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	42.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.820.091.303,00	2.678.858.752,00	2.708.108.753,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.467.011.304,00	2.325.778.753,00	2.340.028.754,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.467.011.304,00	2.325.778.753,00	2.340.028.754,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.868.773,00	50.868.773,00	53.168.773,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.268.773,00	30.268.773,00	32.568.773,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.711.226,00	131.711.226,00	106.711.226,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.711.226,00	21.711.226,00	21.711.226,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.000.000,00	110.000.000,00	85.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.500.000,00	160.500.000,00	198.200.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.000.000,00	44.000.000,00	65.700.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.000.000,00	111.000.000,00	127.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002						Kelurahan Wadaslintang	900.800.000,00	900.800.000,00	950.800.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	710.513.000,00	710.513.000,00	760.513.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	642.513.000,00	642.513.000,00	692.513.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	432.513.000,00	432.513.000,00	482.513.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.287.000,00	134.287.000,00	134.287.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.643.000,00	107.643.000,00	107.643.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.487.000,00	9.487.000,00	9.487.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.856.000,00	97.856.000,00	97.856.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.644.000,00	3.644.000,00	3.644.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.144.000,00	3.144.000,00	3.144.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.14.0000						Kecamatan Sukoharjo	2.474.767.648,00	2.368.706.007,00	2.379.656.007,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	70.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.059.767.648,00	1.953.706.007,00	1.964.656.007,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.891.267.648,00	1.785.206.007,00	1.796.156.007,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.891.267.648,00	1.785.206.007,00	1.796.156.007,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.500.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.000.000,00	65.500.000,00	65.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000						Kecamatan Kalibawang	2.113.330.637,00	2.045.797.187,00	2.053.597.188,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	122.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.688.330.637,00	1.620.797.187,00	1.628.597.188,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.488.123.201,00	1.420.589.751,00	1.428.389.752,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.488.123.201,00	1.420.589.751,00	1.428.389.752,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.200.000,00	83.200.000,00	83.200.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.507.436,00	55.507.436,00	55.507.436,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.211.276,00	34.211.276,00	34.211.276,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.796.160,00	16.796.160,00	16.796.160,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.810.431.471,00	40.767.964.772,00	41.064.014.772,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	39.810.431.471,00	40.767.964.772,00	41.064.014.772,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	39.810.431.471,00	40.767.964.772,00	41.064.014.772,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.149.590.000,00	1.799.590.000,00	2.024.590.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.149.590.000,00	1.799.590.000,00	2.024.590.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.149.590.000,00	1.799.590.000,00	2.024.590.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	31.820.497.800,00	31.899.443.800,00	32.699.443.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	31.820.497.800,00	31.899.443.800,00	32.699.443.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	31.820.497.800,00	31.899.443.800,00	32.699.443.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.100.000.000,00	2.250.000.000,00	1.370.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.100.000.000,00	2.250.000.000,00	1.370.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.100.000.000,00	2.250.000.000,00	1.370.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	325.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	325.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250.000.000,00	275.000.000,00	175.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.204.000.700,00	1.424.000.700,00	1.569.000.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.204.000.700,00	1.424.000.700,00	1.569.000.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	575.000.000,00	625.000.000,00	670.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	429.000.700,00	549.000.700,00	549.000.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.211.342.971,00	3.044.930.272,00	3.150.980.272,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.663.842.971,00	2.497.430.272,00	2.503.480.272,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.610.022.971,00	2.443.610.272,00	2.449.660.272,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.820.000,00	53.820.000,00	53.820.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.500.000,00	113.500.000,00	113.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.000.000,00	276.000.000,00	276.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
						TOTAL	**1.704.659.045.235,00**	**2.195.953.637.116,00**	**2.215.562.514.390,00**

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 Tahun 2024
TANGGAL : 23 September 2024

KABUPATEN WONOSOBO

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		TOTAL
	I	II	III	IV	V	FUNGSIONAL	STAF	
1.	2.					4.	3.	5. (2+3+4)
Golongan X (PPPK)						17		17
Golongan VII (PPPK)						173		173
Golongan V (PPPK)						30		30
Golongan IX (PPPK)						1806		1,806
						2026		2026
Golongan IV/e						2		2
Golongan IV/d		1						1
Golongan IV/c		17	1			18		36
Golongan IV/b		10	39	2		405		456
Golongan IV/a			68	22		616	1	707
JUMLAH GOLONGAN IV		28	108	24		1,041	1	1,202
Golongan III / d			27	123		698	17	865
Golongan III / c			2	51		1092	28	1,173
Golongan III / b				47		536	101	684
Golongan III / a				21		435	352	808
JUMLAH GOLONGAN III			29	242		2,761	498	3,530
Golongan II / d						142	150	292
Golongan II / c						143	170	313
Golongan II / b						10	53	63
Golongan II / a							81	81
JUMLAH GOLONGAN II						295	454	749
Golongan I / d							85	85
Golongan I / c							22	22
Golongan I / b							1	1
Golongan I / a								-
JUMLAH GOLONGAN I						-	108	108
T O T A L	-	28	137	266	-	6,123	1,061	7,615

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH / KURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	62,430,000,000.00	65,448,626,748.00	3,018,626,748.00	104.84
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	11,793,625,000.00	11,205,591,108.00	(588,033,892.00)	95.01
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24,320,779,534.00	23,040,333,270.00	(1,280,446,264.00)	94.74
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175,781,248,307.00	167,364,324,799.91	(8,416,923,507.09)	95.21
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	274,325,652,841.00	267,058,875,925.91	(7,266,776,915.09)	97.35
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,592,029,805,236.00	1,595,001,993,401.00	2,972,188,165.00	100.19
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	161,836,305,776.00	146,042,171,394.00	(15,794,134,382.00)	90.24
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1,753,866,111,012.00	1,741,044,164,795.00	(12,821,946,217.00)	99.27
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**				
4.3.01	Pendapatan Hibah	50,544,912,420.00	49,177,364,845.00	(1,367,547,575.00)	97.29
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	
4.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	50,544,912,420.00	49,177,364,845.00	(1,367,547,575.00)	97.29
	JUMLAH PENDAPATAN	2,078,736,676,273.00	2,057,280,405,565.91	(21,456,270,707.09)	98.97
5	**BELANJA**				

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH / KURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1	**BELANJA OPERASI**				
5.1.01	Belanja Pegawai	870,672,836,879.00	813,687,908,377.00	(56,984,928,502.00)	93.46
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462,160,694,544.00	437,524,507,656.00	(24,636,186,888.00)	94.67
5.1.04	Belanja Subsidi	842,880,000.00	638,215,332.00	(204,664,668.00)	
5.1.05	Belanja Hibah	138,351,699,760.00	136,542,227,583.00	(1,809,472,177.00)	98.69
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12,283,200,000.00	12,130,400,000.00	(152,800,000.00)	98.76
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1,484,311,311,183.00	1,400,523,258,948.00	(83,788,052,235.00)	94.36
5.2	**BELANJA MODAL**				
5.2.01	Belanja Tanah	6,900,000,000.00	-	(6,900,000,000.00)	0.00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	76,212,556,484.00	71,513,835,592.00	(4,698,720,892.00)	93.83
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	77,744,157,300.00	75,966,224,399.00	(1,777,932,901.00)	97.71
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	179,415,331,115.00	173,441,211,700.00	(5,974,119,415.00)	96.67
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	9,085,812,015.00	8,956,129,217.00	(129,682,798.00)	98.57
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	25,000,000.00	24,697,500.00	(302,500.00)	98.79
	JUMLAH BELANJA BELANJA MODAL	**349,382,856,914.00**	**329,902,098,408.00**	**(19,480,758,506.00)**	**94.42**
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**				
5.3.01	Belanja Tak Terduga	5,500,000,000.00	4,741,409,823.00	(758,590,177.00)	86.21
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**5,500,000,000.00**	**4,741,409,823.00**	**(758,590,177.00)**	**86.21**
	JUMLAH BELANJA	**1,839,194,168,097.00**	**1,735,166,767,179.00**	**(104,027,400,918.00)**	**94.34**
5.4	**TRANSFER**				
5.4.01	BELANJA TRANSFER / BAGI HASIL				
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5,523,000,000.00	5,523,000,000.00	0.00	
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1,117,362,500.00	1,117,362,500.00	0.00	
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Desa	**6,640,362,500.00**	**6,640,362,500.00**	**0.00**	**100.00**
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	364,178,746,070.00	364,178,746,070.00	0.00	100.00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	364,178,746,070.00	364,178,746,070.00	0.00	100.00
	Jumlah Transfer / Bantuan Keuangan	**364,178,746,070.00**	**364,178,746,070.00**	**0.00**	**100.00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH / KURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	Jumlah Transfer	**370,819,108,570.00**	**370,819,108,570.00**	**0.00**	**100.00**
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**2,210,013,276,667.00**	**2,105,985,875,749.00**	**(104,027,400,918.00)**	**95.29**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(131,276,600,394.00)**	**(48,705,470,183.09)**	**(125,483,671,625.09)**	**37.10**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	138,294,495,194.00	138,291,994,868.00	(2,500,326.00)	100.00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	17,982,105,200.00	30,000,000,000.00	12,017,894,800.00	0.00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0.00	0.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	0.00	10,100,000.00	10,100,000.00	#DIV/0!
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**156,276,600,394.00**	**168,302,094,868.00**	**12,025,494,474.00**	**#DIV/0!**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
6.2.01	Pembentukan Dana Cadaangan	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	0.00	
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,000,000,000.00	6,570,912,000.00	(3,429,088,000.00)	**65.71**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**25,000,000,000.00**	**21,570,912,000.00**	**(3,429,088,000.00)**	**86.28**
	PEMBIAYAAN NETTO	131,276,600,394.00	146,731,182,868.00	15,454,582,474.00	**111.77**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	98,025,712,684.91	98,025,712,684.91	

2. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REF	2023 (dalam rupiah)	2022 (dalam rupiah)
ASET	C.1.		
ASET LANCAR	C.1.a.		
Kas			
Kas di Kas Daerah	C.1.a.1).	83,309,803,483.00	93,480,222,258.00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.a.2).	110,807,216.00	26,771,800.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.a.3).	43,113,566.00	42,209,500.00
Kas di BLUD	C.1.a.4).	10,150,848,398.91	43,186,557,273.00
Kas Lainnya	C.1.a.5).		
Kas Dana BOS		1,014,029,022.00	1,563,855,898.00
Kas Lainnya		3,736,643,019.00	139,540,674.00
Piutang	C.1.a.6).		
Piutang Pajak Daerah	C.1.a.7).a)	11,359,268,270.00	11,065,075,966.00
Piutang Retribusi Daerah	C.1.a.7).b)	4,025,674,302.00	3,710,633,457.00
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	C.1.a.7).c)	24,450,709,706.00	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	C.1.a.7).d)	3,954,114,450.40	2,174,696,926.64
Piutang Transfer Lainnya dari Pusat -	C.1.a.7).e)	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah	C.1.a.7).f).	3,174,734,387.00	1,674,983,776.00
Piutang Lainnya	C.1.a.7).	6,081,900,594.00	6,092,000,594.00
Penyisihan Piutang Pendapatan	C.1.a.8).	(16,455,170,868.84)	(15,633,100,118.90)
Beban Dibayar Dimuka	C.1.a.9).	166,353,469.67	176,609,655.00
Persediaan	C.1.a.10).	33,614,700,012.97	34,593,855,749.33
Jumlah Aset Lancar		**168,737,529,028.11**	**182,293,913,408.07**
INVESTASI JANGKA PANJANG	C.1.b.		
Investasi Jangka Panjang Non	C.1.b.1).		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**-**	**-**
Investasi Jangka Panjang Permanen	C.1.b.2).		
Penyertaan Modal Pemerintah		300,533,317,974.08	286,254,007,791.86
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**300,533,317,974.08**	**286,254,007,791.86**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**300,533,317,974.08**	**286,254,007,791.86**
ASET TETAP	C.1.c.		
Tanah	C.1.c.1).	777,161,335,964.06	799,803,003,493.06
Peralatan dan Mesin	C.1.c.2).	763,121,291,355.61	705,699,976,394.35
Gedung dan Bangunan	C.1.c.3).	1,265,821,194,286.17	1,194,281,441,926.78
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.1.c.4).	2,899,895,910,200.59	2,687,792,161,464.97
Aset Tetap Lainnya	C.1.c.5).	126,942,634,058.18	118,246,704,459.18
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.c.6).	4,728,161,487.00	3,769,113,704.00
Akumulasi Penyusutan	C.1.c.7).	(2,601,052,863,747.23)	(2,329,949,175,038.97)
Jumlah Aset Tetap		**3,236,617,663,604.37**	**3,179,643,226,403.37**
PROPERTI INVESTASI	C.1.d.		
Properti Investasi - Tanah	C.1.d.1).	62,959,530,699.00	
Properti Investasi - Peralatan dan Mesi			
Properti Investasi - Gedung dan Bangu	C.1.d.2).	14,577,359,861.00	
Properti Investasi - Jalan, Irigasi, dan J			
Properti Investasi - Aset Tetap Lainnya			
Akumulasi Penyusutan Properti Investa	C.1.d.3).	(5,004,686,770.00)	
Jumlah Properti Investasi		**72,532,203,790.00**	**-**
DANA CADANGAN	C.1.d.		
Dana Cadangan		-	15,048,122,525.00
Jumlah Dana Cadangan		**-**	**15,048,122,525.00**
ASET LAINNYA	C.1.e.		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	C.1.e.1).	30,039,159.00	36,041,159.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	C.1.e.2).	185,861,241,481.00	172,490,676,739.00
Aset Tidak Berwujud	C.1.e.3).	9,155,067,109.00	8,423,571,449.00
Amortisasi	C.1.e.4).	(5,210,636,461.00)	(4,645,116,123.00)
Aset Lain-lain	C.1.e.5).	65,780,164,904.66	90,905,321,271.75
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	C.1.e.6).	(46,243,876,166.71)	(64,713,564,615.43)
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	C.1.e.7).	-	
Treasury Deposit Facility Trnsfer ke	C.1.e.8).	2,958,287,000.00	4,542,637,488.00
Jumlah Aset Lainnya		**212,330,287,025.95**	**207,039,567,368.32**
JUMLAH ASET		**3,990,751,001,422.51**	**3,870,278,837,496.62**
KEWAJIBAN	C.2.		

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.a.		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	C.2.a.1).	301,119,529.00	8,762,123.00
Utang Bunga			
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.a.2).	2,292,947,719.90	3,074,809,724.00
Utang Belanja	C.2.a.3).	17,051,137,881.00	25,967,498,992.20
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.a.4).	-	80,902,999.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**19,645,205,129.90**	**29,131,973,838.20**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**-**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN		**19,645,205,129.90**	**29,131,973,838.20**
EKUITAS			
EKUITAS	C.3.	3,971,105,796,292.61	3,841,146,863,658.42
JUMLAH EKUITAS		**3,971,105,796,292.61**	**3,841,146,863,658.42**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**3,990,751,001,422.51**	**3,870,278,837,496.62**

2. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Untuk Tahun Yang berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	E.2.a.		
Arus Masuk Kas	E.2.a.1)		
Penerimaan Pajak Daerah		65,448,626,748.00	59,953,607,231.00
Penerimaan Retribusi Daerah		11,205,591,108.00	9,447,416,172.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		23,040,333,270.00	21,988,351,496.00
Penerimaan Lain - Lain PAD yang Sah		166,361,920,051.91	173,390,622,923.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil pajak		36,777,428,277.00	39,228,649,450.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2,159,463,211.00	4,459,088,779.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		832,084,548,325.00	790,688,710,540.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		463,806,105,588.00	340,511,021,925.00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Insentif Daerah		13,020,711,000.00	3,506,837,000.00
Penerimaan Dana Desa		247,153,737,000.00	221,885,021,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		123,940,726,171.00	121,815,108,966.00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi		22,101,445,223.00	91,211,531,410.00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Penerimaan Hibah		49,177,364,845.00	42,940,464,079.00
Penerimaan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**2,056,278,000,817.91**	**1,921,026,430,971.00**
Arus Keluar Kas	E.2.a.2)		
Pembayaran Pegawai		813,687,908,377.00	749,466,368,775.00
Pembayaran Barang		437,524,507,656.00	462,017,483,572.00
Pembayaran Subsidi		638,215,332.00	227,138,667.00
Pembayaran Hibah		136,542,227,583.00	81,490,740,096.00
Pembayaran Bantuan Sosial		12,130,400,000.00	14,325,579,640.00
Pembayaran Bantuan keuangan		364,178,746,070.00	329,470,030,070.00
Pembayaran Tidak Terduga		4,741,409,823.00	3,893,057,940.00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		5,523,000,000.00	5,584,985,972.00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1,117,362,500.00	1,200,650,869.00
Jumlah Arus Keluar Kas		**1,776,083,777,341.00**	**1,647,676,035,601.00**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		**280,194,223,476.91**	**273,350,395,370.00**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	E.2.b.		
Arus Masuk Kas	E.2.b.1)		
Pencairan Dana Cadangan		30,000,000,000.00	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		76,102,524.00	2,770,000.00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	132,794,198.00
Penjualan Aset Lainnya		926,302,224.00	27,098,000.00
Jumlah Arus masuk Kas		**31,002,404,748.00**	**162,662,198.00**
Arus Keluar Kas	E.2.b.2)		
Pembentukan Dana Cadangan		15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
Perolehan Tanah		-	12,055,630,009.00
Perolehan peralatan dan Mesin		71,513,835,592.00	63,569,225,606.00
Perolehan Gedung dan bangunan		75,966,224,399.00	73,333,124,660.00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		173,441,211,700.00	210,308,031,946.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		8,956,129,217.00	3,359,685,536.00
Perolehan Aset Lainnya		24,697,500.00	811,517,100.00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		6,570,912,000.00	8,877,120,000.00
Jumlah Arus Keluar Kas		**351,473,010,408.00**	**387,314,334,857.00**
ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		**(320,470,605,660.00)**	**(387,151,672,659.00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	E.2.c.		
Arus Masuk Kas	E.2.c.1)		
Penerimaan Kembali Dana Bergulir		10,100,000.00	22,000,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas		**10,100,000.00**	**22,000,000.00**
Arus Keluar Kas	E.2.c.2)		
Jumlah Arus Keluar Kas		**-**	**-**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		**10,100,000.00**	**22,000,000.00**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	E.2.d.		
Arus Masuk Kas	E.2.d.1)		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		117,391,512,088.41	123,686,687,388.00
Kiriman Uang Masuk		38,392,491.00	137,649,122.00
Penerimaan Koreksi		2,528,360.00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**117,432,432,939.41**	**123,824,336,510.00**
Arus Keluar Kas	E.2.d.2)		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		117,099,154,682.41	123,874,543,291.00
Kiriman Uang Keluar		138,408,446.00	21,931,528.00
Pengeluaran Koreksi		2,500,326.00	27,756,460.00
Jumlah Arus Keluar Kas		**117,240,063,454.41**	**123,924,231,279.00**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		**192,369,485.00**	**(99,894,769.00)**

URAIAN	REF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kenaikan / Penurunan Kas	E.2.	(40,073,912,698.09)	(113,879,172,058.00)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD,BOS, Peduli Covid	E.1.	**138,439,157,403.00**	**252,318,329,461.00**
Kas di Kas Daerah		93,480,222,258.00	145,060,766,550.00
Kas di Bendahara Penerimaan		26,771,800.00	14,053,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran		42,209,500.00	62,929,699.00
Kas di BLUD		43,186,557,273.00	104,423,299,418.00
Kas Lainnya		1,703,396,572.00	2,757,280,794.00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD , BOS	E.3.	**98,365,244,704.91**	**138,439,157,403.00**
Kas di Kas Daerah	E.3.a.	83,309,803,483.00	93,480,222,258.00
Kas di Bendahara Penerimaan	E.3.b.	110,807,216.00	26,771,800.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	E.3.c.	43,113,566.00	42,209,500.00
Kas di BLUD	E.3.d.	10,150,848,398.91	43,186,557,273.00
Kas Lainnya	E.3.e.	3,736,643,019.00	-
Saldo Akhir Kas		**98,365,244,704.91**	**138,439,157,403.00**

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 18 ayat (2) Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan juga peran serta masyarakat. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang sudah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan.

Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Laporan Dana Desa.

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 ini adalah sebagai gambaran dan penjelasan posisi keuangan serta target pencapaian realisasi anggaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dengan tujuan:

1. menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya; dan
2. menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber

daya yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana halnya dengan proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo TA 2023 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63):
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
43. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 17);
44. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 407);
45. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 3);
46. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 30);

47. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 94);
48. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 34);
49. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 tahun 2023 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 71);
50. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 72).

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN
- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- B. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
- A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
C. Neraca
D. Laporan Operasional
E. Laporan Arus Kas
F. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

1. Kerangka Ekonomi Makro

a. Perkembangan Nilai PDRB

Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro di tingkat nasional adalah pendapatan nasional, yang dalam lingkup regional disebut produk regional. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1 Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Harga Berlaku Nilai (Miliar Rupiah)	Harga Konstan Nilai (Miliar Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2019	18.807,66	13.793,04
2.	2020	18.838,68	13.566,18
3.	2021	19.856,86	14.064,76
4.	2022	21.587,23	14.770,50
5.	2023	23.329,92	15.405,98

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Tabel II.1 tersebut menunjukkan PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan, akan tetapi PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga konstan sempat mengalami penurunan di tahun 2020.

Tabel II.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2019	5,57
2.	2020	(1,64)
3.	2021	3,68
4.	2022	5,02
5.	2023	4,30

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Menurut Pengeluaran 2019-2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Tabel II.2 tersebut menunjukkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu lima tahun (2019-2023) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten menurun secara signifikan menjadi (1,64%), sementara di tahun 2023 juga mengalami penurunan dari tahun 2022.

b. Peran Masing-masing Sektor Dalam PDRB

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku selama tiga tahun fluktuatif. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2023 menurun. PDRB juga dapat dilihat dari sisi lapangan usaha yaitu penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya, untuk Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku

   Penunjang utama PDRB ADHB Kabupaten Wonosobo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sedangkan yang terkecil adalah dari sektor pengadaan listrik dan gas. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam dengan penjelasan sebagai berikut:

   a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2023 sebesar Rp6.709.700.000.000,00, pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan;
   b) Pertambangan dan Penggalian tahun 2023 sebesar Rp231.540.000.000,00, pada tahun 2019 sampai 2023 terus mengalami kenaikan;
   c) Industri Pengolahan tahun 2023 sebesar Rp4.230.720.000.000,00, pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan;
   d) Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2023 sebesar Rp7.320.000.000,00, pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan;
   e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tahun 2023 sebesar Rp22.760.000.000,00, pada tahun 2019 sampai 2023 selalu mengalami kenaikan;
   f) Konstruksi tahun 2023 sebesar Rp1.650.470.000.000,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sampai 2023;
   g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2023 sebesar Rp3.885.520.000.000,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sampai 2023;
   h) Transportasi dan Pergudangan tahun 2023 sebesar Rp1.480,540.000.000,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sampai 2023;
   i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2023 sebesar Rp768.070.000.000,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sampai 2023;

j) Informasi dan Komunikasi tahun 2023 sebesar Rp361.440.000.000,00, mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2023;
k) Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2023 sebesar Rp743.260.000.000,00, mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2023;
l) Real Estate tahun 2023 sebesar Rp335.880.000.000,00, pada tahun 2019 sampai 2023 cenderung selalu mengalami kenaikan;
m) Jasa Perusahaan tahun 2023 sebesar Rp62.440.000.000,00, pada tahun 2021 sampai 2023 selalu mengalami kenaikan;
n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2023 sebesar Rp506.620.000.000,00, jika diperhatikan tahun 2021 mengalami penurunan, akan tetapi mengalami kenaikan kembali di tahun 2022 sampai 2023;
o) Jasa Pendidikan tahun 2023 sebesar Rp1.430.370.000.000,00, pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan;
p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2023 sebesar Rp353.790.000.000,00, pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan;
q) Jasa Lainnya tahun 2023 sebesar Rp549.480.000.000,00, pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan;

2) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan

Penunjang utama PDRB ADHK Kabupaten Wonosobo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, sedangkan yang terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam Lampiran II.2 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2023 sebesar Rp4.325.170.000.000,00, pada tahun 2020 sampai 2023 mengalami kenaikan;
b) Pertambangan dan Penggalian tahun 2023 sebesar Rp145.010.000.000,00, selama tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan;
c) Industri Pengolahan tahun 2023 sebesar Rp2.613.560.000.000,00, pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan;
d) Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2023 sebesar Rp6.040.000.000,00, mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2023;
e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tahun 2023 sebesar Rp18.080.000.000,00, mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2023;
f) Konstruksi tahun 2023 sebesar Rp1.035.270.000.000,00, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sampai 2023;

g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2023 sebesar Rp2.779.890.000.000,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sampai 2023;
h) Transportasi dan Pergudangan tahun 2023 sebesar Rp1.022.830.000.000,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sampai 2023;
i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2023 sebesar Rp551.950.000.000,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sampai 2023;
j) Informasi dan Komunikasi tahun 2023 sebesar Rp369.130.000.000,00, jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan;
k) Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2023 sebesar Rp429.510.000.000,00, jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan;
l) Real Estate tahun 2023 sebesar Rp265.790.000.000,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sampai 2023;
m) Jasa Perusahaan tahun 2023 sebesar Rp39.700.000.000,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sampai 2023;
n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2023 sebesar Rp332.200.000.000,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan, dan sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021, kemudian kembali mengalami kenaikan di tahun 2022 sampai 2023;
o) Jasa Pendidikan tahun 2023 sebesar Rp840.260.000.000,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sampai 2023;
p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2023 sebesar Rp230.110.000.000,00, jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan;
q) Jasa Lainnya tahun 2023 sebesar Rp401.470.000.000,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sampai 2023;

c. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2022

laju inflasi di Kabupaten Wonosobo relatif terkendali dengan angka rata-rata 1-3%. Pada tahun 2022, Kabupaten Wonosobo mengalami inflasi sesbesar 6,81% yang mana nilai inflasi ini lebih tinggi jika dibandingkan inflasi di Jawa Tengah sebesar 5,63% dan inflasi nasional sebesar 5,51%. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 s/d 2022

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2018	2,98
2.	2019	2,28
3.	2020	1,90
4.	2021	2,18
5.	2022	6,81

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

d. PDRB Per Kapita

Tolok ukur lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro di tingkat dalam lingkup regional adalah produk regional bruto per kapita. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2023 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dengan rincian disajikan dalam tabel II.4 berikut ini.

Tabel II.4 Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Wonosobo (Tahun 2019-2023)

No	Tahun	Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Harga Konstan (Miliar Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2019	27.099,08	19.840,99
2.	2020	28.716,98	20.577,95
3.	2021	27.412,49	19.353,93
4.	2022	28.489,52	19.675,03
5.	2023	31.151,63	20.662,60

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo Menurut Pengeluaran 2019-2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

e. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Indikator tingkat pengangguran terbuka baik dalam satuan unit (orang) maupun persen yang berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru dan untuk melihat banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,95% yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar hampir 5 orang yang menganggur. Angka ini sedikit mengalami penurunan jika dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 5,01%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo tahun 2021 sampai dengan 2023 untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.5 berikut ini.

Tabel II.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2023

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2021	5,26
2.	2022	5,01
3.	2023	4,95

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kabupaten Wonosobo selama tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.6 berikut ini.

Tabel II.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2019	68,27
2.	2020	69,04
3.	2021	69,24
4.	2022	69,69
5.	2023	70,18

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

g. Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) adalah indikator atau alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai ukuran indeks gini berada pada rentang antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai indeks gini, maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi. Hal tersebut menggambarkan bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar dibandingkan dengan yang diterima kelompok penduduk miskin. Idealnya, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Sehingga pada prinsipnya semakin kecil nilai indeks gini semakin menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Berdasarkan Data BPS mencatat Indeks Gini Kabupaten Wonosobo pada rentang Tahun 2021 – 2023 mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam rentang selama periode 3 tahun tersebut terjadi penurunan ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk

Tabel II.7 Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2023

No	Tahun	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)
1.	2021	0,384
2.	2022	0,363
3.	2023	0,355

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

h. Angka Kemiskinan

Pengukuran angka kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung fluktuatif dengan rincian disajikan dalam tabel II.8 berikut ini.

Tabel II.8 Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2019	340.827	131.35	16.63
2.	2020	362.683	137.64	17.36
3.	2021	373.474	139.67	17,67
4.	2022	399.180	128.11	16.17
5.	2023	425.105	123.70	15.58

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Kemiskinan juga dapat dilihat menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.9 berikut ini.

Tabel II.9 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2019	2,44	0,46
2.	2020	2,43	0,47
3.	2021	2,75	0,65
4.	2022	3,18	0,86
5.	2023	2,60	0,63

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Pembangunan di tahun 2023 merupakan implementasi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 dengan tema "Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan". Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi tersebut diperlukan sinergi dan harmonisasi antara berbagai pihak yang terkait melalui implementasi program dan kegiatan prioritas.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan tahun 2023 kebijakan perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur baik dalam hal transportasi, air bersih, air baku maupun air untuk pertanian, peningkatan perekonomian daerah yang meliputi keuangan daerah, stabilitas ekonomi, dan pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM yang meliputi kualitas kesehatan, kualitas pendidikan dan ketrampilan, serta budi pekerti, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketentraman ketertiban masyarakat yang meliputi penguatan sistem pendataan menuju satu data, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan kinerja dan akuntabilitas aparatur sipil negara, serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Proyeksi Asumsi Dasar dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi antara 3,5% - 4,5 %
2) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp23.980.000
3) Inflasi pada angka 3,0±1%
4) Kemiskinan turun menjadi 15,62 – 14,75%
5) Tingkat Pengangguran Terbuka 3 – 4%
6) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,72

b. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Daerah

Berdasarkan Tabel II.1 di atas perekonomian Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Nilai tambah yang dihasilkan dari PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.742.690.000.000,00, sedangkan jika dilihat dari PDRB atas dasar harga

konstan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp635.480.000.000,00 dibanding tahun 2022.

Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB tahun 2023 sebesar 4,03% mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 14,34% pada tahun 2022. Laju pertumbuhan PDRB yang kembali positif dikarenakan banyak kegiatan sektor ekonomi masyarakat maupun pemerintahan yang mulai beroperasi setelah pandemi covid-19 tahun 2020. Apabila melihat dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2023 semua sektor mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, demikian pula berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2023 semua sektor mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan pertumbuhan PDRB tahun 2022 tersebut diatas menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Wonosobo mengalami pemulihan setelah adanya pandemi *covid-19*.

B. Kebijakan Keuangan

1. Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum Anggaran menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023, arah kebijakan yang ditempuh tetap berpedoman pada ketentuan perUndang-Undangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan pendanaan di masa mendatang.

RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2021-2026 dengan visi "Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera" dengan misi:

a. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
b. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
c. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius/berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;

d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;
e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kesinambungan dan pelestarian fungsi dan keberadaanya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah baik pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pemanfaatan kekayaan daaerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah disesuaikan dengan informasi rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah.
b. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023.

2. Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah

Berkaitan dengan pendapatan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah Tahun 2023 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    1) Pajak Daerah
    2) Retribusi Daerah
    3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    4) Lain-lain PAD yang sah
b. Pendapatan Transfer
    1) Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:
        a) Dana Perimbangan
        b) Dana Insentif Daerah
        c) Dana Desa
    2) Transfer Antar Daerah
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    1) Hibah

Adapun kebijakan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo antara lain:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang potensial.
b. Meningkatkan tata kelola pemungutan dan penerimaan pajak daerah melalui Pengembangan sistem pemungutan dan administrasi pendapatan daerah, pemutakhiran/updating Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi dan pendapatan daerah serta retribusi berbasis *online*.

c. Melakukan peninjauan kembali (reviu) terhadap seluruh pemanfaatan aset daerah serta pemberdayaan dan pendayagunaan aset serta standarisasi kerjasama pemanfaatan aset daerah yang diarahkan pada peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan.
d. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
e. Peningkatan Pendapatan Melalui Reformasi dan Regulasi Pendapatan Daerah.
f. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer Daerah.
g. Peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan, promosi potensi investasi, peningkatan akses dan kualitas infrastruktur.
h. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan.

3. Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Struktur belanja daerah sampai dengan tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk tahun 2022, struktur belanja daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026. Struktur belanja daerah tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

a. Belanja Operasi
   1) Belanja Pegawai
   2) Belanja Barang dan Jasa
   3) Belanja Subsidi
   4) Belanja Hibah
   5) Belanja Bantuan Sosial
b. Belanja Modal
c. Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer
   1) Belanja Bagi Hasil
   2) Belanja Bantuan Keuangan

Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan berdasarkan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dengan upaya sebagai berikut:

a. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2021-2026.
b. Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan sektor unggulan yang difokuskan pada pembangunan pertanian pariwisata dan industri pengolahan.

c. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
d. Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah dan pemerataan wilayah di wilayah prioritas.
e. Dukungan Implementasi kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) di 25 desa lokus melalui program multiple intervensi dalam rangka mengurangi beban pengeluaran (jaminan sosial dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar) meningkatkan pendapatan dan pemenuhan dokumen administrasi kependudukan.
f. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi pendidikan dan 10% fungsi kesehatan.
g. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
h. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam.

4. Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Sedangkan pengalokasian pembentukan dana cadangan Tahun 2023 mempertimbangkan pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024.

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Estimasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp2.078.736.676.273,00 dari anggaran semula Rp2.013.604.156.768,00 mengalami kenaikan sebesar Rp65.132.519.505,00.

Estimasi Pendapatan Daerah TA 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel II.10 berikut ini.

Tabel II.10 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pendapatan Asli Daerah	243.395.028.265,00	12,09	274.325.652.841,00	13,20	30.930.624.576,00	12,71
2.	Pendapatan Transfer	1.727.465.775.000,00	85,79	1.753.866.111.012,00	84,37	26.400.336.012,00	1,53
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	42.743.353.503,00	2,12	50.544.912.420,00	2,43	7.801.558.917,00	18,25
	JUMLAH	**2.013.604.156.768,00**	**100,00**	**2.078.736.676.273,00**	**100,00**	**65.132.519.505,00**	**3,23**

Perbandingan Estimasi Pendapatan TA 2023 dengan TA 2022 untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan dalam tabel II.11 berikut ini.

Tabel II.11 Estimasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Pendapatan Asli Daerah	274.325.652.841,00	13,20	236.196.772.997,00	12,39	38.128.879.844,00	16,14
2.	Pendapatan Transfer	1.753.866.111.012,00	84,37	1.626.592.536.625,00	85,33	127.273.574.387,00	7,82
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	50.544.912.420,00	2,43	43.503.600.000,00	2,28	7.041.312.420,00	16,19
	JUMLAH	**2.078.736.676.273,00**	**100,00**	**1.906.292.909.622,00**	**100,00**	**172.443.766.651,00**	**9,05**

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel II.10 di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan TA 2023 diestimasikan mengalami kenaikan dari Rp243.395.028.265,00 menjadi Rp274.325.652.841,00 atau naik sekitar 16,14% dari APBD penetapan TA 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel II.12 berikut ini.

Tabel II.12 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pajak Daerah	55.230.000.000,00	22,69	62.430.000.000,00	22,76	7.200.000.000,00	3,23
2.	Retribusi Daerah	11.173.625.000,00	4.59	11.793.625.000,00	4,30	620.000.000,00	5,55
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.320.779.534,00	9,99	24.320.779.534,00	8.86	-	-
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	152.670.623731,00	62,73	175.781.248.307,00	64,08	23.110.624.576,00	15,14
	JUMLAH	**243.395.028.265,00**	**100,00**	**274.325.652.841,00**	**100,00**	**30.930.624.576,00**	**12,71**

Tabel II.12 tersebut menunjukkan yaitu Pajak Daerah mengalami perubahan 3,23% atau meningkat sebesar Rp30.930.624.576,00, Retribusi Daerah mengalami perubahan 5,55% atau meningkat sebesar Rp620.000.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami perubahan 15,14% atau meningkat sebesar Rp23.110.624.576,00.

Tabel II.12 di atas menunjukkan bahwa Estimasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 setelah perubahan, apabila dibandingkan dengan estimasi TA 2022 setelah perubahan mengalami kenaikan dan penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.13 berikut ini.

Tabel II.13 Estimasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Pajak Daerah	62.430.000.000,00	22,76	50.050.000.000,00	21,19	12.380.000.000,00	24,74
2.	Retribusi Daerah	11.793.625.000,00	4.30	10.695.978.480,00	4,53	1.097.646.520,00	10,26
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.320.779.534,00	8,86	21.910.340.683,00	9,28	2.410.438.851,00	11,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	175.781.248.307,00	64,08	153.540.453.834,00	65,01	22.240.794.473,00	14,49
	JUMLAH	**274.325.652.841,00**	**100,00**	**236.196.772.997,00**	**100,00**	**38.128.879.844,00**	**16,14**

b. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Tabel II.10 di atas Pendapatan Transfer diestimasikan mengalami kenaikan secara keseluruhan 1,52% atau sebesar Rp26.400.336.012,00, dengan rincian disajikan dalam tabel II.14 berikut ini.

Tabel II.14 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Transfer Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.575.482.595.000,00	91,20	1.592.029.805.236,00	90,77	16.547.210.236,00	1,05
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.983.180.000,00	8,80	161.836.305.776,00	9,23	9.853.125.776,00	6,48
	JUMLAH	**1.727.465.775.000,00**	**100,00**	**1.753.866.111.012,00**	**100,00**	**26.400.336.012,00**	**1,53**

Tabel II.10 di atas menunjukkan estimasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 setelah perubahan dibandingkan dengan TA 2022 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.15 berikut ini.

Tabel II.15 Estimasi Pendapatan Transfer Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.592.029.805.236,00**	**90,77**	**1.406.115.017.679,00**	**86,45**	**185.914.787.557,00**	**13,22**
	Dana Perimbangan	1.331.855.357.236,00	75,94	1.180.723.159.679,00	72,59	151.132.197.557,00	12,80
	Dana Insentif Daerah	13.020.711000,00	0.74	3.506.837.000,00	0,22	9.513.874.000,00	271,30
	Dana Desa	247.153.737.000,00	14,09	221.885.021.000,00	13,64	25.268.716.000,00	11,39
2.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**161.836.305.776,00**	**9,23**	**220.447.518.946,00**	**13.55**	**(58.641.213.170,00)**	**(26,59)**
	Pendapatan Bagi Hasil	139.571.305.776,00	7,96	125.967.517.946,00	7,74	13.603.787.830,00	10,80
.	Bantuan Keuangan	22.265.000.000,00	1,27	94.510.001.000,00	5,81	(72.245.001.000,00)	(76,44)
	JUMLAH	**1.753.866.111.012,00**	**100,00**	**1.626.592.536.625,00**	**100,00**	**127.273.574.387,00**	**216,48**

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel II.10 menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan diestimasikan mengalami kenaikan sebesar Rp7.801.558.917,00 atau 18,25%. kenaikan ini terjadi pada Pendapatan Hibah. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.16 berikut ini.

Tabel II.16 Estimasi Perubahan Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pendapatan Hibah	42.743.353.503,00	100,00	50.544.912.420,00	100,00	7.801.558.917,00	18,25
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan PerUndang-Undangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**42.743.353.503,00**	**100,00**	**50.544.912.420,00**	**100,00**	**7.801.558.917,00**	**18,25**

Jika dilihat Tabel II.16 di atas menunjukkan estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 setelah perubahan dibandingkan dengan TA 2022 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.17 berikut ini

Tabel II.17 Estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Pendapatan Hibah	50.544.912.420,00	100,00	43.503.600.000,00	100,00	7.041.312.420,00	16,19
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan PerUndang-Undangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	50.544.912.420,00	100,00	43.503.600.000,00	100,00	7.041.312.420,00	16,19

2. Indikator Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Wonosobo TA 2023 diproyeksikan akan mengalami kenaikan. Belanja daerah pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.210.013.276.667,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp131.622.396.797,00 atau 6,33% dari APBD Penetapan tahun 2023 yaitu Rp2.078.390.879.870,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.18 berikut ini.

Tabel II.18 Proyeksi Perubahan Target Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
	Belanja	1.384.932.856.739,00	66,64	1.484.311.311.183,00	67,16	99.378.454.444,00	7,18
1	Operasi						
	Belanja	321.789.578.561,00	15,48	349.382.856.914,00	15,81	27.593.278.353,00	8,57
2	Modal						
	Belanja	5.500.000.000,00	0,26	5.500.000.000,00	0,25	-	-
	Tidak						
3	Terduga						
	Belanja	366.168.444.570,00	17,62	370.819.108.570,00	16,78	4.650.664.000,00	1,27
4	Transfer						

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
	JUMLAH	**2.078.390.879.870,00**	**100,00**	**2.210.013.276.667,00**	**100,00**	**131.622.396.797,00**	**6,33**

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Wonosobo setelah perubahan APBD TA 2023 jika dibandingkan dengan TA 2022 cenderung mengalami peningkatan dengan rincian disajikan dalam tabel II.19 berikut ini.

Tabel II.19 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Operasi	1.484.311.311.183,00	67,16	1.392.208.029.530,00	65,40	92.103.281.653,00	6,62
2.	Belanja Modal	349.382.856.914,00	15,81	394.902.985.664,00	18,55	(45.520.128.750,00)	(11,53)
3.	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	0,25	5.500.000.000,00	0,26	-	-
4.	Belanja Transfer	370.819.108.570,00	16,78	336.255.666.911,00	15,79	34.563.441.659,00	10,28
	JUMLAH	**2.210.013.276.667,00**	**100,00**	**2.128.866.682.105,00**	**100,00**	**81.146.594.562,00**	**3,81**

a. Belanja Operasi

Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa Belanja Operasi diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp99.378.454.444,00 atau 7,18%. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.20 berikut ini.

Tabel II.20 Proyeksi Perubahan Target Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Belanja Pegawai	845.355.321.724,00	61,04	870.672.836.879,00	58,66	25.317.515.155,00	2,99
2.	Belanja Barang dan Jasa	419.824.690.175,00	30,31	462.160.694.544,00	31,14	42.336.004.369,00	10,08
3.	Belanja Subsidi	542.740.000,00	0,04	842.880.000,00	0,06	300.140.000,00	55,30
4.	Belanja Hibah	107.855.504.840,00	7,79	138.351.699.760,00	9,32	30.496.194.920,00	28,28
5.	Belanja Bantuan Sosial	11.354.600.000,00	0,82	12.283.200.000,00	0,83	928.600.000,00	8,18
	JUMLAH	**1.384.932.856.739,00**	**100,00**	**1.484.311.311.183,00**	**100,00**	**99.378.454.444,00**	**7,18**

Tabel II.19 di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Operasi pada APBD setelah perubahan TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 cenderung mengalami peningkatan dengan rincian disajikan dalam tabel II.21 berikut ini.

Tabel II.21 Proyeksi Belanja Operasi Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Pegawai	870.672.836.879,00	58,66	799.466.416.191,00	57,42	71.206.420.688,00	8,91
2.	Belanja Barang dan Jasa	462.160.694.544,00	31,14	493.387.637.339,00	35,44	(31.226.942.795,00)	(6,33)
3.	Belanja Subsidi	842.880.000,00	0,06	800.000.000,00	0,06	42.880.000,00	5,36
4.	Belanja Hibah	138.351.699.760,00	9,32	82.701.915.000,00	5,94	55.649.784.760,00	67,29
5.	Belanja Bantuan Sosial	12.283.200.000,00	0,83	15.852.061.000,00	1,14	(3.568.861.000,00)	(22,51)
	JUMLAH	**1.484.311.311.183,00**	**100,00**	**1.392.208.029.530,00**	**100,00**	**92.103.281.653,00**	**6,62**

b. Belanja Modal

Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 8,57% dari Rp321.789.578.561,00 menjadi Rp349.382.856.914,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.22 berikut ini.

Tabel II.22 Proyeksi Perubahan Target Belanja Modal Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Belanja Tanah	-	-	6.900.000.000,00	1,97	6.900.000.000,00	-
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	56.137.600.874,00	17,45	76.212.556.484,00	21,81	20.074.955.610,00	35,76
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	70.993.529.063,00	22,06	77.744.157.300,00	22,25	6.750.628.237,00	9,51
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	188.724.676.111,00	58,65	179.415.331.115,00	51,35	(9.309.344.996,00)	(4,93)
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.933.772.513,00	1,84	9.085.812.015,00	2,60	3.152.039.502,00	53,12
6.	Belanja Aset Lainnya	-	-	25.000.000,00	0,007	25.000.000,00	-
	JUMLAH	**321.789.578.561,00**	**100,00**	**349.382.856.914,00**	**100,00**	**27.593.278.353,00**	**8,57**

Tabel II.19 di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Modal setelah perubahan APBD TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.23 berikut ini.

Tabel II.23 Proyeksi Belanja Modal Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Tanah	6.900.000.000,00	1,98	16.566.480.000,00	4,20	(9.666.480.000,00)	(58,35)
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	76.212.556.484,00	21,82	68.647.206.207,00	17,38	7.565.350.277,00	11,02
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	77.744.157.300,00	22,25	90.864.805.943,00	23,01	(13.120.648.643,00)	(14,44)
4.	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	179.415.331.115,00	51,36	214.584.787.070,00	54,34	(35.169.455.955,00)	(16,39)
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.085.812.015,00	2,60	4.239.706.444,00	1,07	4.846.105.571,00	114,30
6.	Belanja Aset Lainnya	25.000.000,00	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**349.382.856.914,00**	**100,00**	**394.902.985.664,00**	**100,00**	**(45.545.128.750,00)**	**(11,53)**

c. Belanja Tidak Terduga

Tabel II.19 di atas menunjukkan bahwa Belanja Tidak Terduga diproyeksikan tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan melainkan stabil dari Rp5.500.000.000,00 menjadi Rp5.500.000.000,00.

d. Belanja Transfer

Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa Belanja Transfer diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 1,27% dari Rp366.168.444.570,00 menjadi Rp370.819.108.570,00 Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.24 berikut ini.

Tabel II.24 Proyeksi Perubahan Target Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Belanja Bagi Hasil	6.640.362.500.,00	1,81	6.640.362.500,00	1,79	-	-
2.	Belanja Bantuan Keuangan	359.528.082.070,00	98,19	364.178.746.070,00	98,21	4.650.664.000,00	1,29
	JUMLAH	**366.168.444.570,00**	**100,00**	**370.819.108.570,00**	**100,00**	**4.650.664.000,00**	**1,27**

Tabel II.19 di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Transfer setelah perubahan APBD TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.25 berikut ini.

Tabel II.25 Proyeksi Belanja Tranfer Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Bagi Hasil	6.640.362.500,00	1,79	6.785.636.841,00	2,02	(145.274.341,00)	(2,14)
2	Belanja Bantuan Keuangan	364.178.746.070,00	98,21	329.470.030.070,00	97,98	34.708.716.000,00	10,53
	JUMLAH	**370.819.108.570,00**	**100,00**	**336.255.666.911,00**	**100,00**	**34.563.441.659,00**	**10,28**

3. Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto Kabupaten Wonosobo TA 2023 diestimasikan akan mengalami kenaikan sehingga dilakukan perubahan sebesar Rp82.329.877.292,00 atau 137,26% yang sebelumnya sebesar Rp98.946.723.102,00 menjadi Rp181.276.600.394,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.26 berikut ini.

Tabel II.26 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)*100
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	81.866.723.102,00	156.276.600.394,00	74.409.877.292,00	90,89
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.080.000.000,00	25.000.000.000,00	7.920.000.000,00	46,37
	Pembiayaan Netto (1-2)	**64.786.723.102,00**	**131.276.600.394,00**	**66.489.877.292,00**	**102,63**

Rencana Pembiayaan Netto pada APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo TA 2023 jika dibandingkan dengan TA 2022 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.27 berikut ini.

Tabel II.27 Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(3)-(5)	(7)=(6)/(5)*100
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	156.276.600.394,00	252.073.772.483,00	(95.797.172.089,00)	(38,00)
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.000.000.000,00	29.500.000.000,00	(4.500.000.000,00)	(15,25)
	Pembiayaan Netto	**131.276.600.394,00**	**222.573.772.483,00**	**(91.297.172.089,00)**	**(41,02)**

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tabel II.28 menunjukkan bahwa estimasi rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 meningkat sebesar Rp74.409.877.292,00 atau 90,89%. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.28 berikut ini.

Tabel II.28 Estimasi Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(3)-(5)	(7)=(6)/(5)*100
1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	81.866.723.102,00	138.294.495.194,00	56.427.772.092,00	68,93
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	17.982.105.200,00	17.982.105.200,00	-
	JUMLAH	**81.866,723.102,00**	**156.276.600.394,00**	**74.409.877.292,00**	**90,89**

Tabel II.28 di atas menunjukkan estimasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 jika dibandingkan dengan TA 2022 cenderung mengalami peningkatan dengan rincian disajikan dalam tabel II.29 berikut ini.

Tabel II.29 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2022 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	138.294.495.194,00	88,49	252.073.772.483,00	100,00	(113.779.277.289,00)	(45,14)
2.	Pencairan Dana Cadangan	17.982.105.200,00	11,51	-	-	17.982.105.200,00	-
	JUMLAH	**156.276.600.394,00**	**100,00**	**252.073.772.483,00**	**100,00**	**(95.797.172.089,00)**	**(38,00)**

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tabel II.28 di atas menunjukkan bahwa estimasi Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp25.000.000.000,00, meningkat sebesar Rp7.920.000.000,00 atau 46,37% dibandingkan pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.30 berikut ini.

Tabel II.30 Estimasi Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	58,55	15.000.000.000,00	60,00	5.000.000.000,00	50,00
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.080.000.000,00	41,45	10.000.000.000,00	40,00	2.920.000.000,00	41,24
	JUMLAH	**17.080.000.000,00**	**100,00**	**25.000.000.000,00**	**100,00**	**7.920.000.000,00**	**46,37**

4. Belanja yang Diamanatkan (*Mandatory Spending*) Peraturan Perundang-undangan

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada lampiran huruf E.Hal khusus lainnya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka

meningkatkan pelayanan bidang pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Pada tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan rasio 31,76% untuk pelayanan bidang pendidikan pada APBD perubahan TA 2023 dan terealisasi 31,37% dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel II.31 Anggaran Belanja Yang Diamanatkan (*Mandatory Spending*) Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rupiah) Anggaran	Realisasi
A.	**1. Belanja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga**	**701.842.137.322,00**	**660.576.498.851,00**
	a. Urusan Pendidikan	**678.777.107.322,00**	**638.228.894.332,00**
	1) Belanja Operasi	622.051.210.870,00	582.255.245.253,00
	2) Belanja Modal	56.725.896.452,00	55.973.649.079,00
	b. Urusan Bidang kebudayaan	**8.224.000.000,00**	**7.722.442.780,00**
	1) Belanja Operasi	8.244.000.000,00	7.722.442.780
	2) Belanja Modal	-	-
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	**1.890.480.000,00**	**1.856.957.955,00**
	1) Belanja Operasi	941.687.900,00	939.482.408,00
	2) Belanja Modal	948.792.100,00	917.475.547,00
	d. Urusan Pemuda dan Olah Raga	**12.950.550.000,00**	**12.768.203.784,00**
	1) Belanja Operasi	7.477.540.000,00	7.358.822.634
	2) Belanja Modal	5.473.010.000,00	5.409.381.150
	2. Belanja di luar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	**-**	**-**
	a. Belanja Operasi	-	-
	b. Belanja Modal	-	-
B.	**Anggaran Fungsi Pendidikan (A+B)**	**701.842.137.322,00**	**660.576.498.851,00**
C.	**Total Belanja Daerah**	**2.210.013.276.667,00**	**2.105.985.875.749,00**
D.	**Rasio Anggaran Pendidikan (B/C) x 100%**	**31,76**	**31,37**

Selain di bidang Pendidikan, secara konsisten dan berkesinambungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji. Menindaklanjuti hal tersebut pada Tahun Anggaran 2023 untuk APBD setelah perubahan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan Mandatory Spending di bidang kesehatan dengan rasio sebesar 22,90% dan terealisasi 21,92% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.32 Anggaran Belanja Yang Diamanatkan (*Mandatory Spending*) Alokasi Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rupiah) Anggaran	Realisasi
A.	**1. Belanja pada Dinas Kesehatan**	**387.560.905.471,00**	**358.071.284.390,00**
	a. Belanja Operasi	344.005.060.486,00	325.503.738.707,00
	b. Belanja Modal	43.555.844.985,00	32.567.545.683,00
	2. Belanja di luar Dinas Kesehatan	**-**	**-**
	a. Belanja Operasi	-	-
	b. Belanja Modal	-	-
B.	**Anggaran Fungsi Kesehatan (A+B)**	**387.560.905.471,00**	**358.071.284.390,00**
C.	**Total Belanja Daerah**	**2.210.013.276.667,00**	**2.105.985.875.749,00**
D.	**Gaji ASN**	**517.632.804.512,00**	**472.179.109.409,00**
E.	**Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (C-D)**	**1.692.380.472.155,00**	**1.633.806.766.340,00**
F.	**Rasio Anggaran Kesehatan (B/E) x 100 %**	**22,90**	**21,92**

Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Alokasi *Mandatory Spending* infrastruktur publik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.33 Anggaran Belanja Yang Diamanatkan (*Mandatory Spending*) Alokasi Fungsi Infrastruktur Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rupiah) Anggaran	Realisasi
A.	**Total Belanja Daerah**	**2.210.013.276.667,00**	**2.105.985.875.749,00**
B.	**Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa**	**370.819.108.570,00**	**370.819.108.570,00**
	1. Belanja Bagi Hasil	6.640.362.500,00	6.640.362.500,00
	2. Belanja Bantuan Keuangan	364.178.746.070,00	364.178.746.070,00
C.	**Selisih (A-B)**	**1.839.194.168.097,00**	**1.735.166.767.179,00**
D.	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)**	**735.677.667.238,80**	**694.066.706.871,60**

Adapun perhitungan Belanja Infrastruktur daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.34 Belanja Yang Diamanatkan (*Mandatory Spending*) Alokasi Fungsi Infrastruktur Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rupiah) Anggaran	Realisasi
A.	**1. Belanja Modal**	**349.382.856.914,00**	**229.902.098.408,00**
	Belanja Modal Tanah	6.900.000.000,00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.212.556.484,00	71.513.835.592,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.744.157.300,00	75.966.224.399,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	179.415.331.115,00	73.441.211.700,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.085.812.015,00	8.956.129.217,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	24.697.500,00
	2. Belanja Pemeliharaan	**20.488.518.587,00**	**19.944.422.607,00**
	Belanja Pemeliharaan Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.872.246.001,00	7.655.478.372,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.579.802.466,00	4.520.609.967,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	7.979.970.120,00	7.711.834.401,00
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.499.867,00
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	32.000.000,00	32.000.000,00
	Jumlah A (1+2)	**369.871.375.501,00**	**249.846.521.015,00**
B.	**Belanja Hibah**	**40.060.565.500,00**	**38.343.717.411,00**
	Belanja Hibah Bangunan	28.125.921.797,00	26.409.073.708,00
	Belanja Hibah Jalan	4.971.043.703,00	4.971.043.703,00
	Belanja Hibah Jaringan	6.963.600.000,00	6.963.600.000,00
C.	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (A+B)**	**409.931.941.001,00**	**388.190.238.426,00**

Dari perhitungan tersebut, bahwa alokasi belanja infrastruktur APBD TA. 2023 belum sesuai atau belum mencapai 40% hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada penyusunan perencanaan belum memperhitungkan mandatory spending infrastruktur sebesar minimal 40% dari selisih total APBD terhadap belanja bagi hasil dan belanja transfer.
2. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan belanja selain infrastruktur, dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
a.	Belanja Pegawai	870.672.836.879,00
b.	Belanja Barang jasa selain pemeliharaan	441.672.175.957,00
c.	Belanja Hibah selain hibah jalan, irigasi, jaringan serta gedung dan bangunan	138.351.699.760,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	12.283.200.000,00
e.	Belanja Subsidi	842.880.000,00
f.	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00

Dalam hal alokasi dana transfer ke desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 12,38% dari DTU yang diterima. Perhitungan rasio ADD terhadap DTU sebagaimana data berikut ini:

DANA TRANSFER UMUM	**ANGGARAN (Rp)**	**REALISASI (Rp)**
1. Dana Alokasi Umum	820.114.945.000,00	832.084.548.325,00
2. Dana Bagi Hasil Pusat	38.936.891.488,00	38.936.891.488,00
Jumlah (1+ 2)	**859.051.836.488,00**	**871.021.439.813,00**
ADD = TAHUN 2023	**106.343.809.070,00**	**106.343.809.070,00**
Persentase	**12,38%**	**12,21%**

Sedangkan alokasi belanja pengawasan pada APBD TA 2023 sebesar Rp8.443.190.620,00 yang terealisasi sebesar Rp8.177.988.100,00 atau 0,39% dari total realisasi belanja daerah, hal ini belum sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan APBD TA 2023, bahwa Pemda mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pengawasan yang paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk total anggaran Pemda diatas Rp2.000.000.000.000,00. Nilai tesebut selain disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah juga berdasarkan usulan SKPD tersebut.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023

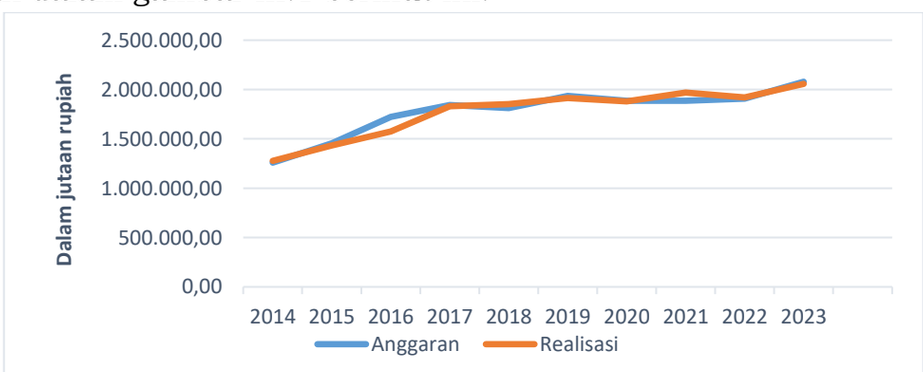
Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan TA 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel III.1 berikut ini.

Tabel III.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023

No	Keterangan	Tahun Anggaran 2023			Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)=(4)-(3)
A	**Pendapatan dan Belanja**				
1	Pendapatan	2.078.736.676.273,00	2.057.280.405.565,91	98,97	(21.456.270.707,09)
2	Belanja dan Transfer	2.210.013.276.667,00	2.105.985.875.749,00	95,29	(104.027.400.918,00)
	Surplus/(Defisit)	(131.276.600.394,00)	(48.705.470.183,09)	37,10	82.571.130.210,91
B	**Pembiayaan**				
1	Penerimaan Pembiayaan	156.276.600.394,00	168.302.094.868,00	107,70	12.025.494.474,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	21.570.912.000,00	86,28	(3.429.088.000,00)
	Pembiayaan Neto	131.276.600.394,00	146.731.182.868,00	111,77	15.454.582.474,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	**98.025.712.684,91**	-	**98.025.712.684,91**

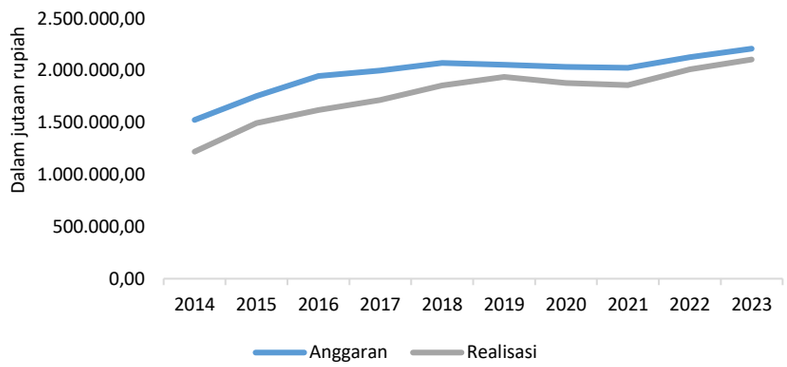
Tabel III.1 tersebut menunjukkan ikhtisar anggaran dan realisasi TA 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Pendapatan Kabupaten Wonosobo TA 2023 diproyeksikan dalam APBD sebesar Rp2.078.736.676.273,00, sedangkan realisasinya sebesar 98,97% yaitu sebesar Rp2.057.280.405.565,91. Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi pendapatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.1 berikut ini.



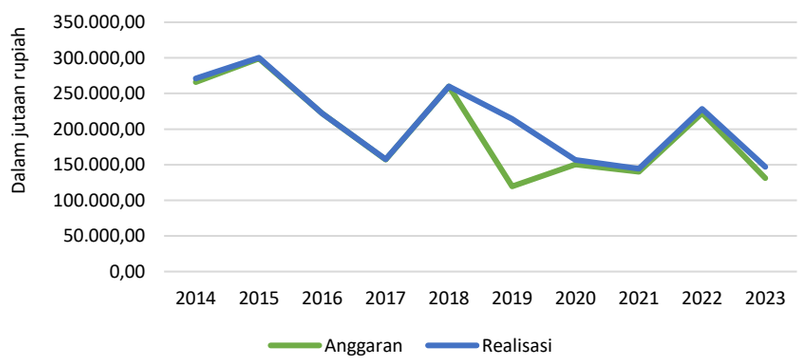
Gambar III.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2014 s/d TA 2023

b. Belanja dan transfer Kabupaten Wonosobo TA 2023 diproyeksikan dalam APBD sebesar Rp2.210.013.276.667,00, sedangkan realisasinya hanya sebesar 95,29% yaitu sebesar Rp2.105.985.875.749,00. Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi belanja dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.2 berikut ini.



Gambar III.2 Anggaran dan Realisasi TA 2014 s/d TA 2023

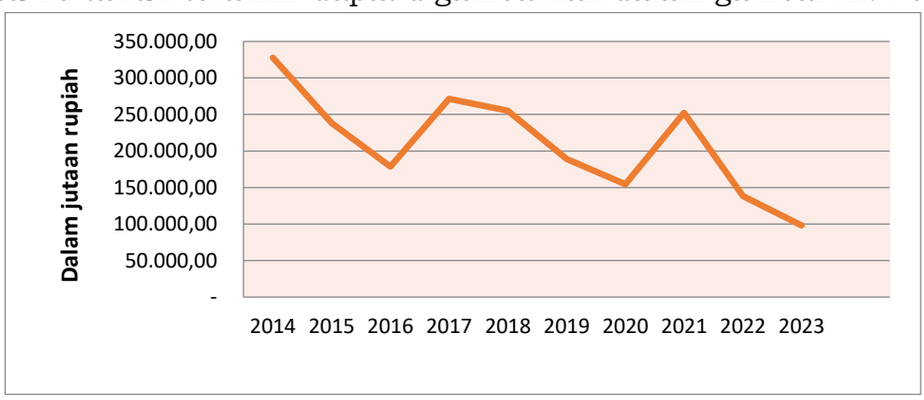
c. APBD TA 2023 telah ditetapkan defisit sebesar (Rp131.276.600.394,00) dan dapat terealisasi sebesar (Rp48.705.470.183,09).
d. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2023 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp156.276.600.394,00, sedangkan realisasinya sesuai ketetapan sebesar 107,70% yaitu sebesar Rp168.302.094.868,00.
e. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2023 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp25.000.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar 86,28% yaitu sebesar Rp21.570.912.000,00.
f. Pembiayaan neto Kabupaten Wonosobo TA 2023 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp131.276.600.394,00, sedangkan realisasinya melebihi ketetapan sebesar 111,77% yaitu sebesar Rp146.731.182.868,00.
Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi pembiayaan neto dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.3 berikut ini.



Gambar III.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto TA 2014 s/d TA 2023

g. Meskipun dalam APBD TA 2023 SILPA yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp0,00 namun terealisasi sebesar Rp98.025.712.684,91. Untuk lebih

jelasnya, realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.4 berikut ini.



Gambar III.4 Realisasi SILPA TA 2014 s/d TA 2023

2. Realisasi TA 2023 Dibandingkan dengan Realisasi TA 2022

Perbandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan TA 2023 dan TA 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2 Komparasi Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022

No	Keterangan	Tahun Anggaran 2023		Realisasi TA 2022	Persentase (%)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)/(5)x100
A	Pendapatan dan Belanja				
1	Pendapatan	2.078.736.676.273,00	2.057.280.405.565,91	1.921.189.093.169,00	7,08
2	Belanja dan Transfer	2.210.013.276.667,00	2.105.985.875.749,00	2.011.113.250.458,00	4,72
	Surplus/(Defisit)	(131.276.600.394,00)	(48.705.470.183,09)	(89.924.157.289,00)	(45,84)
B	Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	156.276.600.394,00	168.302.094.868,00	252.095.772.483,00	(33,24)
2	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	21.570.912.000,00	23.877.120.000,00	(9,66)
	Pembiayaan Neto	131.276.600.394,00	146.731.182.868,00	228.218.652.483,00	(35,71)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**-**	**98.025.712.684,91**	**138.294.495.194,00**	**(29,12)**

Tabel III.2 tersebut menunjukkan komparasi realisasi TA 2023 dan realisasi TA 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp2.057.280.405.565,91 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.921.189.093.169,00 mengalami kenaikan sebesar 7,08%.
b. Realisasi belanja dan transfer TA 2023 sebesar Rp2.105.985.875.749,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.011.113.250.458,00 mengalami kenaikan sebesar 4,72%.
c. Realisasi defisit TA 2023 sebesar Rp48.705.470.183,09 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang mengalami defisit sebesar Rp89.924.157.289,00 mengalami kenaikan 45,84%.
d. Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2023 sebesar Rp168.302.094.868,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp252.095.772.483,00 mengalami penurunan sebesar 33,24%.

e. Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2023 sebesar Rp21.570.912.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp23.877.120.000,00 mengalami penurunan sebesar 9,66%.
f. Realisasi pembiayaan netto TA 2023 sebesar Rp146.731.182.868,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp228.218.652.483,00 mengalami kenaikan sebesar 35,71%.
g. Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran TA 2023 sebesar Rp98.025.712.684,91 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp138.294.495.194,00 mengalami penurunan sebesar 29,12%.

B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

1. Hambatan Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebagai penyumbang tertinggi, Transfer Pemerintah Provinsi sebagai penyumbang terbesar ketiga, dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan bagian terbesar dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan tersebut berasal dari DAU, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu meskipun upaya-upaya optimalisasi pendapatan telah dilakukan namun kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif kecil. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah sehingga perlu pemecahan yang tepat. Upaya–upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan sudah terlihat dari semakin meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, namun demikian masih perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkakan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak dan retribusi yang dapat memberatkan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta solusi yang dapat ditempuh adalah:

a. Menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak/retribusi tepat waktu serta penegakan peraturan perundangan perpajakan dan retribusi daerah, agar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, melalui:
   1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pajak dan retribusi daerah;
   2) Penagihan pajak secara persuasif;
   3) Pemeriksaan dan pemantauan terhadap pembukuan wajib pajak;
   4) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi/pihak yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
b. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang belum sesuai dengan potensi dan menjadi hak pemerintah daerah, upaya yang dilakukan melalui

peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi.

c. Guna terus meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya bidang pajak dan retribusi daerah telah ditempuh langkah-langkah antara lain:
   1) Melakukan penggalian potensi-potensi pendapatan daerah, mengintensifkan siklus pendataan sampai dengan penarikan, pendataan ulang Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR);
   2) Melakukan update database potensi pajak dan retribusi guna memetakan sember-sumber PAD yang sah.
   3) Melakukan pengawasan yang baik kepada petugas penarik/pemungut serta memberikan sanksi kepada WP dan WR yang tidak memenuhi kewajibannya.

2. Hambatan Pencapaian Target Belanja

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini berarti bahwa APBD disusun tidak saja berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Secara umum permasalahan belanja daerah adalah adanya ketidakseimbangan kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan daerah yang direncanakan. Kemudian di sisi lain tingkat penyerapan belanja dari tahun ke tahun berkisar 90%, sehingga berakibat sisa anggaran yang besar, hal ini disebabkan berbagai masalah antara lain jumlah paket pekerjaan yang banyak, tetapi tidak sebanding dengan jumlah SDM yang menangani paket pekerjaan tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup disebabkan banyak kegiatan dalam proses gagal lelang, ataupun ketentuan peraturan yang turun terlambat pada beberapa jenis kegiatan yang dananya dibiayai dari pusat dan juga adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat ditengah pelaksanaan APBD sehingga memperlambat pelaksanaan kegiatan.

3. Hambatan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan daerah adalah terbatasnya sumber-sumber pembiayaan daerah untuk dapat menutup defisit anggaran daerah.

4. Hambatan Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi sangat penting barang daerah atau aset tetap dapat dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi beberapa hal menjadi hambatan antara lain karena jumlah fisik aset tetap yang banyak, sehingga membutuhkan ketelitian dan ketekunan, serta kompetensi SDM pada SKPD kurang memadai terkait dengan kemampuan dan kemauan serta permasalahan teknis lainnya yang membutuhkan komitmen kita bersama agar pengelolaan barang menjadi semakin baik.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar-periode maupun antar-entitas.

A. Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang dimaksud Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdomisili di wilayah Kecamatan Wonosobo yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Wonosobo tepatnya di JL. Soekarno-Hatta, No. 2-4, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311.

Entitas akuntansi merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Domisili dan Dasar Hukum Entitas serta Juridiksi Tempat Entitas Berada dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.

B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas

pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang/kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

b. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

c. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

e. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face***)** laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berikut adalah pengukuran aset menurut klasifikasinya.

1) Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

a) Kas dan Setara Kas

(1) Definisi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(a) Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah;
  Merupakan kas milik Pemerintah Daerah yang ada pada Rekening Kas Daerah, yang merupakan akumulasi saldo akhir tahun lalu, penerimaan, dan pengeluaran pada tahun pelaporan.
- Kas di Bendahara Penerimaan;
  Merupakan saldo kas di bank maupun tunai atas penerimaan pendapatan yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
- Kas di Bendahara Pengeluaran;
  Merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran baik kas tunai maupun kas bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran merupakan sisa uang persediaan, sisa SP2D TU, Potongan pajak baik pajak pusat maupun daerah yang dipungut bendahara, Jasa Giro atas pengelolaan rekening bendahara pengeluaran.
- Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  Merupakan posisi saldo kas di bank maupun tunai pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD pada tanggal pelaporan yang bersumber dari operasional BLUD.
- Kas Dana BOS;
  Merupakan seluruh kas, baik saldo kas di bank maupun tunai pada Bendahara BOS.
- Kas Lainnya;
  Merupakan kas yang tidak dapat diidentifikasi sebagai Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas Dana BOS. Saldo Kas akibat penerimaan yang bersumber dari hibah langsung yang diterima dan digunakan secara langsung oleh SKPD tanpa melalui RKUD contohnya: kas

yang bersumber dari pendapatan hibah dalam negeri maupun luar negeri dari kelompok masyarakat/ perorangan/ badan/ Lembaga/ organisasi/ Lembaga swasta/ organisasi swasta/ sumbangan pihak ketiga, kas yang bersumber dari sumbangan penanganan pandemi COVID-19 diklasifikasikan pada Kas Lain-lain..

(b) Setara Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

(2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

a) Secara umum pengakuan aset dilakukan:

i. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

ii. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

b) Atas dasar butir (ii) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

c) Kas dan setara kas diakui saat Dana TDF diterima di RKUD dengan melakukan reklasifikasi dari Aset Lainnya

d) Kas dan setara kas juga diakui atas dasar pengesahan atas penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja yang tidak melalui RKUD yakni melalui: Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) pada BLUD dan Kas dari pendapatan hibah secara langsung, Surat Pengesahan Belanja (SPB) yang dikeluarkan BUD atas belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

(3) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

(a) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

(b) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah (RKUD) namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;

(c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Investasi Jangka Pendek

(1) Definisi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

(a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
- Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

(b) Penerimaan dari pelepasan/pengurang investasi jangka pendek dapat diakui sebagai penerimaan kas apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

(c) Pengeluaran kas dapat diakui pada saat perolehan investasi jangka pendek dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

(d) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) yang diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

(3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diukur dan dicatat sebagai berikut:

(a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

(a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar

(b) Investasi jangka pendek diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
- Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
- Kenaikan/Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya;
- Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

c) Piutang

(1) Definisi Piutang

a) Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b) Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

c) Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

d) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal penetapan sampai dengan tanggal pelaporan;

e) Umur penyisihan piutang adalah jangka waktu dari tanggal setelah jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.

f) Nilai realisasi bersih *(Net Realizable Value)* piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.

g) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

(2) Pengakuan Piutang

(a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
- Terdapat surat ketetapan/dokumen lain yang sah yang belum dilunasi;
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

(b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
- harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- jumlah piutang dapat diukur.

(c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH tertang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran.

(d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.

(e) Dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Daerah melakukan reklasifikasi Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke *Treasury Deposit Facility* (Aset Lainnya).

(f) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.

(g) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
- dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

(h) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum diterima..

(i) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum diterima.

(j) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan, kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

(k) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

(l) Piutang lain-lain PAD yang Sah yang timbul atas penyaluran remunerasi Dana Bagi Hasil / Dana Alokasi Umum diakui ketika Bank Indonesia telah memberikan remunerasi melalui *Treasury Deposite Facility* (TDF) dengan skema transfer ke RKUN namun belum diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal pelaporan. Pengurangan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah diakui ketika remunerasi atas DBH/DAU melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD.

(3) Pengukuran Piutang

(a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

(b) Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan

i. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai

dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

ii. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

iii. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

iv. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

(c) Pengukuran Piutang Transfer

i. Dana Bagi Hasil (DBH) diukur pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran;

ii. Dana Alokasi Umum (DAU) diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas DAU yang belum dibayarkan;

iii. Dana Alokasi Khusus (DAK) diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas DAK yang belum dibayarkan.

(d) Pengukuran Piutang Ganti Rugi

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

i. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

ii. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

(e) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang, masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

(f) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

(g) Penyisihan piutang tidak tertagih dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

(h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   i. Kualitas Piutang Lancar;
   ii. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
   iii. Kualitas Piutang Diragukan;
   iv. Kualitas Piutang Macet.

(i) Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
   - Pajak dibayar sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
   - Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assesment*).

(j) Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagaimana Tabel IV.1 sebagai berikut.

Tabel IV.1 Penggolongan Kualitas Piutang

NO	JENIS PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	UMUR PIUTANG
1	PAJAK dengan *Self Assesment*	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 5 Tahun
		Macet	Diatas 5 Tahun
2	PAJAK dengan *Official Assesment*	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 5 Tahun
		Macet	Diatas 5 Tahun
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Obyek Retribusi	Lancar	0 s/d 1 Bulan
		Kurang Lancar	Lebih dari 1 bulan s/d 3 Bulan
		Diragukan	Lebih dari 3 bulan s/d 12 Bulan
		Macet	Lebih dari 12 Bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Yang disebutkan Retribusi	Lancar	0 s/d 1 Tahun
		Kurang Lancar	Lebih dari 1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 3 Tahun
		Macet	Diatas 3 Tahun
5	TP-TGR	Dikecualikan dari ketentuan penggolongan kualitas piutang tersebut diatas.	

(4) Pemberhentian Pengakuan

(a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud.

Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

(b) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau yang melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhitungnya pajak daerah dapat dilakukan pemberhentian pengakuan selain pelunasan.

(c) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau yang melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi daerah dapat dilakukan pemberhentian pengakuan selain pelunasan.

(d) Tata cara penghapusan piutang daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(e) Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang merupakan dua hal yang diperlakukan secara terpisah

(f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

(g) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen dan merupakan proses keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

(h) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

(i) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

(j) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

i. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan yaitu: memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan; memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

ii. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

iii. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus

buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

(k) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

(l) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(m) Perlakuan akuntansi penghapusan piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan

(n) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebagaimana Tabel IV.2 berikut:

Tabel IV.2 Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur/Kualitas Piutang	KET
1.	Lancar	0 %	-
2.	Kurang Lancar	10 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
3.	Diragukan	50 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
4	Macet	100 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

(m) Pencatatan transaksi Penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

(n) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Namun apabila kualitas piutang menurun, dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

(5) Penyajian dan Pengungkapan Piutang

(a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

i. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

ii. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
iii. penjelasan atas penyelesaian piutang;
iv. jaminan atau sita jaminan jika ada;
v. perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

(b) Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

(c) Penghapusbukuan Piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

(d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d) Beban Dibayar Dimuka

(1) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

(2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun Sebagian atau keseluruhan manfaat atas barang/jasa/fasilitas dari pihak lain belum diterima/dinikmati.

(3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan selisih pembayaran yang belum dinikmati manfaatnya. Beban Dibayar Dimuka dicatat sebesar total kas yang dikeluarkan dibagi dengan total bulan masa pemanfaatan barang/jasa/fasilitas, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dinikmati manfaatnya. Beban Dibayar Dimuka diukur dengan pendekatan bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

i. Apabila Transaksi terjadi pada tanggal 1 s/d 15 bulan bersangkutan maka diperhitungkan sebagai beban selama satu bulan, tetapi jika melebihi tanggal tersebut belum diakui sebagai beban;

ii. Periode yang diperhitungkan sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah total bulan pemanfaatan aset/pertanggungan asuransi dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai Beban.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar dan diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Persediaan

(1) Definisi Persediaan

i. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

ii. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

(2) Pengakuan Persediaan

(a) Persediaan diakui:

1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

(b) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*Stock opname*).

(3) Pengukuran Persediaan

(a) Metode penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*), kecuali penilaian persediaan obat menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kedaluarsa.

(b) Metode pencatatan Persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

(c) Persediaan disajikan sebesar:

i. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan Persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
ii. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
iii. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

(4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
(a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
(b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
i. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
ii. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang dan tidak disajikan dalam Neraca namun jenis, jumlah, dan nilainya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
iii. Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

f) Aset Untuk Dikonsolidasikan.

(1) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan
Aset Untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

(2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan
Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

(3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan
Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk Dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk Dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan
Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas pelaporan. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

2) Aset Non Lancar

a) Investasi Jangka Panjang

(1) Definisi Investasi Jangka Panjang

(a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

(c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

(d) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

(e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

(f) Diskonto atau premi adalah selisih kurang atau selisih lebih antara harga beli dengan nilai nominal pada suatu pembelian investasi.

(g) Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi:

- Investasi surat berharga melalui pembelian saham dan/atau pembelian surat utang;
- Investasi langsung melalui penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau pemberian pinjaman.

(2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

(a) Investasi Jangka Panjang diakui apabila memenuhi kriterua sebagai berikut:

- kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah

- nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)

(b) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

(c) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa: deviden tunai; deviden saham; dan bagian laba.

(d) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

i. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada Neraca dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Operasional, piutang dividen akan berkurang pada saat kas diterima di RKUD dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

ii. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen. Penerimaan dividen tunai akan mengurangi piutang dividen dan dicatat sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(e) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas tidak akan menambah nilai investasi pemerintah dan tidak diakui sebagai pendapatan.

(f) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
- Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai penambahan nilai investasi pada Neraca dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Laporan Operasional.

(h) Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(i) Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi disajikan nihil.

(3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

(a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi Permanen misalnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

(b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non-permanen yaitu:

i. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

ii. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

iii. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

iv. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

v. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

vi. Investasi non-permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non-permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

vii. Secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka Pendek atau Piutang Jangka Panjang karena dana yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Jika dana tersebut hendak disalurkan kembali kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggarannya sehingga dana tersebut tidak memenuhi karakteristik sebagai dana bergulir dimana dana

bergulir dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah (*revolving fund*).

(c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

(d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

(e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu Metode Biaya, Metode Ekuitas, dan Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

(f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

(g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

(h) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(i) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima, pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non-permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

(a) Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu

diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

(b) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

(5) Penyisihan Investasi Non-permanen Dana Bergulir

(a) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

(b) Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

(c) Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non-permanen dana bergulir dengan presentase penyisihan digambarkan dalam tabel IV.3 berikut.

Tabel IV.3 Presentase Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

(d) Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non-permanen dana bergulir yang bersangkutan.

b) Aset Tetap

(1) Definisi Aset Tetap

(a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya yang terdiri dari:

- Tanah
  Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peralatan dan Mesin
  Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
  Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut; Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- Aset Tetap Lainnya
  Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Konstruksi dalam Pengerjaan
  Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

(b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

(c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

(d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable aset*s) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

(e) Masa manfaat adalah:

- Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

(f) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

(g) Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

(2) Pengakuan Aset Tetap

(a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

(b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat >12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

(c) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual, dihibahkan, dan disewakan.

(d) Pengakuan aset tetap akan andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

(e) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

(f) Batasan minimal kapitalisasi perolehan awal aset tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
2. Pengeluaran untuk Gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

(g) Aset Tetap yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat dalam buku inventaris diluar pembukuan *(ekstrakomptable)*.

(h) Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya Tanaman yang dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah Tanaman yang dipelihara/dirawat pada Taman Kota, Alun-alun, Arboretum (kebun botani yang mengkoleksi pepohonan) dan Taman Tepian Jalan Protokol sebagai berikut: Alpukat, Angsana, Belimbing, Beringin, Bintaro, Bungur, Cemara, Dadap Merah, Durian, Flambboyan, Glodokan/Glodongan, Ipik/Gayam, Jati, Jimitri, Kamboja, Karet, Kayu Putih, Kelapa, Kelengkeng, Kepel, Kersen, Keruing, Kupu-kupu, Mahoni, Manggis, Melinjo, Nagasari/Dewadaru, Pagoda, Palem Sadang, Petai, Pinisium, Pulle, Rambutan, Sapu Tangan, Sawo, Sepatu Dea, Sikat Botol, Sukun, Tanjung, Tabebuya, dan Trembesi.

(3) Pengukuran Aset Tetap

(a) Aset dapat dinilai dengan biaya perolehan.

(b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

(d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

(e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

(f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan Tabel IV.4 sebagai berikut.

Tabel IV.4 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga Perolehan/biaya pembebasan tanah, Biaya yang ditimbulkan dalam rangka perolehan tanah (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	Penerima Hasil Pekerjaan), Biaya Appraisal Tanah, biaya memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan.
Peralatan dan Mesin	Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya ditimbulkan dalam rangka perolehan Peralatan dan Mesin (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).
Gedung dan Bangunan	Harga Pembelian/biaya konstruksi, Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi), biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan perolehan Gedung dan Bangunan (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Biaya perolehan atas Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui swakelola terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Harga Pembelian/biaya konstruksi, Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi), biaya langsung yang timbul dalam rangka perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Biaya perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui swakelola meliputi biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
Aset Tetap Lainnya	Harga Pembelian/biaya perolehan, biaya langsung yang timbul dalam rangka Perolehan Aset Tetap Lainnya (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi). Biaya perolehan atas Aset Tetap Lainnya melalui swakelola untuk Aset Tetap Renovasi meliputi: biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

(g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*;

(h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya;

(i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

(j) Penilaian Awal Aset Tetap
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan;

(k) Perolehan secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;

(l) Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

(m) Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.

(n) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran

bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

(o) Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan beban-beban suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan beban-beban apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran;
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional;
5. Aset Hibah/Donasi yang perolehannya tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran maka jenis aset ini tidak diterima melalui BUD, melainkan diterima langsung oleh Satker/SKPD. Untuk memastikan agar hibah/donasi tersebut dapat tercatat, dilakukan proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah. Proses pengesahan ini diajukan oleh SKPD penerima kepada BUD.

(p) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
2. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan termasuk pengembangan, reklasifikasi, rehabilitasi,

renovasi, dan restorasi akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
   (i) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
   (ii) bertambah umur ekonomis, dan/atau
   (iii) bertambah volume, dan/atau
   (iv) bertambah kapasitas produksi
2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*) aset tetap yaitu :
   (i) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
   (ii) pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
   (iii) nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

3. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin / berkala /terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekadar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

(q) Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
   Metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) tersebut dihitung berdasarkan penyusutan bulanan sejak aset tetap tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaanya berpindah.

   $$\text{Rumus} : \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

   Keterangan :
   Masa Manfaat : dihitung secara bulanan (tahun x 12 bulan).
   Perolehan Aset Tahun 20XX : ditetapkan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca sebagai pengurang nilai aset tetap.
3. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana diuraikan pada tabel IV.5 di bawah ini:

Tabel IV.5 Masa Manfaat Aset Tetap

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	ASET TETAP	
1.3.02	Peralatan dan Mesin	
1.3.02.01	Alat Besar	
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	10
1.3.02.01.02	Alat Besar Apung	8
1.3.02.01.03	Alat Bantu	7
1.3.02.02	Alat Angkutan	
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1.3.02.02.03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1.3.02.02.04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1.3.02.02.05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.02.03.03	Alat Ukur	5
1.3.02.04	Alat Pertanian	
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	4
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.02.05.01	Alat Kantor	5
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.02.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1.3.02.06.01	Alat Studio	5
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	5
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.02.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1.3.02.07	Alat Kedokteran	
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	5
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.02.08	Alat Laboratorium	
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	8
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.02.08.03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1.3.02.08.06	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya	10

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*	15
1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1.3.02.09	Alat Persenjataan	
1.3.02.09.01	Senjata Api	10
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.02.09.03	Senjata Sinar	3
1.3.02.09.04	Alat Khusus Kepolisian	3
1.3.02.10	Komputer	
1.3.02.10.01	Komputer Unit	4
1.3.02.10.02	Peralatan computer	2
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	
1.3.02.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	8
1.3.02.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	8
1.3.02.12	Alat Pengeboran	
1.3.02.12.01	Alat Pengeboran Mesin	10
1.3.02.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1.3.02.13	Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	
1.3.02.13.01	Sumur	20
1.3.02.13.02	Produksi	4
1.3.02.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	4
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.02.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	8
1.3.02.14.02	Alat Bantu Produksi	7
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	
1.3.02.15.01	Alat Deteksi	8
1.3.02.15.02	Alat Pelindung	2
1.3.02.15.03	Alat Sar	5
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	20
1.3.02.16	Alat Peraga	
1.3.02.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	15
1.3.02.18	Rambu-rambu	
1.3.02.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1.3.02.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1.3.02.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	
1.3.02.19.01	Peralatan Olah Raga	3
1.3.03	Gedung dan Bangunan	
1.3.03.01	Bangunan Gedung	
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.03.02	Monumen	
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.03.03	Bangunan Menara	
1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	50
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	
1.3.04.01.01	Jalan	10
1.3.04.01.02	Jembatan	50
1.3.04.02	Bangunan Air	
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.04.02.02	Bangunan Air Pasang Surut	50
1.3.04.02.03	Bangunan Air Rawa dan Polder	25
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	40
1.3.04.03	Instalasi	
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Baku	30
1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor	30
1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.04.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.04.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.04.03.07	Instalasi Pertahanan	30
1.3.04.03.08	Instalasi Gas	30
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.04.03.10	Instalasi Lain	20
1.3.04.04	Jaringan	
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	30
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	40
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	20
1.3.04.04.04	Jaringan Gas	30
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	
1.3.05.02.01.01.	Alat Musik	
1.3.05.02.01.01.02	Alat Musik Modern	5
1.3.05.07	Aset Tetap dalam Renovasi	
1.3.04.07.01	Aset Tetap dalam Renovasi	10

4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu:
   (i) Tanah,
   (ii) Konstruksi Dalam Pengerjaan,
   (iii) Bahan Perpustakaan Tercetak,
   (iv) Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro,
   (v) Kartografi, Naskah dan lukisan,

(vi) Musik,
(vii) Karya Grafika (*Graphic Material*),
(viii) *Three Dimensional Artefacs And Realita*,
(ix) *Tarscalt*,
(x) Barang Bercorak Kesenian,
(xi) Alat Bercorak kebudayaan,
(xii) Tanda Penghargaan,
(xiii) Hewan Piaraan,
(xiv) Ternak,
(xv) Hewan Lainnya,
(xvi) Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip),
(xvii) *Crustea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan sebangsanya),
(xviii) *Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan sebangsanya),
(xix) *Coelenterata* (Ubur-Ubur dan sebangsanya),
(xx) *Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan sebangsanya),
(xxi) *Amphibia* (Kodok dan sebangsanya),
(xxii) *Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan sebangsanya),
(xxiii) *Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan sebangsanya),
(xxiv) *Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air),
(xxv) Biota Perairan Lainnya,
(xxvi) Tanaman,
(xxvii) Barang Koleksi Non-Budaya

5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
6. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
   (i) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
   (ii) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
7. Aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi dapat dijelaskan sebagai berikut :
   - Penambahan masa manfaat atas aset tetap yang diperbaiki atau direnovasi maksimal sebesar masa manfaat awal aset tetap tersebut diperoleh. Sebagai ilustrasi masa manfaat gedung tempat kerja selama 50 tahun, sudah manfaatkan selama 10

tahun sehingga sisa masa manfaat tinggal 40 tahun, kemudian pada tahun ke 11 dilakukan renovasi yang mencapai 75% sehingga menambah masa manfaat selama 15 tahun, apabila sisa masa manfaat 40 tahun ditambah penambahan masa manfaat 15 tahun, masa manfaat gedung tersebut menjadi 55 tahun, hal ini tidak sesuai dengan masa manfaat apabila membangun gedung baru yang hanya 50 tahun masa manfaatnya. Dengan demikian masa manfaat setelah adanya penambahan adalah maksimal sebesar masa manfaat awal gedung/aset tetap tersebut dibangun.

- Penambahan masa manfaat atas peningkatan/ perbaikan/renovasi beberapa aset tetap ditentukan dalam Tabel IV.6 berikut :

Tabel IV.6 Penambahan masa manfaat atas peningkatan/ perbaikan/renovasi beberapa aset tetap

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar :			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d.20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 50%	3
		> 50%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 50%	3
		> 50%	4
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 50%	3
		> 50%	4
Alat Angkutan :			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 50%	1
		> 50%	2
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 50%	1
		> 50%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>80%	4
Alat Bengkel & Alat Ukur :			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		> 50%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Pertanian :			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga :			
Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	*Renovasi*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar :			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan :			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		5>0% s.d 75%	2

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat laboratorium :			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 60%	4
		>60% s.d 80%	6
		>80%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	*Overhaul*	0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 60%	4
		>60% s.d 80%	6
		>80%	8
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory Lainnya	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d 40%	1
		>40% s.d 60%	2
		>60% s.d 80%	3
		>80%	4
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	5
		>75%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Persenjataan :			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 50%	0

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Komputer :			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	0
		>50%	2
Alat Eksplorasi :			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Pengeboran :			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian :			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Bantu Explorasi :			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat keselamatan Kerja :			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Kerja Penerbangan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
		>75%	5
Alat Peraga :			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Proses / Produksi :			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Rambu-rambu :			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Olah Raga :			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	0% s.d. 50%	0
		>50%	2
Bangunan Gedung :			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Monumen :			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Bangunan Menara :			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75%	50
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Jalan dan Jembatan :			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 80%	7
		>80%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	50
Bangunan Air :			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	50
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 80%	15
		>80%	25
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 80%	5
		>80%	10
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Instalasi :			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 25%	0

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 80%	5
		>80%	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 80%	5
		>80%	10
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	15
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	15
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	10
		>80%	20
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	10
		>80%	20
Jaringan :			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 80%	20
		>80%	40
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	10
		>80%	20
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 80%	15
		>80%	30
ASET TETAP DALAM RENOVASI :			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50%	7

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jalan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	5
		>75%	7

(r) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

(s) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang.

(t) Reklasifikasi Aset Tetap

Timbulnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan untuk melakukan reklasifikasi terhadap suatu jenis aset tetap ke jenis aset tetap yang lain (sebagai contoh: Rambu-rambu lalu lintas darat yang sebelumnya masuk ke dalam jenis aset tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan ketentuan harus dicatat dalam jenis aset tetap Peralatan dan Mesin) maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Dilakukan reklasifikasi/pemindahan pencatatan terhadap akun aset tetap terdampak sesuai dengan nilai perolehan ke dalam jenis aset yang baru;
- Dilakukan reklasifikasi/pemindahan pencatatan terhadap saldo akumulasi penyusutan atas akun aset tetap terdampak ke dalam jenis aset yang baru dan jika berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi terjadi perbedaan penentuan masa manfaat yang berpengaruh pada nilai akumulasi penyusutan maka dilakukan penyesuaian.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

(a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(b) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

(c) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), serta mutasi aset tetap lainnya;
- Informasi penyusutan yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

(d) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
4. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

6. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
8. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
9. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

(5) Konstruksi Dalam Pengerjaan

(a) Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

(b) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
   - Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   - Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   - Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

4. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam pembangunan telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan

(c) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
   - Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
   - Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
   - Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   - Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
   - Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
   - Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
   - Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
   - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
   - Asuransi;
   - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
   - Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
   - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
   - Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
   - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

(d) Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat diberhentikan pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik atau kejadian lainnya. Penghentian Konstuksi Dalam Pengerjaan dapat berupa:

- Penghentian Sementara
  Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan sementara pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap disajikan dalam Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- Penghentian Permanen
  Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan secara permanen pembangunannya, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(e) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Suatu entitas Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Uang muka kerja yang diberikan; dan
- Retensi.

c) Properti Investasi

(1) Definisi Properti Investasi

(a) Aset Pendasar (*underlying asset*) yaitu aset yang terikat pada suatu sewa, di mana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa

(b) Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, arus kas dan/atau untuk meningkatkan nilai aset, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(c) Properti Yang Digunakan Sendiri
Property yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa, dapat melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

(d) Sewa Operasi
Sewa Operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansional seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.

(e) Sewa Pembiayaan
Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.

(f) Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa, arus kas dan/atau untuk meningkatkan nilai aset dengan keadaan pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil tersebut.

(g) Berikut yang termasuk properti investasi:
1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas yang lain dalam jangka pendek;
2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Dengan kata lain, jika tanah milik Pemerintah daerah tidak dipakai untuk kegiatan operasional namun akan dijual dimasa mendatang karena diyakini nilai tanah akan bertambah maka pengelompokannya masuk dalam properti investasi;
3) bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi (tidak termasuk proses perencanaan pembangunan atau pengembangan).

(h) Berikut yang tidak termasuk properti investasi:
1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3) properti yang digunakan sendiri, properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di

masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual,

4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
5) properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap;
7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

(i) Dalam hal entitas pemerintah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasinya sebagai berikut:
1) apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
2) apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% total luas aset digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

(j) Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan dan sewa properti investasi yang terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Penyewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap.

(k) Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

(2) Pengakuan Properti Investasi

a) Properti Investasi diakui sebagai aset apabila memenuhi kriteria:
1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

b) Dalam menentukan suatu properti investasi yang memenuhi kriteria huruf a angka (1) Pengakuan properti investasi diatas, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.

c) Kriteria sebagaimana huruf a angka (2) Pengakuan properti investasi diatas biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

d) Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

e) Pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Biaya tersebut dicatat sebagai surplus/defisit pada saat terjadinya transaksi.

f) Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengukuran Saat Pengakuan Awal Properti Investasi

a) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

b) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

c) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Biaya perolehan properti investasi mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang perolehan Aset Tetap dalam kebijakan akuntansi ini.

d) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya dibawah ini:
   1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
   2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
   3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

e) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai sesuai dengan perikatan yang timbul. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

f) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai Sewa Pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai akun kewajiban.

g) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari akun kewajiban. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

h) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (1) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (2) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

i) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
   (1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
   (2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan

(3) selisih antara (1) dan (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas -dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

j) Nilai wajar suatu aset dimana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
   (1) Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
   (2) Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

k) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnnya dalam satu entitas pelaporan dinilai menggunakan nilai buku. Sedangkan properti Investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

(4) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Properti Investasi

a) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
b) Properti investasi, kecuali Tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyusutan Aset Tetap dalam kebijakan akuntansi ini.
c) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
d) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
e) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
f) Properti Investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap *(rolling basis*) asalkan penilaian kembali

tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui, dengan menggunakan penilaian secara internal atau independen;

g) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

h) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.

i) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas pelaporan harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

j) Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, entitas pelaporan harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

   a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
   b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
   c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

(5) Alih Guna Properti Investasi

a) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

   1. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;

2. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
3. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
4. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

b) Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika:
1. Terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk diijual, maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan;
2. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
3. pemerintah daerah memutuskan untuk melepas Properti Investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

c) Entitas pelaporan dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika entitas pelaporan memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

d) Apabila entitas pelaporan menggunakan metode biaya, alih guna antara Properti Investasi, Properti Yang Digunakan Sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.

e) Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

6) Pelepasan Properti Investasi

a) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan; atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara pemanen; dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

b) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

c) Jika entitas pelaporan mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui.
d) Apabila penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tidak dapat secara praktis dilakukan, pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.
e) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
f) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
g) Entitas pelaporan mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
h) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai Surplus/Defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

7) Penyajian Properti Investasi
a) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.
b) Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan

8) Pengungkapan Properti Investasi
Hal-hal yang yang diungkapkan sehubungan dengan Properti Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b) metode penyusutan yang digunakan;
c) masa manfaat atau taruf penyusutan yang digunakan;
d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
   1. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
   2. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
   3. pelepasan;
   4. penyusutan;
   5. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
   6. perubahan lain.

f) apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
   1. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   2. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
   3. tanggal efektif penilaian kembali;
   4. nilai tercatat sebelum revaluasi;
   5. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
   6. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi;
   7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti Investasi;

g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

j) apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
   1. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
   2. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan peghasilan rental selama periode tersebut;

3. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

m) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain;

n) informasi lain yang terkait dengan properti investasi.

d) Dana Cadangan

(1) Definisi Dana Cadangan

(a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

(b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

(c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

(2) Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

(3) Pengukuran Dana Cadangan

(a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan;

(b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan;

(c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan;

(d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

(a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

(b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut;

(c) Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
(d) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

e) Aset Lainnya

(1) Definisi Aset Lainnya

(a) Aset Lainnya merupakan Aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

(b) Aset Lainnya terdiri dari:

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
   Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada Pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
   Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian Daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
   Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
   - Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
   - Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
   - Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

- Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

4. Aset Tidak Berwujud

   Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Jenis Aset Tidak berwujud adalah *Goodwill*; Hak Paten; Royalti; *Software computer* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware computer* tertentu; Lisensi; Hasil Kajian/Penelitian; Aset Tidak Berwujud Lainnya; dan Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan.

5. Aset Lain-lain

   Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) termasuk aset hilang akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dalam proses Tuntutan Ganti Kerugian (sebelum dikenakan/ditetapkan TGR).

6. Aset yang Dibatasi Penggunaannya

   Aset yang Dibatasi Penggunaannya adalah Uang yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan atau pihak luar lainnya. Contoh Aset yang Dibatasi Penggunaannya adalah : Kas Dana Tugas Pembantuan, Kas Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin).

7. *Treasury Deposit Facility*

   Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

(2) Pengakuan Aset Lainnya

(a) Aset Lainnya diakui ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal

(b) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

(c) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

(d) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

- Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
- Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

(e) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

- Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BGS/BOT, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
- Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya

perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

(f) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas.

(g) Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.

(h) Pengakuan Dana Transfer - *Treasury Deposit Facility* (TDF) diakui ketika pokok DAU DBH ditransfer ke rekening TDF. Pengurangan Dana Transfer - *Treasury Deposit Facility* (TDF) diakui pada saat penerimaan kas pada RKUD dari rekening TDF;

(i) Pengakuan Aset yang Dibatasi Penggunaannya adalah saat Kas tersebut ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu.

(3) Pengukuran Aset Lainnya

(a) Aset lainnya diukur dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

(b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)

(d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

- Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah, dicatat sebesar nilai tanah yang dikerjasamakan tidak termasuk nilai bangunan dan gedung serta Aset Tetap lain yang berada diatasnyaa yang belum diserahkan ke Pemerintah Daerah.
- Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

(e) Aset Tidak Berwujud

- Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
- Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
  (i) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
  (ii) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan, biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan, dan biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
  (i) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
  (ii) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
  (iii) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

(f) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

(g) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya (termasuk saldo Akumulasi Penyusutan).

(h) Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

(i) Proses penghapusan terhadap Aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

(j) Pengukuran Aset yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang ditempatkan pada suatu rekening.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

(a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

(c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

(d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

(e) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- Masa manfaat dan metode amortisasi;
- Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
- Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

(f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

(g) Aset yang Dibatasi Penggunaanya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penempatan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan atau penempatan dana, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

(h) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

(i) Amortisasi Aset Lainnya

- Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

- Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
- Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
- Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
- Masa manfaat Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3.01.	*Goodwill*	5
1.5.3.02.	Lisensi dan *franchise*	10
1.5.3.03.	Hak cipta	20
1.5.3.04.	Paten	20
1.5.3.05.	*Software*	10

- Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi".

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

(2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan

jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

(3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
(a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
(b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain, jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
(c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Utang Bunga

(1) Definisi Utang Bunga
Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

(2) Pengakuan Utang Bunga
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

(3) Pengukuran Utang Bunga
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga
Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

c) Utang Jangka Pendek Lainnya

(1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

(2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

(3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

d) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

(1) Definisi Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
(a) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
(b) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
(c) Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
(d) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan

tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

(2) Pengakuan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

(3) Pengukuran Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
(a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
(b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

(2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
(a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
(b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

(3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

f) Pendapatan Diterima Dimuka

(1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

(2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

(3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca. Pendapatan Diterima Dimuka dicatat berdasarkan beberapa kondisi sebagai berikut:

(a) Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Diterima dimuka dicatat sebesar total kas yang telah diterima dibagi dengan total bulan masa pajak dikalikan dengan jumlah bulan yang belum terlampaui masa pajaknya.

(b) Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
Pendapatan Diterima Dimuka dicatat sebesar total kas yang telah diterima dibagi dengan total bulan pemanfaatan Kekayaan Daerah dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dinikmati manfaatnya oleh pihak penyewa. Pendapatan Diterima Dimuka diukur dengan pendekatan bulan, bukan harian dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila transaksi terjadi pada tanggal 1 s.d 15 bulan bersangkutan maka diperhitungkan sebagai Pendapatan selama satu bulan, namun jika melebihi tanggal tersebut belum diakui sebagai pendapatan;
- Untuk periode yang diperhitungkan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka adalah total bulan Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan cara Sewa dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai pendapatan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

g) Utang Beban

1) Definisi Utang Beban
Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
(a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran;
(b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelangganya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya;
(c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
(d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

3) Pengakuan Utang Beban
Utang beban diakui pada saat:
(a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
(b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
(c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan

(dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

4) Pengukuran Utang Beban
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

5) Penyajian dan Pengungkapan Utang Beban
Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

h) Utang Jangka Pendek Lainnya

(1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

(2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

(3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Kewajiban Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri

(1) Definisi Utang Dalam Negeri
Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

(2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
(a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;
(b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;
(c) Utang Dalam Negeri – obligasi;

(d) Utang pemerintah pusat;
(e) Utang pemerintah provinsi; dan
(f) Utang pemerintah kabupaten/kota.

(3) Pengakuan Utang Dalam Negeri
(a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
(b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

(4) Pengukuran Utang Dalam Negeri
(a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
(b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
(c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

(5) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri
Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Utang Luar Negeri

Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.
Pasal 7 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima Pinjaman Luar Negeri dengan penerus pinjaman dan dapat

meneruspinjamkan dan/atau menerushibahkan kepada BUMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Definisi Utang Luar Negeri
   (a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
   (b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
   (c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
   (d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
   (e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value)* dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif..

(2) Pengakuan Utang Luar Negeri
   Sesuai PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

(3) Pengukuran Utang Luar Negeri
   (a) Sesuai paragraf 32 PSAP Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal Neraca.
   (b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri
   (a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
   (b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
   (c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau

lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

(d) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

c) Utang Jangka Panjang Lainnya

(1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan

(b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).

(c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

(d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

(e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

(2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

(b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

(3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

(b) Pengukuran mengenai Utang Kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang Kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang Kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.

(b) Pengungkapan mengenai Utang Kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

(c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

c. Ekuitas

1) Definisi Ekuitas

a) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

b) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

c) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

d) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

e) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun Aset adalah akun Kewajiban.

f) Dengan tidak diakomodirnya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

2) Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

3) Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4) Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Pendapatan - LRA

1) Pendapatan - LRA

a) Definisi Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

(2) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
(3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan- LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
(4) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
(5) Pendapatan LRA terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah - LRA
- Pendapatan Transfer – LRA
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

b) Pengakuan Pendapatan - LRA
(1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
(2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
(a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
(b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
(c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Koordinator pengelolaan/Pemungut Pendapatan/Pembantu Bendahara Penerimaan (di lingkungan Perangkat Daerah) dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD/Bendahara Penerimaan.
(d) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).
(e) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).

(f) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c) Pengukuran Pendapatan-LRA
(1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
(2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
(3) Pendapatan yang tidak melalui RKUD (contoh : pendapatan BLUD, BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan), diukur sesuai jumlah nilai kas yang diterima berdasarkan Pengajuan Pengesahan Pendapatan yang dilaporkan oleh entitas penerima (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) dan telah disahkan oleh BUD (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA
(1) Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(2) Pengungkapan Pendapatan dari
(a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran dalam CaLK.
(b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus diungkapkan dalam CaLK.
(c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah diungkapkan dalam CaLK.
(d) Perbandingan pendapatan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan dalam CaLK, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
(e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pendapatan Asli Daerah - LRA

a) Definisi Pendapatan Asli Daerah - LRA
(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

(2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

b) Pengakuan Pendapatan Asli Daerah - LRA

Pendapatan Asli Daerah - LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

(1) Pajak Diterima Dimuka

Pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, maka Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

(2) Pendapatan yang tidak ada penetapan

Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

c) Pengukuran Pendapatan Asli Daerah - LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) Pendapatan Transfer - LRA

a) Definisi Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer - LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b) Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA

(1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

(2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(3) Pendapatan Transfer – LRA berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN – LRA yang mempunyai karakteristik. Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk operasionalnya dan hanya menerus-salurkan kepada entitas lain yaitu pemerintah Desa maka diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) yang dikeluarkan oleh BUD sesuai daftar rincian SP2D Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan tidak diakui sebagai Pendapatan-LO.

c) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA
(1) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
(2) Pendapatan Transfer – LRA berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN – LRA diukur berdasarkan nilai kas yang dikeluarkan pada SP2D Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA
Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

a) Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Pendapatan Transfer-LRA (dana perimbangan). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA terdiri dari Pendapatan Hibah – LRA, Dana Darurat – LRA, dan Pendapatan Lainnya – LRA.
(2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
- Pendapatan Hibah – LRA,
- Dana Darurat – LRA,
- Pendapatan Lainnya – LRA.

b) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
(2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA yang telah diterima oleh satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa melalui RKUD diakui melalui pengesahan oleh BUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat

pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA berupa Pendapatan Hibah - LRA yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas tanpa melalui RKUD contohnya: dana yang bersumber dari sumbangan penanganan pandemi COVID-19 diakui melalui pengesahan oleh BUD dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).

c) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

(1) Sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

(2) Sesuai jumlah nilai kas yang diterima berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B yang dilaporkan oleh entitas penerima dan telah disahkan oleh BUD melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B.

d) Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Belanja

1) Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan / atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdiri dari:

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social. Belanja Operasi terdiri dari:

- Belanja Pegawai

  Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

- Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

- Belanja Bunga
  Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga *(interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- Belanja Subsidi
  Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- Belanja Hibah
  Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- Belanja Bantuan Sosial
  Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

b) Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

c) Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

d) Belanja Transfer
Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
- Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas

2) Pengakuan Belanja
   a) Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
   b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi Perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU dan SP2D TU Nihil.
   c) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
   d) Belanja yang dikeluarkan oleh entitas secara langsung tanpa melalui RKUD seperti: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, penggunaan dana yang bersumber dari sumbangan penanganan pandemi COVID-19, penggunaan dana yang bersumber dari hibah langsung yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BOP PAUD pada TK Negeri, dan BOP Kesetaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri diakui Ketika dilakukan pengesahan oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atau Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) pada BOS yang dilaporkan oleh entitas dengan diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atau Surat Pengesahan Belanja (SPB) pada BOS,BOP PAUD,BOP Kesetaraan oleh BUD.

3) Pengukuran Belanja
   a) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
   b) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
   c) Pengembalian Belanja ke RKUD sebagai akibat dari hasil pemeriksaan aparatur pemeriksa/pengawas, kelebihan Belanja dan kesalahan Kode Rekening Belanja yang dilakukan pada Tahun Anggaran yang sama dicatat sebagai pengurang Belanja pada entitas yang bersangkutan.
   d) Pengembalian Belanja ke RKUD sebagai akibat dari hasil pemeriksaan aparatur pemeriksa/pengawas, dan kelebihan Belanja pada Tahun Anggaran yang lalu dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah di BPPKAD.
   e) Untuk Belanja yang tidak melalui RKUD yang dilaksanakan oleh Satker/SKPD diakui sesuai jumlah nilai kas yang dikeluarkan berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B atau Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) pada Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) yang dilaporkan oleh entitas dan telah disahkan oleh BUD melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atau Surat Pengesahan Belanja (SPB) pada BOS.

4) Penyajian dan Pengungkapan Belanja
   a) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga.
   b) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
   c) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
   d) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

f. Transfer

1) Definisi Transfer
   a) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
   b) Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
   c) Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
   d) Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
   e) Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
   f) Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai Bagan Akun Standar.

2) Pengakuan Transfer
   a) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
      (1) Untuk kepentingan penyajian Transfer Masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
      (2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b) Transfer Keluar dan Beban Transfer
      (1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
      (2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
      (3) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Desa yang bersumber dari APBN dan mempunyai karakteristik Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk operasionalnya dan hanya menerus salurkan kepada entitas lain yaitu Pemerintah Desa maka diakui berdasarkan penerbitan SP2D Pengesahan oleh BUD berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan tidak diakui sebagai Beban pada Laporan Operasional.

3) Pengukuran Transfer
   a) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
      (1) Untuk kepentingan penyajian Transfer Masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, Pendapatan Transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

b) Transfer Keluar dan Beban Transfer

(1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

(2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, Beban Transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA yang berasal dari Pendapatan Lainnya Dana Desa yang bersumber dari APBN diukur berdasarkan nilai kas yang pada SP2D Pengesahan yang diterbitkan Kuasa BUD berdasarkan daftar rincian SP2D hasil Pemotongan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

4) Penyajian dan Pengungkapan Transfer

a) Pengungkapan Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

(1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi Transfer Masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Masuk dengan realisasinya.

(3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi Transfer Masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional.

(4) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(5) Informasi lainnya yang dinggap perlu.

b) Pengungkapan atas Transfer Keluar dan Beban Transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

(1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi Transfer Keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi Beban Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Keluar dengan realisasinya.

(3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Beban Transfer pada Laporan Operasional.
(4) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
(5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

g. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan, dan Pengeluaran pembiayaan.

1) Penerimaan Pembiayaan

a) Definisi Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

b) Pengakuan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

c) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d) Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan
(1) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(2) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan

a) Definisi Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD

b) Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

c) Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

d) Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan
(1) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(2) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, Kenaikan/Penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Pembiayaan Dana Bergulir

a) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
b) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
c) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
d) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
e) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah),

seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

h. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1) Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
   a) Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
   b) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
   c) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
   d) Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
      - Surplus/Defisit – LRA
      - Pembiayaan Netto
      - SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
      - Perubahan SAL
   e) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
   f) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
   g) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
   h) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
   i) Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

2) Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
   a) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
   b) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

3) Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
   Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini

tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

i. Pendapatan-LO

1) Definisi Pendapatan – LO
   a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
   b) Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
   c) Pajak Daerah Kabupaten terdiri dari :
      - Pajak Hotel;
      - Pajak Restoran;
      - Pajak Hiburan;
      - Pajak Reklame;
      - Pajak Penerangan Jalan;
      - Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
      - Pajak Parkir;
      - Pajak Air Tanah;
      - Pajak Sarang Burung Walet;
      - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
      - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
   d) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
2) Pengakuan Pendapatan – LO

   Pengakuan Pendapatan – LO Pendapatan-LO diakui pada saat:
   a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
   b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

   Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan-LO diklasifkasikan sebagai berikut:
   (1) Pengakuan Pendapatan-LO untuk pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
   (2) Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan

dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan data pajak untuk kemudian dilakukan penetapan dan diakui sebagai pendapatan LO. Dalam situasi tertentu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

(3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.

(4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan data pajak untuk kemudian dilakukan penetapan dan diakui sebagai pendapatan LO. Dalam situasi tertentu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

(5) Pengakuan Pendapatan LO yang tidak ada penetapan terlebih dahulu, diakui pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

(6) Pendapatan dari hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan atau dalam bentuk Bank Garansi kemudian mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

(7) Pada saat penyusunan laporan keuangan terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan-LO yaitu :

- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
  Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan *metode official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
- Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
  Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum

seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

(8) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

(9) Untuk pendapatan hibah langsung berupa uang yang diterima Satker/SKPD tanpa melalui RKUD maka pendapatan Hibah-LO diakui saat dilakukan Pengesahan Pendapatan melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dari Satker/SKPD.

(10) Dalam hal Pendapatan hibah langsung berupa Barang/Jasa maka Pendapatan-Hibah-LO diakui saat dilakukan Pengesahan Pendapatan melalui Surat Pengesahan Sumbangan Barang/Jasa (SPS-BJ) oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Sumbangan Barang/Jasa (SP2S-BJ) dari Satker/SKPD.

(11) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(12) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(13) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(14) Pendapatan-LO berupa Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak, sedangkan dalam bentuk barang/jasa dicatat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan jika data tersebut tidak diperoleh maka dicatat berdasarkan nilai wajar yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah/Donasi Langsung yang dikeluarkan oleh entitas penerima.

3) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan – LO

a) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

b) Pengungkapan Pendapatan – LO dalam CaLK meliputi:

(1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

(2) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

(3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;

(4) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
(5) Informasi lainnya yang diangap perlu.

j. Beban

1) Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO). Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

2) Pengakuan Beban

a) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
b) Beban diakui saat terjadinya konsumsi aset, artinya beban diakui saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daaerah.
c) Beban diakui saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
d) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi yaitu:
(1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
(2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas
(3) Beban diakui setelah pengeluaran kas
Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat

dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

e) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas contoh gaji dan tunjangan PNS, sedangkan Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pembayaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran, contohnya seperti bukti pembayaran honorarium.

f) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

g) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

h) Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

i) Beban Hibah diakui bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD sebab harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

j) Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

k) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

l) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

m) Beban Transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D/Penyaluran Dana Transfer atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

3) Pengukuran Beban

a) Beban diukur dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;

b) beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya; dan
c) dalam hal terjadi kesalahan atas transaksi perolehan Aset Tetap yang diperoleh dari Beban maka dilakukan koreksi pengurangan beban tersebut dan menambah Aset Tetap.

4) Penyajian dan Pengungkapan Beban
a) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
(1) Beban Operasi, yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
(2) Beban Transfer
(3) Beban Non Operasional
(4) Beban Luar Biasa
b) Dalam rangka memenuhi ketentuan Format Laporan Operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka Beban Barang dan Jasa yang merupakan Bagian Beban Operasi perlu dikonversi menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Lain-lain.
c) Beban Barang dan Jasa BLUD yang merupakan bagian dari Beban Barang dan Jasa dikonversi menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
d) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
e) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
(1) Pengeluaran beban tahun berkenaan.
(2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
(3) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
(4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

k. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

1) Definisi
   a) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
   b) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
   c) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos- pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
   d) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
   e) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
   f) Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
   g) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Koreksi Kesalahan
   a) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
   b) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
   c) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
      (1) Kesalahan yang tidak berulang
      Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
         - Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

- Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

(2) Kesalahan yang berulang dan sistemik
Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

d) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

e) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

f) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

g) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan belanja :

(1) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

(2) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambahakun pendapatan lain-lain-LRA.

(3) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

(4) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

h) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
(1) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
(2) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

i) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban :
(1) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO.
(2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

j) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :
(1) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
(2) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer olehPemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
- Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

k) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
(1) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
(2) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
- Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
- Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

l) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
(1) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
(2) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
(1) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
(2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

m) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

(1) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
(2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

n) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
o) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
p) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Perubahan Kebijakan Akuntansi

a) Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
b) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
c) Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
d) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
(1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
(2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
e) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

f) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Perubahan Estimasi Akuntansi
   a) Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
   b) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
   c) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
5) Operasi yang Tidak Dilanjutkan
   a) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
   b) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial ataud ampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada -- harus diungkapkan pada Catatan atas LaporanKeuangan.
   c) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
   d) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah- olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
   e) Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
      (1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
      (2) Fungsi tersebut tetap ada.
      (3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.

(4) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

6) Peristiwa Luar Biasa

a) Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

b) Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

c) Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

d) Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

e) Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

f) Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
(1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
(2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
(3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

(4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

g) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

l. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Kebijakan Akuntansi ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi untuk pencatatan dan pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan yang berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

1) Definisi

a) Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

(1) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan

(2) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan);

b) Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan.

c) Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit/pemeriksaan laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

2) Pengakuan dan Pengukuran Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

a) Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.

b) Peristiwa yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan tergantung pada:

(1) Apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan

(2) Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

3) Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat diidentifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

a) Peristiwa Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan. Berikut

beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya:

- Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
- Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak daerah (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan misal ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- Hasil pemeriksaan Auditor/Pemeriksa yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

b) Peristiwa Non Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan. Contoh dari peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan adalah :

- Adanya kebijakan penyajian kembali nilai asct dengan nilai secara teratur menggunakan wajar yang menyebabkan menurunnya niai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
- Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah tanggal pelaporan.

4) Pengungkapan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

a) Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggungjawab mengotorisasi laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) *Audited*.

b) Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) *Audited*.

c) Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup (a) Sifat peristiwa dan (b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) Audited.

m. Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi. Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan Pernyataan Standar ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.

1) Definisi

a) Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas 2 nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu dan mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama 4 masa perjanjian konsesi jasa.

b) Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

c) Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

d) Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

e) Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

(1) Disediakan oleh mitra, yang (a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau (b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau

(2) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang (a) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau (b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

2) Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

a) Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
   (1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
   (2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

b) Kebijakan Akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan terpenuhi.

c) Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan, pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

d) Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.

e) Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

f) Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

g) Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

h) Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

i) Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

j) Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

(1) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);

(2) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:

- Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
- Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

3) Skema Kewajiban Keuangan

a) Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan.

b) Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

(1) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau

(2) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada

adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

c) Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman pada Kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi ini.

d) Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai: pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui; bagian tagihan atas biaya keuangan; dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

e) Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.

f) Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

4) Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra

a) Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

b) Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

c) Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban.

Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.

d) Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

5) Membagi Perjanjian

a) Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur.

b) Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema.

6) Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada Kebijakanr akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

7) Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan berpedoman pada Kebijakan akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

8) Penyajian dan Pengungkapan

a) Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengann pengaturan pada Kebijakan Akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.

b) Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan:

(1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;

(2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang

harga/tariff, dan dasar penentuan ulang harga/tariff atau negosiasi ulang).

(3) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
(a) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
(b) hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelakdanaan perjanjian konsesi jasa;
(c) nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
(d) hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
(e) opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
(f) ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa *(overhaul*);
(g) ketentuan pemberian ijin atau akses bag mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
(h) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode pelaporan keuangan tahun berjalan;

(4) Pengungkapan sebagaimana dimaksud huruf (2) merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam Kebijakan Akuntansi lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai Kebijakan Akuntansi lain tersebut.

(5) Pengungkapan sebagaimana dimaksud huruf b disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasapengolahan air.

9) Ketentuan Transisi

Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya Pernyataan Kebijakan ini, entitas pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan Kebijakanr ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada PSAP yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan Kelompok Laporan Pelaksanaan Anggaran selain Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang disusun berdasarkan basis kas karena sampai dengan saat ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran disusun berdasarkan basis kas. Tujuan pelaporan realisasi anggaran Pemerintah tentang realisasi dan anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan lebih lanjut atas LRA untuk masing-masing pos Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan SILPA dapat dilihat secara rinci sebagaimana Tabel V.1 di bawah ini:

Tabel V.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan	2.078.736.676.273,00	2.057.280.405.565,91	98,97	1.921.189.093.169,00	7,08
2.	Belanja Dan Transfer	2.210.013.276.667,00	2.105.985.875.749,00	95,29	2.011.113.250.458,00	4,72
3.	Surplus / (Defisit) = 1-2	(131.276.600.394,00)	(48.705.470.183,09)	37,10	(89.924.157.289,00)	(45,84)
4.	Pembiayaan	131.276.600.394,00	146.731.182.868,00	111,77	228.218.652.483,00	(35,71)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) = 3+4		**-**	**98.025.712.684,91**	**-**	**138.294.495.194,00**	**(29,12)**

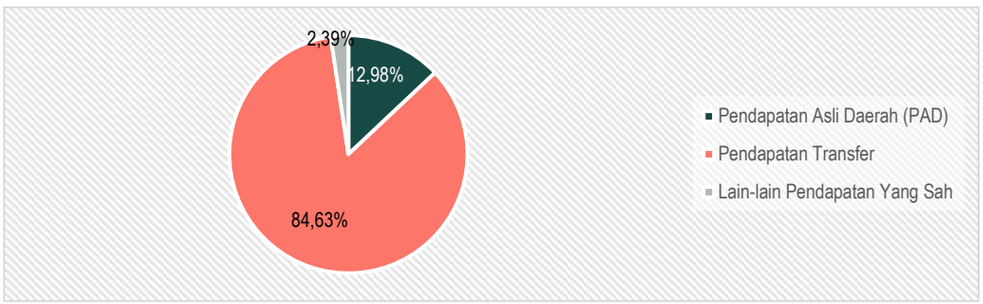
A.1. PENDAPATAN

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp2.057.280.405.565,91 atau 98,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.078.736.676.273,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.921.189.093.169,00, mengalami kenaikan sebesar Rp136.091.312.396,91 atau 7,08%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.2 di bawah ini.

Tabel V.2 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Asli Daerah	274.325.652.841,00	267.058.875.925,91	97,35	264.942.660.020,00	0,80
2.	Pendapatan Transfer	1.753.866.111.012,00	1.741.044.164.795,00	99,27	1.613.305.969.070,00	7,92
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	50.544.912.420,00	49.177.364.845,00	97,29	42.940.464.079,00	14,52
JUMLAH		**2.078.736.676.273,00**	**2.057.280.405.565,91**	**98,97**	**1.921.189.093.169,00**	**7,08**

Penyumbang terbesar Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Pendapatan Transfer sedangkan yang terkecil adalah Lain-lain Pendapatan Yang Sah, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.1 berikut:



Gambar V.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

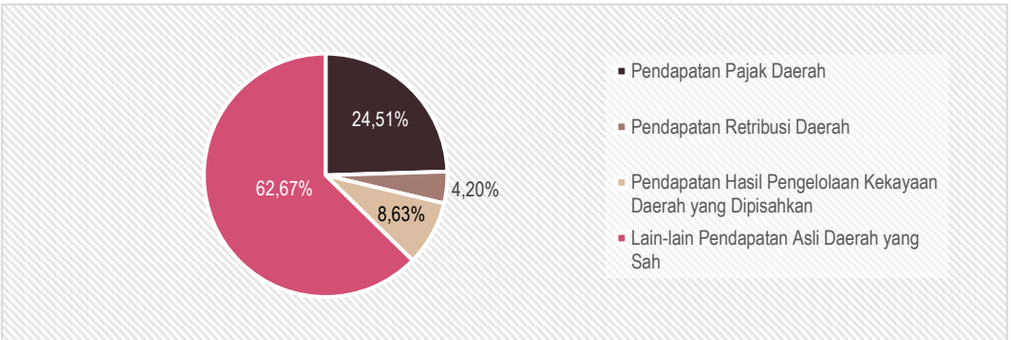
A.1.a.Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tabel V.2 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp267.058.875.925,91 atau 97,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp274.325.652.841,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp264.942.660.020,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.116.215.905,91 atau 0,80%. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.3 berikut.

Tabel V.3 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Pajak Daerah	62.430.000.000,00	65.448.626.748,00	104,84	59.953.607.231,00	9,17
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	11.793.625.000,00	11.205.591.108,00	95,01	9.447.416.172,00	18,61
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.320.779.534,00	23.040.333.270,00	94,74	21.988.351.496,00	4,78
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.781.248.307,00	167.364.324.799,91	95,21	173.553.285.121,00	(3,57)
	JUMLAH	**274.325.652.841,00**	**267.058.875.925,91**	**97,35**	**264.942.660.020,00**	**0,80**

Penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah TA 2023 adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sedangkan yang terkecil adalah Pendapatan Retribusi Daerah, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.2 sebagai berikut.



Gambar V.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2023

A.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Pendapatan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam penerapan pemungutan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo berpegang pada beberapa peraturan antara lain:

a) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan daerah tersebut mengatur tentang pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak parkir dan pajak sarang burung walet.
b) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2010 tentang BPHTB.
c) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Wonosobo nomor 44 Tahun 2020.

Tabel V.3 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp65.448.626.748,00 atau 104,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp62.430.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp59.953.607.231,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.495.019.517,00, atau 9,17%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.4 berikut.

Tabel V.4 Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

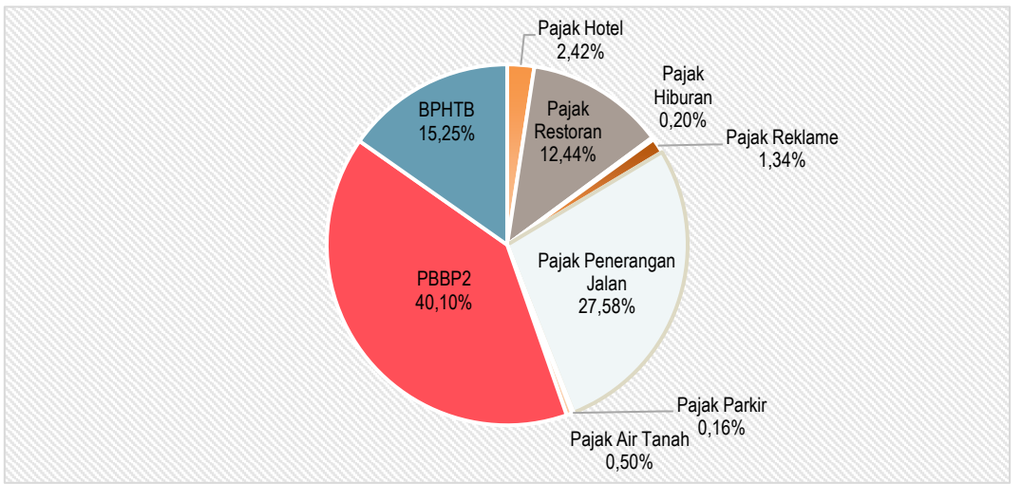
No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pajak Hotel	1.550.000.000,00	1.581.380.479,00	102,02	1.167.665.562,00	35,43
2.	Pajak Restoran	6.700.000.000,00	8.144.052.731,00	121,55	5.908.970.063,00	37,83
3.	Pajak Hiburan	125.000.000,00	133.356.609,00	106,69	80.842.075,00	64.96
4.	Pajak Reklame	750.000.000,00	878.359.249,00	117,11	910.217.793,00	(3,50)
5.	Pajak Penerangan Jalan	17.905.000.000,00	18.051.051.369,00	100,82	16.828.546.446,00	7,26
6.	Pajak Parkir	100.000.000,00	105.396.000,00	105,40	92.550.300,00	13,88
7.	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	329.633.480,00	109,88	339.777.880,00	(2,99)
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.500.000.000,00	26.247.258.386,00	102,93	25.709.852.592,00	2,09
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.500.000.000,00	9.978.138.445,00	105,03	8.915.184.520,00	11,92
	JUMLAH	**62.430.000.000,00**	**65.448.626.748,00**	**104.84**	**59.953.607.231,00**	**9,17**

Pada Tabel V.4 diatas, tidak terdapat anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 karena berdasarkan data Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, IUP di Kabupaten Wonosobo yang telah diterbitkan masih dalam tahap eksplorasi sehingga tidak terdapat laporan produksi pada aplikasi SILUP maupun laporan produksi secara berkala dari pemegang IUP sebagaimana penjelasan lebih lanjut dibawah ini:

Tabel V.5 Daftar Izin Usaha Pertambangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023

No.	Lokasi Tambang	Perusahan	Nomor SK	Tanggal Berlaku	Tanggal Berakhir	Tahap Kegiatan	Luas Wilayah (ha)	Komoditas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Kec. Kertek	CV PKS	1207/1/IUP/PMDN/2021	22/10/2021	22/10/2024	Eksplorasi	8,5	Kerikil (Sirtu)	Berpasir	Alami
2	Kec. Kertek	CV LK	1312/1/IUP/PMDN/2021	01/11/2021	01/11/2024	Eksplorasi	10,46	Pasir		
3	Kec. Selomerto dan Kalikajar	CV KMPS	1325/1/IUP/PMDN/2021	01/11/2021	01/11/2024	Eksplorasi	2,7	Kerikil (Sirtu)	Berpasir	Alami
4	Kec. Kertek	CV JPP	1535/1/IUP/PMDN/2021	17/11/2021	17/11/2024	Eksplorasi	3,55	Kerikil (Sirtu)	Berpasir	Alami
5	Kec. Kertek	CV BSAI	1923/1/IUP/PMDN/2021	28/12/2021	28/12/2024	Eksplorasi	19,35	Kerikil (Sirtu)	Berpasir	Alami
6	Kec. Kertek	PT RAR	24/1/IUP/PMDN/2022	12/01/2022	12/01/2025	Eksplorasi	30,09	Kerikil (Sirtu)	Berpasir	Alami
7	Kec. Kertek	PT EGP	301/1/IUP/PMDN/2022	09/02/2022	09/02/2025	Eksplorasi	26,29	Kerikil (Sirtu)	Berpasir	Alami
8	Kec. Kertek	PT EJE	455/1/IUP/PMDN/2022	08/03/2022	08/03/2025	Eksplorasi	14,17	Kerikil (Sirtu)	Berpasir	Alami
9	Kec. Kertek	PT DCM	576/1/IUP/PMDN/2022	25/03/2022	25/03/2025	Eksplorasi	26,36	Kerikil (Sirtu)	Berpasir	Alami
10	Kec. Kertek	PT GPS	2062/1/IUP/PMDN/2021	31/12/2021	31/12/2024	Eksplorasi	23,33	Kerikil (Sirtu)	Berpasir	Alami

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2023 direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo. Penyumbang terbesar adalah PBBP2 dan yang terkecil adalah Pajak Parkir sebagaimana ilustrasi pada Gambar V.3 di bawah ini.



Gambar V.3 Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

A.1.a.1).a) Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp1.581.380.479,00 atau 102,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.550.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.167.665.562,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp413.714,917,00 atau 35,43%.

A.1.a.1).b) Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp8.144.052.731,00 atau 121,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.700.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.908.970.063,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp2.235.082.668,00 atau 37,83%.

A.1.a.1).c) Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp133.356.609,00 atau 106,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp125.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp80.842.075,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp52.514.534,00 atau 64,96%. Kenaikan tersebut dikarenakan bahwa selama TA 2023 terdapat peningkatan intensitas pelaksanaan acara hiburan yang bersifat insidentil yang dikenakan pajak hiburan.

A.1.a.1).d) Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp878.359.249,00 atau 117,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp750.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp910.217.793,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.858.544,00 atau 3,50%.

A.1.a.1).e) Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp18.051.051.369,00 atau 100,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.905.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp16.828.546.446,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp1.222.504.923,00 atau 7,26%. Pajak Penerangan Jalan dibagi ke dalam dua jenis yaitu Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri dan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dengan rincian sebagaimana Tabel V.6 berikut:

Tabel V.6 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	17.900.000.000,00	18.045.632.546,00	100,81	16.822.299.229,00	7,27
2.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.000.000,00	5.418.823,00	108,38	6.247.217,00	(13,26)
	JUMLAH	**17.905.000.000,00**	**18.051.051.369,00**	**100,82**	**16.828.546.446,00**	**7,26**

Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana Tabel V.6 di atas merupakan penerimaan dari PLN sedangkan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain berasal dari wajib pajak daerah lainnya.

A.1.a.1).f) Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa Pajak Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp105.396.000,00 atau 105,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp92.550.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.845.700,00 atau 13,88%.

A.1.a.1).g) Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp329.633.480,00 atau 109,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp339.777.880,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.144.400,00 atau 2,99%.

A.1.a.1).h)Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa PBBP2 Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp26.247.258.386,00 atau 102,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.500.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp25.709.852.592,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp537.405.794,00 atau 2,09%.

A.1.a.1).i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan yang dimaksud Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa BPHTB Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp9.978.138.445,00 atau 105,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.500.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp8.915.184.520,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp1.062.953.925,00 atau 11,92%.

A.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah

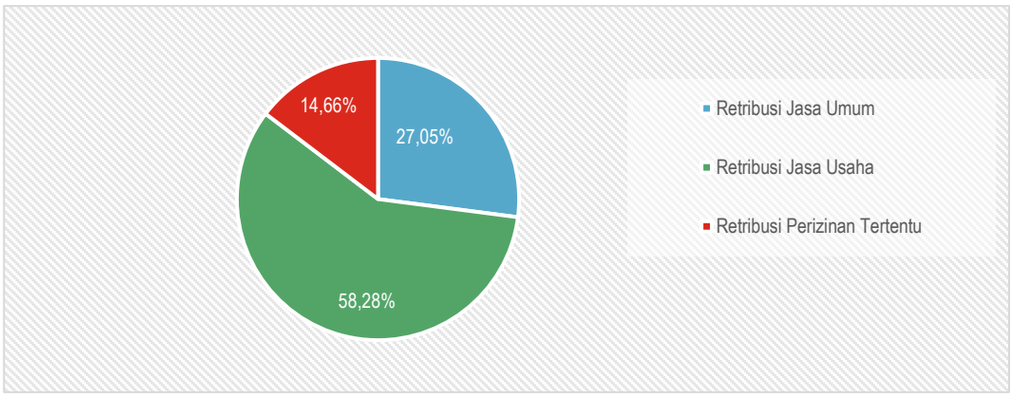
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Tabel V.3 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp11.205.591.108,00 atau 95,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.793.625.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp9.447.416.172,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.758.174.936,00, atau 18,61%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.7 berikut.

Tabel V.7 Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Retribusi Jasa Umum	3.832.825.000,00	3.031.541.471,00	79,09	3.059.334.651,00	(0,91)
2.	Retribusi Jasa Usaha	6.668.300.000,00	6.531.176.600,00	97,94	5.539.034.962,00	17,91
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.292.500.000,00	1.642.873.037,00	127,11	849.046.559,00	93,50
	JUMLAH	**11.793.625.000,00**	**11.205.591.108,00**	**95,01**	**9.447.416.172,00**	**18,61**

Penyumbang terbesar Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Retribusi Jasa Usaha dengan ilustrasi yang dapat dilihat pada Gambar V.4 di bawah ini:



Gambar V.4 Komposisi Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

A.1.a.2).a)Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatur dalam beberapa Peraturan antara lain:

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar;
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
(5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
(6) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

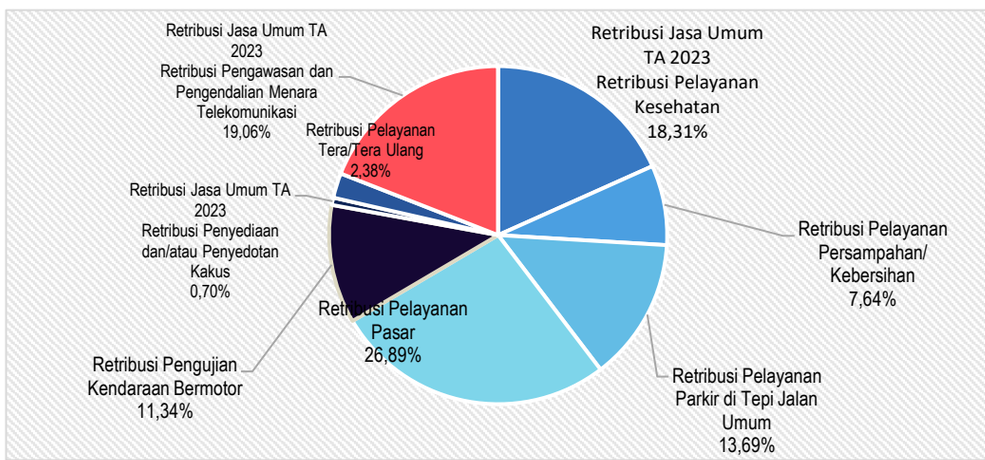
Tabel V.7 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp3.031.541.471,00 atau 79,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.832.825.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.059.334.651,00, Pendapatan Retribusi Jasa

Umum TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp27.793.180,00 atau 0,91%. Penjelasan lebih lanjut terkait Pendapatan Retribusi Jasa Umum dapat dilihat pada Tabel V.8 berikut.

Tabel V.8 Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	554.970.000,00	110,99	330.179.000,00	68,08
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000,00	231.541.500,00	115,77	208.937.500,00	10,82
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	414.986.000,00	69,16	537.609.000,00	(22,81)
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.363.000.000,00	815.074.644,00	59,80	1.104.057.867,00	(26,17)
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	676.725.000,00	343.856.500,00	50,81	480.028.000,00	(28,37)
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.100.000,00	21.259.000,00	60,57	15.379.000,00	38,23
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000,00	72.084.500,00	144,17	64.386.500,00	11,96
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	408.000.000,00	577.769.327,00	141,61	318.757.784,00	81,26
	JUMLAH	**3.832.825.000,00**	**3.031.541.471,00**	**79,09**	**3.059.334.651,00**	**(0,91)**

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Jasa Umum pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 dengan komposisi penyumbang terbesarnya yaitu Retribusi Pelayanan Pasar dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.5 berikut:



Gambar V.5 Komposisi Realisasi Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp554.970.000,00 atau 110,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp330.179.000,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp224.791.000,00 atau 68,08%. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh beberapa hal antara lain adanya peningkatan jumlah calon jamaah haji yang diperiksa pada tahun 2023 di Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan. Parameter pemeriksaan calon jamaah haji diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 01.07/Menkes/2118/2023 tentang standar teknis pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan status *istitha'ah* kesehatan jamaah haji. Jika pada tahun 2022 pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah hanya atas advis dari dokter puskesmas, maka pada tahun 2023 sudah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, dengan jumlah paramater yang diperiksa

lebih banyak dibanding tahun 2022. Selain itu promosi yang dilakukan melalui media sosial semakin banyak dilakukan sehingga produk layanan Laboratorium Kesehatan Daerah semakin dikenal oleh masyarakat. Anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan dan direalisasikan di Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan yang merupakan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Air, Makanan, dan Minuman, sedangkan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut oleh Puskesmas tidak dianggarkan dan direalisasikan karena seluruh Puskesmas di Kabupaten Wonosobo telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang pendapatannya dianggarkan dan direalisasikan pada rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp231.541.500,00 atau 115,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp208.937.500,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp22.604.000,00 atau 10,82%. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp414.986.000,00 atau 69,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp537.609.000,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp122.623.000,00 atau 22,81%. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

(4) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp815.074.644,00 atau 59,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.363.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.104.057.867,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp288.983.223,00 atau 26,17%. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp343.856.500,00 atau 50,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp676.725.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp480.028.000,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp136.171.500,00 atau 28,37%. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

(6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp21.259.000,00 atau 60,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.100.000,00, sedangkan TA 2022 terealisasi sebesar Rp15.379.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.880.000,00 atau 38,23%. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dianggarkan dan direalisasikan di beberapa entitas sebagaimana tabel V.9 berikut.

Tabel V.9 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DPUPR	-	3.800.000,00	-	-	-
2.	Disparbud	5.000.000,00	-	-	-	-
3.	Disdagkop UKM	30.100.000,00	17.459.000,00	58,00	15.379.000,00	13,52
	JUMLAH	**35.100.000,00**	**21.259.000,00**	**60,57**	**15.379.000,00**	**38,23**

(7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 terealisasikan sebesar Rp72.084.500,00 atau 144,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp64.386.500,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp7.698.000,00 atau 11,96%. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direalisasikan di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

(8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp577.769.327,00 atau 141,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp408.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp318.757.784,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp259.011.543,00 atau 81,26%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penerimaan atas ketetapan retribusi yang diterbitkan selama Tahun Anggaran 2023. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

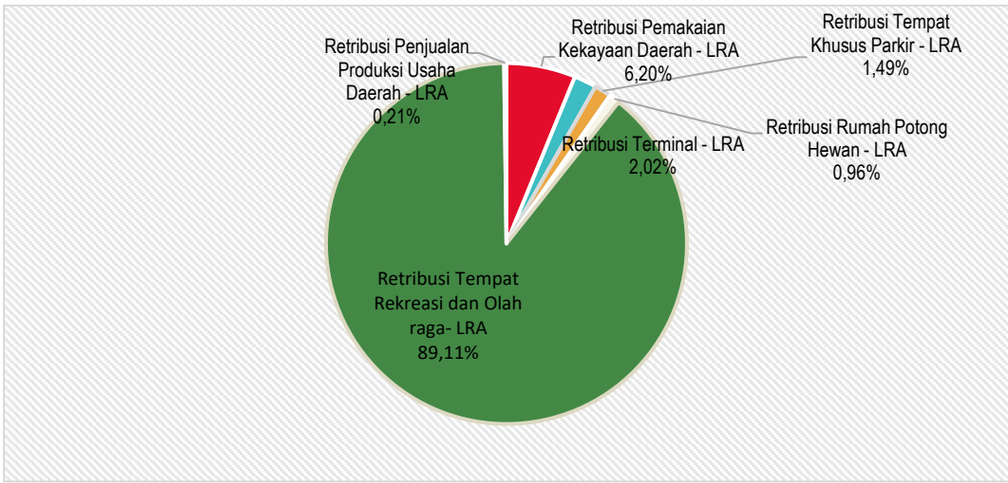
A.1.a.2).b)Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Tabel V.7 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp6.531.176.600,00 atau 97,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.668.300.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.539.034.962,00 mengalami kenaikan sebesar Rp992.141.638,00 atau 17,91%. Penjelasan lebih lanjut terkait Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dapat dilihat pada Tabel V.10 berikut.

Tabel V.10 Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	689.200.000,00	405.088.400,00	58,78	424.404.162,00	(4,55)
2.	Retribusi Terminal	231.800.000,00	131.641.600,00	56,79	144.334.800,00	(8,79)
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00	97.340.000,00	194,68	78.815.500,00	23,50
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	101.800.000,00	62.980.000,00	61,87	72.855.000,00	(13,55)
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	5.590.000.000,00	5.820.126.600,00	104,12	4.807.955.500,00	21,05
6.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.500.000,00	14.000.000,00	254,55	10.670.000,00	31,21
	JUMLAH	**6.668.300.000,00**	**6.531.176.600,00**	**97,94**	**5.539.034.962,00**	**17,91**

Sesuai Tabel V.10, penyumbang terbesar realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 adalah Retribusi Jasa Usaha dengan ilustrasi sebagai berikut.



Gambar V.6 Komposisi Realisasi Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tabel V.10 di atas menunjukkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp405.088.400,00 atau 58,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp689.200.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp424.404.162,00, cenderung mengalami penurunan sebesar Rp19.315.762,00 atau 4,55%. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan pada sejumlah entitas dengan rincian sebagaimana Tabel V.11 berikut.

Tabel V.11 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disdikpora	4.000.000,00	4.250.000,00	106,25	2.000.000,00	112,50
2.	Disnakerintrans	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	12.200.000,00	(59,02)
3.	DLH	11.000.000,00	15.050.000,00	136,82	15.050.000,00	-
4.	Diskominfo	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	109.077.727,00	(78,91)
5.	DPMPTSP	27.300.000,00	4.004.500,00	14,67	5.189.335,00	(22,83)
6.	Dispaperkan	18.400.000,00	4.018.500,00	21,84	9.879.000,00	(59,32)
7.	DPUPR	151.500.000,00	16.880.000,00	11,14	29.085.000,00	(41,96)
8.	DisdagkopUKM	220.000.000,00	94.802.900,00	43,09	144.803.100,00	(34,53)
9.	Bagian Umum	229.000.000,00	238.082.500,00	103,97	97.120.000,00	145,14
	JUMLAH	**689.200.000,00**	**405.088.400,00**	**58,78**	**424.404.162,00**	**(4,55)**

(2) Retribusi Terminal

Tabel V.10 di atas menunjukkan Retribusi Terminal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp131.641.600.,00 atau 56,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp231.800.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp144.334.800,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp12.693.200,00 atau 8,79%. Retribusi Terminal dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Tabel V.10 di atas menunjukkan Retribusi Tempat Khusus Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp97.340.000,00 atau 194,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp78.815.500,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp18.524.500,00 atau 23,50%. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan dan direalisasikan pada beberapa entitas antara lain:

Tabel V.12 Retribusi Tempat Khusus Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disparbud	25.000.000,00	89.640.000,00	358,56	69.915.500,00	28,21
2.	Disdagkop UKM	25.000.000,00	7.700.000,00	30,80	8.900.000,00	(13,48)
	JUMLAH	**50.000.000,00**	**97.340.000,00**	**194,68**	**78.815.500,00**	**23,50**

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan

Tabel V.10 di atas menunjukkan Retribusi Rumah Potong Hewan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp62.980.000,00 atau 61,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp101.800.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp72.855.000,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp9.875.000,00 atau 13,55%. Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan.

(5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Tabel V.10 di atas menunjukkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp5.820.126.600,00 atau 104,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.590.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp4.807.955.500,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp1.012.171.100,00 atau 21,05%.

(6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Tabel V.10 di atas menunjukkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp14.000.000,00 atau 254,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp10.670.000,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp3.330.000,00 atau

31,21%. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, berupa penjualan bibit ikan, ikan konsumsi, serta retribusi nelayan.

A.1.a.2).c) Retribusi Perizinan Tertentu

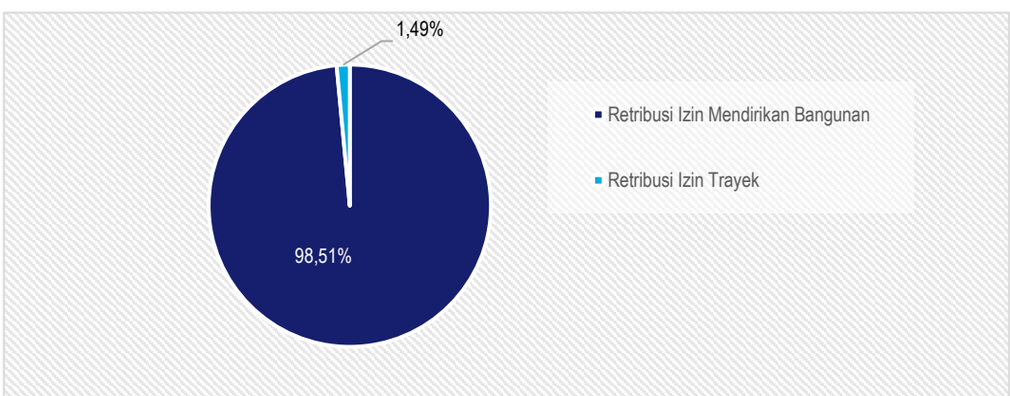
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perizinan tertentu adalah kegiatan Tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel V.7 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp1.642.873.037,00 atau 127,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.292.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp849.046.559,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp793.826.478,00 atau 93,50%. Penyebab kenaikan signifikan tersebut terjadi pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.13 beserta penjelasan dibawahnya sebagai berikut.

Tabel V.13 Retribusi PerizinanTertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000.000,00	1.618.373.037,00	129,47	827.071.559,00	95,68
2.	Retribusi Izin Trayek	42.500.000,00	24.500.000,00	57,65	21.975.000,00	11,49
	JUMLAH	**1.292.500.000,00**	**1.642.873.037,00**	**127,11**	**849.046.559,00**	**93,50**

Tabel V.13 di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 dengan penyumbang terbesar adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan ilustrasi sebagaimana gambar berikut.



Gambar V.7 Komposisi Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Tabel V.12 di atas menunjukkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp1.618.373.037,00 atau 129,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.250.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp827.071.559,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp791.301.478,00 atau 95,68%. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan jumlah perizinan yang dikeluarkan pada TA 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu.

(2) Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp24.500.000,00 atau 57,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp21.975.000,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp2.525.000,00 atau 11,49%. Retribusi Izin Trayek TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

A.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel V.3 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp23.040.333.270,00 atau 94,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp24.320.779.534,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp21.988.351.496,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.051.981.774,00 atau 4,78%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis dengan rincian sebagaimana Tabel V.14 di bawah ini.

Tabel V.14 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	24.320.779.534,00	23.040.333.270,00	94,74	21.988.351.496,00	4,78
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**24.320.779.534,00**	**23.040.333.270,00**	**94,74**	**21.988.351.496,00**	**4,78**

A.1.a.3).a) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Tabel V.14 di atas menunjukkan bahwa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp23.040.333.270,00 atau 94,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp24.320.779.534,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp21.988.351.496,00, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD TA 2023 mengalami

kenaikan sebesar Rp1.051.981.774,00 atau 4,78%. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2023 secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel V.15 di bawah ini.

Tabel V.15 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.007.826.106,00	15.400.622.042,00	102,62	14.214.425.201,00	8,35
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	3.760.481.006,00	2.000.000.000,00	53,18	2.941.850.366,00	(32,02)
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	5.552.472.422,00	5.639.711.228,00	101,57	4.832.075.929,00	16,71
	JUMLAH	**24.320.779.534,00**	**23.040.333.270,00**	**94,74**	**21.988.351.496,00**	**4,78**

(1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Tabel V.15 di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp15.400.622.042,00 atau 102,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.007.826.106,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp14.214.425.201,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.186.196.841,00 atau 8,35%, dengan rincian sebagaimana tabel V.16 berikut.

Tabel V.16 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	PT BPR Bank Wonosobo	3.055.891.525,00	3.078.825.350,00	100,75	2.444.458.521,00	25,95
2.	PD BPR BKK Wonosobo	453.388.320,00	561.957.985,00	123,95	271.420.419,00	107,04
3.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	11.498.546.261,00	11.759.838.707,00	102,27	11.498.546.261,00	2,27
	JUMLAH	**15.007.826.106.00**	**15.400.622.042,00**	**102,62**	**14.214.425.201,00**	**8,35**

(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 53,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.760.481.006,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.941.850.366,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp941.850.366,00 atau 32,02% dengan rincian sebagaimana Tabel V.17 berikut:

Tabel V.17 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	PT Global Dharma Asri	153.881.006,00	-	-	1.164.583.221,00	(100,00)
2.	PT Bima Lukar	6.600.000,00	-	-	-	-
3.	PD Bhakti Husada	-	-	-	27.267.145,00	(100,00)
4.	PT Tambi	3.600.000.000,00	2.000.000.000,00	55,56	1.750.000.000,00	14,29
	JUMLAH	**3.760.481.006,00**	**2.000.000.000,00**	**53,18**	**2.941.850.366,00**	**(32,02)**

(3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp5.639.711.228,00 atau 101,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.552.472.422,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp4.832.075.929,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp807.635.299,00 atau 16,71%, yang dianggarkan dan direalisasikan pada Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo.

A.1.a.3).b) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

Tabel V.14 di atas menunjukkan bahwa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 tidak dianggarkan dan tidak dapat terealisasi.

A.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

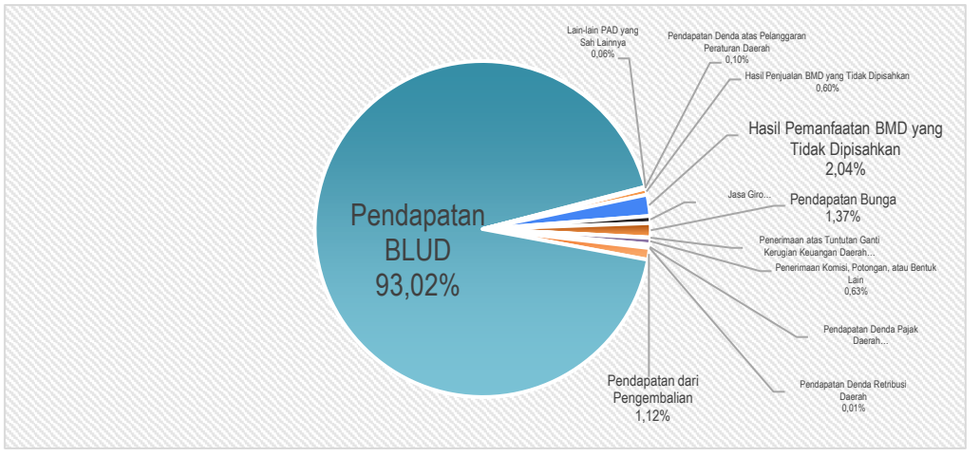
Tabel V.3 di atas menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp167.364.324.799,91 atau 95,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp175.781.248.307,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp173.553.285.121,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.188.960.321,09 atau 3,57%. Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel V.18 di bawah ini.

Tabel V.18 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	69.500.000,00	1.002.404.748,00	1.442,31	162.662.198,00	516,25
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.168.710.883,00	3.418.260.414,00	157,62	2.345.028.363,40	45,77
3.	Jasa Giro	2.800.000.000,00	1.142.639.590,00	40,81	1.542.915.020,00	(25,94)
4.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	-	-	-	-
5.	Pendapatan Bunga	8.252.482.301,00	2.285.799.744,00	27,70	6.055.542.561,00	(62,25)
6.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.000.000,00	61.212.485,00	437,23	144.850.000,00	(57,74)
7.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.379.078.498,00	1.058.133.715,00	76,73	8.100.395.080,60	(86,94)
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	209.754.523,00	-	142.832.980,00	46,85
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	334.194.606,00	-	197.465.337,00	69,24
10.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	21.408.600,00	-	25.689.700,00	(16,66)
11.	Pendapatan dari Pengembalian	2.141.231.664,00	1.876.325.804,00	87.63	76.598.712,00	2.349,55
12.	Pendapatan BLUD	158.646.244.961,00	155.687.851.448,91	98,14	154.238.335.169,00	0,94
13.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000.000,00	174.085.000,00	58,03	520.970.000,00	(66,58)
14.	Remunerasi	-	92.254.122,00	-	-	
	JUMLAH	**175.781.248.307,00**	**167.364.324.799,91**	**95,21**	**173.553.285.121,00**	**(3,57)**

Sesuai Tabel V.17, penyumbang terbesar Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Pendapatan BLUD dengan ilustrasi sebagaimana gambar berikut:

Gambar V.8 Komposisi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah



Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

A.1.a.4).a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Tabel V.18 di atas menunjukkan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp1.002.404.748,00 atau 1.442,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp69.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp162.662.198,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp839.742.550,00 atau 516,25%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.19 berikut:

Tabel V.19 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Hasil Penjualan Tanah	-	-	-	-	-
2.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	50.245.000,00	76.102.524,00	151,46	2.770.000,00	2.647,38
3.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	9.555.000,00	-	-	132.794.198,00	(100,00)
4.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	200.000,00	-	-	-	-
5.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	9.500.000,00	926.302.224,00	9.750,55	27.098.000,00	3.318,34
	JUMLAH	**69.500.000,00**	**1.002.404.748,00**	**1.442,31**	**162.662.198,00**	**516,25**

Kenaikan signifikan tersebut disebabkan karena pada TA 2023 melakukan penjualan Barang Milik Daerah yang sudah usang/rusak berat dan tidak dapat menunjang tugas pokok dan fungsi lebih banyak dibandingkan dengan TA 2022. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

A.1.a.4).b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Tabel V.18 di atas menunjukkan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp3.418.260.414,00 atau 157,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.168.710.883,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.345.028.363,40 mengalami kenaikan sebesar Rp1.073.232.050,60 atau 45,77%. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 sepenuhnya

berasal dari Hasil Sewa BMD yang direalisasikan pada beberapa entitas sebagai berikut

No.	Entitas	(Dalam Rupiah)
1.	Disparbud	236.088.500,00
2.	BPPKAD	1.081.818.314,00
3.	Kel Jlamprang	21.500.000,00
4.	Kel Kejiwan	49.939.500,00
5.	Kel Sambek	28.050.000,00
6.	Kel Mlipak	50.000.000,00
7.	Kel Pagerkukuh	46.600.000,00
8.	Kel Rojoimo	83.350.100,00
9.	Kel Kramatan	86.050.000,00
10.	Kel Tawangsari	18.800.000,00
11.	Kel Jaraksari	18.600.000,00
12.	Kel Bumireso	38.350.000,00
13.	Kel Kalianget	16.500.000,00
14.	Kel Selomerto	168.600.000,00
15.	Kel Wonorejo	106.150.000,00
16.	Kel Leksono	414.000.000,00
17.	Kel Kalikajar	49.800.000,00
18.	Kel Kaliwiro	24.750.000,00
19.	Kel Sapuran	123.100.000,00
20.	Kel Kepil	118.970.000,00
21.	Kel Kertek	106.450.000,00
22.	Kel Wringinanom	165.600.000,00
23.	Kel Kalibeber	69.685.000,00
24.	Kel Mudal	43.200.000,00
25.	Kel Andongsili	42.770.000,00
26.	Kel Garung	21.200.000,00
27.	Kel Wadaslintang	54.030.000,00
28.	Kel Kejajar	70.409.000,00
29.	Kel Wonoroto	63.900.000,00
	JUMLAH	**3.418.260.414,00**

A.1.a.4).c) Jasa Giro

Tabel V.18 di atas menunjukkan Jasa Giro TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp1.142.639.590,00 atau 40,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.800.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.542.915.020,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp400.275.430,00 atau 25,94%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.20 berikut:

Tabel V.20 Jasa Giro Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.700.000.000,00	1.091.225.929,00	40,42	1.488.596.044,00	(26,69)
2.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	51.413.661,00	51,41	54.318.976,00	(5,35)
	JUMLAH	**2.800.000.000,00**	**1.142.639.590,00**	**40,81**	**1.542.915.020,00**	**(25,94)**

Jasa Giro TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

A.1.a.4).d)Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Tabel V.18 di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2023 tidak dapat terealisasi dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 sama dengan TA 2022 juga tidak terdapat realisasi.

A.1.a.4).e) Pendapatan Bunga

Tabel V.18 di atas menunjukkan Pendapatan Bunga TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp2.285.799.744,00 atau 27,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.252.482.301,00. Selama TA 2023 Pemerintah Kabupaten Wonosobo

menempatkan sejumlah dana pada Kas di Kas Daerah dan Dana Cadangan sebagai deposito di Bank Jateng, atas penempatan tersebut didapatkan Pendapatan Bunga sebesar Rp2.285.799.744,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.21 Pendapatan Bunga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023 Realisasi (Rp)	TA 2022 Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=((3)-(4))/(4)x100
1.	Bersumber dari Kas di Kas Daerah	1.337.671.225,00	6.055.542.561,00	(77,91)
2.	Bersumber dari Dana Cadangan	948.128.519,00	-	-
	JUMLAH	**2.285.799.744,00**	**6.055.542.561,00**	**(62,25)**

Tabel V.21 realisasi diatas Pendapatan Bunga TA 2022 adalah sebesar Rp6.055.542.561,00 yang semuanya berasal dari penempatan yang bersumber dari Kas di Kas Daerah yang selama TA 2022 sebesar Rp150.000.000.000,00 dengan beberapa kali penempatan sebagai berikut:

Tabel V.22 Penempatan Deposito Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2022

No	Bulan	Tanggal Penanaman/Pencairan	Mutasi (Rp) Bertambah/Debet	Mutasi (Rp) Berkurang/Kredit	Saldo (Rp)	Penerimaan Bunga Deposito per Bulan (Rp)
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	16/02/2022	25.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00	-
		16/02/2022	25.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	-
		16/02/2022	25.000.000.000,00	-	75.000.000.000,00	-
		16/02/2022	25.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	-
3.	Maret	16/03/2022	-	-	100.000.000.000,00	95.890.410,00
		16/03/2022	-	-	100.000.000.000,00	95.890.410,00
		16/03/2022	-	-	100.000.000.000,00	95.890.410,00
		16/03/2022	-	-	100.000.000.000,00	95.890.410,00
4.	April	05/04/2022	25.000.000.000,00	-	125.000.000.000,00	-
		06/04/2022	25.000.000.000,00	-	150.000.000.000,00	-
		16/04/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		16/04/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		16/04/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		16/04/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
5.	Mei	09/05/2022	-	-	150.000.000.000,00	116.438.356,00
		09/05/2022	-	-	150.000.000.000,00	113.013.698,00
		17/05/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		17/05/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		17/05/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		17/05/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
6.	Juni	06/06/2022	-	-	150.000.000.000,00	95.890.410,00
		06/06/2022	-	-	150.000.000.000,00	95.890.410,00
		16/06/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/06/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/06/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/06/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
7.	Juli	05/07/2022	-	-	150.000.000.000,00	99.315.068,00
		06/07/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/07/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/07/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/07/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/07/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
8.	Agustus	05/08/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		06/08/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		16/08/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		16/08/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		16/08/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		16/08/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
9.	September	05/09/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		06/09/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		16/09/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		16/09/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		16/09/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		16/09/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
10.	Oktober	05/10/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		06/10/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		17/10/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		17/10/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		17/10/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		17/10/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
11.	November	05/11/2022	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
		07/11/2022	-	-	150.000.000.000,00	109.589.041,00
		16/11/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/11/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/11/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/11/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		30/11/2022	-	-	150.000.000.000,00	120.611.080,00

No	Bulan	Tanggal Penanaman/Pencairan	Mutasi (Rp) Bertambah/Debet	Berkurang/Kredit	Saldo (Rp)	Penerimaan Bunga Deposito per Bulan (Rp)
12.	Desember	05/12/2022	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		06/12/2022	-	-	150.000.000.000,00	99.315.068,00
		12/12/2022	-	25.000.000.000,00	125.000.000.000,00	20.547.945,00
		12/12/2022	-	25.000.000.000,00	100.000.000.000,00	23.972.602,00
		16/12/2022	-	-	100.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/12/2022	-	-	100.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/12/2022	-	-	100.000.000.000,00	102.739.726,00
		16/12/2022	-	-	100.000.000.000,00	102.739.726,00
		21/12/2022	-	25.000.000.000,00	75.000.000.000,00	17.123.287,00
		21/12/2022	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	17.123.287,00
		21/12/2022	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	17.123.287,00
		21/12/2022	-	25.000.000.000,00	-	17.123.287,00
	JUMLAH		**150.000.000.000,00**	**150.000.000.000,00**		**6.055.542.561,00**

Sementara itu berdasarkan Tabel V.21 diatas menunjukkan bahwa realisasi TA 2023 dari hasil penempatan deposito yang bersumber dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp1.337.671.225,00 dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.23 dibawah ini.

Tabel V.23 Penempatan Deposito Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	Bulan	Tanggal Tanam/Cair	Mutasi (Rp) Bertambah/Debet	Berkurang/Kredit	Saldo (Rp)	Penerimaan Bunga Deposito per Bulan (Rp)
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	27/02/2023	25.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00	-
		27/02/2023	25.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	-
3.	Maret	27/03/2023	-	-	50.000.000.000,00	95.890.410,00
		27/03/2023	-	-	50.000.000.000,00	95.890.410,00
4.	April	11/04/2023	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	51.369.863,00
		11/04/2023	-	25.000.000.000,00	-	51.369.863,00
5.	Mei	08/05/2023	25.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00	-
		08/05/2023	25.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	-
6.	Juni	08/06/2023	-	-	50.000.000.000,00	106.164.383,00
		08/06/2023	-	-	50.000.000.000,00	106.164.383,00
		19/06/2023	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	37.671.232,00
7.	Juli	08/07/2023	-	-	25.000.000.000,00	102.739.726,00
8.	Agustus	08/08/2023	-	-	25.000.000.000,00	106.164.383,00
9.	September	08/09/2023	-	-	25.000.000.000,00	106.164.383,00
10.	Oktober	02/10/2023	10.000.000.000,00	-	35.000.000.000,00	-
		02/10/2023	10.000.000.000,00	-	45.000.000.000,00	-
		09/10/2023	-	-	-	106.164.383,00
		17/10/2023	10.000.000.000,00	-	55.000.000.000,00	-
		25/10/2023	10.000.000.000,00	-	65.000.000.000,00	-
		25/10/2023	10.000.000.000,00	-	75.000.000.000,00	-
11.	November	03/11/2023	10.000.000.000,00	-	85.000.000.000,00	-
		08/11/2023	-	-	-	102.739.726,00
		10/11/2023	-	10.000.000.000,00	75.000.000.000,00	10.958.904,00
		17/11/2023	-	10.000.000.000,00	65.000.000.000,00	42.465.753,00
		17/11/2023	-	10.000.000.000,00	55.000.000.000,00	31.506.849,00
		28/11/2023	-	10.000.000.000,00	45.000.000.000,00	35.616.438,00
		28/11/2023	-	10.000.000.000,00	35.000.000.000,00	34.246.575,00
12.	Desember	06/12/2023	-	10.000.000.000,00	25.000.000.000,00	15.068.493,00
		07/12/2023	-	25.000.000.000,00	-	99.315.068,00
	JUMLAH		**160.000.000.000,00**	**160.000.000.000,00**		**1.337.671.225,00**

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.22 dan V.23 diatas maka terdapat penerimaan bunga deposito hampir di setiap bulan hal ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Wonosobo Tentang Penyimpanan Uang Daerah Nomor: 900/003.1/BPPKAD/2002 Nomor:11.A/PMS.04/023/2022 tanggal 3 Januari 2022, dimana ketentuan pasal 4 menyatakan bahwa bunga disetorkan paling lambat pada jatuh tempo setiap bulan ke Kas Daerah. Pada TA 2022 Deposito dicairkan ke Kas Daerah beberapa kali di bulan Desember, sedangkan pada TA 2023 Deposito dicairkan beberapa kali di bulan April, Juni, November, dan Desember sehingga dapat dikatakan pada TA 2022 jumlah kas yang mengendap di deposito lebih lama dibandingkan dengan TA 2023 maka terjadi penurunan Pendapatan Bunga yang signifikan sebesar Rp3.769.742.817,00 atau

62,25%. Pendapatan Bunga TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Tabel V.21 menunjukkan bahwa terdapat Pendapatan Bunga Deposito atas penempatan Dana Cadangan sebesar Rp948.128.519,00 dengan uraian sebagaimana Tabel V.23a sebagai berikut:

Tabel V.23a Penempatan Deposito Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA dan TA 2023

No	Tanggal	Uraian	Mutasi (Rp)		Saldo Dana Cadangan (Rp)	Penerimaan Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum daerah (Rp)	Penerimaan Bunga Deposito ke Rekening Kas Umum Daerah (Rp)
			Bertambah/Debet	Berkurang/Kredit			
1	31/10/2022	Bunga Jagir/Tabungan	4.109.597,00	-	4.109.597,00	-	-
2	02/11/2022	Tanam Deposito	10.000.000.000,00	-	10.004.109.597,00	-	-
3	22/12/2022	Tanam Deposito	5.000.000.000,00	-	15.004.109.597,00	-	-
4	30/11/2022	Bunga Jagir/Tabungan	825.406,00	-	15.004.935.003,00	-	-
5	02/12/2022	Bunga Deposito	41.095.890,00	-	15.046.030.893,00	-	-
6	11/12/2022	Bunga Jagir/Tabungan	2.091.632,00	-	15.048.122.525,00	-	-
		Saldo Per 31/12/2022			**15.048.122.525,00**	-	-
7	2/01/2023	Bunga Deposito	42.465.753,00	-	15.090.588.278,00	-	-
8	24/01/2023	Bunga Deposito	22.602.739,00	-	15.113.191.017,00	-	-
9	31/01/2023	Bunga Jagir/Tabungan	39.463,00	-	15.113.230.480,00	-	-
10	02/02/2023	Bunga Deposito	45.863.013,00	-	15.159.093.493,00	-	-
11	22/02/2023	Bunga Deposito	19.863.013,00	-	15.178.956.506,00	-	-
12	28/02/2023	Bunga Jagir/Tabungan	122.808,00	-	15.179.079.314,00	-	-
13	28/02/2023	Koreksi Kelebihan Bunga Deposito	-	3.397.260,00	15.175.682.054,00	-	-
14	03/03/2023	Bunga Deposito	38.356.164,00	-	15.214.038.218,00	-	-
15	24/03/2023	Bunga Deposito	20.547.945,00	-	15.234.586.163,00	-	-
16	31/03/2023	Bunga Jagir/Tabungan	183.613,00	-	15.234.769.776,00	-	-
17	3/04/2023	Bunga Deposito	43.835.616,00	-	15.278.605.392,00	-	-
18	27/04/2023	Bunga Deposito	23.287.671,00	-	15.301.893.063,00	-	-
19	30/04/2023	Bunga Jagir/Tabungan	227.310,00	-	15.302.120.373,00	-	-
20	2/05/2023	Bunga Deposito	39.726.027,00	-	15.341.846.400,00	-	-
21	22/05/2023	Bunga Deposito	17.123.287,00	-	15.358.969.687,00	-	-
22	31/05/2023	Bunga Jagir/Tabungan	292.392,00	-	15.359.262.079,00	-	-
23	03/06/2023	Bunga Deposito	43.835.616,00	-	15.403.097.695,00	-	-
24	22/06/2023	Bunga Deposito	21.232.876,00	-	15.424.330.571,00	-	-
25	30/06/2023	Bunga Jagir/Tabungan	320.740,00	-	15.424.651.311,00	-	-
26	3/07/2023	Bunga Deposito	41.095.890,00	-	15.465.747.201,00	-	-
27	22/07/2023	Bunga Deposito	20.547.945,00	-	15.486.295.146,00	-	-
28	31/07/2023	Bunga Jagir/Tabungan	395.560,00	-	15.486.690.706,00	-	-
29	2/08/2023	Bunga Deposito	41.095.890,00	-	15.527.786.596,00	-	-
30	22/08/2023	Bunga Deposito	21.232.876,00	-	15.549.019.472,00	-	-
31	31/08/2023	Bunga Jagir/Tabungan	464.576,00	-	15.549.484.048,00	-	-
32	2/09/2023	Bunga Deposito	42.465.753,00	-	15.591.949.801,00	-	-
33	14/09/2023	Tanam Deposito	10.000.000.000,00	-	25.591.949.801,00	-	-
34	22/09/2023	Bunga Deposito	21.232.876,00	-	25.613.182.677,00	-	-
35	30/09/2023	Bunga Jagir/Tabungan	3.228.600,00	-	25.616.411.277,00	-	-
36	2/10/2023	Bunga Deposito	41.095.890,00	-	25.657.507.167,00	-	-
37	14/10/2023	Bunga Deposito	41.095.890,00	-	25.698.603.057,00	-	-
38	23/10/2023	Bunga Deposito	21.232.876,00	-	25.719.835.933,00	-	-
39	31/10/2023	Bunga Jagir/Tabungan	579.979,00	-	25.720.415.912,00	-	-
40	2/11/2023	Bunga Deposito	42.465.753,00	-	25.762.881.665,00	-	-
41	06/11/2023	Tanam Deposito	5.000.000.000,00	-	30.762.881.665,00	-	-
42	14/11/2023	Bunga Deposito	42.465.753,00	-	30.805.347.418,00	-	-
43	22/11/2023	Bunga Deposito	20.547.945,00	-	30.825.895.363,00	-	-
44	27/11/2023	Bunga Deposito	52.054.794,00	-	30.877.950.157,00	-	-
45	27/11/2023	Pemindahbukuan ke Rekening kas Umum Daerah (RKUD)	-	10.000.000.000,00	20.877.950.157,00	10.000.000.000,00	-
46	27/11/2023	Pemindahbukuan ke RKUD	-	17.806.219,00	20.860.143.938,00	17.806.219,00	-
47	27/11/2023	Pemindahbukuan ke RKUD	-	10.000.000.000,00	10.860.143.938,00	10.000.000.000,00	-
48	27/11/2023	Pemindahbukuan	-	34.248.575,00	10.825.895.363,00	34.248.575,00	-

No	Tanggal	Uraian	Mutasi (Rp)		Saldo Dana Cadangan (Rp)	Penerimaan Dana Cadangan ke	Penerimaan Bunga Deposito
		ke RKUD					
49	30/11/2023	Bunga Jagir/Tabungan	1.469.730,00	-	10.827.365.093,00	-	-
50	6/12/2023	Bunga Deposito	20.547.945,00	-	10.847.913.038,00	-	-
51	06/12/2023	Tanam Deposito	2.017.894.800,00	-	12.865.807.838,00	(2.017.894.800,00)	-
52	6/12/2023	Bunga Deposito	52.054.794,00	-	12.917.862.632,00	(52.054.794,00)	-
53	22/12/2023	Bunga Deposito	20.547.945,00			-	-
54	29/12/2023	Bunga Deposito	26.905.694,00	-	12.965.316.271,00	-	-
55	29/12/2023	Pemindahbukuan ke RKUD	-	5.000.000.000,00	7.965.316.271,00	5.000.000.000,00	-
56	29/12/2023	Pemindahbukuan ke RKUD	-	4.794.520,00	7.960.521.751,00	-	4.794.520,00
57	29/12/2023	Pemindahbukuan ke RKUD	-	5.000.000.000,00	2.960.521.751,00	5.000.000.000,00	-
58	29/12/2023	Pemindahbukuan ke RKUD	-	15.753.424,00	2.944.768.327,00	-	15.753.424,00
59	29/12/2023	Pemindahbukuan ke RKUD	-	2.017.894.800,00	926.873.527,00	2.017.894.800,00	-
60	29/12/2023	Pemindahbukuan ke RKUD	-	6.357.750,00	920.515.777,00	-	6.357.750,00
61	29/12/2023	Pemindahbukuan ke RKUD	-	920.515.777,00	-	-	920.515.777,00
62	31/12/2023	Bunga Jagir/Tabungan	707.048,00	-	707.048,00	-	-
63	31/12/2023	Bunga Jagir/Tabungan	-	707.048,00	-	-	707.048,00
			33.021.475.373,00	**33.021.475.373,00**		**30.000.000.000,00**	**948.128.519,00**

Catatan: Pada TA 2023 akan dilakukan penarikan Dana cadangan sebesar Rp17.982.105.200,00 yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 sebagai berikut:

a)	KPU Kabupaten Wonosobo	Rp14.156.505.200,00
b)	BAWASLU Kabupaten Wonosobo	Rp3.825.600.000,00
	Jumlah a) + b)	Rp17.982.105.200,00

Namun pada tanggal 27 November 2023 yang dicairkan adalah sejumlah Rp20.052.054.794,00 (baris 45 s/d 48) termasuk di dalamnya pokok dan bunga sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp2.069.949.594,00 sebagai berikut:

a)	Jumlah total yang dicairkan ke RKUD	Rp20.052.054.794,00
b)	Jumlah yang akan dihibahkan ke KPU dan Bawaslu	Rp17.982.105.200,00
	Sisa a) – b)	Rp2.069.949.594,00

Sehingga atas sisa sebesar Rp2.069.949.594,00 termasuk pokok dan bunga dikembalikan lagi ke Dana Cadangan pada tanggal 6 Desember 2023 (lihat baris no. 51 dan 52)

A.1.a.4).f) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Tabel V.18 di atas menunjukkan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp61.212.485,00 atau 437,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp144.850.000,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp83.637.515,00 atau 57,74%. Penurunan tersebut disebabkan oleh karena pada TA 2023 sisa yang harus dilunasi oleh pihak yang menanggung beban Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian semakin berkurang serta pada TA 2023 tidak ada penambahan pembebanan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

A.1.a.4).g) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Tabel V.18 di atas menunjukkan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp1.058.133.715,00 atau 76,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.379.078.498,00, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp8.100.395.080,60 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp7.042.261.365,60 atau 86,94%. Penurunan tersebut dikarenakan pada TA 2022 pendapatan yang merupakan temuan hasil pemeriksaan direalisasikan pada Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sedangkan pada TA 2023 direalisasikan pada akun Pendapatan dari Pengembalian. Penerimaan Komisi,

Potongan, atau Bentuk Lain TA 2023 direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

A.1.a.4).h) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Tabel V.18 di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp209.754.523,00 meskipun tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp142.832.980,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp66.921.543,00 atau 46,85%. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

A.1.a.4).i) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Tabel V.18 di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp334.194.606,00 meskipun tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp197.465.337,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp136.729.269,00 atau 69,24%. Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2023 direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

A.1.a.4).j) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Tabel V.18 di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp21.408.600,00 meskipun tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp25.689.700,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp4.281.100,00 atau 16,66%. Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2023 direalisasikan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan.

A.1.a.4).k)Pendapatan dari Pengembalian

Tabel V.18 di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp1.876.325.804,00 atau 87,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.141.231.664,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp76.598.712,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.799.727.092,00 atau 2.349,55%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh karena pada TA 2022 hanya merupakan realisasi pengembalian atas kelebihan belanja pegawai tahun sebelumnya sedangkan pada TA 2023 termasuk juga realisasi pengembalian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pendapatan dari pengembalian direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

A.1.a.4).l) Pendapatan BLUD

Tabel V.18 di atas menunjukkan Pendapatan BLUD TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp155.687.851.448,91 atau 98,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp158.646.244.961,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp154.238.335.169,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp1.449.516.279,91 atau 0,94%. Rincian Lebih Lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.1.

A.1.a.4).m) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Tabel V.18 di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp174.085.000,00 atau 58,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kemudian pada TA 2023 diterbitkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan Kependudukan yang mulai diberlakukan tanggal 5 Mei 2023, sehingga pengenaan denda pada TA 2023 berakhir pada tanggal tersebut. Terkait dengan hal tersebut maka realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2023 sebesar Rp174.085.000,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp346.885.000,00 atau 66,58% dibandingkan dengan TA 2022 terealisasi sebesar Rp520.970.000,00.

A.1.a.4).n)Remunerasi

Tabel V.18 di atas menunjukkan Remunerasi TA 2023 yang dapat terealisasikan sebesar Rp92.254.122,00 meskipun tidak dianggarkan, Remunerasi tersebut merupakan Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui TDF dan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 telah menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam APBD. Realisasi sebesar Rp92.254.122,00 tersebut termasuk didalamnya penerimaan atas piutang remunerasi TDF per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.101.727,74. Sementara itu Remunerasi TA 2022 tidak terealisasikan dan tidak dianggarkan dikarenakan belum diterapkannya penyaluran secara nontunai melalui fasilitas TDF.

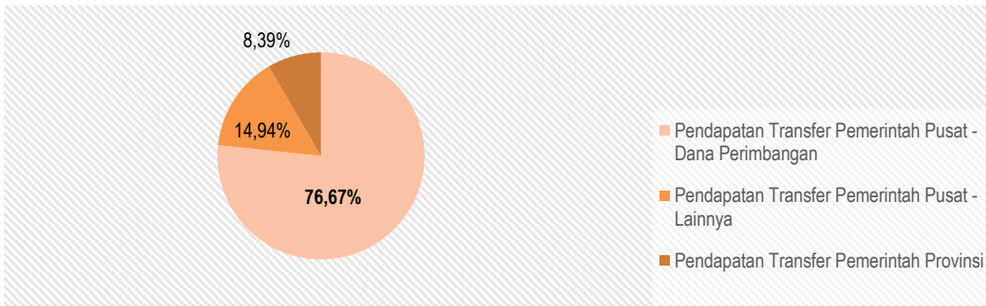
A.1.b. Pendapatan Transfer

Tabel V.2 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp1.741.044.164.795,00 atau 99,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.753.866.111.012,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.613.305.969.070,00 mengalami kenaikan sebesar Rp127.738.195.725,00 atau 7,92%. Pendapatan Transfer dianggarkan dan direalisasikan di BPPKAD dengan rincian dapat dilihat pada Tabel V.24 berikut.

Tabel V.24 Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.331.855.357.236,00	1.334.827.545.401,00	100,22	1.174.887.470.694,00	13,61
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	260.174.448.000,00	260.174.448.000,00	100,00	225.391.858.000,00	15,43
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	161.836.305.776,00	146.042.171.394,00	90,24	213.026.640.376,00	(31,44)
	JUMLAH	**1.753.866.111.012,00**	**1.741.044.164.795,00**	**99,27**	**1.613.305.969.070,00**	**7,92**

Penyumbang terbesar Pendapatan Transfer TA 2023 adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sedangkan yang terkecil adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.9 sebagai berikut.



Gambar V.9 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

A.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

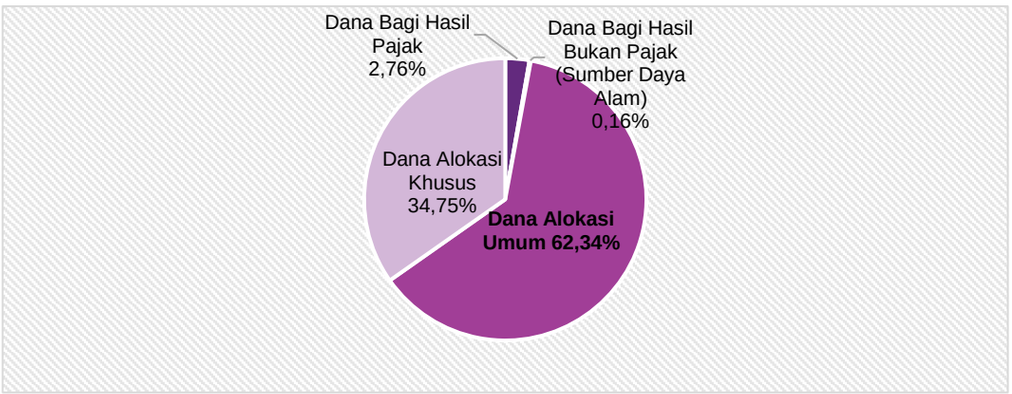
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tabel V.24 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp1.334.827.545.401,00 atau 100,22% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.331.855.357.236,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.174.887.470.694,00, mengalami kenaikan sebesar Rp159.940.074.707,00 atau 13,61%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.25 berikut:

Tabel V.25 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	36.777.428.277,00	36.777.428.277,00	100,00	39.228.649.450,00	(6,25)
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.159.463.211,00	2.159.463.211,00	100,00	4.459.088.779,00	(51,57)
3.	Dana Alokasi Umum	820.114.945.000,00	832.084.548.325,00	101,46	790.688.710.540,00	5,24
4.	Dana Alokasi Khusus	472.803.520.748,00	463.806.105.588,00	98,10	340.511.021.925,00	36,21
	JUMLAH	**1.331.855.357.236,00**	**1.334.827.545.401,00**	**100,22**	**1.174.887.470.694,00**	**13,61**

Penyumbang terbesar Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum dan yang terkecil adalah Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebagaimana ilustrasi pada Gambar V.10 di bawah ini:



Gambar V.10 Komposisi RealisasiPendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

A.1.b.1).a) Dana Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Tabel V.25 di atas menunjukkan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp36.777.428.277,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp36.777.428.277,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp39.228.649.450,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp2.451.221.173,00 atau 6,25%, dengan rincian sebagaimana tabel V.26 berikut.

Tabel V.26 Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.079.353.164,00	6.079.353.164,00	100,00	12.280.469.903,00	(50,50)
2.	DBH PPh Pasal 21	11.014.221.464,00	11.014.221.464,00	100,00	10.991.589.511,00	0,21
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	867.079.302,00	867.079.302,00	100,00	1.327.273.773,00	(34,67)
4.	DBH Cukai	18.816.774.347,00	18.816.774.347,00	100,00	14.629.316.263,00	28,62
	JUMLAH	**36.777.428.277,00**	**36.777.428.277,00**	**100,00**	**39.228.649.450,00**	**(6,25)**

A.1.b.1).b) Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non

penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Tabel V.25 di atas menunjukkan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp2.159.463.211,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.159.463.211,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp4.459.088.779,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp2.299.625.568,00 atau 51,57%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.23 di bawah ini:

Tabel V.27 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	24.662.996,00	24.662.996,00	100,00	68.880.379,00	(64,19)
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	161.405.345,00	161.405.345,00	100,00	394.616.382,00	(59,10)
3.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	40.154.453,00	40.154.453,00	100,00	1.512.989.466,00	(97,35)
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	219.568,00	219.568,00	100,00	-	-
5.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	-	-	1.659.085,00	(100,00)
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	434.518.638,00	434.518.638,00	100,00	522.632.467,00	(16,86)
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.498.502.211,00	1.498.502.211,00	100,00	1.958.311.000,00	(23,48)
	JUMLAH	**2.159.463.211,00**	**2.159.463.211,00**	**100,00**	**4.459.088.779,00**	**(51,57)**

A.1.b.1).c)Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp820.114.945.000,00 yang terdiri dari:

			(Dalam Rupiah)
	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	**:**	**546.632.258,00**
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	:	546.632.258,00
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	**:**	**273.482.687,00**
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	:	55.131.330,00
	Penggajian Formasi PPPK	:	5.800.000,00
	Pendanaan Kelurahan	:	119.809.743,00
	Bidang Pendidikan	:	51.587.621,00
	Bidang Kesehatan	:	41.153.993,00
	Bidang Pekerjaan Umum	:	55.131.330,00
			820.114.945,00

Tabel V.25 di atas menunjukkan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp832.084.548.325,00 atau 101,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp820.114.945.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp790.688.710.540,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp41.395.837.785,00 atau 5,24%. Pada TA 2023 DAU yang Tidak Ditentukan

Penggunaannya Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan sejumlah Rp558.601.861.325,00 dengan perhitungan:

			(Dalam Rupiah)
1	Kotor	:	558.744.272.000,00
2	Potongan (-)	:	142.410.675,00
	Bersih		**558.601.861.325,00**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pasal 33 ayat (7) menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa Dana Alokasi Khusus di RKUD Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan dana alokasi umum/atau dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 ayat (8) menyatakan Besaran sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Daerah dan/atau berita acara penghitungan sisa dana. Potongan DAU sebesar Rp142.410.675,00 tersebut berasal dari:

			(Dalam Rupiah)
1	Sisa DAK non fisik bidang Dukcapil sebesar di kas daerah. (Selisih salur dan SP2D).	:	1.749.254,00
2	Sisa DAK non fisik Th 2021 dan 2022 bidang KPPPA di kas daerah (selisih salur dengan SP2D)	:	140.661.421,00
			142.410.675,00

A.1.b.1).d)Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

Tabel V.25 di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp463.806.105.588,00 atau 98,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp472,803,520,748.00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp340.511.021.925,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp123.295.083.663,00 atau 36,21% dengan rincian sebagaimana tabel V.28 berikut:

Tabel V.28 Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	168.174.552.000,00	161.079.696.095,00	95,78	67.940.718.381,00	137,09
2.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	304.628.968.748,00	302.726.409.493,00	99,38	272.570.303.544,00	11,06
	JUMLAH	**472.803.520.748,00**	**463.806.105.588,00**	**98,10**	**340.511.021.925,00**	**36,21**

1. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Tabel V.28 diatas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp161.079.696.095,00 atau 95,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp168.174.552.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp67.940.718.381,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar

Rp93.138.977.714,00 atau 137,09% dengan rincian sebagaimana tabel V.29 berikut:

Tabel V.29 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	459.127.000,00	446.727.000,00	97,30	-	-
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.672.689.000,00	8.446.481.600,00	97,39	10.666.489.250,00	(20,81)
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.966.722.000,00	5.804.551.952,00	97,28	5.836.866.690,00	(0,55)
4.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	16.735.474.260,00	(100,00)
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	4.935.614.181,00	(100,00)
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	-	-	-	982.050.000,00	(100,00)
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	7.665.628.000,00	7.615.835.000,00	99,35	-	-
8.	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	-	-	2.736.650.000,00	(100,00)
9.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.777.873.000,00	4.681.806.752,00	97,99	-	-
10.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	16.173.609.000,00	15.933.687.950,00	98,52	-	-
11.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	3.777.837.000,00	3.738.416.550,00	98,96	-	-
12.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	9.738.359.000,00	8.398.747.000,00	86,24	-	-
13.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	10.148.000.000,00	(100,00)
14.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	55.209.672.000,00	54.854.280.000,00	99,36	-	-
15.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	-	8.025.747.000,00	(100,00)
16.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	11.096.845.000,00	11.096.845.000,00	100,00	-	-
17.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	-	-	7.873.827.000,00	(100,00)
18.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	14.115.459.000,00	14.115.459.000,00	100,00	-	-
19.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.361.663.000,00	6.973.477.000,00	94,73	-	-
20.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.634.694.000,00	1.492.500.000,00	91,30	-	-
21.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.058.201.000,00	1.014.250.000,00	95,85	-	-
22.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.396.170.000,00	1.385.480.000,00	99,23	-	-
23.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	19.070.004.000,00	15.081.151.291,00	79,08	-	-
	JUMLAH	**168.174.552.000,00**	**161.079.696.095,00**	**95,78**	**67.940.718.381,00**	**137,09**

2. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Tabel V.24 diatas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp302.726.409.493,00 atau 99,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp304.628.968.748,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar

Rp272.570.303.544,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp30.156.105.949,00 atau 11,06% dengan rincian sebagaimana tabel V.30 berikut:

Tabel V.30 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	90.520.494.448,00	90.209.560.332,00	99,66	89.094.799.904,00	1,25
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.040.000.000,00	4.040.000.000,00	100,00	-	-
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	143.643.393.000,00	142.786.512.354,00	99,40	134.912.283.430,00	5,84
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.934.844.000,00	3.034.810.552,00	77,13	4.420.260.000,00	(31,34)
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	66.367.000,00	66.367.000,00	100,00	440.625.648,00	(84,94)
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	14.519.400.000,00	14.556.788.955,00	100,26	14.586.519.000,00	(0,20)
7.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.935.667.772,00	4.063.567.772,00	103,25	3.329.100.000,00	22,06
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	30.561.906.862,00	30.561.906.862,00	100,00	17.196.316.770,00	77,72
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.609.385.664,00	8.609.385.664,00	100,00	7.622.999.992,00	12,94
10.	DAK Non Fisik-PK2UKM	398.797.263,00	398.797.263,00	100,00	347.132.000,00	14,88
11.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.048.405.239,00	1.048.405.239,00	100,00	341.318.100,00	207,16
12.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	288.482.500,00	288.482.500,00	100,00	80.090.700,00	260,19
13.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	92.358.000,00	-
14.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	311.825.000,00	311.825.000,00	100,00	106.500.000,00	192,79
15.	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00	-	-
	JUMLAH	**304.628.968.748,00**	**302.726.409.493,00**	**99,38**	**272.570.303.544,00**	**11,06**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Dana BOS dianggarkan pada rekening Pendapatan Transfer-DAK Non Fisik-BOS Reguler.

A.1.b.2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Tabel V.24 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp260.174.448.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp260.174.448.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp225.391.858.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp34.782.590.000,00 atau 15,43%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya merupakan DID dan Dana Desa dengan rincian sebagaimana tabel V.31 berikut:

Tabel V.31 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Dana Insentif Daerah	13.020.711.000,00	13.020.711.000,00	100,00	3.506.837.000,00	271,30
2.	Dana Desa	247.153.737.000,00	247.153.737.000,00	100,00	221.885.021.000,00	11,39
	JUMLAH	**260.174.448.000,00**	**260.174.448.000,00**	**100,00**	**225.391.858.000,00**	**15,43**

A.1.b.2).a) Dana Insentif Daerah

Tabel V.31 diatas menunjukan Dana Insentif Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 terealisasi sebesar Rp13.020.711.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.020.711.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terealisasi sebesar Rp3.506.837.000,00, cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp9.513.874.000,00 atau 271,30%. Kenaikan tersebut disebabkan karena pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan penilaian dari Pemerintah Pusat sehingga mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal (DIF) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97

Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023, pada:

(1) Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem;

(2) Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan kinerja penurunan *stunting*;

Atas PMK tersebut diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang diterbitkan tanggal 2 Oktober 2023, sebagai penghargaan kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi sebesar Rp13.020.711.000,00 dengan rincian:

			(Dalam Rupiah)
(1)	Kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem	:	6.889.447.000,00
(2)	Kategori kinerja penurunan *stunting*	:	6.131.264.000,00
	Jumlah (1) + (2)		**13.020.711.000,00**

Alokasi tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah melalui 2 (dua) tahap yaitu:

			(Dalam Rupiah)
(1)	Tahap I tanggal 23/10/2023	:	6.510.355.500,00
(2)	Tahap II tanggal 13/12/2023	:	6.510.355.500,00
	Jumlah (1) + (2)		**13.020.711.000,00**

Atas Dana Insentif Fiskal tersebut digunakan untuk menggantikan sumber anggaran kegiatan yang sesuai dengan penandaan kegiatan pada PMK Nomor 97 Tahun 2023 pada Penetapan APBD 2023, dan dialihkan untuk kegiatan lain pada Perubahan APBD 2023. tersebut digunakan untuk menggantikan sumber anggaran kegiatan yang sesuai dengan penandaan kegiatan pada PMK Nomor 97 Tahun 2023 pada Penetapan APBD 2023, dan dialihkan untuk kegiatan lain pada Perubahan APBD 2023 antara lain yaitu :

(1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp2.100.000.000,00;

(2) Pengelolaan Sampah dengan anggaran Rp1.522.550.860,00.

A.1.b.2).b)Dana Desa

Tabel V.31 diatas menunjukan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp247.153.737.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp247.153.737.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp221.885.021.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.268.716.000,00 atau 11,39%. Penyaluran Dana Desa adalah secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengakui Dana Desa yang Bersumber dari APBN-LRA berdasarkan SP2DD sebagai berikut :

				(Dalam Rupiah)
(1)	001/DD/THP1/2023	Tanggal 31 Mei 2023	:	90.421.834.950,00
(2)	002/DD/THP2/2023	Tanggal 28 Agustus 2023	:	81.585.743.650,00
(3)	003/DD/THP3/2023	Tanggal 29 Desember 2023	:	75.146.158.400,00
	Jumlah (1) s/d (3)			**247.153.737.000,00**

A.1.b.3) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Tabel V.24 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp146.042.171.394,00 atau 90,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp161.836.305.776,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp213.026.640.376,00 mengalami penurunan sebesar Rp66.984.468.982,00 atau 31,44%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.32 di bawah ini.

Tabel V.32 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	139.571.305.776,00	123.940.726.171,00	88,80	121.815.108.966,00	1,74
2.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	22.265.000.000,00	22.101.445.223,00	99,27	91.211.531.410,00	(75,77)
	JUMLAH	**161.836.305.776,00**	**146.042.171.394,00**	**90,24**	**213.026.640.376,00**	**(31,44)**

A.1.b.3).a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Tabel V.32 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp123.940.726.171,00 atau 88,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp139.571.305.776,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp121.815.108.966,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.125.617.205,00 atau 1,74%, secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel V.33 di bawah ini.

Tabel V.33 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	38.153.119.310,00	31.290.160.191,00	82,01	30.569.780.204,00	2,36
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.000.578.131,00	15.432.360.129,00	73,49	15.468.017.728,00	(0,23)
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.227.303.245,00	26.962.317.621,00	92,25	24.563.628.575,00	9,77
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	464.556.099,00	318.340.752,00	68,53	290.514.477,00	9,58
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	50.725.748.991,00	49.937.547.478,00	98,45	50.923.167.982,00	(1,94)
	JUMLAH	**139.571.305.776,00**	**123.940.726.171,00**	**88,80**	**121.815.108.966,00**	**1,74**

A.1.b.3).b) Bantuan Keuangan dari Provinsi

Tabel V.32 di atas menunjukkan bahwa Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp22.101.445.223,00 atau 99,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.265.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp91.211.531.410,00, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp69.110.086.187,00 atau 75,77%, hal ini disebabkan karena berdasarkan penetapan alokasi sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebesar Rp94.510.000.000,00 dan direalisasikan sebesar

Rp91.211.531.410,00 sedangkan pada TA 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp22.265.000.000,00 dan direalisasikan Rp22.101.445.223,00. secara rinci Bantuan Keuangan dari Provinsi dapat dilihat sebagaimana Tabel V.34 di bawah ini.

Tabel V.34 Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	22.265.000.000,00	22.101.445.223,00	99,27	91.211.531.410,00	(75,77)
2.	TMMD	-	-	-	-	
	JUMLAH	**22.265.000.000,00**	**22.101.445.223,00**	**99,27**	**91.211.531.410,00**	**(75,77)**

Jika dilihat lebih lanjut, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi pada tabel V.34 diatas sebesar Rp22.101.445.223,00 sudah termasuk TMDD sebesar Rp760.000.000,00 yang diterima RKUD pada tanggal 18 April 2023. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.2.

A.1.c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tabel V.2 di atas menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp49.177.364.845,00 atau 97,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.544.912.420,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp42.940.464.079,00, Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.236.900.766,00 atau 14,52%. Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari beberapa jenis dengan rincian sebagaimana Tabel V.35 di bawah ini.

Tabel V.35 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Hibah	50.544.912.420,00	49.177.364.845,00	97,29	42.940.464.079,00	14,52
2.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**50.544.912.420,00**	**49.177.364.845,00**	**97,29**	**42.940.464.079,00**	**14,52**

A.1.c.1) Pendapatan Hibah

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah, yang dimaksud Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Tabel V.35 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp49.177.364.845,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.544.912.420,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp42.940.464.079,00, mengalami penurunan sebesar Rp6.236.900.766,00, atau 14,52%, untuk rinciannya dapat dilihat pada Tabel V.36 berikut:

Tabel V.36 Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	49.714.912.420,00	48.671.356.930,00	97,90	42.455.680.394,00	14,64
2.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	830.000.000,00	506.007.915,00	60,96	484.783.685,00	4,38
	JUMLAH	**50.544.912.420,00**	**49.177.364.845,00**	**97,29**	**42.940.464.079,00**	**14,52**

A.1.c.1).a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Tabel V.36 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp48.671.356.930,00 atau 97,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.714.912.420,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp42.455.680.394,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp6.215.676.536,00 atau 14,64%, dengan rincian sebagaimana tabel V.37 berikut.

Tabel V.37 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Hibah Jalan Daerah	30.916.539.809,00	35.170.444.930,00	113,76	31.055.780.394,00	13.25
2.	Hibah Sanitasi	5.544.000.000,00	6.930.000.000,00	125,00	3.000.000.000,00	131,00
3.	Hibah Terusan PDAM (Kinerja) / AMBK	2.580.000.000,00	2.070.912.000,00	80,27	2.399.900.000,00	(13,71)
4.	Hibah Terusan PDAM	-	-	-	6.000.000.000,00	(100,00)
5.	Hbah Air Minum Perkotaan	7.420.000.000,00	4.500.000.000,00	60,65	-	-
6.	Hibah Insentif institusi	3.254.372.611,00	-	-	-	-
	JUMLAH	**49.714.912.420,00**	**48,671,356,930.00**	**97.90**	**42,455,680,394.00**	**14.64**

A.1.c.1).b) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri

Tabel V.36 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp506.007.915,00 atau 60,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp830.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terealisasi sebesar Rp484.783.685,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp21.224.230,00 atau 4,38%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.38 di bawah ini.

Tabel V.38 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	830.000.000,00	506.007.915,00	60,96	484.783.685,00	4,38
2.	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**830.000.000,00**	**506.007.915,00**	**60,96**	**484.783.685,00**	**4,38**

(1) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri

Tabel V.38 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp506.007.915,00 atau 60,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp830.000.000,00, sedangkan TA 2022 terealisasi sebesar Rp484.783.685,00. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri berasal dari PT Geo Dipa Energi.

(2) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

Tabel V.38 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 tidak terdapat anggaran maupun realisasi.

A.2. BELANJA

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sebagaimana ditunjukkan Tabel V.1 diatas Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo terealisasi sebesar Rp2.105.985.875.749,00 atau 95,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.210.013.276.667,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.011.113.250.458,00 mengalami kenaikan sebesar Rp94.872.625.291,00 atau 4,72% dengan uraian lebih lanjut sebagaimana tabel V.39 dibawah ini.

Tabel V.39 Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

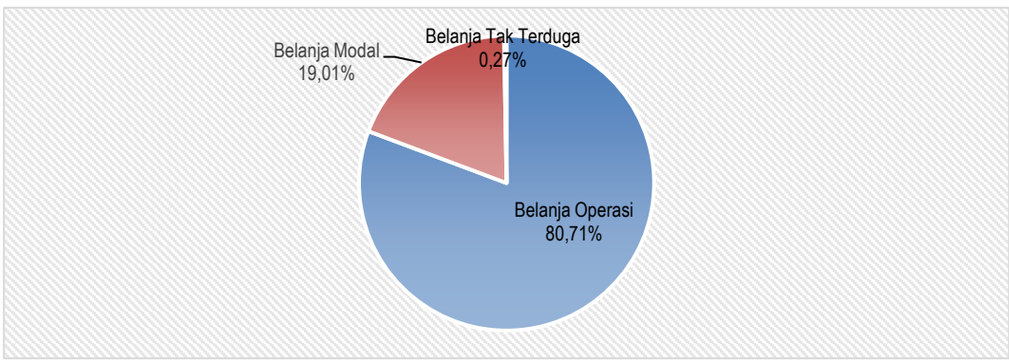
No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja	1.839.194.168.097,00	1.735.166.767.179,00	94,34	1.674.857.583.547,00	3,60
2.	Transfer	370.819.108.570,00	370.819.108.570,00	100,00	336.255.666.911,00	10,28
JUMLAH		**2.210.013.276.667,00**	**2.105.985.875.749,00**	**95,29**	**2.011.113.250.458,00**	**4,72**

Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp1.735.166.767.179,00 atau 94,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.839.194.168.097,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.674.857.583.547,00 mengalami kenaikan sebesar Rp60.309.183.632,00 atau 3,60%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.40 berikut.

Tabel V.40 Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Operasi	1.484.311.311.183,00	1.400.523.258.948,00	94,36	1.307.527.310.750,00	7,11
2.	Belanja Modal	349.382.856.914,00	329.902.098.408,00	94,42	363.437.214.857,00	(9,23)
3.	Belanja Tak Terduga	5.500.000.000,00	4.741.409.823,00	86,21	3.893.057.940,00	21,79
JUMLAH		**1.839.194.168.097,00**	**1.735.166.767.179,00**	**94,34**	**1.674.857.583.547,00**	**3,60**

Realisasi terbesar Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Belanja Operasi sedangkan yang terkecil adalah Belanja Tak Terduga, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.11 berikut:



Gambar V.11 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

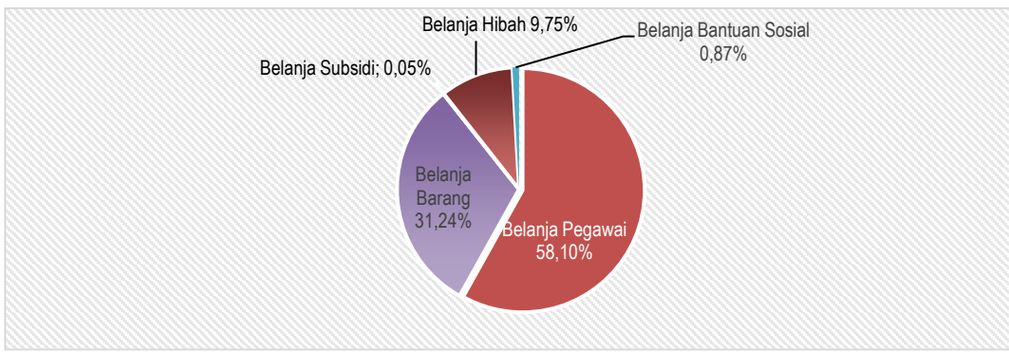
A.2.a Belanja Operasi

Tabel V.40 di atas menunjukkan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp1.400.523.258.948,00 atau 94,36% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.484.311.311.183,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.307.527.310.750,00 mengalami kenaikan sebesar Rp92.995.948.198,00 atau 7,11%. Rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.41 berikut.

Tabel V.41 Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Pegawai	870.672.836.879,00	813.687.908.377,00	93,46	749.466.368.775,00	8,57
2.	Belanja Barang	462.160.694.544,00	437.524.507.656,00	94,67	462.017.483.572,00	(5,30)
3.	Belanja Subsidi	842.880.000,00	638.215.332,00	75,72	227.138.667,00	180,98
4.	Belanja Hibah	138.351.699.760,00	136.542.227.583,00	98,69	81.490.740.096,00	67,56
5.	Belanja Bantuan Sosial	12.283.200.000,00	12.130.400.000,00	98,76	14.325.579.640,00	(15,32)
	JUMLAH	**1.484.311.311.183,00**	**1.400.523.258.948,00**	**94,36**	**1.307.527.310.750,00**	**7,11**

Penyumbang terbesar Belanja Operasi TA 2023 adalah Belanja Pegawai sedangkan yang terkecil adalah Belanja Subsidi, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.12 sebagai berikut.



Gambar V.12 Komposisi Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

A.2.a.1) Belanja Pegawai

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel V.41 di atas menunjukkan realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp813.687.908.377,00 atau 93,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp870.672.836.879,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp749.466.368.775,00 mengalami kenaikan sebesar Rp64.221.539.602,00, atau 8,57%, rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.42 berikut:

Tabel V.42 Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	517.632.804.512,00	472.179.109.409,00	91,22	463.143.125.072,00	1,95
2.	Belanja Tambahan Penghasilan	80.476.473.208,00	75.819.767.452,00	94,21	77.085.659.638,00	(1,64)

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
	ASN					
3.	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	152.766.675.992,00	146.970.845.046,00	96,21	148.488.978.514,00	(1,02)
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.632.849.594,00	24.330.027.690,00	98,77	23.413.590.458,00	3,91
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	734.716.437,00	480.667.576,00	65,42	438.670.576,00	9,57
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	889.800.000,00	852.000.000,00	95,75	852.000.000,00	-
7.	Belanja Pegawai BLUD	93.539.517.136,00	93.055.491.204,00	99,48	36.044.344.517,00	158,17
	JUMLAH	**870.672.836.879,00**	**813.687.908.377,00**	**93,46**	**749.466.368.775,00**	**8,57**

A.2.a.1).a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Tabel V.42 di atas menunjukkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2023 sebesar Rp472.179.109.409,00 atau 91,22% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp517.632.804.512,00. Mengalami kenaikan sebesar 1,95% atau Rp9.035.984.337,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp463.143.125.072,00.

A.2.a.1).b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Tabel V.42 di atas menunjukkan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2023 sebesar Rp75.819.767.452,00 atau 94,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp80.476.473.208,00. Mengalami penurunan sebesar 1,64% atau Rp1.265.892.186,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp77.085.659.638,00.

A.2.a.1).c) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel V.42 di atas menunjukkan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2023 sebesar Rp146.970.845.046,00 atau 96.21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp152.766.675.992,00. Mengalami penurunan sebesar 1,02% atau Rp1.518.133.468,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp148.488.978.514,00.

A.2.a.1).d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Tabel V.42 di atas menunjukkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 sebesar Rp24.330.027.690,00 atau 98,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp24.632.849.594,00. Mengalami kenaikan sebesar 3,91% atau Rp916.437.232,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp23.413.590.458,00.

A.2.a.1).e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Tabel V.42 di atas menunjukkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023 sebesar Rp480.667.576,00 atau 65,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp734.716.437,00. Mengalami kenaikan sebesar 9,57% atau Rp41.997.000,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp438.670.576,00.

A.2.a.1).f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Tabel V.42 di atas menunjukkan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2023 sebesar Rp852.000.000,00 atau 95,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp889.800.000,00. Realisasi TA 2022 sebesar Rp852.000.000,00. Tidak mengalami kenaikan dan penurunan karena jumlah sama dan stagnan.

A.2.a.1).g) Belanja Pegawai BLUD

Tabel V.42 di atas menunjukkan realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2023 sebesar Rp93.055.491.204,00 atau 99,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp93.539.517.136,00. Mengalami kenaikan signifikan sebesar 158,17% atau Rp57.011.146.687,00 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp36.044.344.517,00. Kenaikan tersebut disebabkan khususnya di RSUD KRT Setjonegoro pada TA 2022 beberapa Belanja dianggarkan dan direalisasikan di Belanja Barang Dan Jasa BLUD namun pada TA 2023 direalisasikan di Belanja Pegawai BLUD.

Uraian Belanja Pegawai untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per entitas dapat dilihat pada Lampiran V.3.

A.2.a.2) Belanja Barang

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Tabel V.41 di atas menunjukkan realisasi Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp437.524.507.656,00 atau 94,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp462.160.694.544,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp462.017.483.572,00, mengalami penurunan sebesar Rp24.492.975.916,00 atau 5,30%, rincian lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel V.43 sebagai berikut.

Tabel V.43 Rincian Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Barang	100.670.116.416,00	90.035.856.751,00	89,44	63.600.717.792,00	41,56
2.	Belanja Jasa	158.727.262.990,00	152.379.386.113,00	96,00	147.170.671.677,00	3,54
3.	Belanja Pemeliharaan	20.488.518.587,00	19.944.422.607,00	97,34	21.570.463.603,00	(7,54)
4.	Belanja Perjalanan Dinas	46.338.883.317,00	43.011.055.233,00	92,82	36.357.027.986,00	18,30
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.763.870.000,00	1.626.758.404,00	92,23	1.283.150.737,00	26,78
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.115.777.559,00	62.151.322.542,00	98,47	63.440.638.582,00	(2,03)
7.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.056.265.675,00	68.375.706.006,00	96,23	128.594.813.195,00	(46,83)
	JUMLAH	**462.160.694.544,00**	**437.524.507.656,00**	**94,67**	**462.017.483.572,00**	**(5,30)**

Uraian Belanja Barang untuk masing-masing sub rincian obyek dan realisasi per entitas dapat dilihat pada Lampiran V.4.

A.2.a.2).a) Belanja Barang

Tabel V.43 diatas menunjukkan Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp90.035.856.751,00 atau 89,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.670.116.416,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp63.600.717.792,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.435.138.959,00 atau 41,56%, dengan rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.44 dibawah ini.

Tabel V.44 Rincian Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Barang Pakai Habis	100.662.616.416,00	90.028.356.751,00	89,44	63.600.717.792,00	41,55
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-	-
	JUMLAH	**100.670.116.416,00**	**90.035.856.751,00**	**89,44**	**63.600.717.792,00**	**41,56**

1. Belanja Barang Pakai Habis

Tabel V.44 diatas menunjukkan Belanja Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 terealisasi sebesar Rp90.028.356.751,00 atau 89,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.662.616.416,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp63.600.717.792,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.427.638.959,00 atau 41,55%. Uraian Belanja Barang Pakai Habis lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

2. Belanja Barang Tak Habis Pakai

Tabel V.44 diatas menunjukkan Belanja Barang Tak Habis Pakai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 terealisasi sebesar Rp7.500.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.500.000,00, sedangkan TA 2022 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi. Uraian Belanja Barang Tak Pakai Habis lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

A.2.a.2).b) Belanja Jasa

Tabel V.43 diatas menunjukkan Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp152.379.386.113,00 atau 96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp158.727.262.990,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp147.170.671.677,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.208.714.436,00 atau 3,54%, dengan rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.45 berikut.

Tabel V.45 Rincian Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Jasa Kantor	111.821.221.391,00	106.834.629.696,00	95,54	114.045.245.254,00	(6,32)
2.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.377.529.357,00	33.871.141.435,00	98,53	22.819.205.519,00	48,43
3.	Belanja Sewa Tanah	144.786.000,00	132.270.000,00	91,36	235.200.000,00	(43,76)
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.999.443.510,00	2.862.428.092,00	95,43	1.515.480.053,00	88,88
5.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.410.198.581,00	1.214.293.945,00	86,11	1.413.215.758,00	(14,08)
6.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	-	-
7.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	102.055.247,00	97.674.625,00	95,71	118.523.789,00	(17,59)
8.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.597.890.350,00	1.506.478.994,00	94,28	3.147.966.410,00	(52,14)
9.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.047.708.754,00	3.786.198.627,00	93,54	2.776.011.794,00	36,39
10.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.437.328.800,00	1.328.888.341,00	92,46	409.969.000,00	224,14
11.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	645.901.000,00	602.182.358,00	93,23	689.854.100,00	(12,71)
12.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	120.200.000,00	120.200.000,00	100.00	-	-
	JUMLAH	**158.727.262.990,00**	**152.379.386.113,00**	**96,00**	**147.170.671.677,00**	**3,54**

1. Belanja Jasa Kantor

Tabel V.45 diatas menunjukkan Belanja Jasa Kantor Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp106.834.629.696,00 atau 95,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp111.821.221.391,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp114.045.245.254,00 mengalami penurunan

sebesar Rp7.210.615.558,00 atau 6,32%. Uraian Belanja Jasa Kantor lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

2. Belanja Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Tabel V.45 diatas menunjukkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp33.871.141.435,00 atau 98,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp34.377.529.357,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp22.819.205.519,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.051.935.916,00 atau 48,43%. Uraian Belanja Belanja Iuran Jaminan/Asuransi lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

3. Belanja Sewa Tanah

Tabel V.45 diatas menunjukkan Belanja Sewa Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp132.270.000,00 atau 91,36% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp144.786.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp235.200.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp102.930.000,00 atau 43,76%. Uraian Belanja Sewa Tanah lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

4. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Tabel V.45 diatas menunjukkan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp2.862.428.092,00 atau 95,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.999.443.510,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.515.480.053,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.346.948.039,00 atau 88,88%. Kenaikan tersebut dikarenakan pada TA 2022 terjadi karena terjadi penambahan alokasi anggaran dibandingkan dengan TA 2022 pada beberapa entitas realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin yang dapat dilihat pada Lampiran V.4.

5. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Tabel V.45 diatas menunjukkan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp1.214.293.945,00 atau 86,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.410.198.581,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.413.215.758,00 mengalami penurunan sebesar Rp198.921.813,00 atau 14,08%. Uraian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

6. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel V.45 diatas menunjukkan Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp23.000.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp23.000.000,00, dibandingkan dengan TA 2022 yang tidak terdapat anggaran dan tidak terealisasi. Uraian Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

7. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel V.45 diatas menunjukkan Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp97.674.625,00 atau

95,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp102.055.247,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp118.523.789,00 mengalami penurunan yang sebesar Rp20.849.164,00 atau 17,59%. Uraian Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

8. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Tabel V.45 diatas menunjukkan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp1.506.478.994,00 atau 94,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.597.890.350,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.147.966.410,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.641.487.416,00 atau 52,14%. Uraian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

9. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tabel V.45 diatas menunjukkan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp3.786.198.627,00 atau 93,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.047.708.754,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.776.011.794,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.010.186.833,00 atau 36,39%. Uraian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

10. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel V.45 diatas menunjukkan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp1.328.888.341,00 atau 92,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.437.328.800,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp409.969.000,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp918.919.341,00 atau 224,14%. Kenaikan tersebut disebabkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada TA 2023 khususnya pada Belanja Kursus Singkat/Pelatihan terealisasi sebesar Rp1.164.866.341,00 sedangkan pada TA 2022 realisasi hanya sebesar Rp1.578.000,00 sehingga mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 73.719,16%. Belanja tersebut sebagian besar didanai bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana - Dana Bantuan Operasional Kesehatan TA 2023. Uraian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

11. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Tabel V.45 diatas menunjukkan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp602.182.358,00 atau 93,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp645.901.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar

Rp689.854.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp87.671.742,00 atau 12,71%. Uraian Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

12. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Tabel V.45 diatas menunjukkan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp120.200.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp120.200.000,00, dibandingkan dengan TA 2022 tidak terdapat anggaran dan tidak terealisasi. Uraian Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

A.2.a.2).c) Belanja Pemeliharaan

Tabel V.43 diatas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp19.944.422.607,00 atau 97,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.488.518.587,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp21.570.463.603,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.626.040.996,00 atau 7,54%, dengan rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.46 berikut.

Tabel V.46 Rincian Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Pemeliharaan Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-	-
2.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.872.246.001,00	7.655.478.372,00	97,25	6.037.701.940,00	26,79
3.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.579.802.466,00	4.520.609.967,00	98,71	3.772.878.938,00	19.82
4.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.979.970.120,00	7.711.834.401,00	96,64	11.753.685.125,00	(34,39)
5.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.499.867,00	99,99	6.197.600,00	53,28
6.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	-	-
	JUMLAH	**20.488.518.587,00**	**19.944.422.607,00**	**97,34**	**21.570.463.603,00**	**(7,54)**

1. Belanja Pemeliharaan Tanah

Tabel V.46 diatas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00, dibandingkan dengan TA 2022 tidak terdapat anggaran dan tidak terealisasi. Uraian Belanja Pemeliharaan tanah lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4. Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel V.46 diatas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp7.655.478.372,00 atau 97,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.872.246.001,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp6.037.701.940,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.617.776.432,00 atau

26,79%. Uraian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Tabel V.46 diatas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp4.520.609.967,00 atau 98,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.579.802.466,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.772.878,938,00 mengalami kenaikan sebesar Rp747.731.029,00 atau 19,82%. Uraian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

4. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel V.46 diatas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp7.711.834.401,00 atau 96,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.979.970.120,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp11.753.685.125,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.041.850.724,00 atau 34,39%. Uraian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

5. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tabel V.46 diatas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp9.499.867,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.500.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp6.197.600,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp3.302.267,00 atau 53,28%. Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya merupakan Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset Buku Umum tersebut dikarenakan sering digunakan oleh masyarakat pada Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Daerah. Kenaikan signifikan tersebut disebabkan karena terjadinya peningkatan kebutuhan untuk melakukan pemeliharaan buku umum. Uraian Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

6. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Tabel V.46 diatas menunjukkan Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp32.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp32.000.000,00, dibandingkan dengan TA 2022 tidak terdapat anggaran dan tidak terealisasi. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2023 merupakan Jasa Pemeliharaan sistem informasi kependudukan dan keluarga berkualitas (SiKKB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Uraian Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

A.2.a.2).d)Belanja Perjalanan Dinas

Tabel V.43 diatas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp43.011.055.233,00 atau 92,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp46.338.883.317,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp36.357.027.986,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.654.027.247,00 atau 18,30%, dengan rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.47 berikut.

Tabel V.47 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.338.883.317,00	43.011.055.233,00	92,82	36.357.027.986,00	18.30
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**46.338.883.317,00**	**43.011.055.233,00**	**92,82**	**36.357.027.986,00**	**18,30**

Uraian Belanja Perjalanan Dinas lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

A.2.a.2).e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel V.43 diatas menunjukkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp1.626.758.404,00 atau 92,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.763.870.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.283.150.737,00 mengalami penurunan sebesar Rp343.607.667,00 atau 26,78%, dengan rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.48 berikut.

Tabel V.48 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.542.095.000,00	1.428.620.000,00	92,64	1.073.295.000,00	33,11
2.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	221.775.000,00	198.138.404,00	89,34	209.855.737,00	(5,58)
	JUMLAH	**1.763.870.000,00**	**1.626.758.404,00**	**92,23**	**1.283.150.737,00**	**26,78**

1. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel V.48 diatas menunjukkan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp1.428.620.000,00 atau 92,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.542.095.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.073.295.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp355.325.000,00 atau 33,11%. Uraian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel V.48 diatas menunjukkan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp198.138.404,00 atau 89,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp221.775.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar

Rp209.855.737,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.717.333,00 atau 5,58%. Uraian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

A.2.a.2).f) Belanja Barang dan Jasa BOS

Tabel V.43 diatas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa BOS Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp62.151.322.542,00 atau 98,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp63.115.777.559,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp63.440.638.582,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.289.316.040,00 atau 2,03%, dengan rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.49 berikut.

Tabel V.49 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.115.777.559,00	62.151.322.542,00	98,47	63.440.638.582,00	(2,03)
	JUMLAH	**63.115.777.559,00**	**62.151.322.542,00**	**98,47**	**63.440.638.582,00**	**(2,03)**

Uraian Belanja Barang dan Jasa BOS lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

A.2.a.2).g) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Tabel V.43 diatas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp68.375.706.006,00 atau 96,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp71.056.265.675,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp128.594.813.195,00 mengalami penurunan sebesar Rp60.219.107.189,00 atau 46,83%, dengan rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.50 berikut.

Tabel V.50 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.056.265.675,00	68.375.706.006,00	96,23	128.594.813.195,00	(46,83)
	JUMLAH	**71.056.265.675,00**	**68.375.706.006,00**	**96,23**	**128.594.813.195,00**	**(46,83)**

Uraian Belanja Barang dan Jasa BLUD lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4.

A.2.a.3) Belanja Subsidi

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Subsidi adalah merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi TA 2023 diberikan untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat pada PT. BPR Bank Wonosobo. Pemberian Subsidi diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah dan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 580/161/2022 Tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo Sebagai Penyalur Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah Di Kabupaten Wonosobo.

Tabel V.37 di atas menunjukkan bahwa Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp638.215.332,00 atau 75,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp842.880.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar Rp227.138.667,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar 180,98% atau Rp411.076.665,00 yang disebabkan oleh karena pada TA 2022 akad kredit dimulai pada bulan Juli s/d Desember dengan jatuh tempo yang beragam sehingga per 31 Desember 2022 bunga bulanan yang disubsidi hanya 1 s/d 5 bulan saja sedangkan per 31 Desember 2023 bunga bulanan yang disubsidi menjadi lebih banyak. Selain itu pada TA 2023 terdapat penambahan pelaku UKM yang mendapatkan subsidi sebelumnya di TA 2022 sebanyak 519 menjadi 865 di TA 2023.

A.2.a.4) Belanja Hibah

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Tabel V.41 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp136.542.227.583,00 atau 98,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp138.351.699.760,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar Rp81.490.740.096,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp55.051.487.487,00 atau 67,56%. Kenaikan tersebut dapat dilihat pada Tabel V.51 dan penjelasan dibawahnya sebagai berikut.

Tabel V.51 Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.477.043.200,00	18.475.653.200,00	99,99	780.161.000,00	2.268,18
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	106.252.356.560,00	104.661.438.551,00	98,50	68.012.581.205,00	53,89
3.	Belanja Hibah Dana BOS	12.547.900.000,00	12.330.735.832,00	98,27	11.623.597.891,00	6,08
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.074.400.000,00	1.074.400.000,00	100,00	1.074.400.000,00	-
	JUMLAH	**138.351.699.760,00**	**136.542.227.583,00**	**98,69**	**81.490.740.096,00**	**67,56**

A.2.a.4).a) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Tabel V.51 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2023 terealisasi sebesar Rp18.475.653.200,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.477.043.200,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp780.161.000,00, Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp17.695.492.200,00 atau 2.268,18%. Kenaikan tersebut disebabkan salah satunya karena dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Umum di Tahun 2024 maka pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menghibahkan sejumlah uang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo. Selain itu hibah juga diberikan

kepada instansi pusat seperti Kodim dan Polres untuk keperluan pekerjaan penataan lingkungan kantor. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

	Entitas/No. Bukti	Uraian	Jumlah (Rp)
	Bakesbangpol		**17.982.105.200,00**
a)	SP2D-04202/LS/8.01.0.00.0.00.01/2023	SPM Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Kepada KPU Kabupaten Wonosobo	14.156.505.200,00
b)	SP2D-04203/LS/8.01.0.00.0.00.01/2023	SPM Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat kepada BAWASLU Kabupaten Wonosobo	3.825.600.000,00
	DPUPR		**493.548.000,00**
c)	SP2D-01483/LS/1.03.0.00.0.00.01/2023	Pembayaran Pekerjaan Penataan Ruang Reskrim Mapolres Wonosobo Kepada CV. NKM Wonosobo	97.938.000,00
d)	SP2D-04470/LS/1.03.0.00.0.00.01/2023	Pembayaran 100% Pekerjaan Penataan Kodim 0707 Wonosobo kepada CV. AK	197.429.000,00
e)	SP2D-06445/LS/1.03.0.00.0.00.01/2023	Pembayaran 100% Pekerjaan Penataan Mapolsek Wadaslintang kepada CV. SA	198.181.000,00
	Jumlah		**18.475.653.200,00**

A.2.a.4).b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Tabel V.51 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp104.661.438.551,00 atau 98,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp106.252.356.560,00, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp68.012.581.205,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp36.648.857.346,00 atau 53,89%, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.52 beserta penjelasannya di bawahnya sebagai berikut.

Tabel V.52 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.083.050.000,00	7.973.956.994,00	98,65	4.515.000.000,00	76,61
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	65.823.306.560,00	64.849.305.327,00	98,52	42.673.045.205,00	51,97
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	31.846.000.000,00	31.838.176.230,00	99,98	20.824.536.000,00	52,89
4.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	-	-	-	-
	JUMLAH	**106.252.356.560,00**	**104.661.438.551,00**	**98,50**	**68.012.581.205,00**	**53,89**

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel V.52 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp7.973.956.994,00 atau 98,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.083.050.000,00, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp4.515.000.000,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp3.458.956.994,00 atau 76,61%. Kenaikan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat

Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan direalisasikan tersebut berasal pada beberapa entitas sebagai berikut.

Tabel V.53 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disdikpora	5.042.550.000,00	4.933.456.994,00	97,84	3.975.000.000,00	24,11
2.	Dinkes	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	250.000.000,00	40,00
3.	BKD	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	-	-
4.	Bakesbangpol	2.150.500.000,00	2.150.500.000,00	100,00	170.000.000,00	1.165,00
5.	Diskominfo	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	-	-
6.	BKD	-	-	-	120.000.000,00	(100,00)
	JUMLAH	**8.083.050.000,00**	**7.973.956.994,00**	**98,65**	**4.515.000.000,00**	**76,61**

Tabel V.53 diatas penyumbang kenaikan yang paling signifikan adalah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada TA 2023 yaitu 1.165,00% jika dibandingkan saldo TA 2022. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.150.500.000,00 dan diberikan kepada 10 organisasi kemasyarakatan sedangkan pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00 yang diberikan kepada 4 organisasi kemasyarakatan.

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Tabel V.52 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp64.849.305.327,00 atau 98,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp65.823.306.560,00, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp42.673.045.205,00 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp22.176.260.122,00 atau 51,97%, terutama disebabkan oleh kenaikan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.54 beserta penjelasan dibawahnya sebagai berikut.

Tabel V.54 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.044.050.000,00	24.621.209.917,00	98,31	17.645.219.000,00	39,53
2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.779.256.560,00	40.228.095.410,00	98,65	25.027.826.205,00	60,73
	JUMLAH	**65.823.306.560,00**	**64.849.305.327,00**	**98,52**	**42.673.045.205,00**	**51,97**

(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan pada beberapa entitas sebagai berikut.

Tabel V.55 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disdikpora	18.288.050.000,00	18.325.209.917,00	100,20	17.513.819.000,00	4,63
2.	Disparbud	6.756.000.000,00	6.296.000.000,00	93,19	-	-
3.	Dispaperkan	-	-	-	131.400.000,00	(100,00)
	JUMLAH	**25.044.050.000,00**	**24.621.209.917,00**	**98,31**	**17.645.219.000,00**	**39,53**

(b) Tabel V.54 diatas menunjukkan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023 mengalami kenaikan signifikan sebesar 60,73% yang berasal dari beberapa entitas sebagaimana Tabel V.56 dibawah ini:

Tabel V.56 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disdikpora	20.606.190.000,00	20.413.850.700,00	99,07	15.146.487.524,00	34,78
2.	Dispaperkan	20.173.066.560,00	19.814.244.710,00	98,22	9.263.492.965,00	113,90
3.	Disparbud	-	-	-	484.576.716,00	(100,00)
4.	Bagian Kesra Sekretariat daerah	-	-	-	133.269.000,00	(100,00)
	JUMLAH	**40.779.256.560,00**	**40.228.095.410,00**	**98,65**	**25.027.826.205,00**	**60,73**

Jika diperhatikan lebih lanjut pada Tabel V.56 realisasi pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan TA 2023 mengalami kenaikan signifikan sebesar 113,90% hal ini disebabkan bahwa pada TA 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp20.173.066.560,00 dengan realisasi sebesar Rp19.814.244.710,00 sedangkan pada TA 2023 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp9.606.021.550,00 dan terealisasi sebesar Rp9.263.492.965,00.

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Tabel V.52 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp31.838.176.230,00 atau 99,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.846.000.000,00, sedangkan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp20.824.536.000,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp11.013.640.230,00 atau 52,89%. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan dianggarkan dan direalisasikan di entitas sebagaimana Tabel V.57 berikut.

Tabel V.57 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DPUPR	30.701.000.000,00	30.697.692.000,00	99,99	20.774.536.000,00	47,77
2.	Bankesbangpol	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-	-
3.	DLH	880.000.000,00	876.719.430,00	99,63	-	-
4.	Dispaperkan	65.000.000,00	64.264.800,00	98,87	-	-
5.	Bagian Kesra Sekretariat Daerah	150.000.000,00	149.500.000,00	99,67	50.000.000,00	199,00
	JUMLAH	**31.846.000.000,00**	**31.838.176.230,00**	**99,98**	**20.824.536.000,00**	**52,89**

(4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Tabel V.52 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Wonosobo TA 2023 tidak dapat terealisasikan meskipun terdapat anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp500.000.000,00 yang berada di Dinas Kesehatan yang sedianya akan dilakukan hibah pembangunan gedung PPNI namun tidak terlaksana karena penerima hibah tidak memenuhi persyaratan penerimaan hibah diantaranya yaitu tidak memiliki sertifikat (SHM) atas lahan yang akan di bangun. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada TA 2022 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi.

A.2.a.4).c) Belanja Hibah Dana BOS

Tabel V.51 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah Dana BOS Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp12.330.735.832,00 atau 98,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.547.900.000,00, dibandingkan dengan TA 2022 terealisasi sebesar Rp11.623.597.891,00, mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp707.137.941,00 atau 6,08%. Rincian Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima Satdikdas Swasta Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Belanja BOS SD Swasta TA 2023	:	3.372.191.756,00
Belanja BOS SMP Swasta TA 2023	:	8.958.544.076,00
JUMLAH	**:**	**12.330.735.832,00**

A.2.a.4).d) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tabel V.51 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasi sebesar Rp1.074.400.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.074.400.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.074.400.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.58 berikut.

Tabel V.58 Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	268.354.000,00	268.354.000,00	100,00	268.354.000,00	-
2.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Perindo	43.327.000,00	43.327.000,00	100,00	43.327.000,00	-
3.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa	230.364.000,00	230.364.000,00	100,00	230.364.000,00	-
4.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai HANURA	43.269.000,00	43.269.000,00	100,00	43.269.000,00	-
5.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	70.234.000,00	70.234.000,00	100,00	70.234.000,00	-
6.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai NASDEM	75.793.000,00	75.793.000,00	100,00	75.793.000,00	-
7.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GOLKAR	105.960.000,00	105.960.000,00	100,00	105.960.000,00	-
8.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat	72.512.000,00	72.512.000,00	100,00	72.512.000,00	-
9.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GERINDRA	102.056.000,00	102.056.000,00	100,00	102.056.000,00	-
10.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional	62.531.000,00	62.531.000,00	100,00	62.531.000,00	-
	JUMLAH	**1.074.400.000,00**	**1.074.400.000,00**	**100,00**	**1.074.400.000,00**	-

A.2.a.5) Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Bantuan

Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Tabel V.41 di atas menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp12.130.400.000,00 atau 98,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.283.200.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp14.325.579.640,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp2.195.179.640,00 atau 15,32%. Belanja Bantuan Sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis dengan rincian sebagaimana Tabel V.59 di bawah ini.

Tabel V.59 Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.743.200.000,00	6.590.400.000,00	97,73	13.517.800.000,00	(51,25)
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.435.000.000,00	2.435.000.000,00	100,00	18.000.000,00	13.427,7
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.105.000.000,00	3.105.000.000,00	100,00	765.000.000,00	305,88
4.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	24.779.640,00	(100,00)
	JUMLAH	**12.283.200.000,00**	**12.130.400.000,00**	**98,76**	**14.325.579.640,00**	**(15,32)**

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan pada beberapa entitas sebagai berikut.

No.	Entitas	(Dalam Rupiah)
1.	Dinas Kesehatan	3.105.000.000,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	2.435.000.000,00
3.	Dinas Sosial PMD	6.590.400.000,00
		12.130.400.000,00

A.2.b. Belanja Modal

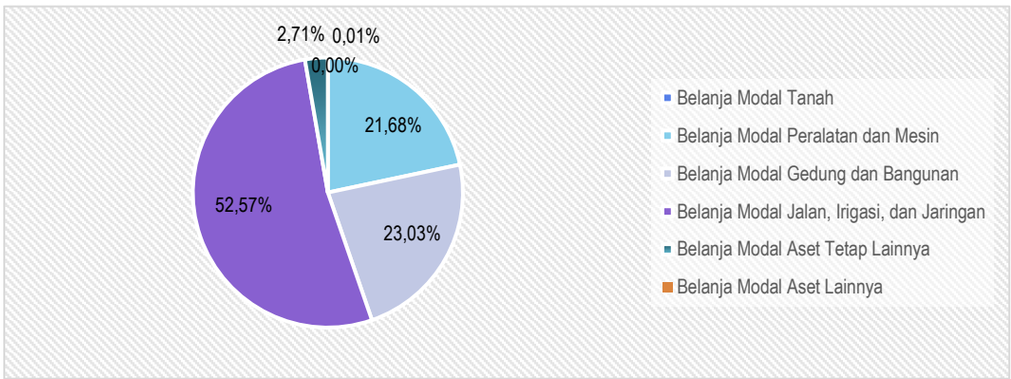
Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya dan asset tak berwujud. Tabel V.40 di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp329.902.098.408,00,00 atau 94,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp349.382.856.914,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp363.437.214.857,00, mengalami penurunan sebesar Rp33.535.116.449,00 atau 9,23%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.60 berikut.

Tabel V.60 Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Tanah	6.900.000.000,00	-	-	12.055.630.009,00	(100,00)
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.212.556.484,00	71.513.835.592,00	93,83	63.569.225.606,00	12,50
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.744.157.300,00	75.966.224.399,00	97,71	73.333.124.660,00	3,59
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	179.415.331.115,00	173.441.211.700,00	96,67	210.308.031.946,00	(17,53)

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.085.812.015,00	8.956.129.217,00	98,57	3.359.685.536,00	166,58
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	24.697.500,00	98,79	811.517.100,00	(96,96)
	JUMLAH	**349.382.856.914,00**	**329.902.098.408,00**	**94,42**	**363.437.214.857,00**	**(9,23)**

Penyumbang terbesar Belanja Modal TA 2023 adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sedangkan yang terkecil adalah Belanja Aset Lainnya. Ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.13 sebagai berikut.



Gambar V.13 Komposisi Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

A.2.b.1) Belanja Modal Tanah

Tabel V.60 di atas menunjukkan tidak direalisasikan tetapi ditetapkan anggaran sebesar Rp6.900.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp12.055.630.009,00, dan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Belanja Modal Tanah TA 2023 dianggarkan di RSUD KRT Setjonegoro yang diperuntukkan dalam rangka ekspansi perluasan area, meskipun terdapat anggaran sebesar Rp6.900.000.000,00, namun tidak dapat merealisasikannya hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi belanja yang dilakukan karena dengan mempertimbangkan capaian realisasi pendapatan selama TA 2023 maka dana yang tersedia tidak mencukupi. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.61 di bawah ini.

Tabel V.61 Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Tanah Persil	6.900.000.000,00	-	-	8.880.000.000,00	(100,00)
2.	Belanja Modal Lapangan	-	-	-	3.175.630.009,00	(100,00)
	JUMLAH	**6.900.000.000,00**	**-**	**-**	**12.055.630.009,00**	**(100,00)**

A.2.b.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel V.60 diatas menunjukkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 yaitu sebesar Rp71.513.835.592,00 atau 93,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp76.212.556.484,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp63.569.225.606,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.944.609.986,00, atau 12,50%, dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.5.

A.2.b.3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel V.60 di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp75.966.224.399,00 atau 97,71%

dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp77.744.157.300,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu sebesar Rp73.333.124.660,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.633.099.739,00, atau 3,59%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.62 berikut:

Tabel V.62 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	77.729.157.300,00	75.951.224.399,00	97,71	73.333.124.660,00	3,57
2.	Belanja Modal Monumen	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-	-
	JUMLAH	**77.744.157.300,00**	**75.966.224.399,00**	**97,71**	**73.333.124.660,00**	**3,59**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Entitas dapat dilihat pada Lampiran V.6

A.2.b.4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel V.60 di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp173.441.211.700,00 atau 96,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp179.415.331.115,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu sebesar Rp210.308.031.946,00, mengalami penurunan sebesar Rp36.866.820.246,00, atau 17,53%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.63 berikut:

Tabel V.63 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	163.641.614.115,00	158.179.134.700,00	96,66	189.204.110.870,00	(16,40)
2.	Belanja Modal Bangunan Air	12.750.717.000,00	12.263.835.000,00	96,18	13.800.116.150,00	(11,13)
3.	Belanja Modal Instalasi	2.991.600.000,00	2.967.528.000,00	99,20	7.303.804.926,00	(59,37)
4.	Belanja Modal Jaringan	31.400.000,00	30.714.000,00	97,82	-	-
	JUMLAH	**179.415.331.115,00**	**173.441.211.700,00**	**96,67**	**210.308.031.946,00**	**(17,53)**

Uraian Belanja Modal Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per entitas dapat dilihat pada Lampiran V.7.

A.2.b.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel V.60 di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp8.956.129.217,00 atau 98,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.085.812.015,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.359.685.536,00, mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp5.596.443.681,00, atau 166,58%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.64 berikut sedangkan untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per entitas dapat dilihat pada Lampiran V.8.

Tabel V.64 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	7.927.932.243,00	7.832.715.044,00	98,80	3.064.874.639,00	155,56
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	378.758.772,00	364.989.263,00	96,36	196.850.322,00	85,41
3.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	779.121.000,00	758.424.910,00	97,34	-	-
4.	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	97.960.575,00	(100,00)
	JUMLAH	**9.085.812.015,00**	**8.956.129.217,00**	**98,57**	**3.359.685.536,00**	**166,58**

Berdasarkan Tabel V.64 di atas, realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2023 kembali dianggarkan pada sub akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang sebelumnya pada TA 2022 dianggarkan pada sub akun Belanja Modal Aset Lainnya.

A.2.b.6) Belanja Modal Aset Lainnya

Tabel V.60 di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dari sub akun Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dengan realisasi sebesar Rp24.697.500,00 atau 98,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp811.517.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp786.819.600,00 atau 96,96%. Lebih lanjut anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset lainnya dapat dilihat pada tabel V.65 berikut :

Tabel V.65 Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal *Software*	25.000.000,00	24.697.500,00	98,79	727.044.100,00	(96,60)
2.	Belanja Modal Kajian	-	-	-	49.173.000,00	(100,00)
3.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	-	35.300.000,00	(100,00)
	JUMLAH	**25.000.000,00**	**24.697.500,00**	**98,79**	**811.517.100,00**	**(96,96)**

Tabel V.65 diatas menunjukkan bahwa Belanja Modal Software Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar Rp24.697.500,00 atau 98,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 pada Sekretariat Daerah, berupa aplikasi e-agenda.

A.2.c Belanja Tak Terduga

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel V.40 di atas menunjukkan bahwa Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat terealisasikan sebesar Rp4.741.409.823,00 atau 86,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.500.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.893.057.940,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp848.351.883,00 atau 21,79%. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.9.

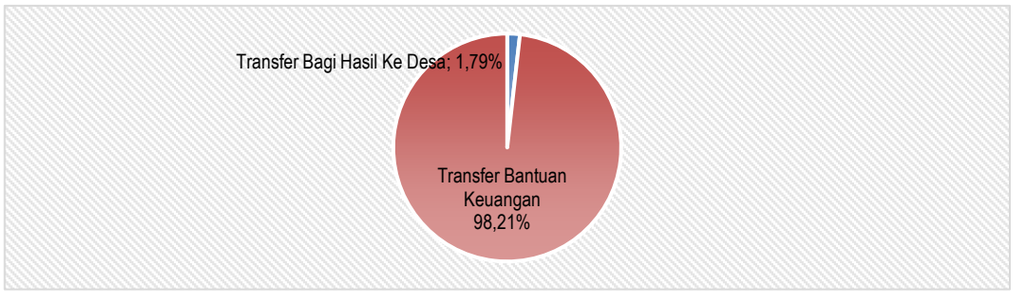
A.3. Transfer

Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp370.819.108.570,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp370.819.108.570,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp336.255.666.911,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.563.441.659,00 atau 10,28% dengan rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.66 berikut.

Tabel V.66 Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Transfer Bagi Hasil Ke Desa	6.640.362.500,00	6.640.362.500,00	100,00	6.785.636.841,00	(2,14)
2.	Transfer Bantuan Keuangan	364.178.746.070,00	364.178.746.070,00	100,00	329.470.030.070,00	10,53
	JUMLAH	**370.819.108.570,00**	**370.819.108.570,00**	**100,00**	**336.255.666.911,000**	**10,28**

Realisasi terbesar Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Transfer Bantuan Keuangan sedangkan yang terkecil adalah Transfer Bagi Hasil Ke Desa dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.14 berikut:



Gambar V.14 Komposisi Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

A.3.a. Transfer Bagi Hasil Ke Desa

Tabel V.66 di atas menunjukkan realisasi Transfer Bagi Hasil Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp6.640.362.841,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.640.362.500,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp6.785.636.841,00 mengalami penurunan sebesar Rp145.274.341,00 atau 2,14%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.67 berikut.

Tabel V.67 Transfer Bagi Hasil Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Bagi Hasil Pajak	5.523.000.000,00	5.523.000.000,00	100,00	5.584.985.972,00	(1,11)
2.	Bagi Hasil Retribusi	1.117.362.500,00	1.117.362.500,00	100,00	1.200.650.869,00	(6,94)
	JUMLAH	**6.640.362.500,00**	**6.640.362.500,00**	**100,00**	**6.785.636.841,00**	**(2,14)**

Uraian Transfer Bagi Hasil ke Desa untuk masing-masing rincian obyek dan daftar desa penerima transfer dapat dilihat pada Lampiran V.10.

A.3.b. Transfer Bantuan Keuangan

Tabel V.66 di atas menunjukkan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp364.178.746.070,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp364.178.746.070,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp329.470.030.070,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.708.716.000,00 atau 10,53%. Rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.68 berikut.

Tabel V.68 Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	364.178.746.070,00	364.178.746.070,00	100,00	329.470.030.070,00	10,53
2.	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**364.178.746.070,00**	**364.178.746.070,00**	**100,00**	**329.470.030.070,00**	**10,53**

a. Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

Tabel V.68 di atas menunjukkan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp364.178.746.070,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp364.178.746.070,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp329.470.030.070,00 mengalami

penurunan sebesar Rp34.708.716.000,00 atau 10,53%, rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.69 berikut.

Tabel V.69 Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	353.497.546.070,00	353.497.546.070,00	100,00	328.228.830.070,00	7,70
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	10.681.200.000,00	10.681.200.000,00	100,00	1.241.200.000,00	760,55
	JUMLAH	**364.178.746.070,00**	**364.178.746.070,00**	**100,00**	**329.470.030.070,00**	**10,53**

Bantuan transfer bagi hasil ke desa dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.69 diatas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 adalah sebesar Rp10.681.200.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.681.200.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 760,55% yang disebabkan oleh pada TA 2023 selain TMMD yang disalurkan kepada 3 Desa sebesar Rp1.241.200.000,00 juga menyalurkan bantuan keuangan sebagaimana Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 412/278/2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 kepada 64 Desa sebesar Rp9.440.000.000,00 sedangkan pada TA 2022 hanya berupa TMMD yang disalurkan kepada 3 desa sebesar Rp1.241.200.000,00.

b. Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tabel V.68 di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi, sama halnya dengan TA 2022 tidak terdapat anggaran dan tidak terealisasi. Hal tersebut dikarenakan Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan pada sub akun Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

A.4. Surplus/(Defisit)

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Surplus/(Defisit) adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Tabel V.1 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 memperoleh Defisit yang terealisasikan sebesar (48.705.470.183,09) atau 37,10% dari anggaran yang ditetapkan adalah Defisit sebesar (Rp131.276.600.394,00). Jika dibandingkan dengan realisasi Defisit TA 2022 sebesar (Rp89.924.157.289,00), cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp41.218.687.105,91 atau 45,84%.

A.5. Pembiayaan

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Tabel V.1 di atas menunjukkan realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp146.731.182.868,00 atau 111,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp131.276.600.394,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp228.218.652.483,00 mengalami penurunan sebesar Rp81.487.469.615,00 atau 35,71%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.70 berikut.

Tabel V.70 Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Penerimaan Pembiayaan	156.276.600.394,00	168.302.094.868,00	107,70	252.095.772.483,00	(33,24)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	21.570.912.000,00	86,28	23.877.120.000,00	(9,66)
Pembiayaan Netto (1-2)		**131.276.600.394,00**	**146.731.182.868,00**	**111,77**	**228.218.652.483,00**	**(35,71)**

A.5.a Penerimaan Pembiayaan

Tabel V.70 di atas menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp168.302.094.868,00 atau 107,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp156.276.600.394,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp252.095.772.483,00 mengalami penurunan sebesar Rp83.793.677.615,00 atau 33,24%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.71 berikut.

Tabel V.71 Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.294.495.194,00	138.291.994.868,00	99,99	252.073.772.483,00	(45,14)
2.	Pencairan Dana Cadangan	17.982.105.200,00	30.000.000.000,00	166,83	-	-
3.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	10.100.000,00	-	22.000.000,00	(54,09)
JUMLAH		**156.276.600.394,00**	**168.302.094.868,00**	**107,70**	**252.095.772.483,00**	**(33.24)**

A.5.a.1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Tabel V.71 di atas menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp138.291.994.868,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp138.294.495.194,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp252.073.772.483,00 mengalami penurunan sebesar Rp113.781.777.615,00 atau 45,14%.

A.5.a.2) Pencairan Dana Cadangan

Tabel V.71 di atas menunjukkan TA 2023 Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat realisasi sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 166,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.982.105.200,00, sedangkan TA 2022 tidak terdapat realisasi dikarenakan pencairan Dana Cadangan dilakukan di TA 2023.

A.5.a.3) Penerimaan Kembali Dana Bergulir

Tabel V.71 di atas menunjukkan realisasi Penerimaan Kembali Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp10.100.000,00 meskipun tidak dianggarkan, sedangkan TA 2022 terealisasi sebesar Rp22.000.000,00 mengalami

penurunan sebesar Rp11.900.000,00 atau 54,09%. Realisasi Penerimaan Kembali Dana Bergulir TA 2023 dapat dilihat rincian di bawah ini.

			(Dalam Rupiah)
A		**Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi**	**8.600.000,00**
	1	Setoran Dana Bergulir dari USP PM	4.050.000,00
	2	Setoran Dana Bergulir dari KUD HRP	4.550.000,00
B		**Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat**	**1.500.000,00**
	4	Setoran Dana Bergulir dari IK Batako FKP Kejajar	500.000,00
	5	Setoran Dana Bergulir dari NM (MC)	1.000.000,00
		Jumlah A + B	**10.100.000,00**

A.5.b Pengeluaran Pembiayaan

Tabel V.70 di atas menunjukkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp21.570.912.000,00 atau 86,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp23.877.120.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.306.208.000,00 atau 9,66%. Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian pada Tabel V.72 sebagai berikut.

Tabel V.72 Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00	-
2.	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	6.570.912.000,00	65,71	8.877.120.000,00	(25.98)
	JUMLAH	**25.000.000.000,00**	**21.570.912.000,00**	**86,28**	**23.877.120.000,00**	**(9,66)**

Jika dilihat pada Tabel V.72 diatas, terdapat realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2023. Sedangkan realisasi Penyertaan Modal Daerah pada BUMD TA 2023 sebesar Rp6.570.912.000,00 merupakan penyertaan modal pada Perumda Tirta Aji Kabupaten Wonosobo.

A.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Tabel V.1 di atas menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Wonosobo TA 2023 yang diperoleh adalah sebesar Rp98.025.712.684,91. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp138.294.495.194,00, SILPA TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp40.268.782.509,09 atau 29,12%. Berikut ini adalah uraian SILPA TA 2023:

				(Dalam Rupiah)
a)	**Kas di RKUD (Bank Jateng Rekening: 1 023 00001 9)**		**:**	**83.309.803.483,00**
b)	**Kas di Bendahara Pengeluaran**		**:**	**43.113.566,00**
	1) Sekretariat DPRD	39.561.650,00		
	2) Puskesmas Leksono 1 – Dinkes	1.152.983,00		
	3) Puskesmas Kalibawang –Dinkes	2.398.933,00		
c)	**Kas di Bendahara Penerimaan**		**:**	**110.807.216,00**
	1) Disparbud	68.971.600,00		
	2) Disdagkop UKM	12.453.916,00		
	3) Disperkimhub	881.700,00		
	4) Dispaperkan	250.000,00		
	5) Kelurahan Bumireso	28.250.000,00		
d)	**Kas di BLUD**		:	**10.150.848.398,91**
	1) Kas di RSUD	5.427.523.097,91		
	2) Kas di BLUD Puskesmas	4.723.325.301,00		

e)	**Kas Dana BOS**			**1.014.029.022,00**
	Kas Dana BOS	1.014.029.022,00		
f)	**Kas Lainnya**			**3.397.110.999,00**
	1) Kas Dana BOP Kesetaraan	2.492.400,00		
	2) Kas BOK Puskesmas	3.352.930.529,00		
	3) Kas BOP PAUD	911.838,00		
	4) Kas di Dana Desa	40.776.232,00		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023		**:**	**98.025.712.684,91**

Saldo Akhir Kas di Neraca Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp98.365.244.704,91 sedangkan SILPA TA 2023 adalah sebesar Rp98.025.712.684,91 atau terdapat selisih sebesar Rp339.532.020,00 merupakan saldo kas di Bank per 31 Desember 2023 pada Bendahara Sekolah Negeri, Saldo Penanganan Stunting Wonosobo, dan PFK berupa JKN 1% di rekening penampungan gaji dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama	Jumlah (Rp)
3104112446	SD Negeri Wringinanom (BOSDA)	75.000,00
3023421452	SD Negeri 2 Rojoimo (BOSDA)	1,00
3171029812	TK Negeri Pembina Selomerto	19.212,00
3023056436	SD Negeri 1 Kalibening	16.544,00
3155010711	SMP Negeri 10 Satap Wadaslintang	10.000,00
3023211067	TK Negeri Pembina Selomerto	823,00
3104076717	TK Negeri Pembina Sapuran	54.321,00
1023003470	TK Negeri Pembina Sapuran	20.000,00
3104099512	TK Negeri Pembina Sapuran	133.311,00
3023418320	TK Negeri Pembina Wonosobo	481.279,00
3023357061	TK Negeri Pembina Wonosobo	100.000,00
1023012096	Penanganan Stunting Wonosobo	37.502.000,00
1023001531	PFK berupa JKN 1% di rekening penampungan gaji	301.119.529,00
	Jumlah	**339.532.020,00**

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

B.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2022 sebesar Rp138.294.495.194,00, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 sebagai Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2023.

B.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Sisa Saldo Anggaran Lebih TA 2023 sebesar Rp138.291.994.868,00 untuk Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Sehingga terdapat Saldo Anggaran Lebih sebelum Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp2.500.326,00.

B.3. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp98.025.712.684,91, yang diperoleh dari Defisit sebesar Rp48.705.470.183,09 ditambah Penggunaan Sisa Saldo Anggaran Lebih TA 2022 sebesar Rp138.291.994.868,00 ditambah Pencairan dana cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp10.100.000,00 yang merupakan penerimaan kembali dana bergulir dan dikurangi Pembiayaan Pengeluaran berupa Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun berjalan sebesar Rp6.570.912.000,00 atas penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Selain itu terdapat pengurangan sebesar Rp2.500.326,00 merupakan setoran pengembalian saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 pada SD N Bendungan Kecamatan Kaliwiro ke RKUD pada tanggal 30 Januari 2023 selanjutnya dipindahbukukan ke RKUN pada tanggal 18 Desember 2023. Hal ini mendasari Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 421/342/2022 tentang Penutupan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Bendungan Kecamatan Kaliwiro. Sekolah tersebut dinyatakan ditutup mulai tanggal 31 Oktober 2022.

C. NERACA

C.1. ASET

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.990.751.001.422,51. Jika dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.870.278.837.496,62, mengalami kenaikan sebesar Rp120.472.163.925,89 atau 3,11%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.73 di bawah ini.

Tabel V.73 Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Aset Lancar	168.737.529.028,11	182.293.913.408,07	(13.556.384.379,96)	(7,44)
2.	Investasi Jangka Panjang	300.533.317.974,08	286.254.007.791,86	14.279.310.182,22	4,99
3.	Aset Tetap	3.236.617.663.604,37	3.179.643.226.403,37	56.974.437.201,00	1,79
4.	Properti Investasi	72.532.203.790,00	-	72.532.203.790,00	-
5.	Dana Cadangan	-	15.048.122.525,00	(15.048.122.525,00)	(100,00)
6.	Aset Lainnya	212.330.287.025,95	207.039.567.368,32	5.290.719.657,63	2,56
	JUMLAH	**3.990.751.001.422,51**	**3.870.278.837.496,62**	**120.472.163.925,89**	**3,11**

C.1.a. ASET LANCAR

Tabel V.73 di atas menunjukkan saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp168.737.529.028,11 dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp182.293.913.408,07, mengalami penurunan sebesar Rp13.556.384.379,96 atau 7,44%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.74 berikut.

Tabel V.74 Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Kas di Kas Daerah	83.309.803.483,00	93.480.222.258,00	(10.170.418.775,00)	(10,88)
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	110.807.216,00	26.771.800,00	84.035.416,00	313,90
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	43.113.566,00	42.209.500,00	904.066,00	2,14
4.	Kas di BLUD	10.150.848.398,91	43.186.557.273,00	(33.035.708.874,09)	(76,50)
5.	Kas Dana BOS	1.014.029.022,00	-	1.014.029.022,00	-
6.	Kas Lainnya	3.736.643.019,00	1.703.396.572,00	2.033.246.447,00	119,36
7.	Piutang	46.964.501.115,40	18.625.390.125,64	28.339.110.989,76	152,15
8.	Piutang Lainnya	6.081.900.594,00	6.092.000.594,00	(10.100.000,00)	(0,17)
9.	Penyisihan Piutang	(16.455.170.868,84)	(15.633.100.118,90)	(822.070.749,94)	5,26
10.	Beban Dibayar Dimuka	166.353.469,67	176.609.655,00	(10.256.185,33)	(5,81)
11.	Persediaan	33.614.700.012,97	34.593.855.749,33	(979.155.736,36)	(2,83)
	JUMLAH	**168.737.529.028,11**	**182.293.913.408,07**	**(13.556.384.379,96)**	**(7,44)**

C.1.a.1) Kas di Kas Daerah

Tabel V.74 di atas menunjukkan saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.309.803.483,00, dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.480.222.258,00, mengalami penurunan sebesar Rp10.170.418.775,00 atau 10,88%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo per 31 Desember 2022	**:**	**93.480.222.258,00**
Mutasi Bertambah (Debet)	**:**	**1.752.959.194.251,00**
Realisasi pendapatan TA 2023		1.515.180.913.842,00
Pengembalian sisa UP/TU/LS		26.304.231.609,00
Angsuran Pokok Dana Bergulir		10.100.000,00
Pencairan Deposito		160.000.000.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan		26.771.800,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		37.177.000,00
Setoran SiLPA BLUD RSUD KRT Setjonegoro		21.400.000.000,00
Pencairan Dana Cadangan		30.000.000.000,00
Mutasi Berkurang (Kredit)	**:**	**1.763.129.613.026,00**
SP2D LS/GU/TU		1.603.129.613.026,00
Penanaman Deposito		160.000.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	**:**	**83.309.803.483,00**

Dari Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.309.803.483,00 tersebut termasuk didalamnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		Saldo (Rp)	Keterangan
SILPA yang mengikat			
Penggajian PPPK	:	38.638.226.769,00	DAU *Specific Grant*
Pendanaan kelurahan	:	45.486.331,00	DAU *Specific Grant*
Bidang Pendidikan	:	6.018.779.264,00	DAU *Specific Grant*
Bidang Kesehatan	:	2.136.925.968,00	DAU *Specific Grant*
Bidang Pekerjaan Umum	:	1.044.639.184,00	DAU *Specific Grant*
DAU Tambahan -THR dan gaji 13	:	20.007.900,00	
DAK Non Fisik	:	7.620.458.398,00	
DAK Fisik	:	203.324.151,00	
Pencairan Dana Cadangan untuk Pilkada	:	12.017.894.800,00	
Sisa DIF per 31 Desember 2023	:	481.761.882,00	
DBHCHT	:	1.277.810.272,00	
Jumlah Silpa yang Mengikat		**69.505.314.919,00**	
SILPA Bebas			
Jumlah SILPA Bebas	:	**13.804.488.564,00**	
JUMLAH		**83.309.803.483,00**	

Dengan kondisi dapat dilihat pada Tabel V.75 berikut:

Tabel V.75 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Keterangan	Nama Bank	Nomor Rekening	2023 (Dalam Rupiah)	2022 (Dalam Rupiah)	Tren (%)
1	Kas Daerah	Bank Jateng	1-023-00001-9	83.309.803.483,00	93.480.222.258,00	(10,88)
2	Deposito	Bank Jateng	-	-	-	
	Jumlah			**83.309.803.483,00**	**93.480.222.258,00**	**(10,88)**

Selama TA 2023 Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menempatkan sebagian Kas Daerah di Deposito Bank Jateng dengan mutasi selama TA 2023 dan perolehan Bunga Deposito per bulan pada Tabel V.76 sebagai berikut:

Tabel V.76 Mutasi Saldo Deposito Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

No	Bulan	Tanggal Tanam/Cair	Mutasi (Rp) Bertambah/Debet	Berkurang/Kredit	Saldo (Rp)	Penerimaan Bunga Deposito per Bulan (Rp)
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	27/02/2023	25.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00	-
		27/02/2023	25.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	-
3.	Maret	27/03/2023	-	-	50.000.000.000,00	95.890.410,00
		27/03/2023	-	-	50.000.000.000,00	95.890.410,00
4.	April	11/04/2023	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	51.369.863,00
		11/04/2023	-	25.000.000.000,00	-	51.369.863,00
5.	Mei	08/05/2023	25.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00	-
		08/05/2023	25.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	-
6.	Juni	08/06/2023	-	-	50.000.000.000,00	106.164.383,00
		08/06/2023	-	-	50.000.000.000,00	106.164.383,00
		19/06/2023	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	37.671.232,00
7.	Juli	08/07/2023	-	-	25.000.000.000,00	102.739.726,00
8.	Agustus	08/08/2023	-	-	25.000.000.000,00	106.164.383,00
9.	September	08/09/2023	-	-	25.000.000.000,00	106.164.383,00
10.	Oktober	02/10/2023	10.000.000.000,00	-	35.000.000.000,00	-
		02/10/2023	10.000.000.000,00	-	45.000.000.000,00	-
		09/10/2023	-	-	-	106.164.383,00
		17/10/2023	10.000.000.000,00	-	55.000.000.000,00	-
		25/10/2023	10.000.000.000,00	-	65.000.000.000,00	-
		25/10/2023	10.000.000.000,00	-	75.000.000.000,00	-
11.	November	03/11/2023	10.000.000.000,00	-	85.000.000.000,00	-
		08/11/2023	-	-	85.000.000.000,00	102.739.726,00
		10/11/2023	-	10.000.000.000,00	75.000.000.000,00	10.958.904,00
		17/11/2023	-	10.000.000.000,00	65.000.000.000,00	42.465.753,00
		17/11/2023	-	10.000.000.000,00	55.000.000.000,00	31.506.849,00
		28/11/2023	-	10.000.000.000,00	45.000.000.000,00	35.616.438,00
		28/11/2023	-	10.000.000.000,00	35.000.000.000,00	34.246.575,00
12.	Desember	06/12/2023	-	10.000.000.000,00	25.000.000.000,00	15.068.493,00
		07/12/2023	-	25.000.000.000,00	-	99.315.068,00
	JUMLAH		**160.000.000.000,00**	**160.000.000.000,00**		**1.337.671.225,00**

C.1.a.2) Kas di Bendahara Penerimaan

Tabel V.74 di atas menunjukkan saldo Kas yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp110.807.216,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022sebesar Rp26.771.800,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp84.035.416,00 atau 313,90%, kenaikan signifikan tersebut diakibatkan oleh kas di bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, salah satunya Disparbud yang pada tanggal tersebut masih menerima pendapatan tetapi belum bisa disetorkan karena Bank sedang libur. Uraian Kas di Bendahara Penerimaan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.77 berikut:

Tabel V.77 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Disdikpora	-	4.250.000,00	4.250.000,00	-
2.	Labkesda	-	554.970.000,00	554.970.000,00	-
3.	DPUPR	-	332.322.536,00	332.322.536,00	-
4.	Disperkimhub	-	936.392.700,00	935.511.000,00	881.700,00
5.	Disnakerintrans	200.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	-
6.	DLH	-	246.591.500,00	246.591.500,00	-
7.	Disdukcapil	-	174.085.000,00	174.085.000,00	-
8.	Diskominfo	-	600.769.327,00	600.769.327,00	-
9.	DPMPTSP	-	1.622.377.537,00	1.622.377.537,00	-
10.	Disparbud	26.311.800,00	6.145.855.100,00	6.103.195.300,00	68.971.600,00
11.	Dispaperkan	210.000,00	80.998.500,00	80.958.500,00	250.000,00
12.	Disdagkop UKM	-	1.007.121.044,00	994.667.128,00	12.453.916,00
13.	Bagian Umum Setda	-	238.082.500,00	238.082.500,00	-
14.	Kel Jlamprang	-	21.500.000,00	21.500.000,00	-
15.	Kel Kejiwan	-	49.939.500,00	49.939.500,00	-
16.	Kel Sambek	-	28.050.000,00	28.050.000,00	-
17.	Kel Mlipak	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
18.	Kel Pagerkukuh	-	46.600.000,00	46.600.000,00	-
19.	Kel Rojoimo	-	83.350.100,00	83.350.100,00	-
20.	Kel Kramatan	-	86.050.000,00	86.050.000,00	-
21.	Kel Tawangsari	-	18.800.000,00	18.800.000,00	-
22.	Kel Jaraksari	-	18.600.000,00	18.600.000,00	-
23.	Kel Bumireso	-	38.350.000,00	10.100.000,00	28.250.000,00
24.	Kel Kalianget	-	16.500.000,00	16.500.000,00	-
25.	Kel Kertek	-	106.450.000,00	106.450.000,00	-
26.	Kel Wringinanom	-	165.600.000,00	165.600.000,00	-
27.	Kel Selomerto	-	168.600.000,00	168.600.000,00	-
28.	Kel Wonorejo	-	106.150.000,00	106.150.000,00	-
29.	Kel Leksono	-	414.000.000,00	414.000.000,00	-
30.	Kel Wonoroto	-	63.900.000,00	63.900.000,00	-
31.	Kel Kalibeber	-	69.685.000,00	69.685.000,00	-
32.	Kel Mudal	-	43.200.000,00	43.200.000,00	-
33.	Kel Andongsili	-	42.770.000,00	42.770.000,00	-
34.	Kel Garung	-	21.200.000,00	21.200.000,00	-
35.	Kel Kejajar	-	70.409.000,00	70.409.000,00	-
36.	Kel Kalikajar	-	49.800.000,00	49.800.000,00	-
37.	Kel Sapuran	-	123.100.000,00	123.100.000,00	-
38.	Kel Kepil	-	118.970.000,00	118.970.000,00	-
39.	Kel Kaliwiro	-	24.750.000,00	24.750.000,00	-
40.	Kel Wadaslintang	-	54.030.000,00	54.030.000,00	-
41.	BPPKAD	50.000,00	56.357.138.760,00	56.357.188.760,00	-
	JUMLAH	**26.771.800,00**	**70.406.308.104,00**	**70.322.272.688,00**	**110.807.216,00**

Dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 sebesar Rp110.807.216,00 telah disetorkan ke RKUD dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan		Nilai (Rp)	Tanggal penyetoran ke Kas Daerah
Disperkimhub	:	881.700,00	02/01/2024
Disparbud	:	68.971.600,00	03/01/2024
Dispaperkan	:	250.000,00	02/01/2024
DisdagkopUKM	:	12.453.916,00	04/01/2024
Kelurahan Bumireso	:	28.250.000,00	04/01/2024
JUMLAH		**110.807.216,00**	

C.1.a.3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Tabel V.74 di atas menunjukkan saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.113.566,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.209.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp904.066,00 atau 2,14% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.78 berikut:

Tabel V.78 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Dinkes – Puskesmas Leksono 1	-	1.152.983,00	-	1.152.983,00
2.	Dinkes - Puskesmas Watumalang	4.950.000,00	-	4.950.000,00	-
3.	Dinkes - Puskesmas Kalibawang		2.398.933,00	-	2.398.933,00
4.	Dinkes - Labkesda	60.000,00	-	60.000,00	-
5.	DPU	32.167.000,00	-	32.167.000,00	-
6.	BPBD	5.032.500,00	-	5.032.500,00	-
7.	Sekretariat DPRD	-	39.561.650,00	-	39.561.650,00
	JUMLAH	**42.209.500,00**	**43.113.566,00**	**42.209.500,00**	**43.113.566,00**

Dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 sebesar Rp43.113.566,00 telah disetorkan ke RKUD yang terdiri atas Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)		Nilai (Rp)	Tanggal penyetoran ke Kas Daerah
Puskesmas Leksono 1 –Dinkes	:	1.152.983,00	24/01/2024
Puskesmas Kalibawang- Dinkes	:	2.398.933,00	04/01/2024
Sekretariat DPRD	:	39.561.650,00	11/01/2024
JUMLAH		**43.113.566,00**	

C.1.a.4) Kas di BLUD

Tabel V.74 di atas menunjukkan saldo Kas di BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.150.848.398,91 dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp43.186.557.273,00, mengalami penurunan sebesar Rp33.035.708.874,09 atau 76,50% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.79 berikut:

Tabel V.79 Kas di BLUD TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp) 2023	2022	Kenaikan / (Penurunan) Saldo (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Kas di BLUD RSUD KRT Setjonegoro	5.472.642.242,91	40.038.976.180,00	(34.566.333.937,09)	(86,33)
2.	Kas di BLUD Puskesmas	4.678.206.156,00	3.147.581.093,00	1.530.625.063,00	48,63
	JUMLAH	**10.150.848.398,91**	**43.186.557.273,00**	**(33.035.708.874,09)**	**(76,50)**

Tabel V.79 di atas menunjukkan saldo Kas di BLUD RSUD KRT Setjonegoro Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.472.642.242,91 yang terdiri dari kas di Bank sebesar Rp5.427.523.097,91 dan Kas Tunai di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke bank sebesar Rp45.119.145,00, jika dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD RSUD KRT Setjonegoro per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.038.976.180,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp34.611.453.082,09 atau 86,44% yang disebabkan karena terdapat penyetoran SiLPA RSUD KRT Setjonegoro ke RKUD sebesar Rp21.400.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No. Bukti		Nilai (Rp)	Tanggal penyetoran ke Kas Daerah
001/silparsu/2023	:	10.500.000.000,00	07/11/2023
002/silparsu/2023	:	5.900.000.000,00	08/12/2023
003/silparsu/2023	:	5.000.000.000,00	20/12/2023
JUMLAH		**21.400.000.000,00**	

Saldo Kas di Bank Pada RSUD KRT Setjonegoro per 31 Desember 2023 diatas terdiri dari:

No.	Bank	No. Rekening	(Dalam Rupiah)
1.	Bank Jateng	1023004174	4.460.872.712,00
2.	BRI	011201000470307	966.650.385,91
		JUMLAH	**5.427.523.097,91**

Sedangkan Kas di BLUD Puskesmas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.678.206.156,00 dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.147.581.093,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.530.625.063,00 atau 48,63%. Adapun penjelasan lebih rinci atas saldo Kas di BLUD dapat dilihat pada Tabel V.80 berikut:

Tabel V.80 Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	RSUD KRT Setjonegoro Bank Jateng No Rek: 1.023.004.174 BRI No Rek: 0112.01.000470.30.7	40.038.976.180,00	99.383.209.381,91	133.949.543.319,00	5.472.642.242,91
2.	Pusk Kec. Wonosobo 1 Bank Jateng No Rek: 1023005669	300.761.295,00	3.692.744.702,00	3.462.634.279,00	530.871.718,00
3.	Pusk Kec. Wonosobo 2 Bank Jateng No Rek: 1023009940	71.567.795,00	1.181.137.503,00	1.137.297.603,00	115.407.695,00
4.	Pusk Kec. Kertek 1 Bank Jateng No Rek: 1023005910	76.361.409,00	2.867.223.489,00	2.832.380.181,00	111.204.717,00
5.	Pusk Kec. Kertek 2 Bank Jateng No Rek: 1023009958	206.381.288,00	2.274.350.129,00	2.106.585.032,00	374.146.385,00
6.	Pusk Kec. Selomerto 1 Bank Jateng No Rek: 1023005774	179.408.574,00	4.307.593.691,00	4.018.808.246,00	468.194.019,00
7.	Pusk Kec. Selomerto 2 Bank Jateng No Rek: 1023009966	25.764.468,00	1.067.430.026,00	1.042.424.065,00	50.770.429,00
8.	Pusk Kec. Leksono 1 Bank Jateng No Rek: 1023005677	85.509.719,00	1.589.332.027,00	1.541.752.218,00	133.089.528,00
9.	Pusk Kec. Leksono 2 Bank Jateng No Rek: 1023009907	55.289.435,00	798.608.344,00	778.248.744,00	75.649.035,00
10.	Pusk Kec. Watumalang Bank Jateng No Rek: 1023005812	85.623.781,00	2.484.799.094,00	2.393.409.462,00	177.013.413,00
11.	Pusk Kec. Mojotengah Bank Jateng No Rek: 1023005707	373.984.709,00	4.033.926.746,00	3.766.526.172,00	641.385.283,00
12.	Pusk Kec. Garung Bank Jateng No Rek: 1023005880	282.766.750,00	4.009.981.438,00	4.116.202.343,00	176.545.845,00
13.	Pusk Kec. Kejajar 1 Bank Jateng No Rek: 1023005651	29.359.321,00	2.625.556.843,00	2.590.157.522,00	64.758.642,00
14.	Pusk Kec. Kejajar 2 Bank Jateng No Rek: 1023009923	37.432.390,00	870.299.972,00	887.641.818,00	20.090.544,00
15.	Pusk Kec. Kalikajar 1 Bank Jateng No Rek: 1023005855	10.646.319,00	2.065.652.976,00	2.065.055.469,00	11.243.826,00
16.	Pusk Kec. Kalikajar 2 Bank Jateng No Rek: 1023009915	62.190.080,00	2.141.528.538,00	2.006.286.616,00	197.432.002,00
17.	Pusk Kec. Sapuran Bank Jateng No Rek: 1023005626	508.869.446,00	4.624.626.870,00	4.661.078.169,00	472.418.147,00
18.	Pusk Kec. Kepil 1 Bank Jateng No Rek: 1023005634	127.110.196,00	2.721.587.195,00	2.610.654.682,00	238.042.709,00
19.	Pusk Kec. Kepil 2 Bank Jateng No Rek: 1104001340	104.285.766,00	1.748.449.252,00	1.715.097.596,00	137.637.422,00
20.	Pusk Kec. Kaliwiro Bank Jateng No Rek: 1155000569	229.894.688,00	3.471.587.998,00	3.596.571.551,00	104.911.135,00
21.	Pusk Kec. Wadaslintang 1 Bank Jateng No Rek: 1155000577	168.282.265,00	2.567.795.198,00	2.540.742.783,00	195.334.680,00
22.	Pusk Kec. Wadaslintang 2 Bank Jateng No Rek: 1155000801	50.002.904,00	1.334.961.128,00	1.279.319.913,00	105.644.119,00
23.	Pusk Kec. Sukoharjo 1 Bank Jateng No Rek: 1023005693	29.112.820,00	1.582.466.049,00	1.561.398.988,00	50.179.881,00
24.	Pusk Kec. Sukoharjo 2 Bank Jateng No Rek: 1023009931	9.927.269,00	806.939.905,00	690.546.139,00	126.321.035,00
25.	Pusk Kec. Kalibawang Bank Jateng No Rek: 1023005758	37.048.406,00	1.436.062.954,00	1.373.197.413,00	99.913.947,00
	JUMLAH	**43.186.557.273,00**	**155.687.851.448,91**	**188.723.560.323,00**	**10.150.848.398,91**

C.1.a.5) Kas Dana BOS

Tabel V.74 diatas menunjukan saldo Kas Dana BOS Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.014.029.022,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 tidak ada karena saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 disajikan dalam bagian Kas Lainnya, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.81 dibawah ini.

Tabel V.81 Saldo Kas di Bendahara BOS TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Kas Dana BOS di SD Negeri	-	58.411.453.153,00	57.881.709.520,00	529.743.633,00
2.	Kas Dana BOS di SMP Negeri	-	25.071.227.245,00	24.586.941.856,00	484.285.389,00
3.	Kas Dana BOS di Swasta	-	12.330.735.832,00	12.330.735.832,00	-
	JUMLAH	**-**	**95.813.416.230,00**	**94.799.387.208,00**	**1.014.029.022,00**

Tabel V.81 diatas menunjukkan terdapat mutasi/koreksi debet Kas Dana BOS di SD Negeri sebesar Rp58.411.453.153,00 yang berasal dari:

			(Dalam Rupiah)
1.	Reklasifikasi saldo per 31/12/2022 dari Kas Lainnya – Kas di Bendahara BOS	:	806.670.796,00
2.	Transaksi Tahun Berjalan	:	57.604.782.357,00
			58.411.453.153,00

Tabel V.81 diatas menunjukkan terdapat mutasi/koreksi debet Kas Dana BOS di SMP Negeri sebesar Rp25.071.227.245,00 yang berasal dari:

			(Dalam Rupiah)
1.	Reklasifikasi saldo per 31/12/2022 dari Kas Lainnya – Kas di Bendahara BOS	:	757.185.102,00
2.	Transaksi Tahun Berjalan	:	24.314.042.143,00
			25.071.227.245,00

C.1.a.6) Kas Lainnya

Tabel V.74 di atas menunjukkan saldo Kas Lainnya Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.736.643.019,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.703.396.572,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.033.246.447,00 atau 119,36%, karena terdapat perbedaan mekanisme penatausahaan dana BOK Tahun Anggaran 2022 dengan Tahun Anggaran Tahun 2023 sehingga terdapat sisa saldo kas lainnya di puskemas pada 31 Desember 2023. dengan rincian dapat dilihat pada Tabel V.82 berikut:

Tabel V.82 Saldo Kas Lainnya TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Kas di Bendahara BOS	1.563.855.898,00	-	1.563.855.898,00	-
2.	Kas Lainnya	139.540.674,00	45.279.196.172,00	41.682.093.827,00	3.736.643.019,00
	JUMLAH	**1.703.396.572,00**	**45.279.196.172,00**	**43.245.949.725,00**	**3.736.643.019,00**

Kas di Bendahara BOS Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 adalah nihil karena disajikan pada akun Kas Dana BOS sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.563.855.898,00 yang terdiri atas Kas Dana BOS di SD Negeri sebesar Rp806.670.796,00 dan Kas Dana BOS di SMP Negeri sebesar Rp757.185.102,00 direklasifikasi ke akun Kas Dana BOS.

Tabel V.82 di atas menunjukkan saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.736.643.019,00 yang terdiri dari :

a) Saldo Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp3.352.930.529,00 sesuai tabel V.83 dengan rincian berikut:

Tabel V.83 Saldo Kas Lainnya Dana BOK per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Puskesmas Wonosobo 1	-	1.344.217.000,00	1.200.258.284,00	143.958.716,00
2.	Puskesmas Kertek 1	-	1.195.959.000,00	1.021.918.930,00	174.040.070,00
3.	Puskesmas Selomerto 1	-	1.272.852.000,00	1.112.711.642,00	160.140.358,00
4.	Puskesmas Leksono 1	-	1.060.283.000,00	832.295.414,00	227.987.586,00
5.	Puskesmas Watumalang	-	1.357.127.000,00	1.115.766.745,00	241.360.255,00
6.	Puskesmas Mojotengah	-	1.410.507.000,00	1.354.409.946,00	56.097.054,00
7.	Puskesmas Garung	-	1.255.480.000,00	1.211.796.614,00	43.683.386,00
8.	Puskesmas Kejajar 1	-	1.092.012.000,00	964.730.070,00	127.281.930,00
9.	Puskesmas Kalikajar 1	-	1.037.797.000,00	944.421.820,00	93.375.180,00
10.	Puskesmas Sapuran	-	1.278.496.000,00	1.219.058.255,00	59.437.745,00
11.	Puskesmas Kepil 1	-	1.068.794.000,00	982.615.128,00	86.178.872,00
12.	Puskesmas Kaliwiro	-	1.376.617.000,00	1.152.824.312,00	223.792.688,00
13.	Puskesmas Wadaslintang 1	-	1.080.668.000,00	1.015.995.332,00	64.672.668,00
14.	Puskesmas Sukoharjo 1	-	966.425.000,00	795.240.808,00	171.184.192,00
15.	Puskesmas Kalibawang	-	1.092.580.000,00	955.140.801,00	137.439.199,00
16.	Puskesmas Wonosobo 2	-	748.840.000,00	500.139.169,00	248.700.831,00
17.	Puskesmas Kertek 2	-	990.531.000,00	819.662.272,00	170.868.728,00
18.	Puskesmas Selomerto 2	-	922.799.000,00	800.286.081,00	122.512.919,00
19.	Puskesmas Leksono 2	-	833.603.000,00	796.383.602,00	37.219.398,00
20.	Puskesmas Kejajar 2	-	953.553.000,00	698.418.831,00	255.134.169,00
21.	Puskesmas Kalikajar 2	-	1.006.454.000,00	848.953.331,00	157.500.669,00
22.	Puskesmas Kepil 2	-	1.000.526.000,00	817.414.599,00	183.111.401,00
23.	Puskesmas Wadaslintang 2	-	961.067.000,00	904.257.594,00	56.809.406,00
24.	Puskesmas Sukoharjo 2	-	969.992.000,00	859.548.891,00	110.443.109,00
	JUMLAH	**-**	**26.277.179.000,00**	**22.924.248.471,00**	**3.352.930.529,00**

Pada Tabel V.83 diatas, Saldo akhir Kas Dana BOK pada Puskesmas Selomerto 2 sebesar Rp122.512.919,00 terdiri dari Kas di Bank BNI sebesar Rp121.086.735,00 dan Kas Tunai pada Bendahara BOK sebesar Rp1.426.184,00. Kas tunai tersebut merupakan kelebihan pembayaran pajak dari belanja tanggal 26 Desember 2023 namun telah di setorkan ke rekening Bank BNI pada tanggal 4 Januari 2024.

b) Saldo Kas Lain-Lain

Saldo Kas Lain-lain Sebesar Rp383.712.490,00 terdiri dari:

(1) Saldo sebesar Rp40.776.232,00 merupakan kelebihan belanja penyaluran jaminan kesehatan aparatur pemerintah desa dan telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 9 Januari 2024.

(2) Saldo Bank per 31 Desember 2023 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp4.314.729,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.84 berikut:

Tabel V.84 Saldo Kas Lainnya Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga TA 2023

No	Uraian	No. Rekening	Keterangan	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TK Negeri Pembina Sapuran	Bank Jateng 3104076717	Tidak menjadi perhitungan SILPA	54.321,00
2.	TK Negeri Pembina Sapuran	Bank Jateng 1023003470	Tidak menjadi perhitungan SILPA	20.000,00
3.	SD Negeri 2 Rojoimo	Bank Jateng 3023421550	Tidak menjadi perhitungan SILPA	1,00
4.	SD Negeri Wringinanom	Bank Jateng 3104112446	Tidak menjadi perhitungan SILPA	75.000,00
5.	TK N Pembina Selomerto	Bank Jateng 3171029812	Tidak menjadi perhitungan SILPA	19.212,00
6.	SMPN 10 Satap Wadaslintang	Bank Jateng 3155010711	Tidak menjadi perhitungan SILPA	10.000,00
7.	SD Negeri 1 Kalibening	Bank Jateng 3023056436	Tidak menjadi perhitungan SILPA	16.544,00
8.	TK Negeri Pembina Selomerto	Bank Jateng 3023211067	Tidak menjadi perhitungan SILPA	823,00
9.	TK Negeri Pembina Sapuran	Bank Jateng 3104099512	Tidak menjadi perhitungan SILPA	133.311,00
10	UPTD SKB Wonosobo	Bank Jateng 3023358301	Sisa Dana BOP Kesetaraan	2.455.000,00
11	TK Negeri Pembina Selomerto	Bank Jateng 3023421452	Sisa Dana BOP PAUD	20.200,00
12	TK Negeri Pembina Wonosobo	Bank Jateng 3023418320	Tidak menjadi perhitungan SILPA	481.279,00
13	TK Negeri Pembina Wonosobo	Bank Jateng 3023357061	Tidak menjadi perhitungan SILPA	100.000,00
14	PKBM Bergema	Bank Jateng 3104112446	Sisa Dana BOP Kesetaraan	37.400,00
15	KB Tunas Mulia	Bank Jateng 3104100260	Sisa penggunaan dana hibah	121.878,00
16	TK Aisyiyah Leksono	Bank Jateng 3171020408	Sisa penggunaan dana hibah	7.500,00
17	TK Islam Al-Futuhiyah	Bank Jateng 3023356758	Sisa penggunaan dana hibah	324.000,00
18	TK Pertiwi Mudal	Bank Jateng 3023356901	Sisa penggunaan dana hibah	162.000,00
19	KB Aisyiyah Azzahra	Bank Jateng 3104099571	Sisa penggunaan dana hibah	3.962,00
20	TK Aisyiyah Sapuran	Bank Jateng 3104099326	Sisa penggunaan dana hibah	200,00
21	TK Pertiwi 2 Pecekelan	Bank Jateng 3104099580	Sisa penggunaan dana hibah	4.778,00
22	TK Pertiwi 1 Kalierang	Bank Jateng 3171021340	Sisa penggunaan dana hibah	1.200,00
23	TK Pertiwi Semayu	Bank Jateng 3171021234	Sisa penggunaan dana hibah	780,00
24	TK Pertiwi Wilayu	Bank Jateng 3171021412	Sisa penggunaan dana hibah	840,00

No	Uraian	No. Rekening	Keterangan	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	TK Pertiwi 1 Tlogo	Bank Jateng 3171019892	Sisa penggunaan dana hibah	44.000,00
26	TK Quraniyah Suroyudan	Bank Jateng 3171019779	Sisa penggunaan dana hibah	20.000,00
27	TK Setyarini Pucungwetan	Bank Jateng 3171019922	Sisa penggunaan dana hibah	50.000,00
28	TK Al-Madina	Bank Jateng 3023355255	Sisa penggunaan dana hibah	120.000,00
29	TK IT Insan Mulia	Bank Jateng 3023356286	Sisa penggunaan dana hibah	30.500,00
		JUMLAH		**4.314.729,00**

(3) Saldo Kas Penanganan Stunting Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.502.000,00 nomor rekening Bank Jateng 1023012096 , hal ini berdasarkan SK Bupati Nomor: 978.5/330/2023 tentang penunjukan pengelola rekening penghimpunan bantuan yang bersumber dari masyarakat untuk percepatan penanganan stunting.

(4) Saldo Kas yang merupakan utang PFK berupa JKN 1% di rekening penampungan gaji No. rek 1023001531 sebesar Rp301.119.529,00. Pada tanggal 28 Februari 2024 dan 01 April 2024 masing-masing senilai Rp262.445.373,00 dan Rp3.787.730,00 telah disetorkan ke BPJS Kesehatan, sedangkan sisa sebesar Rp34.886.426,00 masih di rekening penampungan gaji.

Saldo Kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebagaimana Tabel V.74 di atas adalah sebesar Rp98.365.244.704,91 dan jika dibandingkan dengan SILPA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp98.025.712.684,91 terdapat selisih sebesar Rp339.532.020,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

A	Kas Lainnya Penanganan Stunting Wonosobo berdasarkan SK Bupati Nomor: 978.5/330/2023 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	37.502.000,00
B	PFK berupa JKN 1% di rekening penampungan gaji	301.119.529,00
C	Saldo Kas pada Sekolah Negeri	910.491,00
		339.532.020,00

C.1.a.7) Piutang

Saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp46.964.501.115,40 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.625.390.125,64 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp28.339.110..989,76 atau 152,15%, dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.85 berikut:

Tabel V.85 Saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Pajak Daerah	11.065.075.966,00	55.776.182.684,00	55.481.990.380,00	11.359.268.270,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	3.710.633.457,00	3.438.429.545,00	3.123.388.700,00	4.025.674.302,00
3.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	24.450.709.706,00	-	24.450.709.706,00
4.	Piutang lain-lain PAD yang sah	2.174.696.926,64	82.918.361.512,48	81.138.943.988,72	3.954.114.450,40
5.	Piutang Transfer Lainnya dari Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-
6.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	1.674.983.776,00	3.174.734.387,00	1.674.983.776,00	3.174.734.387,00
	JUMLAH	**18.625.390.125,64**	**169.758.417.834,48**	**141.419.306.844,72**	**46.964.501.115,40**

C.1.a.7).a) Piutang Pajak Daerah

Tabel V.85 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.359.268.270,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.065.075.966,00 mengalami kenaikan sebesar Rp294.192.304,00 atau 2,66% dengan penjelasan dibawah ini.

Saldo Awal Piutang Pajak Daerah	**:**	**11.065.075.966,00**
Mutasi Tambah	**:**	**55.776.182.684,00**
Surat Ketetapan Pajak Daerah	:	55.764.198.847,00
Koreksi atas kelebihan pembayaran Pokok Ketetapan PBB P2 tahun pajak 2013-2022	:	490.233,00
Koreksi atas kelebihan pembayaran Pokok Ketetapan PBB P2 tahun pajak 2023	:	1.565.180,00
Penambahan ketetapan pokok pajak hotel C dan hotel A TA 2023	:	9.928.424,00
Mutasi Kurang	**:**	
Pembayaran Piutang Pajak Daerah	:	55.276.578.446,00
koreksi atas kelebihan pembayaran piutang PBBP2 tahun pajak 2013 s/d 2022	:	9.446.664,00
Koreksi atas salah entry penerimaan pendapatan PBB seharusnya dengan ketetapan	:	195.965.270,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Daerah	**:**	**11.359.268.270,00**

Berikut rincian per jenis Piutang Pajak dapat dilihat pada Tabel V.86 berikut:

Tabel V.86 Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Pajak Hotel	110.236.238,00	1.501.706.866,00	1.581.380.479,00	30.562.625,00
2.	Piutang Pajak Restoran	180.584.531,00	8.074.397.485,00	8.144.052.731,00	110.929.285,00
3.	Piutang Pajak Hiburan	8.830.500,00	133.356.609,00	133.356.609,00	8.830.500,00
4.	Piutang Pajak Reklame	696.879.066,00	879.994.574,00	878.359.249,00	698.514.391,00
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	6.127.020,00	18.051.051.369,00	18.051.051.369,00	6.127.020,00
6.	Piutang Pajak Parkir	8.719.000,00	100.821.000,00	105.396.000,00	4.144.000,00
7.	Piutang Pajak Air Tanah	21.724.447,00	329.688.980,00	329.633.480,00	21.779.947,00
8.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	202.400,00	-	-	202.400,00
9.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.031.772.764,00	26.705.165.801,00	26.258.760.463,00	10.478.178.102,00
	JUMLAH	**11.065.075.966,00**	**55.776.182.684,00**	**55.481.990.380,00**	**11.359.268.270,00**

Pengelolaan Piutang Pajak Daerah berada di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Piutang Pajak Hotel

Tabel V.86 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.562.625,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp110.236.238,00 mengalami penurunan sebesar Rp79.673.613,00 atau 72,28%, karena pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pelunasan Piutang Pajak Hotel. Adapun mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal Piutang Pajak Hotel	**:**	**110.236.238,00**
Mutasi Tambah	**:**	**1.501.706.866,00**
Surat Ketetapan Pajak Daerah	:	1.501.706.866,00
Mutasi Kurang	**:**	**1.581.380.479,00**
Pembayaran Piutang Pajak Hotel	:	1.581.380.479,00
Saldo Akhir Piutang Pajak	**:**	**30.562.625,00**

(2) Piutang Pajak Restoran

Tabel V.86 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp110.929.285,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp180.584.531,00 mengalami penurunan sebesar Rp69.655.246,00 atau 38,57%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Restoran	**:**	**180.584.531,00**
Mutasi Tambah	**:**	**8.074.397.485,00**
Surat Ketetapan Pajak Daerah	:	8.074.397.485,00
Mutasi Kurang	**:**	**8.144.052.731,00**
Pembayaran Piutang Pajak Restoran	:	8.144.052.731,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Restoran	**:**	**110.929.285,00**

(3) Piutang Pajak Hiburan

Tabel V.86 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.830.500,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.830.500,00, tidak mengalami penurunan atau kenaikan selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Hiburan	**:**	**8.830.500,00**
Mutasi Tambah	**:**	**133.356.609,00**
Surat Ketetapan Pajak Daerah	:	133.356.609,00
Mutasi Kurang	**:**	**133.356.609,00**
Pembayaran Piutang Pajak Hiburan	:	133.356.609,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Hiburan	**:**	**8.830.500,00**

(4) Piutang Pajak Reklame

Tabel V.86 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp698.514.391,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp696.879.066,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.635.325,00 atau 0,23%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Reklame	**:**	**696.879.066,00**
Mutasi Tambah	**:**	**879.994.574,00**
Surat Ketetapan Pajak Daerah	:	879.994.574,00
Mutasi Kurang	**:**	**878.359.249,00**
Pembayaran Piutang Pajak Reklame	:	878.359.249,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Reklame	**:**	**698.514.391,00**

(5) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Tabel V.86 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.127.020,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.127.020,00 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan selama TA 2023 dengan penjelasan mutasi/koreksi selama TA 2023 sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Penerangan Jalan	**:**	**6.127.020,00**
Mutasi Tambah	**:**	**18.051.051.369,00**
Surat Ketetapan Pajak Daerah	:	18.051.051.369,00
Mutasi Kurang	**:**	**18.051.051.369,00**
Pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan	:	18.051.051.369,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan	**:**	**6.127.020,00**

(6) Piutang Pajak Parkir

Tabel V.86 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.144.000,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.719.000,00 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp4.575.000,00 atau 52,47% yang disebabkan mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Parkir	**:**	**8.719.000,00**
Mutasi Tambah	**:**	**100.821.000,00**
Surat Ketetapan Pajak Daerah	:	100.821.000,00
Mutasi Kurang	**:**	**105.396.000,00**
Pembayaran Piutang Pajak Parkir	:	105.396.000,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Parkir	**:**	**4.144.000,00**

(7) Piutang Pajak Air Tanah

Tabel V.86 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Air Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.779.947,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.724.447,00 mengalami kenaikan sebesar Rp55.500,00 atau 0,26%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Air Tanah	**:**	**21.724.447,00**
Mutasi Tambah	**:**	**329.688.980,00**
Surat Ketetapan Pajak Daerah	:	329.688.980,00
Mutasi Kurang	**:**	**329.633.480,00**
Pembayaran Piutang Pajak Air Tanah	:	329.633.480,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Air Tanah	**:**	**21.779.947,00**

(8) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel V.86 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp202.400,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp202.400,00 cenderung stagnan.

(9) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Tabel V.86 di atas menunjukkan Saldo Piutang PBBP2 Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.478.178.102,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.031.772.764,00 mengalami kenaikan sebesar Rp446.405.338,00 atau 4,45%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang PBBP2	**:**	**10.031.772.764,00**
Mutasi Tambah	**:**	**26.705.165.801,00**
Pendapatan Pajak PBBP2-LO	:	26.703.110.388,00
Koreksi atas Kelebihan Pembayaran Piutang PBB-P2 tahun pajak 2013-2022	:	490.233,00
Koreksi atas kelebihan pembayaran Pokok Ketetapan PBB P2 tahun pajak 2023	:	1.565.180,00
Mutasi Kurang	**:**	**26.247.411.371,00**
Pendapatan Pajak PBBP2-LRA	:	26.247.411.371,00
koreksi atas kelebihan pembayaran piutang PBBP2 tahun pajak 2013 s/d 2022	:	9.446.664,00
Koreksi atas salah entry penerimaan pendapatan PBB seharusnya dengan ketetapan	:	195.965.270,00
Saldo Akhir Piutang PBBP2	**:**	**10.478.178.102,00**

C.1.a.7).b) Piutang Retribusi Daerah

Tabel V.85 di atas menunjukkan Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.025.674.302,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.710.633.457,00 mengalami kenaikan sebesar Rp315.040.845,00 atau 8,49% dengan penjelasan dibawah ini.

Saldo Awal Piutang Retribusi Daerah	**:**	**3.710.633.457,00**
Mutasi Tambah	**:**	**3.438.429.545,00**
Surat Ketetapan Retribusi Daerah	:	3.438.087.545,00
Kurang catat piutang retribusi penyewaan tahan tahun 2022	:	342.000,00
Mutasi Kurang	**:**	**3.123.388.700,00**
Pembayaran Piutang Retribusi Daerah	:	3.123.388.700,00
Saldo Akhir Piutang Retribusi Daerah	**:**	**4.025.674.302,00**

Berikut rincian per jenis Piutang Retribusi Daerah lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.87 berikut:

Tabel V.87 Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Retribusi Jasa Umum	3.036.161.837,00	1.617.076.008,00	1.378.060.763,00	3.275.177.082,00
2.	Piutang Retribusi Jasa Usaha	421.671.350,00	202.980.500,00	126.954.900,00	497.696.950,00
3.	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	252.800.270,00	1.618.373.037,00	1.618.373.037,00	252.800.270,00
	JUMLAH	**3.710.633.457,00**	**3.438.429.545,00**	**3.123.388.700,00**	**4.025.674.302,00**

(a) Piutang Retribusi Jasa Umum

Tabel V.87 di atas menunjukkan Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.275.177.082,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.036.161.837,00 mengalami kenaikan sebesar Rp239.015.245,00 atau 7,87% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.88 berikut:

Tabel V.88 Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	317.919.000,00	-	-	317.919.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2.232.698.308,00	791.542.838,00	463.506.615,00	2.560.734.531,00
3.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	485.544.529,00	481.676.670,00	570.697.648,00	396.523.551,00
4.	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	-	-	-
5.	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	343.856.500,00	343.856.500,00	-
	JUMLAH	**3.036.161.837,00**	**1.617.076.008,00**	**1.378.060.763,00**	**3.275.177.082,00**

1) Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub).
2) Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar berada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop UKM).
3) Saldo Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi berada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
4) Saldo Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub).

(b) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Tabel V.87 di atas menunjukkan Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp497.696.950,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp421.671.350,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp76.025.600,00 atau 18,03% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.89 berikut:

Tabel V.89 Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	416.871.350,00	202.980.500,00	126.954.900,00	492.896.950,00
2.	Piutang Retribusi Terminal	600.000,00	-	-	600.000,00
3.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.200.000,00	-	-	4.200.000,00
	JUMLAH	**421.671.350,00**	**202.980.500,00**	**126.954.900,00**	**497.696.950,00**

1) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2023 berada di dua entitas dengan rincian dapat dilihat pada Tabel V.90 berikut:

Tabel V.90 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	DPMPTSP	16.700,00	4.004.500,00	4.004.500,00	16.700,00
2.	Disdagkop UKM	416.854.650,00	198.976.000,00	122.950.400,00	492.880.250,00
	JUMLAH	**416.871.350,00**	**202.980.500,00**	**126.954.900,00**	**492.896.950,00**

2) Retribusi Terminal berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), dengan saldo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp600.000,00
3) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), dengan saldo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.200.000,00.

(c) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel V.87 di atas menunjukkan Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp252.800.270,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp252.800.270,00 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan selama TA 2023 dengan uraian dapat dilihat pada tabel V.91 berikut:

Tabel V.91 Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	179.143.484,00	1.618.373.037,00	1.618.373.037,00	179.143.484,00
2.	Piutang Retribusi Izin Trayek	49.798.750,00	-	-	49.798.750,00
3.	Piutang Retribusi Izin Gangguan	23.858.036,00	-	-	23.858.036,00
	JUMLAH	**252.800.270,00**	**1.618.373.037,00**	**1.618.373.037,00**	**252.800.270,00**

1) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp179.143.484,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp179.143.484,00 saldo piutang cenderung stagnan.

2) Piutang Retribusi Izin Trayek berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), dengan saldo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.798.750,00.
3) Piutang Retribusi Izin Gangguan berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar Rp23.858.036,00.

C.1.a.7).c) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel V.85 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.850.091.079,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Nihil, mengalami kenaikan sebesar Rp24.450.709.706,00 atau 100,00%, karena pada saat Tahun Anggaran 2022 belum ada BUMD yang mengumumkan hasil dari RUPS. Uraian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.92 berikut:

Tabel V.92 Saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	12.850.091.079,00	-	12.850.091.079,00
2.	PT BPR BKK Wonosobo	-	4.166.335.747,00	-	4.166.335.747,00
3.	Perumda PDAM Tirta Aji Kabupaten Wonosobo	-	7.434.282.880,00	-	7.434.282.880,00
	JUMLAH	**-**	**24.450.709.706,00**	**-**	**24.450.709.706,00**

C.1.a.7).d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel V.85 di atas menunjukkan Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.954.114.450,40, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.174.696.926,64 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.779.417.523,76 atau 81,82%, dari adanya Piutang Pendapatan dari Pengembalian yang pada saat Tahun Anggaran 2022 nilainya nihil. uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.93 berikut:

Tabel V.93 Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	974.640.118,40	5.062.434.597,00	4.954.566.255,00	1.082.508.460,40
2.	Piutang Pendapatan Bunga	1.101.727,74	-	1.101.727,74	-
3.	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	59.817.485,00	1.500.000,00	55.962.485,00	5.355.000,00
4.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	2.723.253,00	-	2.723.253,00
5.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	-	1.283.314.000,00	-	1.283.314.000,00
6.	Piutang Pendapatan BLUD	1.139.137.595,50	76.566.186.207,00	76.125.110.065,50	1.580.213.737,00
7.	Piutang Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	-	2.203.455,48	2.203.455,48	-
	JUMLAH	**2.174.696.926,64**	**82.918.361.512,48**	**81.138.943.988,72**	**3.954.114.450,40**

(1) Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tabel V.93 di atas menunjukkan Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.082.508.460,40, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp974.640.118,40 mengalami kenaikan sebesar Rp107.868.342,00 atau 11,07% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.94 Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Disperkimhub	8.172.000,00	-	-	8.172.000,00
2.	Disparbud	132.862.500,00	280.126.000,00	236.088.500,00	176.900.000,00
3.	Kel Jlamprang	14.500.000,00	7.000.000,00	21.500.000,00	-
4.	Kel Kejiwan	10.550.000,00	49.939.500,00	49.939.500,00	10.550.000,00
5.	Kel Sambek	-	36.650.000,00	28.050.000,00	8.600.000,00
6.	Kel Mlipak	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
7.	Kel Pagerkukuh	56.290.000,00	56.170.000,00	50.900.000,00	61.560.000,00
8.	Kel Rojoimo	152.450.000,00	83.350.100,00	83.350.100,00	152.450.000,00
9.	Kel Kramatan	17.400.000,00	85.510.000,00	86.050.000,00	16.860.000,00
10.	Kel Tawangsari	-	18.800.000,00	18.800.000,00	-
11.	Kel Jaraksari	-	18.600.000,00	18.600.000,00	-
12.	Kel Bumireso	27.600.000,00	57.950.000,00	38.350.000,00	47.200.000,00
13.	Kel Kalianget	57.000.000,00	42.200.000,00	16.500.000,00	82.700.000,00
14.	Kel Kertek	-	112.950.000,00	106.450.000,00	6.500.000,00
15.	Kel Wringinanom	-	175.100.000,00	165.600.000,00	9.500.000,00
16.	Kel Selomerto	-	168.600.000,00	168.600.000,00	-
17.	Kel Wonorejo	-	106.150.000,00	106.150.000,00	-
18.	Kel Leksono	327.950.000,00	414.000.000,00	414.000.000,00	327.950.000,00
19.	Kel Wonoroto	52.525.000,00	63.900.000,00	63.900.000,00	52.525.000,00
20.	Kel Kalibeber	18.600.000,00	69.685.000,00	69.685.000,00	18.600.000,00
21.	Kel Mudal	-	43.200.000,00	43.200.000,00	-
22.	Kel Andongsili	-	42.770.000,00	42.770.000,00	-
23.	Kel Garung	-	21.200.000,00	21.200.000,00	-
24.	Kel Kejajar	-	70.409.000,00	70.409.000,00	-
25.	Kel Kalikajar	5.500.000,00	47.500.000,00	49.800.000,00	3.200.000,00
26.	Kel Sapuran	22.641.000,00	127.650.000,00	123.100.000,00	27.191.000,00
27.	Kel Kepil	6.938.000,00	118.970.000,00	118.970.000,00	6.938.000,00
28.	Kel Kaliwiro	400.000,00	24.350.000,00	24.750.000,00	-
29.	Kel Wadaslintang	23.450.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00	23.450.000,00
30.	BPPKAD	39.811.618,40	2.615.674.997,00	2.613.824.155,00	41.662.460,40
	JUMLAH	**974.640.118,40**	**5.062.434.597,00**	**4.954.566.255,00**	**1.082.508.460,40**

(2) Piutang Pendapatan Bunga

Tabel V.93 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pendapatan Bunga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar nihil dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.101.727,74. Piutang Pendapatan Bunga TA 2022 merupakan Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF. Piutang Pendapatan tersebut telah diterima di RKUD pada tanggal 26 April 2023 dan diakui sebagai pendapatan-LRA pada BPPKAD dengan No. Bukti 2713.c/sts/bppkad/2023.

(3) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tabel V.93 di atas menunjukkan Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.355.000,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.817.485,00 mengalami penurunan sebesar Rp54.462.485,00 atau 91,05% karena pada tahun 2023 Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah atas nama Drs BSW, Apt telah terbayarkan seluruhnya, sedangkan atas nama PU, SE telah terbayarkan sebagian dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.95 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian Rincian Piutang	SKTJM	Tahun Pengakuan	Saldo Per 31/12/2022	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo per 31/12/2023
					Debet	Kredit	
1	Drs. BSW, Apt	SKTJM No.028/001/2021	2021	45.212.485,00	-	45.212.485,00	-
2	PU, SE.	SKTJM No. 951/02/TPKD/X/2022	2022	14.605.000,00	-	9.250.000,00	5.355.000,00
	JUMLAH			**59.817.485,00**	**-**	**54.462.485,00**	**5.355.000,00**

(4) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Tabel V.93 di atas Menunjukan Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.723.253,00, sedangkan dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah nihil. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah terdiri dari:

	Uraian	(Dalam Rupiah)
(1)	Hotel A	860.333,00
(2)	Hotel C	1.862.920,00
	Jumlah	**2.723.253,00**

(5) Piutang Pendapatan BLUD

Tabel V.93 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pendapatan BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.580.213.737,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.139.137.595,50 mengalami kenaikan sebesar Rp441.076.141,50 atau 38,72%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.96 berikut :

Tabel V.96 Saldo Piutang Pendapatan BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Puskesmas Wonosobo 1	-	35.175.000,00	-	35.175.000,00
2.	Puskesmas Kertek 1	18.735.000,00	11.780.000,00	18.735.000,00	11.780.000,00
3.	Puskesmas Selomerto 1	48.955.000,00	-	48.955.000,00	-
4.	Puskesmas Leksono 1	-	2.180.000,00	-	2.180.000,00
5.	Puskesmas Watumalang	-	14.442.000,00	-	14.442.000,00
6.	Puskesmas Mojotengah	-	4.376.000,00	-	4.376.000,00
7.	Puskesmas Garung	680.000,00	20.744.400,00	680.000,00	20.744.400,00
8.	Puskesmas Kejajar 1	38.408.000,00	-	38.408.000,00	-
9.	Puskesmas Kalikajar 1	1.090.000,00	1.285.000,00	1.090.000,00	1.285.000,00
10.	Puskesmas Sapuran	74.301.000,00	-	74.301.000,00	-
11.	Puskesmas Kepil 1	21.494.000,00	-	21.494.000,00	-
12.	Puskesmas Kaliwiro	-	42.986.000,00	-	42.986.000,00
13.	Puskesmas Wadaslintang 1	-	2.535.000,00	-	2.535.000,00
14.	Puskesmas Sukoharjo 1	-	1.741.000,00	-	1.741.000,00
15.	Puskesmas Kalibawang	-	16.951.000,00	-	16.951.000,00
16.	Puskesmas Wonosobo 2	2.645.000,00	1.400.000,00	2.645.000,00	1.400.000,00
17.	Puskesmas Kertek 2	15.829.840,00	29.481.000,00	15.829.840,00	29.481.000,00
18.	Puskesmas Selomerto 2	3.055.000,00	2.439.000,00	3.055.000,00	2.439.000,00
19.	Puskesmas Leksono 2	-	1.246.000,00	-	1.246.000,00
20.	Puskesmas Kejajar 2	-	8.405.000,00	-	8.405.000,00
21.	Puskesmas Kalikajar 2	11.985.120,00	2.180.000,00	11.985.120,00	2.180.000,00
22.	Puskesmas Kepil 2	16.296.000,00	500.000,00	16.296.000,00	500.000,00
23.	Puskesmas Wadaslintang 2	22.855.000,00	10.945.000,00	22.855.000,00	10.945.000,00
24.	Puskesmas Sukoharjo 2	6.995.000,00	7.197.000,00	6.995.000,00	7.197.000,00
25.	RSUD KRT Setjonegoro	855.813.635,50	76.348.197.807,00	75.841.786.105,50	1.362.225.337,00
	JUMLAH	**1.139.137.595,50**	**76.566.186.207,00**	**76.125.110.065,50**	**1.580.213.737,00**

(6) Piutang Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 telah menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam APBD. Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh Dana Transfer pada rekening *Treasury Deposit Facility* dengan saldo remunerasi per 31 Desember 2023 adalah nihil, sedangkan pada tahun sebelumnya diakui sebagai Piutang Pendapatan Bunga.

C.1.a.7).e) Piutang Transfer Lainnya dari Pusat – Dana Perimbangan

Tabel V.85 di atas menunjukkan Saldo Piutang Transfer Lainnya dari Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Nihil.

C.1.a.7).f) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel V.85 di atas menunjukkan Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.174.734.387,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.674.983.776,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.499.750.611,00 atau 89,54% berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2023 yang belum terbayarkan, yang berasal dari mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**:**	**1.674.983.776,00**
Mutasi Tambah	**:**	**3.174.734.387,00**
BA Rekonsiliasi Nomor 7/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2024 Tanggal 23 Januari 2024	:	3.026.342.507,00
BA Rekonsiliasi Bonus Produksi Panas Bumi Tanggal 14 Maret 2024	:	148.391.880,00
Mutasi Kurang	:	**1.674.983.776,00**
Pembayaran Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 tanggal 20 November 2023	:	1.674.983.776,00
Saldo Akhir Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**:**	**3.174.734.387,00**

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 merupakan Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Piutang Pendapatan Hibah dari PT. Geo Dipa Energi (Persero) dengan rincian sebagaimana Tabel V.97 berikut.

Tabel V.97 Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.009.323.243,00	597.427.581,00	1.009.323.243,00	597.427.581,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	570.872.250,00	15.111.630,00	570.872.250,00	15.111.630,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.744.978,00	2.397.280.863,00	49.744.978,00	2.397.280.863,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	45.043.305,00	16.522.433,00	45.043.305,00	16.522.433,00
5.	Piutang Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	148.391.880,00	-	148.391.880,00
	JUMLAH	**1.674.983.776,00**	**3.174.734.387,00**	**1.674.983.776,00**	**3.174.734.387,00**

Penambahan Piutang Pendapatan Bagi Hasil tersebut didasarkan pada Berita Acara Rekonsiliasi Nomor Nomor 7/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2024 Tanggal 23 Januari 2024 rekonsiliasi tersebut dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan BPPKAD Kabupaten Wonosobo sedangkan Piutang Pendapatan Hibah berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Bonus Produksi Panas Bumi TW IV Tahun 2023 Tanggal 14 Maret 2024.

C.1.a.8) Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.081.900.594,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.092.000.594,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.100.000,00 atau 0,17%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.98 berikut.

Tabel V.98 Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	6.092.000.594,00	-	10.100.000,00	6.081.900.594,00
2.	Uang Muka	-	-	-	-
	JUMLAH	**6.092.000.594,00**	**-**	**10.100.000,00**	**6.081.900.594,00**

(1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Tabel V.98 di atas menunjukkan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.081.900.594,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.092.000.594,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.100.000 atau 0,17%, Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang tersebut berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat pada beberapa entitas dengan rincian sebagaimana Tabel V.99 berikut :

Tabel V.99 Saldo Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	4.885.286.744,00	-	10.100.000,00	4.873.986.744,00
2.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	599.935.300,00	-	-	599.935.300,00
3.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi	606.778.550,00	-	-	606.778.550,00
	JUMLAH	**6.092.000.594,00**	**-**	**10.100.000,00**	**6.081.900.594,00**

Rincian lebih lanjut terkait dengan Saldo Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang berupa Dana Bergulir dapat dilihat pada Lampiran V.11.

(2) Uang Muka

Tabel V.98 diatas menunjukan Uang Muka Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah nihil.

C.1.a.9) Penyisihan Piutang

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 Kebijakan Akuntansi Daerah. Penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan umur piutang dibedakan menjadi empat kategori sebagaimana pada Tabel V.100 berikut:

Tabel V.100 Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur/Kualitas Piutang	Keterangan
1.	Lancar	0%	-
2.	Kurang Lancar	10%	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
3.	Diragukan	50%	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
4	Macet	100%	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

Sedangkan kualitas piutang ditentukan berdasarkan berikut:

Tabel V.101 Kualitas Piutang

No.	JENIS PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	UMUR PIUTANG
1	PAJAK dengan Self Assesment	Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet	Kurang 1 Tahun 1 s/d 2 Tahun Di atas 2 s/d 5 Tahun Di atas 5 Tahun
2	PAJAK dengan Official Assesment	Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet	Kurang 1 Tahun 1 s/d 2 Tahun Di atas 2 s/d 5 Tahun Di atas 5 Tahun
3		Lancar	0 s/d 1 Bulan

No.	JENIS PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	UMUR PIUTANG
	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Obyek Retribusi	Kurang Lancar Diragukan Macet	Lebih dari 1 bulan s/d 3 Bulan Lebih dari 3 bulan s/d 12 Bulan Lebih dari 12 Bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Yang Disebutkan Retribusi	Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet	0 s/d 1 Tahun Lebih dari 1 s/d 2 Tahun di atas 2 s/d 3 Tahun di atas 3 Tahun
5	TP-TGR	Dikecualikan dari ketentuan penggolongan kualitas piutang tersebut di atas.	

Saldo Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp16.455.170.868,84). Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp15.633.100.118,90) saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp822.070.749,94 atau 5,26%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2023 dengan rincian sebagaimana Tabel V.102 di bawah ini.

Tabel V.102 Saldo Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(5.968.082.219,60)	-	266.228.753,70	(6.234.310.973,30)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.881.543.286,50)	2.349.183.554,50	2.796.141.277,00	(3.328.501.009,00)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(691.474.018,80)	618.102.118,80	737.086.392,54	(810.458.292,54)
4.	Penyisihan Piutang Lainnya	(6.092.000.594,00)	5.495.322.044,00	5.485.222.044,00	(6.081.900.594,00)
	JUMLAH	**(15.633.100.118,90)**	**8.462.607.717,30**	**9.284.678.467,24**	**(16.455.170.868,84)**

Rincian lebih lanjut terkait saldo penyisihan piutang dapat dilihat pada Lampiran V.17.

(a) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel V.102 di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp6.234.310.973,30) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp5.968.082.219,60) mengalami kenaikan sebesar Rp266.228.753,70 atau 4,46%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.103 berikut:

Tabel V.103 Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(20.431.100,50)	-	87.500,00	(20.518.600,50)
2.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(86.167.200,00)	-	-	(86.167.200,00)
3.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(8.830.500,00)	-	123.856.426,90	(132.686.926,90)
4.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(557.356.712,60)	-	-	(557.356.712,60)
5.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(6.127.020,00)	-	-	(6.127.020,00)
6.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(3.430.000,00)	-	639.000,00	(4.069.000,00)
7.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(20.346.663,50)	-	1.377.783,50	(21.724.447,00)
8.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(202.400,00)	-	-	(202.400,00)
9.	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(5.265.190.623,00)	-	140.268.043,30	(5.405.458.666,30)
	JUMLAH	**(5.968.082.219,60)**	**-**	**266.228.753,70**	**(6.234.310.973,30)**

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) berada di BPPKAD dengan rincian sebagaimana tabel V.104 di bawah ini:

Tabel V.104 Penyisihan Piutang PBB Sektor Pedesaan Perkotaan TA 2023

No	Keterangan	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
			Kategori	%	Jumlah
1	Piutang Th 2013	Di atas 5 Tahun	Macet	100%	832.331.981,00
2	Piutang Th 2014	Di atas 5 Tahun	Macet	100%	796.263.936,00
3	Piutang Th 2015	Di atas 5 Tahun	Macet	100%	727.863.480,00
4	Piutang Th 2016	Di atas 5 Tahun	Macet	100%	662.298.663,00
5	Piutang Th 2017	Di atas 5 Tahun	Macet	100%	845.856.178,00
6	Piutang Th 2018	Di atas 2 s/d 5 Tahun	Diragukan	50%	566.268.133,00
7	Piutang Th 2019	Di atas 2 s/d 5 Tahun	Diragukan	50%	379.345.530,00
8	Piutang Th 2020	Di atas 2 s/d 5 Tahun	Diragukan	50%	354.456.927,50
9	Piutang Th 2021	Di atas 1 s/d 2 Tahun	Kurang Lancar	10%	111.773.823,30
10	Piutang Th 2022	Di atas 1 s/d 2 Tahun	Kurang Lancar	10%	129.000.015
11	Piutang Th 2023	Kurang dari 1 Tahun	Lancar	0%	-
			Jumlah		**5.405.458.666,80**

Jatuh Tempo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bulan September, sehingga untuk menghitung umur piutang adalah per 30 September.

(b) Penyisihan Piutang Retribusi

Tabel V.102 di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.328.501.009,00) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.881.543.286,50) mengalami kenaikan sebesar Rp446.957.722,50 atau 15,51%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.105 berikut:

Tabel V.105 Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	(279.067.000,00)	-	38.852.000,00	(317.919.000,00)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(1.667.478.779,50)	1.667.478.779,50	-	-
3.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Los	-	-	921.761.908,00	(921.761.908,00)
4.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan pasar-Kios	-	-	1.022.669.255,00	(1.022.669.255,00)
5.	Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(325.141.512,00)	-	59.070.114,00	(384.211.626,00)
6.	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(352.239.025,00)	352.239.025,00	-	-
7.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	-	-	424.322.250,00	(424.322.250,00)
8.	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	(4.200.000,00)	-	-	(4.200.000,00)
9.	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	(179.143.484,00)	-	-	(179.143.484,00)
10.	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	(49.798.750,00)	-	-	(49.798.750,00)
11.	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan	(23.858.036,00)	-	-	(23.858.036,00)
12.	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	(16.700,00)	-	-	(16.700,00)
13.	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	(600.000,00)	-	-	(600.000,00)
	JUMLAH	**(2.881.543.286,50)**	**2.019.717.804,50**	**2.466.675.527,00**	**(3.328.501.009,00)**

(c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel V.102 di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp810.458.292,54) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp691.474.018,80) mengalami kenaikan sebesar Rp118.984.273,74 atau 17,21%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.106 berikut:

Tabel V.106 Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/20223 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	(620.566.900,00)	543.687.000,00	2.435.000,00	(79.314.900,00)
2.	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Sewa BMD	-	3.508.000,00	623.388.061,84	(619.880.061,84)
3.	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-	-
4.	Penyisihan Piutang BLUD	(70.907.118,80)	70.907.118,80	111.263.330,70	(111.263.330,70)
	JUMLAH	**(691.474.018,80)**	**618.102.118,80**	**737.086.392,54**	**(810.458.292,54)**

(d) Penyisihan Piutang Lainnya
Saldo Piutang Lainnya berasal dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana Bergulir tersebut sudah dalam kategori "Macet" sehingga disisihkan 100% yaitu sebesar (Rp6.081.900.594,00).

C.1.a.10) Beban Dibayar Dimuka

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp166.353.469,67. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp176.609.655,00 saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.256.185,33 atau 5,81%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2023 dengan rincian sebagaimana Tabel V.107 di bawah ini.

Tabel V.107 Saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	SKPD	Nilai Polis/Kontrak	Potongan	Periode Pertanggungan Mulai	Akhir	Beban TA 2023	Beban Dibayar Dimuka Premi/Bulan	bln	Jumlah
1.	RSUD Setjonegoro	70.206.658,00		04/05/2023	04/05/2024	70.206.658,00	5.850.554,83	4	23.402.219,33
2.	Sekretariat DPRD	75.865.950,01		20/12/2023	19/12/2024	75.865.950,00	6.322.162,50	12	75.865.950,01
3.	BPPKAD	74.083.964,00	900.000,00	14/12/2023	14/12/2024	73.183.964,00	6.098.663,67	11	67.085.300,33
	JUMLAH	**220.156.572,01**	**900.000,00**			**219.256.572,00**	**-**		**166.353.469,67**

(a) Beban Dibayar Dimuka pada Sekretariat DPRD merupakan pengakuan asuransi kendaraan dengan nilai polis atau kontrak sebesar Rp75.865.950,01 mulai dari tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024. Nilai Beban Dibayar Dimuka pada Sekretariat DPRD per 31 Desember 2023 sebesar Rp75.865.950,01.

(b) Beban Dibayar Dimuka pada BPPKAD merupakan premi asuransi kendaraan dengan nilai polis atau kontrak sebesar Rp74.083.964,00 dan mendapatkan potongan nilai polis atau kontrak sebesar Rp900.000,00 mulai dari tanggal 14 Desember 2023 sampai

dengan tanggal 14 Desember 2024. Nilai Beban Dibayar Dimuka pada BPPKAD per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.085.300,33.

(c) Beban Dibayar Dimuka pada RSUD KRT Setjonegoro merupakan premi asuransi kesehatan dokter dengan nilai polis atau kontrak sebesar Rp70.206.658,00 mulai dari tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024. Nilai Beban Dibayar Dimuka pada RSUD KRT Setjonegoro 31 Desember 2023 sebesar Rp23.402.219,33.

C.1.a.11) Persediaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang dimaksud Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang - barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp33.614.700.012,97 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.593.855.749,33 mengalami penurunan sebesar Rp979.155.736,36 atau 2,83% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.108 berikut:

Tabel V.108 Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Barang Pakai Habis	34.541.370.749,33	33.631.558.114,78	34.558.228.840,14	33.614.700.012,97
2.	Barang Tak Habis Pakai	28.560.000,00	-	28.560.000,00	-
3.	Barang Bekas Dipakai	23.925.000,00	-	23.925.000,00	-
	JUMLAH	**34.593.855.749,33**	**33.631.558.114,78**	**34.610.713.840,14**	**33.614.700.012,97**

C.1.a.11).a)Barang Pakai Habis

Tabel V.108 di atas menunjukkan Saldo Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.614.700.012,97, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.541.370.749,33 mengalami penurunan sebesar Rp926.670.736,36 atau 2,68%, dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.109 berikut:

Tabel V.109 Saldo Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bahan	1.430.514.232,29	1.715.046.225,60	1.430.514.232,29	1.715.046.225,60
2.	Suku Cadang	-	165.175.948,86	3.733.236,81	161.442.712,05
3.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.627.009.870,57	2.985.373.698,40	3.640.104.736,17	2.972.278.832,80
4.	Obat-obatan	28.831.526.128,66	27.204.691.440,19	28.831.556.129,16	27.204.661.439,69
5.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	590.231.481,00	368.794.378,00	590.231.481,00	368.794.378,00
6.	Natura dan Pakan	62.089.036,81	1.192.476.424,83	62.089.036,81	1.192.476.424,83
	JUMLAH	**34.541.370.749,33**	**33.631.558.115,88**	**34.558.228.852,24**	**33.614.700.012,97**

(1) Bahan

Tabel V.109 di atas menunjukkan Saldo Bahan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.715.046.225,60, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.430.514.232,29 mengalami kenaikan sebesar Rp284.531.993,31

atau 19,89%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan uraian sebagaimana Tabel V.110 berikut:

Tabel V.110 Saldo Bahan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	360.839.020,00	567.707.388,80	360.839.020,00	567.707.388,80
2.	Bahan Kimia	1.022.136.619,29	958.964.569,40	1.022.136.619,29	958.964.569,40
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	200.000,00	39.636.324,00	-	39.636.324,00
4.	Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-
5.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	8.998.213,00	200.000,00	8.998.213,00
6.	Isi Tabung Gas	227.000,00	5.333.700,00	227.000,00	5.333.700,00
7.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-
8.	Bahan Lainnya	47.111.593,00	134.406.030,40	47.111.593,00	134.406.030,40
	JUMLAH	**1.430.514.232,29**	**1.715.046.225,60**	**1.430.514.232,29**	**1.715.046.225,60**

(2) Suku Cadang

Tabel V.109 di atas menunjukkan Saldo Suku Cadang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp161.442.712,05 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Nihil, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp161.442.712,05 atau 100% karena terdapat belanja Suku Cadang Alat Kedokteran pada Puskesmas. Mutasi/koreksi selama TA 2023 dapat diuraikan sebagaimana Tabel V.111 berikut:

Tabel V.111 Saldo Suku Cadang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet Hasil Stock Opname	Kredit Pemakaian	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)0,00(5)
1.	Suku Cadang Alat Kedokteran	-	155.564.437,86	3.733.225,81	151.831.212,05
2.	Suku Cadang Lainnya	-	9.611.511,00	11,00	9.611.500,00
	JUMLAH	**-**	**165.175.948,86**	**3.733.236,81**	**161.442.712,05**

(3) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Tabel V.109 di atas menunjukkan Saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.972.278.832,80, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.627.009.870,57 mengalami penurunan sebesar Rp654.731.037,77 atau 18,05%. Berikut rincian saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor dapat dilihat pada Tabel V.100 berikut:

Tabel V.112 Saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Tulis Kantor	347.753.645,98	289.292.514,60	347.753.645,98	289.292.514,60
2.	Kertas dan Cover	100.188.211,30	97.645.969,30	100.188.211,30	97.645.969,30
3.	Bahan Cetak	1.329.474.712,73	1.129.896.625,33	1.341.997.928,33	1.117.373.409,73
4.	Benda Pos	2.614.999,00	1.980.000,00	2.614.999,00	1.980.000,00
5.	Bahan Komputer	883.336.608,00	1.046.089.539,02	883.336.608,00	1.046.089.539,02
6.	Perabot Kantor	465.606.537,91	235.391.927,40	465.606.537,91	234.891.927,40
7.	Alat Listrik	16.613.810,00	17.470.587,00	16.613.810,00	17.470.587,00
8.	Perlengkapan Dinas	152.129.000,00	66.257.800,00	152.129.000,00	66.257.800,00
9.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.117.431,83	2.875.000,00	1.117.431,83	2.875.000,00
10.	Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	-
11.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	328.174.913,82	98.473.735,75	328.746.563,82	97.602.085,75
	JUMLAH	**3.627.009.870,57**	**2.985.373.698,40**	**3.640.104.736,17**	**2.972.278.832,80**

(4) Obat-obatan

Tabel V.109 di atas menunjukkan Saldo Obat-obatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.204.661.439,69 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.831.526.128,66 mengalami penurunan sebesar Rp1.626.864.688,97 atau 5,64% yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan dibawah ini:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Awal per 31 Desember 2022**	**:**	**28.831.526.128,66**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**27.204.691.440,19**
	Hasil Perhitungan Fisik (Stock Opname) per 31 Desember 2023	:	27.204.476.499,39
	kurang catat saldo akhir PKM Leksono 2	:	0,01
	kurang catat saldo awal persediaan PKM Wonosobo 1	:	214.940,79
(3)	**Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:**	**:**	**28.831.556.129,16**
	Pemakaian Persediaan	:	28.831.556.128,66
	lebih catat saldo akhir PKM Kertek 2	:	0,50
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir per 31 Desember 2023**	**:**	**27.204.661.439,69**

Berikut rincian saldo Obat-obatan dapat dilihat pada Tabel V.113 berikut:

Tabel V.113 Saldo Obat-obatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Obat	27.320.504.968,86	25.739.234.342,19	27.320.534.969,36	25.739.204.341,69
2.	Obat-obatan Lainnya	1.511.021.159,80	1.465.457.098,00	1.511.021.159,80	1.465.457.098,00
	JUMLAH	**28.831.526.128,66**	**27.204.691.440,19**	**28.831.556.129,16**	**27.204.661.439,69**

(5) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Tabel V.109 di atas menunjukkan Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp368.794.378,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp590.231.481,00 mengalami penurunan sebesar Rp221.437.103,00 atau 37,52% yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan dibawah ini:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Awal per 31 Desember 2022**	**:**	**590.231.481,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**368.794.378,00**
	Hasil Perhitungan Fisik (*Stock Opname*) per 31 Desember 2023	:	368.794.378,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:**	**:**	**590.231.481,00**
	Pemakaian Persediaan	:	590.231.481,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir per 31 Desember 2023**	**:**	**368.794.378,00**

Berikut rincian saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebagaimana Tabel V.114 berikut:

Tabel V.114 Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	590.231.481,00	41.741.864,00	590.231.481,00	41.741.864,00
2.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	327.052.514,00	-	327.052.514,00
	JUMLAH	**590.231.481,00**	**368.794.378,00**	**590.231.481,00**	**368.794.378,00**

Jika dilihat pada Tabel V.114 di atas, pada TA 2023 terdapat saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp368.794.378,00 yang berada di entitas sebagai berikut:

(a) Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp12.673.000,00 berada di Puskesmas Kalikajar 1;
(b) Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp26.575.804,00 dan saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp206.999.514,00 berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
(c) Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.493.060,00 berada di DPPKBPPPA;
(d) Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp120.053.000,00 berada di DPUPR;

(6) Natura dan Pakan

Tabel V.109 di atas menunjukkan Saldo Natura dan Pakan Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.192.476.424,83 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp62.089.036,81 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.130.387.388,02 atau 1.820,59%, karena pada Tahun Anggaran 2023 penggunaan Natura dan Pakan hanya pada sisa dari saldo awal, sedangkan terdapat belanja pada Tahun Anggaran 2023 yang belum digunakan pada BLUD sampai dengan 31 Desember 2023. yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan dibawah ini:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Awal per 31 Desember 2022**	**:**	**62.089.036,81**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**1.192.476.424,83**
	Hasil Perhitungan Fisik (*Stock Opname*) per 31 Desember 2023	:	1.192.476.424,83
(3)	**Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:**	**:**	**62.089.036,81**
	Pemakaian Persediaan	:	62.089.036,81
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir per 31 Desember 2023**	**:**	**1.192.476.424,83**

Berikut rincian Saldo Natura dan Pakan sebagaimana Tabel V.115 berikut:

Tabel V.115 Saldo Natura dan Pakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Natura	62.089.036,81	830.144.424,83	62.089.036,81	830.144.424,83
2.	Natura dan Pakan Lainnya	-	362.332.000,00	-	362.332.000,00
	JUMLAH	**62.089.036,81**	**1.192.476.424,83**	**62.089.036,81**	**1.192.476.424,83**

C.1.a.11).b)Barang Tak Habis Pakai

Tabel V.108 di atas menunjukkan Saldo Barang Tak Habis Pakai Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Nihil dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.560.000,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.560.000,00,00 atau 100,00% karena pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat realisasi belanja barang tak habis pakai. dengan penjelasan dibawah ini:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Awal per 31 Desember 2022**	**:**	**28.560.000,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**-**
	Hasil Perhitungan Fisik (*Stock Opname*) per 31 Desember 2023	:	-
(3)	**Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:**	**:**	**28.560.000,00**
	Pemakaian Persediaan	:	28.560.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir per 31 Desember 2023**	**:**	**-**

Berikut rincian saldo Barang Tak Habis Pakai sebagaimana tabel V.116 berikut:

Tabel V.116 Saldo Barang Tak Habis Pakai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Komponen	28.560.000,00	-	28.560.000,00	-
2.	Pipa	-	-	-	-
	JUMLAH	**28.560.000,00**	**-**	**28.560.000,00**	**-**

Tabel V.116 di atas menunjukkan Saldo komponen Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Nihil dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.560.000,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.560.000,00 atau 100,00% dengan uraian sebagaimana Tabel V.117 berikut:

Tabel V.117 Saldo Komponen Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Komponen Rambu-Rambu	28.560.000,00	-	28.560.000,00	-
2.	Komponen Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	**28.560.000,00**	**-**	**28.560.000,00**	**-**

C.1.a.11).c)Barang Bekas Dipakai

Tabel V.108 di atas menunjukkan Saldo Barang Bekas Dipakai berupa Komponen Bekas dan Pipa Bekas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Nihil dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.925.000,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.925.000,00 atau 100,00%, karena pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat realisasi Belanja Barang Bekas Dipakai dengan penjelasan dibawah ini:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Awal per 31 Desember 2022**	**:**	**23.925.000,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**-**
	Hasil Perhitungan Fisik (*Stock Opname*) per 31 Desember 2023	:	-
(3)	**Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:**	**:**	**23.925.000,00**
	Pemakaian Persediaan	:	23.925.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Akhir per 31 Desember 2023**	**:**	**-**

Berikut rincian saldo Barang Bekas Dipakai dapat dilihat pada tabel V.118 berikut:

Tabel V.118 Saldo Barang Bekas Dipakai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Pipa Bekas	23.925.000,00	-	23.925.000,00	-
2.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	**23.925.000,00,00**	**-**	**23.925.000,00**	**-**

C.1.b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Tabel V.73 di atas menunjukkan saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp300.533.317.974,08, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp286.254.007.791,86, mengalami kenaikan sebesar Rp14.279.310.182,22 atau 4,99%. Uraian lebih dapat dilihat pada Tabel V.119 berikut:

Tabel V.119 Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-
2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	300.533.317.974,08	286.254.007.791,86	14.279.310.182,22	4,99
	JUMLAH	**300.533.317.974,08**	**286.254.007.791,86**	**14.279.310.182,22**	**4,99**

C.1.b.1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tabel V.119 di atas menunjukkan bahwa Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 tidak memiliki saldo/Nihil.

C.1.b.2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan

Tabel V.119 di atas menunjukkan saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp300.533.317.974,08, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp286.254.007.791,86, mengalami kenaikan sebesar Rp14.279.310.182,22 atau 4,99%. Investasi Jangka Panjang Permanen sepenuhnya berasal dari Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.120 berikut:

Tabel V.120 Saldo Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	51.501.000.000,00	51.501.000.000,00	-	-
2.	PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	16.702.411.809,03	15.907.494.870,81	794.916.938,22	5,00
3.	PT BKK Jateng (Perseroda)	6.350.000.000,00	6.350.000.000,00	-	-
4.	Perumda Air Minum Tirta Aji	141.721.176.102,26	128.667.479.267,40	13.053.696.834,86	10,15
5.	PD. BPR Bank Wonosobo	46.642.923.131,99	44.346.902.998,00	2.296.020.133,99	5,18
6.	PT. Bima Lukar	579.794.795,25	466.283.761,90	113.511.033,35	24,34
7.	PT. PRPP Jawa Tengah	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-
8.	PD. Bhakti Husada	487.102.695,00	580.525.452,00	(93.422.757,00)	(16,09)
9.	PT Global Dharma Asri	15.731.487.244,55	15.667.551.145,75	63.936.098,80	0,41
10.	PT. Tambi	20.677.422.196,00	22.626.770.296,00	(1.949.348.100,00)	(8,62)
	JUMLAH	**300.533.317.974,08**	**286.254.007.791,86**	**14.279.310.182,22**	**4,99**

PENILAIAN INVESTASI

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada Bab IV Kebijakan Akuntansi Akun pada penjelasan Pengukuran Investasi Jangka Panjang, untuk Penilaian Investasi dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:

- Metode Biaya
  Adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. **Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%.** Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode Ekuitas
  Adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. **Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%.** Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan
  Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Tabel V.120 di atas menunjukkan tren kenaikan atas saldo Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 terhadap saldo per 31 Desember 2022, yang berasal dari hasil penilaian Investasi dengan Metode Biaya dan Metode ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Metode Biaya
   Metode Biaya digunakan untuk menghitung Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagaimana Tabel V.121 di bawah ini:

Tabel V.121 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD – Metode Biaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Kepemilikan	Saldo Akhir (Rp) 2022	Mutasi/Koreksi (Rp) Debit	Mutasi/Koreksi (Rp) Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (%)
(1)	(2)	(%)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1,17	51.501.000.000,00	-	-	51.501.000.000,00
2.	PT BKK JATENG (Perseroda)	1,73	6.350.000.000,00	-		6.350.000.000,00
3.	PT. PRPP Jawa Tengah	0,18	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00
	JUMLAH	**3,47**	**57.991.000.000,00**	**-**	**-**	**57.991.000.000,00**

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Metode Biaya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp57.991.000.000,00 yang berasal dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.991.000.000,00 atau tidak terdapat Mutasi/Koreksi selama TA 2023.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas digunakan untuk menghitung Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagaimana Tabel V.122 di bawah ini:

Tabel V.122 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD – Metode Ekuitas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Kepemilikan (%)	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	58,25	15.907.494.870,81	794.916.938,22	-	16.702.411.809,03
2.	PD. BPR Bank Wonosobo	100,00	44.346.902.998,00	2.296.020.133,99	-	46.642.923.131,99
3.	Perumda Air Minum Tirta Aji	83,62	128.667.479.267,40	13.062.019.561,39	8.322.726,53	141.721.176.102,26
4.	PT. Bima Lukar	55,00	466.283.761,90	113.544.034,45	33.001,10	579.794.795,25
5.	PD. Bhakti Husada	100,00	580.525.452,00	-	93.422.757,00	487.102.695,00
6.	PT Global Dharma Asri	99,01	15.667.551.145,75	63.951.830,29	15.731,49	15.731.487.244,55
7.	PT. Tambi	50,00	22.626.770.296,00	-	1.949.348.100,00	20.677.422.196,00
	JUMLAH		**228.263.007.791,86**	**16.330.452.498,34**	**2.051.142.316,12**	**242.542.317.974,08**

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Metode Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp242.542.317.974,08 yang berasal dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp228.263.007.791,86 ditambah Mutasi/Koreksi Debet selama TA 2023 sebesar Rp16.330.452.498,34 dikurangi Mutasi/Koreksi Kredit selama TA 2023 sebesar Rp2.051.142.316,12 dengan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut:

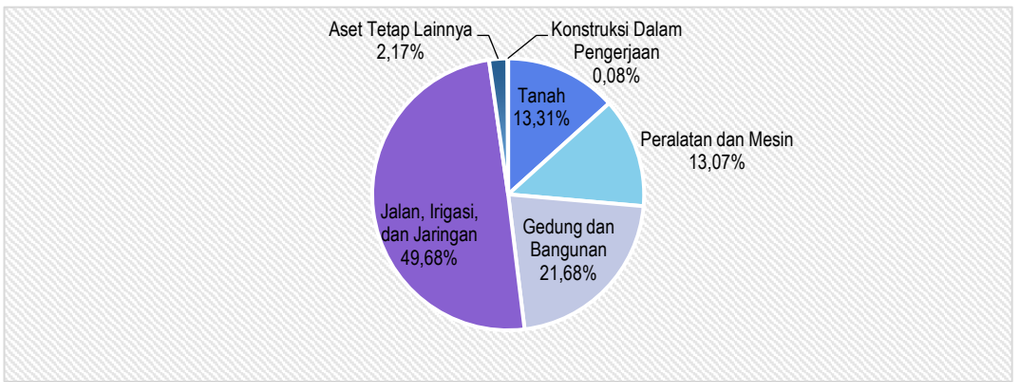
			(*Dalam Rupiah*)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**228.263.007.791,86**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**16.330.452.498,34**
	Koreksi kurang catat atas penyertaan modal pada BUMD		
	Perumda Tirta Aji		13.062.019.561,39
	PT. BPR Bank Wonosobo		2.296.020.133,99
	PT. BPR BKK Wonosobo		794.916.938,22
	PT Global Dharma Asri		63.951.830,29
	PT. Bima Lukar (Apotik Cahaya)		113.544.034,45
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**2.051.142.316,12**
	Koreksi penurunan penyertaan modal pada BUMD		
	PD. Bhakti Husada		93.422.757,00
	PT. Tambi		1.949.348.100,00
	PT Global Dharma Asri		15.731,49
	Perumda Tirta Aji		8.322.726,53
	PT. Bima Lukar (Apotik Cahaya)		33.001,10
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**242.542.317.974,08**

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa BUMD yang sudah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dengan data sebagai berikut:

No	Nama BUMD	Kantor Akuntan Publik	Opini
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	KAP Paul Hadiwinata , Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & rekan	WTP
2.	PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	KAP Wartono & Rekan	WTP
3.	PT BKK Jateng (Perseroda)	KAP Darsono & Budi Cahyo	WTP
4.	Perumda Air Minum Tirta Aji	KAP RMR Ruchendi, Mardjito, Rushadi, & Rekan	WTP
5.	PD. BPR Bank Wonosobo	KAP Dr. Rahardja, M.Si, CPA	WTP
6.	PT. Bima Lukar	KAP Ganung AB	TMP
7.	PT. PRPP Jawa Tengah	KAP Arnestesa Semarang	WTP
8.	PD. Bhakti Husada	KAP Helliantono & Rekan	WDP
9.	PT Global Dharma Asri	KAP Suratman	WDP
10.	PT. Tambi	KAP Ruchendi, Mardjito,Rushadi & Rekan	WTP

C.1.c.ASET TETAP

Neraca Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menunjukkan menunjukkan saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.236.617.663.604,37, dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.179.643.226.403,37, mengalami kenaikan sebesar Rp56.974.437.201,00 atau 1,79%, dengan saldo terbesar berupa aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan jika dilihat Gambar V.15 di bawah ini :



Gambar V.15 Komposisi Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.236.617.663.604,37 tersebut berasal dari nilai Aset Tetap Bruto sebesar Rp5.837.670.527.351,61 ditambah Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp2.601.052.863.747,23).

Tabel V.123 Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp) 2023	2022	Kenaikan / (Penurunan) Saldo (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Tanah	777.161.335.964,06	799.803.003.493,06	(22.641.667.529,00)	(2,83)
2.	Peralatan dan Mesin	763.121.291.355,61	705.699.976.394,35	57.421.314.961,26	8,14
3.	Gedung dan Bangunan	1.265.821.194.286,17	1.194.281.441.926,78	71.539.752.359,39	5,99
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.899.895.910.200,59	2.687.792.161.464,97	212.103.748.735,62	7,89
5.	Aset Tetap Lainnya	126.942.634.058,18	118.246.704.459,18	8.695.929.599,00	7,35
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.728.161.487,00	3.769.113.704,00	959.047.783,00	25,44
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.601.052.863.747,23)	(2.329.949.175.038,97)	(271.103.688.708,26)	11,64
	JUMLAH	**3.236.617.663.604,37**	**3.179.643.226.403,37**	**56.974.437.201,00**	**1,79**

C.1.c.1) Tanah

Tabel V.123 di atas menunjukkan saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp777.161.335.964,06, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp799.803.003.493,06, mengalami penurunan sebesar Rp22.641.667.529,00, atau 2,83%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan rincian sebagaimana Tabel V.124 berikut:

Tabel V.124 Saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Tanah Persil	92.963.286.892,15	11.920.691.068,00	24.936.117.988,00	79.947.859.972,15
2.	Tanah Non-Persil	63.599.290.121,00	3.113.906.189,00	57.339.258.618,00	9.373.937.692,00
3.	Lapangan	643.240.426.479,91	56.409.535.866,00	11.810.424.046,00	687.839.538.299,91
	JUMLAH	**799.803.003.493,06**	**71.444.133.123,00**	**94.085.800.652,00**	**777.161.335.964,06**

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca pada Saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA)	-
Penambahan/Penurunan:	
Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca)	777.161.335.964,06
Aset Tetap Tanah Tahun 2022 (Neraca)	799.803.003.493,06
Selisih yang teridentifikasi	**(22.641.667.529,00)**

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp22.641.667.529,00, selisih tersebut berasal dari:

	(Dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	
Hibah Masuk Aset TetapTanah	28.145.407.900,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi & Jaringan	243.321.059,00
Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :	
- Kurang Catat Aset Tetap Tanah	17.912.747.250,00
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	754.000.000,00
Mutasi Berkurang:	
Hibah Keluar Aset Tetap Tanah	(482.758.339,00)
Reklasifikasi ke Properti Investasi	(62.959.530.699,00)
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Kerjasama Pemanfaatan)	(2.894.672.700,00)
Penghapusan Aset Tetap Tanah	(1.513.450.000,00)
Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :	
- Pencatatan Ganda Aset Tetap Tanah	(218.127.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung & Bangunan	(1.628.605.000,00)
	(22.641.667.529,00)

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.123 di atas diketahui saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp777.161.335.964,06 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Tanah Persil

Tabel V.124 di atas menunjukkan saldo Tanah Persil Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.947.859.972,15, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.963.286.892,15, mengalami penurunan sebesar -Rp13.015.426.920,00, atau 14,00%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**92.963.286.892,15**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**11.920.691.068,00**
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		1.096.758.000,00
	Kurang Catat Aset Tetap		250.015.439,00
	Hibah Masuk Aset Tetap		3.713.580.500,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Kurang Catat Aset Tetap		1.717.344.100,00
	Reklasifikasi Antar Tanah		4.388.993.029,00
	Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Lain-lain		754.000.000,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**24.936.117.988,00**
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		1.096.758.000,00
	Penghapusan Aset Tetap		1.507.200.000,00
	Hibah Keluar Aset Tetap		64.658.339,00
	Reklasifikasi Ke. Properti Investasi (koreksi audited 2023)		11.502.273.290,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Lebih Catat Aset Tetap		9.016.000,00
	Double Catat Aset Tetap		61.750.000,00
	Reklasifikasi Antar Tanah		9.065.857.359,00
	Reklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan		1.628.605.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**79.947.859.972,15**

b) Tanah Non-Persil

Tabel V.124 di atas menunjukkan saldo Tanah Non Persil Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.373.937.692,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.599.290.121,00, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp54.225.352.429,00, atau 85,26%, yang disebabkan karena terdapat reklasifikasi ke Aset Kerja Sama Pemanfaatan dan Properti Investasi dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**63.599.290.121,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**3.113.806.189,00**
	Hibah Masuk Aset Tetap		474.725.000,00
	Reklasifikasi Antar Tanah		639.746.439,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Reklasifikasi Antar Tanah		446.502.000,00
	Kurang Catat Aset Tetap		1.552.832.750,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**57.339.158.618,00**
	Penghapusan Aset Tetap		6.250.000,00
	Hibah Keluar Aset Tetap		418.100.000,00
	Reklasifikasi Ke. Properti Investasi (koreksi audited 2023)		51.410.219.909,00
	Reklasifikasi Ke. Kerja Sama Pemanfaatan (koreksi audited 2023)		2.894.672.700,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Penghapusan Aset Tetap		51.051.000,00
	Reklasifikasi Antar Tanah		2.515.465.009,00
	Double Catat Aset Tetap		43.400.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**9.373.937.692,00**

c) Lapangan

Tabel V.124 di atas menunjukkan saldo Lapangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp687.839.538.299,91, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp643.240.426.479,91, mengalami kenaikan sebesar Rp44.599.111.820,00, atau 6,93%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**643.240.426.479,91**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**56.409.535.866,00**
	Reklasifikasi Aset Tetap dari JIJ		243.321.059,00
	Hibah Masuk Aset Tetap		23.957.102.400,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		4.171.061.600,00
	Reklasifikasi Antar Tanah		13.395.480.407,00
	Kurang Catat Aset Tetap		14.642.570.400,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**11.810.424.046,00**
	Lebih Catat Aset Tetap		250.015.439,00
	Reklasifikasi Ke. Properti Investasi (koreksi audited 2023)		46.937.500,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		4.171.061.600,00
	Reklasifikasi Antar Tanah		7.289.499.507,00
	Double Catat Aset Tetap		52.910.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**687.839.538.299,91**

C.1.c.2) Peralatan dan Mesin

Tabel V.123 di atas menunjukkan saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp763.121.291.355,61 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp705.699.976.394,35, mengalami kenaikan sebesar Rp57.421.314.961,26, atau 8,14%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan rincian sebagaimana Tabel V.125 berikut:

Tabel V.125 Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Besar	19.756.839.518,00	5.246.087.758,00	3.491.688.894,80	21.511.238.382,00
2.	Alat Angkutan	103.988.542.237,61	18.792.796.426,00	14.840.185.915,00	107.941.152.748,61
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.192.051.066,87	241.742.917,00	170.157.800,00	4.263.636.183,87
4.	Alat Pertanian	3.323.670.171,00	168.078.350,00	121.739.250,00	3.370.009.271,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	122.978.798.697,05	21.057.660.833,06	7.933.631.257,81	136.102.828.272,30
6.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	13.618.203.177,77	2.870.269.922,00	708.279.946,00	15.780.193.153,77
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	227.290.596.383,80	63.501.347.903,01	44.351.385.641,00	246.440.558.645,81
8.	Alat Laboratorium	61.559.920.498,96	9.794.690.967,00	6.088.239.951,00	65.266.371.514,96
9.	Komputer	118.075.852.940,63	30.909.922.677,00	18.600.771.273,00	130.398.992.626,63
10.	Alat Eksplorasi	2.799.000,00	18.481.500,00	18.481.500,00	2.799.000,00
11.	Alat Pengeboran	-	1.895.000,00	-	1.895.000,00
12.	Alat Keselamatan Kerja	3.014.982.287,00	764.231.263,00	68.725.347,00	3.710.488.203,00
13.	Alat Peraga	74.691.154,00	18.999.880,00	18.999.880,00	74.691.154,00
14.	Peralatan Proses/Produksi	12.057.226,00	-	-	12.057.226,00
15.	Rambu-rambu	26.820.569.136,52	467.427.441,00	202.851.854,00	27.085.144.723,52
16.	Peralatan Olahraga	990.402.899,14	154.827.203,00	5.244.852,00	1.139.985.250,14
17.	Alat Persenjataan	-	19.250.000,00	-	19.250.000,00
	JUMLAH	**705.699.976.394,35**	**154.027.710.040,07**	**96.620.383.361,61**	**763.121.291.355,61**

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca pada Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	71.513.835.592,00
Penambahan/Penurunan:	
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	763.121.291.355,61
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 (Neraca)	705.699.976.394,35
Selisih yang teridentifikasi	(14.092.520.630,74)

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp14.092.520.630,74, selisih tersebut berasal dari:

	(Dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	**5.259.199.857,06**
Hibah Masuk	3.757.150.708,00
Kurang Catat Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	46.846.000,00
Kurang Catat Nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	0,06
Reklasifikasi dari Belanja Barang	18.558.483,00
Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	245.950.363,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	775.532.045,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan	246.954.508,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya	156.865.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain (Rusak Berat)	11.343.750,00
Mutasi Berkurang:	**(19.351.720.487,80)**
Hibah Keluar	(6.238.330.821,00)
Penghapusan	(10.769.270.316,20)
Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,00)
dobel catat/lebih catat	(18.180.000,00)
Reklasifikasi antar Aset Tetap :	
- Ke Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan	(597.450.000,00)
- Ke Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	(16.822.999,00)
Reklasifikasi ke Persediaan	(941.262.120,00)
Reklasifikasi ke Pemeliharaan	(392.788.767,00)
Reklasifikasi ke Beban Ekstrakomptabel	(142.874.049,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat/Usang	(153.836.416,59)
Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun Lalu	(80.902.999,00)
	(14.092.520.630,74)

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.123 di atas diketahui saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp763.121.291.355,61 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Alat Besar

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Besar Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.511.238.382,00, dibandingkan dengan saldo per

31 Desember 2022 sebesar Rp19.756.839.518,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.754.398.864,00, atau 8,88%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.126 berikut:

Tabel V.126 Saldo Alat Besar Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Besar Darat	13.328.022.318,00	4.814.516.508,00	3.207.242.644,00	14.935.296.182,00
2.	Alat Bantu	6.428.817.200,00	431.571.250,00	284.446.250,00	6.575.942.200,00
	JUMLAH	**19.756.839.518,00**	**5.246.087.758,00**	**3.491.688.894,00**	**21.511.238.382,00**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**19.756.839.518,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**5.246.087.758,00**
	Belanja Modal		4.355.123.750,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		85.810.500,00
	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan		246.954.508,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		558.199.000,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**3.491.688.894,00**
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		85.810.500,00
	Penghapusan Aset Tetap		22.275.000,00
	Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi & Jaringan		597.450.000,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan		19.600.000,00
	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan		47.096.000,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		2.719.457.394,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**22.511.238.382,00**

b) Alat Angkutan

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Angkutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp107.941.152.748,61, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp103.988.542.237,61, mengalami kenaikan sebesar Rp3.952.610.511,00, atau 3,80%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.127 berikut:

Tabel V.127 Saldo Alat Angkutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	102.739.562.488,61	18.731.352.676,00	14.840.185.915,00	106.630.729.249,61
2.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.006.241.494,00	61.443.750,00	-	1.067.685.244,00
3.	Alat Angkutan Apung Bermotor	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
4.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	222.738.255,00	-	-	222.738.255,00
	JUMLAH	**103.988.542.237,61**	**18.792.796.426,00**	**14.840.185.915,00**	**107.941.152.748,61**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 sesuai tabel V.127 diatas lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**103.988.542.237,61**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**18.792.796.426,00**
	Belanja Modal		10.986.589.296,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		4.994.053.968,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Peralatan & Mesin		60.693.750,00
	Kurang Catat Aset Tetap		36.090.000,00
	Hibah Masuk Aset Tetap		1.030.673.018,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		1.673.352.644,00
	Reklasifikasi dari aset lain-lain (RB)		11.343.750,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**14.840.185.915,00**
	Penghapusan Aset Tetap		9.281.802.947,00
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		4.994.053.968,00

	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		546.149.000,00
	Pencatatan Ganda (Koreksi Audited) 2023		18.180.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**107.941.152.748,61**

c) Alat Bengkel dan Alat Ukur

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.263.636.183,87, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.192.051.066,87, mengalami kenaikan sebesar Rp71.585.117,00, atau 1,71%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.128 berikut:

Tabel V.128 Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Bengkel Bermesin	1.499.506.370,88	195.742.917,00	165.322.000,00	1.529.927.287,88
2.	Alat Bengkel Tak Bermesin	452.976.897,99	-	835.800,00	452.141.097,99
3.	Alat Ukur	2.239.567.798,00	46.000.000,00	4.000.000,00	2.281.567.798,00
	JUMLAH	**4.192.051.066,87**	**241.742.917,00**	**170.157.800,00**	**4.263.636.183,87**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**4.192.051.066,87**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**241.742.917,00**
	Belanja Modal		64.385.000,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		104.937.000,00
	Perolehan Dari Belanja Persediaan		2.650.000,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		69.770.917,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**170.157.800,00**
	Penghapusan Aset Tetap		835.800,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		104.937.000,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		64.385.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**4.263.636.183,87**

d) Alat Pertanian

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Pertanian berupa Alat Pengolahan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.370.009.271,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.323.670.171,00, mengalami kenaikan sebesar Rp46.339.100,00, atau 1,39%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.129 berikut :

Tabel V.129 Saldo Pertanian Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
	Alat Pengolahan	3.323.670.171,00	168.078.350,00	121.739.250,00	3.370.009.271,00
	JUMLAH	**3.323.670.171,00**	**168.078.350,00**	**121.739.250,00**	**3.370.009.271,00**

Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**3.323.670.171,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**168.078.350,00**
	Belanja Modal		121.739.250,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		43.339.100,00
	Perolehan Dari Belanja Persediaan		3.000.000,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**121.739.250,00**
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan		11.349.750,00

	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		110.389.500,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**3.370.009.271,00**

e) Alat Kantor dan Rumah Tangga

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp136.102.828.272,30, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp122.978.798.697,05, mengalami kenaikan sebesar Rp13.123.754.735,25, atau 10,67%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.130 berikut:

Tabel V.130 Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Kantor	44.971.392.383,62	7.795.335.436,00	2.192.422.392,01	50.574.305.427,61
2.	Alat Rumah Tangga	71.445.397.146,94	12.818.315.078,06	5.397.206.374,60	78.866.505.850,40
3.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.562.009.166,49	444.010.319,00	344.002.491,20	6.662.016.994,29
	JUMLAH	**122.978.798.697,05**	**21.057.660.833,06**	**7.933.631.257,81**	**136.102.828.272,30**

Tabel V.130 diatas menunjukkan Mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**122.978.798.697,05**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**21.057.660.833,06**
	Belanja Modal		12.349.995.020,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		321.087.516,00
	Kurang Catat Nilai Aset Tetap		0,06
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Peralatan & Mesin		557.549.261,00
	Kurang Catat Aset Tetap		84.289.500,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan & Mesin		156.865.000,00
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Persediaan		12.408.483,00
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Pemeliharaan		243.390.113,00
	Hibah Masuk Aset Tetap		277.243.730,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		7.054.832.210,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**7.933.631.257,81**
	Penghapusan Aset Tetap		1.077.716.203,20
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		321.087.516,00
	Lebih Catat Aset Tetap		0,01
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset tetap Lainnya		10.323.000,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan		69.904.549,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan		345.046.542,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Ekstrakomptabel		117.871.047,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset tetap Lain-lain		11.907.416,59
	Koreksi Hibah Aset Tetap		73.534.500,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		5.906.240.484,01
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**136.102.828.272,30**

f) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.780.193.153,77, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.618.203.177,77, mengalami kenaikan sebesar Rp2.161.989.976,00, atau 15,88%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.131 berikut:

Tabel V.131 Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Studio	9.550.204.813,20	2.508.376.327,00	654.374.346,00	11.404.206.794,20
2.	Alat Komunikasi	2.759.900.867,52	146.582.666,00	48.905.600,00	2.857.577.933,52
3.	Peralatan Pemancar	1.308.097.497,05	215.310.929,00	5.000.000,00	1.518.408.426,05
	JUMLAH	**13.618.203.177,77**	**2.870.269.922,00**	**708.279.946,00**	**15.780.193.153,77**

Penjelasan Mutasi/koreksi selama TA 2023 sebagaimana tabel V.131 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**13.618.203.177,77**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**2.870.269.922,00**
	Belanja Modal		801.099.694,00
	Reklasifikasi Aset Tetap dari Gedung dan Bangunan		35.857.919,00
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Persediaan		500.000,00
	Hibah Masuk Aset Tetap		12.800.000,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		2.009.012.309,00
	Kurang Catat		11.000.000,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**708.279.946,00**
	Penghapusan Aset Tetap		21.571.502,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Ekstrakomptabel		225.000,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		675.483.444,00
	Koreksi Hibah Aset Tetap		11.000.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**15.780.193.153,77**

g) Alat Kedokteran dan Kesehatan

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp246.440.558.645,81, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp227.290.596.383,80, mengalami kenaikan sebesar Rp19.149.962.262,00, atau 8,43%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.132 berikut:

Tabel V.132 Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Kedokteran	215.139.698.865,80	35.409.509.898,01	16.240.068.918,00	234.309.139.845,81
2.	Alat Kesehatan Umum	12.150.897.518,00	28.091.838.005,00	28.111.316.723,00	12.131.418.800,00
	JUMLAH	**227.290.596.383,80**	**63.501.347.903,01**	**44.351.385.641,00**	**246.440.558.645,81**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 sebagaimana tabel V.132 dapat dijelaskan sebagai berikut:

			Dalam Rupiah
(1)	**Saldo Per 31 Desember 202**	**:**	**227.290.596.383,80**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**63.501.347.903,01**
	Belanja Modal		26.473.115.825,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		11.634.172.496,00
	Hibah Masuk Aset Tetap		2.250.500.000,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		23.143.559.582,01
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**44.351.385.641,00**
	Penghapusan Aset Tetap		600.000,00
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		11.634.172.496,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan		532.939.411,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Ekstrakomptabel		22.038.002,00
	Hibah Keluar Aset Tetap		6.238.330.821,00
	Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun Lalu		46.420.999,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		25.876.883.912,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**246.440.558.645,81**

h) Alat Laboratorium

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Laboratorium Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.266.371.514,96, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.559.920.498,96, mengalami kenaikan sebesar Rp3.706.451.016,00, atau 6,02%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.133 berikut:

Tabel V.133 Saldo Alat Laboratorium Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Unit Alat Laboratorium	33.197.152.087,36	8.550.182.634,00	5.470.168.274,00	36.277.166.447,36
2.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	355.536.762,81	-	-	355.536.762,81
3.	Alat Peraga Praktik Sekolah	25.760.160.659,02	953.648.333,00	327.211.677,00	26.386.597.315,02
4.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.637.875.737,00	-	-	1.637.875.737,00
5.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	4.282.330,00	-	-	4.282.330,00
6.	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya	3.705.159,00	-	-	3.705.159,00
7.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	533.403.142,77	40.960.000,00	40.960.000,00	533.403.142,77
8.	Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*	22.889.621,00	249.900.000,00	249.900.000,00	22.889.621,00
9.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	44.915.000,00	-	-	44.915.000,00
	JUMLAH	**61.559.920.498,96**	**9.794.690.967,00**	**6.088.239.951,00**	**65.266.371.514,96**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 sebagaimana tabel V.133 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**61.559.920.498,96**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**9.794.690.967,00**
	Belanja Modal		1.186.746.763,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		5.279.522.415,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Peralatan & Mesin		26.094.582,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		3.302.327.207,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**6.088.239.951,00**
	Penghapusan Aset Tetap		6.090.476,00
	Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Aset Tetap Lainnya		6.499.999,00
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		5.279.522.415,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan		135.506.495,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		660.620.566,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**65.266.371.514,96**

i) Komputer

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Komputer Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.398.992.626,63 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp118.075.852.940,63, mengalami kenaikan sebesar Rp12.323.139.686,00,00 atau 10,44%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.134 berikut:

Tabel V.134 Saldo Komputer Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Komputer Unit	88.447.000.709,42	19.993.119.651,00	10.017.471.809,00	98.422.648.551,42
2.	Peralatan Komputer	29.628.852.231,21	10.930.791.308,00	8,583.299.464,00	31.976.344.075,21
	JUMLAH	**118.075.852.940,63**	**30.923.910.959,00**	**18.600.771.273,00**	**130.398.992.626,63**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**118.075.852.940,63**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**30.909.922.677,00**
	Belanja Modal		14.797.428.240,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		100.484.975,00
	Perolehan Aset Tetap dari Gedung & Bangunan		25.612.800,00
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Pemeliharaan		2.560.250,00
	Hibah Masuk Aset Tetap		182.133.960,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		15.805.590.734,00
	Kurang Catat Aset Tetap		10.100.000,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**18.600.382.994,00**
	Penghapusan Aset Tetap		353.133.536,00
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		100.484.975,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan		137.112.015,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Pemeiliharaan		1.846.225,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Ekstrakomptabel		1.540.000,00
	Pembayaran Utang Pengadaan Tahun Lalu		34.482.000,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		17.820.143.522,00
	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Putusan Pengadilan) (Koreksi audited 2023)		141.929.000,00
	Koreksi Hibah Aset Tetap		10.100.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**130.398.992.626,63**

j) Alat Eksplorasi

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Eksplorasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.799.000,00, sama halnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.799.000,00 namun selama TA 2023 terdapat mutasi/koreksi dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.135 berikut:

Tabel V.135 Saldo Alat Eksplorasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Eksplorasi Topografi	-	4.205.000,00	4.205.000,00	-
2.	Alat Eksplorasi Geofisika	2.799.000,00	14.276.500,00	14.276.500,00	2.799.000,00
	JUMLAH	**2.799.000,00**	**18.481.500,00**	**18.481.500,00**	**2.799.000,00**

Lebih rinci Mutasi/koreksi Alat Eksplorasi selama TA 2023 adalah sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**2.799.000,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**18.481.500,00**
	Belanja Modal		18.481.500,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**18.481.500,00**
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		14.276.500,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan		4.205.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**2.799.000,00**

k) Alat Pengeboran

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Pengeboran Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.895.000,00, sedangkan per 31 Desember 2022 tidak terdapat saldo, selama TA 2023 terdapat mutasi/koreksi dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.136 berikut:

Tabel V.136 Saldo Alat Pengeboran Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Pengeboran Mesin	-	1.895.000,00	-	1.895.000,00
2.	Alat Pengeboran Non Mesin	-	-	-	-
	JUMLAH	**-**	**1.895.000,00**	**-**	**1.895.000,00**

Lebih rinci Mutasi/koreksi Alat Pengeboran selama TA 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**1.895.000,00**
	Belanja Modal		1.895.000,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**1.895.000,00**

l) Alat Keselamatan Kerja

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Keselamatan Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.710.488.203,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.014.982.287,00, mengalami kenaikan sebesar Rp695.505.916,00, atau 23,07%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.137 berikut:

Tabel V.137 Saldo Alat Keselamatan Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Deteksi	-	111.794.000,00	-	111.794.000,00
2.	Alat Pelindung	11.110.000,00	37.640.411,00	37.640.411,00	11.110.000,00
3.	Alat SAR	2.929.672.288,00	400.511.852,00	31.084.936,00	3.299.099.204,00
4.	Alat Kerja Penerbangan	74.199.999,00	214.285.000,00	-	288.484.999,00
	JUMLAH	**3.014.982.287,00**	**764.231.263,00**	**68.725.347,00**	**3.710.488.203,00**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**3.014.982.287,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**764.231.263,00**
	Belanja Modal		149.434.400,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		31.084.936,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		583.711.916,00
	Koreksi lebih catat reklasifikasi ke persediaan		11,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**68.725.347,00**
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		31.084.936,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan		22.646.911,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		14.993.500,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**3.710.488.203,00**

m) Alat Peraga

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Peraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp74.691.154,00, sama halnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.691.154,00, namun terdapat mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.138 berikut:

Tabel V.138 Saldo Alat Peraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	74.691.154,00	18.999.880,00	18.999.880,00	74.691.154,00
	JUMLAH	**74.691.154,00**	**18.999.880,00**	**18.999.880,00**	**74.691.154,00**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan rincian sebagaimana penjelasan di bawah ini.

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**74.691.154,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**18.999.880,00**
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		18.999.880,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**18.999.880,00**
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		18.999.880,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**74.691.154,00**

n) Peralatan Proses/Produksi

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Peralatan Proses/Produksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.057.226,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 cenderung stagnan.

o) Rambu-Rambu

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Rambu-rambu Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.085.144.723,52, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.820.569.136,52, mengalami kenaikan sebesar Rp264.575.587,00, atau 0,99%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.139 berikut:

Tabel V.139 Saldo Rambu-rambu Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	26.630.938.136,52	467.427.441,00	202.851.854,00	26.895.513.723,52
2.	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	189.631.000,00	-	-	189.631.000,00
	JUMLAH	**26.820.569.136,52**	**467.427.441,00**	**202.851.854,00**	**27.085.144.723,52**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**26.820.569.136,52**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**467.427.441,00**
	Belanja Modal		202.851.854,00
	Reklasifikasi Aset Tetap dari Gedung & Bangunan		69.723.733,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		194.851.854,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**202.851.854,00**
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan		8.000.000,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		194.851.854,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**27.085.144.723,52**

p) Peralatan Olahraga

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Peralatan Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.139.985.250,14, dibandingkan dengan

saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp990.402.899,14, mengalami kenaikan sebesar Rp149.582.351,00, atau 15,10%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.139a :

Tabel V.139a Saldo Peralatan Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Peralatan Olahraga	990.402.899,14	154.827.203,00	5.244.852,00	1.139.985.250,14
	JUMLAH	**990.402.899,14**	**154.827.203,00**	**5.244.852,00**	**1.139.985.250,14**

Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**990.402.899,14**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**154.827.203,00**
	Belanja Modal		4.950.000,00
	Hibah Masuk Aset Tetap		3.800.000,00
	Reklasifikasi Antar Peralatan & Mesin		146.077.203,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**5.244.852,00**
	Penghapusan Aset Tetap		5.244.852,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**1.139.985.250,14**

q) Alat Persenjataan

Tabel V.125 di atas menunjukkan saldo Alat Persenjataan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.250.000,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah nihil, mengalami kenaikan sebesar Rp19.250.000,00, atau 100%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.140 :

Tabel V.140 Saldo Alat Persenjataan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1	Senjata Api	-	-	-	-
2	Persenjataan Non Senjata Api	-	500.000,00	-	500.000,00
3	Senjata Sinar	-	-	-	-
4	Senjata Kepolisian	-	18.750.000,00	-	18.750.000,00
	JUMLAH	**-**	**19.250.000,00**	**-**	**19.250.000,00**

Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**-**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:**	**:**	**19.250.000,00**
	Reklas dari Belanja Modal		19.250.000,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**-**
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**19.250.000,00**

C.1.c.3) Gedung dan Bangunan

Tabel V.123 di atas menunjukkan saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.265.821.194.286,17, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.194.281.441.926,78, mengalami kenaikan sebesar Rp71.539.752.359,39, atau 5,99%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan rincian sebagaimana Tabel V.141 berikut:

Tabel V.141 Saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bangunan Gedung	1.170.285.589.349,78	414.824.675.992,30	342.687.561.503,91	1.242.422.703.838,17
2.	Monumen	20.074.226.314,00	120.453.251,00	13.229.376.546,00	6.965.303.019,00
3.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.921.626.263,00	13.228.974.882,00	717.413.716,00	16.433.187.429,00
	JUMLAH	**1.194.281.441.926,78**	**428.174.104.125,30**	**356.634.351.765,91**	**1.265.821.194.286,17**

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca pada Saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	75.966.224.399,00
Penambahan/Penurunan:	
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	1.265.821.194.286,17
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 (Neraca)	1.194.281.441.926,78
Selisih yang teridentifikasi	**(4.426.472.039,61)**

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar (Rp4.426.472.039,61), selisih tersebut berasal dari:

	(Dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	**80.076.378.410,70**
Hibah Masuk	7.582.634.250,00
Perolehan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dari BTT	1.232.509.222,00
Perolehan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dari Belanja Pemeliharaan	344.980.000,00
Kurang Catat Nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	0,01
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	549.878.780,99
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	148.365.950,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	135.254.249,00
Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :	
- Kurang Catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan	53.366.811.326,00
- Reklasifikasi dari Tanah	1.628.605.000,00
- Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.087.339.632,70
Mutasi Berkurang:	**84.502.850.450,31**
Hibah Keluar	254.496.299,00
Penghapusan	16.110.236.691,00
Kesalahan Pos Belanja Modal :	
- Reklas ke Belanja Barang	233.885.810,00
- Reklas ke Belanja Pemeliharaan	234.555.769,00
Reklasifikasi ke Beban Ekstrakomptabel	6.521.291,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.312.958.418,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap -Peralatan dan Mesin	775.532.045,00
Reklasfifikasi ke Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya	254.201.243,00
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.193.416.032,00
Reklasifikasi ke Properti Invenstasi	14.577.359/861,00
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya (KSP)	10.712.395.885,00
Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :	
Penghapusan	10.347.794.309,20
Lebih Catat Nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	631.085.875,00
Double Catat Nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	646.206.259,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Jalan, Irigasi & Jaringan	18.619.430.131,11
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Aset Lain-lain	399.938.356,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Pecah Pencatatan	5.192.836.176,00
	(4.426.472.039,61)

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.141 di atas diketahui saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.265.821.194.286,17 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Bangunan Gedung

Tabel V.141 di atas menunjukkan saldo Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.242.422.703.838,17, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.170.285.589.349,78, mengalami kenaikan sebesar Rp72.137.114.488,39 atau 6,16%. Kenaikan tersebut disebabkan

oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.142 berikut:

Tabel V.142 Saldo Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.152.447.350.600,18	392.116.253.547,08	331.988.302.686,61	1.212.575.301.460,65
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	17.838.238.749,60	22.708.422.445,22	10.699.258.817,30	29.847.402.377,52
	JUMLAH	**1.170.285.589.349,78**	**414.824.675.992,30**	**342.687.561.503,91**	**1.242.422.703.838,17**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**1.170.285.589.349,78**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**414.824.675.992,30**
	Belanja Modal		75.951.224.399,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		24.393.802.543,00
	Reklasifikasi Antar ke Gedung & Bangunan		21.756.348.080,00
	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Gedung & Bangunan		549.878.781,00
	Kurang Catat Aset Tetap		273.540.000,01
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung & Bangunan		148.365.950,00
	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung & Bangunan		135.254.249,00
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Pemeliharaan		344.980.000,00
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Tidak Terduga		1.232.509.222,00
	Hibah Masuk Aset Tetap		7.307.634.250,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		7.284.546.966,00
	Kurang Catat Aset Tetap		52.529.716.502,00
	Reklasifikasi Antar ke Gedung & Bangunan		187.898.317.833,59
	Reklasifikasi dari Tanah ke Gedung & Bangunan		1.628.605.000,00
	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Gedung & Bangunan		15.067.239.632,70
	Koreksi Pencatatan Karena Pecah		18.245.969.747,00
	Koreksi Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Persediaan		4.785.000,00
	Koreksi Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan		71.957.837,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**342.687.561.503,91**
	Penghapusan Aset Tetap		16.182.194.528,00
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		24.393.802.543,00
	Reklasifikasi Antar ke Gedung & Bangunan		25.039.975.806,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Peralatan & Mesin		760.532.045,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Jalan, Irigasi & Jaringan		4.312.958.418,01
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Tetap Lainnya		254.201.243,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.193.416.032,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan		238.670.810,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan		234.555.769,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Ekstrakomptable		6.521.291,00
	Hibah Keluar Aset Tetap		254.496.299,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		7.284.546.966,00
	Penghapusan Aset Tetap		10.188.008.809,20
	Lebih Catat Aset Tetap		814.125.875,00
	Double Catat Aset Tetap		446.679.629,00
	Reklasifikasi Antar ke Gedung & Bangunan		185.135.465.659,59
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Jalan, Irigasi & Jaringan		16.851.883.016,11
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-lain		366.965.096,00
	Koreksi Pencatatan Karena Pecah		23.438.805.923,00
	Reklasifikasi ke Properti Investasi (Koreksi Audited 2023)		14.577.359.861,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya Kerjasama Pemanfaatan (Koreksi Audited 2023)		0.712.395.885,00)
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**1.242.422.703.838,17**

b) Monumen

Tabel V.141 di atas menunjukkan saldo Monumen Pemerintah berupa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.965.303.019,00, dibandingkan dengan saldo *per* 31 Desember 2022 sebesar

Rp20.074.226.314,00, mengalami penurunan sebesar Rp13.108.923.295,00, atau 65,30%, dikarenakan terdapat reklasifikasi antar aset tetap.

c) Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tabel V.141 di atas menunjukkan saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti berupa Tugu/Tanda Batas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.433.187.429,00, dibandingkan dengan saldo *per* 31 Desember 2022 sebesar Rp3.921.626.263,00, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp12.511.561.166,00, atau 319,04%, karena terdapat penambahan dari reklasifikasi antar aset tetap pada hasil inventarisasi BMD. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya koreksi debet selama TA 2023 dengan rincian :

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**3.921.626.263,00**
(2)	**Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**13.228.974.882,00**
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)	:	275.000.000,00
	Kurang Catat Aset Tetap	:	563.554.824,00
	Reklasifikasi Antar ke Gedung & Bangunan	:	9.086.692.332,00
	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Gedung & Bangunan	:	20.100.000,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung & Bangunan	:	3.283.627.726,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	:	**717.413.716,00**
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Reklasifikasi Antar ke Gedung & Bangunan	:	717.413.716,00
(4)=(1)+(2)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**16.433.187.429,00**

C.1.c.4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tabel V.123 di atas menunjukkan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.899.895.910.200,59, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.687.792.161.464,97, mengalami kenaikan sebesar Rp212.103.748.735,62, atau 7,89%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan rincian sebagaimana Tabel V.143 berikut:

Tabel V.143 Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Jalan dan Jembatan	1.969.453.904.760,64	300.980.802.019,82	96.703.612.961,03	2.173.731.093.819,43
2.	Bangunan Air	650.179.314.526,34	44.920.049.192,12	48.498.994.581,29	646.600.369.137,17
3.	Instalasi	53.570.842.576,59	26.550.288.472,40	7.163.357.654,00	72.957.773.394,99
4.	Jaringan	14.588.099.601,40	228.085.000,00	8.209.510.752,40	6.606.673.849,00
	JUMLAH	**2.687.792.161.464,97**	**372.679.224.683,93**	**160.575.475.948,31**	**2.899.895.910.200,59**

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca pada Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)	173.441.211.700,00
Penambahan/Penurunan:	
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	2.899.895.910.200,59
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 (Neraca)	2.687.792.161.464,97
Selisih yang teridentifikasi	**38.662.537.035,62**

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp38.662.537.035,62, selisih tersebut berasal dari:

	(Dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	**90.456.431.770,12**
Hibah Masuk	27.825.134.332,00
Kapitalisasi Non Belanja Modal (dari Belanja Pemeliharaan)	934.533.565,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	597.450.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	4.312.958.418,01
Reklasifikasi dari Aset Tetap - KDP	99.114.000,00
Belanja Tak Terduga	3.162.315.601,00
Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :	
- Kurang Catat Aset Tetap - Jalan, irigasi & Jaringan	29.722.841.628,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap- Gedung dan Bangunan	18.619.430.131,11
- Reklasifikasi dari Beban Ekstrakomptable	181.189.235,00
- Perolehan Aset Tetap - Pecah Pencatatan	5.001.464.860,00
Mutasi Berkurang:	**51.793.894.734,50**
Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) :	
- Reklasifikasi ke belanja Barang	168.194.000,00
- Reklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan	199.379.940,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (KSP)	743.982.434,00
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya (Lebih catat nilai aset tetap -JIJ)	0,41
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Tanah	243.321.059,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	246.954.508,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	549.878.781,00
Temuan Pemeriksaan atas Pengadaan Aset Tetap yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi	1.283.314.000,00
Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :	
Penghapusan Aset Tetap - Jalan, Irigasi & Jaringan	8.292.820.792,16
Double Catat Aset Tetap - Jalan, Irigasi & Jaringan	4.014.027.500,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	15.087.339.632,70
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Aset Lain-lain	20.964.682.087,23
	38.662.537.035,62

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.143 di atas diketahui saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.899.895.910.200,59 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Jalan dan Jembatan

Tabel V.143 di atas menunjukkan saldo Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.173.731.093.819,43, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.969.453.904.760,64, mengalami kenaikan sebesar Rp204.277.189.058,79, atau 10,37%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.144 berikut:

Tabel V.144 Saldo Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Jalan	1.756.699.420.832,45	273.144.075.721,41	37.241.547.927,00	1.992.601.948.626,86
2.	Jembatan	212.754.483.928,19	27.836.726.298,00	59.462.065.033,62	181.129.145.192,57
	JUMLAH	**1.969.453.904.760,64**	**300.980.802.019,41**	**96.703.612.960,62**	**2.173.731.093.819,43**

Penjelasan lebih lanjut terkait mutasi/koreksi selama TA 2023 adalah sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**1.969.453.904.760,64**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**300.980.802.019,82**
	Belanja Modal		158.179.134.700,00
	Kapitalisasi Non Belanja Modal (dari Belanja Pemeliharaan)		934.533.565,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		13.886.170.006,00
	Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan		715.343.032,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Jalan, Irigasi & Jaringan		2.471.746.979,00
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Tidak Terduga		1.684.530.601,00

	Hibah Masuk Aset Tetap		18.327.204.020,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	- Serah Terima Antar entitas (Masuk)		3.414.008.756,00
	- Kurang Catat Aset Tetap		25.309.097.015,00
	- Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan		71.714.525.178,82
	- Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Jalan, Irigasi & Jaringan		1.570.510.260,00
	- Koreksi Pencatatan Karena Pecah		2.773.997.907,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**96.703.612.961,03**
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		13.688.721.368,00
	Lebih Catat Nilai Aset Tetap		0,41
	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Peralatan & Mesin		246.954.508,00
	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Gedung & Bangunan		549.878.781,00
	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Beban Persediaan		137.480.000,00
	Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan		1.521.746.203,00
	Temuan Pemeriksaan atas Pengadaan Aset Tetap yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi		1.242.114.000,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	- Serah Terima Antar entitas (Keluar)		3.414.008.756,00
	- Penghapusan Aset Tetap		1.411.853.596,00
	- Lebih Catat Aset Tetap		3.979.027.500,00
	- Double Catat Aset Tetap		35.000.000,00
	- Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan		68.806.206.918,82
	- Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Gedung & Bangunan		147.524.564,00
	- Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Aset Tetap Lainnya		219.075.752,00
	- Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Aset Tetap Lain-lain		1.304.021.013,80
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**2.173.731.093.819,43**

b) Bangunan Air

Tabel V.143 di atas menunjukkan saldo bangunan Air Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp646.600.369.137,17, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp650.179.314.526,34, mengalami penurunan sebesar Rp3.578.945.389,17, atau 0,55%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.145 berikut:

Tabel V.145 Saldo Bangunan Air Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bangunan Air Irigasi	575.217.535.956,93	15.101.638.169,00	9.891.599.139,00	580.427.574.986,93
2.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	85.223.000,00	-	-	85.223.000,00
3.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	388.525.420,00	-	193.287.000,00	195.238.420,00
4.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.802.835.115,84	5.586.246.474,00	7.087.488.703,70	12.301.592.886,14
5.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.515.295.962,00	68.001.165,00	69.371.000,00	1.513.926.127,00
6.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	33.229.411.310,26	23.508.809.326,12	18.585.403.826,16	38.152.816.810,22
7.	Bangunan Air Kotor	25.940.487.761,31	655.354.058,00	12.671.844.912,43	13.923.996.906,88
	JUMLAH	**650.179.314.526,34**	**44.920.049.192,12**	**48.498.994.581,29**	**646.600.369.137,17**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**650.179.314.526,34**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**44.920.049.192,12**
	Belanja Modal	:	12.263.835.000,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)	:	608.954.533,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Jalan, Irigasi & Jaringan	:	1.693.170.019,00
	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi & Jaringan	:	99.114.000,00
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Tidak Terduga	:	1.280.414.000,00
	Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan	:	608.954.533,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		

	Serah Terima Antar entitas (Masuk)	:	398.792.000,00
	Kurang Catat Aset Tetap	:	4.162.023.893,00
	Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan	:	6.110.564.793,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Jalan, Irigasi & Jaringan	:	15.799.531.354,11
	Koreksi Pencatatan Karena Pecah	:	1.713.505.832,00
	Reklasifikasi dari Beban Ekstra Komptable ke Jalan, Irigasi & Jaringan	:	181.189.235,00
	Koreksi reklasifikasi atas gedung dan bangunan ke jalan, irigasi dan jaringan	:	0,01
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	:	**48.498.994.581,29**
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)	:	608.954.533,00
	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Tanah	:	243.321.059,00
	Temuan BPK 2023 atas Pengadaan Aset Tetap	:	41.200.000,00
	Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan	:	197.454.000,00
	Reklasifikasi ke Kerjasama Pemanfaatan (KSP)		565.971.702,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :	:	
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)	:	398.792.000,00
	Penghapusan Aset Tetap	:	5.226.471.389,16
	Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan	:	8.441.810.440,00
	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Gedung & Bangunan	:	14.939.815.068,70
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset lain-lain	:	17.835.204.389,43
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	:	**646.600.369.137,17**

c) Instalasi

Tabel V.143 di atas menunjukkan saldo Instalasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.957.773.394,99, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.570.842.576,59, mengalami kenaikan sebesar Rp19.386.930.818,40, atau 36,19%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.146 berikut:

Tabel V.146 Saldo Instalasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Mutasi/Koreksi (Rp) Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	8.854.224.426,59	128.092.832,00	850.321.737,00	8.131.995.521,59
2.	Instalasi Air Kotor	12.255.556.864,00	642.603.158,00	2.312.076.985,00	10.586.083.037,00
3.	Instalasi Pengolahan Sampah	809.927.479,00	2.596.866.973,00	349.000.000,00	3.057.794.452,00
4.	Instalasi Pembangkit Listrik	288.218.000,00	-	288.218.000,00	-
5.	Instalasi Gardu Listrik	31.097.191.807,00	23.174.823.109,40	3.363.740.932,00	50.908.273.984,40
6.	Instalasi Gas	199.152.000,00	7.902.400,00	-	207.054.400,00
7.	Instalasi Pengaman	66.572.000,00	-	-	66.572.000,00
	JUMLAH	**53.570.842.576,59**	**26.550.288.472,40**	**7.163.357.654,00**	**72.957.773.394,99**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**53.570.842.576,59**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**26.550.288.472,40**
	Belanja Modal		2.967.528.000,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		349.000.000,00
	Hibah Masuk Aset Tetap		9.497.930.312,00
	Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Jalan, Irigasi & Jaringan		597.450.000,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Jalan, Irigasi & Jaringan		148.041.420,00
	Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan		3.163.050.698,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Kurang Catat Aset Tetap		251.720.720,00
	Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan		7.812.217.684,40
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Jalan, Irigasi & Jaringan		1.249.388.517,00
	Koreksi Pencatatan Karena Pecah		513.961.121,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**7.163.357.654,00**
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		546.448.638,00
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan		199.379.940,00
	Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan		2.768.148.060,00
	Reklasifikasi ke Kerjasama Pemanfaatan (KSP)		178.010.732,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi		
	Penghapusan Aset Tetap		1.131.083.807,00
	Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan		733.905.545,00
	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Aset tetap Lainnya		1.040.518.009,00
	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Aset tetap Lain-lain		565.862.923,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**72.957.773.394,99**

d) Jaringan

Tabel V.143 di atas menunjukkan saldo Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.606.673.849,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.588.099.601,40, mengalami penurunan sebesar Rp7.981.425.752,40, atau 54,71%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.147 berikut:

Tabel V.147 Saldo Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Jaringan Air Minum	1.721.772.522,00	-	260.690.000,00	1.461.082.522,00
2.	Jaringan Listrik	12.647.978.771,40	-	7.918.106.752,40	4.729.872.019,00
3.	Jaringan Telepon	-	30.714.000,00	30.714.000,00	-
4.	Jaringan Gas	218.348.308,00	197.371.000,00	-	415.719.308,00
	JUMLAH	**14.588.099.601,40**	**228.085.000,00**	**8.209.510.752,40**	**6.606.673.849,00**

Lebih lanjut Mutasi/Koreksi selama TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**14.588.099.601,40**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**228.085.000,00**
	Belanja Modal		30.714.000,00
	Perolehan Aset Tetap dari Belanja Tidak terduga	:	197.371.000,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**		**8.209.510.752,40**
	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan		30.714.000,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi		
	Penghapusan Aset Tetap		523.412.000,00
	Reklasifikasi Antar Jalan, Irigasi & Jaringan		7.655.384.752,40
(4)=(1)+(2)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**6.606.673.849,00**

C.1.c.5) Aset Tetap Lainnya

Tabel V.123 di atas menunjukkan saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp126.942.634.058,18 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp118.246.704.459,18, mengalami kenaikan sebesar Rp8.695.929.599,00, atau 7,35%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan rincian sebagaimana Tabel V.148 berikut:

Tabel V.148 Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bahan Perpustakaan	112.264.807.034,63	14.945.357.098,00	7.126.542.054,00	120.083.622.078,63
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	4.490.649.788,55	847.137.768,00	354.489.263,00	4.983.298.293,55
3.	Tanaman	1.073.410.000,00	-	-	1.073.410.000,00
4.	Aset Tetap Dalam Renovasi	417.837.636,00	532.832.000,00	148.365.950,00	802.303.686,00
	JUMLAH	**118.246.704.459,18**	**16.325.326.866,00**	**7.629.397.267,00**	**126.942.634.058,18**

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca pada Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	8.956.129.217,00
Penambahan/Penurunan:	
Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	126.942.634.058,18
Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 (Neraca)	118.246.704.459,18
Selisih yang teridentifikasi	**(260.199.618,00)**

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp260.199.618,00, selisih tersebut berasal dari:

	(Dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	**803.856.242,00**
Kurang Catat Aset Tetap	532.832.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin	16.822.999,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan	254.201.243,00
Mutasi Berkurang:	**1.064.055.860,00**
Penghapusan Aset Tetap	758.424.910,00
Reklasifikasi ke aset tak berwujud	400.000,00
Reklasifikasi ke Peralatan & Mesin	156.865.000,00
Reklasifikasi ke Gedung & Bangunan	148.365.950,00
	(260.199.618,00

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.148 di atas diketahui saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp126.942.634.058,18 dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

a) Bahan Perpustakaan

Tabel V.148 di atas menunjukkan saldo Bahan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp120.083.622.078,63, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.264.807.034,63, mengalami kenaikan sebesar Rp7.818.815.044,00, atau 6,96%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.149 berikut:

Tabel V.149 Saldo Bahan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	110.798.040.836,00	14.219.325.808,00	7.113.042.054,00	117.904.324.590,01
2.	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	352.343.637,58	726.031.290,00	13.500.000,00	1.064.874.927,57
3.	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	911.205.690,05	-	-	911.205.690,05
4.	Musik	12.280.118,00	-	-	12.280.118,00
5.	Karya Grafika (*Graphic Material)*	186.741.753,00	-	-	186.741.753,00
6.	*Three Dimensional Artefacs And Realita*	2.695.000,00	-	-	2.695.000,00
7.	*Tarscalt*	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
	JUMLAH	**112.264.807.034,63**	**14.945.357.098,00**	**7.126.542.054,00**	**120.083.622.078,63**

Mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**112.264.807.034,63**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**14.945.357.098,00**
	Belanja Modal		7.832.715.044,00
	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Lainnya		7.112.642.054,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**7.126.542.054,00**
	Penghapusan Aset Tetap		400.000,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan & Mesin		13.500.000,00
	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Lainnya		7.112.642.054,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**120.083.622.078,63**

b) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga

Tabel V.148 di atas menunjukkan saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.983.298.293,55, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar

Rp4.490.649.788,55, mengalami kenaikan sebesar Rp492.648.505,00 , atau 10,97%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan uraian sebagaimana Tabel V.150 berikut:

Tabel V.150 Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Barang Bercorak Kesenian	4.208.542.532,92	452.071.525,00	214.624.263,00	4.445.989.794,92
2.	Alat Bercorak Kebudayaan	270.162.881,03	395.066.243,00	139.865.000,00	525.364.124,03
3.	Tanda Penghargaan	11.944.374,60	-	-	11.944.374,60
	JUMLAH	**4.490.649.788,55**	**847.137.768,00**	**354.489.263,00**	**4.983.298.293,55**

Lebih lanjut penjelasan mutasi/koreksi selama TA 2023 adalah sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**4.490.649.788,55**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**847.137.768,00**
	Belanja Modal		364.989.263,00
	Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Aset Tetap Lainnya		16.822.999,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Tetap Lainnya		254.201.243,00
	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Lainnya		211.124.263,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**354.489.263,00**
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan & Mesin		143.365.000,00
	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Lainnya		211.124.263,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**4.983.298.293,55**

c) Tanaman

Tabel V.148 di atas menunjukkan saldo Tanaman Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.073.410.000,00, sama halnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.073.410.000,00.

d) Aset Tetap Dalam Renovasi

Tabel V.134 di atas menunjukkan saldo Aset Tetap Dalam Renovasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp802.303.686,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp417.837.636,00, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp384.466.050,00, atau 92,01 %, karena terdapat kurang catat Aset Tetap Dalam Renovasi pada Tahun Anggaran 2023. Kenaikan signifikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**417.837.636,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**532.832.000,00**
	Kurang Catat Aset Tetap		532.832.000,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**148.365.950,00**
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung & Bangunan		148.365.950,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**802.303.686,00**

ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

Berdasarkan Laporan Hasil Sidang Penilaian Kompensasi Atas Nilai Signifikansi Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Kecamatan Sapuran, Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor: 430/1112/DISPARBUD/2020 yang

disusun oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo telah ditemukan 24 Aset Bersejarah (*Heritage Aset*) pada Tahun 2020 dan berdasarkan laporan tersebut juga telah dilakukan identifikasi dengan rincian sebagai berikut:
Aset Bersejarah (*Heritage Assets*) tersebut saat ini disimpan dan dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

		Bahan
(1)	Nampan Perunggu motif *Padmasankha*	Perunggu
(2)	Nampan Perunggu motif Vas Bunga Sulur	Perunggu
(3)	Nampan Perunggu Polos	Perunggu
(4)	*Centhong* Tembaga motif Padma	Tembaga
(5)	Mangkuk keramik glasir putih	Keramik
(6)	*Lepek* keramik glasir coklat.	Keramik
(7)	Cawan Perunggu polos.	Perunggu
(8)	Cawan Tembaga motif suluran daun.	Tembaga
(9)	Cawan Perunggu motif Hexagonal.	Perunggu
(10)	Cawan Perunggu berkelopak polos alas Cembung.	Perunggu
(11)	Cawan Perunggu motif Dekoratif.	Perunggu
(12)	Cawan Tembaga motif Stiliran.	Tembaga
(13)	Cawan Perunggu berkelopak bentuk tiga kelopak bunga , motif tiap sisi.	Perunggu
(14)	Takaran beras (*beruk*) tembaga motif suluran daun.	Tembaga
(15)	Fragmen lis nampan perunggu.	Perunggu
(16)	Fragmen mata rantai perunggu	Perunggu
(17)	Gelang Perunggu Bergotri.	Perunggu
(18)	Gelang Perunggu	Perunggu
(19)	Fragmen Amulet Perak.	Perak
(20)	Fragmen Arca Kepala Singa *(Simha)*	Batu Pasir
(21)	Arca Siwa-Parwati *(kalyanasundaramurti)*	Batu Breksi
(22)	Kemuncak Bertakik	Batu Andesit
(23)	Kemuncak Polos	Batu Andesit
(24)	Kemuncak Susun	Batu Andesit

C.1.c.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tabel V.123 di atas menunjukkan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.728.161.487,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.769.113.704,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.186.499.989,99, atau 25,44%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan rincian sebagaimana Tabel V.151 berikut:

Tabel V.151 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	3.617.236.209,00	1.193.416.032,00	135.254.249,00	4.675.397.992,00
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	151.877.495,00	-	99.114.000,00	52.763.495,00
	JUMLAH	**3.769.113.704,00**	**1.193.416.032,00**	**234.368.249,00**	**4.728.161.487,00**

Mutasi/koreksi sebagaimana Tabel V.126 di atas lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**3.769.113.704,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**1.193.416.032,00**
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.193.416.032,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**234.368.249,00**
	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung & Bangunan		135.254.249,00
	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi & Jaringan		99.114.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**4.728.161.487,00**

C.1.c.7) Akumulasi Penyusutan

Tabel V.123 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.601.052.863.747,23) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.329.949.175.038,97), mengalami kenaikan sebesar (Rp271.103.688.708,26) atau 11,64 %. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan rincian sebagaimana Tabel V.152 berikut:

Tabel V.152 Saldo Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(526.935.686.459,80)	7.206.826.002,79	72.558.255.537,31	(592.287.115.994,32)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(299.911.135.599,79)	82.884.027.367,72	113.767.131.993,70	(330.794.240.225,77)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.502.970.052.977,38)	58.854.361.620,70	232.417.362.332,66	(1.676.533.053.689,34)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(132.300.002,00)	114.176.210,00	1.420.330.045,81	(1.438.453.837,81)
	JUMLAH	**(2.329.949.175.038,97)**	**149.059.391.201,22**	**420.163.079.909,48**	**(2.601.052.863.747,24)**

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.152 di atas diketahui saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.601.052.863.747,24) dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tabel V.152 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp592.287.115.994,32), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp526.935.686.459,80), mengalami kenaikan sebesar (Rp65.351.429.534,51) atau 12,40%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.153 berikut:

Tabel V.153 Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(13.571.217.839,00)	219.961.471,00	1.498.195.245,00	(14.849.451.613,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(77.910.722.464,54)	3.579.535.267,00	11.510.342.954,07	(85.841.530.151,61)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.087.759.443,99)	1.710.270,00	344.996.744,00	(3.431.045.917,99)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(2.816.094.163,00)	-	387.496.344,00	(3.203.590.507,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(90.329.319.910,52)	318.002.826,79	11.762.529.199,03	(101.773.846.282,75)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(10.597.336.137,72)	21.571.503,00	1.222.674.693,00	(11.798.439.327,72)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(173.025.142.935,81)	703.416.574,00	21.412.743.211,00	(193.734.469.572,81)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(42.481.773.985,94)	1.827.272.541,00	6.798.242.371,21	(47.452.743.816,15)
9	Akumulasi Penyusutan Komputer	(84.306.392.475,63)	522.257.803,00	16.798.527.068,00	(100.582.661.740,63)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(379.031,00)	-	349.875,00	(728.906,00)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	22.875,00	(22.875,00)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(2.273.726.173,00)	12.952.057,00	339.293.074,00	(2.600.067.190,00)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(15.783.090,00)	-	14.938.232,00	(30.721.322,00)
14	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(1.639.060,00)	-	803.814,00	(2.442.874,00)
15	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(25.722.993.102,52)	-	357.609.446,00	(26.080.602.548,52)
16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(795.406.647,14)	145.690,00	108.323.725,00	(903.584.682,14)
17	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-	-	1.166.667,00	(1.166.667,00)
	Jumlah	**(526.935.686.459,80)**	**7.206.826.002,79**	**72.558.255.537,31**	**(592.287.115.994,32)**

Analisis Horizontal antara LO dan Neraca pada Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	65.663.200.311,31
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	(592.287.115.994,32)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 (Neraca)	(526.935.686.459,80)
Selisih yang teridentifikasi	**311.770.776,79**

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp311.770.776,79, selisih tersebut berasal dari:

	(Dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	
Penerimaan Hibah Barang	(816.926.933,00)
Perubahan Masa Manfaat	(84.284.964,00)
Perubahan Tahun Perolehan	(9.364.940,00)
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya (kurang catat)	(27.000.000,00)
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	(11.343.750,00)
Mutasi Berkurang:	
Akumulasi Aset Tetap Pengeluaran Hibah	2.085.082,00
Akumulasi Aset Tetap Dihapuskan	1.075.922.109,20
Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,00
dobel catat/lebih catat	18.180.000,00
Perubahan Masa Manfaat	25.452.014,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	139.052.157,59
	311.770.776,79

Tabel V.153 di atas menunjukkan mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan lebih sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**(526.935.686.459,80)**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	
	Penghapusan Aset Tetap		1.075.922.109,20
	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain		139.052.157,59
	Hibah Keluar Aset Tetap		2.085.082,00
	Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan		1,00
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		5.774.710.302,00
	Koreksi Perubahan Masa Manfaat	:	196.664.911,00
	Pencatatan Ganda	:	18.180.000,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	
	Beban Penyusutan Tahun 2023	:	65.686.250.110,31
	Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	:	27.000.000,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)	:	5.774.710.302,00
	Koreksi Perubahan Masa Manfaat	:	280.949.875,00
	Hibah Masuk Aset Tetap	:	777,790.060,00
	Reklasifikasi dari Aset RB ke Aset Baik	:	11.343.750,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**(592.287.115.994,32)**

b) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel V.152 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp330.794.240.225,77) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp299.911.135.599,79), mengalami kenaikan sebesar (Rp30.883.104.625,98) atau 10,30%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.154 berikut:

Tabel V.154 Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Akumulasi Penyusutan Bangunan	(296.136.480.895,79)	80.412.015.330,72	112.348.789.383,70	(328.073.254.948,77)

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
	Gedung				
2.	Akumulasi Penyusutan Monumen	(3.585.368.748,00)	2.423.770.336,00	149.832.514,00	(1.311.430.926,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	-
4.	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(189.285.956,00)	48.241.701,00	1.268.510.096,00	(1.409.554.351,00)
	JUMLAH	**(299.911.135.599,79)**	**82.884.027.367,72**	**113.767.131.993,70**	**(330.794.240.225,77)**

Analisis Horizontal antara LO dan Neraca pada Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	21.555.217.396,98
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	(330.794.240.225,77)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 (Neraca)	(299.911.135.599,79)
Selisih yang teridentifikasi	**(9.327.887.229,00)**

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar (Rp9.327.887.229,00), selisih tersebut berasal dari:

	(Dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	(289.400.977,00)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap Lainnya	(114.176.210,00)
Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :	
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	(12.168.230.841,00)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap - Jalan, Irigasi & Jaringan	(8.072.812.155,00)
Perolehan Aset - Pecah Pencatatan	(93.872.310,00)
Koreksi Pencatatan Karena Gabung	(5.666.525.075,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Reklas	(1.482.959.590,00)
Koreksi Kesalahan Pencatatan Akumulasi Penyusutan	(1.040.564.926,00)
Mutasi Berkurang:	
Penghapusan Aset Tetap	2.874.176.696,00
Lebih Catat Nilai Akumulasi	298.530.243,00
Hibah Keluar Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	424.160,00
Reklasifikasi *ke Properti Investasi*	5.004.686.770,00
Reklasifikasi *ke KSP*	907.912.729,00
Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :	
Penghapusan Aset Tetap	4.560.436.084,00
Lebih Catat Nilai Akumulasi	486.156.428,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Jalan, Irigasi & Jaringan	2.274.989.215,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	38.013.558,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	92.274.840,00
Perolehan Aset - Pecah Pencatatan	1.238.062.782,00
Koreksi Pencatatan Karena Gabung	767.319.165,00
Koreksi Kesalahan Pencatatan	1.057.672.183,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Reklas	2,00
	(9.327.887.229,00)

Tabel V.140 di atas menunjukkan mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**(299.911.135.599,79)**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	
	Penghapusan Aset Tetap		2.878.614.094,00
	Hibah Keluar Aset Tetap		424.160,00
	Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan		298.530.243,00
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		1.145.477.855,00
	Reklasifikasi ke Properti Investasi		5.004.686.770,00
	Reklasifikasi ke KSP		907.912.729,00
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Penghapusan Aset Tetap		4.560.436.084,00
	Lebih Catat Akumulasi Penyusutan		486.156.428,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Jalan, Irigasi & Jaringan		2.274.989.215,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset tetap Lainnya		38.013.558,00
	Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset tetap Lain-lain		92.274.840,00

	Koreksi Pencatatan Karena Pecah		1.238.062.782,00
	Koreksi Pencatatan Karena Gabung		767.319.165,00
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Reklas		2,00
	Koreksi Kesalahan Pencatatan Akumulasi Penyusutan		1.057.672.183,00
	Serah Terima Antar entitas (Keluar)		797.816.637,00
	Reklasifikasi Antar Gedung & Bangunan		61.335.435.813,59
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	
	Beban Penyusutan Tahun 2022		21.555.217.396,98
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung & Bangunan		114.176.210,00
	Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan		289.400.977,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		1.145.477.855,00
	Dobel catat aset		4.437.398,10
	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi :		
	Kurang Catat Akumulasi Penyusutan		12.168.230.841,00
	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi & Jaringan ke Gedung & Bangunan		8.072.812.155,00
	Koreksi Pencatatan Karena Pecah		93.872.310,00
	Koreksi Pencatatan Karena Gabung		5.666.525.075,00
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Reklas		1.482.959.590,00
	Koreksi Kesalahan Pencatatan Akumulasi Penyusutan		1.040.564.926,00
	Serah Terima Antar entitas (Masuk)		797.816.637,00
	Reklasifikasi Antar Gedung & Bangunan		61.335.435.813,59
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**(330.794.240.225,77)**

c) Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

Tabel V.152 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.676.533.053.689,34) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.502.970.052.977,38) mengalami kenaikan sebesar (Rp173.563.000.711,96) atau 11,55%. Kenaiakan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.155 berikut:

Tabel V.155 Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.278.532.101.086,08)	36.079.714.228,00	203.876.576.813,60	(1.446.328.963.671,68)
2.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(211.673.933.212,30)	19.236.249.937,70	23.464.456.969,06	(215.902.140.243,66)
3.	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(8.285.711.699,00)	1.602.695.532,00	4.901.004.217,00	(11.584.020.384,00)
4.	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(4.478.306.980,00)	1.935.701.923,00	175.324.333,00	(2.717.929.390,00)
	JUMLAH	**(1.502.970.052.977,38)**	**58.854.361.620,70**	**232.417.362.332,66**	**(1.676.533.053.689,34)**

Analisis Horizontal antara LO dan Neraca pada Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Berjalan (LO)	75.435.300.781,18
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	(1.676.533.053.689,34)
Akumulasi Penyusutan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 (Neraca)	(1.502.970.052.977,38)
Selisih yang teridentifikasi	**(98.127.699.930,78)**

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar (Rp98.127.699.930,78), selisih tersebut berasal dari:

	(Dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	(5,00)
Koreksi Pencatatan karena kapitalisasi	(9.444.950,92)
Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi:	
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	(11.986.949.233,00)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	(2.274.989.215,00)
Perolehan Aset - Pecah Pencatatan	(50.778.512,00)

Koreksi Pencatatan Karena Gabung	(104.399.222.132,08)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Reklas	(1.605.789.063,42)
Koreksi Kesalahan Pencatatan Akumulasi Penyusutan	(2.159.778.145,06)
Mutasi Berkurang:	
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	3.961.425,00
Lebih Catat Nilai Akumulasi	12,00
Reklas ke KSP	72.573.548,00
Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi:	
Penghapusan Aset Tetap	3.485.143.944,70
Lebih Catat Nilai Akumulasi	3.204.425.502,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	8.072.812.155,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	455.604.992,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	7.509.656.478,00
Koreksi Pencatatan Karena Gabung	473.978.526,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Reklas	81.483.387,00
Koreksi Kesalahan Pencatatan	999.611.356,00
	(98.127.699.930,78)

d) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tabel V.152 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.438.453.837,81) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp132.300.002,00), mengalami kenaikan sebesar (Rp1.306.153.835,81) atau 987,27%, karena terdapat kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang berdasarkan kebijakan akuntansi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.156 berikut:

Tabel V.156 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	1.393.382.877,81	(1.393.382.877,81)
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(132.300.002,00)	114.176.210,00	26.947.168,00	(45.070.960,00)
	JUMLAH	**(132.300.002,00)**	**114.176.210,00**	**1.420.330.045,81**	**(1.438.453.837,81)**

Analisis Horizontal antara LO dan Neraca pada Saldo Akumulasi Aset tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya Tahun Berjalan (LO)	624.868.619,81
Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	(1.438.453.837,81)
Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya Tahun 2022 (Neraca)	(132.300.002,00)
Selisih yang teridentifikasi	**(681.285.216,00)**

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar (Rp681.285.216,00), selisih tersebut berasal dari:

	(Dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	(795.461.426,00)
Mutasi Keluar:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung & Bangunan	114.176.210,00
	(681.285.216.,00)

Tabel V.156 di atas menunjukkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**(132.300.002,00)**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**114.176.210,00**
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung & Bangunan	:	114.176.210,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**1.420.330.045,81**
	Beban Penyusutan Tahun 2022	:	624.868.619,81
	Kurang Catat Akumulasi Penyusutan		795.461.426,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**(1.438.453.837,81)**

C.1.d. PROPERTI INVESTASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi menyatakan bahwa PSAP Properti Investasi mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022. Maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menindaklajutinya dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa entitas yang telah menyampaikan data dengan penjelasan sebagai berikut.

No	Uraian	Bidang	Nilai Properti Investasi (Rp)
1.	Tanah	714 Bidang	62.959.530.699,00
2.	Gedung dan Bangunan	15 Bidang	14.577.359.861,00
3.	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	15 Bidang	(5.004.686.787,00)
	JUMLAH		**72.532.203.790,00**

Bagan Akun Standar Kabupaten Wonosobo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana dalam Peraturan Bupati dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut belum mengatur tentang Properti Investasi. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kodefikasi merupakan acuan baku bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sehingga dalam BAS yang disusun Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rincian lebih lanjut properti investasi dapat dilihat pada Lampiran V.12.

C.1.d.1) Properti Investasi – Tanah

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai Properti Investasi – Tanah sebesar Rp62.959.530.699,00 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 nihil. Nilai tersebut berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Tanah menjadi Properti Investasi - Tanah pada Tahun Anggaran 2023. Kenaikan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	:	**-**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	:	**62.959.530.699,00**
	Reklasifiaksi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi Tanah	:	62.959.530.699,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	:	**-**
	Saldo Per 31 Desember 2023	:	**62.959.530.699,00**

C.1.d.2) Properti Investasi – Gedung dan Bangunan

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai Properti Investasi – Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.577.359.861,00 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 nihil. Nilai tersebut berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi Properti Investasi – Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2023. Kenaikan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	:	**-**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	:	**14.577.359.861,00**
	Reklasifiaksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Properti Investasi Gedung dan Bangunan	:	14.577.359.861,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	:	**-**
	Saldo Per 31 Desember 2023	:	**14.577.359.861,00**

C.1.d.3) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Kabupaten Wonosobo per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.004.686.787,00 sedangkan per 31 Desember 2022 nilainya nihil. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kode rekening terkait dengan Properti Investasi sehingga terdapat reklasifikasi dari akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang sebelumnya belum dicatat sebagai Properti Investasi.

C.1.e.DANA CADANGAN

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dan cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Dana Cadangan yang dibentuk lebih dari satu peruntukkan, maka dana cadangan dirinci menurut pembentukannya. Tabel V.65 diatas menunjukkan per 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo Dana Cadangan sedangkan per 31 Desember 2022 terdapat saldo sebesar Rp15.048.122.525,00 (yang berasal dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 ditambah Bunga Dana Cadangan sebesar Rp48.122.525,00), Hal tersebut dikarenakan per 31 Desember 2023 telah dipindahkan sepenuhnya ke Rekening Kas Umum Daerah. Uraian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**15.048.122.525,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**17.969.955.588,00**
	Bunga Deposito Dana cadangan		900.005.994,00
	Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000,00

	Pemindahbukuan Saldo Deposito dana cadangan dari Kas Daerah		2.017.894.800,00
	Pemindahbukuan Saldo Bunga Deposito dana cadangan dari Kas Daerah		52.054.794,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**33.018.078.113,00**
	Pencairan Dana Cadangan ke Kas Daerah		20.052.054.794,00
	Pencairan Dana Cadangan Ke Kas daerah		12.044.800.494,00
	Pencairan Bunga Deposito Dana Cadangan ke Kas Daerah		921.222.825,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**-**

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa jumlah Dana Cadangan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00. Pembentukan dana cadangan tersebut dipenuhi selama dua tahun anggaran dimana APBD Tahun Anggaran 2022 dibentuk Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00, Dana Cadangan tersebut disimpan dalam bentuk deposito atau bentuk lain atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD dan disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

C.1.f. ASET LAINNYA

Neraca Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menunjukkan saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp212.330.287.025,95, dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp207.039.567.368,32 mengalami penurunan sebesar Rp6.875.070.145,63 atau 3,32%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.157 di bawah ini:

Tabel V.157 Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	30.039.159,00	36.041.159,00	(6.002.000,00)	(16,65)
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	185.861.241.481,00	172.490.676.739,00	13.370.564.742,00	7,75
3.	Aset Tidak Berwujud	9.155.067.109,00	8.423.571.449,00	731.495.660,00	8,68
4.	Amortisasi	(5.210.636.461,00)	(4.645.116.123,00)	(565.520.338,00)	12,17
5.	Aset Lain-lain	65.780.164.904,66	90.905.321.271,75	(25.125.156.367,09)	(27,64)
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(46.243.876.166,71)	(64.713.564.615,43)	18.469.688.448,72	(28,54)
7.	Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-
8.	*Treasury Deposit Facility* (TDF) Transfer ke Daerah	2.958.287.000,00	4.542.637.488,00	(1.584.350.488,00)	(34,88)
	JUMLAH	**212.330.287.025,95**	**207.039.567.368,32**	**6.875.070.145,63**	**3,32**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 telah menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening *Treasury Deposite Facilities* (TDF) dalam APBD. Adapun TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh Dana Transfer pada rekening *Treasury Deposite Facilities* dengan saldo pokok per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.542.637.488,00 dan remunerasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.101.727,74.

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF memiliki *holding period* yang ditetapkan selama 3 bulan terhitng penempatan DBH dan/atau DAU di fasilitas TDF. Selain itu, penarikan dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa *holding period* atau setelah masa *holding period*.

C.1.f.1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tabel V.157 di atas menunjukkan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.039.159,00, dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.041.159,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.002.000,00 atau 16,65%, yang berasal dari cicilan untuk melunasi TGR oleh sdr SWG. Rincian Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	SKTJM	Tahun Pengakuan	Jatuh Tempo	Jumlah (Rp)
1.	SWG	SKTJM No.950/540/2012	2012	31 Desember 2021	20.039.159,00
2.	KSF	SKTJM No. 028/033/2020	2020	30 November 2020	10.000.000,00
		JUMLAH			**30.039.159,00**

C.1.f.2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tabel V.157 di atas menunjukkan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp185.861.241.481,00, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp172.490.676.739,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.158 berikut:

Tabel V.158 Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan (Pasar Induk Wonosobo)	10.864.240.000,00	-	-	10.864.240.000,00
2.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar (Pasar Induk Wonosobo)	170.800.290.320,00	-	-	170.800.290.320,00
3.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar (Pasar Induk Wonosobo)	(9.173.853.581,00)	-	-	(9.173.853.581,00)
4.	Tanah Kering (Taman Syailendra)	-	2.894.672.700,00	-	2.894.672.700,00
5.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Taman Syailendra)	-	714.573.589,00	-	714.573.589,00
6.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar (Taman Syailendra)	-	349.212.311,00	-	349.212.311,00
7.	Bangunan Fasilitas Umum (Taman Syailendra)	-	205.586.560,00	-	205.586.560,00
8.	Taman (Taman Syailendra)	-	4.713.600.696,00	-	4.713.600.696,00
9.	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Perinstirahatan (Taman Syailendra)	-	3.821.510.000,00	-	3.821.510.000,00
10.	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku (Taman Syailendra)	-	516.020.350,00	-	516.020.350,00
11.	Instalasi Gardu Listrik Distribusi (Taman Syailendra)	-	155.388.536,00	-	155.388.536,00
	JUMLAH	**172.490.676.739,00**	**13.370.564.742,00**	**-**	**185.861.241.481,00**

Berdasarkan Tabel V.158 di atas diketahui saldo Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp185.861.241.481,00 merupakan Pasar Induk Wonosobo. Pada TA 2020 terdapat koreksi debet dari aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pasar Induk Wonosobo yang ditemukan ternyata masih dalam masa Kerjasama Pemanfaatan dalam BOT (*Built Operate Transfer*) /BGS (Bangun Guna Serah) sebesar Rp172.490.676.738,00. Meskipun telah dilakukan terima pengalihan HPL dan Bangunan Pasar Induk Wonosobo pada 15 Juli 2016 dari PT. JGU selaku kuasa dari PT. PTW kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Nomor : JGU.2016.VII.15.10 yang isinya kedua belah pihak sepakat mengadakan serah terima barang dalam bentuk pengalihan hak pengelolaan lahan dan bangunan, namun sesuai dengan perjanjian awal diberikan penguasaan atas kios-kios dengan status Hak Guna Bangunan (Induk) di atas Hak Pengelolaan (Pemkab Wonosobo) dengan jangka waktu 30 tahun dan PT. PTW juga diberi hak untuk melakukan pemasaran/penjualan kios-kios tersebut kepada para pedagang/pihak ketiga dan kepada pihak ketiga diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (Pemerintah Kabupaten Dati II Wonosobo) atas nama masing-masing selama jangka waktu 30 tahun terhitung sesuai jangka waktu HGB atau sampai dengan Tahun 2025. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 (Taman Syailendra) Desa Dieng Kecamatan Kejajar dan Bangunan Diatasnya Nomor : 028/0073/2023 Nomor : 001/GDA-PKS11/2023 dengan PT Global Dharma Asri (Perseroda) yang berisi bahwa kedua belah pihak sepakat Aset Tetap Tanah dan Bangunan Taman Syailendra Dieng tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo telah ditetapkan menjadi aset khusus Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo dan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan tersebut oleh PT Global Dharma Asri (Perseroda) adalah 20 tahun dengan kewajiban menyerahkan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

C.1.f.3) Aset Tidak Berwujud

Tabel V.157 di atas menunjukkan saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.155.067.109,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.423.571.449,00, mengalami kenaikan sebesar Rp731.495.660,00 atau 7,99%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**8.423.571.449,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**783.122.410,00**
	Belanja Modal		758.424.910,00
	Reklasifikasi Antar Aset Lainnya dari Belanja Modal TA 2023		24.697.500,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**51.626.750,00**
	Penghapusan Aset Tidak Berwujud (DED Sudah Tidak Dilanjutkan – Dinas Lingkungan Hidup)		51.626.750,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**9.155.067.109,00**

C.1.f.4) Amortisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan ke Tiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Masa manfaat Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3.01.	*Goodwill*	5
1.5.3.02.	Lisensi dan *franchise*	10
1.5.3.03.	Hak cipta	20
1.5.3.04.	Paten	20
1.5.3.05.	*Software*	10

Analisis Horizontal antara LO dan Neraca pada Saldo Akumulasi Amortisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Beban Amortisasi Tahun Berjalan (LO)	571.053.236,00
Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca)	(5.210.636.461,00)
Akumulasi Amortisasi Tahun 2022 (Neraca)	(4.645.116.123,00)
Selisih yang teridentifikasi	**(5.532.898,00)**

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar (Rp5.532.898,00), selisih tersebut berasal dari:

	(Dalam Rupiah)
Mutasi Berkurang:	
Penghapusan Aset Tidak Berwujud	5.532.898,00

Tabel V.157 di atas menunjukkan saldo Amortisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp5.210.636.461,00), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp4.645.116.123,00), mengalami penurunan sebesar (Rp565.520.338,00), atau 12,17%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**(4.645.116.123,00)**
(2)	**Mutasi/Koreksi berkurang (Debet) dari:**	**:**	**5.532.898,00**
	Penghapusan Karena Sudah Tidak Dilanjutkan (DED-DLH)		5.532.898,00
(3)	**Mutasi/Koreksi bertambah (kredit) dari:**	**:**	**571.053.236,00**
	Beban Amortisasi TA 2023		571.053.236,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**(5.210.636.461,00)**

C.1.f.5) Aset Lain-lain

Tabel V.157 di atas menunjukkan saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdiri dari Aset Rusak Berat/Usang dan Kas di Tabulin. Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.780.164.904,66, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp90.905.321.271,75, mengalami penurunan sebesar Rp25.125.156.367,09 atau 27,64%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan rincian sebagaimana Tabel V.159 berikut:

Tabel V.159 Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 *(Rp)*	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Aset Rusak Berat/Usang	89.905.641.384,75	22.284.871.200,83	47.498.247.453,92	64.692.265.131,66
2.	Kas di Tabulin	999.679.887,00	1.087.899.773,00	999.679.887,00	1.087.899.773,00
	JUMLAH	**90.905.321.271,75**	**23.372.770.973,83**	**48.497.927.340,92**	**65.780.164.904,66**

a. Aset Rusak Berat/Usang

Tabel V.159 di atas menunjukkan saldo Aset Rusak Berat/Usang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.692.265.131,66, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp89.905.641.384,75, mengalami penurunan sebesar Rp25.213.376.253,09, atau 28,04%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**89.905.641.384,75**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**22.284.871.200,83**
	Koreksi Hasil Inventarisasi BMD	**:**	21.364.620.443,23
	Reklasifikasi dari Aset Tetap		11.907.416,60
	Mutasi antar entitas		766.414.341,00
	Koreksi Audited 2023		141.929.000,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**47.498.247.453,92**
	Koreksi Hasil Inventarisasi BMD	:	27.435.491.455,00
	Koreksi Lebih catat		9.826.735.322,03

	Penjualan Aset Rusak Berat/Usang		9.028.543.893,58
	Mutasi antar entitas		766.414.341,00
	Hibah		118.582.500,00
	Penghapusan		279.176.500,00
	Koreksi Audited 2023		43.303.442,31
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**64.692.265.131,66**

b. Kas di Tabulin

Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin) adalah tabungan sosial yang dilakukan oleh calon pengantin, ibu hamil dan ibu yang akan bersalin maupun oleh masyarakat untuk biaya pemeriksaan kehamilan dan persalinan serta pemeliharaan kesehatan selama nifas. Tabulin selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sisa Dana Tabungan Bersalin di Kabupaten Wonosobo. Tabel V.145 di atas menunjukkan saldo Kas di Tabulin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.087.899.773,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah Rp999.679.887,00, mengalami kenaikan sebesar Rp88.219.886,00 atau 8,82%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**999.679.887,00**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**1.087.899.773,00**
	Koreksi Audited 2023	**:**	1.087.899.773,00
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**999.679.887,00**
	Penyesuaian saldo awal	:	999.679.887,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**1.087.899.773,00**

Penjelasan lebih lanjut Saldo Kas di Tabulin per 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel V.160 berikut:

Tabel V.160 Saldo Kas di Tabulin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 *(Rp)*	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Kecamatan Wonosobo PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda) No Rek: 01.101.06168	109.053.931,00	1.733.538,00	-	110.787.469,00
2.	Kecamatan Kertek PT.BPR BKK Jateng (Perseroda) No Rek: 01.520.9000179	21.396.254,00	315.626,00	-	21.711.880,00
3.	Kecamatan Selomerto PD. BPR BKK Wonosobo No Rek 06.101.18255	124.128.989,00	2.147.271,00	-	126.276.260,00
4.	Kecamatan Leksono PD BPR BKK Leksono No Rek: 05.101.03127	46.486.198,00	725.080,00	-	47.211.278,00
5.	Kecamatan Watumalang PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda) Kc Watumalang No Rek: 04.101.03681	14.689.194,00	212.581,00	-	14.901.775,00 -
6.	Kecamatan Mojotengah PD BKK Kertek Cabang Mojotengah No Rek: 01.520.2002551	34.073.080,00	76.350.971,00	-	110.424.051,00
7.	Kecamatan Garung Bank Jateng Wonosobo No Rek: 2-023-15199-8	79.181.032,00	22.033,00	-	79.203.065,00 -
8.	Kecamatan Kejajar BPR BKK Wonosobo Kec. Kejajar No Rek: 03.101.03986	88.089.591,00	1.395.638,00	-	89.485.229,00 -
9.	Kecamatan Kalikajar PD. BPR Bank Wonosobo No Rek: 10.02.04.00140	62.181.944,00	37.260,00	-	62.219.204,00 -
10.	Kecamatan Sapuran PD. BPR Bank Wonosobo No Rek: 10.01.10.00325	178.258.107,00	2.120.735,00	-	180.378.842,00

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 *(Rp)*	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
11.	Kecamatan Kepil PD. BPR Bank Wonosobo No Rek: 10.02.19.00094	115.954.507,00	900.900,00	-	116.855.407,00 -
12.	Kecamatan Kaliwiro PD. BPR BKK Wonosobo Kc Kaliwiro No Rek: 007.01.028492	11.744.548,00	165.119,00	-	11.909.667,00 -
13.	Kecamatan Wadaslintang PD. BPR BKK Wonosobo No Rek: 008.01.009801	103.352.703,00	2.085.885,00	-	105.438.588,00
14.	Kecamatan Sukoharjo BPR Bank Wonosobo No Rek: 10.02.18.00141	10.032.298,00	10.127,00	-	10.042.425,00
15.	Kecamatan Kalibawang BPR BKK Wonosobo No Rek: 09.101.01156	1.057.511,00	-	2.878,00	1.054.633,00
	JUMLAH	**999.679.887,00**	**88.222.764,00**	**2.878,00**	**1.087.899.773,00**

C.1.f.6) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Tabel V.157 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 berupa Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat sebesar (Rp46.243.876.166,71), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022sebesar (Rp64.713.564.615,43), mengalami penurunan sebesar Rp18.469.688.448,72 atau 28,54%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	**Saldo Per 31 Desember 2022**	**:**	**(64.713.564.615,43)**
(2)	**Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:**	**:**	**27.401.532.351,31**
	Koreksi Hasil Inventarisasi BMD	**:**	16.366.304.854,00
	Koreksi Lebih catat		1.075.707.409,00
	Penjualan Aset Rusak Berat/Usang		8.916.683.885,00
	Beban Hibah		105.024.813,00
	Mutasi antar entitas		693.280.443,00
	Penghapusan Aset Tetap		201.227.500,00
	Koreksi Audited 2023		43.303.447,31
(3)	**Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:**	**:**	**8.931.843.902,59**
	Koreksi Hasil Inventarisasi BMD	:	8.095.549.868,00
	Koreksi kurang catat		9,00
	Mutasi antar entitas		693.280.443,00
	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		15.868.841,59
	Koreksi Audited 2023		127.144.741,00
(4)=(1)+(2)-(3)	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**:**	**(46.243.876.166,71)**

C.1.f.7) Aset Yang Dibatasi Penggunaannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengamanatkan pada pasal 9 yang menyatakan bahwa Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Saldo Aset Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 terdapat saldo yang merupakan Kas di tabulin disajikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka akun tersebut menjadi tidak ada dan saldo kas di tabulin dicatat pada Aset Lain-lain.

C.1.f.8) *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah

Tabel V.157 di atas menunjukkan saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.958.287.000,00 sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp4.542.637.488,00, dikarenakan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* pada Tahun Anggaran 2023 telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

C.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp19.645.205.129,90 yang seluruhnya merupakan Utang Jangka Pendek. Jika dibandingkan dengan saldo TA 2022 sebesar Rp29.131.973.838,20 mengalami penurunan sebesar 32,56% atau Rp9.486.768.708,30. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.161 di bawah ini:

Tabel V.161 Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		Per 31/12/2023	Per 31/12/2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Kewajiban Jangka Pendek	19.645.205.129,90	29.131.973.838,20	(9.486.768.708,30)	(32,56)
2.	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
	JUMLAH	**19.645.205.129,90**	**29.131.973.838,20**	**(9.486.768.708,30)**	**(32,56)**

C.2.a. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp19.645.205.129,90. Jika dibandingkan dengan saldo TA 2022 sebesar Rp29.131.973.838,20 mengalami penurunan sebesar 32,56% atau Rp9.486.768.708,30. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.162 di bawah ini:

Tabel V.162 Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		Per 31/12/2023	Per 31/12/2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	301.119.529,00	8.762.123,00	292.357.406,00	3.336,60
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	2.292.947.719,90	3.074.809.724,00	(781.862.004,10)	(25,43)
3.	Utang Belanja	17.051.137.881,00	25.967.498.992,20	(8.916.361.111,20)	(34,34)
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	80.902.999,00	(80.902.999,00)	(100,00)
	JUMLAH	**19.645.205.129,90**	**29.131.973.838,20**	**(9.486.768.708,30)**	**(32,56)**

C.2.a.1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tabel V.162 di atas menunjukkan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2023 adalah Rp301.119.529,00, jika dibandingkan dengan Saldo TA 2022 sebesar Rp8.762.123,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp292.357.406,00 atau 3.336,60% karena pada TA 2023 terdapat kurang catat utang PFK berupa JKN 1% di rekening penampungan. dengan uraian sebagaimana Tabel V.163 sebagai berikut:

Tabel V.163 Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023
		31/12/2022 (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	2.529.603,00	2.529.603,00	301.119.529,00	301.119.529,00
2.	Utang PPh Pusat	483.020,00	483.020,00	-	-
3.	Utang PPN Pusat	435.000,00	435.000,00	-	-
4.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	5.314.500,00	5.314.500,00	-	-
	JUMLAH	**8.762.123,00**	**8.762.123,00**	**301.119.529,00**	**301.119.529,00**

a. Tabel V.163 diatas menunjukkan Utang Iuran Jaminan Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.529.603,00 yang berada pada Puskesmas Garung sebesar Rp1.243,00 dan Puskesmas Kalibawang sebesar Rp2.528.360,00 dan telah dilunasi pada TA 2023. Terdapat kurang catat utang PFK berupa JKN 1% di rekening penampungan pada PPKD sebesar Rp301.119.529,00.

b. Tabel V.163 diatas menunjukkan Utang PPh Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp483.020,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel V.164 Saldo Utang PPh Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang PPh 21	117.500,00	117.500,00	-	-
2.	Utang PPh 23	365.520,00	365.520,00	-	-
	JUMLAH	**483.020,00**	**483.020,00**	**-**	**-**

1) Tabel V.164 diatas menunjukkan per 31 Desember 2022 terdapat saldo Utang PPh pasal 21 yang telah dibayarkan sebesar Rp117.500,00 di tahun 2023.
2) Tabel V.164 diatas menunjukkan saldo per 31 Desember 2022 Utang PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp365.520,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah dibayarkan di tahun 2023.

c. Tabel V.163 diatas menunjukkan terdapat saldo Utang PPN Pusat per 31 Desember 2022 yang telah dibayarkan sebesar Rp435.000,00 di tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja	Nilai (Rp)	Nomor Bukti	Tanggal penyetoran ke Kas Negara
Dikpora	435.000,00	ID Billing 027281784057024	06 Januari 2023
	435.000,00		

d. Tabel V.163 diatas menunjukkan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.314.500,00 yang berada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp282.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.032.500,00 merupakan Utang Pajak Daerah Tahun 2022 yang sudah disetorkan pada TA 2023.

C.2.a.2) Pendapatan Diterima Dimuka

Tabel V.162 di atas menunjukkan bahwa saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.292.947.719,90. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.074.809.724,00, saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp721.909.609,77 atau 0,31%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2023 dengan penjelasan di bawah ini:

(Dalam Rupiah)

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022	:	**3.074.809.724,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**5.616.320.193,77**
Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka	:	5.391.543.065,66
Koreksi lebih catat pendapatan diterima dimuka		104.118.794,45
Koreksi Audited 2023		120.658.333,66
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**4.834.458.189,67**
Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka	:	4.773.752.250,34

Koreksi Audited 2023		60.705.939,33
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023	**:**	**2.292.947.719,90**

Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan perhitungan perjanjian atau ketetapan pendapatan.Saldo Pendapatan diterima dimuka per entitas Saldo per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel V.165 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	RSUD KRT Setjonegoro	108.266.666,67	108.266.666,67	137.333.333,33	137.333.333,33
2.	DPMPTSP	302.167,00	302.167,33	9.417,00	9.416,67
3.	Disdagkop	1.698.837.500,00	3.397.675.000,00	2.197.327.500,00	498.490.000,00
4.	Kel Jlamprang	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-
5.	Kel Kejiwan	32.331.250,00	64.662.500,00	66.410.875,00	34.079.625,00
6.	Kel Sambek	13.825.000,00	27.650.000,00	32.375.000,00	18.550.000,00
7.	Kel Mlipak	91.254.166,67	141.029.166,67	118.337.500,00	68.562.500,00
8.	Kel Pagerkukuh	10.445.833,33	20.891.666,66	15.070.833,33	4.625.000,00
9.	Kel Rojoimo	19.258.341,67	38.516.683,33	38.466.683,33	19.208.341,67
10.	Kel Kramatan	23.136.666,67	46.273.333,34	48.180.000,00	25.043.333,33
11.	Kel Tawangsari	18.662.500,00	37.325.000,00	26.495.833,33	7.833.333,33
12.	Kel Jaraksari	65.615.000,00	108.176.666,67	81.890.000,00	39.328.333,33
13.	Kel Bumireso	30.662.500,00	61.325.000,00	56.558.333,33	25.895.833,33
14.	Kel Kalianget	1.500.000,00	3.000.000,00	2.875.000,00	1.375.000,00
15.	Kel kertek	45.000.000,00	90.000.000,00	94.487.500,00	49.487.500,00
16.	Kel Wiringanom	49.017.500,00	98.035.000,00	180.117.500,00	131.100.000,00
17.	Kel Wonorejo	57.725.000,00	115.450.000,00	163.066.666,67	105.341.666,67
18.	Kel Leksono	69.125.000,00	138.250.000,00	310.625.000,00	241.500.000,00
19.	Kel Mudal	18.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00
20.	Kel Andongsili	28.513.333,33	57.026.666,66	57.026.666,66	28.513.333,33
21.	Kel Garung	17.500.000,00	17.500.000,00	12.366.666,67	12.366.666,67
22.	Kel Kejajar	11.734.833,33	11.734.833,33	11.734.833,33	11.734.833,33
23.	Kel Kalikajar	18.150.000,00	18.150.000,00	-	-
24.	Kel Sapuran	88.625.000,00	98.208.333,33	102.583.333,33	93.000.000,00
25.	Kel Kepil	11.168.750,00	22.337.500,00	85.525.000,00	74.356.250,00
26.	Kel Wadaslintang	1.720.833,33	3.441.666,66	30.987.083,33	29.266.250,00
27.	BPPKAD	538.731.882,00	849.392.343,11	928.607.631,02	617.947.169,91
	JUMLAH	**3.074.809.724,00**	**5.616.320.193,76**	**4.834.458.189,66**	**2.292.947.719,90**

C.2.a.3) Utang Belanja

Tabel V.162 di atas menunjukkan bahwa saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.051.137.881,00, dibanding saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.967.498.992,20, mengalami penurunan sebesar Rp8.916.361.111,20 atau 34,34%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2023 yang dapat dilihat pada Tabel V.166 di bawah ini.

Tabel V.166 Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp) Per 31/12/2023	Per 31/12/2022	Kenaikan / (Penurunan) Saldo (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Utang Belanja Pegawai	12.296.602.095,00	125.785.989,00	12.170.816.106,00	9.675,81
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.713.545.786,00	25.841.713.003,20	(21.128.167.217,20)	(81,76)
3.	Utang Belanja Bantuan Sosial	40.990.000,00	-	40.990.000,00	-
	JUMLAH	**17.051.137.881,00**	**25.967.498.992,20**	**(8.916.361.111,20)**	**(34,34)**

a) Utang Belanja Pegawai

Tabel V.166 di atas menunjukkan saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.296.602.095,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp125.785.989,00 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 9.675,81%,

karena terdapat reklasifikasi Utang Belanja Barang dan Jasa menjadi Utang Belanja Pegawai pada RSUD KRT Setjonegoro. Mutasi/koreksi selama tahun berjalan dengan uraian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel V.167 berikut:

Tabel V.167 Saldo Utang Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	19.284.836,00	25.969.061,00	6.684.225,00
2.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	125.785.989,00	23.299.605.637,20	35.463.737.518,20	12.289.917.870,00
	JUMLAH	**125.785.989,00**	**23.318.890.473,20**	**35.489.706.579,20**	**12.296.602.095,00**

(1) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Tabel V.167 diatas menunjukkan bahwa Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.684.225,00 sedangkan per 31 Desember 2022 bersaldo nihil. Saldo Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN per 31 Desember 2023 yang merupakan Iuran Jaminan Kesehatan PPPK pada beberapa entitas antara lain:

Unit Kerja	Nilai (Rp)
Puskesmas Wonosobo 1	3.927.590,00
Puskesmas Kertek 1	1.118.256,00
Puskesmas Kepil 1	1.638.379,00
	6.684.225,00

(2) Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel V.167 diatas menunjukkan bahwa Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.289.917.870,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp125.785.989,00 cenderung mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp12.164.131.881,00 atau 9.670,50%, terdapat reklasifikasi Utang Belanja Jasa (Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan) menjadi Utang Belanja Pegawai (Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan). Mutasi/koreksi selama tahun berjalan dengan uraian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel V.168 berikut:

Tabel V.168 Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	121.768.685,00	23.295.588.333,20	35.458.810.290,20	12.284.990.642,00
2.	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.017.304,00	4.017.304,00	4.927.228,00	4.927.228,00
	JUMLAH	**125.785.989,00**	**23.299.605.637,20**	**35.463.737.518,20**	**12.289.917.870,00**

(a) Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

Tabel V.168 diatas menunjukkan bahwa Saldo Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.284.990.642,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp125.785.989,00 cenderung mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp12.164.131.881,00 atau 9.670,50%, terdapat reklasifikasi antar akun kewajiban karena terdapat perbedaan penganggaran pada Tahun Anggaran 2022 sebagai Belanja Jasa dan Tahun Anggaran 2023 sebagai Belanja Pegawai dengan rincian sebagaimana Tabel V.169 dibawah ini.

Tabel V.169 Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

			Mutasi/Koreksi (Rp)				
			Debet		Kredit		
No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	Koreksi Reklasifikasi Utang	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)=(3)-(4)-(5)+(6)+(7)
1	Puskesmas Garung	85.336.767,00	85.336.767,00	-	-	-	-
2	Puskesmas Kepil 1	36.431.918,00	36.431.918,00	-	-	-	-
3	RSUD KRT Setjonegoro	-	23.172.849.903,20	-	12.193.985.923,00	23.172.849.903,20	12.193.985.923,00
4	Puskesmas Sukoharjo 2	-	-	969.745,00	91.974.464,00	-	91.004.719,00
	JUMLAH	**121.768.685,00**	**23.294.618.588,20**	**969.745,00**	**12.285.960.387,00**	**23.172.849.903,20**	**12.284.990.642,00**

(b) Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Tabel V.168 diatas menunjukkan bahwa Saldo Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.927.228,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.017.304,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp909.924,00 atau 22,65% dengan rincian sebagaimana Tabel V.170 dibawah ini.

Tabel V.170 Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

			Mutasi/Koreksi (Rp)			
			Debet		Kredit	
No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)=(3)-((4)+(5))+(6)
1	Puskesmas Garung	517.304,00	517.304,00	-	-	-
2	Puskesmas Kepil 1	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-
3	Puskesmas Sukoharjo 2	-	-	-	4.927.228,00	4.927.228,00
	JUMLAH	**4.017.304,00**	**4.017.304,00**	-	**4.927.228,00**	**4.927.228,00**

b) Utang Belanja Barang dan Jasa

Tabel V.166 di atas menunjukkan bahwa saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.713.545.786,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah Rp25.841.713.003,20 mengalami penurunan signifikan sebesar 81,76% karena terdapat reklasifikasi menjadi Utang Belanja Pegawai dengan uraian lebih lanjut sebagaimana Tabel V.171 berikut:

Tabel V.171 Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Belanja Barang	761.843.771,00	736.433.621,00	2.322.987.247,00	2.348.397.397,00
2.	Utang Belanja Jasa	25.070.656.232,20	25.030.071.098,20	1.976.213.875,00	2.016.799.009,00
3.	Utang Belanja Pemeliharaan	-	-	345.197.880,00	345.197.880,00
4.	Utang Belanja Perjalanan Dinas	9.213.000,00	9.213.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
5.	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	1.836.500,00	1.836.500,00
	JUMLAH	**25.841.713.003,20**	**25.775.717.719,20**	**4.647.550.502,00**	**4.713.545.786,00**

(1) Utang Belanja Barang

Tabel V.171 diatas menunjukkan bahwa Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.348.397.397,00 yang berasal dari mutasi/koreksi selama TA 2023, dengan uraian sebagaimana tabel V.172 dibawah ini.

Tabel V.172 Saldo Utang Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	UBBPH-Bahan-Bahan Kimia	313.879.095,00	313.879.095,00	691.563.624,00	691.563.624,00
2.	UBBPH-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.752.948,00	16.752.948,00	19.542.858,00	19.542.858,00
3.	UBBPH -Bahan-Isi Tabung Gas	92.599.540,00	92.599.540,00	109.010.890,00	109.010.890,00
4.	UBBPH- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	76.370.588,00	76.370.588,00
5.	UBBPH - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	21.606.306,00	21.606.306,00	13.667.463,00	13.667.463,00
6.	UBBPH - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	38.398.718,00	38.398.718,00
7.	UBBPH-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	89.196.397,00	89.196.397,00
8.	UBBPH -Obat-Obatan- Obat-Obatan	121.735.155,00	121.735.155,00	1.015.662.764,00	1.015.662.764,00
9.	UBBPH -Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	25.410.150,00	-	-	25.410.150,00
10.	UBBPH- Natura dan Pakan - Natura	138.534.577,00	138.534.577,00	235.548.945,00	235.548.945,00
11.	UBBPH-Makanan dan Minuman Rapat			2.640.000,00	2.640.000,00
12.	UBBPH -Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	24.726.000,00	24.726.000,00	31.385.000,00	31.385.000,00
	JUMLAH	**761.843.771,00**	**736.433.621,00**	**2.322.987.247,00**	**2.348.397.397,00**

*) UBBPH : Utang Belanja Barang Pakai Habis

(a) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia per 31 Desember 2022 sebesar Rp691.563.624,00 dengan uraian tabel V.173 dibawah ini:

Tabel V.173 Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)			Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet		Kredit	
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+(6)
1.	RSUD KRT Setjonegoro	313.879.095,00	313.879.095,00	-	679.187.124,00	679.187.124,00
2.	Puskesmas Selomerto 1	-	-	-	12.376.500,00	12.376.500,00
	JUMLAH	**313.879.095,00**	**313.879.095,00**	**-**	**691.563.624,00**	**691.563.624,00**

(b) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.542.858,00 berada di RSUD KRT Setjonegoro dengan uraian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**16.752.948,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**16.752.948,00**
Pembayaran Utang	:	16.752.948,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**19.542.858,00**
Utang Tahun Berjalan	:	19.542.858,00
	:	
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**19.542.858,00**

(c) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas per 31 Desember 2023 sebesar Rp109.010.890,00 nilai tersebut berada di RSUD KRT Setjonegoro, dengan uraian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**92.599.540,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**92.599.540,00**
Pembayaran Utang	:	92.599.540,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**109.010.890,00**
Utang Tahun Berjalan	:	109.010.890,00
	:	
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**109.010.890,00**

(d)Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat 31 Desember 2022 adalah nihil, sedangkan per 31 Desember 2023 terdapat saldo sebesar Rp76.370.588,00 yang berada di RSUD KRT Setjonegoro yang berasal dari utang tahun berjalan.

(e) Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.667.463,00, dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**21.606.306,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**21.606.306,00**
Pembayaran Utang	:	21.606.306,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**13.667.463,00**
Utang Tahun Berjalan	:	11.603.510,00
Koreksi Audited 2023	:	2.063.953,00
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**13.667.463,00**

(f) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor per 31 Desember 2023 adalah Rp38.398.718,00 pada RSUD KRT Setjonegoro, dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**6.600.000,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**6.600.000,00**
Pembayaran Utang	:	6.600.000,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**38.398.718,00**
Utang Tahun Berjalan	:	38.398.718,00
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**38.398.718,00**

(g) Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2022 adalah nihil, sedangkan per 31 Desember 2023 terdapat saldo sebesar Rp89.196.397,00 yang berada di RSUD KRT Setjonegoro sebesar Rp56.914.397,00 dan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kab. Wonosobo yang berasal dari utang tahun berjalan sebesar Rp32.282.000,00.

(h) Utang Belanja Barang Pakai Habis - Obat-Obatan-Obat-Obatan

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis - Obat-Obatan - Obat-Obatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.015.662.764,00 pada RSUD KRT Setjonegoro, dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**121.735.155,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**121.735.155,00**
Pembayaran Utang	:	121.735.155,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**1.015.662.764,00**
Utang Tahun Berjalan	:	1.015.662.764,00
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**1.015.662.764,00**

(i) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.410.150,00, yang

merupakan retensi/jaminan pemeliharaan kegiatan pembangunan tambahan sumur kapasitas 1,5L/Detik Desa Sigedang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo TA 2019 yang oleh penyedia yaitu CV. JS dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum dilakukan klaim/penagihan atas retensi tersebut.

(j) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura per 31 Desember 2023 sebesar Rp235.548.945,00 pada RSUD KRT Setjonegoro, dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**138.534.577,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**138.534.577,00**
Pembayaran Utang	:	138.534.577,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**235.548.945,00**
Utang Tahun Berjalan	:	235.548.945,00
Saldo Per 31 Desember 2023	:	**235.548.945,00**

(k) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat per 31 Desember 2022 adalah nihil, sedangkan per 31 Desember 2023 terdapat saldo sebesar Rp2.640.000,00 yang berada di RSUD KRT Setjonegoro yang berasal dari utang tahun berjalan.

(l) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

Saldo Utang Belanja Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp31.385.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel V.174 sebagai berikut:

Tabel V.174 Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet		Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+(6)
1.	Puskesmas Wadaslintang 1	24.726.000,00	24.726.000,00	-	-	-
2.	Puskesmas Selomerto 1	-	-	-	31.385.000,00	31.385.000,00
	JUMLAH	**24.726.000,00**	**24.726.000,00**	**-**	**31.385.000,00**	**31.385.000,00**

(2) Utang Belanja Jasa

Tabel V.171 diatas menunjukkan bahwa Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.016.799.009,00 yang berasal dari mutasi/koreksi selama TA 2023 dengan uraian sebagaimana tabel V.175 dibawah ini.

Tabel V.175 Saldo Utang Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	UBJK -Jasa Tenaga Kesehatan	23.424.985.846,20	23.424.985.846,20	74.204.877,00	74.204.877,00
2.	UBJK –Jasa Tenaga Laboratorium	151.328.810,00	151.328.810,00	430.974.950,00	430.974.950,00
3.	UBJK -Jasa Tenaga Ahli	5.300.000,00	5.300.000,00	20.979.000,00	20.979.000,00

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
4.	UBJK -Jasa Pengolahan Sampah	4.760.801,00	7.267.898,00	9.231.600,00	6.724.503,00
5.	UBJK –Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.876.802,00	5.876.802,00	2.445.000,00	2.445.000,00
6.	UBJK -Tagihan Telepon	33.197.492,00	33.197.522,00	45.250.728,00	45.250.698,00
7.	UBJK -Tagihan Air	47.079.153,00	49.353.673,00	80.499.600,00	78.225.080,00
8.	UBJK -Tagihan Listrik	215.559.587,00	217.289.177,00	239.652.566,00	237.922.976,00
9.	UBJK -Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	400.000,00	400.000,00	180.000,00	180.000,00
10.	UBJK - Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	33.290.242,00	780.748.877,00	780.765.709,00	33.307.074,00
11.	UBJK –Paket/Pengiriman	254.500,00	254.500,00	40.000,00	40.000,00
12.	UBJK -Rekening Penerangan Jalan Umum	940.362.417,00	940.362.417,00	967.105.109,00	967.105.109,00
13.	UBJK -Pengolahan Air Limbah	99.477.393,00	99.477.393,00	70.230.167,00	70.230.167,00
14.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.348.930,00	1.348.930,00	-	-
15.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	22.680,00	22.680,00	42.840,00	42.840,00
16.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21.535,00	21.535,00	46.735,00	46.735,00
17.	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-
18.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	39.521.000,00	39.521.000,00	-	-
19.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	49.120.000,00	-	-	49.120.000,00
20.	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Diklat Kepemimpinan	16.549.044,00	16.549.044,00	-	-
	JUMLAH	**25.070.656.232,20**	**25.775.506.104,20**	**2.721.648.881,00**	**2.016.799.009,00**

*) UBJK : Utang Belanja Jasa Kantor

(a) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp74.204.877,00 dengan rincian sebagaimana tabel V.176 berikut.

Tabel V.176 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)			Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet		Kredit	
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+((6))
1.	Pusk Wonosobo 1	-	-	-	19.019.000,00	19.019.000,00
2.	Pusk Selomerto 1	10.400.000,00	10.400.000,00	-	9.685.000,00	9.685.000,00
3.	Pusk Leksono 1	49.695.943,00	49.695.943,00	-	-	-
4.	Pusk Sukoharjo 2	-	-	-	9.030.877,00	9.030.877,00
5.	Pusk Mojotengah	154.800.000,00	154.800.000,00	-	-	-
6.	Pusk Kejajar 1	11.970.000,00	11.970.000,00	-	-	-
7.	Pusk Wadaslintang 1	21.280.000,00	21.280.000,00	-	-	-
8.	Pusk Kejajar 2	3.990.000,00	3.990.000,00	-	-	-
9.	RSUD KRT Setjonegoro	23.172.849.903,20	23.172.849.903,20	-	1.700.000,00	1.700.000,00
10.	Pusk Kalikajar 2	-	-	-	34.770.000,00	34.770.000,00
	JUMLAH	**23.424.985.846,20**	**23.424.985.846,20**	**-**	**74.204.877,00**	**74.204.877,00**

(b) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Laboratorium per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp430.974.950,00 yang berada di RSUD KRT Setjonegoro, dengan uraian lebih lanjut sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**151.328.810,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**151.328.810,00**
Pembayaran Utang	:	151.328.810,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**430.974.950,00**
Utang Tahun Berjalan	:	430.974.950,00
	:	

Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**430.974.950,00**

(c) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli TA 2023 sebesar Rp20.979.000,00 berada di RSUD KRT Setjonegoro dengan perhitungan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**5.300.000,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**5.300.000,00**
Pembayaran Utang	:	5.300.000,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**20.979.000,00**
Utang Tahun Berjalan	:	20.979.000,00
	:	
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**20.979.000,00**

(d) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.724.503,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.177 berikut.

Tabel V.177 Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per 31 Desember TA 2023 dan Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)			Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Pembayaran Utang	Debet Koreksi Lebih Catat Utang	Kredit Utang Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+((6))
1.	Pusk. Sukoharjo 1	1.726.197,00	1.726.197,00	-	-	-
2.	Pusk. Sukoharjo 2	3.034.604,00	3.034.604,00	-	-	-
3.	Pusk Kertek 2	-	2.507.097,00	-	5.909.145,00	3.402.048,00
4.	Pusk Leksono 2	-	-	-	832.500,00	832.500,00
5. 4	Pusk Wadaslintang 1	-	-	-	2.489.955,00	2.489.955,00
	JUMLAH	**4.760.801,00**	**7.267.898,00**	**-**	**9.231.600,00**	**6.724.503,00**

(e) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan TA 2023 sebesar Rp2.445.000,00 berada di RSUD KRT Setjonegoro dengan perhitungan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**5.876.802,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**5.876.802,00**
Pembayaran Utang	:	5.876.802,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**2.445.000,00**
Utang Tahun Berjalan	:	2.445.000,00
	:	
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**2.445.000,00**

(f) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.250.698,00. Rincian mutasi/koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon Tahun Anggaran 2023 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.13.

(g) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air per 31 Desember 2023 sebesar Rp78.225.080,00, rincian mutasi/koreksi Tahun Anggaran 2023 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.14.

(h) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik per 31 Desember 2023 sebesar Rp237.922.976,00. Rincian Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik entitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.15.

(i) Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah per 31 Desember 2023 sebesar Rp180.000,00. Rincian Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah per entitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.178 di bawah ini:

Tabel V.178 Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet		Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+((6))
1.	Kec Wonosobo	310.000,00	310.000,00	-	-	-
2.	Kel Leksono	90.000,00	90.000,00	-	-	-
3.	Pusk. Wonosobo 2	-	-	-	90.000,00	90.000,00
4.	Kel. Leksono	-	-	-	90.000,00	90.000,00
	JUMLAH	**400.000,00**	**400.000,00**	**-**	**180.000,00**	**180.000,00**

(j) Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Tabel V.175 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.307.074,00. Rincian Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan entitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.16.

(k) Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman TA 2023 sebesar Rp40.000,00 berada di RSUD KRT Setjonegoro dengan perhitungan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**254.500,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**254.500,00**
Pembayaran Utang	:	254.500,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**40.000,00**
Utang Tahun Berjalan	:	40.000,00
	:	
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**40.000,00**

(l) Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum TA 2023 sebesar Rp967.105.109,00 berada di BPPKAD dengan perhitungan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	:	**940.362.417,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**940.362.417,00**
Pembayaran Utang	:	940.362.417,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**967.105.109,00**
Utang Tahun Berjalan	:	1.378.000,00
Koreksi Audited 2023	:	965.727.109,00
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**967.105.109,00**

(m) Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah

Tabel V.175 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah per 31 Desember 2023 Rp70.230.167,00 rincian sebagai berikut :

Tabel V.179 Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet		Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+((6))
1.	Pusk. Selomerto 1	9.774.268,00	9.774.268,00	-	12.482.267,00	12.482.267,00
2.	Pusk Kertek 2	2.507.097,00	2.507.097,00	-		
3.	RSUD KRT Setjonegoro	87.196.028,00	87.196.028,00	-	57.747.900,00	57.747.900,00
	JUMLAH	**99.477.393,00**	**99.477.393,00**	**-**	**70.230.167,00**	**70.230.167,00**

(n) Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

Tabel V.175 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN per 31 Desember 2023 adalah nihil sedangkan per 31 Desember 2022 terdapat saldo sebesar Rp1.348.930,00 di Puskesmas Kepil 1 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	:	**1.348.930,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**1.348.930,00**
Pembayaran Utang	:	1.348.930,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**-**
Utang Tahun Berjalan	:	-
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**-**

(o) Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN TA 2023 sebesar Rp42.840,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.180 berikut:

Tabel V.180 Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet		Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+((6))
1.	Kel. Jaraksari	22.680,00	22.680,00	-	22.680,00	22.680,00
2.	Kel. Rojoimo	-	-	-	20.160,00	20.160,00
	JUMLAH	**22.680,00**	**22.680,00**	**-**	**42.840,00**	**42.840,00**

(p) Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN TA 2023 sebesar Rp46.735,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.181 berikut:

Tabel V.181 Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet		Kredit	Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-((4)+(5))+((6))
1.	Kel. Jaraksari	21.535,00	21.535,00	-	21.535,00	21.535,00
2.	Kel. Rojoimo	-	-	-	25.200,00	25.200,00
	JUMLAH	**21.535,00**	**21.535,00**	**-**	**46.735,00**	**46.735,00**

(q) Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel per 31 Desember 2023 adalah nihil sedangkan per 31 Desember 2022 terdapat saldo sebesar Rp2.200.000,00 pada RSUD KRT Setjonegoro dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**2.200.000,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**2.200.000,00**
Pembayaran Utang	:	2.200.000,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**-**
Utang Tahun Berjalan	:	-
	:	
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**-**

(r) Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi- Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya

Tabel V.175 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya per 31 Desember 2023 adalah nihil sedangkan per 31 Desember 2022 terdapat saldo sebesar Rp39.521.000,00 pada RSUD KRT Setjonegoro dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**39.521.000,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**39.521.000,00**
Pembayaran Utang	:	39.521.000,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**-**
Utang Tahun Berjalan	:	-
	:	
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**-**

(s) Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus

Tabel V.175 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp49.120.000,00 pada DPUPR yang merupakan saldo utang tahun 2014 berupa Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kejiwan - Gondang - Kuripan CV. DR pada DPUPR.

(t) Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Diklat Kepemimpinan

Tabel V.175 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Diklat Kepemimpinan per 31 Desember 2023 adalah nihil, sedanglam per 31 Desember 2022 terdapat saldo sebesar Rp16.549.044,0000 pada RSUD KRT Setjonegoro dengan rincian sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**16.549.044,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**16.549.044,00**
Pembayaran Utang	:	16.549.044,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**-**
Utang Tahun Berjalan	:	-
Saldo Per 31 Desember 2023	:	**-**

(3) Utang Belanja Pemeliharaan

Tabel V.171 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2023 adalah Rp345.197.880,00 yang seluruhnya berada pada RSUD KRT Setjonegoro sedangkan per 31 Desember 2022 adalah nihil dengan uraian sebagaimana tabel V.182 dibawah ini.

Tabel V.182 Saldo Utang Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2023 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	6.412.750,00	6.412.750,00
2.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum	-	-	337.610.130,00	337.610.130,00
3.	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	-	-	1.175.000,00	1.175.000,00
	JUMLAH			**345.197.880,00**	**345.197.880,00**

(4) Utang Belanja Perjalanan Dinas

Tabel V.171 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri per 31 Desember 2023 merupakan Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp1.315.000,00, sedangkan Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.213.000,00 rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**9.213.000,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**9.213.000,00**
Pembayaran Utang	:	9.213.000,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**1.315.000,00**
Utang Tahun Berjalan	:	1.315.000,00
Saldo Per 31 Desember 2023	:	**1.315.000,00**

Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 berada pada RSUD KRT Setjonegoro.

(5) Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel V.171 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat berupa Utang Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.836.500,00 yang berada pada RSUD KRT Setjonegoro sedangkan per 31 Desember 2022 bersaldo nihil dengan uraian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**-**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**-**
Pembayaran Utang	:	-
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**1.836.500,00**
Utang Tahun Berjalan	:	1.836.500,00
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**1.836.500,00**

c) Utang Belanja Bantuan Sosial

Tabel V.166 diatas menunjukkan bahwa Saldo Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.990.000,00 sedangkan per 31 Desember 2022 tidak terdapat saldo. Saldo Utang Belanja Bantuan Sosial tersebut merupakan Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu pada RSUD KRT Setjonegoro dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**-**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**-**
Pembayaran Utang	:	-
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**40.990.000,00**
Utang Tahun Berjalan	:	40.990.000,00
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**40.990.000,00**

C.2.a.4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Tabel V.162 di atas menunjukkan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 adalah nihil sedangkan per 31 Desember 2022 memiliki saldo sebesar Rp80.902.999,00 yang berada pada RSUD KRT Setjonegoro dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	:	**80.902.999,00**
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)	:	**80.902.999,00**
Pembayaran Utang	:	80.902.999,00
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)	:	**-**
Utang Tahun Berjalan	:	-
Saldo Per 31 Desember 2023	**:**	**-**

C.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.971.105.796.292,61 Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.841.146.863.658,42, mengalami kenaikan sebesar Rp129.958.932.634,19 atau 3,38%, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal Ekuitas	**3.841.146.863.658,42**
Surplus/ (Defisit) - LO TA 2023	54.184.107.832,30
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar atas Ekuitas Awal TA 2023	75.774.824.801,89
Saldo akhir Ekuitas	**3.971.105.796.292,61**

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Saldo Ekuitas dapat dilihat pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan poin F. Laporan Perubahan Ekuitas.

D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Wonosobo disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Penjelasan lebih lanjut atas LO TA 2023 untuk masing-masing pos dapat dilihat sebagaimana Tabel V.183 di bawah ini:

Tabel V.183 Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan – LO	1.915.174.743.853,02	1.786.796.904.631,75	128.377.839.221,27	7,18
2.	Beban	1.704.863.383.166,07	1.646.147.560.908,46	58.715.822.257,61	3,57
3.	**Jumlah Surplus/Defisit Dari Operasi (1-2)**	**210.311.360.686,95**	**140.649.343.723,29**	**69.662.016.963,66**	**49,53**
4.	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(156.127.252.854,65)	(8.967.740.117,55)	(147.159.512.737,10)	1.640,99
5.	**Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (3+4)**	**54.184.107.832,30**	**131.681.603.605,74**	**(77.497.495.773,44)**	**(58,85)**
6.	Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO (5+6)	**54.184.107.832,30**	**131.681.603.605,74**	**(77.497.495.773,44)**	**(58,85)**

D.1. PENDAPATAN - LO

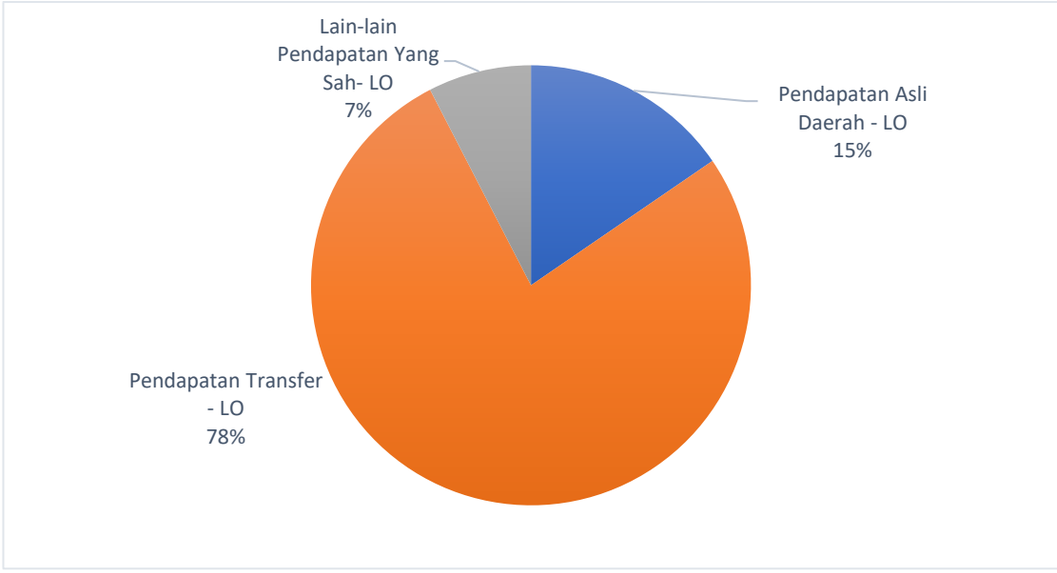
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan – LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Tabel V.183 di atas menunjukkan Pendapatan – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp1.915.174.743.853,02. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp128.377.839.221,27 atau 7,18% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.786.796.904.631,75. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.184 berikut.

Tabel V.184 Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	289.222.596.997,77	267.037.820.451,75	22.184.776.546,02	8,31
2.	Pendapatan Transfer - LO	1.493.657.436.038,00	1.366.166.108.497,00	127.491.327.541,00	9,33
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah- LO	132.294.710.817,25	153.592.975.683,00	(21.298.264.865,75)	(13,87)
JUMLAH		**1.915.174.743.853,02**	**1.786.796.904.631,75**	**128.377.839.221,27**	**7,18**

Penyumbang Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 terbesar adalah Pendapatan Transfer sedangkan yang terkecil adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.16 berikut.



Gambar V.16 Komposisi Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

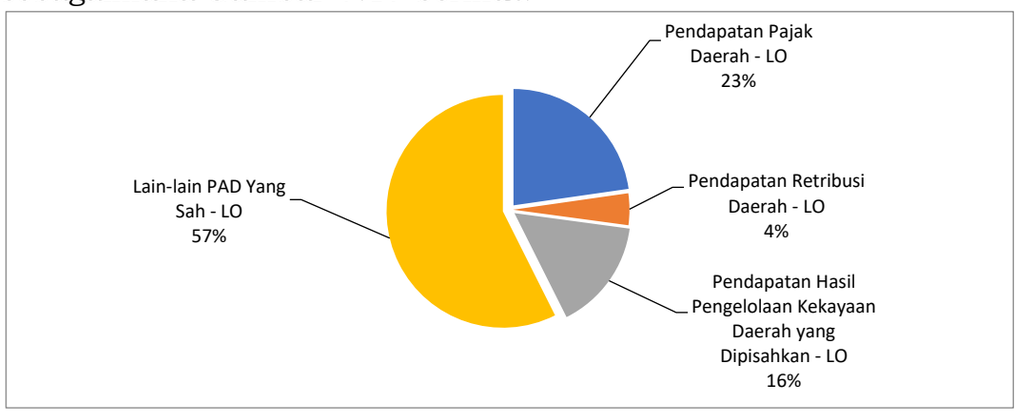
D.1.a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Tabel V.184 di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp289.222.596.997,77. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.184.776.546,03 atau 8,31% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp267.037.820.451,74. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.185 berikut.

Tabel V.185 Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	65.749.980.543,31	59.736.172.687,69	6.013.807.855,62	10,07
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	12.720.930.203,33	10.972.195.975,33	1.748.734.228,00	15,94
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	44.738.403.371,95	32.385.034.668,29	12.353.368.703,66	38,15
4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	166.013.282.879,18	163.944.417.120,43	2.068.865.758,75	1,26
JUMLAH		**289.222.596.997,77**	**267.037.820.451,74**	**22.184.776.546,03**	**8,31**

Penyumbang Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2023 terbesar adalah Lain-lain PAD yang Sah-LO sedangkan yang terkecil adalah Pendapatan Retribusi Daerah - LO, dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.17 berikut.



Gambar V.17 Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO Kabup aten Wonosobo TA 2023

D.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp65.749.980.543,31. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.013.807.855,62 atau 10,07% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp59.736.172.687,69, dengan rincian sebagaimana Tabel V.186 berikut.

Tabel V.186 Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

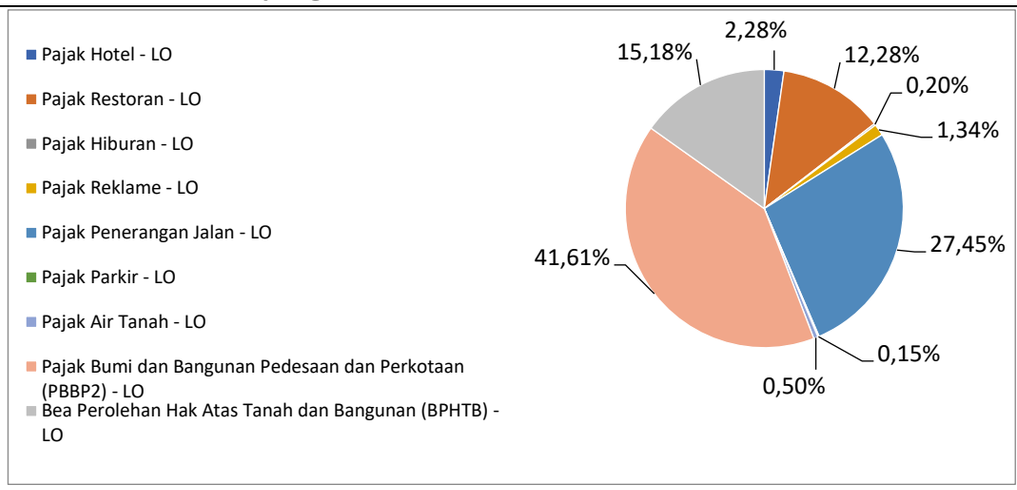
No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pajak Hotel - LO	1.501.706.866,00	1.131.687.040,00	370.019.826,00	32,70
2.	Pajak Restoran - LO	8.074.397.485,00	5.991.982.524,00	2.082.414.961,00	34,75
3.	Pajak Hiburan - LO	133.356.609,00	80.842.075,00	52.514.534,00	64,96
4.	Pajak Reklame - LO	878.331.733,31	881.245.000,69	(2.913.267,38)	(0,33)
5.	Pajak Penerangan Jalan - LO	18.051.051.369,00	15.619.926.596,00	2.431.124.773,00	15,56
6.	Pajak Parkir - LO	100.821.000,00	97.200.300,00	3.620.700,00	3,72
7.	Pajak Air Tanah - LO	329.688.980,00	326.143.180,00	3.545.800,00	1,09
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	26.702.488.056,00	26.691.961.452,00	10.526.604,00	0,04
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	9.978.138.445,00	8.915.184.520,00	1.062.953.925,00	11,92
	JUMLAH	**65.749.980.543,31**	**59.736.172.687,69**	**6.013.807.855,62**	**10,07**

Pada Tabel V.186 diatas, tidak terdapat realisasi Pajak Mineral Bukan Logam – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 karena berdasarkan data Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, IUP di Kabupaten Wonosobo yang telah diterbitkan masih dalam tahap eksplorasi sehingga tidak terdapat laporan produksi pada aplikasi SILUP maupun laporan produksi secara berkala dari pemegang IUP.

Perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah – LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)	:	65.749.980.543,31
Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)	:	65.448.626.748,00
Piutang Pajak Tahun Berjalan (Neraca)	:	11.359.268.270,00
Piutang Pajak Tahun 2022 (Neraca)	:	11.065.075.966,00
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	:	91.081.861,58
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	:	89.419.020,89
Selisih	:	**8.824.332,00**
Penjelasan Selisih		
Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak PBB (kelebihan pembayaran piutang PBBP2 th pajak 2013 s/d 2022)	:	9.446.664,00
Pengurangan PBB berdasarkan SK 971//284/2023	:	(458.652,00)
Jurnal Koreksi atas Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajk 2023 Karena Keringanan Ketetapan PBB Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	:	(163.680,00)
Jumlah		**8.824.332,00**

Pendapatan Pajak Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan penyumbang terbesar berasal dari PBBP2 sedangkan yang terkecil adalah Pajak Parkir dengan ilustrasi pada Gambar V.18 berikut.



Gambar V.18 Komposisi Pendapatan Pajak Daerah – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023

a) Pajak Hotel - LO

Tabel V.186 di atas menunjukkan Pajak Hotel – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp1.501.706.866,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp370.019.826,00 atau 32,70% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.131.687.040,00. Pajak Hotel – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) selama TA 2023 sebesar Rp1.501.706.866,00. Perbedaan antara Pendapatan Pajak Hotel – LO dengan Pendapatan Pajak Hotel - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Hotel _LO Tahun 2023	:	1.501.706.866,00
Pendapatan Pajak Hotel_LRA Tahun 2023	:	1.581.380.479,00
Selisih	:	**(79.673.613,00)**
Penjelasan Selisih		
Piutang Pajak Hotel Tahun Berjalan (Neraca)	:	30.562.625,00
Piutang Pajak Hotel Tahun 2022 (Neraca)	:	(110.236.238,00)
Jumlah	:	**(79.673.613,00)**

b) Pajak Restoran - LO

Tabel V.186 di atas menunjukkan Pajak Restoran – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp8.074.397.485,00, Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.082.414.961,00 atau 34,75% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar R5.991.982.524,00. Pajak Restoran – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2023 sebesar Rp8.074.397.485,00. Perbedaan antara Pendapatan Pajak Restoran – LO dengan Pendapatan Pajak Restoran - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Restoran _LO Tahun 2023	:	8.074.397.485,00
Pendapatan Pajak Restoran_LRA Tahun 2023	:	8.144.052.731,00
Selisih	:	**(69.655.246,00)**
Penjelasan Selisih		
Piutang Pajak RestoranTahun Berjalan (Neraca)	:	110.929.285,00
Piutang Pajak Restoran Tahun 2022 (Neraca)	:	(180.584.531,00)
Jumlah	:	**(69.655.246,00)**

c) Pajak Hiburan - LO

Tabel V.186 di atas menunjukkan Pajak Hiburan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp133.356.609,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp52.514.534,00 atau 64,96% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp80.842.075,00. Pajak Hiburan – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2023 sebesar Rp133.356.609,00. Pendapatan Pajak Hiburan – LO dengan Pendapatan Pajak Hiburan - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sama karena tidak terdapat kenaikan atau penurunan piutang selama tahun 2023.

d) Pajak Reklame - LO

Tabel V.186 di atas menunjukkan Pajak Reklame – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp878.331.733,31. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.913.267,38 atau 0,33% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp881.245.000,69. Pajak Reklame – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2023 dikurangi pendapatan diterima di muka TA 2023 ditambah pendapatan diterima di muka tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam rupiah)
Ketetapan Selama TA 2023	879.994.574,00
Pendapatan Diterima Di muka TA 2023	(91.081.861,58)
Pendapatan Diterima Di muka TA 2022	89.419.020,89
	878.331.733,31

Perbedaan antara Pendapatan Pajak Reklame – LO dengan Pendapatan Pajak Reklame - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Reklame _LO Tahun 2023	:	878.331.733,31
Pendapatan Pajak Reklame_LRA Tahun 2023	:	878.359.249,00
Selisih	:	**(27.515,69)**
Penjelasan Selisih		
Piutang Pajak ReklameTahun Berjalan (Neraca)	:	698.514.391,00
Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 (Neraca)	:	(696.879.066,00)
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	:	(91.081.861,58)
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	:	89.419.020,89
Jumlah	:	**(27.515,69)**

e) Pajak Penerangan Jalan - LO

Tabel V.186 di atas menunjukkan Pajak Penerangan Jalan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp18.051.051.369,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.431.124.773,00 atau 15,56% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp15.619.926.596,00. Pajak Penerangan Jalan – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2023 sebesar Rp18.051.051.369,00.

f) Pajak Parkir - LO

Tabel V.186 di atas menunjukkan Pajak Parkir – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp100.821.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.620.700,00 atau 3,72% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp97.200.300,00. Pajak Penerangan Jalan – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2023 sebesar Rp100.821.000,00. Perbedaan antara

Pendapatan Pajak Parkir – LO dengan Pendapatan Pajak Parkir - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak Parkir _LO Tahun 2023	:	100.821.000,00
Pendapatan Pajak Parkir_LRA Tahun 2023	:	105.396.000,00
Selisih	:	**(4.575.000,00)**
Penjelasan Selisih		
Piutang Pajak Parkir Tahun Berjalan (Neraca)	:	4.144.000,00
Piutang Pajak Parkir Tahun 2022 (Neraca)	:	(8.719.000,00)
Jumlah	:	**(4.575.000,00)**

g) Pajak Air Tanah - LO

Tabel V.186 di atas menunjukkan Pajak Air Tanah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp329.688.980,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.545.800,00 atau 1,09% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp326.143.180,00. Pajak Air Tanah – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2023 sebesar Rp329.688.980,00.

h) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO

Tabel V.186 di atas menunjukkan PBBP2 – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp26.702.488.056,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.526.604,00 atau 0,04% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp26.691.961.452,00. PBBP2 – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBBP2 yang diterbitkan selama Tahun 2023 pada 15 kecamatan sebesar Rp26.702.488.056,00.

Tabel V.187 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Ketetapan Pokok (Rp)	Ketetapan Pokok (Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Kec. Wadaslintang	1.995.475.156,00	1.995.412.251,00	62.905,00	0,003
2.	Kec. Kepil	2.023.416.441,00	2.018.430.637,00	4.985.804,00	0,25
3.	Kec. Sapuran	1.843.169.654,00	1.841.373.449,00	1.796.205,00	0,10
4.	Kec. Kaliwiro	1.969.390.159,00	1.966.920.626,00	2.469.533,00	0,13
5.	Kec. Leksono	1.116.749.215,00	1.117.180.932,00	(431.717,00)	(0,04)
6.	Kec. Selomerto	1.435.276.092,00	1.432.683.970,00	2.592.122,00	0,18
7.	Kec. Kalikajar	2.104.352.311,00	2.102.046.657,00	2.305.654,00	0,11
8.	Kec. Kertek	2.326.710.887,00	2.324.237.316,00	2.473.571,00	0,11
9.	Kec. Wonosobo	3.567.743.333,00	3.573.324.513,00	(5.581.180,00)	(0,16)
10.	Kec. Watumalang	1.548.029.163,00	1.547.929.192,00	99.971,00	0,01
11.	Kec. Mojotengah	1.578.068.161,00	1.571.138.439,00	6.929.722,00	0,44
12.	Kec. Garung	1.581.088.671,00	1.580.800.602,00	288.069,00	0,02
13.	Kec. Kejajar	1.513.159.740,00	1.520.308.574,00	(7.148.834,00)	(0,47)
14.	Kec. Sukoharjo	1.196.426.456,00	1.196.680.941,00	(254.485,00)	(0,02)
15.	Kec. Kalibawang	903.432.617,00	903.493.353,00	(60.736,00)	(0,01)
	JUMLAH	**26.702.488.056,00**	**26.691.961.452,00**	**10.526.604,00**	**0,04**

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO

Tabel V.186 di atas menunjukkan BPHTB – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp9.978.138.445,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.062.953.925,00 atau 11,92% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp8.915.184.520,00.

D.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp12.720.930.203,33. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.748.734.228,00 atau 15,94% dibandingkan dengan

TA 2022 sebesar Rp10.972.195.975,33. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.188 berikut:

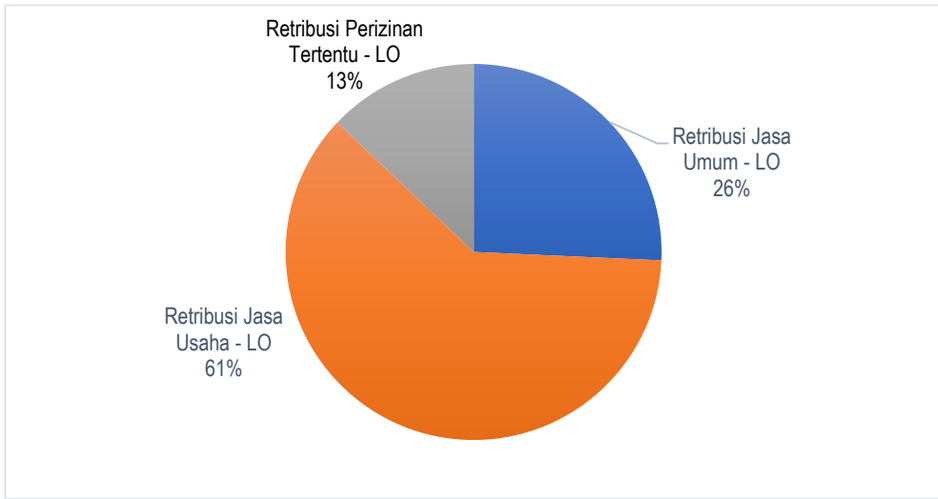
Tabel V.188 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Retribusi Jasa Umum - LO	3.270.556.716,00	3.450.085.806,00	(179.529.090,00)	(5,20)
2.	Retribusi Jasa Usaha - LO	7.807.500.450,33	6.797.919.903,33	1.009.580.547,00	14,85
3.	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	1.642.873.037,00	724.190.266,00	918.682.771,00	126,86
	JUMLAH	**12.720.930.203,33**	**10.972.195.975,33**	**1.748.734.228,00**	**15,94**

Perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah – LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(dalam rupiah)
Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO)	12.720.930.203,33
Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LRA)	11.205.591.108,00
Piutang Retribusi Tahun Berjalan (Neraca)	4.025.674.302,00
Piutang Retribusi Tahun 2022 (Neraca)	3.710.633.457,00
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	498.499.416,67
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	1.699.139.667,00
Selisih	**(342.000,00)**
Penjelasan Selisih :	
Koreksi Kurang Catat Piutang Retribusi Penyewaan Tanah 2022 (DPMPTSP)	(342.000,00)
Jumlah	**1.515.339.095,00**

Penyumbang Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 terbesar berasal dari Retribusi Jasa Usaha dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.19 berikut.



Gambar V.19 Komposisi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023

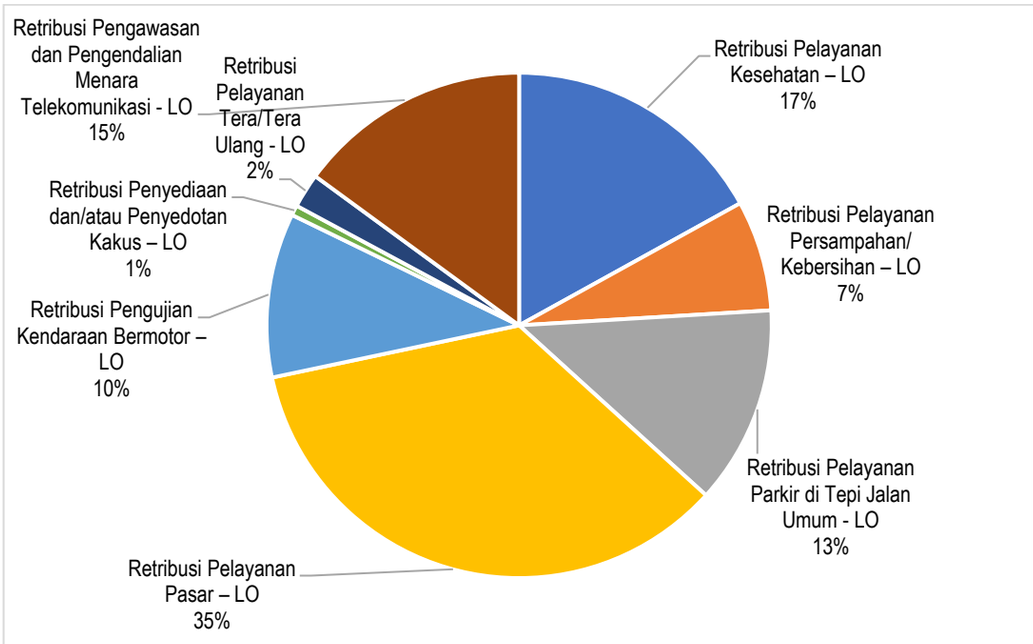
a) Retribusi Jasa Umum - LO

Tabel V.188 di atas menunjukkan bahwa Retribusi Jasa Umum – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp3.270.556.716,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp179.529.090,00 atau 5,20% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp3.450.085.806,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.189 berikut:

Tabel V.189 Retribusi Jasa Umum – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	554.970.000,00	330.179.000,00	224.791.000,00	68,08
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	231.541.500,00	208.937.500,00	22.604.000,00	10,82
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	414.986.000,00	541.542.000,00	(126.556.000,00)	(23,37)
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.143.110.867,00	1.334.524.716,00	(191.413.849,00)	(14,34)
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	343.856.500,00	480.028.000,00	(136.171.500,00)	(28,37)
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	21.259.000,00	15.379.000,00	5.880.000,00	38,23
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	72.084.500,00	64.386.500,00	7.698.000,00	11,96
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	488.748.349,00	475.109.090,00	13.639.259,00	2,87
	JUMLAH	**3.270.556.716,00**	**3.450.085.806,00**	**(179.529.090,00)**	**(5,20)**

Penyumbang Retribusi Jasa Umum – LO pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 terbesar dari Retribusi Pelayanan Pasar dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.20 berikut:



Gambar V.20 Komposisi Retribusi Jasa Umum – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO

Tabel V.189 di atas menunjukkan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp554.970.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp224.791.000,00 atau 68,08% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp330.179.000,00. Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO dikelola Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang merupakan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Air, Makanan, dan Minuman.

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO

Tabel V.189 di atas menunjukkan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp231.541.500,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.604.000,00

atau 10,82% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp208.937.500,00. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO

Tabel V.189 di atas menunjukkan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp414.986.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp126.556.000,00 atau 23,37% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp541.542.000,00. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

(4) Retribusi Pelayanan Pasar - LO

Tabel V.189 di atas menunjukkan Retribusi Pelayanan Pasar – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp1.143.110.867,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp191.413.849,00 atau 14,34% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.334.524.716,00. Retribusi Pelayanan Pasar – LO dianggarkan dan dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Retribusi Pelayanan Pasar – LO dipungut melalui SKRD yaitu terdiri dari SKRD Abonemen Los sebesar Rp337.860.398,00 dan Abonemen Kios sebesar Rp453.682.440,00. Sementara itu, Retribusi juga dipungut tanpa melalui SKRD sebesar Rp351.568.029,00.

(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

Tabel V.189 di atas menunjukkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp343.856.500,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp136.171.500,00 atau 28,37% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp480.028.000,00. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO dipungut berdasarkan SKRD sebesar Rp343.856.500,00.

(6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO

Tabel V.189 di atas menunjukkan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp21.259.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.880.000,00 atau 38,23% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp15.379.000,00. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO

Tabel V.189 di atas menunjukkan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp72.084.500,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.698.000,00 atau 11,96% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp64.386.500,00. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

(8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO

Tabel V.189 di atas menunjukkan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp488.748.349,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.639.259,00 atau 2,87% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp475.109.090,00. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO dipungut berdasarkan SKRD sebesar Rp481.676.670,00. Retribusi juga terdapat setoran tanpa melalui SKRD sebesar Rp7.071.679,00. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

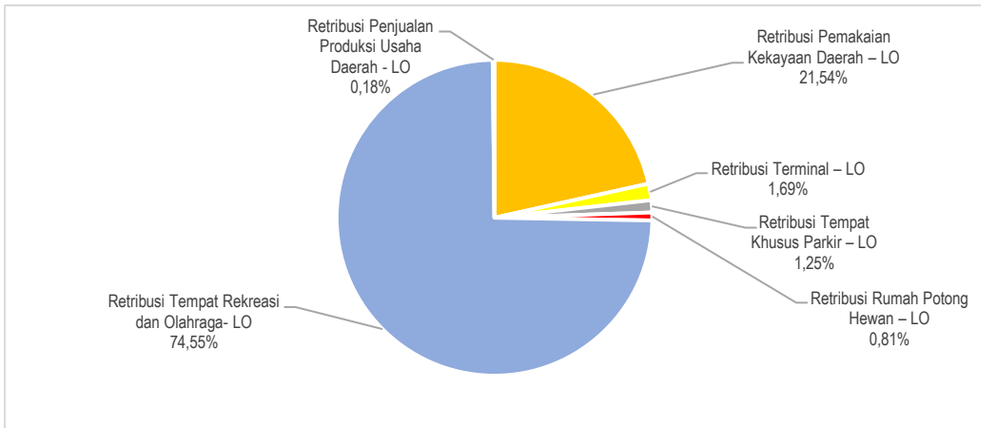
b) Retribusi Jasa Usaha - LO

Tabel V.188 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp7.807.500.450,33. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.009.580.547,00 atau 14,85% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp6.797.919.903,33. Secara rinci Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO dapat dilihat pada Tabel V.190 berikut:

Tabel V.190 Retribusi Jasa Usaha – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	1.681.412.250,33	1.683.289.103,33	(1.885.853,00)	(0,11)
2.	Retribusi Terminal – LO	131.641.600,00	144.334.800,00	(12.693.200,00)	(8,79)
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	97.340.000,00	78.815.500,00	18.524.500,00	23,50
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	62.980.000,00	72.855.000,00	(9.875.000,00)	(13,55)
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO	5.820.126.600,00	4.807.955.500,00	1.012.171.100,00	21,05
6.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	14.000.000,00	10.670.000,00	3.330.000,00	31,21
	JUMLAH	**7.807.500.450,33**	**6.797.919.903,33**	**1.009.580.547,00**	**14,85**

Penyumbang Retribusi Jasa Usaha – LO TA 2023 paling besar adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO dan paling kecil adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.21 berikut.



Gambar V.21 Komposisi Retribusi Jasa Usaha – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LO

Tabel V.190 di atas menunjukkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran TA 2023 adalah sebesar Rp1.681.412.250,33. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.885.853,00 atau 0,11% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar

Rp1.683.289.103,33. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO TA 2023 dikelola oleh beberapa entitas dengan rincian sebagaimana Tabel V.191 berikut:

Tabel V.191 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dikpora	4.250.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	112,50
2.	DPUPR	16.880.000,00	29.085.000,00	(12.205.000,00)	(41,96)
3.	Disnakerind	5.000.000,00	12.200.000,00	(7.200.000,00)	(59,02)
4.	DLH	15.050.000,00	15.050.000,00	-	-
5.	Diskominfo	23.000.000,00	109.077.727,00	(86.077.727,00)	(78,91)
6.	DPMPTSP	3.955.250,33	7.016.959,66	(3.061.709,33)	(43,63)
7.	Dispaperkan	4.018.500,00	9.879.000,00	(5.860.500,00)	(59,32)
8.	Disdagkop UKM	1.371.176.000,00	1.401.869.416,67	(30.693.416,67)	(2,19)
9.	Bag Umum	238.082.500,00	97.120.000,00	140.962.500,00	145,14
	JUMLAH	**1.681.412.250,33**	**1.683.289.103,33**	**(1.885.853,00)**	**(0,11)**

(2) Retribusi Terminal - LO

Tabel V.190 di atas menunjukkan Retribusi Terminal – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp131.641.600,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.693.200,00 atau 8,79% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp144.334.800,00. Retribusi Terminal – LO TA 2023 dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Retribusi Terminal – LO terdiri dari pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum dan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO

Tabel V.190 di atas menunjukkan Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp97.340.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.524.500,00 atau 23,50% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp78.815.500,00. Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan rincian sebagaimana Tabel V.192 berikut:

Tabel V.192 Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Disparbud	89.640.000,00	69.915.500,00	19.724.500,00	28,21
2.	Disdagkop UKM	7.700.000,00	8.900.000,00	(1.200.000,00)	(13,48)
	JUMLAH	**97.340.000,00**	**78.815.500,00**	**18.524.500,00**	**23,50**

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan - LO

Tabel V.190 di atas menunjukkan Retribusi Rumah Potong Hewan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp62.980.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.875.000,00 atau 13,55% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp72.855.000,00. Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2023 dikelola oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan.

(5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO

Tabel V.190 di atas menunjukkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp5.820.126.600,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.012.171.100,00 atau 21,05%

dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp4.807.955.500,00. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

(6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO

Tabel V.190 di atas menunjukkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp14.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.330.000,00 atau 31,21% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp10.670.000,00. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 dikelola oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan - LO, berupa penjualan bibit ikan, ikan konsumsi, serta retribusi nelayan.

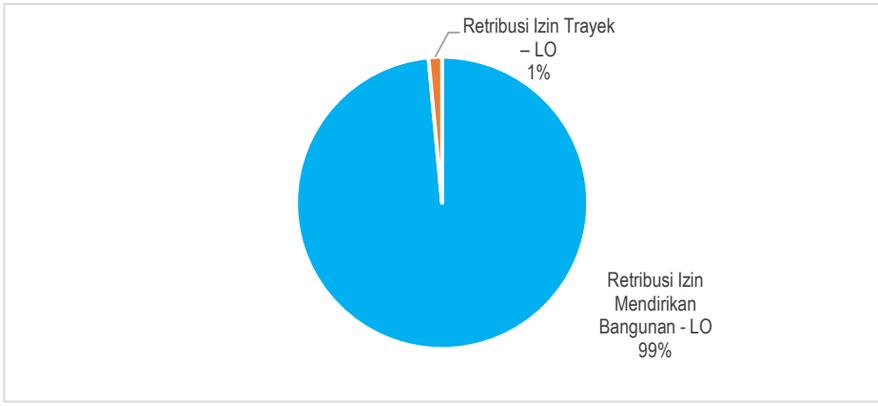
c) Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Tabel V.188 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp1.642.873.037,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp918.682.771,00 atau 126,86% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp724.190.266,00,00, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.193 berikut:

Tabel V.193 Retribusi Perizinan Tertentu – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.618.373.037,00	702.215.266,00	916.157.771,00	130,47
2.	Retribusi Izin Trayek – LO	24.500.000,00	21.975.000,00	2.525.000,00	11,49
	JUMLAH	**1.642.873.037,00**	**724.190.266,00**	**918.682.771,00**	**126,86**

Penyumbang terbesar Retribusi Perizinan Tertentu – LO adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.22 berikut:



Gambar V.22 Komposisi Retribusi Perizinan Tertentu – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO

Tabel V.193 di atas menunjukkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp1.618.373.037,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp916.157.771,00 atau 130,47% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp702.215.266,00. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan jumlah perizinan yang dikeluarkan pada TA 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO

TA 2023 dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO dipungut berdasarkan SKRD sebesar Rp1.618.373.037,00.

(2) Retribusi Izin Trayek - LO

Tabel V.193 di atas menunjukkan Retribusi Izin Trayek – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp24.500.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.525.000,00 atau 11,49% dibandingkan dengan TA 2022 yaitu sebesar Rp21.975.000,00. Retribusi Izin Trayek TA 2023 dianggarkan dan dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

D.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp44.738.403.371,95. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.353.368.703,66 atau 38,15% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp32.385.034.668,29. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2023 dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagaimana Tabel V.194 di bawah ini.

Tabel V.194 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	44.738.403.371,95	32.385.034.668,29	12.353.368.703,66	38,15
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	-
	JUMLAH	**44.738.403.371,95**	**32.385.034.668,29**	**12.353.368.703,66**	**38,15**

Perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LO)	:	44.738.403.371,95
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LRA)	:	23.040.333.270,00
Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (Neraca)	:	24.450.709.706,00
Selisih	:	**(2.752.639.604,05)**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas nilai investasi dengan metode ekuitas dikurangi penerimaan dividen th 2023:		
-PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda)	:	3.695.486.202,99
-PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	:	938.472.214,95
-Perumda Air Minum Tirta Aji	:	5.662.438.393,92
-PT Global Dharma Asri	:	67.757.706,93
-PT Bimalukar (Apotik Cahaya)	:	59.197.552,15
-PD Bhakti Husada	:	(94.576.818,00)
-PT Perkebunan Tambi	:	(881.111.757,00)
-Bank Jateng	:	(11.759.838.707,00)
Koreksi Ekuitas - Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022	:	(440.464.393,00)
Selisih		**(2.752.639.604,05)**

a) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO

Tabel V.194 di atas menunjukkan bahwa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp44.738.403.371,95. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.353.368.703,66 atau 38,15% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp32.385.034.668,29. Kenaikan tersebut disebabkan karena terdapat piutang dividen berdasarkan RUPS 2024 atas Laporan Keuangan BUMD TA 2023 pada PT. BPD Bank Jateng, Perumda Air Minum Tirta Aji dan PT. BPR Bank Wonosobo. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO TA 2023 secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel V.195 di bawah ini.

Tabel V.195 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	24.850.704.185,94	5.015.193.037,65	19.835.511.148,29	395,51
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.151.266.684,08	11.180.662.545,00	(10.029.395.860,92)	(89,70)
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	18.736.432.501,92	16.189.179.085,64	2.547.253.416,28	15,73
	JUMLAH	**44.738.403.371,95**	**32.385.034.668,29**	**12.353.368.703,66**	**38,15**

(1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO

Tabel V.195 di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO TA 2023 adalah sebesar Rp24.850.704.185,94. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp19.835.511.148,29 atau 395,51 % dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp5.015.193.037,65 dengan rincian sebagaimana tabel V.196 berikut.

Tabel V.196 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	PT Bank Jateng	12.850.091.079,00	-	12.850.091.079,00	100,00
2.	PT BPR BKK Wonosobo	1.500.430.199,95	2.972.904.795,11	(1.472.474.595,16)	(49,53)
3.	PD.BPR Bank Wonosobo	10.500.182.906,99	2.042.288.242,54	8.457.894.664,45	414,14
	JUMLAH	**24.850.704.185,94**	**5.015.193.037,65**	**19.835.511.148,29**	**395,51**

Kenaikan signifikan diatas disebabkan karena adanya penambahan piutang dividen atas RUPS 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

- RUPS Bank Jateng pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp12.850.091.079,00;
- RUPS PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda) No. 900.1.13.2/117/EK tgl 28 Maret 2024 sebesar Rp3.725.871.354,00.

(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO

Tabel V.195 di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO TA 2023 adalah sebesar Rp1.151.266.684,08. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp10.029.395.860,92 atau 89,70% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp11.180.662.545,00. Penurunan signifikan tersebut karena terdapat penurunan nilai investasi pada TA 2023 yang berada di PT.Tambi dan PD Bhakti Husada, dengan rincian sebagaimana Tabel V.197 berikut.

Tabel V.197 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	PT Global Dharma Asri	67.757.706,93	1.164.583.221,00	(1.096.825.514,07)	(94,18)
2.	PT. Bimo Lukar	59.197.552,15	-	59.197.552,15	100,00
3.	PD. Bhakti Husada	(94.576.818,00)	27.267.145,00	(121.843.963,00)	(446,85)
4.	PT. Tambi	1.118.888.243,00	9.988.812.179,00	(8.869.923.936,00)	(88,80)
	JUMLAH	**1.151.266.684,08**	**11.180.662.545,00**	**(10.029.395.860,92)**	**(89,70)**

(3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO

Tabel V.195 di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO TA 2023 adalah sebesar Rp18.736.432.501,92. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.547.253.416,28 atau 15,73% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp16.189.179.085,64, yang berasal dari Perumda Air Minum Tirta Aji. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan piutang dividen atas RUPS 2024 pada Perumda Air Minum Tirta Aji No. 900.1.13.2/101/EK tanggal 8 Maret 2024 sebesar Rp7.434.282.880,00.

b) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO

Tabel V.194 di atas menunjukkan bahwa terdapat Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Nihil dan TA 2022 sebesar Nihil.

D.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp166.013.282.879,18. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.068.865.758,75 atau 1,26% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp163.944.417.120,43.

Perbedaan antara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)	:	166.013.282.879,18
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	:	167.364.324.799,91

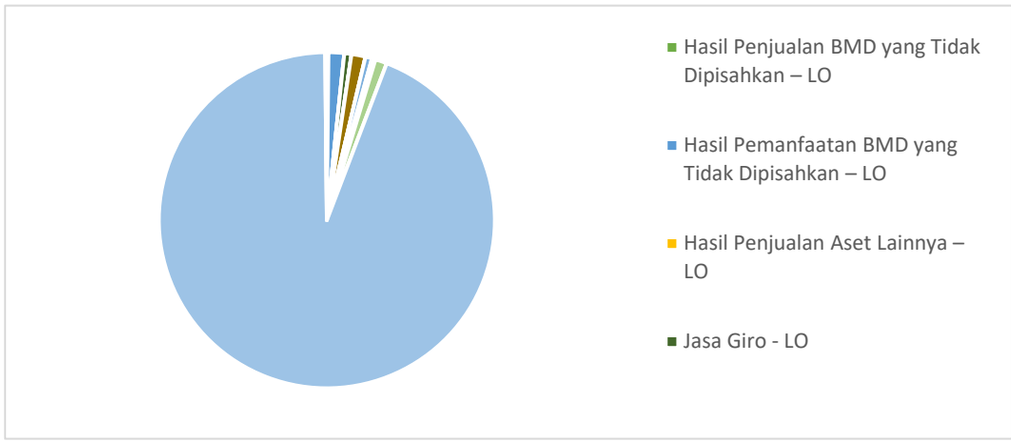
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	:	3.954.114.450,40
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 (Neraca)	:	2.174.696.926,64
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	:	1.703.366.441,65
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	:	1.286.251.036,11
Selisih		**(2.713.344.038,95)**
Penjelasan Selisih :		
Hasil Penjualan Bangunan Gedung pada SKPD namun pendapatan tercatat di BPPKAD	:	(55.710.700,00)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin pada SKPD namun pendapatan tercatat di BPPKAD	:	(2.690.000,00)
Hasil Penjualan Aset Lainnya pada SKPD namun pendapatan tercatat di BPPKAD	:	(2.087.000,00)
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO (rusak) namun pendapatan tercatat di BPPKAD	:	(16.034.700,00)
Koreksi pendapatan bp/00383a/5.02.0.00.0.00.04.0000/2023 seharusnya rekening hasil penjualan aset lain-lain	:	(667.287.239,00)
Koreksi lebih catat saldo pendapatan diterima dimuka hasil sewa bmd tahun lalu	:	(104.118.794,45)
Kurang catat Piutang Hasil Sewa BMD SPBU Sapen	:	(256.518.000,00)
Koreksi salah catat ketetapan sewa BMD Hak pakai nomor 00028 Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo	:	(274.675.000,00)
Pendapatan Bunga Dana Cadangan Tahun lalu yang diterima di kasda th 2023	:	(48.122.525,00)
Pengurangan atas Aset lainnya berupa tagihan jk panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	:	(6.750.000,00)
koreksi atas temuan BPK TA 2023 atas kelebihan pembayaran bangunan pembawa irigasi yang belum setor sampai dengan 31 Desember 2023	:	(41.200.000,00)
koreksi atas temuan BPK TA 2023 atas kelebihan pembayaran jalan kabupaten yang belum setor sampai dengan 31 Desember 2023	:	(1.242.114.000)
kurang catat piutang pasien umum TA 2022 (RSUD KRT Setjonegoro)	:	(8.895.350)
Lebih catat saldo awal piutang pasien umum TA 2022 (RSUD KRT Setjonegoro)	:	1,50
Lebih catat saldo awal piutang pasien gizi buruk TA 2022 (RSUD KRT Setjonegoro)	:	12.773.028,00
Lebih catat saldo awal piutang BPJS Ketenagakerjaan TA 2022 (RSUD KRT Setjonegoro)	:	86.240,00
Jumlah		**(2.713.344.038,95)**

Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dapat dilihat pada Tabel V.198 di bawah ini.

Tabel V.198 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	258.595.109,00	16.525.000,00	242.070.109,00	1.464,87
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	2.502.768.222,67	2.449.480.328,60	53.287.894,07	2,18
3.	Jasa Giro - LO	1.142.639.590,00	1.542.914.514,00	(400.274.924,00)	(25,94)
4.	Pendapatan Bunga - LO	2.237.677.219,00	6.056.644.288,74	(3.818.967.069,74)	(63,05)
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	-	17.955.000,00	(17.955.000,00)	(100,00)
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	1.058.133.715,00	8.072.638.620,60	(7.014.504.905,60)	(86,89)
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	209.754.523,00	142.832.980,00	66.921.543,00	46,85
8.	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	336.917.859,00	197.465.337,00	139.452.522,00	70,62
9.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	21.408.600,00	25.689.700,00	(4.281.100,00)	(16,66)
10.	Pendapatan dari Pengembalian - LO	1.876.325.804,00	76.598.712,00	1.799.727.092,00	2.349,55
11.	Pendapatan BLUD - LO	156.103.824.843,26	144.824.702.133,49	11.279.122.709,77	7,79
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	174.085.000,00	520.970.000,00	(346.885.000,00)	(66,58)
13.	Remunerasi-LO	91.152.394,26	-	91.152.394,26	100,00
14.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	-	506,00	(506,00)	(100,00)
	JUMLAH	**166.013.282.879,18**	**163.944.417.120,43**	**2.068.865.758,75**	**1,26**

Penyumbang terbesar Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Pendapatan BLUD dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.23 berikut.



Gambar V.23 Komposisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO TA 2023 adalah sebesar Rp258.595.109,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp242.070.109,00 atau 1.464,87% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp16.625.000,00, dengan rincian sebagaimana tabel V.199 berikut:

Tabel V.199 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	73.412.524,00	-	73.412.524,00	100,00
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LO	(55.710.700,00)	-	(55.710.700,00)	(100,00)
3.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	256.927.985,00	16.525.000,00	240.402.985,00	1.454,78
4.	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain - LO	(16.034.700,00)	-	(16.034.700,00)	(100,00)
	JUMLAH	**258.595.109,00**	**16.525.000,00**	**242.070.109,00**	**1.464,87**

Pada Tabel diatas, Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO mengalami kenaikan yang signifikan yang disebabkan karena adanya penjualan aset berdasarkan SK Lelang yang dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO TA 2023 adalah sebesar Rp2.502.768.222,67. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp53.287.894,07 atau 2,18% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp2.449.480.328,60. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO TA 2023 dan TA 2023 berasal dari Hasil Sewa BMD dan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD.

c) Jasa Giro - LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Jasa Giro - LO TA 2023 adalah sebesar Rp1.142.639.590,00 . Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp400.274.924,00 atau 25,94% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.542.914.514,00, dengan rincian sebagaimana tabel V.200 berikut:

Tabel V.200 Jasa Giro – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Jasa Giro pada Kas Daerah – LO	1.091.225.929,00	1.488.596.044,00	(397.370.115,00)	(26,69)
2.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara – LO	51.413.661,00	54.318.470,00	(2.904.809,00)	(5,35)
	JUMLAH	**1.142.639.590,00**	**1.542.914.514,00**	**(400.274.924,00)**	**(25,94)**

Jasa Giro - LO TA 2023 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

d) Pendapatan Bunga - LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Pendapatan Bunga – LO TA 2023 adalah sebesar Rp2.237.677.219,00. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp3.818.967.069,74 atau 63,05% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp6.056.644.794,74. Penurunan signifikan tersebut disebabkan karena berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Wonosobo Tentang Penyimpanan Uang Daerah Nomor: 900/003.1/BPPKAD/2002 Nomor:11.A/PMS.04/023/2022 tanggal 3 Januari 2022, dimana ketentuan pasal 4 menyatakan bahwa bunga disetorkan paling lambat pada jatuh tempo setiap bulan ke Kas Daerah. Pada TA 2022 Deposito dicairkan ke Kas Daerah beberapa kali di bulan Desember, sedangkan pada TA 2023 Deposito dicairkan beberapa kali di bulan April, Juni, November, dan Desember sehingga dapat dikatakan pada TA 2022 jumlah kas yang mengendap di deposito lebih lama dibandingkan dengan TA 2023 maka terjadi penurunan Pendapatan Bunga yang signifikan sebesar Rp3.818.967.069,74 atau 63,05%. Pendapatan Bunga TA 2023 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO TA 2023 adalah nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp17.955.000,00 atau 100% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp17.955.000,00. Penurunan signifikan tersebut disebabkan karena pada TA 2023 sisa yang harus dilunasi oleh pihak yang menanggung beban Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian semakin berkurang, serta pada TA 2023 tidak ada penambahan pembebanan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO TA 2023 dikelola di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

f) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO TA 2023 adalah sebesar Rp1.058.133.715,00. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp7.014.504.905,60 atau 86,89% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp8.072.638.620,60. Penurunan signifikan tersebut dikarenakan pada TA 2022 pendapatan yang merupakan temuan hasil pemeriksaan direalisasikan pada Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sedangkan pada TA 2023 direalisasikan pada akun Pendapatan dari Pengembalian. Penerimaan Komisi,

Potongan, atau Bentuk Lain – LO TA 2023 dikelola di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO TA 2023 adalah sebesar Rp209.754.523,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp66.921.543,00 atau 46,85% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp142.832.980,00. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 dikelola di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas PUPR.

h) Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO TA 2023 adalah sebesar Rp336.917.859,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp139.452.522,00 atau 70,62% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp197.465.337,00. Kenaikan tersebut disebabkan karena pada TA 2023 terdapat pemeriksaan pajak oleh Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah BPPKAD serta dengan dikeluarkannya SKPDKB yang lebih banyak dibandingkan pada TA 2022. Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO TA 2023 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

i) Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO TA 2023 adalah sebesar Rp21.408.600,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.281.100,00 atau 16,66% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp25.689.700,00. Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA – LO 2023 dikelola oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan.

j) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian - LO TA 2023 adalah sebesar Rp1.876.325.804,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.799.727.092,00 atau 2.349,55% jika dibandingkan dengan TA 2022 adalah sebesar Rp76.598.712,00. Kenaikan signifikan tersebut disebabkan karena pada TA 2022 hanya berupa realisasi pengembalian atas kelebihan belanja pegawai tahun sebelumnya sedangkan pada TA 2023 termasuk juga realisasi pengembalian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pendapatan dari Pengembalian TA 2023 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

k) Pendapatan BLUD - LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Pendapatan BLUD – LO TA 2023 adalah sebesar Rp156.103.824.843,26. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.279.122.709,77 atau 7,79% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp144.824.702.133,49. Pendapatan BLUD dikelola oleh RSUD KRT Setjonegoro dan Puskesmas di Kabupaten Wonosobo.

l) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2023- LO adalah sebesar Rp174.085.000,00. Nilai tersebut mengalami

penurunan sebesar Rp346.885.000,00 atau 66,58% dibandingkan dengan TA 2022 adalah Rp520.970.000,00. Penurunan signifikan tersebut disebabkan karena ditetapkannya Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan Kependudukan yang mulai diberlakukan tanggal 5 Mei 2023, sehingga Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan lagi memungut denda atas keterlambatan pengurusan kependudukan. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

m) Remunerasi-LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Remunerasi – LO TA 2023 adalah sebesar Rp91.152.394,26. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp91.152.394,26 atau 100% dibandingkan TA 2022 sebesar Nihil. Remunerasi tersebut merupakan Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui TDF dan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 telah menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam APBD. Realisasi sebesar Rp92.254.122,00 tersebut termasuk didalamnya penerimaan atas piutang remunerasi TDF per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.101.727,74.

n) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO TA 2023 adalah nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp506,00 atau 100% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp506,00.

D.1.b. Pendapatan Transfer - LO

Tabel V.184 di atas menunjukkan Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp1.493.657.436.038,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp127.491.327.541,00 atau 9,33% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.366.166.108.497,00. Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.201 berikut.

Tabel V.201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	1.333.243.194.913,00	1.149.376.891.291,00	183.866.303.622,00	16,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	13.020.711.000,00	3.506.837.000,00	9.513.874.000,00	271,30
3.	Transfer Pemerintah Provinsi – LO	147.393.530.125,00	213.282.380.206,00	(65.888.850.081,00)	(30,89)
	JUMLAH	**1.493.657.436.038,00**	**1.366.166.108.497,00**	**127.491.327.541,00**	**9,33**

D.1.b.1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Tabel V.201 di atas menunjukkan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp1.333.243.194.913,00, nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp183.866.303.622,00, atau 16,00%

dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.149.376.891.291,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.202 berikut:

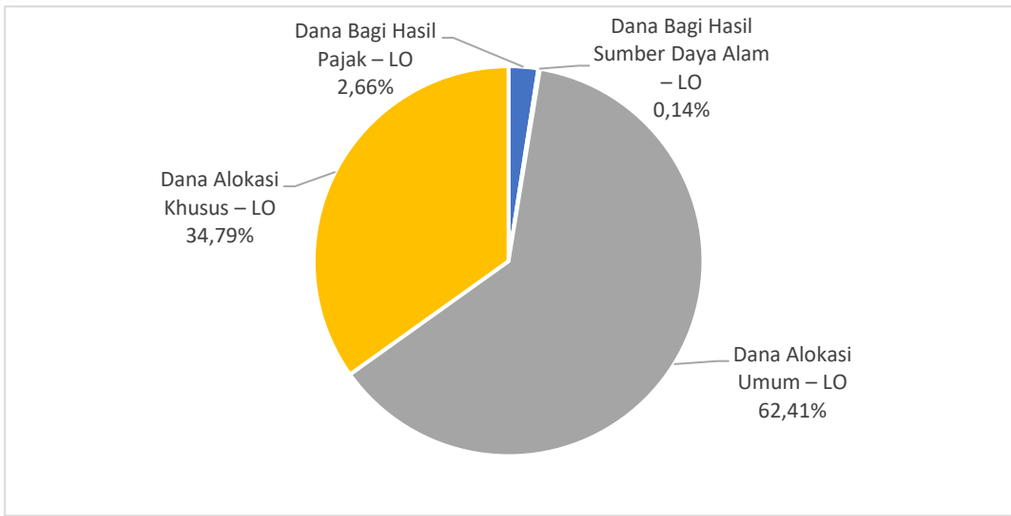
Tabel V.202 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dana Bagi Hasil Pajak – LO	35.456.070.000,00	43.467.112.727,00	(8.011.042.727,00)	(18,43)
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO	1.896.471.000,00	4.763.262.990,00	(2.866.791.990,00)	(60,19)
3.	Dana Alokasi Umum – LO	832.084.548.325,00	789.542.910.540,00	42.541.637.785,00	5,39
4.	Dana Alokasi Khusus – LO	463.806.105.588,00	311.603.605.034,00	152.202.500.554,00	48,84
	JUMLAH	**1.333.243.194.913,00**	**1.149.376.891.291,00**	**183.866.303.622,00**	**16,00**

Perbedaan antara Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	:	1.333.243.194.913,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA	:	1.334.827.545.401,00
Selisih		**(1.584.350.488,00)**
Penjelasan Selisih :		
penerimaan DBH Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) TA 2022		(4.542.637.488,00)
Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) TA 2023		2.958.287.000,00
Jumlah		**(1.584.350.488,00)**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan penyumbang terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum, sedangkan yang terkecil adalah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO dengan ilustrasi pada Gambar V.24 berikut.



Gambar V.24 Komposisi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023

D.1.b.1).a Dana Bagi Hasil Pajak – LO

Tabel V.202 di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Pajak – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp35.456.070.000,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.011.042.727,00 atau 18,43% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp43.467.112.727,00, dengan rincian sebagaimana tabel V.203 berikut.

Tabel V.203 Bagi Hasil Pajak - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	DBH PBB-LO	5.792.804.000,00	13.485.584.067,00	(7.692.780.067,00)	(57,04)
2.	DBH PPh Pasal 21-LO	11.659.541.000,00	12.256.939.975,00	(597.398.975,00)	(4,87)
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	860.199.000,00	1.422.024.075,00	(561.825.075,00)	(39,51)
4.	DBH CHT-LO	17.143.526.000,00	16.302.564.610,00	840.961.390,00	5,16
	JUMLAH	**35.456.070.000,00**	**43.467.112.727,00**	**(8.011.042.727,00)**	**(18,43)**

D.1.b.1).b Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Tabel V.202 di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp1.896.471.000,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.866.791.990,00 atau 60,19% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp4.763.262.990,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.204 berikut:

Tabel V.204 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	DBH SDA Minyak Bumi-LO	56.478.000,00	92.948.720,00	(36.470.720,00)	(39,24)
2.	DBH SDA Gas Bumi-LO	139.409.000,00	416.612.727,00	(277.203.727,00)	(66,54)
3.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	25.292.000,00	1.512.989.466,00	(1.487.697.466,00)	(98,33)
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	240.000,00	1.795.653,00	(1.555.653,00)	(86,63)
5.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	388.303.000,00	568.848.105,00	(180.545.105,00)	(31,74)
6.	DBH SDA Perikanan-LO	1.286.749.000,00	2.170.064.211,00	(883.315.211,00)	(40,70)
	JUMLAH	**1.896.471.000,00**	**4.763.258.882,00**	**(2.866.787.882,00)**	**(60,19)**

D.1.b.1).c Dana Alokasi Umum - LO

Tabel V.202 di atas menunjukkan Dana Alokasi Umum – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp832.084.548.325,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp42.541.637.785,00 atau 5,39% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp789.542.910.540,00.

D.1.b.1).d Dana Alokasi Khusus - LO

Tabel V.202 di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp463.806.105.588,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp152.202.500.554,00 atau 48,84% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp311.603.605.034,00, Dana Alokasi Khusus – LO terbagi atas Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO dengan rincian sebagaimana Tabel V.205 di bawah ini:

Tabel V.205 Dana Alokasi Khusus - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	161.079.696.095,00	67.940.718.381,00	93.138.977.714,00	137,09
2.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	302.726.409.493,00	243.662.886.653,00	59.063.522.840,00	24,24
	JUMLAH	**463.806.105.588,00**	**311.603.605.034,00**	**152.202.500.554,00**	**48,84**

1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp161.079.696.095,00, sedangkan pada TA 2022 adalah Rp67.940.718.381,00 atau bisa dikatakan mengalami kenaikan

signifikan sebesar Rp93.138.977.714,00 atau 137,09% dengan rincian sebagaimana Tabel V.206 berikut:

Tabel V.206 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	446.727.000,00	-	446.727.000,00	100,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	8.446.481.600,00	10.666.489.250,00	(2.220.007.650,00)	(20,81)
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	5.804.551.952,00	5.836.866.690,00	(32.314.738,00)	(0,55)
4.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	7.615.835.000,00	-	7.615.835.000,00	100,00
5.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	4.681.806.752,00	-	4.681.806.752,00	100,00
6.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	15.933.687.950,00	-	15.933.687.950,00	100,00
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	-	16.735.474.260,00	(16.735.474.260,00)	(100,00)
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	-	4.935.614.181,00	(4.935.614.181,00)	(100,00)
9.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	1.014.250.000,00	982.050.000,00	32.200.000,00	3,28
10.	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	-	2.736.650.000,00	(2.736.650.000,00)	(100)
11.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	54.854.280.000,00	10.148.000.000,00	44.706.280.000,00	440,54
12.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	11.096.845.000,00	8.025.747.000,00	3.071.098.000,00	38,27
13.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	3.738.416.550,00	-	3.738.416.550,00	100,00
14.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	8.398.747.000,00	-	8.398.747.000,00	100,00
15.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	6.973.477.000,00	-	6.973.477.000,00	100,00
16.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	1.492.500.000,00	-	1.492.500.000,00	100,00
17.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	1.385.480.000,00	-	1.385.480.000,00	100,00
18.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	15.081.151.291,00	-	15.081.151.291,00	100,00
19.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	14.115.459.000,00	7.873.827.000,00	6.241.632.000,00	79,27
	JUMLAH	**161.079.696.095,00**	**67.940.718.381,00**	**93.138.977.714,00**	**137,09**

2) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp302.726.409.493,00, sedangkan pada TA 2022 adalah Rp243.662.886.653,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp59.063.522.840,00 atau 24,24% dengan rincian sebagaimana Tabel V.207 berikut:

Tabel V.207 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	90.209.560.332,00	77.471.202.013,00	12.738.358.319,00	16,44
2.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	4.040.000.000,00	134.912.283.430,00	(130.872.283.430,00)	97,01
3.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	142.786.512.354,00	-	142.786.512.354,00	100,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	3.034.810.552,00	4.420.260.000,00	(1.385.449.448,00)	(31,34)
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	66.367.000,00	440.625.648,00	(374.258.648,00)	(84,94)
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	14.556.788.955,00	127.200.000,00	14.429.588.955,00	11.344,02
7.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	4.063.567.772,00	504.600.000,00	3.558.967.772,00	705,30
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	30.561.906.862,00	7.622.999.992,00	22.938.906.870,00	300,92
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	8.609.385.664,00	-	8.609.385.664,00	100,00
10.	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	398.797.263,00	347.132.000,00	51.665.263,00	14,88

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
11.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO	1.048.405.239,00	341.318.100,00	707.087.139,00	207,16
12.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	288.482.500,00	80.090.700,00	208.391.800,00	260,19
13..	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	-	17.196.316.770,00	(17.196.316.770,00)	(100,00)
14..	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	311.825.000,00	92.358.000,00	219.467.000,00	237,63
15.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	-	106.500.000,00	(106.500.000,00)	(100,00)
16..	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	2.750.000.000,00	-	2.750.000.000,00	100,00
	JUMLAH	**302.726.409.493,00**	**243.662.886.653,00**	**59.063.522.840,00**	**24,24**

D.1.b.2) Transfer Pemerintah Pusat lainnya - LO

Tabel V.201 di atas menunjukkan bahwa pada Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp13.020.711.000,00, nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp9.513.874.000,00 atau 271,30% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp3.506.837.000,00. Kenaikan signifikan tersebut karena diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang diterbitkan tanggal 2 Oktober 2023, sebagai penghargaan kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi sebesar Rp13.020.711.000,00 dengan rincian:

1) Kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp6.889.447,00;
2) Kategori kinerja penurunan stunting sebesar Rp6.131.264,00.

Alokasi tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah melalui 2 (dua) tahap yaitu:

1) Tahap I tanggal 23/10/2023 sebesar Rp6.510.355.500,00;
2) Tahap II tanggal 13/12/2023 sebesar Rp6.510.355.500,00.

D.1.b.3)Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Tabel V.201 di atas menunjukkan bahwa Transfer Pemerintah Provinsi – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp147.393.530.125,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp65.888.850.081,00 atau 30,89% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp213.282.380.206,00, dengan uraian sebagaimana Tabel V.208 di bawah ini.

Tabel V.208 Transfer Pemerintah Provinsi – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	125.292.084.902,00	122.070.848.796,00	3.221.236.106,00	2,64
2.	Bantuan Keuangan Provinsi - LO	22.101.445.223,00	91.211.531.410,00	(69.110.086.187,00)	(75,77)
	JUMLAH	**147.393.530.125,00**	**213.282.380.206,00**	**(65.888.850.081,00)**	**(30,89)**

Perbedaan antara Transfer Pemerintah Provinsi -LO dengan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Transfer Pemerintah Provinsi-LO	:	147.393.530.125,00
Transfer Pemerintah Provinsi-LRA	:	146.042.171.394,00
Selisih		**1.351.358.731,00**

Penjelasan Selisih :

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	3.026.342.507,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022 (Neraca)	(1.674.983.776,00)
Jumlah	**(1.351.358.731,00)**

D.1.b.3).a Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sesuai Tabel V.208 di atas TA 2023 adalah sebesar Rp125.292.084.902,00, sedangkan pada TA 2022 adalah sebesar Rp122.070.848.796,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.221.236.106,00 atau 2,64% dengan rincian sebagaimana Tabel V.209 berikut:

Tabel V.209 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	30.878.264.529,00	30.713.779.896,00	164.484.633,00	0,54
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	14.876.599.509,00	15.507.917.602,00	(631.318.093,00)	(4,07)
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	29.309.853.506,00	24.613.031.564,00	4.696.821.942,00	19,08
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	289.819.880,00	312.951.752,00	(23.131.872,00)	(7,39)
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	49.937.547.478,00	50.923.167.982,00	(985.620.504,00)	(1,94)
	JUMLAH	**125.292.084.902,00**	**122.070.848.796,00**	**3.221.236.106,00**	**2,64**

D.1.b.3).b Bantuan Keuangan Provinsi – LO

Bantuan Keuangan Provinsi – LO sesuai Tabel V.208 di atas TA 2023 adalah sebesar Rp22.101.445.223,00, sedangkan pada TA 2022 adalah sebesar Rp91.211.531.410,00 atau mengalami penurunan signifikan sebesar Rp69.110.086.187,00 atau 75,77% dengan rincian sebagaimana Tabel V.210 berikut:

Tabel V.210 Bantuan Keuangan Provinsi – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	TMMD – LO	-	-	-	-
2.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	22.101.445.223,00	91.211.531.410,00	(69.110.086.187,00)	(75,77)
	JUMLAH	**22.101.445.223,00**	**91.211.531.410,00**	**(69.110.086.187,00)**	**(75,77)**

Penurunan Bantuan Keuangan Provinsi disebabkan karena berdasarkan penetapan alokasi sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebesar Rp94.510.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp91.211.531.410,00 sedangkan pada TA 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp22.265.000.000,00 dan direalisasikan Rp22.101.445.223,00.

D.1.c. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Tabel V.184 diatas menunjukkan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp132.294.710.817,25. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp21.298.264.865,75 atau 13,87% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp153.592.975.683,00, Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.211 berikut.

Tabel V.211 Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Hibah – LO	132.294.710.817,25	153.592.975.683,00	(21.298.264.865,75)	(13,87)
2.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	**132.294.710.817,25**	**153.592.975.683,00**	**(21.298.264.865,75)**	**(13,87)**

Perbedaan Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO TA 2023 dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan_LO	:	132.294.710.817,25
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan_LRA	:	49.177.364.845,00
Selisih		**83.117.345.972,25**
Penjelasan Selisih :		
Pendapatan hibah barang yang menjadi persediaan	:	15.768.796.202,25
Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap	:	
-Tanah	:	28.145.407.900,00
-Peralatan dan Mesin	:	2.894.613.208,00
-Gedung dan Bangunan	:	7.582.634.250,00
-Jalan, Irigasi dan Jaringan	:	27.825.134.332,00
Pendapatan Hibah berupa barang ekstrakomptabel	:	13.000.000,00
Pendapatan Hibah berupa bantuan sosial	:	78.182.000,00
Pendapatan Hibah berupa beban hibah (antropometri ke 18 desa)	:	308.100.000,00
Pendapatan Hibah berupa jasa	:	277.481.400,00
Pendapatan Hibah berupa pemeliharaan	:	24.804.800,00
Pendapatan Hibah berupa perjalanan dinas	:	50.800.000,00
pengakuan pendapatan hibah bonus produksi PT. Geo Dipa Energi Triwulan IV TA 2023	:	148.391.880,00
Jumlah		**83.117.345.972,25**

D.1.c.1) Pendapatan Hibah – LO

Tabel V.211 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp132.294.710.817,25, nilai pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp21.298.264.865,75 atau 13,87% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp153.592.683,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.212 berikut.

Tabel V.212 Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	64.682.818.042,00	107.835.029.702,00	(43.152.211.660,00)	(40,02)
2.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	78.182.000,00	-	78.182.000,00	100,00
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri -LO	664.399.795,00	19.384.128.685,00	(18.719.728.890,00)	(96,57)
4.	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	-	23.980.000,00	(23.980.000,00)	(100,00)
5.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	53.932.377.432,00	3.735.025.500,00	50.197.351.932,00	1.343,96
6.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	12.936.933.548,25	22.614.811.796,00	(9.677.878.247,75)	(42,79)
	JUMLAH	**132.294.710.817,25**	**153.592.975.683,00**	**(21.298.264.865,75)**	**(13,87)**

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

Tabel V.212 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp64.682.818.042,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp43.152.211.660,00 atau 40,02% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp107.835.029.702,00, yang terdiri dari:

		(dalam Rupiah)
(1)	Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Thp II TA 2023 (Hibah Dalam Negeri)	6.214.480.497,00
(2)	Hibah Sanitasi TA 2023	6.930.000.000,00
(3)	Hibah PHJD Tahap III TA 2023	28.955.964.433,00
(4)	Hibah PDAM TA 2023	2.070.912.000,00

(5)	Hibah PDAM TA 2023	4.500.000.000,00
(6)	Hibah Kementerian Kesehatan (Dinkes)	2.666.120.000,00
(7)	Hibah Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Tinggi	9.374.734.312,00
(8)	Hibah Kemendagri	504.009.000,00
(9)	Hibah Kementerian Pariwisata	48.150.000,00
(10)	Hibah dari Pemerintah Provinsi Jateng	3.418.447.800,00
	Jumlah	**64.682.818.042,00**

b) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO

Tabel V.212 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp78.182.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp78.182.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan TA 2022 nihil. Kenaikan signifikan tersebut berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang digunakan untuk penanganan *stunting*.

c) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO

Tabel V.212 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp664.399.795,00, nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp18.719.728.890,00 atau 96,57% dibandingkan dengan TA 2022 yang Rp19.384.128.685,00. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO adalah berupa Bonus Produksi dari PT. Geo Dipa Energi selama tahun 2023 sebesar Rp654.399.795,00 dan hibah peralatan dan mesin dari Bank BRI sebesar Rp10.000.000,00 pada BPBD.

d) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO

Tabel V.212 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah nihil, nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp23.980.000,00 atau 100,00% dibandingkan dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp23.980.000,00. Penurunan signifikan tersebut karena tidak terdapat hibah dari swasta pada TA 2023, sedangkan pada TA 2022 terdapat hibah 4 unit *personal computer* dari PT. Intisumber Hasil Sempurna Global di RSUD KRT Setjonegoro.

e) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO

Tabel V.212 di atas menunjukkan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp53.932.377.432,00, nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp50.197.351.932,00 atau 1.343,96% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp3.735.025.500,00, yang terdiri dari:

	Uraian	(Dalam Rupiah)
1	Diskpora	149.383.000,00
2	Dinkes	70.000.000,00
3	RSUD KRT Setjonegoro	40.925.000,00
4	Disperkimhub	6.706.764.470,00
5	Satpol PP	5.000.000,00
6	Disnakerin	429.000.490,00
7	DLH	84.500.000,00
8	Disdukcapil	5.000.000,00
9	DPPKB PP PA	1.677.199.270,00
10	Arpusda	1.500.000,00
11	Disparbud	15.950.000,00
12	Dispaperkan	1.500.000,00
13	Bagian Adbang Setda	10.500.000,00
14	Bagian Kesra Setda	70.545.000,00

	Uraian	(Dalam Rupiah)
15	Bagian Perekonomian & SDA Setda	40.000.000,00
16	Bagian Umum Setda	31.500.000,00
17	Bagian Prokompim Setda	7.300.000,00
18	Setwan	35.000.000,00
19	Kec Wonosobo	3.000.000,00
20	Kel Jlamprang	16.182.130.900,00
21	Kel Mlipak	36.000.000,00
22	Kel Pagerkukuh	3.295.000.000,00
23	Kel Mudal	23.226.341.500,00
24	Kel Andongsili	1.191.430.000,00
25	Kec Garung	1.800.000,00
26	Kec Kepil	28.000.000,00
27	Inspektorat	10.000.000,00
28	Bappeda	5.000.000,00
29	BPPKAD	342.473.018,00
30	BKD	151.712.000,00
31	BPBD	77.922.784,00
	JUMLAH	**53.932.377.432,00**

f) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Tabel V.212 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp12.936.933.548,25, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.677.878.247,75 atau 42,79% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp22.614.811.796,00. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya berada pada Dinas Kesehatan berupa hibah Posbindu Kit dari Pemprov Jateng sebesar Rp93.330.645,25, hibah obat dari Dinkes Pemprov Jateng sebesar Rp12.617.323.739,00, dan hibah obat dari Dinkes Kota Salatiga sebesar Rp1.256.964,00. Sedangkan hibah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp225.022.200,00 merupakan hibah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemprov Jateng.

D.2. BEBAN - LO

Tabel V.183 di atas menunjukkan Beban - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp1.704.863.383.166,07. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp58.715.822.257,61 atau 3,57% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.646.147.560.908,46 uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.213 berikut.

Tabel V.213 Beban Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Pegawai	802.924.812.735,14	749.299.292.664,41	53.625.520.070,73	7,16
2.	Beban Persediaan	172.850.638.036,04	148.697.400.086,49	24.153.237.949,55	16,24
3.	Beban Jasa	202.994.680.284,00	249.047.890.672,54	(46.053.210.388,54)	(30,97)
4.	Beban Pemeliharaan	27.797.393.188,00	32.068.215.489,00	(4.270.822.301,00)	(13,32)
5.	Beban Perjalanan Dinas	50.263.878.364,00	42.301.751.220,00	7.962.127.144,00	24,83
6.	Beban Subsidi	638.215.332,00	227.138.667,00	411.076.665,00	180,98
7.	Beban Hibah	145.528.387.321,67	55.417.030.110,99	90.111.357.210,68	162,61
8.	Beban Bantuan Sosial	13.348.347.900,00	14.325.579.640,00	(977.231.740,00)	(6,82)
9.	Beban Penyusutan	163.849.640.345,28	237.516.925.469,69	(73.667.285.124,41)	(31,02)
10.	Beban Transfer	123.665.371.570,00	114.370.645.911,00	9.294.725.659,00	8,13
11.	Beban Penyisihan Piutang	822.070.749,94	706.619.799,70	115.450.950,24	16,34
12.	Beban Lain-lain	179.947.340,00	2.169.071.177,64	(1.989.123.837,64)	(91,70)
	JUMLAH	**1.704.863.383.166,07**	**1.646.147.560.908,46**	**58.715.822.257,61**	**3,57**

D.2.a. Beban Pegawai

Tabel V.213 di atas menunjukkan Beban Pegawai Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp802.924.812.735,14. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp53.625.520.070,73 atau 7,16% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp749.299.292.664,41.

Perbedaan antara Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Beban Pegawai Tahun Berjalan (LO)	:	802.925.782.480,14
Belanja Pegawai Tahun Berjalan (LRA)	:	813.687.908.377,00
Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan (Neraca)	:	12.297.571.840,00
Utang Belanja Pegawai Tahun 2022 (Neraca)	:	125.785.989,00
Selisih	:	**(22.933.911.747,86)**
Penjelasan Selisih		
Beban dibayar dimuka tahun lalu	:	32.460.528,67
Beban dibayar dimuka tahun berjalan	:	(23.402.219,33)
Koreksi ekuitas kurang catat utang belanja pegawai tahun lalu	:	(16.756.476,00)
Koreksi reklasifikasi dari beban barang dan jasa BLUD	:	261.740.682,00
Koreksi reklasifikasi ke belanja dan jasa	:	(12.576.000,00)
Reklasifikasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga - Utang Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2022 ke utang belanja pegawai	:	(2.528.360,00)
Reklasifikasi Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan Tahun 2022 ke Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	:	(23.172.849.903,20)
JUMLAH	:	**(22.933.911.747,86)**

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.214 berikut.

Tabel V.214 Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	472.779.598.583,00	463.184.279.045,00	9.595.319.538,00	2,07
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	77.570.602.242,00	77.085.659.638,00	484.942.604,00	0,63
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	212.629.942.422,80	166.730.359.249,00	45.899.583.173,80	27,53
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	24.335.627.346,00	23.412.190.544,00	923.436.802,00	3,94
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	480.667.576,00	438.670.576,00	41.997.000,00	9,57
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	-	-
7.	Beban Pegawai BLUD	14.276.374.565,34	17.596.133.612,41	(3.319.759.047,07)	(18,87)
	JUMLAH	**802.924.812.735,14**	**749.299.292.664,41**	**53.625.520.070,73**	**7,16**

1) Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Tabel V.214 di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp472.779.598.583,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.595.319.538,00 atau 2,07% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp463.184.279.045,00, yang dijelaskan lebih rinci sebagaimana Tabel V.215 di bawah ini:

Tabel V.215 Beban Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Gaji Pokok ASN	355.199.803.721,00	347.029.004.882,00	8.170.798.839,00	2,35
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	32.984.946.942,00	32.029.654.059,00	955.292.883,00	2,98
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.830.820.000,00	4.863.618.810,00	(32.798.810,00)	(0,67)
4.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	30.067.968.700,00	27.020.714.210,00	3.047.254.490,00	11,28
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.970.530.000,00	3.774.754.521,00	(804.224.521,00)	(21,31)
6.	Beban Tunjangan Beras ASN	20.420.870.751,00	19.618.451.680,00	802.419.071,00	4,09
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.412.152.063,00	1.519.749.160,00	(107.597.097,00)	(7,08)
8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	5.132.368,00	4.946.894,00	185.474,00	3,75
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.957.772.904,00	24.491.539.789,00	(2.533.766.885,00)	(10,35)
10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	732.403.827,00	707.963.361,00	24.440.466,00	3,45
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.197.197.307,00	2.123.881.679,00	73.315.628,00	3,45
	JUMLAH	**472.779.598.583,00**	**463.184.279.045,00**	**9.595.319.538,00**	**2,07**

2) Beban Tambahan Penghasilan ASN

Tabel V.214 di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp77.570.602.242,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp484.942.604,00 atau 0,63% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp77.085.659.638,00, yang dijelaskan lebih rinci sebagaimana Tabel V.216 di bawah ini:

Tabel V.216 Beban Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	30.007.680.194,50	28.384.579.529,50	1.623.100.665,00	5,72
2.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.423.005.259,00	6.037.329.781,00	(614.324.522,00)	(10,18)
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	88.908.929,00	86.435.891,00	2.473.038,00	2,86
4.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	42.051.007.859,50	42.577.314.436,50	(526.306.577,00)	(1,24)
	JUMLAH	**77.570.602.242,00**	**77.085.659.638,00**	**484.942.604,00**	**0,63**

3) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel V.214 di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp212.629.942.422,80. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp45.899.583.173,80 atau 27,53% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp166.730.359.249,00 yang dijelaskan lebih rinci sebagaimana Tabel V.217 di bawah ini:

Tabel V.217 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	140.319.851.120,00	143.733.865.254,00	(3.414.014.134,00)	(2,38)
2.	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	151.776.300,00	313.356.800,00	(161.580.500,00)	(51,56)
3.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.606.515.000,00	3.623.490.000,00	(16.975.000,00)	(0,47)
4.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	65.449.918.248,80	16.434.658.482,00	49.015.259.766,80	298,24
5.	Beban Honorarium	3.101.881.754,00	2.624.988.713,00	476.893.041,00	18,17
	JUMLAH	**212.629.942.422,80**	**166.730.359.249,00**	**45.899.583.173,80**	**27,53**

4) Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Tabel V.214 di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp24.335.627.346,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp923.436.802,00 atau 3,94% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp23.412.190.544,00, yang dijelaskan lebih rinci sebagaimana Tabel V.218 di bawah ini:

Tabel V.218 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	-	-
2.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	129.353.700,00	129.074.400,00	279.300,00	0,22
3.	Beban Tunjangan Beras DPRD	137.308.320,00	137.308.320,00	-	-
4.	Beban Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	-	-
5.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	-	-
6.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	126.154.350,00	125.880.300,00	274.050,00	0,22
7.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.529.500,00	29.646.650,00	(14.117.150,00)	(47,62)
8.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	-	-
9.	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	-	-

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
10.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	129.087.000,00	129.087.000,00	-	-
11.	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.260.811.976,00	7.508.311.374,00	752.500.602,00	10,02
12.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.904.000.000,00	5.719.500.000,00	184.500.000,00	3,23
	JUMLAH	**24.335.627.346,00**	**23.412.190.544,00**	**923.436.802,00**	**3,94**

5) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Tabel V.214 di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp480.667.576,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp41.997.000,00 atau 9,57% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp438.670.576,00, yang dijelaskan lebih rinci sebagaimana Tabel V.219 di bawah ini:

Tabel V.219 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	-	-
2.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-
3.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	-	-
4.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.041.640,00	2.607.120,00	434.520,00	16,67
5.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.784.696,00	1.764.096,00	20.600,00	1,17
6.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.960,00	1.680,00	280,00	16,67
7.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.328.000,00	5.328.000,00	-	-
8.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	-	-
9.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	-	-
10.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	314.662.000,00	273.120.400,00	41.541.600,00	15,21
	JUMLAH	**480.667.576,00**	**438.670.576,00**	**41.997.000,00**	**9,57**

6) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Tabel V.214 di atas menunjukkan Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp852.000.000,00, sama dengan TA 2022 sebesar Rp852.000.000,00.

7) Beban Pegawai BLUD

Tabel V.214 di atas menunjukkan Beban Pegawai BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp14.276.374.565,34. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.319.759.047,07 atau 18,87% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp17.596.133.612,41.

D.2.b. Beban Persediaan

Tabel V.213 di atas menunjukkan Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp172.850.638.036,04. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.153.237.949,55 atau 16,24% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp148.697.400.086,49.

Perbedaan antara Beban Persediaan – LO dengan Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan – LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Beban Persediaan Tahun Berjalan (LO)	:	172.850.638.036,04
Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA)	:	90.035.856.751,00
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	:	33.614.700.012,97
Persediaan Barang Tahun 2022 (Neraca)	:	34.593.855.749,33
Selisih	:	**81.835.625.548,68**
Penjelasan Selisih		
Belanja Barang Dan Jasa (Dana BOS)	:	29.665.596.828,00
Belanja Barang Dan Jasa (BLUD)	:	35.654.671.021,00

Reklas dari belanja modal	:	1.343.343.941,00
Reklas dari belanja pemeliharaan	:	4.785.000,00
Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah barang persediaan (pendapatan hibah)	:	15.773.796.202,25
Perolehan Persediaan dari Utang Belanja Barang tahun 2023	:	2.322.987.247,00
Retur Obat Kedaluwarsa tahun 2022	:	165.266.676,06
Retur Hibah Obat dari PH 3/Swasta	:	118.548.318,00
Kurang catat persediaan tahun lalu	:	106.461.285,68
Penghapusan Persediaan	:	(967.571.960,51)
Obat Kedaluwarsa	:	(53.929.606,91)
Reklas ke Aset Tetap	:	(18.558.483,00)
Reklas ke Beban Jasa	:	(16.755.660,00)
Berkurangnya persediaan karena pemberian hibah barang persediaan (beban hibah)	:	(1.500.221.092,67)
Utang Belanja Barang Tahun 2022	:	(736.433.621,00)
Lebih catat persediaan obat Kedaluwarsa	:	(18.200.427,74)
Lebih catat saldo persediaan tahun lalu	:	(8.160.107,48)
Lebih catat saldo persediaan tahun berjalan	:	(11,00)
JUMLAH	:	**81.835.625.548,68**

Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.220 berikut.

Tabel V.220 Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

(Rp)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Barang Pakai Habis	172.790.653.036,04	148.588.882.586,49	24.201.770.449,55	16,29
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	36.060.000,00	80.027.500,00	(43.967.500,00)	(54,94)
3.	Beban Barang Bekas Dipakai	23.925.000,00	28.490.000,00	(4.565.000,00)	(16,02)
	JUMLAH	**172.850.638.036,04**	**148.697.400.086,49**	**24.153.237.949,55**	**16,24**

1) Beban Barang Pakai Habis

Tabel V.220 di atas menunjukkan Beban Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp172.790.653.036,04. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.201.770.449,55 atau 16,29% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp148.588.882.586,49.

2) Beban Barang Tak Habis Pakai

Tabel V.220 di atas menunjukkan Beban Barang Tak Habis Pakai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp36.060.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp43.967.500,00 atau 54,94% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp80.027.500,00. Beban Barang Tak Habis Pakai berupa komponen rambu-rambu yang berada di Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan.

3) Beban Barang Bekas Dipakai

Tabel V.220 di atas menunjukkan Beban Barang Bekas Dipakai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp23.925.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.565.000,00 atau 16,02% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp28.490.000,00.

D.2.c. Beban Jasa

Tabel V.213 di atas menunjukkan Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp202.994.680.284,00. Nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp46.053.210.388,54 atau 30,97% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp249.047.890.672,54. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.221 berikut.

Tabel V.221 Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Jasa Kantor	153.375.187.239,00	210.196.219.056,20	(56.821.031.817,20)	(27,03)
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	34.419.267.929,00	23.380.383.598,67	11.038.884.330,33	47,21
3.	Beban Sewa Tanah	139.220.000,00	263.116.666,67	(123.896.666,67)	(47,09)
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.199.994.209,00	2.290.680.256,00	909.313.953,00	39,70
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.223.713.945,00	1.449.465.758,00	(225.751.813,00)	(15,57)
6.	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	23.000.000,00	1.200.000,00	21.800.000,00	1.816,67
7.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	121.109.625,00	116.758.789,00	4.350.836,00	3,73
8.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.992.642.179,00	4.006.189.410,00	(2.013.547.231,00)	(50,26)
9.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.635.001.627,00	2.768.860.794,00	866.140.833,00	31,28
10.	Beban jasa Ketersediaan layanan (Availability Payment)	-	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.164.866.341,00	-	1.164.866.341,00	100,00
12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.120.946.478,00	2.222.119.277,00	(1.101.172.799,00)	(49,56)
13.	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	602.182.358,00	689.854.100,00	(87.671.742,00)	(12,71)
14.	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	120.200.000,00	-	120.200.000,00	100,00
15.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.857.348.354,00	1.655.542.967,00	201.805.387,00	12,19
	JUMLAH	**202.994.680.284,00**	**249.047.890.672,54**	**(46.053.210.388,54)**	**(30,97)**

1) Beban Jasa Kantor

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Jasa Kantor Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp153.375.187.239,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp56.821.031.817,20 atau 27,03% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp210.196.219.056,20.

2) Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan/Asuransi Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp34.419.267.929,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.038.884.330,33 atau 47,21% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp23.380.383.598,67.

3) Beban Sewa Tanah

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Sewa Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp139.220.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp123.896.666,67 atau 47,09% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp263.116.666,67.

4) Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Sewa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp3.199.994.209,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp909.313.953,00 atau 39,70% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp2.290.680.256,00.

5) Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Sewa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp1.223.713.945,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp225.751.813,00 atau 15,57% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.449.465.758,00.

6) Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp23.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp21.800.000,00 atau 1.816,67% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.200.000,00. Kenaikan signifikan tersebut berada pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga berupa sewa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel pembinaan minat bakat SD dan SMP.

7) Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp121.109.625,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.350.836,00 atau 3,73% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp116.758.789,00.

8) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp1.992.642.179,00. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp2.013.547.231,00 atau 50,26% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp4.006.189.410,00. Penurunan signifikan tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada TA 2023.

9) Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp3.635.001.627,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp866.140.833,00 atau 31,28% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp2.768.860.794,00.

10) Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp7.500.000,00 atau 100% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp7.500.000,00. Penurunan tersebut disebabkan karena tidak terdapat anggaran Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) pada TA 2023, sedangkan pada TA 2022 terdapat di Puskesmas Kertek 2.

11) Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Beasiswa Pendidikan PNS Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp1.164.866.341,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.164.866.341,00 atau 100% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Nihil. Beban Beasiswa Pendidikan PNS terdapat pada Dinas Kesehatan.

12) Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp1.120.946.478,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.101.172.799,00 atau 49,56% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp2.222.119.277,00.

13) Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp602.182.358,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp87.671.742,00 atau 12,71% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp689.854.100,00.

14) Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi

Tabel V.221 di atas menunjukan Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp120.200.000,00, sedangkan TA 2022 adalah Nihil. Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi berada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

15) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel V.221 di atas menunjukkan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp1.857.348.354,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp201.805.387,00 atau 12,19% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.655.542.967,00.

D.2.d. Beban Pemeliharaan

Tabel V.213 di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp27.797.393.188,00, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.270.822.301,00 atau 13,32% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp32.068.215.489,00. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.222 berikut.

Tabel V.222 Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	15.000.000,00	-	15.000.000,00	100,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.239.207.652,00	9.207.192.930,00	2.032.014.722,00	22,07
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.525.004.893,00	11.480.924.624,00	(1.955.919.731,00)	(17,04)
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.976.680.776,00	11.361.945.335,00	(4.385.264.559,00)	(38,60)
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.499.867,00	18.152.600,00	(8.652.733,00)	(47,67)
6.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	32.000.000,00	-	32.000.000,00	100,00
	JUMLAH	**27.797.393.188,00**	**32.068.215.489,00**	**(4.270.822.301,00)**	**(13,32)**

Perbedaan antara Belanja Pemeliharaan – LRA dengan Beban Pemeliharaan – LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Beban Pemeliharaan Tahun Berjalan (LO)	:	27.797.393.188,00
Belanja Pemeliharaan Tahun Berjalan (LRA)	:	19.944.422.607,00
Selisih	:	**7.852.970.581,00**
Penjelasan Selisih		
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD	:	4.519.212.776,00
Reklasifikasi beban barang dan jasa BOS	:	3.516.879.577,00
Reklasfikasi dari Belanja Modal tahun 2023	:	827.924.476,00
Reklasifikasi ke aset tetap	:	(1.525.463.928,00)
Reklasifikasi ke persediaan	:	(4.785.000,00)
Hibah dari BPD Bank Jateng	:	24.804.800,00
Utang belanja pemeliharaan tahun berjalan (Neraca)	:	345.197.880,00
Beban pemeliharaan jaringan dari BTT (Diskominfo)	:	149.200.000,00
Jumlah	:	**7.852.970.581,00**

1) Beban Pemeliharaan Tanah

Tabel V.222 di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp15.000.000,00, sedangkan pada TA 2022 adalah Nihil.

2) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel V.222 di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp11.239.207.652,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.032.014.722,00 atau 22,07% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp9.207.192.930,00.

3) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Tabel V.222 di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp9.525.004.893,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.955.919.731,00 atau 17,04% dibandingkan dengan

TA 2022 sebesar Rp11.480.924.624,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.223 di bawah ini:

Tabel V.223 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

(Rp)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.627.200.179,00	8.168.774.558,00	(4.541.574.379,00)	(55,60)
2.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.456.893.756,00	140.665.855,00	2.316.227.901,00	1.646,62
3.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.385.000,00	191.011.872,00	(177.626.872,00)	(92,99)
4.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.053.009.177,00	1.793.812.458,00	259.196.719,00	14,45
5.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	199.453.794,00	199.687.466,00	(233.672,00)	(0,12)
6.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	54.468.000,00	(54.468.000,00)	(100,00)
7.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	-	31.017.000,00	(31.017.000,00)	(100,00)
8.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	-	19.896.000,00	(19.896.000,00)	(100,00)
9.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	54.714.000,00	-	54.714.000,00	-
10.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	8.400.000,00	-	8.400.000,00	-
11.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	32.375.031,00	31.693.145,00	681.886,00	2,15
12.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	587.798.986,00	117.016.944,00	470.782.042,00	402,32
13.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	104.099.520,00	(104.099.520,00)	(100,00)
14.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	277.895.303,00	(277.895.303,00)	(100,00)
15.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	5.702.389,00	(5.702.389,00)	(100,00)
16.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	12.950.000,00	-	12.950.000,00	-
17.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	435.980.820,00	218.014.950,00	217.965.870,00	99,98
18.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	38.023.050,00	-	38.023.050,00	-
19	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	-	127.169.164,00	(127.169.164,00)	(100,00)
20.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.821.100,00	-	4.821.100,00	-
	JUMLAH	**9.525.004.893,00**	**11.480.924.624,00**	**(1.955.919.731,00)**	**(17,04)**

4) Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel V.222 di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp6.976.680.776,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.385.264.559,00 atau 38,60% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp11.361.945.335,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.224 di bawah ini:

Tabel V.224 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	3.496.346.435,00	8.631.224.990,00	(5.134.878.555,00)	(59,49)
2.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	214.268.000,00	418.536.000,00	(204.268.000,00)	(48,81)
3.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	376.152.000,00	456.461.000,00	(80.309.000,00)	(17,59)
4.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	510.496.500,00	187.192.000,00	323.304.500,00	172,71
5.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.243.777.500,00	1.322.951.500,00	(79.174.000,00)	(5,98)
6.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	119.570.000,00	129.650.000,00	(10.080.000,00)	(7,77)
7.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	521.658.600,00	176.308.375,00	345.350.225,00	195,88
8.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	199.502.000,00	-	199.502.000,00	-
9.	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	419.220,00	(419.220,00)	(100,00)
10.	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	85.531.801,00	-	85.531.801,00	-
11.	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	199.379.940,00	-	199.379.940,00	-
12.	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	9.998.000,00	39.202.250,00	(29.204.250,00)	(74,50)
	JUMLAH	**6.976.680.776,00**	**11.361.945.335,00**	**(4.385.264.559,00)**	**(38,60)**

5) Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tabel V.222 di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp9.499.867,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.652.733,00 atau 47,67% sedangkan pada TA 2022 sebesar Rp18.152.600,00.

6) Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Tabel V.222 di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp32.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp32.000.000,00 atau 100%, sedangkan pada TA 2022 adalah Nihil. Kenaikan tersebut karena terdapat anggaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud pada TA 2023 yang berada di DPPKBPPPA.

D.2.e. Beban Perjalanan Dinas

Tabel V.213 di atas menunjukkan Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp50.263.878.364,00. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.962.127.144,00 atau 24,83% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp42.301.751.220,00. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.225 berikut.

Tabel V.225 Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.263.878.364,00	42.301.751.220,00	7.962.127.144,00	24,83
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-
	JUMLAH	**50.263.878.364,00**	**42.301.751.220,00**	**7.962.127.144,00**	**24,83**

Tabel V.225 menunjukkan Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp50.263.878.364,00 berupa Beban Perjalanan Dinas Dalam

Daerah sedangkan pada TA 2022 sebesar Rp42.301.751.220,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dilihat pada Tabel V.226 di bawah ini:

Tabel V.226 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	22.579.356.935,00	18.902.081.623,00	3.677.275.312,00	19,45
2.	Beban Perjalanan Dinas Tetap	8.628.859.700,00	8.332.329.000,00	296.530.700,00	3,56
3.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.606.555.729,00	15.039.540.597,00	2.567.015.132,00	17,07
4.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	416.525.000,00	18.750.000,00	397.775.000,00	2.121,47
5.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.032.581.000,00	9.050.000,00	1.023.531.000,00	11.309,73
	JUMLAH	**50.263.878.364,00**	**42.301.751.220,00**	**7.962.127.144,00**	**18,82**

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat dua sub akun beban perjalanan dinas yang mengalami kenaikan signifikan diatas 50% dengan penjelasan sebagai berikut:

- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota mengalami kenaikan 2.121,47% dengan saldo beban tertinggi berada di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebesar Rp322.735.000,00;
- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota mengalami kenaikan 11.309,73% dengan saldo beban tertinggi berada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp539.627.000,00 dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp372.335.000,00.

D.2.f. Beban Subsidi

Tabel V.213 di atas menunjukkan Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp638.215.332,00. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp411.076.665,00 atau 180,98% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp227.138.667,00. Beban subsidi tersebut adalah berupa subsidi bunga kredit usaha rakyat kepada UKM melalui PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

D.2.g. Beban Hibah

Tabel V.213 di atas menunjukkan Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp145.528.387.321,67. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp90.111.357.210,68 atau 162,61% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp55.417.030.110,99.

Perbedaan antara Belanja Hibah – LRA dengan Beban Hibah – LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Beban Hibah Tahun Berjalan (LO)	:	145.528.387.321,67
Belanja Hibah Tahun Berjalan (LRA)	:	136.542.227.583,00
Selisih	:	**8.986.159.738,67**
Penjelasan Selisih		
hibah ke BUMD	:	46.203.193,86
Hibah ke Pemerintah Desa	:	6.884.282.071,63
Hibah ke provinsi (Tanah utk SMK Garung)	:	418.100.000,00
Hibah ke Instansi Vertikal	:	64.658.339,00
Hibah ke lembaga kesehatan swasta	:	1.358.346.396,18
Hibah kepada masyarakat/pihak ketiga	:	214.569.738,00
Jumlah	:	**8.986.159.738,67**

Rincian Beban Hibah dapat dilihat pada Tabel V.227 sebagai berikut:

Tabel V.227 Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.540.311.539,00	996.582.281,86	17.543.729.257,14	1.760,39
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.302.382.071,63	1.048.399.869,00	6.253.982.202,63	596,53
3.	Beban Hibah Uang kepada BUMD	46.203.193,86	-	46.203.193,86	100,00
4.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	106.234.354.685,18	52.297.647.960,13	53.936.706.725,05	103,13
5.	Beban Hibah Dana BOS	12.330.735.832,00	-	12.330.735.832,00	-
6.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.074.400.000,00	1.074.400.000,00	-	-
	JUMLAH	**145.528.387.321,67**	**55.417.030.110,99**	**90.111.357.210,68**	**162,61**

1) Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Tabel V.227 di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp18.540.311.539,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp17.543.729.257,14 atau 1.760,39% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp996.582.281,86. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat tersebut merupakan Beban Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

2) Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel V.227 di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp7.302.382.071,63, nilai beban tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp6.253.982.202,63 atau 596,53% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.048.399.869,00. Kenaikan signifikan tersebut disebabkan karena adanya beban hibah barang kepada Pemerintah Desa sebesar Rp6.884.282.071,63 di Dinas Kesehatan.

3) Beban Hibah Uang kepada BUMD

Tabel V.227 diatas menunjukan Beban Hibah Uang kepada BUMD Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp46.203.193,86. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp46.203.193,86 atau 100%, sedangkan pada TA 2022 adalah Nihil. Kenaikan tersebut karena adanya hibah obat dari Dinas Kesehatan kepada PD. Bhakti Husada.

4) Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Tabel V.227 di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp106.234.354.685,18. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp53.936.706.725,05 atau 103,13% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp52.297.647.960,13, dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.228 berikut:

Tabel V.228 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.997.750.357,89	4.519.600.000,00	3.478.150.357,89	76,96
2.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	66.183.858.359,29	26.953.511.960,13	39.230.346.399,16	145,55
3.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	32.052.745.968,00	20.824.536.000,00	11.228.209.968,00	53,92
	JUMLAH	**106.234.354.685,18**	**52.297.647.960,13**	**53.936.706.725,05**	**103,13**

Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.150.500.000,00 dan diberikan kepada 10 organisasi kemasyarakatan sedangkan pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00 yang diberikan kepada 4 organisasi kemasyarakatan.

5) Beban Hibah Dana BOS

Tabel V.227 di atas menunjukkan Beban Hibah Dana BOS Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp12.330.735.832,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp12.330.735.832,00 atau 100%, sedangkan pada TA 2022 adalah Nihil. Kenaikan tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan penganggaran belanja Dana BOS kepada sekolah swasta pada TA 2023 dan TA 2022.

6) Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Tabel V.227 di atas menunjukkan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp1.074.400.000,00 sama dengan TA 2022.

D.2.h. Beban Bantuan Sosial

Tabel V.213 di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp13.348.347.900,00. Nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp977.231.740,00 atau 6,82% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp14.325.579.640,00. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.229 berikut:

Tabel V.229 Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	7.808.347.900,00	13.517.800.000,00	(5.709.452.100,00)	(42,24)
2.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2.435.000.000,00	18.000.000,00	2.417.000.000,00	13.427,78
3.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	3.105.000.000,00	765.000.000,00	2.340.000.000,00	305,88
4.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	24.779.640,00	(24.779.640,00)	(100,00)
	JUMLAH	**13.348.347.900,00**	**14.325.579.640,00**	**(977.231.740,00)**	**(6,82)**

Perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial – LRA dengan Beban Bantuan Sosial – LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Beban Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LO)	:	13.348.347.900,00
Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LRA)	:	12.130.400.000,00
Selisih	:	**1.217.947.900,00**
Penjelasan Selisih		
Utang Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	:	1.177.267.900,00
Hibah dari masyarakat/pihak ketiga/instansi vertikal guna penanganan *stunting*	:	40.680.000,00
Jumlah	:	**1.217.947.900,00**

1) Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

Tabel V.229 di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp7.808.347.900,00. Nilai tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp5.709.452.100,00 atau 42,24% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp13.517.800.000,00, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.230 di bawah ini:

Tabel V.230 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.631.080.000,00	13.517.800.000,00	(6.886.720.000,00)	(50,95)
2.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.177.267.900,00	-	1.177.267.900,00	-
	JUMLAH	**7.808.347.900,00**	**13.517.800.000,00**	**(5.709.452.100,00)**	**(42,24)**

2) Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga

Tabel V.229 di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp2.435.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.417.000.000,00 atau 13.427,78% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp18.000.000,00, kenaikan signifikan tersebut berada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang digunakan dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.231 di bawah ini:

Tabel V.231 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.435.000.000,00	18.000.000,00	2.417.000.000,00	13.427,78
2.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	-	-	-	-
	JUMLAH	**2.435.000.000,00**	**18.000.000,00**	**2.417.000.000,00**	**13.427,78**

3) Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Tabel V.229 di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp3.105.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.340.000.000,00 atau 305,88% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp765.000.000,00. Kenaikan signifikan tersebut berada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.995.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.232 di bawah ini :

Tabel V.232 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.105.000.000,00	765.000.000,00	2.340.000.000,00	305,88
2.	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
	JUMLAH	**3.105.000.000,00**	**765.000.000,00**	**2.340.000.000,00**	**305,88**

4) Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Tabel V.229 di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Nihil. Sedangkan TA 2022 sebesar Rp24.779.640,00, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.233 di bawah ini:

Tabel V.233 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	24.779.640,00	(24.779.640,00)	(100,00)
	JUMLAH	**-**	**24.779.640,00**	**(24.779.640,00)**	**(100,00)**

D.2.i. Beban Penyusutan

Tabel V.213 di atas menunjukkan Beban Penyusutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp163.849.640.345,28. Nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp73.667.285.124,41 atau 31,02% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp237.516.925.469,69. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.234 berikut.

Tabel V.234 Beban Penyusutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	65.663.200.311,31	83.745.937.823,09	(18.082.737.511,78)	(21,59)
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.555.217.396,98	26.123.844.672,00	(4.568.627.275,02)	(17,49)
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	75.435.300.781,18	127.137.930.786,60	(51.702.630.005,42)	(40,67)
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	624.868.619,81	31.821.687,00	593.046.932,81	1.863,66
5.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	571.053.236,00	477.390.501,00	93.662.735,00	19,62
	JUMLAH	**163.849.640.345,28**	**237.516.925.469,69**	**(73.667.285.124,41)**	**(31,02)**

1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tabel V.234 di atas menunjukkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp65.663.200.311,31, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.082.737.511,78 atau 21,59% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp83.745.937.823,09.

Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	:	65.663.200.311,31
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 (Neraca)	:	(592.287.115.994,32)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 (Neraca)	:	(526.935.686.459,80)
Selisih	:	**311.770.776,79**
Penjelasan Selisih		
Mutasi tambah		
Penerimaan Hibah Barang	:	(816.926.933,00)
Dikarenakan Perubahan Masa Manfaat	:	(84.284.964,00)
Dikarenakan Perubahan Tahun Perolehan	:	(9.364.940,00)
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya (kurang catat)	:	(27.000.000,00)
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	:	(11.343.750,00)
Mutasi kurang		
Akumulasi Aset Tetap Pengeluaran Hibah	:	2.085.082,00
Akumulasi Aset Tetap Dihapuskan	:	1.075.922.109,20
Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	:	1,00
dobel catat/lebih catat	:	18.180.000,00
Dikarenakan Perubahan Masa Manfaat	:	25.452.014,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	:	139.052.157,59
Jumlah	:	**311.770.776,79**

2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel V.234 di atas menunjukkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp21.555.217.396,98, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.568.627.275,02 atau 17,49% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp26.123.844.672,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.235 berikut.

Tabel V.235 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.173.420.666,98	25.381.004.629,00	(5.207.583.962,02)	(20,52)
2.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	969.633.705,00	314.912.882,00	654.720.823,00	207,91
3.	Beban Penyusutan Monumen	139.440.301,00	382.798.694,00	(243.358.393,00)	(63,57)
4.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	272.722.724,00	45.128.467,00	227.594.257,00	504,33
	JUMLAH	**21.555.217.396,98**	**26.123.844.672,00**	**(4.568.627.275,02)**	**(17,49)**

Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	:	21.555.217.396,98
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 (Neraca)	:	(330.794.240.225,77)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 (Neraca)	:	(299.911.135.599,79)
Selisih	:	**(9.327.887.229,00)**
Penjelasan Selisih		
Mutasi tambah		
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	:	(12.168.230.841,00)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap - Jalan, Irigasi & Jaringan	:	(8.072.812.155,00)
Perolehan Aset - Pecah Pencatatan	:	(93.872.310,00)
Koreksi Pencatatan Karena Gabung	:	(5.666.525.075,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Reklas	:	(1.482.959.590,00)
Koreksi Kesalahan Pencatatan Akumulasi Penyusutan	:	(1.040.564.926,00)
Koreksi Pencatatan Tahun Berjalan :	:	
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	:	(289.400.977,00)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap Lainnya	:	(114.176.210,00)
Koreksi Hasil Inventarisasi:		
Penghapusan Aset Tetap	:	4.560.436.084,00
Lebih Catat Nilai Akumulasi	:	486.156.428,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Jalan, Irigasi & Jaringan	:	2.274.989.215,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	:	38.013.558,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	:	92.274.840,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	:	5.004.686.770,00
Reklasifikasi ke ksp	:	907.912.729,00
Perolehan Aset - Pecah Pencatatan	:	1.238.062.782,00
Koreksi Pencatatan Karena Gabung	:	767.319.165,00
Koreksi Kesalahan Pencatatan	:	1.057.672.183,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Reklas	:	2,00
Koreksi Pencatatan Tahun Berjalan :	:	
Penghapusan Aset Tetap	:	2.874.176.696,00
Lebih Catat Nilai Akumulasi	:	298.530.243,00
Hibah Keluar Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	:	424.160,00
Jumlah	:	**(9.327.887.229,00)**

3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tabel V.234 di atas menunjukkan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp75.435.300.781,18, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp51.702.630.005,42 atau 40,67% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp127.137.930.786,60, dengan rincian sebagaimana Tabel V.236 berikut.

Tabel V.236 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	58.124.683.116,60	111.523.151.791,60	(53.398.468.675,00)	(47,88)
2.	Beban Penyusutan Bangunan Air	14.613.573.001,58	13.805.318.663,00	808.254.338,58	5,85
3.	Beban Penyusutan Instalasi	2.524.234.852,00	1.432.634.266,00	1.091.600.586,00	76,20
4.	Beban Penyusutan Jaringan	172.809.811,00	376.826.066,00	(204.016.255,00)	(54,14)
	JUMLAH	**75.435.300.781,18**	**127.137.930.786,60**	**(51.702.630.005,42)**	**(40,67)**

Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LO)	:	75.435.300.781,18
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 (Neraca)	:	(1.676.533.053.689,34)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 (Neraca)	:	(1.502.970.052.977,38)
Selisih	:	**(98.127.699.930,78)**
Penjelasan Selisih		
Koreksi Hasil Inventarisasi:		
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	:	(11.986.949.233,00)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	:	(2.274.989.215,00)
Perolehan Aset - Pecah Pencatatan	:	(50.778.512,00)
Koreksi Pencatatan Karena Gabung	:	(104.399.222.132,08)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Reklas	:	(1.605.789.063,42)
Koreksi Kesalahan Pencatatan Akumulasi Penyusutan	:	(2.159.778.145,06)
Koreksi Pencatatan Tahun Berjalan :		
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	:	(5,00)
Koreksi Pencatatan karena kapitalisasi	:	(9.444.950,92)
Koreksi Hasil Inventarisasi:		
Penghapusan Aset Tetap	:	3.485.143.944,70
Lebih Catat Nilai Akumulasi	:	3.204.425.502,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	:	8.072.812.155,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	:	455.604.992,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	:	7.509.656.478,00
Koreksi Pencatatan Karena Gabung	:	473.978.526,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Reklas	:	81.483.387,00
Koreksi Kesalahan Pencatatan	:	999.611.356,00
Koreksi Pencatatan Tahun Berjalan :		
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	:	3.961.425,00
Lebih Catat Nilai Akumulasi	:	12,00
Reklas ke KSP	:	72.573.548,00
Jumlah	:	**(98.127.699.930,78)**

4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tabel V.234 di atas menunjukkan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp624.868.619,81, nilai beban tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp593.046.932,81 atau 1.863,66% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp31.821.687,00. Kenaikan signifikan tersebut karena terdapat kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap lainnya berupa alat musik pada TA 2023 yang berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LO)	:	624.868.619,81
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 (Neraca)	:	(1.438.453.837,81)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 (Neraca)	:	(132.300.002,00)
Selisih	:	**(681.285.216,00)**
Penjelasan Selisih		
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	:	(795.461.426,00)
Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan		114.176.210,00
Jumlah	:	**(681.285.216,00)**

5) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tabel V.234 di atas menunjukkan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp571.053.236,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp93.662.735,00 atau 19,62% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp477.390.501,00.

Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Beban Amortisasi Tahun Berjalan (LO)	:	571.053.236,00
Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca)	:	(5.210.636.461,00)
Akumulasi Amortisasi Tahun 2022 (Neraca)	:	(4.645.116.123,00)
Selisih	:	**5.532.898,00**
Penjelasan Selisih		
Penghapusan Aset Tidak Berwujud	:	5.532.898,00
Jumlah	:	**5.532.898,00**

D.2.j. Beban Transfer

Tabel V.213 di atas menunjukkan Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp123.665.371.570,00. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.294.725.659,00 atau 8,13% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp114.370.645.911,00. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.237 berikut.

Tabel V.237 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bagi Hasil	6.640.362.500,00	6.785.636.841,00	(145.274.341,00)	(2,14)
2.	Beban Bantuan Keuangan	117.025.009.070,00	107.585.009.070,00	9.440.000.000,00	8,77
	JUMLAH	**123.665.371.570,00**	**114.370.645.911,00**	**9.294.725.659,00**	**8,13**

Selisih antara Belanja Transfer-LRA Rp370.819.108.570,00 dengan Beban Transfer-LO sebesar Rp123.665.371.570,00 adalah Rp247.153.737.000,00 berupa realisasi Belanja Dana Desa yang tidak masuk ke Laporan Operasional.

1) Beban Bagi Hasil

Tabel V.237 di atas menunjukkan Beban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp6.640.362.500,00, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp145.274.341,00 atau 2,14% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp6.785.636.841,00, yang diklasifikasikan menjadi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa serta Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagaimana Tabel V.238 di bawah ini.

Tabel V.238 Beban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.523.000.000,00	5.584.985.972,00	(61.985.972,00)	(1,11)
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.117.362.500,00	1.200.650.869,00	(83.288.369,00)	(6,94)
	JUMLAH	**6.640.362.500,00**	**6.785.636.841,00**	**(145.274.341,00)**	**(2,14)**

Beban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 berada di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah – PPKD.

2) Beban Bantuan Keuangan

Tabel V.237 di atas menunjukkan Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp117.025.009.070,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.440.000.000,00 atau 8,77% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp107.585.009.070,00, yang dijelaskan sebagaimana Tabel V.239 di bawah ini.

Tabel V.239 Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	106.343.809.070,00	106.343.809.070,00	-	-
2.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	10.681.200.000,00	1.241.200.000,00	9.440.000.000,00	760,55
	JUMLAH	**117.025.009.070,00**	**107.585.009.070,00**	**9.440.000.000,00**	**8,77**

Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 berada di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah – PPKD.

D.2.k. Beban Penyisihan Piutang

Tabel V.213 di atas menunjukkan Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp822.070.749,94, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp115.450.950,24 atau 16,34% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp706.619.799,70. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.240 berikut.

Tabel V.240 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	266.228.753,70	200.389.859,70	65.838.894,00	32,86
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	446.957.722,50	542.914.401,20	(95.956.678,70)	(17,67)
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	118.984.273,74	(36.684.461,20)	155.668.734,94	(424,35)
4.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(10.100.000,00)	-	(10.100.000,00)	-
	JUMLAH	**822.070.749,94**	**706.619.799,70**	**115.450.950,24**	**16,34**

1) Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel V.240 di atas menunjukkan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp266.228.753,70, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp65.838.894,00 atau 32,86% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp200.389.859,70. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah berada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagaimana Tabel V.241 berikut.

Tabel V.241 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Pajak Restoran	87.500,00	74.700,00	12.800,00	17,14
2.	Beban Penyisihan Pajak Reklame	123.856.426,90	57.281,40	123.799.145,50	216.124,51
3.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	639.000,00	-	639.000,00	100,00
4.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	1.377.783,50	-	1.377.783,50	100,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	140.268.043,30	200.257.878,30	(59.989.835,00)	(29,96)
	JUMLAH	**266.228.753,70**	**200.389.859,70**	**65.838.894,00**	**32,86**

2) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Tabel V.240 di atas menunjukkan Beban Penyisihan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp446.957.722,50, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp95.956.678,70 atau 17,67% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp542.914.401,20, dengan rincian sebagaimana Tabel V.242 berikut.

Tabel V.242 Beban Penyisihan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	374.874.497,50	365.408.205,50	9.466.292,00	2,59
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	72.083.225,00	68.576.725,00	3.506.500,00	5,11
3.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	108.929.470,70	(108.929.470,70)	(100,00)
4.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	-	-
	JUMLAH	**446.957.722,50**	**542.914.401,20**	**(95.956.678,70)**	**(17,67)**

Berikut adalah beberapa penjelasan terkait Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023:

a) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum

Tabel V.242 di atas menunjukkan Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp374.874.497,50. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.466.292,00 atau 2,59% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp365.408.205,50, penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.243 berikut:

Tabel V.243 Beban Penyisihan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	38.852.000,00	24.669.000,00	14.183.000,00	57,49
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	276.952.383,50	188.674.723,50	88.277.660,00	46,79
3.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	59.070.114,00	152.064.482,00	(92.994.368,00)	(61,15)
	JUMLAH	**374.874.497,50**	**365.408.205,50**	**9.466.292,00**	**2,59**

b) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha

Tabel V.242 di atas menunjukan Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp72.083.225,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.506.500,00 atau 5,11% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp68.576.725,00, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.244 berikut:

Tabel V.244 Beban Penyisihan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	72.083.225,00	68.576.725,00	3.506.500,00	5,11
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-
	JUMLAH	**72.083.225,00**	**68.576.725,00**	**3.506.500,00**	**5,11**

c) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel V.242 di atas menunjukan Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Nihil, sedangkan untuk TA 2022

adalah sebesar Rp108.929.470,70, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.245 berikut:

Tabel V.245 Beban Penyisihan Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	108.929.470,70	(108.929.470,70)	(100,00)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	-
	JUMLAH	**-**	**108.929.470,70**	**(108.929.470,70)**	**(100,00)**

3) Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel V.240 di atas menunjukan Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp118.984.273,74, nilai beban tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp155.668.734,94 atau 424,35% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp36.684.461,20, dengan rincian sebagaimana Tabel V.246 berikut.

Tabel V.246 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	78.628.061,84	(20.058.600,00)	98.686.661,84	(491,99)
2.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	40.356.211,90	5.374.138,80	34.982.073,10	650,93
3.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	(22.000.000,00)	22.000.000,00	(100,00)
	JUMLAH	**118.984.273,74**	**(36.684.461,20)**	**155.668.734,94**	**(424,35)**

Kenaikan Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD merupakan Penyisihan Piutang pada RSUD KRT Setjonegoro.

4) Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Tabel V.240 di atas menunjukan Beban Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp10.100.000,00 berupa penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang dana bergulir, sedangkan pada TA 2022 nilai Beban Penyisihan Piutang Lainnya adalah Nihil.

D.2.1. Beban Lain-lain

Tabel V.213 di atas menunjukkan Beban Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp179.947.340,00, nilai beban tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.989.123.837,64 atau 91,70% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp2.169.071.177,64. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.247 berikut.

Tabel V.247 Beban Lain - lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Lain-lain	-	209.915.527,00	(209.915.527,00)	(100,00)
2.	Beban Penurunan Nilai Investasi	-	1.959.155.650,64	(1.959.155.650,64)	(100,00)
3.	Beban Barang Ekstra Komptable	179.947.340,00	-	179.947.340,00	-
	JUMLAH	**179.947.340,00**	**2.169.071.177,64**	**(1.989.123.837,64)**	**(91,70)**

1) Beban Lain-lain

Tabel V.247 di atas menunjukkan Beban Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Nihil, sedangkan pada TA 2022 sebesar Rp209.915.527,00.

2) Beban Penurunan Nilai Investasi

Tabel V.247 di atas menunjukkan Beban Penurunan Nilai Investasi Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Nihil, nilai beban tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.959.155.650,64 atau 100,00% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.959.155.650,64. Penurunan tersebut karena terdapat koreksi atas penurunan nilai investasi TA 2023 pada PD. Bhakti Husada dan PT. Tambi.

3) Beban Barang Ekstra Komptable

Tabel V.247 di atas menunjukkan Beban Barang Ekstra Komptable Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp179.947.340,00 berupa beban barang ekstra komptable peralatan dan mesin sebesar Rp167.147.340,00 dan beban barang ekstra komptable gedung dan bangunan sebesar Rp12.800.000,00, sedangkan pada TA 2022 adalah Nihil.

D.3. SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI

Surplus/(Defisit) dari Operasi merupakan selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan Surplus Dari Operasi sebesar Rp210.311.360.686,95, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp69.662.016.963,66 atau 49,53% dibandingkan dengan TA 2022 yang juga mendapatkan surplus sebesar Rp140.649.343.723,29, dengan perhitungan sebagaimana Tabel V.248 berikut.

Tabel V.248 Surplus/(Defisit) Dari Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan - LO	1.915.174.743.853,02	1.786.796.904.631,75	128.377.839.221,27	7,18
2.	Beban	1.704.863.383.166,07	1.646.147.560.908,46	58.715.822.257,61	3,57
Surplus/(Defisit)=1-2		**210.311.360.686,95**	**140.649.343.723,29**	**69.662.016.963,66**	**49,53**

D.4. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebesar Rp156.127.252.854,66. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan defisit sebesar Rp147.159.512.737,11 atau 1.640,99% dibandingkan dengan TA 2022 yang juga mendapatkan defisit sebesar Rp8.967.740.117,55, dengan uraian sebagaimana Tabel V.249 berikut.

Tabel V.249 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	661.982.003,00	4.380.500,00	657.601.503,00	15.012,02
2.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	24.370.465.388,00	-	24.370.465.388,00	100,00
3.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	(45.457.820.106,24)	(3.354.336.883,03)	(42.103.483.223,21)	1.255,20
4.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(135.701.880.139,42)	(5.617.783.734,52)	(130.084.096.404,90)	2.315,58
	Jumlah	**(156.127.252.854,66)**	**(8.967.740.117,55)**	**(147.159.512.737,11)**	**1.640,99**

D.4.a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Tabel V.249 diatas menunjukkan Surplus Penjualan Aset Non Lancar TA 2023 adalah sebesar Rp661.982.003,00, nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp657.601.503,00 atau 15.012,02% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp4.380.500,00. Kenaikan signifikan tersebut karena terdapat pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan cara penjualan pada TA 2023 berdasarkan SK Lelang. Surplus Penjualan Aset Non Lancar berasal dari 20 entitas dengan rincian sebagaimana Tabel V.250 berikut:

Tabel V.250 Surplus Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

(Rp)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	RSUD	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
2.	DPMPTSP	815.000,00	-	815.000,00	-
3.	Disdagkop UKM	305.000,00	-	305.000,00	-
4.	Arpusda	-	2.905.500,00	(2.905.500,00)	(100,00)
5.	Kel Sambek	700.000,00	-	700.000,00	-
6.	Kel Kertek	15.000,00	-	15.000,00	-
7.	Kel Wringinanom	23.000,00	-	23.000,00	-
8.	Kec Mojotengah	344.500,00	-	344.500,00	-
9.	Kel Kalibeber	18.500,00	-	18.500,00	-
10.	Kel Mudal	63.500,00	-	63.500,00	-
11.	Kel Andongsili	30.000,00	-	30.000,00	-
12.	Kec Leksono	-	25.000,00	(25.000,00)	(100,00)
13.	Kec Kalikajar	200.000,00	-	200.000,00	-
14.	Kel Kaliwiro	5.000,00	-	5.000,00	-
15.	Kec Wadaslintang	986.527,00	-	986.527,00	-
16.	Kel Wadaslintang	82.000,00	-	82.000,00	-
17.	Kec Sukoharjo	84.666,00	-	84.666,00	-
18.	Inspektorat	1.530.000,00	-	1.530.000,00	-
19.	BPPKAD	646.596.310,00	1.450.000,00	645.146.310,00	44.492,85
20.	BKD	183.000,00	-	183.000,00	-
	Jumlah	**661.982.003,00**	**4.380.500,00**	**657.601.503,00**	**15.012,02**

D.4.b. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tabel V.249 diatas menunjukkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp24.370.465.388,00, mengalami kenaikan sebesar Rp24.370.465.388,00 atau 100% dibandingkan TA 2022 sebesar Nihil. Kenaikan signifikan tersebut karena terdapat inventarisasi Barang Milik Daerah pada TA 2023 berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dilihat pada Tabel V.251 berikut:

Tabel V.251 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

(Rp)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dikpora	271.509.612,00	-	271.509.612,00	-
2.	Pusk Kec Kertek 1	4.816.108,00	-	4.816.108,00	-
3.	Pusk Kec Selomerto 1	38.446.215,00	-	38.446.215,00	-
4.	Pusk Kec Leksono 1	19.881.321,00	-	19.881.321,00	-
5.	Pusk Kec Watumalang	844.291,00	-	844.291,00	-
6.	Pusk Kec Mojotengah	2.021.927,00	-	2.021.927,00	-
7.	Pusk Kec Garung	2.152.408,00	-	2.152.408,00	-
8.	Pusk Kec Kejajar 1	28.372,00	-	28.372,00	-
9.	Pusk Kec Kalikajar 1	2.476.234,00	-	2.476.234,00	-
10.	Pusk Kec Sapuran	4.241.579,00	-	4.241.579,00	-
11.	Pusk Kec Kepil 1	2.798.300,00	-	2.798.300,00	-
12.	Pusk Kec Kaliwiro	16.541.120,00	-	16.541.120,00	-
13.	Pusk Kec Kertek 2	1.069.842,00	-	1.069.842,00	-
14.	Pusk Kec Kalikajar 2	6.510.637,00	-	6.510.637,00	-
15.	Pusk Kec Kepil 2	770.693,00	-	770.693,00	-
16.	Pusk Kec Sukoharjo 2	4.000.849,00	-	4.000.849,00	-
17.	DLH	171.629.335,00	-	171.629.335,00	-
18.	Disparbud	23.247.434.607,00	-	23.247.434.607,00	-
19.	Kec Wonosobo	128.289.600,00	-	128.289.600,00	-

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
20.	Kel Wonosobo Barat	16.328.101,00	-	16.328.101,00	-
21.	Kel Pagerkukuh	186.429.075,00	-	186.429.075,00	-
22.	Kel Tawangsari	23.294.416,00	-	23.294.416,00	-
23.	Kel Kertek	27.374.495,00	-	27.374.495,00	-
24.	Kec Selomerto	61.100.350,00	-	61.100.350,00	-
25.	Kel Kalibeber	4.619.324,00	-	4.619.324,00	-
26.	Kec Garung	3.386.979,00	-	3.386.979,00	-
27.	Kec Kejajar	80.294.038,00	-	80.294.038,00	-
28.	Kec Sapuran	1.547.598,00	-	1.547.598,00	-
29.	Kel Kepil	338.070,00	-	338.070,00	-
30.	Kec Wadaslintang	35.867.693,00	-	35.867.693,00	-
31.	BKD	4.422.199,00	-	4.422.199,00	-
	Jumlah	**24.370.465.388,00**	**-**	**24.370.465.388,00**	**-**

D.4.c. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Tabel V.249 diatas menunjukkan Defisit Penjualan Aset Non Lancar TA 2023 adalah sebesar Rp45.457.820.106,24, nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp42.103.483.223,21 atau 1.255,20% dibandingkan dengan Defisit Penjualan Aset Non Lancar TA 2022 sebesar Rp3.354.336.883,03. Kenaikan signifikan tersebut karena terdapat penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil inventarisasi maupun koreksi penghapusan aset rusak berat/usang pada TA 2023. Defisit Penjualan Aset Non Lancar berasal dari beberapa Aset Non Lancar dengan rincian sebagaimana Tabel V.252 berikut:

Tabel V.252 Defisit Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dikpora	4.945.039.175,20	249.749.091,00	4.695.290.084,20	1.880,00
2.	Dinkes	2.806.667,00	110.071.027,00	(107.264.360,00)	(97,45)
3.	Pusk Kec Selomerto 1	32.309.090,00	-	32.309.090,00	100,00
4.	Pusk Kec Kejajar 1	159.079.209,00	113.201.032,00	45.878.177,00	40,53
5.	Pusk Kec Kalikajar 1	527.937.276,00	-	527.937.276,00	-
6.	Pusk Kec Kaliwiro	281.776.429,00	-	281.776.429,00	-
7.	Pusk Kec Kalibawang	115.051.991,00	-	115.051.991,00	-
8.	Pusk Kec Kejajar 2	33.730.125,00	-	33.730.125,00	-
9.	DPUPR	19.882.192.352,00	-	19.882.192.352,00	-
10.	Disperkimhub	18.574.160,86	-	18.574.160,86	-
11.	Arpusda	-	34.146.480,00	(34.146.480,00)	(100,00)
12.	BPBD	1.540.000,00	-	1.540.000,00	-
13.	Disnakerintrans	546.260.236,00	-	546.260.236,00	-
14.	DLH	2.041.592.132,00	-	2.041.592.132,00	-
15.	DPPKBPPPA	19.776.458,00	-	19.776.458,00	-
16.	DPMPTSP	334.008,00	-	334.008,00	-
17.	Disparbud	319.255.536,00	726.891.017,03	(407.635.481,03)	(56,08)
18.	Dispaperkan	787.967.745,00	-	787.967.745,00	-
19.	Disdagkop UKM	-	1.912.382.000,00	(1.912.382.000,00)	(100,00)
20.	Bag Umum	-	8.316.977,00	(8.316.977,00)	(100,00)
21.	Kec Wonosobo	619.946.872,00	-	619.946.872,00	-
22.	Kel Wonosobo Timur	92.105.392,00	-	92.105.392,00	-
23.	Kel Sambek	2.962.500,00	-	2.962.500,00	-
24.	Kel Pagerkukuh	73.277.689,00	-	73.277.689,00	-
25.	Kel Rojoimo	5.426.667,00	-	5.426.667,00	-
26.	Kel Jaraksari	51.051.000,00	-	51.051.000,00	-
27.	Kel Bumireso	829.577.359,46	-	829.577.359,46	-
28.	Kel Kalianget	2.098.000.000,00	-	2.098.000.000,00	-
29.	Kec Kertek	421.034.937,00	-	421.034.937,00	-
30.	Kel Kertek	41.659.120,00	-	41.659.120,00	-
31.	Kel Selomerto	17.394.736,00	-	17.394.736,00	-
32.	Kec Leksono	-	711.667,00	(711.667,00)	(100,00)
33.	Kel Leksono	46.877.631,00	-	46.877.631,00	-
34.	Kec Watumalang	335.036.316,00	-	335.036.316,00	-
35.	Kec Mojotengah	168.018.837,00	-	168.018.837,00	-
36.	Kel Kalibeber	110.415.783,00	-	110.415.783,00	-
37.	Kel Mudal	2.633.667,00	-	2.633.667,00	-
38.	Kel Andongsili	44.302.675,00	-	44.302.675,00	-
39.	Kec Kalikajar	5.717.858,00	-	5.717.858,00	-
40.	Kec Sapuran	244.898.360,00	-	244.898.360,00	-

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
41.	Kec Kepil	1.097.699.779,00	45.394.534,00	1.052.305.245,00	2.318,13
42.	Kec Kaliwiro	93.364.731,72	-	93.364.731,72	-
43.	Kel Kaliwiro	309.518.931,00	-	309.518.931,00	-
44.	Kel Wadaslintang	1.423.125,00	-	1.423.125,00	-
45.	Kec Sukoharjo	170.088.242,00	-	170.088.242,00	-
46.	Inspektorat	1.820.934,00	-	1.820.934,00	-
47.	BPPKAD	8.828.265.394,00	-	8.828.265.394,00	-
48.	BKD	30.078.980,00	153.473.058,00	(123.394.078,00)	(80,40)
	Jumlah	**45.457.820.106,24**	**3.354.336.883,03**	**42.103.483.223,21**	**1.255,20**

D.4.d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tabel V.249 di atas menunjukkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp135.701.880.139,42, nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp130.084.096.404,90 atau 2.315,58% dibandingkan dengan TA 2022 yang juga mendapatkan Defisit sebesar Rp5.617.783.734,52. Kenaikan signifikan tersebut karena terdapat inventarisasi Barang Milik Daerah pada TA 2023 berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dilihat pada Tabel V.253 berikut:

Tabel V.253 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp) 2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dikpora	2.398.054.204,00	285.346.285,75	2.112.707.918,25	740,40
2.	Dinkes	-	254.825.501,00	(254.825.501,00)	(100,00)
3.	Pusk Kec Wonosobo 1	-	1.112.167,00	(1.112.167,00)	(100,00)
4.	Pusk Kec Selomerto 1	-	14.619.000,00	(14.619.000,00)	(100,00)
5.	Pusk Kec Watumalang	-	682.495,00	(682.495,00)	(100,00)
6.	Pusk Kec Garung	1.079.111,00	216.666,00	862.445,00	398,05
7.	Pusk Kec Kalikajar 1	-	520.000,00	(520.000,00)	(100,00)
8.	Pusk Kec Kepil 1	-	75.833,00	(75.833,00)	(100,00)
9.	Pusk Kec Sukoharjo 1	-	766.667,00	(766.667,00)	(100,00)
10.	Pusk Kec Wonosobo 2	-	239.452,00	(239.452,00)	(100,00)
11.	Pusk Kec Selomerto 2	171.596,00	275.000,00	(103.404,00)	(37,60)
12.	Pusk Kec Leksono 2	-	560.000,00	(560.000,00)	(100,00)
13.	Pusk Kec Kepil 2	-	32.211.468,31	(32.211.468,31)	(100,00)
14.	RSUD	50.941.309,00	6.098.997,00	44.842.312,00	735,24
15.	DPUPR	93.634.299.366,74	6.212.633.828,00	87.421.665.538,74	1.407,16
16.	Disperkimhub	3.906.258,00	1.517.931.611,00	(1.514.025.353,00)	(99,74)
17.	BPBD	12.162.130,00	-	12.162.130,00	-
18.	DLH	1.798.169.207,42	99.301.884,00	1.698.867.323,42	1.710,81
19.	DPPKBPPPA	-	47.895.000,00	(47.895.000,00)	(100,00)
20.	DPMPTSP	-	738.833,00	(738.833,00)	(100,00)
21.	Arpusda	-	66.505.000,00	(66.505.000,00)	(100,00)
22.	Disparbud	22.204.000.007,00	701.516.388,00	21.502.483.619,00	3.065,14
23.	Dispaperkan	60.539.266,00	261.310.000,00	(200.770.734,00)	(76,83)
24.	Disdagkop UKM	4.040.586.835,00	53.391.998,46	3.987.194.836,54	7.467,78
25.	Bag Umum	-	(79.175.511,00)	79.175.511,00	(100,00)
26.	Setwan	105.790.853,00	-	105.790.853,00	-
27.	Kecamatan Wonosobo	616.367.645,00	-	616.367.645,00	-
28.	Kel Wonosobo Barat	330.979.505,80	(169.466.725,00)	500.446.230,80	(295,31)
29.	Kel Wonosobo Timur	93.097.707,00	(124.779.918,00)	217.877.625,00	(174,61)
30.	Kel Jlamprang	370.860.208,00	(190.873.396,00)	561.733.604,00	(294,30)
31.	Kel Kejiwan	460.285.843,00	(257.706.535,00)	717.992.378,00	(278,61)
32.	Kel Sambek	241.450.466,00	(105.710.670,00)	347.161.136,00	(328,41)
33.	Kel Mlipak	175.005.502,00	(118.172.087,00)	293.177.589,00	(248,09)
34.	Kel Pagerkukuh	981.025.658,00	(401.408.971,00)	1.382.434.629,00	(344,40)
35.	Kel Rojoimo	429.069.784,00	(16.957.448,00)	446.027.232,00	(2.630,27)
36.	Kel Kramatan	93.390.944,00	(7.105.081,00)	100.496.025,00	(1.414,42)
37.	Kel Tawangsari	192.431.826,00	(75.926.207,00)	268.358.033,00	(353,45)
38.	Kel Jaraksari	762.639.858,00	(329.068.904,00)	1.091.708.762,00	(331,76)
39.	Kel Bumireso	484.336.177,00	(31.329.558,00)	515.665.735,00	(1.645,94)
40.	Kel Kalianget	524.880.882,00	(256.468.500,00)	781.349.382,00	(304,66)
41.	Kec Kertek	20.867.954,00	457.875,00	20.410.079,00	4.457,57
42.	Kel Kertek	123.267.342,00	(102.482.412,00)	225.749.754,00	(220,28)
43.	Kel Wringinanom	44.739.130,00	(46.271.725,00)	91.010.855,00	(196,69)
44.	Kec Selomerto	82.557.865,00	-	82.557.865,00	-

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
45.	Kel Selomerto	605.609.502,00	(100.465.636,00)	706.075.138,00	(702,80)
46.	Kel Wonorejo	363.378.428,00	-	363.378.428,00	-
47.	Kel Leksono	85.888.923,00	(76.343.585,00)	162.232.508,00	(212,50)
48.	Kec Watumalang	26.642.827,00	-	26.642.827,00	-
49.	Kel Wonoroto	121.378.164,00	(126.806.237,00)	248.184.401,00	(195,72)
50.	Kec Mojotengah	17.222.841,00	144.897.310,00	(127.674.469,00)	(88,11)
51.	Kel Kalibeber	315.241.711,00	(247.206.487,00)	562.448.198,00	(227,52)
52.	Kel Mudal	1.016.376.242,90	(135.840.035,00)	1.152.216.277,90	(848,22)
53.	Kel Andongsili	313.621.302,00	(174.987.002,00)	488.608.304,00	(279,23)
54.	Kel Garung	235.782.503,17	(111.673.999,00)	347.456.502,17	(311,13)
55.	Kel Kejajar	212.711.177,00	-	212.711.177,00	-
56.	Kec Kalikajar	68.983.577,00	-	68.983.577,00	-
57.	Kel Kalikajar	658.242.956,00	(456.799.864,00)	1.115.042.820,00	(244,10)
58.	Kel Sapuran	202.767.852,00	(64.249.285,00)	267.017.137,00	(415,60)
59.	Kel Kepil	210.666.868,00	(50.868.665,00)	261.535.533,00	(514,14)
60.	Kel Kaliwiro	127.185.034,39	(48.303.945,00)	175.488.979,39	(363,30)
61.	Kec Wadaslintang	47.952.787,00	-	47.952.787,00	-
62.	Kel Wadaslintang	595.909.689,00	(209.482.137,00)	805.391.826,00	(384,47)
63.	Kec Sukoharjo	3.800.967,00	-	3.800.967,00	-
64.	Inspektorat	7.854.445,00	-	7.854.445,00	-
65.	BAPPEDA	127.707.903,00	-	127.707.903,00	-
66.	BPPKAD	-	29.585.000,00	(29.585.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	**135.701.880.139,42**	**5.617.783.734,52**	**130.084.096.404,90**	**2.315,58**

D.5. SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa TA 2023 adalah sebesar Rp54.184.107.832,30 yang berasal dari Surplus dari Kegiatan Operasi ditambah Surplus dari Kegiatan Non Operasional. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp77.497.495.773,44 atau 58,85% dibandingkan dengan TA 2022 yang juga mendapatkan Surplus sebesar Rp131.681.603.605,74. Rincian Surplus Sebelum Pos Luar Biasa dapat dilihat pada Tabel V.254 berikut:

Tabel V.254 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Surplus/(Defisit) Dari Operasi	210.311.360.686,95	140.649.343.723,29	69.662.016.963,66	49,53
2.	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(156.127.252.854,66)	(8.967.740.117,55)	(147.159.512.737,11)	1.640,99
	Jumlah	**54.184.107.832,30**	**131.681.603.605,74**	**(77.497.495.773,44)**	**(58,85)**

D.6. SURPLUS/(DEFISIT) – LO

Surplus-LO TA 2023 adalah sebesar Rp54.184.107.832,30 dengan yang berasal dari Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa ditambah Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp77.497.495.773,44 atau 58,85% dibandingkan dengan TA 2022 yang juga mendapatkan Surplus sebesar Rp131.681.603.605,74 dengan perhitungan sebagaimana Tabel V.255 berikut:

Tabel V.255 Surplus/(Defisit) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2023	2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	54.184.107.832,30	131.681.603.605,74	(77.497.495.773,44)	(58,85)
2.	Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	-	-	-	-
	Surplus/(Defisit) - LO: 1+2	**54.184.107.832,30**	**131.681.603.605,74**	**(77.497.495.773,44)**	**(58,85)**

E. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan realisasi tahun 2022 yang merupakan konsolidasi dari Laporan Arus Kas Bendahara Umum Daerah (BUD), Laporan Arus Kas BLUD Puskesmas, Laporan Arus Kas BLUD RSUD, Laporan Arus Kas dari Dana BOS, dan Laporan Arus Kas Lainnya. Ringkasan Laporan Arus Kas disajikan sebagaimana Tabel V.256 berikut:

Tabel V.256 Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
A.	**Saldo Awal Kas**	**138.439.157.403,00**	**252.318.329.461,00**	**(113.879.172.058,00)**	**(45,13)**
	Arus/Aliran Kas Dari:				
1.	Aktivitas Operasi	280.194.223.476,91	273.350.395.370,00	6.843.828.106,91	2,50
2.	Aktivitas Investasi	(320.470.605.660,00)	(387.151.672.659,00)	66.681.066.999,00	(17,22)
3.	Aktivitas Pendanaan	10.100.000,00	22.000.000,00	(11.900.000,00)	(54,09)
4.	Aktivitas Transitoris	192.369.485,00	(99.894.769,00)	292.264.254,00	(292,57)
B.	**Kenaikan/(Penurunan) Kas (1+2+3+4)**	**(40.073.912.698,09)**	**(113.879.172.058,00)**	**73.805.259.359,91**	**(64,81)**
Saldo Akhir Kas (A+B)		**98.365.244.704,91**	**138.439.157.403,00**	**(40.073.912.698,09)**	**(28,95)**

E.1. Saldo Awal Kas

Saldo awal Kas TA 2023 merupakan saldo akhir Kas TA 2022 sebesar Rp138.439.157.403,00 dengan rincian lebih lanjut sebagaimana Tabel V.257 sebagai berikut:

Tabel V.257 Saldo Awal Kas TA 2023 dan 2022

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Kas di BUD	93.480.222.258,00	145.060.766.550,00	(51.580.544.292,00)	(35,56)
2.	Kas di BLUD RSUD	40.038.976.180,00	102.166.322.327,00	(62.127.346.147,00)	(60,81)
3.	Kas di BLUD Puskesmas	3.147.581.093,00	2.256.977.091,00	890.604.002,00	39,46
4.	Kas di Bendahara Penerimaan	26.771.800,00	14.053.000,00	12.718.800,00	90,51
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran	42.209.500,00	62.929.699,00	(20.720.199,00)	(32,93)
6.	Kas Lainnya	1.703.396.572,00	2.757.280.794,00	(1.053.884.222,00)	(38,22)
Jumlah Saldo Awal Kas		**138.439.157.403,00**	**252.318.329.461,00**	**(113.879.172.058,00)**	**(45,13)**

E.2. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Tabel V.241 diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2023 mengalami penurunan kas sebesar Rp40.073.912.968,09 yang berasal dari arus kas bersih Aktivitas Operasi, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi, arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan, dan arus kas bersih Aktivitas Transitoris, sedangkan pada TA 2022 juga mengalami penurunan Kas sebesar Rp113.879.172.058,00.

E.2.a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Tabel V.256 diatas menunjukkan bahwa Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp280.194.223.476,91 sedangkan pada TA 2022 adalah sebesar Rp273.350.395.370,00 dengan rincian sebagai berikut

		TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1)	Arus Kas Masuk	2.056.278.000.817,91	1.921.026.430.971,00
2)	Arus Kas Keluar	1.776.083.777.341,00	1.647.676.035.601,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1-2)	**280.194.223.476,91**	**273.350.395.370,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2023 menunjukkan angka yang positif yang berarti bahwa Pendapatan Operasional Pemerintah Kabupaten Wonosobo mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional, jika dibandingkan dengan TA 2022 terjadi kenaikan sebesar 2,50%.

E.2.a.1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp2.056.278.000.817,91 dibandingkan TA 2022 sebesar Rp1.921.026.430.971,00 mengalami kenaikan sebesar 7,04%, dengan rincian pada Tabel V.258 sebagai berikut.

Tabel V.258 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Penerimaan Pajak Daerah	65.448.626.748,00	59.953.607.231,00	5.495.019.517,00	9,17
2.	Penerimaan Retribusi Daerah	11.205.591.108,00	9.447.416.172,00	1.758.174.936,00	18,61
3.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.040.333.270,00	21.988.351.496,00	1.051.981.774,00	4,78
4.	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	166.361.920.051,91	173.390.622.923,00	(7.028.702.871,09)	(4,09)
5.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	36.777.428.277,00	39.228.649.450,00	(2.451.221.173,00)	(6,25)
6.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.159.463.211,00	4.459.088.779,00	(2.299.625.568,00)	(51,57)
7.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	832.084.548.325,00	790.688.710.540,00	41.395.837.785,00	5,24
8.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	463.806.105.588,00	340.511.021.925,00	123.295.083.663,00	36,21
9.	Penerimaan Dana Insentif Daerah	13.020.711.000,00	3.506.837.000,00	9.513.874.000,00	271,30
10.	Penerimaan Dana Desa	247.153.737.000,00	221.885.021.000,00	25.268.716.000,00	11,39
11.	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	123.940.726.171,00	121.815.108.966,00	2.125.617.205,00	1,74
12.	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	22.101.445.223,00	91.211.531.410,00	(69.110.086.187,00)	(75,77)
13.	Penerimaan Hibah	49.177.364.845,00	42.940.464.079,00	6.236.900.766,00	14,52
	Jumlah Arus Kas Masuk	**2.056.221.653.672,91**	**1.921.026.430.971,00**	**135.251.569.846,91**	**7,04**

E.2.a.2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp1.776.083.777.341,00 dibandingkan TA 2022 sebesar Rp1.647.676.035.601,00 mengalami kenaikan sebesar 7,79%, dengan rincian pada Tabel V.259 sebagai berikut:

Tabel V.259 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pembayaran Pegawai	813.687.908.377,00	749.466.368.775,00	64.221.539.602,00	8,57
2.	Pembayaran Barang	437.524.507.656,00	462.017.483.572,00	(24.492.975.916,00)	(5,30)
3.	Pembayaran Subsidi	638.215.332,00	227.138.667,00	411.076.665,00	180,98
4.	Pembayaran Hibah	136.542.227.583,00	81.490.740.096,00	55.051.487.487,00	67,56
5.	Pembayaran Bantuan Sosial	12.130.400.000,00	14.325.579.640,00	(2.195.179.640,00)	(15,32)
6.	Pembayaran Bantuan Keuangan	364.178.746.070,00	329.470.030.070,00	34.708.716.000,00	10,53
7.	Pembayaran Tak Terduga	4.741.409.823,00	3.893.057.940,00	848.351.883,00	21,79
8.	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.523.000.000,00	5.584.985.972,00	(61.985.972,00)	(1,11)
9.	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.117.362.500,00	1.200.650.869,00	(83.288.369,00)	(6,94)
	Jumlah Arus Kas Keluar	**1.776.083.777.341,00**	**1.647.676.035.601,00**	**128.407.741.740,00**	**7,79**

E.2.b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Tabel V.256 diatas menunjukkan bahwa Arus Kas

Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2023 adalah sebesar (Rp320.470.605.660,00) sedangkan pada TA 2022 adalah sebesar (Rp387.151.672.659,00) dengan rincian sebagai berikut:

		TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1)	Aus Masuk Kas	31.002.404.748,00	162.662.198,00
2)	Arus Kas Keluar	351.473.010.408,00	387.314.334.857,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1-3)	**(320.470.605.660,00)**	**(387.151.672.659,00)**

E.2.b.1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Kabupaten Wonosobo TA 2023 sebesar Rp31.002.404.748,00, sedangkan TA 2022 sebesar Rp162.662.198,00 dengan rincian sebagaimana tabel V.260 berikut:

Tabel V.260 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00	-
2.	Penjualan atas Peralatan dan mesin	76.102.524,00	2.770.000,00	73.332.524,00	2647,38
3.	Penjualan atas Gedung dan bangunan	-	132.794.198,00	(132.794.198,00)	(100,00)
4.	Penjualan Aset lainnya	926.302.224,00	27.098.000,00	899.204.224,00	3318,34
	Jumlah Arus Kas Masuk	**31.002.404.748,00**	**162.662.198,00**	**30.839.742.550,00**	**18.959,38**

E.2.b.2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp351.473.010.408,00 dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp387.314.334.857,00 mengalami penurunan sebesar 9,25% dengan rincian pada Tabel V.261 sebagai berikut:

Tabel V.261 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-
2.	Perolehan Tanah	-	12.055.630.009,00	(12.055.630.009,00)	(100,00)
3.	Perolehan peralatan dan Mesin	71.513.835.592,00	63.569.225.606,00	7.944.609.986,00	12,50
4.	Perolehan Gedung dan Bangunan	75.966.224.399,00	73.333.124.660,00	2.633.099.739,00	3,59
5.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	173.441.211.700,00	210.308.031.946,00	(36.866.820.246,00)	(17,53)
6.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.956.129.217,00	3.359.685.536,00	5.596.443.681,00	166,58
7.	Perolehan Aset Lainnya	24.697.500,00	811.517.100,00	(786.819.600,00)	(96,96)
8.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.570.912.000,00	8.877.120.000,00	(2.306.208.000,00)	(25,98)
	Jumlah Arus Kas Keluar	**351.473.010.408,00**	**387.314.334.857,00**	**(35.841.324.449,00)**	**(9,25)**

E.2.c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Tabel V.256 diatas menunjukkan bahwa Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 adalah sebesar Rp10.100.000,00 sedangkan pada TA 2022 adalah Rp22.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

		TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1)	Aus Masuk Kas	10.100.000,00	22.000.000,00
2)	Arus Kas Keluar	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (1-2)	**10.100.000,00**	**22.000.000,00**

E.2.c.1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah Rp10.100.000,00 sedangkan pada TA 2022 terdapat setoran Dana Bergulir sebesar Rp22.000.000,00, dengan rincian pada Tabel V.262 sebagai berikut.

Tabel V.262 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	10.100.000,00	22.000.000,00	(11.900.000,00)	(54,09)
	Jumlah Arus Kas Masuk	**10.100.000,00**	**22.000.000,00**	**(11.900.000,00)**	**(54,09)**

E.2.c.2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2023 dan 2022 tidak terdapat Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan.

E.2.d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2023 adalah sebesar Rp192.369.485,00 dibandingkan TA 2022 adalah sebesar (Rp99.894.769,00) mengalami kenaikan signifikan sebesar 292,57% yang disebabkan antara lain adanya setoran pengembalian atas temuan Inspektorat pada Belanja Dana BOS sekolah Negeri TA 2021 yang dikembalikan ke Kas Daerah pada TA 2023. Adapun perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris dapat dijelaskan sebagai berikut.

		TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1)	Arus Masuk Kas	117.432.432.939,41	123.824.336.510,00
2)	Arus Kas Keluar	117.240.063.454,41	123.924.231.279,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (1-2)	**192.369.485,00**	**(99.894.769,00)**

E.2.d.1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp117.432.432.939,41 dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp123.824.336.510,00 mengalami penurunan sebesar 5,16% dengan rincian pada Tabel V.263 sebagai berikut.

Tabel V.263 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	117.391.512.088,41	123.686.687.388,00	(6.295.175.299,59)	(5,09)
2.	Kiriman Uang Masuk	38.392.491,00	137.649.122,00	(99.256.631,00)	(72,11)
3.	Penerimaan Koreksi	2.528.360,00	-	2.528.360,00	-
	Jumlah Arus Kas Masuk	**117.432.432.939,41**	**123.824.336.510,00**	**(6.391.903.570,59)**	**(5,16)**

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.263 diatas menunjukkan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat Kiriman Uang Masuk sebesar Rp38.392.491,00 merupakan saldo bank bendahara pengeluaran sekolah negeri dan saldo kas Penanganan Stunting Wonosobo per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Rekening	Uraian	(dalam Rupiah)	Keterangan
1	Bank Jateng 3104112446	SD Negeri Wringinanom (BOSDA)	75.000,00	aktif
2	Bank Jateng 3023421452	SD Negeri 2 Rojoimo (BOSDA)	1,00	aktif
3	Bank Jateng 3171029812	TK Negeri Pembina Selomerto (BOSDA)	19.212,00	aktif
4	Bank Jateng 3023056436	SD Negeri 1 Kalibening	16.544,00	sudah ditutup tgl 24 januari 2024
5	Bank Jateng 3155010711	SMP N 10 Satap Wadaslintang	10.000,00	aktif
6	Bank Jateng 3023211067	TK Negeri Pembina Selomerto	823,00	aktif
7	Bank Jateng 3104076717	TK Negeri Pembina Sapuran	54.321,00	aktif
8	Bank Jateng 3023418320	TK Negeri Pembina Wonosobo	481.279,00	aktif
9	Bank Jateng 3104099512	TK Negeri Pembina Sapuran	133.311,00	aktif
10	Bank Jateng 3023357061	TK Negeri Pembina Wonosobo	100.000,00	aktif
11	Bank Jateng 1023012096	Penanganan Stunting Wonosobo	37.502.000,00	aktif
			38.392.491,00	

Berdasarkan Tabel V.263 terdapat Penerimaan koreksi sebesar Rp2.528.360,00 yang merupakan Utang PFK-Iuran Jaminan Kesehatan per 31 Desember 2022 pada Puskesmas Garung yang telah dikoreksi ke Utang Belanja Pegawai-Iuran Jaminan Kesehatan dan pada tahun 2023 telah dibayarkan melalui Belanja Pegawai BLUD.

E.2.d.2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp117.240.063.454,41 dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp123.924.231.279,00 mengalami penurunan sebesar 5,39%, dengan rincian pada Tabel V.264 sebagai berikut.

Tabel V.264 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	117.099.154.682,41	123.874.543.291,00	(6.775.388.608,59)	(5,47)
2.	Kiriman Uang Keluar	138.408.446,00	21.931.528,00	116.426.918,00	531,09
3.	Pengeluaran Koreksi	2.500.326,00	27.756.460,00	(25.256.134,00)	(90,99)
	Jumlah Arus Kas Keluar	**117.240.063.454,41**	**123.924.231.279,00**	**(6.684.167.824,59)**	**(5,39)**

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.264 di atas menunjukkan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat Kiriman Uang Keluar per 31 Desember 2023 sebesar Rp138.408.446,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Setoran pengembalian temuan Inspektorat atas pengelolaan Dana BOS Tahun 2021 pada Sekolah Negeri dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	(Dalam Rupiah)	Keterangan
1.	SD Negeri 1 Pecekelan Sapuran	1.000.000,00	Disetorkan ke Kasda tgl 24 Januari 2023
2.	SD Negeri 3 Banyumudal Sapuran	95.753.000,00	Disetorkan ke Kasda tgl 24 Januari 2023
3.	SD Negeri 2 Tegalombo Kalikajar	18.678.000,00	Disetorkan ke Kasda tgl 24 Januari 2023
4.	SMP Negeri 2 Kalibawang	245.000,00	Disetorkan ke Kasda tgl 24 Januari 2023
5.	SD Negeri Kramatan	685.000,00	Disetorkan ke Kasda tgl 24 Januari 2023
6.	SD Negeri 1 Kepil	3.450.000,00	Disetorkan ke Kasda tgl 30 Januari 2023
7.	SMP Negeri 3 Kalikajar	791.400,00	Disetorkan ke Kasda tgl 24 Januari 2023
8.	SMP Negeri 1 Selomerto	768.000,00	Disetorkan ke Kasda tgl 24 Januari 2023
9.	SMP Negeri 2 Leksono	1.161.760,00	Disetorkan ke Kasda tgl 24 Januari 2023
10.	SMP Negeri 4 kaliwiro	3.000.000,00	Disetorkan ke Kasda tgl 25 Januari 2023
11.	SMP Negeri 1 Kejajar	1.765.000,00	Disetorkan ke Kasda tgl 13 April 2023
		127.297.160,00	

b) Saldo Bank pada Bendahara yang ada penetapannya (SK Bupati) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.111.286,00, telah bersaldo Nihil per 31 Desember 2023

No	No. Rekening	Uraian	(Dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Bank Jateng 3023339047	SMPN 4 Satap Sukoharjo (Rutin)	-	Saldo Per 31 Desember 2022
2.	Bank Jateng 3155030983	SMPN4 Satap Kalibawang (Rutin)	27.374,00	Saldo Per 31 Desember 2022
3.	Bank Jateng 3023229110	SMPN 4 Satap Watumalang (Rutin)	22.587,00	Saldo Per 31 Desember 2022
4.	Bank Jateng 3104084515	SMPN 6 Satap Kepil Rutin (Rutin)	118.231,00	Saldo Per 31 Desember 2022
5.	Bank Jateng 3104060322	SMPN 3 Satu Atap Sapuran (Rutin)	-	Saldo Per 31 Desember 2022
6.	Bank Jateng 3023334959	SMPN 6 Satap Kaliwiro	144.600,00	Saldo Per 31 Desember 2022
7.	Bank Jateng 3104092801	SMPN 5 Satu Atap Klkajar (Rutin)	62.606,00	Saldo Per 31 Desember 2022
8.	Bank Jateng 3023020920	Bend Pengel SMPN 9 Satap Wdslt (Rutin)	214.389,00	Saldo Per 31 Desember 2022
9.	Bank Jateng 3023256036	SMPN 6 Satap Watumalang Rutin (Rutin)	149.656,00	Saldo Per 31 Desember 2022
10.	Bank Jateng 3155010711	SMPN 10 Satap Wdltg (Rutin)	18.490,00	Saldo Per 31 Desember 2022
11.	Bank Jateng 3023061910	SMPN 7 Satap Kepil (Rutin)	37.536,00	Saldo Per 31 Desember 2022
12.	Bank Jateng 3104083543	SMPN 5 Satap Sapuran (Rutin)	310.256,00	Saldo Per 31 Desember 2022
13.	Bank Jateng 3155010940	SMPN Satu Atap Kalibawang (Rutin)	12.591,00	Saldo Per 31 Desember 2022
14.	Bank Jateng 3023397292	SMPN 7 Satap Kaliwiro	9.779.093,00	Saldo Per 31 Desember 2022
15.	Bank Jateng 3023353490	SMPN 3 Satap Kejajar	50.220,00	Saldo Per 31 Desember 2022
16.	Bank Jateng 3023354941	SMPN 5 Satuatap Sukoharjo	100.000,00	Saldo Per 31 Desember 2022
17.	Bank Jateng 3023321075	TK Negeri Pembina Wonosobo	6.134,00	Saldo Per 31 Desember 2022
18.	Bank Jateng 3023211067	TK Negeri Pembina Selomerto	57.523,00	Saldo Per 31 Desember 2022
			11.111.286,00	

Adapun koreksi keluar pada arus kas keluar pada aktivitas transitoris sebesar Rp2.500.326,00, merupakan setoran pengembalian sisa Dana BOS SD Negeri Bendungan Kaliwiro Tahun Anggaran 2022 ke Kas Negara.

E.3. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas TA 2023 adalah sebesar Rp98.365.244.704,91 dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp138.439.157.403,00 mengalami penurunan sebesar 28,95% dengan rincian lebih lanjut sebagaimana Tabel V.265 berikut:

Tabel V.265 Saldo Akhir Kas untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
a.	Kas di Kas Daerah	83.309.803.483,00	93.480.222.258,00	-10.170.418.775,00	(10,88)
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	110.807.216,00	26.771.800,00	84.035.416,00	(313,90)
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	43.113.566,00	42.209.500,00	904.066,00	(2,14)
d.	Kas di BLUD	10.150.848.398,91	43.186.557.273,00	-33.035.708.874,09	(76,5)
e	Kas Dana BOS	1.014.029.022,00	-	1.014.029.022,00	-
f.	Kas Lainnya	3.736.643.019,00	1.703.396.572,00	2.033.246.447,00	119,36
	Jumlah Saldo Akhir Kas	**98.365.244.704,91**	**138.439.157.403,00**	**(40.073.912.698,09)**	**(28,95)**

E.3.a Kas di Kas Daerah

Tabel V.265 menunjukkan Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.309.803.483,00 yang ditempatkan pada Bank Jateng nomor rekening 1-023-00001-9.

E.3.b Kas di Bendahara Penerimaan

Tabel V.265 menunjukkan saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp110.807.216,00, saldo kas tersebut berada di beberapa Entitas dengan rincian pada Tabel V.251 sebagai berikut.

Tabel V.266 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Disparbud	68.971.600,00	26.311.800,00	42.659.800,00	162,13
2.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	250.000,00	210.000,00	40.000,00	19,05
3.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
4.	BPPKAD	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(100,00)
5.	Dinas Perkimhub	881.700,00	0,00	881.700,00	-
6.	Disdagkop	12.453.916,00	0,00	12.453.916,00	-
7.	Kelurahan Bumireso	28.250.000,00	0,00	28.250.000,00	-
	Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan	**110.807.216,00**	**26.771.800,00**	**84.035.416,00**	**313,90**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp110.807.216,00 telah disetorkan ke RK UD pada TA 2024 dengan rincian dibawah ini:

No	Entitas	Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
1.	Disparbud	Setor ke Kas Daerah tanggal 03/01/2024	68.971.600,00
2.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Setor ke Kas Daerah tanggal 02/01/2024	250.000,00
3.	Dinas Perkimhub	Setor ke Kas Daerah tanggal 02/01/2024	881.700,00
4.	Disdagkop	Setor ke Kas Daerah tanggal 04/01/2024	12.453.916,00
5.	Kelurahan Bumireso	Setor ke Kas Daerah tanggal 04/01/2024	28.250.000,00
			110.807.216,00

E.3.c Kas di Bendahara Pengeluaran

Tabel V.265 menunjukkan saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.113.566,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.267 berikut :

Tabel V.267 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran	43.113.566,00	37.177.000,00	5.936.566,00	15,97
2.	PFK Yang Belum Disetor	-	-	-	-
3.	Pajak Daerah Yang Belum Disetor	-	5.032.500,00	(5.032.500,00)	(100,00)
	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	**43.113.566,00**	**42.209.500,00**	**904.066,00**	**2,14**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp43.113.566,00 telah disetorkan ke RKUD pada TA 2024 dengan rincian dibawah ini:

No	Entitas	Uraian	(Dalam Rupiah)
1.	Puskesmas Leksono 1 –Dinkes	Setor ke Kas Daerah tanggal 24/01/2024	1.152.983,00
2.	Puskesmas Kalibawang- Dinkes	Setor ke Kas Daerah tanggal 04/01/2024	2.398.933,00
3.	Sekretariat DPRD	Setor ke Kas Daerah tanggal 11/01/2024	39.561.650,00
			43.113.566,00

Sedangkan Pajak Daerah yang Belum Disetor sampai dengan 31 Desember 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.032.500,00, telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 19 Mei 2023.

E.3.d Kas di BLUD

Tabel V.265 menunjukkan saldo Kas di BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.150.848.398,91 dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

E.3.d.1) Kas di BLUD RSUD

Saldo Kas di BLUD RSUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.472.642.242,91 merupakan saldo kas pada RSUD KRT Setjonegoro per 31 Desember 2023 berupa uang yang masih di Bendahara Penerimaan sebesar Rp45.119.145,00 dan yang ditempatkan pada dua bank yaitu:

	Uraian		Nilai (Rp)
1.	Bank Jateng No Rek: 1.023.004.174	:	4.460.872.712,00
2.	BRI No Rek: 0112.01.000470.30.7	:	966.650.385,91
			5.427.523.097,91

E.3.d.2) Kas di BLUD Puskesmas

Saldo Kas di BLUD Puskesmas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.678.206.156,00 berupa Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas

sebesar Rp11.228.000,00 dan pada Rekening Bank BLUD sebesar Rp4.666.978.156,00. Adapun rincian Kas Di BLUD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	(Dalam Rupiah)
1.	Puskesmas Wonosobo 1	530.871.718,00
2.	Puskesmas Kertek 1	111.204.717,00
3.	Puskesmas Selomerto 1	468.194.019,00
4.	Puskesmas Leksono 1	133.089.528,00
5.	Puskesmas Watumalang	177.013.413,00
6.	Puskesmas Mojotengah	641.385.283,00
7.	Puskesmas Garung	176.545.845,00
8.	Puskesmas Kejajar 1	64.758.642,00
9.	Puskesmas Kalikajar 1	11.243.826,00
10.	Puskesmas Sapuran	472.418.147,00
11.	Puskesmas Kepil 1	238.042.709,00
12.	Puskesmas Kaliwiro	104.911.135,00
13.	Puskesmas Wadaslintang 1	195.334.680,00
14.	Puskesmas Sukoharjo 1	50.179.881,00
15.	Puskesmas Kalibawang	99.913.947,00
16.	Puskesmas Wonosobo 2	115.407.695,00
17.	Puskesmas Kertek 2	374.146.385,00
18.	Puskesmas Selomerto 2	50.770.429,00
19.	Puskesmas Leksono 2	75.649.035,00
20.	Puskesmas Kejajar 2	20.090.544,00
21.	Puskesmas Kalikajar 2	197.432.002,00
22.	Puskesmas Kepil 2	137.637.422,00
23.	Puskesmas Wadaslintang 2	105.644.119,00
24.	Puskesmas Sukoharjo 2	126.321.035,00
		4.678.206.156,00

E.3.e Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.014.029.022,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

		(dalam Rupiah)
Kas Dana BOS TA 2023		
Saldo Kas Dana BOS SD	:	529.743.633,00
Saldo Kas Dana BOS SMP	:	484.285.389,00
		1.014.029.022,00

E.3.f Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 adalah sebesar Rp3.736.643.019,00 berupa Kas Lain-lain yang terdiri dari:

a) Saldo Bank Kas per 31 Desember 2023 pada Sekolah Negeri sebesar Rp910.491,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Rekening	Uraian	(dalam Rupiah)
1.	Bank Jateng 3023421452	SD Negeri 2 Rojoimo (BOSDA)	1,00
2.	Bank Jateng 3104112446	SD Negeri Wringinanom (BOSDA)	75.000,00
3.	Bank Jateng 3171029812	TK N Pembina Selomerto (BOSDA)	19.212,00
4.	Bank Jateng 3155010711	SMPN 10 Satap Wdltg (Rutin)	10.000,00
5.	Bank Jateng 3023056436	SD Negeri 1 Kalibening	16.544,00
6.	Bank Jateng 3023211067	TK Negeri Pembina Selomerto	823,00
7.	Bank Jateng 3104076717	TK Negeri Pembina Sapuran	54.321,00
8.	Bank Jateng 3023418320	TK Negeri Pembina Wonosobo	481,279.00
9.	Bank Jateng 3104099512	TK Negeri Pembina Sapuran	133,311.00
10.	Bank Jateng 3023357061	TK Negeri Pembina Wonosobo	100.000,00
11.	Bank Jateng 1023003470	TK Negeri Pembina Sapuran	20.000,00
			910.491,00

b) Saldo Kas UPTD SKB Wonosobo sebesar Rp2.455.000,00 Nomor rekening bank jateng 3023358301 yang merupakan sisa kas dari dana BOP Kesetaraan.

c) Saldo Kas TK Negeri Pembina Selomerto sebesar Rp20.200,00 nomor rekening Bank Jateng 20349147 yang merupakan sisa kas dari Dana BOP PAUD.

d) Saldo Kas Dana BOP Kesetaraan pada PKBM Bergema sebesar Rp37.400,00.

e) Saldo Kas Dana BOP PAUD swasta sebesar Rp891.638,00 yang merupakan sisa kas dari dana BOP PAUD dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Rekening	Uraian	(Dalam Rupiah)
1.	3104100260	KB Tunas Mulia	121.878,00
2.	3171020408	TK Aisyiyah Leksono	7.500,00
3.	3023356758	TK Islam Al-Fututhiyah	324.000,00
4.	3023356901	TK Pertiwi Mudal	162.000,00
5.	3104099571	KB Aisyiyah Azzahra	3.962,00
6.	3104099326	TK Aisyiyah Sapuran	200,00
7.	3104099580	TK Pertiwi 2 Pecekelan	4.778,00
8.	3171021340	TK Pertiwi 1 Kalierang	1.200,00
9.	3171021234	TK Pertiwi Semayu	780,00
10.	3171021412	TK Pertiwi Wilayu	840,00
11.	3171019892	TK Pertiwi 1 Tlogo	44.000,00
12.	3171019779	TK Quraniyah Suroyudan	20.000,00
13.	3171019922	TK Setyarini Pucungwetan	50.000,00
14.	3023355255	TK Al-Madina	120.000,00
15.	3023356286	TK IT Insan Mulia	30.500,00
			891.638,00

f) Saldo Kas BOK per 31 Desember 2023 pada Puskesmas berupa saldo bank yang disimpan di Bank BNI Cabang Wonosobo dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	(Dalam Rupiah)
1.	Puskesmas Wonosobo 1	143.958.716,00
2.	Puskesmas Kertek 1	174.040.070,00
3.	Puskesmas Selomerto 1	160.140.358,00
4.	Puskesmas Leksono 1	227.987.586,00
5.	Puskesmas Watumalang	241.360.255,00
6.	Puskesmas Mojotengah	56.097.054,00
7.	Puskesmas Garung	43.683.386,00
8.	Puskesmas Kejajar 1	127.281.930,00
9.	Puskesmas Kalikajar 1	93.375.180,00
10.	Puskesmas Sapuran	59.437.745,00
11.	Puskesmas Kepil 1	86.178.872,00
12.	Puskesmas Kaliwiro	223.792.688,00
13.	Puskesmas Wadaslintang 1	64.672.668,00
14.	Puskesmas Sukoharjo 1	171.184.192,00
15.	Puskesmas Kalibawang	137.439.199,00
16.	Puskesmas Wonosobo 2	248.700.831,00
17.	Puskesmas Kertek 2	170.868.728,00
18.	Puskesmas Selomerto 2	122.512.919,00
19.	Puskesmas Leksono 2	37.219.398,00
20.	Puskesmas Kejajar 2	255.134.169,00
21.	Puskesmas Kalikajar 2	157.500.669,00
22.	Puskesmas Kepil 2	183.111.401,00
23.	Puskesmas Wadaslintang 2	56.809.406,00
24.	Puskesmas Sukoharjo 2	110.443.109,00
		3.352.930.529,00

g) Saldo Kas Penanganan Stunting Wonosobo per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.502.000,00 nomor rekening Bank Jateng 1023012096, hal ini berdasarkan SK Bupati Nomor: 978.5/330/2023 tentang penunjukan pengelola rekening penghimpunan bantuan yang bersumber dari masyarakat untuk percepatan penanganan stunting.

h) Saldo Rekening Penampungan Gaji per 31 Desember 2023 sebesar Rp301.119.529,00 nomor rekening Bank Jateng 1023001531 yang merupakan penampungan potongan JKN 1 % dari tambahan penghasilan dan tunjangan penghasilan guru, yang pada tanggal 28 Februari 2024 dan 01 April 2024 masing-masing senilai Rp262.445.373,00 dan Rp3.787.730,00 telah disetorkan ke BPJS Kesehatan. Sedangkan sisa sebesar Rp34.886.426,00 masih di rekening penampungan gaji.

i) Saldo Kas Lain-lain sebesar Rp40.776.232,00 merupakan kelebihan belanja penyaluran selisih perhitungan pemotongan jaminan kesehatan aparatur pemerintah desa TA 2023, yang telah disetorkan kembali ke RKUD pada tanggal 9 Januari 2024.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas selama tahun 2023. Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.971.105.796.292,61 dari saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.841.146.863.658,42, ditambah Surplus/(Defisit) LO TA 2023 sebesar Rp54.184.107.832,30 dan ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2023 sebesar Rp75.774.824.801,89.

F.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal TA 2023 sebesar Rp3.841.146.863.658,42 berasal dari saldo Ekuitas Neraca per 31 Desember 2022.

F.2. Surplus/(Defisit) LO TA 2023

Berdasarkan perhitungan pada Laporan Operasional (LO) TA 2023 Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh Surplus sebesar Rp54.184.107.832,30 yang berasal dari Pendapatan-LO dikurangi Beban-LO TA 2023. Surplus/Defisit tahun 2023 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp77.497.495.773,44 atau 58,85% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp131.681.603.605,74. Penurunan tersebut disebabkan antara lain adanya kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, Penghapusan Aset Daerah, dan Penjualan Aset Daerah.

F.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar menggambarkan transaksi selama satu tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas bersih tahun 2023. Total nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan Tahun 2023 sebesar Rp75.774.824.801,89 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp71.914.465.637,34 atau 1.862,90% dari tahun 2022 sebesar Rp3.860.359.164,55 yang sebagian besar disebabkan adanya kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, rincian terdiri dari:

			(Dalam Rupiah)
a).	**Koreksi yang menambah ekuitas**		
	Koreksi Nilai Persediaan		
	Koreksi kurang catat persediaan		403.775.640,56
		Jumlah	**403.775.640,56**
	Lain-Lain		
	kurang catat saldo kas tabulin		88.222.764,00
	koreksi kurang catat piutang		450.803.470,74
	koreksi lebih catat nilai akumulasi penyusutan		328.530.290,00
	kurang catat aset tetap		1.280.389.294,66
	kurang catat nilai aset tetap		541.922.000,01
	koreksi lebih catat utang		6.013.965,00
	koreksi pendapatan diterima dimuka (+)		635.311.794,45
	kurang catat saldo kas lainnya		910.491,00
	kurang catat aset tetap (koreksi Inventarisasi BMD)		86.120.085.267,00
	koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan (-)		1.151.036.597,00
	koreksi lebih catat akumulasi penyusutan		353.750.377,00
	koreksi beban ekstrakomptabel menjadi aset tetap (+)		181.189.235,00
	Koreksi penyertaan modal		16.591.485.393,27
	Piutang TGR		748.000,00
		Jumlah	**107.730.398.939,13**
b).	**Koreksi yang mengurangi ekuitas**		
	Koreksi Nilai Persediaan		
	Koreksi lebih catat persediaan		46.040.154,04
	Koreksi persediaan yang dihapus		967.571.960,50
	Koreksi persediaan kadaluwarsa yang belum dihapuskan		53.929.606,91
		Jumlah	**1.067.541.721,45**

Lain-Lain		
koreksi pengembalian kas dana BOS		2.500.326,00
lebih catat saldo kas tabulin		2.878,00
koreksi lebih catat piutang		22.785.329,24
koreksi penyertaan modal (-)		6.570.912.000,00
Koreksi kurang catat nilai akumulasi penyusutan		1.143.695.363,00
lebih catat aset		8.781.027.947,02
lebih catat nilai aset		250.015.443,02
koreksi kurang catat utang		20.803.423,00
koreksi lebih catat kas lainnya		138.428.446,00
lebih catat aset tetap (koreksi Hasil Inventarisasi BMD)		2.153.366.493,00
koreksi kesalahan pencatatan aset tetap (-)		1.836.466.058,06
koreksi kurang catat akumulasi penyusutan		10.237.486.366,00
koreksi pencatatan akumulasi penyusutan karena gabung (+)		134.317.984,00
	Jumlah	**31.291.808.056,34**

F.3.a Koreksi Nilai Persediaan

Atas dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar terdapat Koreksi Nilai persediaan pada TA 2023 sebesar (Rp663.766.080,90) yang terdiri dari koreksi kredit (menambah ekuitas) sebesar Rp403.775.640,56 dan koreksi debet (mengurangi ekuitas) sebesar Rp1.067.541.721,45 sedangkan pada TA 2022 terdapat koreksi persediaan sebesar Rp476.774.034,65 Koreksi Nilai Persediaan sebesar (Rp663.766.080,90) dengan rincian sebagai berikut:

a) Koreksi kurang catat persediaan

Koreksi kurang catat persediaan sebesar Rp403.775.640,56 terdapat pada lima entitas antara lain:

	Entitas	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dinkes	Kurang catat berupa persediaan obat	290.852.674,68
(2)	Puskesmas Wonosobo 1	Koreksi kurang catat saldo awal persediaan obat	361.883,06
(3)	Puskesmas Kepil 1	Koreksi kurang catat saldo awal persediaan obat	30.000,00
(4)	RSUD	Kurang catat persediaan	112.431.757,22
(5)	Dinas Lingkungan Hidup	Koreksi kurang saldo awal persediaan karcis	99.325,60
			403.775.640,56

b) Koreksi Lebih Catat Persediaan

Koreksi kurang catat persediaan sebesar Rp46.040.154,04 terdapat pada 7 entitas antara lain:

	Entitas	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dinas Kesehatan	Koreksi Lebih catat persediaan obat	6.180.258,00
(2)	Puskesmas kejajar 1	Koreksi Lebih catat persediaan obat	6,88
(3)	Puskesmas Kalikajar 1	Koreksi Lebih catat persediaan obat ED	18.200.427,74
(4)	RSUD	Koreksi kurang catat persediaan obat dari retur obat	13.499.360,82
(5)	Disperkimhub	Koreksi lebih catat saldo awal persediaan karcis	100,00
(6)	Dinas Lingkungan Hidup	koreksi lebih catat persediaan karcis	0,60
(7)	DPPKBPPPA	Koreksi Lebih catat persediaan obat lainnya	8.160.000,00
			46.040.154,04

c) Koreksi Persediaan yang Dihapus

Koreksi persediaan yang dihapus sebesar Rp967.571.960,50 pada beberapa entitas antara lain:

Entitas	(Dalam Rupiah)
Dinkes	372.677.950,00
Puskesmas Wonosobo 1	27.678.741,00
Puskesmas Kertek 1	4.029.943,00
Puskesmas Selomerto 1	25.370.029,00
Puskesmas Leksono 1	16.965.734,00
Puskesmas Watumalang	3.736.829,00
Puskesmas Mojotengah	7.915.387,00
Puskesmas Garung	16.555.401,38
Puskesmas Kejajar 1	24.817.460,71
Puskesmas Sapuran	23.392.664,00
Puskesmas Kepil 1	21.834.865,42
Puskesmas Kaliwiro	3.948.971,90

Entitas	(Dalam Rupiah)
Puskesmas Wadaslintang 1	4.155.914,10
Puskesmas Sukoharjo 1	4.607.118,00
Puskesmas Kalibawang	23.049.475,00
Puskesmas Wonosobo 2	4.077.339,00
Puskesmas Kertek 2	30.420.945,99
Puskesmas Selomerto 2	8.306.835,00
Puskesmas Leksono 2	7.478.772,00
Puskesmas Kejajar 2	2.271.299,00
Puskesmas Kalikajar 2	75.806.824,00
Puskesmas Kepil 2	39.878.864,00
Puskesmas Sukoharjo 2	9.354.572,00
RSUD	207.760.026,00
Disperkimhub	1.480.000,00
Jumlah	**967.571.960,50**

d) Koreksi Persediaan kadaluwarsa yang belum dihapuskan

Koreksi persediaan kadaluarsa yang belum dihapuskan sebesar Rp53.929.606,91 pada umumnya berupa persediaan obat obatan yang terdapat pada beberapa entitas antara lain :

Entitas	(Dalam Rupiah)
Dinkes	26.105.760,00
Puskesmas Wonosobo 1	3.234.740,00
Puskesmas Leksono 1	2.863.613,00
Puskesmas Kalikajar 1	7.257.708,00
Puskesmas Kepil 1	90.599,58
Puskesmas Sukoharjo 1	523.758,00
Puskesmas Wonosobo 2	8.214.365,33
Puskesmas Kertek 2	103.200,00
Puskesmas Kejajar 2	2.845.925,00
Puskesmas Kalikajar 2	72.380,00
Puskesmas Wadaslintang 2	2.617.558,00
	53.929.606,91

F.3.b Lain-lain

Atas dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar terdapat lain-lain pada TA 2023 sebesar Rp76.438.590.882,79 yang terdiri dari Lain-lain kredit (menambah ekuitas) sebesar Rp107.730.398.939,13 dan koreksi debet (mengurangi ekuitas) sebesar Rp31.291.808.056,34 dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp3.383.585.129,90 mengalami kenaikan sebesar Rp73.055.005.752,89 atau 2.159,10%.

1) Lain-lain yang menambah ekuitas sebesar Rp107.730.398.939,13 yang berasal dari :
   a) Kurang catat saldo kas tabulin sebesar Rp88.222.764,00 yang merupakan penambahan saldo kas tabulin tahun berjalan, pada beberapa entitas sebagai berikut :

	Uraian	(Dalam Rupiah)
(1)	Kec Wonosobo	1.733.538,00
(2)	Kec Kertek	315.626,00
(3)	Kec Selomerto	2.147.271,00
(4)	Kec Leksono	725.080,00
(5)	Kec Watumalang	212.581,00
(6)	Kec Mojotengah	76.350.971,00
(7)	Kec Garung	22.033,00
(8)	Kec Kejajar	1.395.638,00
(9)	Kec Kalikajar	37.260,00
(10)	Kec Kepil	900.900,00
(11)	Kec Kaliwiro	165.119,00
(12)	Kec Wadaslintang	2.085.885,00
(13)	Kec Sukoharjo	10.127,00
(14)	Kec Sapuran	2.120.735,00
	Jumlah	**88.222.764,00**

   b) Koreksi kurang catat piutang sebesar Rp450.803.470,74 pada empat entitas sebagai berikut

	Uraian	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	RSUD	Koreksi kurang catat piutang pasien umum TA. 2022	8.895.350,00
(2)	DPMPTSP	koreksi kurang catat piutang retribusi PBG TA. 2022	342.000,00
(3)	BPPKAD	koreksi piutang renumerasi TDF dari PPKD ke BPPKAD	1.101.727,74
(4)	BPPKAD	Koreksi dividen dari RUPS TA 2022 BPR BKK Wonosobo	440.464.393,00
	Jumlah		**450.803.470,74**

c) Koreksi lebih catat nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp328.530.290,00 pada beberapa entitas sebagai berikut :

	Uraian	(Dalam Rupiah)
(1)	Puskesmas Wonosobo 2	3,00
(2)	RSUD	30.000.023,00
(3)	Satpol PP	1,00
(4)	Dinsos	3,00
(5)	DLH	11,00
(6)	Diskominfo	1,00
(7)	Bagian Umum Setda	4,00
(8)	Kec Wonosobo	1,00
(9)	Kel Mlipak	1,00
(10)	Kel Wonoroto	1,00
(11)	Kec Kaliwiro	3,00
(12)	Kel Wadaslintang	1,00
(13)	BPPKAD	298.530.237,00
	Jumlah	**328.530.290,00**

d) Kurang catat Aset Tetap sebesar Rp1.280.389.294,66 pada empat entitas sebagai berikut:

	Uraian	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dikpora	Kurang catat aset rusak berat dan alat rumah tangga	65.752.627,07
(2)	Disparbud	Koreksi kurang catat tanah untuk bangunan tempat kerja dan Bangunan air bersih	614.144.668,00
(3)	Kel Mlipak	Koreksi kurang catat tanah	600.492.000,00
(4)	Kel Garung	kurang catat jalan	(0,41)
	Jumlah		**1.280.389.294,66**

e) Kurang catat nilai Aset Tetap sebesar Rp541.922.000,01 pada dua entitas sebagai berikut:

	Uraian	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	BPBD	Kurang catat aset kendaraan roda dua	9.090.000,00
(2)	Disdagkop	Koreksi kurang catat aset tetap dalam renovasi	532.832.000,01
	Jumlah		**541.922.000,01**

f) Koreksi lebih catat utang sebesar Rp6.013,965,00 pada beberapa entitas sebagai berikut :

	Uraian	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dinas Lingkungan Hidup	Koreksi Lebih catat utang belanja jasa	2.655.935,00
(2)	Disperkimhub	Koreksi Lebih catat utang belanja jasa	1.709,00
(3)	BPBD	Koreksi Lebih catat utang belanja jasa	35.650,00
(4)	RSUD	Koreksi Lebih catat utang belanja perjalanan dinas	50.000,00
(5)	PKM Kepil 2	Koreksi Lebih catat utang belanja jasa	1.740,00
(6)	PKM Sukoharjo 2	Koreksi Lebih catat utang belanja jasa	3.034.604,00
(7)	Kec. Selomerto	Koreksi Lebih catat utang belanja jasa	225.930,00
(8)	Kec. Kepil	Koreksi Lebih catat utang belanja jasa	3.385,00
(9)	BPPKAD	Koreksi Lebih catat utang belanja jasa	12,00
(10)	BKD	Koreksi Lebih catat utang belanja jasa	5.000,00
		Jumlah	**6.013.965,00**

g) Koreksi pendapatan diterima dimuka sebesar Rp635.311.794,45 pada BPPKAD yang merupakan pendapatan diterima dimuka sewa Barang Milik Daerah.

h) Kurang catat saldo kas lainnya sebesar Rp910.491,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga berupa saldo kas bank pada sekolah negeri.

i) Kurang catat aset tetap berupa Tanah, Bangunan gedung dan Jalan Irigasi dan Jaringan dari Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2023 sebesar Rp86.120.085.267,00, pada entitas sebagai berikut:

	Uraian	(Dalam Rupiah) Tanah	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Jumlah
1.	Dikpora	712.816.800,00	28.845.904.456,00	2.435.765.779,00	31.994.487.035,00
2.	Dinkes	-	67.404.599,00	-	67.404.599,00
3.	Puskesmas Wonosobo 1	-	397.516.450,00	-	397.516.450,00
4.	Puskesmas Kertek 1	-	54.843.360,00	72.229.099,00	127.072.459,00
5.	Puskesmas Watumalang	-	267.120.516,00	-	267.120.516,00
6.	Puskesmas Mojotengah	-	193.452.000,00	-	193.452.000,00
7.	Puskesmas Sapuran	-	256.671.700,00	-	256.671.700,00
8.	Puskesmas Wadaslintang 1	-	1.119.703.560,00	-	1.119.703.560,00
9.	DPU	-	-	23.194.927.354,00	23.194.927.354,00
10.	Disperkimhub	-	113.538.840,00	-	113.538.840,00
11.	Satpol PP	-	98.137.552,00	-	98.137.552,00
12.	BPBD	-	257.312.592,00	-	257.312.592,00
13.	Disnakerin	-	908.020.236,00	-	908.020.236,00
14.	DLH	-	167.739.040,00	-	167.739.040,00
15.	Dispaperkan	609.088.000,00	71.634.024,00	-	680.722.024,00
16.	Disdagkop	253.061.000,00	-	-	253.061.000,00
17.	Umum	-	3.577.843.382,00	-	3.577.843.382,00
18.	Kel Wotim	2.028.048.000,00	-	-	2.028.048.000,00
19.	Kel Jlamprang	-	787.378.592,00	-	787.378.592,00
20.	Kel Sambek	1.880.000,00	-	-	1.880.000,00
21.	Kel Pagerkukuh	160.780.000,00	237.927.536,00	128.687.395,00	527.394.931,00
22.	Kel Rojoimo	26.922.000,00	1.401.251.006,00	34.851.440,00	1.463.024.446,00
23.	Kel Kramatan	308.156.000,00	109.600.000,00	902.983.333,00	1.320.739.333,00
24.	Kel Tawangsari	-	-	9.685.760,00	9.685.760,00
25.	Kel Jaraksari	7.763.782.000,00	-	83.833.768,00	7.847.615.768,00
26	Kel Bumireso	1.526.907.100,00	178.245.240,00	-	1.705.152.340,00
27.	Kel Kalianget	417.920.000,00	-	-	417.920.000,00
28.	Kel Kertek	242.136.000,00	-	-	242.136.000,00
29.	Kel Wringinanom	41.715.000,00	-	-	41.715.000,00
30.	Kel Selomerto	6.560.000,00	-	-	6.560.000,00
31.	Kel Wonorejo	-	332.008.800,00	-	332.008.800,00
32.	Kel Leksono	175.500.000,00	-	-	175.500.000,00
33.	Kel Wonoroto	-	50.730.762,00	-	50.730.762,00
34.	Kel Kalibeber	102.060.000,00	-	-	102.060.000,00
35.	Kel Mudal	137.385.600,00	1.707.340.800,00	-	1.844.726.400,00
36.	Kel Andongsili	442.599.950,00	241.617.600,00	-	684.217.550,00
37.	Kel Garung	139.786.000,00	429.542.400,00	34.742.400,00	604.070.800,00
38.	Kec Kejajar	-	95.440.550,00	-	95.440.550,00
39	Kel Kejajar	73.490.000	-	-	73.490.000,00
40.	Kel Kalikajar	330.853.600,00	-	-	330.853.600,00
41.	Kel Kepil	1.700.069.500,00	-	-	1.700.069.500,00
42.	Kel Kaliwiro	7.408.700,00	-	-	7.408.700,00
43.	Kel Wadaslintang	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
44.	Kec Kalibawang	6.500.000,00	36.978.096,00	-	43.478.096,00
	Jumlah	**17.217.475.250,00**	**42.004.903.689,00**	**26.897.706.328,00**	**86.120.085.267,00**

j) Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan atas Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah sebesar Rp353.750.377,00, pada entitas sebagai berikut:

	Entitas	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Puskesmas Kepil 1	lebih catat karena aset tetap (bangunan gedung tempat tinggal) telah dihapus	20.083.333,00
(2)	Puskesmas Wadaslintang 1	lebih catat karena aset tetap (bangunan kesehatan) telah dihapus	62.463.537,00
(3)	Dispaperkan	dobel catat bangunan tempat tinggal	250.000.000,00
(4)	Kec Selomerto	dobel catat jembatan pada jalan desa dan lebih catat aset rusak berat	13.358.334,00
(5)	Kel Garung	lebih catat akumulasi penyusutan jalan-jalan desa	7.845.169,00
(6)	Sekretariat DPRD	Lebih catat akumulasi penyusutan aset rusak berat	1,00
(7)	DPMPTSP	Lebih catat akumulasi penyusutan aset rusak berat	3,00
			353.750.377,00

k) Koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan TA 2023 sebesar Rp1.151.036.597,00 dari Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan uraian sebagai berikut:

	Entitas	Uraian	(Dalam Rupiah)
(1)	Dikpora	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	988.492.025,00
(2)	Dikpora	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	1.214.375,00
(3)	Dikpora	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.385.098,00
(4)	Dikpora	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan	63.580.685,00
(5)	Kel Kaliwiro	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	93.364.414,00
			1.151.036.597,00

l) Koreksi beban ekstrakomtabel menjadi bangunan pelengkap air bersih atas Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah sebesar Rp181.189.235,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

m) Koreksi Penyertaan Modal TA 2023 sebesar Rp16.591.485.393,27 berasal dari penyesuaian penyertaan modal pada BUMD metode ekuitas senilai Rp159.922.681,57 dan berasal dari penyesuaian lebih catat hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan metode ekuitas pada PT Tambi dan PD Bhakti Husada senilai Rp16.431.562.711,70.

n) Koreksi kurang catat Piutang TGR pada BPPKAD atas nama SWG senilai Rp748.000,00.

2) Lain-lain yang mengurangi ekuitas sebesar Rp31.291.808.056,34 yang berasal dari :

a) Koreksi pengembalian kas dana BOS sebesar Rp2.500.326,00 merupakan setoran pengembalian sisa Dana BOS SD Negeri Bendungan Kaliwiro Tahun Anggaran 2022 ke Kas Negara.

b) Lebih catat saldo kas tabulin sebesar Rp2.878,00 terdapat pada entitas Kecamatan Kalibawang berupa pengurangan karena biaya administrasi bank.

c) Koreksi lebih catat piutang sebesar Rp22.785.329,24 terdapat pada entitas sebagai berikut:

	Entitas	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	BPPKAD	penghapusan piutang PBB karena ada keringanan	8.824.332,00
(2)	PPKD	Piutang remunerasi DBH TDF TA. 2022	1.101.727,74
(3)	RSUD	Lebih catat saldo awal piutang pasien	12.859.269,50
		Jumlah	**22.785.329,24**

d) Koreksi penyertaan modal sebesar Rp6.570.912.000,00 merupakan penyertaan modal untuk Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo melalui pengeluaran pembiayaan.

e) Koreksi kurang catat nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.143.695.363,00 terdapat pada 10 entitas sebagai berikut :

	Uraian	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dikpora	kurang catat nilai akumulasi barang bercorak kesenian	768.675.015,00
(2)	Dinkes	kurang catat nilai akumulasi barang rusak berat	6,00
(3)	Puskesmas Kejajar 1	kurang catat nilai akumulasi barang rusak berat	1,00
(4)	DLH	kurang catat nilai akumulasi penyusutan bangunan gedung	58.832.951,00
(5)	Disparbud	kurang catat nilai akumulasi barang bercorak kesenian	26.786.411,00
(6)	Bagian Umum	kurang catat nilai akumulasi penyusutan bangunan gedung	3,00
(7)	Kec Wonosobo	kurang catat nilai akumulasi penyusutan JIJ	3,00
(8)	Kel Kramatan	kurang catat nilai akumulasi penyusutan bangunan Gedung	1,00
(9)	Kel Tawangsari	kurang catat nilai akumulasi penyusutan bangunan Gedung	1,00
(10)	BPPKAD	kurang catat nilai akumulasi penyusutan bangunan gedung	289.400.971,00
		Jumlah	**1.143.695.363,00**

f) Koreksi lebih catat aset sebesar Rp8.781.027.947,02 terdapat pada tiga entitas sebagai berikut:

	Uraian	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dikpora	lebih catat aset rusak berat dan alat kantor lainnya	8.751.027.947,01
(2)	RSUD	lebih catat saldo awal aset rusak berat	30.000.000,00
(3)	Bagian Umum	lebih catat aset rusak berat	0,01
		Jumlah	**8.781.027.947,02**

g) Koreksi lebih catat nilai aset sebesar Rp250.015.443,02 terdapat pada lima entitas sebagai berikut:

	Uraian	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Disnakerin	lebih catat akumulasi barang rusak berat	1,00
(2)	Disparbud	lebih catat aset tanah berupa taman	250.015.439,00
(3)	Disdagkop	lebih catat aset rusak berat	0,01
(4)	Kec Kertek	lebih catat aset rusak berat	0,01
(5)	Kec Kalibawang	lebih catat akumulasi penyusutan bangunan gedung dan JIJ	3,00
			250.015.443,02

h) Koreksi kurang catat utang sebesar Rp20.803.423,00 terdapat pada entitas sebagai berikut:

	Uraian	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Puskesmas Kertek 2	kurang catat utang belanja jasa kantor	1.829.016,00
(2)	Disperkimhub	kurang catat utang belanja pegawai tahun lalu	3.826.782,00
(3)	Satpol PP	kurang catat utang belanja pegawai tahun lalu	185.262,00
(4)	BPBD	kurang catat utang belanja jasa kantor	357.930,00
(5)	DLH	kurang catat utang belanja jasa kantor	1.345.634,00
(6)	Diskominfo	kurang catat utang belanja pegawai tahun lalu	488.536,00
(7)	Dpmptsp	kurang catat utang belanja pegawai tahun lalu	153.842,00
(8)	Dispaperkan	kurang catat utang belanja pegawai tahun lalu	471.635,00
(9)	Bagian Umum Setda	kurang catat utang belanja pegawai tahun lalu	1.358.525,00
(10)	Kec Kepil	kurang catat utang belanja pegawai tahun lalu	10.537.148,00
(11)	Kel Wadaslintang	kurang catat utang belanja jasa kantor	66.780,00
(12)	BPPKAD	kurang catat utang belanja pegawai tahun lalu	132.302,00
(13)	Dinkes	kurang catat utang belanja jasa kantor	90,00
(14)	Pkm Leksono 1	kurang catat utang belanja jasa kantor	1,00
(15)	Pkm Wonosobo 2	kurang catat utang belanja jasa kantor	10,00
(16)	Sekretariat Dprd	kurang catat utang belanja jasa kantor	28.500,00
(17)	Kec Wonosobo	kurang catat utang belanja jasa kantor	1.000,00
(18)	Kec Leksono	kurang catat utang belanja jasa kantor	20.430,00
		Jumlah	**20.803.423,00**

i) Koreksi lebih catat Kas Lainnya sebesar Rp138.428.446,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari setoran Kas Lainnya dari temuan Inspektorat tahun lalu sebesar Rp127.297.160,00 dan sisa kas yang ada penetapan SK tahun 2022 sebesar Rp11.131.286,00.

j) Koreksi lebih catat aset tetap atas Hasil Inventarisasi BMD sebesar Rp2.153.366.493,00 yang terdapat pada entitas sebagai berikut :

	Entitas	(Dalam Rupiah) Tanah	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Jumlah
(1)	Dikpora	-	354.267.067,00	-	354.267.067,00
(2)	Puskesmas Wonosobo 1	-	180.617.462,00	-	180.617.462,00
(3)	Puskesmas Kepil 1	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
(4)	Puskesmas Kaliwiro	-	105.052.375,00	-	105.052.375,00
(5)	Puskesmas Wadaslintang 1	-	155.510.875,00	-	155.510.875,00
(6)	DLH	-	-	795.805.500,00	795.805.500,00
(7)	DPMPTSP	-	12.172.630,00	-	12.172.630,00
(8)	Dispaperkan	-	250.000.000,00	-	250.000.000,00
(9)	Kec Selomerto	-	-	35.000.000,00	35.000.000,00
(10)	Kec Watumalang	9.016.000,00	-	-	9.016.000,00
(11)	Kel Kalibeber	43.400.000,00	-	-	43.400.000,00
(12)	Kel Mudal	52.910.000,00	-	-	52.910.000,00
(13)	Kel Kepil	61.750.000,00	-	-	61.750.000,00
(14)	Kec Wadaslintang	-	-	15.572.917,00	15.572.917,00
(15)	Kel Wadaslintang	-	32.291.667,00	-	32.291.667,00
	Jumlah	**167.076.000,00**	**1.139.912.076,00**	**846.378.417,00**	**2.153.366.493,00**

k) Koreksi kesalahan pencatatan aset atas hasil Inventarisasi BMD berupa kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan bangunan air bersih/ air baku sebesar Rp1.836.466.058,06 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

l) Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan atas Hasil Inventarisasi BMD sebesar Rp10.237.486.366,00yang terdapat pada entitas sebagai berikut :

	Entitas	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Puskesmas Kalikajar 1	Kurang catat akumulasi penyusutan Instalasi air kotor	9.201.747,00
(2)	Puskesmas Wadaslintang 1	Kurang catat akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja dan tempat tinggal	371.772.679,00
(3)	DPU	Kurang catat akumulasi penyusutan jembatan pada jalan kabupaten	9.424.179.542,00
(4)	Disperkimhub	Kurang catat akumulasi penyusutan instalasi gardu listrik	655,00
(5)	Dispaperkan	Kurang catat akumulasi penyusutan tugu tanda batas	20.176.917,00
(6)	Kel Mudal	Kurang catat akumulasi penyusutan gedung tempat kerja	241.873.280,00
(7)	Kel Andongsili	Kurang catat akumulasi penyusutan gedung tempat kerja	77.720.328,00
(8)	Dikpora	Kurang catat akumulasi penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	92.561.218,00
		Jumlah	**10.237.486.366,00**

m) Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan karena gabung atas Hasil Inventarisasi BMD sebesar Rp134.317.984,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, berupa koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan gedung tempat kerja- bangunan gedung kantor.

F.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.971.105.796.292,61 yang berasal dari Ekuitas Awal Rp3.841.146.863.658,42 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp54.184.107.832,30 dan dampak kumulatif adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar sebesar Rp75.774.824.801,89.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan Dasar Hukum Entitas serta Juridiksi Tempat Entitas Berada.

Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdomisili di wilayah Kecamatan Wonosobo yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Wonosobo tepatnya di JL. Soekarno-Hatta, No. 2-4, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1. Letak Geografi

   Kabupaten Wonosobo secara administratif dibagi menjadi 15 wilayah kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan. Secara geografis terletak antara 7^{o} 11' - 7^{o} 36' garis Lintang Selatan (LS) serta 109^{o} 43' - 110^{o} 04' garis Bujur Timur (BT). Berada pada rentang ketinggian 250 dpl – 2.250 dpl dominasi pada rentang 500 dpl – 1.000 dpl atau sebesar 50% dari keseluruhan luas wilayah Wonosobo. Berjarak dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) 120 km dan 520 km dari Ibukota Negara (Jakarta).

2. Luas Wilayah

   Kabupaten Wonosobo memiliki luas 98.468 hektar (984,68 km2) atau 3,03% (persen) dari luas Jawa Tengah dengan komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99%), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99%), hutan negara 18.909,72 ha (19.20%), perkebunan negara/swasta 2.764,51 ha (2,80%) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01%). Kondisi kemiringan biogeofisik sebagai berikut:
   a. $3\text{-}8^{0}$ seluas 0,544 km^{2}
   b. $8\text{-}15^{0}$ seluas 247,691 km^{2}
   c. $15\text{-}40^{0}$ seluas 421,736 km^{2}
   d. $>40^{0}$ seluas 318,299 km^{2}

3. Batas Wilayah

   Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu:
   a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
   b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

4. Jenis Tanah

Keadaan tanah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tanah andosol (25%) terdapat di Kecamatan Kejajar, sebagian Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kalikajar.
b. Tanah Regosol (40%) terdapat di Kecamatan Kertek, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Garung.
c. Tanah Podsolik (35%) terdapat di Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Sapuran.

Jenis tanah meliputi tanah andosol seluas 10.817,7 ha, tanah regosol seluas 19.372,7 ha, tanah latosol seluas 63.043,4 ha, tanah argonosol seluas 761,1 ha, tanah mediterian merah kuning seluas 3.054 ha dan tanah gramosol seluas 1.778,6 ha.

5. Iklim

Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Suhu udara rata-rata 24 – 30℃ di siang hari, turun menjadi 20℃ pada malam hari. Pada bulan Juli – Agustus turun menjadi 12 – 15℃ pada malam hari dan 15 – 20℃ di siang hari. Curah hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Rata-rata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata 3.400 mm, tertinggi di Kecamatan Garung (4.802 mm) dan terendah di Kecamatan Watumalang (1.554 mm).

6. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Wonosobo berdasarkan data BPS Kabupaten Wonosobo tahun 2023 adalah sebanyak 909.664 jiwa dengan rasio jenis kelamin 103,74.

B. Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo

Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Periode 2021-2025 dijabat oleh H. Afif Nurhidayat, S.Ag dan Dr. H. Muhammad Albar, M.M. dilantik oleh gubernur jawa tengah Ganjar Pranowo pada tanggal 26 Februari 2021 beliau merupakan pemimpin yang ke-24 sejak Wonosobo berdiri tahun 1825.

C. DPRD Kabupaten Wonosobo

Berikut susunan pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 170/20 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Keanggotaan 2019-2024 dan Keputusan DPRD

Kabupaten Wonosobo Nomor 170/26 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel VI.1 Daftar Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo Periode 2019 - 2024

No.	Nama	Jabatan	Keterangan/Unsur
1	Eko Prasetyo Heru Wibowo, SH	Ketua DPRD	F. PDIP
2	Amir Husein	Wakil Ketua I DPRD	F. PKB
3	Sumardiyo, S.E.	Wakil Ketua II DPRD	F. P Gerinda
4	Agus Riyadi	Wakil Ketua III DPRD	F. P Golkar
5	Kristiyanto SH	Sekretaris DPRD	Pemerintah Kabupaten Wonosobo

D. Entitas Akuntansi

Jumlah SKPD di Kabupaten Wonosobo sebanyak 40 yang merupakan entitas akuntansi, didalamnya terdapat 1 SKPD selaku BLUD yaitu RSUD Setjonegoro, disamping itu ada 24 BLUD Unit Puskesmas di bawah SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (2), disebutkan bahwa Kelurahan tidak termasuk sebagai SKPD. Kelurahan merupakan Unit dibawah SKPD Kecamatan, sehingga dalam struktur pengelolaan keuangan daerah kepala kelurahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, jumlah kelurahan sebanyak 29.

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2023 dapat dilihat lebih rinci pada Lampiran VI.1.

E. Aplikasi Pendukung Laporan Keuangan

1. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)
   Merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah.

2. FMIS (Financial Management Information System)
   Adalah SIMDA Next-G yang merupakan pengembangan aplikasi SIMDA dengan basis Web yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan.

3. e-PBB
   Aplikasi pelayanan yang digunakan oelh wajib pajak untuk untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi sppt, tempat pembayaran, cek status berkas, saran dan masukan atau pengaduan wajib pajak langsung masuk ke pejabat terkait.

4. Sismiop (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)
   Sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemprosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.

5. e-BPHTB
   Sistem informasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan BPHTB.

6. Sim Gaji (Sistem Informasi Manajemen Gaji)
   Sistem aplikasi penggajian yang dibangun oleh PT. Taspen (Persero) yang berfungsi untuk pengelolaan data gaji PNS Daerah pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui Teknologi Informasi yang dapat diakses dan terintegrasi dengan unit kerja lainnya serta dapat menyajikan data secara akurat, tepat dan *up to date*.

7. Simtrada
   Sistem informasi untuk menyajikan data realisasi penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa.

8. ALADIN (Aplikasi DAK Non Fisik)
   Aplikasi yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi DAK Non Fisik.

9. OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
   Aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan laporan sesuai kebutuhan.

10. e-Bantuan BPKAD Provinsi Jawa Tengah
    Aplikasi untuk pengajuan persyaratan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah.

11. Si Bapers
    Aplikasi yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan data terkait manajemen pencatatan persediaan.

12. SITAWON (Sistem Informasi Pendapatan Wonosobo)
    Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah administrasi pajak daerah Kabupaten Wonosobo.

13. SIMDA-BMD
    Sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

F. Pengelolaan Keuangan Desa

Kabupaten Wonosobo memiliki 236 desa yang tersebar di 15 kecamatan, telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa desa diwajibkan menyusun APBDesa sebagai dasar implementasi pengelolaan keuangan desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan desa setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Berkaitan dengan hal tersebut dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa

harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ikhtisar realisasi Pelaksanaan APBDesa selama TA 2023 dari 236 desa se-Kabupaten Wonosobo, secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel VI.2 Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan	456.674.218.440,00	441.981.631.643,00	(14.692.586.797,00)
Belanja	465.357.471.116,00	430.190.701.782,00	(35.166.775.334,00)
Surplus/(Defisit)	(8.683.258.676,00)	11.790.929.861,00	20.474.188.537,00
Pembiayaan			
- Penerimaan	12.419.443.336,00	11.740.507.548,00	(678.935.788,00)
- Pengeluaran	3.663.174.030,00	3.013.121.080,00	(650.152.950,00)
Pembiayaan Netto	8.756.269.306,00	8.727.386.468,00	(28.882.838,00)
SILPA	**73.010.630,00**	**20.518.316.329,00**	**20.445.305.699,00**

Rincian lebih lanjut atas Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2023 sebagaimana pada Lampiran VI.3

Kabupaten Wonosobo terdiri dari 236 desa yang tersebar di 15 wilayah kecamatan, sumber pendapatan desa salah satunya adalah dana transfer dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Transfer bantuan keuangan:

		(dalam Rupiah)
a.	Dana Desa (Penetapan)	241.533.073.000,00
b.	Alokasi Dana Desa (Penetapan)	106.343.809.070,00

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN untuk desa yang disalurkan melalui APBD Kab. Wonosobo, penyaluran kedesa dilakukan 3 (tiga) tahap. Keuangan desa sebagai sumber pendanaan desa harus dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

G. Kegiatan yang Dianggarkan Kembali Pada Tahun Anggaran 2023

Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Tahun Anggaran 2022 tidak memiliki program kegiatan yang dianggarkan kembali di tahun anggaran 2023.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial sebagai pencerminan hasil aktivitas pemerintah Kabupaten Wonosobo selama satu periode akuntansi, disusun dan disajikan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Wonosobo, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yaitu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu berupaya melakukan perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah baik melalui sistem pengendalian intern yang semakin handal maupun kepatuhan tehadap peraturan perundang-undangan, disamping itu upaya penyelesaian atas rekomendasi temuan pemeriksaan baik pemeriksa eksternal maupun pemeriksa internal telah dilakukan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih akuntabel dan transparan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, harapan kami atas perbaikan pengelolaan keuangan daerah ini juga dapat mempertahankan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian penjelasan secara singkat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL: 23 September 2024

KABUPATEN WONOSOBO
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman / obligasi	tanggal/tahun perjanjian pinjaman/ obligasi	jumlah pinjaman/nilai nominal obligasi (Rp)	jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman (%)	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								pokok pinjaman daerah	bunga	Pokok pinjaman daerah	bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 23 September 2024

KABUPATEN WONOSOBO
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Kaliwiro	26.064.800,00	26.064.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.064.800,00	26.064.800,00
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Wonoroto	61.760.000,00	61.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.760.000,00	61.760.000,00
3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
4	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	365.000.000,00	405.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000.000,00	435.000.000,00
5	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Jaraksari	0,00	0,00	14.176.000,00	14.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176.000,00	14.176.000,00
6	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sambek	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kalikajar	418.132.913,00	405.972.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.132.913,00	405.972.913,00
8	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Wonoroto	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
9	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	10.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00
10	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Rojoimo	413.800.000,00	413.800.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.800.000,00	613.800.000,00
11	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650.000,00	25.650.000,00
12	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Watumalang	2.560.569.814,00	2.438.648.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.569.814,00	2.438.648.338,00
13	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
14	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sambek	378.459.877,00	378.459.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.459.877,00	378.459.877,00
15	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Pagerkukuh	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
16	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Wonosobo 2	480.198.000,00	480.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.198.000,00	480.198.000,00
17	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kaliwiro	3.511.622.500,00	3.616.533.635,00	112.977.500,00	112.977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.600.000,00	3.729.511.135,00
18	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Leksono	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
19	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas lingkungan Hidup	10.935.272.500,00	11.146.212.542,00	2.284.870.000,00	2.246.631.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220.142.500,00	13.392.844.500,00
20	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kalikajar	84.253.600,00	84.253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.253.600,00	84.253.600,00
21	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00
23	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	611.687.000,00	611.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.687.000,00	611.687.000,00
24	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Pagerkukuh	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
25	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Rojoimo	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
26	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Rojoimo	26.700.000,00	156.257.040,00	25.000.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700.000,00	193.757.040,00
27	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan kaliwiro	2.261.198.636,00	2.284.746.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.198.636,00	2.284.746.891,00
28	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kaliwiro	138.590.000,00	138.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.590.000,00	138.590.000,00
29	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	43.700.000,00	0,00	10.602.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646.140.000,00
30	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kaliwiro	367.061.590,00	417.061.590,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.061.590,00	617.061.590,00
31	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Rojoimo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
32	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Wonoroto	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
33	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
34	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
35	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kalikajar	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
36	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kalikajar	2.508.561.851,00	2.208.263.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.561.851,00	2.208.263.549,00
37	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kalikajar	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00
38	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kalikajar	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000.000,00	201.000.000,00
39	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Watumalang	89.500.000,00	84.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500.000,00	84.500.000,00
40	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	931.050.000,00	0,00	298.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000.000,00
41	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
42	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00
43	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas lingkungan Hidup	0,00	1.547.590,00	0,00	55.102.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.650.000,00
44	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Kalikajar	26.069.042,00	26.069.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.069.042,00	26.069.042,00
45	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	293.000.000,00	0,00	128.572.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.572.500,00
46	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah	0,00	26.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700.000,00
47	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	0,00	11.223.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223.755,00
49	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Sambek	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
50	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kaliwiro	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360.000,00	15.360.000,00
51	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.524.087.656,00	3.328.649.126,00	224.415.600,00	430.415.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.503.256,00	3.759.064.726,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
52	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kalikajar	70.000.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	76.500.000,00
53	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Watumalang	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
54	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Watumalang	108.000.000,00	139.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	139.000.000,00
55	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Kalikajar	13.320.811,00	25.480.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320.811,00	25.480.811,00
56	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Jlamprang	295.296.400,00	295.296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.296.400,00	295.296.400,00
57	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	185.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.925.000,00
58	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
59	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
60	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Jlamprang	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
61	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Wonosobo 2	52.440.000,00	52.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.440.000,00	52.440.000,00
62	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	1.080.759.760,00	1.265.759.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.759.760,00	1.265.759.760,00
63	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kaliwiro	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
64	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Setjonegoro	24.766.578.269,00	26.439.162.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766.578.269,00	26.439.162.914,00
65	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Sambek	151.554.005,00	151.554.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.554.005,00	151.554.005,00
66	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Wonosobo 2	1.032.620.000,00	1.240.567.695,00	0,00	159.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.620.000,00	1.399.877.695,00
67	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
68	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
69	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	67.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
70	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.150.000,00	1.150.000,00	648.850.000,00	853.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	855.000.000,00
71	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Watumalang	123.500.000,00	134.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500.000,00	134.500.000,00
72	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kalibeber	0,00	9.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660.000,00
73	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	6.347.327.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347.327.095,00
74	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Pagerkukuh	491.820.000,00	492.157.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.820.000,00	492.157.200,00
75	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	1.459.732.000,00	1.401.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.732.000,00	1.401.508.000,00
76	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Watumalang	101.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	61.000.000,00
77	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	33.200.000,00
78	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	270.610.000,00	241.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.610.000,00	241.960.000,00
				TOTAL	**58.810.819.024,00**	**68.748.170.168,00**	**5.550.021.100,00**	**17.121.433.968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.360.840.124,00**	**85.869.604.136,00**

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 September 2024

KABUPATEN WONOSOBO
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1.	1983	PT Bank Jateng	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2022	Saham	5,000,000,000,000.00	51,501,000,000.00	0.00	51,501,000,000.00	4,948,499,000,000.00	11,759,838,707.00	0.00	51,501,000,000.00
2.	1976	PERUMDA AIR MINUM	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2022	Penyertaan Modal	300,000,000,000.00	141,721,176,102.26	7,377,382,835.00	149,098,558,937.26	150,901,441,062.74	5,639,711,228.00	0.00	149,098,558,937.26
3.	1980	PD BPR - Bank Wonosobo	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2022	Penyertaan Modal	100,000,000,000.00	46,642,923,131.99	0.00	46,642,923,131.99	53,357,076,868.01	3,078,825,350.00	0.00	46,642,923,131.99
4.	1970	PD BPR - BKK Wonosobo (Perseroda)	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2022	Penyertaan Modal	81,000,000,000.00	16,702,411,809.03	0.00	16,702,411,809.03	64,297,588,190.97	561,957,985.00	0.00	16,702,411,809.03
5.	2002	PT BKK JATENG (Perseroda)	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2022	Penyertaan Modal	924,840,000,000.00	6,350,000,000.00	0.00	6,350,000,000.00	918,490,000,000.00	-	0.00	6,350,000,000.00
6.	1965	PT. TAMBI	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2001	Penyertaan Modal	20,677,422,196.00	20,677,422,196.00	0.00	20,677,422,196.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	20,677,422,196.00

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
7.	1979	PT . Bimolukar (Apotik Cahaya)	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2016	Penyertaan Modal	756,000,000.00	579,794,795.25	0.00	579,794,795.25	176,205,204.75	-	0.00	579,794,795.25
8.	2001	PD Bhakti Husada	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2011	Penyertaan Modal	2,000,000,000.00	487,102,695.00	0.00	487,102,695.00	1,512,897,305.00	-	0.00	487,102,695.00
9.	2006	PT PRPP Semarang	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2022	Penyertaan Modal	200,000,000,000.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	199,860,000,000.00	-	0.00	140,000,000.00
10.	2014	PT Global Dharma Asri	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2022	Penyertaan Modal	60,000,000,000.00	15,731,487,244.55	0.00	15,731,487,244.55	44,268,512,755.45	-	0.00	15,731,487,244.55
Jumlah				-	6,689,273,422,195.99	300,533,317,974.07	7,377,382,835	307,910,700,809.08	6,381,362,721,387	23,040,333,270.00	-	307,910,700,809.08

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 September 2024

KABUPATEN WONOSOBO
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T - 2	Perkiraan Penambahan tahun T- 1	Perkiraan Pengurangan tahun T - 1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T - 1
1	2	3	4	5	6	7 (4+5-6)
1	Tanah	Aset Tetap	799,803,003,493.06	71,444,133,123.00	94,085,800,652.00	777,161,335,964.06
2	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap	705,699,976,394.35	154,041,698,322.07	96,620,383,360.81	763,121,291,355.61
3	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap	1,194,281,441,926.78	428,174,104,125.30	356,634,351,765.91	1,265,821,194,286.17
4	Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap	2,687,792,161,464.97	372,679,224,683.93	160,575,475,948.31	2,899,895,910,200.59
5	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap	118,246,704,459.18	16,325,326,866.00	7,629,397,267.00	126,942,634,058.18
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Tetap	3,769,113,704.00	1,193,416,032.00	234,368,249.00	4,728,161,487.00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Aset Tetap	(2,329,949,175,038.97)	149,059,391,201.22	420,163,079,909.48	(2,601,052,863,747.23)
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Aset lain-Lain	36,041,159.00	-	6,002,000.000	30,039,159.00
9	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Aset lain-Lain	172,490,676,739.00	13,370,564,742.00	-	185,861,241,481.00
10	Aset Tak Berwujud	Aset lain-Lain	8,423,571,449.00	731,495,660.000	-	9,155,067,109.00
11	Amortisasi	Aset lain-Lain	(4,645,116,123.00)	(565,520,338.00)	-	(5,210,636,461.00)
12	Aset Lain-lain	Aset lain-Lain	90,905,321,271.75	-	25,125,156,367.090	65,780,164,904.66
13	Akumulasi Penyusutan Aset Lain	Aset lain-Lain	(64,713,564,615.43)	-	(18,469,688,448.72)	(46,243,876,166.71)
14	Aset yang Dibatasi Penggunaannya	Aset lain-Lain		-		
15	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Aset lain-Lain	4,542,637,488.00	-	1,584,350,488.000	2,958,287,000.00
	Jumlah		3,386,682,793,771.69	1,206,453,834,417.52	1,041,857,056,500.51	3,448,947,950,630.33

BUPATI WONOSOBO

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 September 2024

1. TAHUN PERTAMA

KABUPATEN WONOSOBO
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n -1		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 TA T-1 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)	
				APBD Induk TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-	-

BUPATI WONOSOBO,

ARIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XVI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 September 2024

KABUPATEN WONOSOBO
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemilihan Kepala Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	-
		Jumlah	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	-

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 September 2024

KABUPATEN WONOSOBO
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun n - 2	Perkiraan Penambahan Tahun n - 1	Perkiraan Pengurangan Tahun n - 1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun n - 1
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1.	Piutang Pajak	2010-2023	11,065,075,966.00	55,776,182,684.00	55,481,990,380.00	11,359,268,270.00
2.	Piutang Retribusi	2010-2023	3,710,633,457.00	3,067,568,545.00	2,752,527,700.00	4,025,674,302.00
3.	Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah	2011-2023	2,174,696,926.64	82,914,658,057.00	81,135,240,533.24	3,954,114,450.40
4.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	24,450,709,706.00	0	24,450,709,706.00
5.	Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0	0	0	0	0
6.	Piutang Dana Transfer Pemerintah Daerah - Dana Bagi Hasil Pajak	2023	1,674,983,776.00	3,026,342,507.00	1,674,983,776.00	3,026,342,507.00
7.	Piutang Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri	2023	0	148,391,880.00	0	148,391,880.00
8.	Piutang Lainnya	2001-2008	6,092,000,594.00	0	10,100,000.00	6,081,900,594.00
		Jumlah	24,717,390,719.64	169,383,853,379.00	141,054,842,389.24	53,046,401,709.40

BUPATI WONOSOBO,

ARIF NURHIDAYAT